

**MANIFESTASI PERSPEKTIF PEMBERITAAN
SURAT KABAR INDONESIA PADA AKHIR ERA ORDE BARU
KE DALAM STRATEGI PENYAJIAN INFORMASI
DAN BENTUK-BENTUK EKSPRESI BAHASA**

DISERTASI



OLEH

B. WIDHARYANTO

NIM 96656648094



**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
NOVEMBER 2000**

Disertasi oleh Drs. B. Widharyanto, M.Pd. ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang,

Pembimbing I

a.u.



Kartomihardjo I

Prof. Dr. H. Soeseno Kartomihardjo

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Imam Syafi'ie


Pembimbing III



Dr. Djoehana D. Oka, M.A.

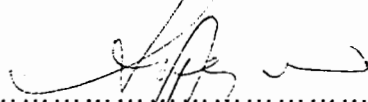
Disertasi oleh Drs. B. Widharyanto, M.Pd ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 25 September 2000 .


Dewan Penguji

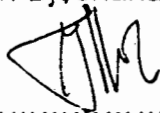

....., Ketua
Dr. A. Rofuddin



....., Anggota
Prof. Dr. Suparno


....., Anggota
Prof. Dr. M. Diniyati



....., Anggota
Prof. Dr. Soepomo Poedjosoedarmo


....., Anggota
Dr. Djehana D. Oka, M.A.


....., Anggota
Prof. Dr. H. Imam Syafi'ie


....., Anggota
Prof. Dr. H. Soeseno Kartomihardjo



Mengetahui,
Direktur PPS Universitas Negeri Malang

Dr. Frans Mataheru
NIP. 130220549

ABSTRAK

Widharyanto, B. 2000. **Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru ke dalam Strategi Penyajian Informasi dan Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa.** Disertasi. Program Studi Pendidikan Bahasa, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Soeseno Kartomihardjo, (II) Prof. Dr. H. Imam Syafii'e, (III) Dr. Djoehana D. Oka.

Kata-kata kunci: manifestasi, perspektif, strategi penyajian informasi, bentuk-bentuk ekspresi bahasa

Perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia, yang dimulai pada bulan Maret, April, dan Mei 1998 dengan terjadinya gerakan reformasi mahasiswa Indonesia, secara jelas mempengaruhi kehidupan pers Indonesia, termasuk di dalamnya bahasa yang digunakan dalam komunikasi politiknya. Pers Indonesia menjadi dinamis dan hidup. Pers Indonesia tidak lagi hanya menyuarakan ide-ide dan pandangan pemerintah, dan sekedar menjadi penjaga *status quo*. Pers Indonesia mulai terlihat berani menyuarakan aspirasi-aspirasi dari bawah yang mendapatkan penyalurannya dalam gerakan reformasi mahasiswa Indonesia. Fenomena yang menarik ini dapat ditangkap dari dua hal yakni (1) bervariasinya perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia dalam melaporkan peristiwa sosial politik yang terjadi pada bulan-bulan itu, dan (2) bahasa yang digunakan dalam pemberitaan itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ihwal perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia dalam konteks masa akhir era Orde Baru dan bentuk-bentuk manifestasinya di dalam bahasa. Ada tiga hal yang dideskripsikan lebih lanjut, yakni (1) macam perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru; (2) manifestasi perspektif pemberitaan di dalam strategi penyajian informasi dalam teks-teks berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru; dan (3) manifestasi perspektif pemberitaan di dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa dalam teks-teks berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian yang berupa fenomena perspektif dan manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam bahasa diperoleh dari teks berita empat surat kabar Indonesia, yakni *Suara Karya*, *Angkatan Bersenjata*, *Kompas*, dan *Republika*, yang terbit pada bulan Maret, April, Mei 1998. Data penelitian, baik yang terdapat dalam tataran wacana, sintaksis, dan kata, didekati dengan menggunakan kerangka teori *Sosiopolitikolinguistik* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Linguistik Kritis*. Lebih lanjut, teknik analisis yang digunakan

untuk mengkaji dan menginterpretasikan data adalah *analisis wacana kritis* yang dikembangkan oleh Fairclough (1989) dan (1995). Untuk menjaga kesahihan data dan analisisnya, maka peneliti melakukan triangulasi teoritis seperti yang dikemukakan Cohen dan Manion (1994) dan triangulasi logis menurut Miles dan Huberman (1984).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia yang muncul dalam masa akhir era Orde Baru adalah perspektif pro pemerintah, perspektif pro mahasiswa, dan perspektif netral. Surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* cenderung menampilkan berita sosial politik dengan menggunakan perspektif pro pemerintah. Sementara itu, surat kabar *Kompas* dan *Republika* cenderung seimbang dalam menggunakan ketiga perspektif pemberitaan itu. Surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* cenderung menampilkan berita dengan perspektif pro pemerintah karena keduanya memiliki keterikatan organisatoris dengan elemen-elemen pendukung Pemerintahan Orde Baru, yakni *kalangan birokrasi (Korpri)* dan *kalangan Militer (AD)*. Sementara itu, surat kabar *Kompas* dan *Republika* tidak memiliki keterikatan organisatoris dengan elemen-elemen pendukung Pemerintahan Orde Baru. *Kompas* dan *Republika* lahir dari basis massa keagamaan yang berbeda, yakni Katolik dan Islam, yang tidak berafiliasi politis pada Pemerintah Orde Baru. Dari perbedaan latar institusional inilah maka tingkat kepatuhan dan kewajiban dalam kaitannya dengan pelestarian nilai-nilai ideologis dan budaya yang dianut Pemerintah Orde Baru menjadi berbeda. *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* memiliki tingkat kepatuhan dan kewajiban yang lebih besar daripada *Kompas* dan *Republika* dalam pelestarian nilai-nilai ideologis dan budaya yang dianut Pemerintah Orde Baru.

Lebih lanjut di dalam penelitian ini ditemukan juga manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia ke dalam bahasa. Manifestasi itu dapat diklasifikasi dalam dua hal, yakni dalam (1) wujud strategi penyajian informasi, dan (2) wujud bentuk-bentuk ekspresi bahasa. Dalam wujud yang pertama, perspektif pemberitaan dimanifestasikan melalui bagian-bagian wacana seperti judul berita, tema berita, struktur tema berita, dan terakhir melalui strategi penahanan dalam badan berita. Dalam keempat bagian wacana inilah ketiga perspektif, yakni pro pemerintah, pro mahasiswa, maupun netral ditampakkan oleh keempat sumber data. Dalam wujud yang kedua, perspektif pemberitaan dimanifestasikan di dalam tataran sintaksis dan kata, seperti struktur ketransitifan, struktur penyajian informasi, tindak tutur, struktur nominalisasi, metafora, pilihan kata, dan modalitas. Dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa inilah pandangan, nilai-nilai, ide-ide, dan keyakinan para wartawan dan institusinya ditampakkan secara jelas.

Temuan-temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi maupun teoritis. Para praktisi seperti politikus, pengajar jurnalistik, redaksi surat kabar, wartawan, pemerhati dan pengelola media massa, serta peneliti

antar bidang, yakni media massa, bahasa, dan politik dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mendukung profesi mereka masing-masing. Para teoritis seperti sosiolinguistik dan analisis wacana, dapat memanfaatkan temuan-temuan penelitian ini untuk pengembangan bidang sosiopolitikolinguistik yang khas Indonesia maupun pengembangan teori perspektif dalam wacana jurnalistik Indonesia.

ABSTRACT

Widharyanto, B. 2000. **The Manifestation of Indonesian Newspaper Reporting Perspectives at The End of The New Order Era into Information Presentation Strategies and Linguistic Expression Forms**. Disertation. Study Program of Indonesian Education. Graduate Program. University of Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. Soesena Kartomihardjo, (2) Prof. Dr. H. Imam Syafii'ie, (3) Dr. Djoehana D. Oka, M.A.

Key Words: manifestation, perspectives, information presentation strategy, linguistic expression forms

A change in Indonesian political system, started in March, April, and May 1998 accompanied by Indonesian students' reformation movement, has obviously influenced Indonesian press, including the language used in the political communication. Indonesian press has become dynamic and alive. It is not the sound of the government's ideas, views, and a status quo keeper any more. It has begun to bravely sound aspiration of the people at the bottom who get their channel in Indonesian students' reformation movement. This interesting phenomenon can be drawn into two things: (1) variation in Indonesian newspaper reporting perspectives in covering socio-political happenings in those months, and (2) language used in the reporting.

This research aims at describing the perspectives of Indonesian newspaper reporting at the end of the New Order era and it's manifestation in language. There are three things discussed further, they are (1) kinds of perspective of Indonesian newspaper reporting at the end of the New Order era; (2) perspective manifestation of reporting in information presentation strategy of Indonesian newspaper report texts at the end of the New Order era; (3) perspective manifestation of reporting in linguistic expression forms on Indonesian newspaper report texts at the end of the New Order era.

The approach applied in the research is *qualitative approach*. The data of the research which constitutes the perspective phenomenon and manifestation of reporting into language was taken from the report texts of four Indonesian newspapers, they were *Suara Karya*, *Angkatan Bersenjata*, *Kompas*, and *Republika*, published in March, April, and May 1998. The data of the research, existed in discourse, syntax, and words, were treated with the frame of *sociopoliticalinguistics* theory or is known as *criticism linguistics*. Furthermore, the analysis used to study and interpret the data was *criticism discourse analysis* developed by Fairclough (1989) and (1995). To keep the validity of data and analysis, the researcher employed *theoretical triangulacy*

suggested by Cohen and Manion (1984) and *logical triangulacy* by Miles and Huberman (1984).

Three results of the research showed that the perspectives of Indonesian newspaper report emerging at the end of the New Order era was pro-government, pro-students, and neutral in perspectives. *Suara Karya* and *Angkatan Bersenjata* tended to present socio-political news by using pro-government perspective. Meanwhile, *Kompas* and *Republika* were in balance in employing the three reporting perspectives. *Suara Karya* and *Angkatan Bersenjata* had the tendency to present pro-government news as both had organisational attachment to the supporting elements of the New Order government, such as bureaucratic society (*Korpri*) and military society (*AD*), whereas *Kompas* and *Republika* did not. They had originated from the basis of different religious mass, Catholic and Moslem, which had no political affiliation in the New Order government. The difference of institutional background made up a difference in the obedience and duty level in connection with preservation of ideological and cultural values of the New Order government. The level of the obedience and duty of *Suara Karya* and *Angkatan Bersenjata* was greater than *Kompas*' and *Republika*'s in preserving the ideological and cultural values of the New Order.

In addition, this research found a manifestation of Indonesian newspaper report perspectives into language. It can be classified into two groups, they are (1) information presentation strategy, and (2) linguistic expression forms. The former implied that the reporting perspectives was manifested through part of the discourse such as the title, theme, theme structure, and at last the staging strategy of news body. Within these four parts of discourse, the three perspectives, namely the pro-government, pro-students, and neutral, were appeared in the four sources of the data.

The latter implied that the reporting perspectives was manifested in syntax and words, such as transitive structure, information presentation structure, speech act, nominal structure, metaphor, diction, and modality. Through these linguistic expression forms, the journalist and their institution's views, values, ideas, and beliefs were obviously apparent.

The findings can be used by practitioners and theorists. Practitioners such as politicians, journalistic teachers, newspaper editors, men who have a great concerns of and manage mass media, and researches from different areas of mass media, language, and politics can make use of the research findings to support their professions. The theorists such as sociolinguists and discourse analysts can do the same thing to develop the Indonesian typical sociopoliticolinguistics field and perspective theory of Indonesian Journalistic discourse.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disertasi dengan judul *Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru ke Strategi Penyajian Informasi dan Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa* ini dapat saya selesaikan berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai rasa hormat yang tulus kepada pribadi-pribadi yang saya sebutkan berikut ini.

Ucapan terimakasih yang pertama saya sampaikan kepada para pembimbing saya, yaitu Prof. Dr. H. Soeseno Kartomihardjo (Alm.), Prof. Dr. H. Imam Syafi'ie, dan Dr. Djoehana D. Oka. Pada Prof. Dr. H. Soeseno Kartomihardjo (Alm.), promotor utama dalam penulisan disertasi ini, saya sangat terkesan dengan perhatian dan kepercayaan yang besar, serta sifat kebabakan dari beliau yang dapat saya rasakan tidak hanya selama pembimbingan disertasi tetapi juga dalam proses keseharian, mulai dari ketika beliau masih sehat sampai menjelang beliau meninggal dunia karena sakit. Sampai saat-saat akhirnya, beliau masih sempat memberikan saran-saran perbaikan untuk disertasi ini. Banyak hal yang dapat saya serap dari beliau, tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan *Sosiolinguistik* maupun *Analisis Wacana*, namun juga hal-hal lain mengenai hidup dan kehidupan itu sendiri.

Pada Prof. Dr. H. Imam Syafi'ie, selaku Ko. Promotor dalam disertasi ini, saya sangat terbantu dengan sikap kritis dan sikap bersahabat beliau selama pembimbingan disertasi. Dorongan semangat yang beliau berikan pada saya terkadang menjadi "obat" yang mujarab untuk mengatasi rasa bosan dan rasa putus asa saya yang terkadang muncul dalam penyelesaian disertasi.

Kepada Dr. Djoehana D. Oka, selaku Ko. Promotor dalam disertasi ini, saya sangat termotivasi dengan kritik, saran dan pandangan-pandangan beliau yang diberikan selama penyusunan hingga penyelesaian disertasi. Saya sangat terkesan juga dengan sikap keterbukaan beliau terhadap argumentasi-argumentasi lain yang saya ajukan.

Ucapan terima kasih kedua, saya sampaikan kepada Dewan Penguji disertasi ini, yakni Dr. A. Rofi'uddin, Prof. Dr. Suparno, Prof. Dr. Dimiyati, Prof. Dr. Soepomo Poedjosoedarmo, Dr. Djoehana D. Oka, Prof. Dr. H. Imam Syafi'ie, Prof. Dr. H. Soeseno Kartomihardjo (Alm.). Ketujuh beliau ini dengan kepakaran masing-masing telah mengkritisi disertasi ini dan telah memberikan pertanyaan, sanggahan, dan masukan untuk perbaikan disertasi ini.

Ucapan terimakasih ketiga, saya sampaikan kepada Romo Dr. M. Sastrapratedja, S.J., Prof. Dr. Nuril Huda, M.A., dan Dr. Frans Mataheru. Kepada Romo Rektor Dr. M. Sastrapratedja, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, saya sangat berterima kasih atas izin studi yang

diberikan, dan atas segala bantuan yang berupa dana, fasilitas, kemudahan, dan toleransi yang diberikan kepada saya selama studi S3 di Universitas Negeri Malang. Kepada Prof. Dr. Nuril Huda, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Malang, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan studi S3 yang saya dapatkan pada Universitas Negeri Malang, lembaga yang dipimpin oleh beliau. Dan kepada Dr. Frans Mataheru, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan studi S3 dan beasiswa TMPD yang diperjuangkannya untuk saya sehingga saya berkesempatan menempuh program doktor di Universitas Negeri Malang. Tanpa kesempatan yang diberikan oleh tiga pribadi ini rasanya tidak mungkin saya mencapai jenjang akademik tertinggi ini.

Ucapan terima kasih keempat, saya sampaikan pada para dosen Pascasarjana Universitas Negeri Malang secara keseluruhan. Beliau-beliau inilah yang membimbing dan menempa saya selama bertahun-tahun melalui perkuliahan, seminar, diskusi, dan penelitian, serta melalui berbagai cara yang lain. Dari kepakaran-kepakaran mereka dalam berbagai bidang, saya mendapatkan wawasan keilmuan mengenai Pendidikan Bahasa dan ilmu Linguistik secara memadai.

Ucapan terima kasih kelima, saya sampaikan kepada teman-teman seangkatan saya, Drs. Anang Santosa, M.Pd., Drs. Bambang Yulianto, M.Pd.,

Drs. Herman Budiyono, M.Pd., Dr. Cucu Sutaryah, M.A., Drs. Samuel Palar, M.A (Alm.), dan Dr. Rusman, M.Pd. Mereka-mereka inilah sahabat-sahabat saya dalam suka dan duka dalam menempuh program doktor di Universitas Negeri Malang selama bertahun-tahun. Menjadi bagian dari "angkatan" ini sungguh merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya.

Ucapan terima kasih, secara khusus, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu saya, F.X. Dirdjowidharsono dan R.A. Subarinah (Alm.). Kedua pribadi ini sangat berjasa pada diri saya. Melalui beliau berdua, saya berkesempatan mendapatkan pendidikan keluarga dan pendidikan formal secara layak. Melalui beliau berdua pula, semangat menjadi seorang pendidik tumbuh subur dalam diri saya. Dan selanjutnya, karena kedua beliau adalah saya terdorong untuk meraih jenjang pendidikan tertinggi ini.

Dan terakhir, secara tulus saya ucapkan terima kasih kepada istri saya Dra. Ratna Dewi Susanti dan anak saya Agatha Ratna Puspitasari. Mereka berdua telah ikut bersusah payah dan menderita bersama saya selama masa-masa studi saya. Mereka berdua selalu setia mendoakan saya agar saya selalu tabah dalam menyelesaikan studi saya di Malang. Dan kepada mereka berdua, apa yang saya capai ini saya persembahkan.

Penulis,

DAFTAR ISI



ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SKEMA	xxiii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Fokus Penelitian	13
1.2.1 Rumusan Masalah.	14
1.2.2 Tujuan Penelitian	15
1.3 Manfaat Hasil Penelitian	16
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	19
1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian	24
1.6 Batasan Istilah.....	27
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	31
2.1 Bahasa Sebagai Realitas Sosial	31
2.1.1 Bahasa, Teks, dan Konteks	35

2.1.2 Konteks Situasi dan Hubungannya dengan Teks	36
2.1.3 Konteks Budaya dan Hubungannya dengan Teks.....	38
2.2 Hubungan antara Bahasa dan Ideologi	39
2.2.1 Bahasa dan Kekuasaan	40
2.2.2 Pengaruh Ideologi pada Pemakaian Bahasa	42
2.2.3 Transformasi Ideologi dalam Wacana	45
2.3 Bahasa dan Perspektif dalam Wacana	47
2.3.1 Pendekatan Terhadap Fenomena Perspektif dalam Studi Wacana	47
2.3.2 Perspektif dalam Produksi Bahasa	50
2.3.2.1 Strategi Penyajian Informasi	50
2.3.2.2 Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa Sebagai Penanda Perspektif.....	57
2.4 Pers Indonesia pada Era Orde Baru	82
2.4.1 <u>Hubungan Pers, Masyarakat, dan Negara</u>	83
2.4.2 Kondisi Pers Indonesia pada Era Orde Baru	89
2.4.3 Pers Pancasila sebagai Paradigma Pers Indonesia pada Era Orde Baru	93
2.4.4 <u>Paradigma Pers Indonesia pada Akhir Era Orde Baru</u>	99
2.5 Wacana Berita di dalam Surat Kabar.....	101

Di dalam pers ditabakan

2.5.1 Isi Berita	101
2.5.2 Struktur Berita	104
2.5.3 Ragam Bahasa Berita	107
2.6 Kerangka Berpikir	109
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	112
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.	112
3.2 Data dan Sumber Data.....	117
3.3 Prosedur Pengumpulan Data... ..	122
3.4 Analisis Data	125
3.5 Instrumen Penelitian.....	133
3.6 Triangulasi Hasil Analisis Data	135
BAB IV. HASIL ANALISIS DATA.....	137
4.1 Perspektif Pemberitaan dalam Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru	137
4.2 Manifestasi Perspektif Pemberitaan di dalam Strategi Penyajian Informasi (SPI).....	144
4.2.1 Judul Berita	145
4.2.2 Pilihan Tematik	152
4.2.3 Struktur Tematik Berita	155

4.2.4 Penahapan	157
4.3 Manifestasi Perspektif Pemberitaan Berbagai Surat Kabar	
Indonesia dalam Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa	166
4.3.1 Ketransitifan	166
4.3.2 Tindak Tutur	182
4.3.3 Pilihan Kata	183
4.3.4 Metafora	185
4.3.5 Struktur Informasi	186
4.3.6 Modalitas	186
4.3.7 Struktur Nominalisasi	189
BAB V. PEMBAHASAN HASIL-HASIL PENELITIAN.....	190
5.1 Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada	
akhir era Orde Baru	190
5.1.1 Tiga Perspektif Pemberitaan	191
5.1.1.1 Perspektif Pro Mahasiswa	191
5.1.1.2 Perspektif Pro Pemerintah.....	195
5.1.1.3 Perspektif Netral	199
5.1.2 Latar Belakang Konteks Perspektif Pemberitaan.....	203
5.1.2.1 Konteks Institusional	203
5.1.2.2 Konteks Ideologi	205

5.1.2.3 Konteks Budaya	207
5.2 Manifestasi Perspektif Pemberitaan di dalam	
Strategi Penyajian Informasi (SPI).....	212
5.2.1 Judul Berita	212
5.2.1.1 Pemanfaatan Piranti Ketransitifan	213
5.2.1.2 Pemanfaatan Piranti Modalitas	215
5.2.1.3 Pemanfaatan Piranti Nominalisasi	219
5.2.1.4 Pemanfaatan Pilihan Kata	222
5.2.1.5 Pemanfaatan Tindak Tutur	225
5.2.1.6 Pemanfaatan Piranti Metafora	229
5.2.2 Pilihan Tematik	231
5.2.2.1 Pola [<i>Who</i> ← (<i>Favorable, Unfavorable, Netral</i>)]	233
5.2.2.2 Pola [<i>What</i> ← (<i>Favorable, Unfavorable, Netral</i>)].....	236
5.2.2.3 Pola [<i>Who</i> ¹ → (<i>Favorable, Unfavorable, Netral</i>)→ <i>Who</i> ² ...	238
5.2.2.4 Pola [<i>Who</i> → (<i>Favorable, Unfavorable, Netral</i>)→ <i>What</i>]....	240
5.2.3 Struktur Tematik Berita	242
5.2.3.1 Pola Struktur Tematik Frase Nominal Pengisi	
Subjek Gramatikal	244
5.2.3.2 Pola Struktur Tematik Paduan Frase Nominal Pengisi	
Subjek Gramatikal dan Frase Preposisional Keterangan	

Waktu	253
5.2.3.3 Pola Struktur Tematik Paduan Frase Nominal Pengisi Subjek Gramatikal dan Frase Preposisional Keterangan Tempat.....	262
5.2.4 Penahapan	267
5.2.4.1 Penyajian Informasi dalam Urutan Kewajaran	268
5.2.4.2 Penyajian Informasi Berdasarkan Ukuran Keeksplisitan..	284
5.3 Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia dalam Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa	296
5.3.1 Ketransitifan	296
5.3.1.1 Proses Material Perbuatan	297
5.3.1.2 Proses Material Kejadian	301
5.3.1.3 Proses Mental Penglihatan	307
5.3.1.4 Proses Mental Pemikiran	311
5.3.1.5 Proses Mental Perasaan	315
5.3.1.6 Proses Verbal dengan Kutipan Langsung	319
5.3.1.7 Proses Verbal dengan Kutipan Tidak langsung	324
5.3.2 Tindak Tutur	328
5.3.3 Pilihan Kata	334
5.3.3.1 Pilihan Kata Berfitur Nilai Eksperiental.....	335

5.3.3.2 Pilihan Kata Berfitur Nilai Relasional.....	342
5.3.3.3 Pilihan Kata Berfitur Nilai Ekspresif.....	347
5.3.4 Metafora	351
5.3.5 Struktur Informasi	356
5.3.6 Modalitas.....	364
5.3.6.1 Modalitas Kebenaran	365
5.3.6.2 Modalitas Keharusan	368
5.3.6.3 Modalitas Izin	370
5.3.6.4 Modalitas Keinginan.....	375
5.3.7 Struktur Nominalisasi.....	377
BAB VI. PENUTUP.....	384
6.1 Kesimpulan	384
6.2 Saran-Saran.....	395
DAFTAR RUJUKAN	402
LAMPIRAN-LAMPIRAN	412

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu Bidang yang Terkait dengan Bahasa, Pikiran, Ideologi, dan Media Massa di Indonesia	12
1.2 Media yang Dipercaya untuk Mencari Informasi Sosial Politik pada Konteks Tahun 1998	18
2.1 Hubungan Konteks Situasi dan Teks	38
2.2 Sampel Beberapa Kosa Kata yang Cenderung Digunakan oleh Rezim Orde Lama dan Orde Baru	60
2.3 Fitur-Fitur Makna dalam Ketransitifan	79
2.4 Kosa Kata Rezim Orde Lama dan Orde Baru	81
3.1 Wujud Data Penelitian	135
4.1 Peristiwa Sosial Politik yang Diberitakan Empat Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru	154
4.2 Kecenderungan Keempat Surat Kabar dalam Perspektif Pemberitaan	156
4.3 Peristiwa-Peristiwa Sosial Politik pada Akhir Era Orde Baru dan Perspektif Pemberitaannya	157
4.4 Peran Modalitas dalam Menandakan Perspektif Pemberitaan	190

4.5 Struktur Tematik (4.43)	227
4.6 Struktur Tematik (4.44)	231
4.7 Struktur Tematik (4.45)	235
4.8 Struktur Tematik (4.46)	238
4.9 Urutan Wajar dalam Teks Berita (4.47) dan (4.48)	243
4.10 Pola Umum-Khusus dalam Teks Berita (4.52)	253
4.11 Pola Umum-Khusus dalam Teks Berita (4.53) dan (4.54)	255
4.12 Analisis Proses Verbal dalam Kutipan Langsung (4.84) dan (4.85)	300
4.13 Analisis Proses Verbal dalam Kutipan Langsung (4.86) dan (4.87)	302
4.14 Analisis Proses Verbal dalam Kutipan Tidak Langsung (4.88) dan (4.89)	305
4.15 Perbedaan Proposisi Pengisi Informasi Latar dan Baru dalam (4.133) dan (4.134)	339
4.16 Perbedaan Proposisi Pengisi Informasi Latar dan Baru dalam (4.137)-(4.139)	343

DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
3.1 Indikator Perspektif Pemberitaan	143
4.1 Relasi Antonimi atau Oposisional Pilihan-Pilihan Kata Pembeda Perspektif Pemberitaan	319
4.2 Relasi Sinonimi Antar Kata Pembeda Perspektif Pemberitaan ...	322
4.3 Relasi Hponimi Antar Kata Pembentuk Perspektif Pemberitaan.....	323

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

AB	:	Angkatan Bersenjata
KOM	:	Kompas
REP	:	Republika
SK	:	Suara Karya
SPI	:	Strategi Penyajian Informasi
+	:	diberitakan (untuk kode dalam Tabel 4.1)
x	:	tidak diberitakan (untuk kode dalam Tabel 4.1)
[...]	:	menandai pola (untuk pilihan tematik) atau mewakili rentetan data yang tidak dituliskan
(...)	:	bersifat alternatif (untuk pilihan tematik)
←	:	<i>favorable</i> terhadap unsur sebelumnya (untuk pilihan tematik)
→	:	unsur tertentu <i>favorable</i> terhadap unsur sesudahnya (untuk pilihan tematik)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Format Lembar Analisis	393
2. Sampel Data Teks Berita Surat Kabar	394
3. Hasil Analisis Perspektif Pemberitaan Berbagai Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru Berdasarkan Tiga Indikator (topik, partisipan, dan nada pemberitaan)	423
4. Data Judul Berita	425
5. Hasil Analisis Judul Berita	427
6. Data Tema Berita	430
7. Hasil Analisis Pilihan Tema Berita	432
8. Hasil Analisis Struktur Tema Berita	436
9. Data Penahapan	437
10. Hasil Analisis Penahapan	441
11. Data Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa	442
12. Hasil Analisis Ketransitifan	451
13. Hasil Analisis Tindak Tutur	453
14. Hasil Analisis Pilihan Kata	454
15. Hasil Analisis Metafora	456
16. Hasil Analisis Struktur Informasi	457

17.	Hasil Analisis Modalitas	463
18.	Hasil Analisis Struktur Nominalisasi	468

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Renkema (1993) menjelaskan bahwa istilah *perspektif* digunakan untuk mendeskripsikan ihwal sudut pandang yang ada. Namun begitu, sudut pandang yang dimaksudkan tidak diacukan dalam pengertian tradisional, yakni posisi pencerita di dalam suatu narasi, apakah sebagai narator maha tahu yang berdiri di luar cerita ataukah sebagai narator yang hanya tahu serba sedikit karena dia merupakan bagian dari cerita itu. Sudut pandang dalam konteks ini terkait dengan latar belakang nilai-nilai keyakinan, pengetahuan, dan pandangan hidup penulis dalam melihat, memproses, membuat, dan melaporkan suatu peristiwa dalam interaksi sosial. Renkema (1993) lebih lanjut menganalogikan perspektif itu seperti halnya posisi kamera dalam dunia sinematik. Posisi beberapa kamera yang berbeda dalam meliput suatu peristiwa yang sama akan menghasilkan suatu liputan pandangan mata yang berbeda.

Dalam dunia persuratkabaran, perspektif itu merupakan wujud transformasi nilai-nilai, ide, paham, dan kepentingan ke dalam wujud bahasa.

Keraf (1983) memberikan ilustrasi yang menarik tentang fenomena ini. Dia mencontohkan bahwa suatu topik mengenai masalah *perburuhan* dapat dilihat dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Penulis yang berpandangan sosialis akan melihat persoalan perburuhan dari segi para buruh atau pekerja, sebaliknya penulis yang berpandangan liberal dan kapitalis akan mengkaji persoalan perburuhan ini dari segi para pemilik modal. Perbedaan perspektif di antara dua penulis ini akan menghasilkan informasi yang berbeda (lihat juga Lee, 1992; Trew, 1979). Lain lagi hasilnya, apabila persoalan perburuhan ini disoroti dari sudut pandang penulis Islam atau sudut pandang penulis Kristen. Nuansa nilai-nilai keyakinan dan ajaran kedua agama ini akan mewarnai laporan pemberitaan dari masalah perburuhan itu.

Pendekatan terhadap perspektif seperti yang dikemukakan oleh Renkema (1993) di atas dapat menjelaskan mengapa dua surat kabar yang melaporkan suatu subjek berita yang sama, misalnya *tragedi 27 Juli 1997* seperti kutipan (1.1) dan (1.2) berikut, dapat menghasilkan informasi yang berbeda.

- (1.1) Polda Metro Jaya menangkap 55 orang yang mengaku sebagai pendukung Megawati Soekarnoputri, karena menggelar pawai atau arak-arakan tanpa izin dan cenderung mengganggu ketertiban umum. (*Kedaulatan Rakyat*, 28 Juli 1997)
- (1.2) Dalam penjagaan dan pengawasan ketat aparat keamanan Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya, massa PDI di Jakarta,

kemarin masih sempat 'mencuri peluang' memperingati 'tragedi 27 Juli'. Karena dilarang mendekati kantor DPP PDI untuk melakukan tabur bunga, akhirnya warga melakukannya di berbagai tempat di sekitar DPP PDI. Bahkan, terjadi *long-march* dari Jalan Diponegoro hingga DPC PDI Jakarta Utara Tanjung Priok, yang berjarak 15 kilometer. (*Bernas, 28 Juli 1997*)

Pelaporan berita pada kutipan (1.1) dan (1.2) memperlihatkan perspektif yang berbeda. Pada kutipan (1.1) pelaporan berita dimulai dengan perspektif aparat keamanan, dalam hal ini *Polda Metro Jaya*, sedang pada kutipan (1.2) perspektif yang diambil adalah *massa PDI*. Efek dari perbedaan titik tolak pemberitaan ini adalah adanya perbedaan informasi yang disajikan. Pada kutipan (1.1) informasi yang disajikan adalah tentang *penangkapan 55 orang, pawai atau arak-arakan tanpa izin, dan terganggunya ketertiban umum*. Sebaliknya, pada (1.2) informasi yang disajikan adalah tentang *penjagaan dan pengawasan yang ketat, "mencuri peluang" memperingati "tragedi 27 Juli", massa dilarang mendekat ke kantor DPP PDI, tabur bunga dan terjadinya "long-march"*.

Fenomena perbedaan perspektif seperti yang terlihat pada contoh (1.1) dan (1.2) di atas banyak ditemui dalam pelaporan berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, yakni antara bulan Maret hingga Mei 1998. Kecenderungan meningkatnya perbedaan perspektif dalam pemberitaan surat kabar Indonesia ini terjadi seiring dengan adanya perubahan kondisi politik di Indonesia dari era Orde Baru ke era Reformasi. Nilai-nilai ideologis

Orde Baru seperti keselarasan, keseimbangan (*equilibrium*), paternalistik (lihat Panuju, 1997:39), stabilitas, ketertiban, keamanan (lihat Schiller, 1978; Mas'ood, 1994:47), dan keseragaman yang menjadi dasar dalam komunikasi politik di Indonesia, termasuk surat kabar, secara nyata mulai tampak ditinggalkan.

Beberapa surat kabar Indonesia cenderung mengalami perubahan dari surat kabar 'penjaga stabilitas' menjadi surat kabar yang membangun kesadaran kolektif rakyat dalam menyikapi realitas sosial politik yang tengah berkembang. Semua perubahan ini terkait dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di Indonesia secara radikal. Perubahan itu diawali dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, serta maraknya gerakan mahasiswa Indonesia dalam menuntut reformasi yang mencapai titik puncaknya pada bulan Mei 1998 ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Fenomena ini, menurut Pabotinggi (1994:74), menunjukkan adanya keberanian dari sebagian surat kabar Indonesia dalam "usaha penyebaran informasi dan kebenaran, pengembangan pemikiran kritis, demokratisasi dan pendidikan politik rakyat" .

Dalam situasi pergeseran format politik era Orde Baru ke format politik era Reformasi ini terlihat kecenderungan terjadi tarik ulur antara nilai-nilai ideologis Orde Baru dan nilai-nilai baru dalam era Reformasi yang

dikehendaki masyarakat. Tarik ulur nilai-nilai lama dan baru ini secara transparan terlihat dalam perspektif pemberitaan surat kabar-surat kabar yang berafiliasi pada pemerintah, seperti *Angkatan Bersenjata* dan *Suara Karya* di satu pihak, dan surat kabar-surat kabar nonpemerintah seperti *Kompas* dan *Republika* di pihak lain.

Karena medium utama yang digunakan sebagai piranti komunikasi politik dalam surat kabar adalah bahasa, maka fenomena: (1) meningkatnya perbedaan perspektif pemberitaan dalam surat kabar, (2) berubahnya paradigma pemberitaan beberapa surat kabar Indonesia dari sebagai penjaga 'status quo' menjadi 'penyalur aspirasi rakyat', dan (3) tarik ulur nilai-nilai ideologis yang tampak dalam perspektif pemberitaan, pada akhirnya termanifestasikan dalam pemakaian bahasanya.

Berdasarkan ketiga fenomena dalam pemberitaan yang teramati pada akhir era Orde Baru di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia dengan cara melakukan analisis terhadap isi dan bahasa beritanya. Analisis terhadap isi dan bahasa berita tidak hanya sekadar mengungkapkan wujud perspektif pemberitaan dalam sistem dan struktur bahasa pada tingkat sintaksis dan wacana tetapi juga mengungkapkan sesuatu hal yang tersembunyi dibalik sistem dan struktur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, misalnya ideologi, kepentingan-kepentingan, sikap dan sebagainya.

Analisis terhadap contoh (1.1) dan (1.2) di atas memperlihatkan bahwa dengan bahasa suatu sikap mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka terhadap subjek berita yang didasari oleh nilai-nilai ideologis, baik oleh institusi atau pribadi tertentu, dapat diperlihatkan dalam strategi penyajian informasi berita. Bahasa dalam hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk menunjukkan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, apakah itu penguasa, ataukah itu rakyat yang dikuasai.

Selain alasan utama di atas, ada tiga alasan lain yang bersifat teoritis yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru ini. Pertama, perbedaan perspektif dalam pemberitaan surat kabar dapat dijelaskan dengan mengungkap hubungan antara pikiran dan bahasa, atau lebih khusus lagi, hubungan antara ideologi dan bahasa.

Kajian tentang hubungan antara pikiran dan bahasa ini sudah sejak lama menjadi objek perdebatan para psikolog, filosof, antropolog dan linguis. Sebagai hasilnya, paling tidak sampai sekarang terdapat beberapa pendapat tentang fenomena dan sifat hubungan kedua hal itu. Pendapat yang pertama adalah bahasa menentukan cara berpikir penuturnya. Pendapat ini bersumber pada hipotesis yang dikemukakan oleh Sapir-Whorf yang kemudian dikenal sebagai Hipotesis Sapir-Whorf. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh Clark dan Clark (1977), yakni ada

pengaruh struktur bahasa pada cara berpikir seseorang, dan sebaliknya, pikiran seseorang dapat juga mempengaruhi perilaku berbahasanya.

Hipotesis Sapir-Whorf mengisyaratkan bahwa setiap bahasa memaksakan atau memberikan suatu *pandangan dunia* pada penuturnya. Ini berarti bahwa bahasa itu mempengaruhi cara penutur bahasanya dalam mempersepsi dan mengorganisasi dunia sekitarnya. Dalam hal ini manusia membagi-bagi alam, menyusunnya menjadi konsep-konsep, dan menilai kepentingannya dengan cara yang sebagian besar disebabkan karena manusia telah sepakat untuk menyusun alam itu secara demikian. Ini adalah suatu kesepakatan yang berlaku bagi masyarakat bahasa dan yang telah dimanifestasikan dalam pola-pola bahasa.

Clark dan Clark (1977) meragukan hipotesis Sapir-Whorf yang dapat dikategorikan versi "kuat" ini. Menurut Clark dan Clark, bukti untuk hipotesis Sapir-Whorf itu masih samar-samar. Whorf mengemukakan fakta bahwa dalam satu bahasa mungkin terdapat lebih banyak kata dalam sesuatu ranah daripada bahasa lain, misalnya bahasa Eskimo memiliki banyak kata untuk *snow*, sementara bahasa Inggris dan Aztec hanya satu. Perbedaan ini menurut Clark dan Clark ialah karena dalam kehidupan sehari-hari seorang penutur bahasa itu memerlukan sebanyak mungkin istilah-istilah agar dapat berbicara dengan cepat, jelas, dan tepat. Clark dan Clark (1977) kemudian mengajukan suatu "versi lemah" dari hipotesis itu. Bunyinya adalah ada

pengaruh struktur bahasa pada cara berpikir seseorang dan sebaliknya pikiran seseorang dapat juga mempengaruhi perilakunya. Intinya adalah bahwa hubungan pengaruh antara bahasa dan pikiran berjalan dua arah. Di satu sisi diakui bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir seseorang, namun di sisi lain diakui juga bahwa cara berpikir seseorang mempengaruhi cara berbahasanya, atau dengan kata lain, pikiran yang termasuk kebudayaan mental mempengaruhi bahasa (lihat Wardhaugh, 1986).

Dalam kaitannya dengan fenomena perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, pandangan dari Clark dan Clark (1977) lebih sesuai daripada pandangan Sapir-Whorf. Implikasi dari pandangan ini adalah perbedaan perspektif yang ada salah satunya dipengaruhi oleh cara penulis dalam melihat dan menilai suatu kejadian, peristiwa, atau subjek berita. Cara penulis melihat dan menilai suatu berita direfleksikan dalam bahasanya.

Kedua, perbedaan perspektif dalam pemberitaan yang mencerminkan sikap wartawan yang didasari oleh nilai ideologis tertentu dapat diwujudkan dalam bahasa (wacana) melalui berbagai cara dan dalam berbagai aspeknya. Beberapa ahli sosiolinguistik, ahli politik, maupun ahli komunikasi seperti Fowler (1991), Lee (1992), Renkema (1993), McCarthy dan Carter (1994), Fairclough (1995), dan Rakhmat (1996) telah menguraikan pandangan-pandangannya tentang fenomena ini.

Fowler (1991), misalnya, menjelaskan fenomena perspektivitas dalam pemberitaan berkaitan dengan pelaporan dan penyajian berita dari masing-masing surat kabar yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Akibatnya adalah semua surat kabar akan melaporkan suatu berita dari sudut pandang tertentu dan mengartikulasikannya dengan cara yang berbeda dalam bentuk-bentuk linguistiknya, seperti sintaksis dan leksikal

Lee (1992) melihat fenomena perspektivitas pemberitaan dalam kaitannya dengan aspek-aspek linguistik dan transformasi ideologi dalam wacana. Menurut dia aspek-aspek dalam linguistik seperti metafora, metonimia, pilihan kata, struktur nominalisasi, transitivitas, dan struktur tematik, merefleksikan perbedaan perspektif di antara para penulis (wartawan) dalam bahasa yang sama. Perbedaan perspektif diantara para penulis berita juga mencerminkan perbedaan ideologi yang ditampakkan dari cara mereka menerima dan melaporkan kejadian atau peristiwa pada para pembacanya.

Dari pemikiran McCarthy dan Carter (1994) tentang hubungan antara pilihan aspek-aspek linguistik tertentu dan cara-cara bagaimana nilai-nilai budaya dan ideologi diekspresikan dapat diketahui pula perspektif pemberitaan suatu surat kabar. Perspektif pemberitaan secara implisit maupun eksplisit dikodekan di dalam pilihan gaya bahasa (*stylistic choice*) dan

struktur teks. Dalam perbedaan pilihan gaya bahasa dan struktur teks tersebut tertampakan atau terkodekan pula perbedaan ideologi yang melatarbelakanginya.

Pandangan Fairclough (1995) mengenai relasi antara ideologi dan bahasa, semakin mengukuhkan bahwa perspektif pemberitaan itu terbentuk karena dilatarbelakangi keterkaitan antara keduanya. Ideologi menurut Fairclough adalah suatu sifat dari struktur-struktur dan juga sifat dari kejadian-kejadian. Suatu ideologi, dengan demikian, dapat diketahui letak keberadaannya di dalam suatu bentuk dari sistem dalam praktek berbahasa, seperti kode, struktur, sistem, atau formasi. Kemungkinan yang kedua adalah ideologi terletak di dalam kejadian yang terpisah-pisah itu sendiri. Suatu kejadian cenderung mencerminkan sifat pelambangan ideologi di dalamnya.

Perspektif pemberitaan juga dapat ditemukan dengan mengacu pada pandangan-pandangan Rakhmat (1996) mengenai penyebaran ideologi pada masyarakat. Rakhmat (1996) menyatakan bahwa ideologi itu "*socially shared*". Ideologi itu terbentuk dan berkembang melalui suatu proses sosial. Ideologi pada mulanya dirumuskan secara jelas oleh elite intelektual (termasuk elite politik) dan kemudian disebarkan kepada seluruh anggota komunitas politik lainnya. Dalam perumusan dan penyebaran ideologi, peranan bahasa sangat menentukan. Di satu sisi, ideologi membentuk bahasa, dan di sisi yang lain, ideologi dibentuk oleh bahasa. Dengan ideologi orang

memberi makna pada realitas sosial. Untuk memudahkan penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan makna, maka diperlukan bahasa. Pada gilirannya bahasa tertentu, yang ditampakkan pada pemilihan kata dan kalimat, membentuk realitas sosial.

Ketiga, banyak hal yang berkaitan dengan fenomena manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru yang belum terungkap, baik dalam wujud strategi penyajian informasi maupun bentuk-bentuk ekspresi bahasanya, serta nilai-nilai ideologis yang mendasarinya. Sejauh ini penelitian yang ada adalah penelitian tentang pers pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Selain itu, aspek yang diteliti lebih terfokus dan terkonsentrasi pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan politiknya daripada aspek bahasa. Dhakidae (1993:1) tentang masalah ini menyatakan:

Kebanyakan studi tentang pers Indonesia semata memberikan perhatiannya pada satu aspek, yaitu peran yang dimainkan pers di dalam ideologi, peran pers di dalam menumbuhkan nasionalisme, peran pers di dalam menumbuhkan dan menyebarkan modernisasi.

Penelitian tentang manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru dalam bahasa akan mengeksplorasi hal-hal yang secara khusus belum tergarap dalam kajian-kajian sebelumnya, misalnya kajian dari Anderson (1966) dan (1984), Crawford (1967), Ridwan (1975), Naina (1982), Razak (1982), Tamin (1982), Sutopo (1982), Faizin (1983), Hooker (1990), Dhakidae (1991), Aditjondro (1993), Krisnawan

(1997), dan Ngadiman (1998), yang secara singkat seperti yang tampak dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1: Penelitian-Penelitian Terdahulu Bidang yang Terkait dengan Bahasa, Pikiran, Ideologi, dan Media Massa di Indonesia

No.	Penelitian	Topik Penelitian	Masalah Penelitian
1.	Anderson (1966)	Bahasa Politik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh bahasa dan budaya Belanda serta Jawa dalam perkembangan bahasa politik Indonesia modern.
2.	Anderson (1984)	<i>Sembah Sumpah</i> : Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • Ketegangan bahasa Indonesia yang populis dan bahasa Indonesia yang feodalistis
3.	Crawford (1967)	Pers Indonesia Pada Era Demokrasi Terpimpin	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Isi Surat Kabar pada era Demokrasi Terpimpin
4.	Ridwan (1975)	Liputan Surat Kabar tentang Pemilu tahun 1977	<ul style="list-style-type: none"> • Ikatan Tradisional Pers dengan Partai-Partai Peserta pemilu 1977
5.	Naina (1982)	Tajuk Rencana Pers Indonesia Tahun 1980	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku pers Indonesia terhadap kebijakan Pemerintah seperti yang termanifestasikan dalam Tajuk Rencana
6.	Razak (1982)	Kebebasan Pers Indonesia pada Tahun-Tahun 1980'an	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap Kritis Pers Indonesia terhadap Pemerintah seperti yang termanifestasikan dalam Tajuk Rencana
7.	Tamin (1982)	Pers Nasional pada Liputan Tahun 1980	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Berita dalam Surat Kabar Pemerintah dan Swasta
8.	Sutopo (1982)	Peliputan Berita pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus dan Penekanan Peliputan Berita Pembangunan oleh Surat Kabar Pemerintah dan Swasta
9.	Faizin (1983)	Berita Luar Negeri dalam Pers Indonesia Tahun 1980	<ul style="list-style-type: none"> • Penjataan Ruang Berita untuk Berita Luar Negeri dalam pers Indonesia
10.	Aditjondro (1993)	Media sebagai Pengembangan "Textbook"	<ul style="list-style-type: none"> • Distorsi Informasi dalam Debat tentang Akibat Sosial dari Proyek Kedung Orno dalam Media Massa Indonesia
11.	Hooker (1990)	Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia:	<ul style="list-style-type: none"> • Model wacana zaman Orde lama dan Orde baru
12.	Dakidae (1991)	Politik Ekonomi dalam Industri Penerbitan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Industri Penerbitan Indonesia di bawah Pemerintahan Orde Baru

13.	Ngadiman (1997)	Pola pikir budaya Jawa yang diwujudkan dalam wacana ekspositoris	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh pola pikir budaya Jawa dalam tulisan-tulisan ekspositoris di majalah bahasa Jawa
14.	Krisnawan (1997)	Keberpihakan Pers pada Golkar	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah sikap Suara Merdeka terhadap orsospol pemilu 1992

Berdasarkan data-data penelitian terkait seperti yang disajikan dalam Tabel 1.1 dapatlah ditegaskan bahwa penelitian tentang fenomena perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru dalam bahasa belum pernah dilakukan. Padahal penelitian ini dapat mengungkapkan banyak hal yang berkaitan dengan manifestasi perspektif dalam pemakaian bahasa, yang muncul dalam wujud strategi penyajian informasi dan bentuk-bentuk ekspresi bahasa, serta sekaligus mengungkapkan nilai-nilai ideologis yang mendasari pemberitaan surat kabar Indonesia pada masa kejatuhan Pemerintahan Orde Baru. Hal-hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengungkap lebih jauh fenomena manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru dalam bahasa.

1.2 Fokus Penelitian

Beberapa hal yang merupakan inti pembicaraan dalam latar belakang penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terlihat adanya tiga kecenderungan yang kuat yang terlihat dalam perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, yakni: (1) meningkatnya

perbedaan perspektif pemberitaan, (2) adanya perubahan paradigma pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru dari pemberitaan yang “menjaga stabilitas” menjadi pemberitaan yang “membangun kesadaran kolektif rakyat” dalam menyikapi realitas politik yang tengah berkembang, dan (3) adanya tarik ulur nilai-nilai ideologis Orde Baru dan nilai-nilai baru yang diinginkan masyarakat. Indikator perubahan dalam ketiga hal di atas dapat dilihat dalam bahasa yang digunakan sebagai medium komunikasi politiknya. Kedua, perbedaan perspektif dalam pemberitaan surat kabar dapat dijelaskan dengan mengungkap hubungan hubungan antara ideologi dan bahasa, serta hubungan sosial antar partisipan. Ketiga, bahwa perbedaan perspektif dalam pemberitaan yang mencerminkan sikap jurnalis yang didasari oleh nilai ideologis tertentu dapat diwujudkan dalam bahasa (wacana) melalui berbagai cara dan dalam berbagai aspeknya. Keempat, banyak hal yang berkaitan dengan fenomena perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru yang belum terungkap, baik itu mengenai perspektif apa saja yang muncul dan manifestasi perspektif dalam wujud strategi penyajian informasi maupun bentuk-bentuk ekspresi bahasanya.

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian keempat hal tersebut di atas, maka dirumuskanlah suatu permasalahan umum dalam penelitian ini, yakni “*Bagaimanakah*

manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru ke dalam Strategi Penyajian Informasi dan Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa. Berdasarkan rumusan masalah umum ini kemudian dirumuskan submasalah sebagai berikut:

1. Perspektif apakah yang muncul dalam pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru?
2. Bagaimanakah perspektif itu dimanifestasikan di dalam strategi penyajian informasi dalam teks-teks berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru?
3. Bagaimanakah perspektif itu dimanifestasikan di dalam pemakaian bentuk-bentuk ekspresi bahasa dalam teks-teks berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru?

1.2.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ditetapkan dalam 1.2.1, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan "*Manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru ke dalam bahasa*". Apabila dirinci, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru.
2. Manifestasi perspektif pemberitaan di dalam strategi penyajian informasi dalam teks-teks berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru.

3. Manifestasi perspektif pemberitaan di dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa dalam teks-teks berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru.

1.3 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut. Pertama, dalam pengembangan bidang sosiopolitikolinguistik, yakni suatu bidang khusus dari sosiolinguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan verifikasi tentang dua hal, yakni (a) pengaruh ideologi dalam penggunaan bahasa di dalam media massa, khususnya surat kabar, dan (b) manifestasi atau perwujudan ideologi di dalam kode-kode bahasa, sistem atau struktur bahasa. Bidang yang bersifat antardisipliner ini relatif masih baru dan belum banyak mendapat perhatian secara memadai oleh para sosiolinguis dan analis wacana Indonesia.

Kedua, dari penelitian ini dapat dikembangkan teori perspektif dalam wacana berita surat kabar, yang dalam pendekatan Renkema (1993) dimasukkan dalam pendekatan *vision*, yang berlandaskan pada bidang sosiologi politik. Teori perspektif yang dikembangkan ini tidak hanya menggambarkan wujud-wujud perspektif di dalam struktur wacana, seperti

judul, pilihan tematik, struktur tematik, penahapan atau *staging*, tetapi juga wujud-wujud perspektif dalam struktur di bawahnya, yakni kalimat atau klausa, dalam sistem ketransitifan, modalitas, dan sistem tindak tutur, serta dalam struktur leksikal dan pilihan kata. Teori perspektif yang dikembangkan ini adalah teori perspektif yang berdasarkan pada konteks sosial. Kebutuhan akan teori seperti ini, menurut Hymes (1974) dan Lavandera (dalam Newmeyer, 1988), penting untuk memahami suatu wacana dalam latar alami.

Ketiga, penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Bahasa Indonesia ragam jurnalistik, di samping ragam-ragam lain, seperti ragam akademik, ragam sastra, ragam bisnis, dan ragam filsafat (lihat Sudaryanto, 1995) perlu untuk dikembangkan karena bahasa ragam ini ada di masyarakat, memiliki masyarakat penutur, dan digunakan oleh masyarakat penuturnya, yakni jurnalis dan pembaca, untuk mengkomunikasikan berita. Di samping itu, seperti layaknya bahasa-bahasa ragam lain, bahasa jurnalistik juga mengalami dinamika perkembangan. Agar bahasa jurnalistik ini terus berkembang dan tidak mengalami kemandegan atau kemunduran, bahasa jurnalistik perlu “dipelihara” dan direkayasa. Salah satu bentuk “pemeliharaan” dan perekayasaan terhadap bahasa jurnalistik adalah dengan melakukan penelitian. Dengan penelitian diharapkan dihasilkan suatu deskripsi yang komprehensif tentang salah satu aspek dari bahasa jurnalistik, yakni fenomena perspektif dalam strategi penyajian.

informasi pada tataran wacana dan dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa pada tataran kalimat, frase, dan kata, yang pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pembenahan, maupun rekayasa bahasa jurnalistik.

Di samping sumbangan teoritisnya, penelitian ini juga memiliki sumbangan praktis sebagai berikut. Pertama, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi analis wacana, sosiopolitikolinguistik, dan ahli komunikasi untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam media massa Indonesia. Media televisi, misalnya, baik swasta maupun pemerintah juga menunjukkan gejala yang cukup unik. *Kompas* 17 Mei 1998 melaporkan tentang informasi sosial-politik dari media yang paling dipercaya oleh rakyat, seperti yang terlihat dalam Tabel 1. 2 berikut.

Tabel 1. 2: Media yang Dipercaya untuk Informasi Sosial Politik

Informasi/Berita	Responden	Televisi swasta	TVRI
Demonstrasi Mahasiswa	723	46.9%	1.5%

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa media televisi swasta lebih dipercaya dalam memberikan informasi tentang “demonstrasi mahasiswa” daripada televisi pemerintah. Dari fakta ini dapatlah diinferensikan bahwa telah terjadi perbedaan perspektif dalam pemberitaan tentang “demonstrasi mahasiswa”, dan perspektif televisi swastalah yang lebih dipercayai oleh masyarakat.

Inferensi-inferensi lain yang mungkin dapat dikonfirmasi adalah telah terjadi manipulasi dalam penggunaan bahasa Indonesia, tayangan foto-foto dan gambar-gambar di televisi, baik oleh televisi swasta maupun televisi pemerintah untuk kepentingan mereka masing-masing.

Kedua, hasil penelitian yang berupa deskripsi fenomena perspektif pemberitaan: (1) di dalam struktur wacana berita, seperti perspektif dalam judul, pilihan tema, struktur tematik, dan penahapan (*staging*), dan (2) di dalam struktur kalimat atau klausa, seperti perspektif dalam sistem ketransitifan, modalitas, sistem tindak tutur, serta (3) di dalam struktur leksikal dan pilihan kata, seperti nominalisasi, metafora, eufimisme, dapat dimanfaatkan oleh para pengajar jurnalistik maupun para wartawan surat kabar untuk mendukung profesi mereka masing-masing. Para pengajar jurnalistik dapat memanfaatkan temuan ini untuk melengkapi bahan ajar jurnalistiknya, terutama yang berkaitan dengan bahasa jurnalistik dan teknik penulisan berita. Para wartawan dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan kualitas tulisan beritanya, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan aspek-aspek sintaksis, semantis, dan pragmatik.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Peneiitian tentang *“Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru ke dalam Strategi Penyajian Informasi*

dan Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa”, memiliki beberapa batasan sebagai berikut. Pertama, penelitian ini dibatasi pada surat kabar Indonesia yang berbahasa Indonesia dan bukan surat kabar berbahasa daerah atau asing. Latar belakangnya adalah salah satu implikasi lebih lanjut yang diharapkan dari penelitian ini untuk pengembangan teori bahasa jurnalistik Indonesia yang berkonteks sosial.

Kedua, surat kabar yang dijadikan sebagai sumber data adalah surat kabar yang berkategori nasional. Pengertian *nasional* dalam hal ini menurut LP3Y (1996) dapat dilihat, salah satunya, dari segi lingkup informasi yang disediakan oleh surat kabar itu. Lingkup informasi berkaitan dengan perilaku surat kabar Indonesia yang berorientasi pada pembaca di daerah atau pembaca secara nasional. Surat kabar nasional memiliki lingkup informasi yang mencakup seluruh Indonesia, sebaliknya surat kabar daerah hanya memiliki lingkup informasi yang bersifat lokal dan mencakup daerah tertentu saja. Dalam penelitian ini surat kabar yang diteliti adalah surat kabar yang berkategori nasional. Dalam surat kabar ini pemakaian bahasa Indonesia sebagai mediumnya relatif lebih baik karena tidak memasukkan atau terpengaruh unsur-unsur bahasa daerah di dalam pelaporan beritanya.

Ketiga, surat kabar yang dipilih sebagai sumber data ada dua jenis, yakni surat kabar yang berafiliasi atau menurut istilah Krisnawan (1997:vi) *lebih bersimpati*, pada pemerintah Orde Baru karena memiliki keterkaitan

organisasoris dalam manajemennya dan surat kabar yang tidak berafiliasi pada pemerintah Orde Baru karena tidak memiliki hubungan oragnisatoris.

Mengacu pada pendapat Rakhmat (1996), secara teoritis dua jenis surat kabar ini, sebagai milik dari komunitas politiknya, tentu akan menyebarkan ideologi atau preferensi yang dianut dan dimilikinya kepada masyarakat pembacanya. Surat kabar yang memiliki keterkaitan organisatoris dengan pemerintah Orde Baru tentu akan "bersimpati" dan berorientasi pada pemberitaan yang mengutamakan kepentingan pemerintah Orde Baru. Implikasi dari keterkaitan ini adalah segala pemberitaannya cenderung menjaga keselarasan dengan pemerintah atau bahkan membela kepentingan pemerintah.

Sebaliknya, surat kabar yang tidak memiliki keterkaitan oranisatoris dengan pemerintah Orde Baru, yakni surat kabar yang mandiri, tidak terikat dari segi ekonomi pada pemerintah, dan mempunyai visi dan misi komunitas pendukungnya sendiri, tentu tidak memiliki keharusan untuk membela kepentingan pemerintah Orde Baru. Bahkan surat kabar ini memiliki kecenderungan berbeda perspektif dengan pemerintah Orde Baru.

Surat kabar jenis pertama yang diambil sebagai sumber data adalah surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan *Suara Karya* sedangkan surat kabar yang masuk jenis kedua adalah *Kompas* dan *Republika*. Satu argumen dapat dikemukakan di sini berkaitan dengan penentuan surat kabar *Angkatan*

Bersenjata dan *Suara Karya* sebagai sumber data. Kedua surat kabar ini pada zaman Orde Baru lahir dari “pilar-pilar” penyangga Pemerintahan Orde Baru, yakni militer khususnya Angkatan Darat (AD) untuk surat kabar *Angkatan Bersenjata*, dan birokrasi, Korpri, serta berbagai ormas Golkar untuk surat kabar *Suara Karya*. Kedua surat kabar ini diterbitkan untuk menjaga keseimbangan informasi dan opini publik nasional menghadapi propaganda dari luar pemerintah. Dengan demikian, keduanya dapat dikategorikan sebagai surat kabar yang berafiliasi pada Pemerintah Orde Baru (lihat Naina, 1982; Wibisono, 1993; Abar 1998).

- Sementara itu, alasan untuk pemilihan surat kabar *Kompas* dan *Republika* adalah sebagai berikut ini. Kedua surat kabar ini diterbitkan bukan oleh organisasi di bawah organisasi massa Golkar sehingga tidak ada keterikatan organisatoris dengan Golkar dan Pemerintahan Orde Baru. Surat kabar *Kompas* adalah surat kabar independen yang berada di bawah kelompok usaha Kompas Gramedia yang dimiliki oleh Yayasan Pers Katolik (lihat Aditjondro, 1991:23). Surat kabar *Republika* adalah surat kabar independen yang berada di bawah kelompok usaha PT Abdi Bangsa yang dimiliki oleh Yayasan Abdi Bangsa dan umat Muslim Indonesia (lihat Hutabarat, 1993). Karena kedua surat kabar ini tidak berafiliasi pada Golkar, maka kedua surat kabar ini berbeda dengan surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan *Suara Karya* dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan pemerintah.

Selain itu, kedua surat kabar nasional ini, diantara 76 surat kabar harian yang terbit setiap hari, memiliki jangkauan yang lebih luas pada pembaca surat kabar harian nasional di Indonesia. Bahkan *Kompas*, menurut *Basis*, 01-02/1999, menjangkau hampir 50% pembaca surat kabar harian nasional dan dibaca tidak kurang dari tiga juta kaum terpelajar di Indonesia.

Keempat, teks dari keempat surat kabar diambil dari laporan berita yang terdiri atas *straight news report*, *deph report*, dan *Interpretive report* yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian yang sama. Sedangkan suatu peristiwa yang hanya dilaporkan oleh satu atau dua dari empat surat kabar itu tidak diambil sebagai data penelitian. Dengan cara demikian perspektif masing-masing surat kabar yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini akan tampak lebih jelas. Cara ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Trew (1979) pada dua surat kabar Inggris, yakni *The Guardian* dan *The Times*.

Kelima, berita yang diambil sebagai data penelitian adalah berita tentang peristiwa sosial politik, seperti demonstrasi mahasiswa, gerakan reformasi mahasiswa, masalah HAM, dan sejenisnya. Alasannya adalah topik-topik berita seperti ini pada era Orde Baru cenderung bersifat kontroversial dan menimbulkan kontradiksi, serta polemik yang berkepanjangan antara pemerintah dengan rakyat maupun mahasiswa.

Topik-topik seperti itu dalam pemberitaan surat kabar akan menunjukkan fenomena perspektif yang lebih jelas daripada topik-topik lainnya.

Keenam, berita sosial politik dari 4 surat kabar tersebut dibatasi pada berita yang diterbitkan antara bulan Maret hingga terakhir pada bulan Mei 1998. Alasannya adalah pada antara bulan-bulan tersebut wacana sosial politik Indonesia menunjukkan gerak dinamis yang berbeda dengan wacana sosial politik sebelumnya. Pada antara bulan-bulan itu Pemerintahan Orde Baru sedang mengalami proses kejatuhan kekuasaannya akibat bergejolaknya peristiwa sosial-politik yang berbarengan dengan merosotnya perekonomian nasional, serta gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia.

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian

Pada bagian ini diuraikan dua hal yakni asumsi penelitian dan keterbatasan penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya, keterbatasan penelitian adalah hal-hal yang tidak mungkin dihindari oleh peneliti yang sifatnya mengurangi keoptimalan temuan.

1.5.1 Asumsi Penelitian

Berikut ini diuraikan beberapa asumsi yang menjadi pijakan berpikir dan bertindak dalam meneliti manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar

Indonesia pada akhir era Orde Baru ke strategi penyajian informasi dan bentuk-bentuk ekspresi bahasa.

- 1) Budaya, termasuk di dalamnya ideologi, mempengaruhi penggunaan bahasa, baik dalam tuturan lisan maupun tertulis. Demikian juga sebaliknya, bahasa mempengaruhi budaya, termasuk di dalamnya ideologi.
- 2) Hubungan antara budaya, termasuk ideologi, dan bahasa tercermin dalam tataran satuan lingual seperti kosa kata, bunyi, morfosintaksis, dan tataran wacana.
- 3) Perbedaan perspektif pemberitaan dalam surat kabar dapat diamati dari segi pemakaian bahasanya, khususnya strategi penyajian informasi dan bentuk-bentuk ekspresi bahasa.
- 4) Perbedaan perspektif pemberitaan dalam surat kabar mencerminkan perbedaan kepentingan dan pandangan yang dianut oleh masing-masing surat kabar.

1.5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini diuraikan hal-hal yang merupakan keterbatasan-keterbatasan penelitian yang tentu saja mempengaruhi keoptimalan hasil temuan penelitian.



- 1) Data penelitian hanya terbatas pada empat surat kabar terpilih, yakni *Angkatan Bersenjata*, *Suara Karya*, *Kompas*, dan *Republika*, sehingga temuan-temuan yang dihasilkan hanya berlaku untuk keempat surat kabar itu dan tidak berlaku untuk surat kabar pada umumnya, kecuali pada surat kabar-surat kabar tertentu yang memiliki kemiripan karakteristiknya.
- 2) Objek penelitian yang diamati adalah teks berita sosial politik dari keempat surat kabar yang terbit dari bulan Maret hingga Mei 1998. Namun demikian, karena jumlah berita sosial politik yang terkumpul sangat banyak, bahkan apabila tidak dibatasi akan terjadi "ledakan data" yang menyulitkan peneliti sendiri dalam kerja analisis data, maka diputuskan tidak semua berita sosial politik dari empat surat kabar itu diambil sebagai data penelitian. Hanya berita sosial politik yang memiliki karakteristik berikut yang diambil sebagai data penelitian. Pertama, berita sosial politik yang diambil sebagai data adalah berita yang kontroversial dan menimbulkan polemik di masyarakat. Berita yang seperti itu berpotensi memperlihatkan perspektif pemberitaan yang jelas. Kedua, berita sosial politik yang diambil adalah berita yang disajikan secara kronologis atau berurutan dalam beberapa waktu dan bukan berita yang hanya dilaporkan sekali tanpa berkelanjutan. Berita yang seperti itu

cenderung memperlihatkan perspektif pemberitaan yang jelas. Dengan pembatasan ini, di satu pihak meringankan kerja analisis peneliti, namun di pihak yang lain pembatasan itu sekaligus merupakan keterbatasan penelitian ini. Hasil simpulan-simpulan yang dikemukakan hanya berlaku untuk berita-berita sosial politik yang diambil sebagai data penelitian dan tidak berlaku untuk berita-berita sosial politik lainnya yang tidak diambil sebagai data penelitian. Alasannya adalah masing-masing berita sosial politik itu berpotensi memiliki perspektif yang berbeda dengan berita lainnya karena faktor-faktor penentu perspektivitas itu beraneka macam, seperti kepentingan ideologi negara, kepentingan lembaga pers itu sendiri, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan publik serta idealisme pers.

1.6 Batasan Istilah

Beberapa istilah penting dalam penelitian seperti: manifestasi, perspektif, berita, pemberitaan, ideologi, bentuk ekspresi bahasa, strategi penyajian informasi dan akhir era Orde Baru, diberi batasan seperti berikut ini.

- 1) Manifestasi adalah perwujudan atau bentuk lain dari sesuatu yang tidak kelihatan (KBBI, 1990). Dalam konteks "Manifestasi perspektif

pemberitaan surat kabar Indonesia dalam bahasa” maknanya adalah perwujudan dari perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia ke dalam bahasa.

- 2) Perspektif adalah sudut pandang dalam melihat sesuatu yang didasari oleh latar belakang nilai-nilai keyakinan, pengetahuan, dan pandangan hidup penulis. Dalam konteks “perspektif pemberitaan” maknanya adalah sudut pandang yang didasari oleh latar belakang nilai-nilai keyakinan, pengetahuan, dan pandangan hidup penulis dalam melihat, memproses, membuat, dan melaporkan suatu peristiwa dalam interaksi sosial yang dikemas dalam wujud berita. Dalam penelitian ini, pendekatan terhadap fenomena perspektif mengacu pada pandangan sosiologi politik, sehingga penelitian perspektif ini lebih berorientasi pada masalah ideologi. Renkema (1993) menyebut penelitian perspektif dalam bidang ini sebagai penelitian *visi*, yang secara jelas dibedakan dengan penelitian perspektif *empati* dalam bidang psikolinguistik dan penelitian perspektif *fokalisasi* dalam bidang sastra.
- 3) Berita adalah segala bentuk pelaporan surat kabar tentang peristiwa, tindakan atau pernyataan yang muncul dari interaksi sosial masyarakat (LP3Y, 1996).
- 4) Pemberitaan adalah proses, pembuatan, cara memberitakan atau melaporkan (KBBI, 1990). Dalam konteks “perspektif pemberitaan”

maknanya adalah sudut pandang dalam cara memberitakan atau melaporkan suatu peristiwa atau kejadian yang muncul dalam interaksi sosial masyarakat

- 5) Ideologi adalah perangkat gagasan dan kepercayaan yang tercermin dalam praktek sosio politik dan sosio ekonomi (Kleden dalam Azca, 1998). Dalam konteks penelitian ini, ideologi dapat ditemukan secara implisit di dalam wujud perspektif dari pemberitaan peristiwa sosial politik surat kabar karena terbentuknya suatu perspektif dilatarbelakangi oleh gagasan dan kepercayaan yang diyakini wartawan atau surat kabarnya. Selain itu, ideologi juga ditemukan di dalam pengkajian bahasa surat kabar karena seperti yang diungkapkan Thompson (1985) dalam bahasalah secara primer makna dimobilisasi untuk kepentingan kelompok, rezim, institusi, maupun individu, dan dalam bahasa pulalah relasi-relasi dominasi dan kekuasaan dipelihara.
- 6) Strategi penyajian informasi adalah cara penulis memilih informasi tertentu sebagai tema, judul, dan menata serta mengembangkan informasi tersebut dalam struktur linier wacana (*staging*).
- 7) Bentuk-bentuk ekspresi bahasa adalah istilah yang diperkenalkan oleh Fowler (1991:4) untuk mengacu pada struktur bahasa, unsur-unsur bahasa, atau yang membentuk bahasa, misalnya diksi; gaya bahasa; struktur dalam tataran sintaksis, seperti ketransitifan. Untuk fenomena

yang sama ini, MacCarthy dan Carter (1994) menyebutnya sebagai "bentuk-bentuk bahasa" atau *forms of language*, Lee (1992) menyebutnya aspek-aspek linguistik atau *linguistic aspects*, dan Fairclough (1995) menyebutnya sebagai "bentuk dari sistem" dalam praktek berbahasa seperti kode, struktur, sistem, dan formasi.

- 8) Akhir era Orde Baru adalah masa ketika Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun mengalami proses kejatuhan. Proses kejatuhan itu terlihat mulai pada bulan Maret 1998 hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998 ketika gerakan reformasi mahasiswa Indonesia memaksa Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

BAB II

Kajian Pustaka

Pada Bab II ini dibahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah agar memberikan gambaran umum tentang latar penelitian, mempertajam fokus penelitian, dan sebagai bahan rujukan pembahasan hasil penelitian. Teori-teori tersebut adalah teori tentang (1) bahasa sebagai realitas sosial, (2) hubungan antara bahasa dan ideologi, (3) bahasa dan perspektif dalam wacana, (4) pers Indonesia pada era Orde Baru, dan (5) wacana berita dalam surat kabar.

2.1 Bahasa Sebagai Realitas Sosial

Bahasa sebagai realitas sosial bermakna bahwa bahasa itu ada, tumbuh di tengah-tengah masyarakat, dan digunakan oleh anggota masyarakatnya untuk mencukupi kebutuhan ekspresi diri maupun komunikasi dengan anggota masyarakat yang lain. Bahasa dalam pandangan ini, meminjam istilah Lindgren (1973), adalah "perekat masyarakat". Pandangan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan pakar linguistik terdahulu seperti Saussure dan Halliday.

Saussure (dalam Sampson, 1983) menyebut bahwa bahasa adalah fakta sosial. Sebagai fakta sosial, bahasa itu merupakan hasil dari "kesadaran kolektif" suatu masyarakat. Kesadaran kolektif suatu masyarakat adalah sesuatu yang terdapat di luar diri masing-masing anggota masyarakat dan idenya tercermin secara tidak langsung dalam pemikiran orang-orang yang membentuk masyarakat itu. Pendapat Saussure ini memperlihatkan suatu kenyataan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemakainya. Apabila di dalam masyarakat pemakai bahasa itu telah tercipta berbagai pedoman yang berupa adat kebiasaan, norma, nilai, dan peraturan yang mengatur kehidupan berbahasa masyarakatnya, maka setiap anggota masyarakat terikat untuk merefleksikan pedoman itu ke dalam tingkah laku dan tutur kata atau kebiasaan berbahasanya terhadap anggota masyarakat yang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari (lihat Kartomihardjo, 1988). Namun karena setiap kelompok masyarakat memiliki pedoman mereka sendiri, suatu tingkah laku dan tutur kata atau kebiasaan berbahasa yang benar bagi kelompok masyarakat yang satu mungkin saja dianggap tidak atau kurang benar dalam kelompok masyarakat yang lain.

Suatu kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya merupakan pegawai kantor, misalnya, tentu terbiasa menggunakan salam seperti dalam kalimat (2.1) dan bukan dalam kalimat (2.2) berikut ini.

(2.1) Selamat pagi, Pak!

(2.2) Belum selesai membajak, Mas?

Kalimat (2.2) merupakan suatu bentuk salam yang biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya adalah petani sehingga akan lebih tepat apabila bentuk salam ini muncul dalam konteks interaksi dua orang di tepi sawah. Akan terasa sangat janggal apabila bentuk salam dalam kalimat (2.2) ini muncul dalam konteks interaksi di suatu kantor.

Sementara itu, Halliday (1978) menyatakan bahwa bahasa itu merupakan produk dari proses sosial. Bahasa itu timbul dalam kehidupan seseorang melalui suatu pertukaran makna yang terus menerus dengan orang-orang lain di sekitarnya. Seorang anak, misalnya, pertama-tama menghasilkan bahasa kanak-kanaknya, kemudian bahasa ibunya, dalam suatu interaksi dengan orang-orang yang selalu bertemu dengannya yang merupakan kelompok bermaknanya, seperti orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-teman bermainnya, teman-teman sekelasnya, dan guru-guru di sekolahnya.

Halliday (1978) dan Halliday dan Hasan (1985) juga menjelaskan bahwa seorang anak ketika belajar bahasa pada saat yang bersamaan juga belajar "sesuatu yang lain" melalui bahasa dalam konteks sosial. Dia membangun suatu gambaran realitas yang mengelilinginya dan di dalam dirinya. Dalam proses belajar bahasa ini, yang adalah juga suatu proses sosial, penafsiran realitas tidak dapat dipisahkan dari penafsiran sistem semantik di mana realitas itu dikodekan, baik itu di lingkungan, dalam arti konkret, tempat belajar

itu berlangsung seperti di kelas dan sekolah, ataupun dalam arti yang lebih abstrak, seperti sistem sekolah, sistem kependidikan, norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakatnya.

Lebih lanjut Halliday (1978) menjelaskan bahwa dalam realitas sosial terdapat dua aspek fundamental yang dikodekan dalam bahasa, yakni bahasa sebagai suatu alat refleksi tentang sesuatu dan bahasa sebagai alat melakukan sesuatu. Yang pertama adalah komponen dari makna ideasional dan yang kemudian adalah komponen makna interpersonal. Dua makna ini oleh Halliday dan Hasan (1985) disebut dengan istilah *metafungsi* dalam teori sistematik.

Brown dan Yule (1983), dalam kaitannya dengan ini, membagi fungsi bahasa atas transaksional dan interaksional. Perbedaan ini sejajar dengan perbedaan metafungsi ideasional dan interpersonal menurut Halliday (1978) dan Halliday dan Hasan (1985). Fungsi bahasa transaksional adalah fungsi bahasa untuk mengungkapkan "isi" atau informasi faktual atau proposisional. Sebaliknya, fungsi bahasa interaksional adalah fungsi bahasa yang terlibat dalam pengungkapan hubungan-hubungan sosial dan sikap-sikap pribadi.

Di luar pembagian fungsi bahasa atas ideasional/transaksional dan interpersonal/interaksional, Halliday dan Hasan (1985) menambahkan unsur metafungsional yang ketiga, yakni tekstual. Unsur ini tidak berhubungan dengan fungsi pemakaian atau penggunaan bahasa, tetapi lebih tepat

merupakan sumber untuk memastikan bahwa hal yang diutarakan itu relevan, bergayut, dan berhubungan dengan konteksnya.

2.1.1 Bahasa, Teks, dan Konteks

Teks oleh Halliday (1978) dipandang sebagai ruang sosial di mana dua proses sosial yang fundamental, yakni representasi pengalaman dan dunia, dan interaksi sosial antar partisipan secara serempak terjadi. Berdasarkan pandangan ini, maka teks oleh Halliday dan Hasan (1985) juga dijelaskan “sebagai bahasa yang berfungsi”, yakni bahasa yang sedang menjalankan tugas tertentu dalam konteks tertentu. Dengan demikian, semua contoh bahasa hidup yang ambil bagian tertentu dalam konteks situasi disebut sebagai teks.

Menurut Halliday dan Hasan (1985) suatu teks memiliki sifat-sifat sebagai berikut ini. Pertama, teks itu sesungguhnya terdiri atas makna-makna dan membentuk satuan makna, walaupun sebenarnya yang tampak dalam teks itu bila dituliskan adalah deretan kata-kata dan kalimat-kalimat. Makna dalam hal ini diungkapkan atau dikodekan dalam kata-kata dan struktur.

Kedua, suatu teks sebenarnya merupakan suatu bentuk pertukaran makna yang bersifat sosial. Setiap jenis teks dalam setiap bahasa memiliki makna karena dapat dihubungkan dengan interaksi di antara pembicaranya.

Ketiga, teks adalah hasil dari lingkungannya. Teks merupakan hasil suatu proses pemilihan makna yang terus-menerus, yang dapat digambarkan

sebagai jalan setapak atau jalan kecil melalui jaringan-jaringan yang membentuk suatu sistem kebahasaan.

Keempat, teks memiliki hubungan yang dekat dengan konteks. Bahkan Halliday dan Hasan (1985:71) menyatakan bahwa “kita tidak dapat mengungkapkan salah satu konsep tanpa mengungkapkan yang lain”. Oleh karena itu, apabila terdapat suatu teks tentu ada teks lain yang menyertainya. Teks yang menyertai teks itu adalah konteks. Pengertian mengenai konteks ini meliputi tidak hanya yang dilisankan atau ditulis, melainkan termasuk pula kejadian-kejadian yang *nonverbal* lainnya, yakni keseluruhan teks itu. Dengan demikian, konteks menurut Halliday dan Hasan (1985) merupakan jembatan antara teks dan situasi tempat teks itu betul-betul terjadi.

2.1.2 Konteks Situasi dan Hubungannya dengan Teks

Konteks situasi pertama kali diperkenalkan oleh Malinowsky (dalam Halliday dan Hasan, 1985) untuk mengacu pada keseluruhan lingkungan, tidak hanya lingkungan tutur (verbal), tetapi juga lingkungan keadaan tempat teks diucapkan. Pandangan Malinowsky ini kemudian dikembangkan oleh Firth dalam teori kebahasaannya. Ini tercermin dalam uraiannya yang berbunyi “semua ilmu bahasa adalah kajian tentang makna dan semua makna merupakan fungsi dalam konteks” (dalam Halliday dan Hasan, 1985).

Firth, menurut Halliday dan Hasan (1985), lebih lanjut melengkapi konteks situasi dari Malinowsky menjadi seperti berikut ini. Suatu konteks

situasi terdiri atas: pelibat, tindakan pelibat, ciri-ciri situasi lainnya yang relevan, dan dampak-dampak tindak tutur. Buah pemikiran Firth ini kemudian diikuti oleh Hymes (1967) yang mengajukan seperangkat konsep untuk memerikan konteks situasi seperti berikut ini. Suatu konteks situasi terdiri atas: bentuk dan isi pesan, perangkat lingkungan khas, pelibat, maksud dan dampak komunikasi, kunci atau petunjuk, perantara, genre, dan norma interaksi.

Halliday (Halliday dan Hasan, 1985) menunjukkan adanya indikator tertentu yang dapat digunakan untuk memerikan konteks situasi atau lingkungan langsung tempat teks itu benar-benar berfungsi, yakni medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), dan sarana wacana (*mode of discourse*). Medan wacana menunjuk pada hal yang sedang terjadi, pada sifat tindakan sosial yang sedang berlangsung, yang di dalamnya bahasa ikut berperan serta sebagai unsur pokok tertentu. Pelibat wacana menunjuk pada orang-orang yang mengambil bagian, pada sifat para pelibat, kedudukan dan peranan mereka, dan pada jenis-jenis hubungan peranan yang terdapat di antara para pelibat. Sarana wacana menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, organisasi simbolik teks, kedudukan yang dimilikinya dan fungsinya dalam konteks, termasuk salurannya, dan juga mode retoriknya.

Hubungan konteks situasi dengan teks oleh Halliday diuraikan dengan mengaitkan antara ciri-ciri konteks situasi, yakni medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana, dengan tiga unsur fundamental teori semantik,

yakni makna ideasional atau makna pengalaman, makna interpersonal, dan makna tekstual. Hubungan antara konteks situasi dan teks secara jelas terlihat dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. : Hubungan Konteks Situasi dan Teks

Situasi: Ciri Konteks	diungkapkan oleh	Teks:Unsur Fundamental sistem semantik
Medan Wacana (hal yang berlangsung)		Makna Pengalaman (Transitivitas, penamaan)
Pelibat Wacana (orang yang ambil bagian)		Makna antar pelibat (modus, modalitas, persona, dll)
Sarana Wacana (peran yang diberikan pada bahasa)		Makna tekstual (tema, informasi, hubungan kohesif)

2.1.3 Konteks Budaya dan Hubungannya dengan Teks

Konteks situasi yang dikemukakan di atas hanyalah merupakan lingkungan yang langsung dari teks. Masih terdapat lingkungan yang lebih luas yang harus diacu dalam menafsirkan teks, yaitu konteks budaya. Setiap konteks situasi yang sebenarnya, susunan medan tertentu, pelibat, dan sarana yang telah membentuk teks, bukanlah suatu kumpulan ciri yang acak, melainkan suatu keutuhan yang secara khas bergayut dalam suatu budaya. Menurut Halliday dan Hasan (1985) orang melakukan hal tertentu pada kesempatan tertentu dan memberinya makna dan nilai. Menurut dia, inilah yang dimaksud dengan kebudayaan.

Teks surat kabar, entah itu berita, editorial, opini, dan sebagainya merupakan contoh yang bagus yang merupakan suatu “pertemuan” antara konteks situasi dan konteks budaya. Di dalam surat kabar, setiap teks—misal teks berita—selalu memiliki konteks situasi: (1) medan wacana yang berupa “berita apa”, (2) pelibat wacana yang berupa “hubungan antara penulis dan pembacanya”, dan (3) sarana wacana yang berupa “pemberitaan”. Contoh ini merupakan contoh yang diambil dari surat kabar, yang maknanya juga bersumber dari surat kabar, sebagai suatu lembaga atau institusi dalam suatu budaya. Konsep visi dan misi pers, peran dan kedudukan Pemerintah dalam pers, struktur peran para jurnalis, penerbit, pembaca, dan sebagainya, semua merupakan faktor yang membentuk konteks budaya dan secara bersama menentukan penafsiran teks dalam konteks situasinya.

2.2 Hubungan Antara Bahasa dan Ideologi

Berikut ini dibahas hubungan antara bahasa dengan salah satu hasil dari proses berpikir manusia yang merupakan kumpulan konsep bersistem dan nilai-nilai yang dapat mendasari tingkah laku berbahasa manusia, yakni ideologi. Pembahasan tentang bahasa dan ideologi tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan bahasa dan kekuasaan (lihat Fairclough, 1995) karena perilaku ideologi hanya dapat diamati dalam praktek kekuasaan. Selanjutnya pembahasan tentang hubungan antara bahasa dan ideologi baru akan sampai pada inti permasalahan apabila sampai pada pembahasan tentang saling

pengaruh antara ideologi dan bahasa, dan bagaimana ideologi ditransformasikan dalam penggunaan bahasa.

2.2.1 Bahasa dan Kekuasaan

Bahasa dan kekuasaan adalah dua bidang yang secara sekilas tidak tampak berhubungan. Pengamatan ini hampir benar apabila didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa hanya direduksi sebagai tatabahasa dan kekuasaan hanya direduksi sebagai teori politik belaka. Paradigma terhadap bahasa dan kekuasaan yang seperti ini menyebabkan teori bahasa dan teori politik tidak saling "menyapa" dalam kurun waktu yang lama. Dua bidang ini memiliki kesibukan sendiri-sendiri yang tidak memungkinkan untuk saling berinteraksi.

Latif dan Ibrahim (1996) menyatakan bahwa hubungan bidang bahasa dan bidang kekuasaan mulai terjalin ketika Jean Baudrillard, Jurgen Habermas, dan Antonio Gramsci mengemukakan gagasan-gagasan mereka yang cemerlang. Baudrillard, seperti yang dikutip oleh Latif dan Ibrahim (1996:15), menyatakan bahwa "The real monopoly is never that of technical means, but of speech". Ungkapan dari Baudrillard ini dapat dikatakan menjembatani dua bidang yang terpisah karena kesibukannya masing-masing.

Jauh sebelum Baudrillard menyatakan itu, Habermas telah mengisyaratkan bahwa proses-proses politik tidak pernah lepas dari "praksis komunikasi". Hikam (1996) menjelaskan bahwa Habermas menekankan pentingnya aspek-aspek intersubjektivitas dalam proses wacana. Ia terutama

memandang bahasa sebagai medium untuk menghubungkan sang subjek dengan tiga wilayah: wilayah eksternal, wilayah sosial, dan wilayah dunia dalam (pribadi). Wilayah pertama mengacu pada situasi di luar masyarakat di mana subjek berada. Wilayah kedua mengacu pada totalitas hubungan-hubungan antarpribadi yang memiliki aturan-aturan normatif dalam masyarakat. Sedangkan wilayah ketiga, mengacu pada totalitas dari maksud-maksud dan pengalaman subjektif sang pembicara. Sehingga tidak berlebihan apabila dalam konteks hubungan bahasa dan tiga wilayah ini, Habermas, seperti yang dikutip Latif dan Ibrahim (1996:16), menyatakan bahwa "Language is also a medium of domination and power".

Lebih lanjut menurut Hikam (1996), bagi Habermas, wacana dan transaksi komunikasi adalah upaya untuk mencari titik temu dan saling pengertian antarpara pesertanya. Proses komunikasi, menurutnya, hanya akan berhasil apabila ia memenuhi syarat-syarat pragmatik universal, yakni keterpahaman secara kognitif, kebenaran pernyataan, kejujuran pembicara dan pendengar, dan kesesuaian dengan basis-basis normatif para pembicarnya. Sebagai basis normatif dalam proses komunikasi, elemen-elemen pragmatik universal ini amat dipengaruhi oleh dimensi-dimensi eksternal, seperti ekonomi, politik, dan khususnya ideologi.

Berkaitan dengan masalah pengaruh dimensi-dimensi eksternal dalam bahasa ini, Gramsci, seperti yang dikutip oleh Fairclough (1995) dan

Pabotinggi (1986), memunculkan istilah “kekuatan” (*force*) dan “hegemoni” (*hegemony*). Istilah “kekuatan” lebih ditafsirkan sebagai penggunaan daya paksa untuk membuat orang lain menaati syarat-syarat suatu cara produksi tertentu, dan istilah “hegemoni” diartikan sebagai perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas berkuasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, politik yang termanifestasikan dalam bentuk-bentuk kooptasi institusional dan manipulasi sistematis atas teks dan tafsirnya. Implikasi dari dua konsep yang dikemukakan oleh Gramsci ini dapat dilihat dalam kehidupan sosial politik bernegara. Hubungan-hubungan dominasi dan penaklukan tidak hanya dijalankan melalui aparatur-aparatur negara yang dapat dilihat secara nyata, tetapi juga melalui produksi dan reproduksi kuasa-kuasa yang termanifestasikan dalam ruang budaya, yakni tempat yang oleh Latif dan Ibrahim (1996) disebut sebagai “tempat wawasan dan makna hidup dirajut dalam aneka teks dan wacana yang saling berkompetisi”.

2.2.2 Pengaruh Ideologi pada Pemakaian Bahasa

Fenomena adanya hubungan dua arah antara ideologi dan bahasa mencerminkan pandangan yang terdapat dalam Hipotesis Sapir-Whorf versi lemah, yakni terdapat hubungan timbal balik antara bahasa dan pikiran. Di satu sisi bahasa mempengaruhi pikiran para penuturnya dan di sisi lain, pikiran, termasuk di dalamnya ideologi, yakni ide-ide, gagasan, dan nilai-nilai, serta

cara berpikirnya, mempengaruhi perilaku bahasa para penuturnya. Pada bagian ini pembahasan tentang fenomena ini lebih difokuskan pada pengaruh ideologi pada pemakaian bahasa.

Tentang fenomena hubungan ideologi dan bahasa, berikut ini diberikan pandangan dari beberapa pakar politik dan komunikasi, seperti Hikam (1995), Latif dan Ibrahim (1995), dan Rakhmat (1995). Hikam (1995) menyatakan bahwa bahasa dan praktik kebahasaan tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan sosial politik. Namun semakin disadari bahwa bahasa, di dalam dirinya, tampil sebagai representasi dari dan ruang bagi penggelaran berbagai macam kuasa, termasuk ideologi. Oleh karena itu, bahasa lantas dilihat pula sebagai salah satu ruang (*space*) tempat konflik-konflik kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni terjadi, yang didasari oleh ideologi tertentu.

Latif dan Ibrahim (1995) juga menguraikan bahwa di satu sisi bahasa tidak pernah luput dari ajang penggelaran operasi-operasi kekuasaan dan ideologi. Namun di sisi lain, bahasa juga dapat dilihat sebagai "pintu masuk" untuk "menelanjangi" permainan kekuasaan dan ideologi.

Mirip dengan dua pendapat di atas, Rakhmat (1995:50) menjelaskan panjang lebar tentang hubungan dua arah antara bahasa dan ideologi sebagai berikut:

Ideologi adalah serangkaian preferensi yang dimiliki bersama oleh komunitas politik. Karena ideologi itu *socially shared*, ia pasti terbentuk melalui proses sosial. Ia harus dirumuskan secara jelas oleh elite intelektual dan kemudian disebarakan kepada anggota komunitas politik lainnya. Dalam perumusan dan penyebaran ideologi, peranan bahasa sangat menentukan. Tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa. Dengan ideologi orang memberi makna pada realitas sosial. Untuk memudahkan penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan, dan penyimpanan makna diperlukan bahasa. Pada gilirannya, bahasa tertentu—yang ditampakkan pada pemilihan kata dan kalimat—membentuk realitas sosial yang tertentu.

Ketiga pendapat di atas memperlihatkan suatu pemikiran yang sama tentang ideologi dan bahasa. Pemikiran pertama adalah ideologi dan bahasa walaupun merupakan dua bidang yang terpisah tetapi saling berinteraksi dan saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya. Pemikiran kedua adalah hubungan antara ideologi dan bahasa berupa hubungan mempengaruhi dan bersifat dua arah. Ini berarti ideologi yang dianut penutur bahasa dapat mempengaruhi proses produksi bahasa penuturnya, dan sebaliknya bahasa dapat digunakan untuk membentuk realitas dunia yang diyakini oleh penuturnya melalui pilihan kata dan kalimat-kalimat.

Bukti secara empirik yang dapat digunakan untuk mendukung ketiga pendapat ini adalah hasil pengamatan Rakhmat (1995) tentang kosa kata bahasa Indonesia yang digunakan secara menonjol pada rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru seperti yang terdapat dalam Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2: Sampel Beberapa Kosa kata Yang Cenderung Digunakan oleh Rezim Orde Lama dan Rezim Orde Baru

Rezim Orde Lama	Rezim Orde Baru
revolusi	pembangunan
kontra-revolusi	anti pembangunan
Nekolim	bersih lingkungan
antek-antek Kapitalis-imperialis	gerakan pengacu keamanan
Nasakom	lepas landas
Manipol-Usdek	stabilitas nasional
indoktrinasi	penataran
kaum Marhaen	digebuk
berdikari	diamankan

Tabel 2.2 mengindikasikan suatu makna bahwa ketika rezim Orde Lama digantikan dengan rezim Orde Baru, di mana orientasi ideologisnya berbeda, maka wacana politiknya pun berganti. Pergantian itu dapat dilihat dalam kecenderungan pemakaian kosa kata tertentu dan adanya pergeseran makna kata dari kata-kata yang digunakan.

2.2.3 Transformasi Ideologi dalam Wacana

Ideologi, yang merupakan kumpulan konsep bersistem, baik itu ide, norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan asas pendapat dalam memberikan arah dan tujuan dalam tindakan, adalah sesuatu yang abstrak dan ada di dalam pikiran. Sesuatu yang abstrak ini dapat ditransformasikan ke dalam wacana lewat dua cara (lihat Fairclough, 1995; dan Lee, 1992). Cara yang pertama adalah dalam wujud lambang-lambang atau tanda-tanda (*sign*).

Hal ini selaras dengan pernyataan Volosinov (dalam Hall, 1982) bahwa setiap tanda selalu menghadirkan ideologi di dalamnya serta memiliki nilai semiotis. Cara yang kedua adalah melalui perspektif pelaporan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam wacana. Perspektif tertentu yang diambil oleh penutur atau penulis memperlihatkan latar belakang ideologi yang dianutnya.

Kehadiran ideologi di dalam wacana, dalam wujud tanda-tanda, dapat dilihat dalam struktur-struktur bahasa dan pada berbagai tingkatan bahasa (lihat Fairclough, 1995). Berdasarkan penelitian Fowler (1986) dan (1991), Lee (1992), MacCarthy dan Carter (1994), dan Fairclough (1995) dapat dijelaskan bahwa wadah atau tempat di mana ideologi "memperlihatkan diri" ada dalam struktur transitivitas, nominalisasi, struktur leksikal atau penamaan, modalitas, struktur tematik, pengaturan proposisi: informasi lama dan baru, metafora, dan tindak tutur.

Kehadiran ideologi di dalam wacana, menurut Fairclough (1995) dan Lee (1992), tidak hanya terlihat di dalam struktur bahasa saja, tetapi juga terdapat dalam cara pelaporan peristiwa-peristiwa wacana itu sendiri yang lebih dikenal dengan perspektif pelaporan. Suatu peristiwa sosial-politik yang terjadi di masyarakat dilaporkan di dalam wacana dalam bentuk kemasan tertentu dan telah direproduksi melalui media atau dimediasikan. Hasil mediasi peristiwa-peristiwa sosial-politik oleh jurnalis, baik dalam televisi maupun surat kabar, berupa imaji-imaji tertentu tentang realitas telah mengalami manipulasi

dan distorsi. Storey (1993:3) tentang fenomena manipulasi dan distorsi ini menyebutnya sebagai “kesadaran palsu”. Sementara itu, Barthes (dalam Stevenson, 1996:41) menyebut fenomena pesan atau informasi yang telah dimediasikan ini membentuk makna konotasi.

2.3 Bahasa dan Perspektif dalam Wacana

Pada bagian 2.2 telah diuraikan tentang hubungan timbal balik antara bahasa dan ideologi. Di satu sisi bahasa memaksa atau memberikan suatu “**pandangan dunia**” pada penuturnya, dan di sisi yang lain, ideologi yang dianutnya mempengaruhi penggunaan bahasanya. Pada bagian ini implikasi dari pandangan ini akan diuraikan berkaitan dengan pandangan bahwa perbedaan perspektif atau sudut pandangan mempengaruhi produksi bahasa.

2.3.1 Pendekatan Terhadap Fenomena Perspektif dalam Studi Wacana

Perspektif menurut Renkema (1993) tidak persis sama dengan istilah *viewpoint* menurut Grimes (1975), *point of view* menurut Brown dan Yule (1983) dan Fowler (1986), dan *writer's stance* menurut Tibbetts dan Charlene Tibbetts (1991), yang dianalogikan seperti posisi kamera dalam meliput suatu peristiwa pandangan mata dalam dunia sinematik. Perspektif dalam pandangan Renkema (1993) memiliki cakupan makna yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan posisi pencerita dalam melihat objek deskripsinya, seperti sifat dan karakter pribadi-pribadi lain dalam ceritanya, tetapi dikaitkan juga

dengan latar belakang, nilai-nilai, pandangan hidup, dan sikap pencerita (atau penulis) yang dapat disorot dari segi sosiologi politik dan segi psikolinguistik.

Secara rinci, Renkema (1993) menjelaskan bahwa kajian terhadap fenomena perspektif sebenarnya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni visi, fokalisasi, dan empati. Visi adalah pendekatan yang lebih mendasarkan diri pada bidang sosiologi politik dan mengaitkan kajian perspektif ini dengan aspek ideologi. Keraf (1983) memberikan ilustrasi yang menarik tentang fenomena ini. Dia mencontohkan bahwa suatu topik mengenai masalah *perburuhan* dapat dilihat dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Penulis yang berpandangan sosialis akan melihat persoalan perburuhan dari segi para buruh atau pekerja, sebaliknya penulis yang berpandangan liberal dan kapitalis akan mengkaji persoalan perburuhan ini dari segi para pemilik modal. Singkatnya, dalam pendekatan ini suatu informasi dapat disajikan dari suatu perspektif ideologi tertentu, yakni suatu sistem norma dan nilai-nilai yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial.

Berbeda dengan pendekatan visi, pendekatan fokalisasi adalah pendekatan yang sudah sangat lazim dikenal dalam dunia sastra. Pendekatan ini memasukkan teori naratif dalam analisisnya. Gagasan utamanya adalah seorang narator dapat menjadi seorang individu lain yang telah menyaksikan atau sedang menyaksikan suatu peristiwa. Dia dapat juga berdiri sebagai individu yang maha tahu, yang mengerti secara menyeluruh seluk-beluk

peristiwa yang terjadi pada individu-individu lain dalam narasi yang diceritakannya. Pendekatan ini dalam telaah kajian perspektif sering disebut sebagai pendekatan tradisional dalam fenomena perspektif.

Pendekatan yang terakhir adalah empati yang mendasarkan diri pada bidang psikolinguistik. Pendekatan ini menunjukkan tingkat di mana pembicara memperkenalkan seseorang atau objek yang merupakan bagian dari peristiwa atau kondisi yang dideskripsikan dalam suatu kalimat.

Dalam penelitian ini, fenomena perspektif yang terlihat dalam surat kabar Indonesia dikaji dengan menggunakan pendekatan visi. Ini berarti penelitian ini lebih berorientasi pada upaya untuk mengungkap aspek-aspek ideologis yang mendasari dan membentuk perspektif pemberitaan surat kabar-surat kabar Indonesia. Dengan pendekatan ini dapat dijelaskan mengapa dua surat kabar yang melaporkan tentang kejadian yang sama dapat menghasilkan laporan yang berbeda. Contoh (2.3) dan (2.4) berikut ini adalah kutipan dari Renkema (1993:145) yang menyajikan laporan surat kabar "sayap kanan konservatif" dan surat kabar "sayap kiri" tentang demonstrasi akbar yang dilakukan secara damai di Belanda.

- (2.3) With 400.000 demonstrators participating, double that of the organizers' highest estimates, the peace demonstration in Amsterdam has already been labeled an important political event.
- (2.4) The fears on the part of thousands of Dutchmen that the peace demonstration in Amsterdam would culminate in an aggressive anti-America orgy was not fulfilled.



Banyak pembaca Belanda akan dengan cepat mengenali (2.3) memiliki perspektif ideologi progresif dan (2.4) memiliki perspektif ideologi konservatif.

2.3.2 Perspektif dalam Produksi Bahasa

Dalam produksi bahasa, khususnya tulisan, perspektif dapat dimanifestasikan dalam kaitannya dengan dua hal, yakni masalah strategi penyajian informasi (*presentation of information*) dan masalah pemilihan bentuk-bentuk ekspresi bahasa yang digunakan sebagai penanda perspektif. Dalam strategi penyajian informasi, kesatuan apa yang dikenal sebagai (1) pemilihan tema atau titik tolak pembicaraan, termasuk didalamnya pemilihan judul, dan (2) “urutan wajar” dan “pembalikan urutan wajar” (lihat Levelt, 1981; dan Brown Yule, 1983) dalam penataan informasi memperlihatkan suatu perspektif tertentu. Selain itu, dalam pemilihan dan pemakaian bentuk-bentuk ekspresi bahasa tertentu seperti struktur transitivitas, struktur leksikal dan pilihan kata, struktur nominalisasi, pemakaian bentuk modalitas, tindak tutur, metafora, dan informasi lama dan baru, tersimbolkan juga perspektif penulis.

2.3.2.1 Strategi Penyajian Informasi

Dalam produksi suatu wacana tulis, atau teks dalam pengertian sempit, perspektif dapat dibangun sejak penulis memutuskan apa yang dipilih sebagai tema di dalam tulisannya. Tema dalam hal ini paralel dengan apa yang diistilahkan oleh Perfetti dan Goldman (1974) sebagai “subjek sentral wacana”.

Tema adalah apa yang dipakai oleh penulis sebagai titik permulaan tulisannya itu (lihat, Brown dan Yule, 1983). Pemilihan tema tertentu sebagai titik tolak pembicaraan akan mendasari pengembangan tulisannya lebih lanjut dan membawa konsekuensi pada masuknya informasi-informasi tertentu, baik itu berupa keadaan, kejadian atau peristiwa, serta partisipan-partisipan yang relevan, dan tidak dimasukkannya informasi-informasi lain yang tidak relevan di dalam tulisannya. Kutipan (2.5a) dan (2.5b) berikut ini diambil dari surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas* yang melaporkan “peristiwa demonstrasi massa pendukung PDI Megawati pada tanggal 27 Juli 1997 di Jakarta”. Kedua surat kabar mengambil tema yang berbeda untuk laporan beritanya dari peristiwa yang sama.

- (2.5a) Polda Metro Jaya menangkap 55 orang yang mengaku sebagai pendukung Megawati Soekarnoputri, karena menggelar pawai atau arak-arakan tanpa izin dan cenderung mengganggu ketertiban umum. (*Kedaulatan Rakyat*, 28 Juli 1997)
- (2.5b) Dalam penjagaan dan pengawasan ketat aparat keamanan Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya, massa PDI di Jakarta, kemarin masih sempat ‘mencuri peluang’ memperingati ‘tragedi 27 Juli’. Karena dilarang mendekati kantor DPP PDI untuk melakukan tabur bunga, akhirnya warga melakukannya di berbagai tempat di sekitar DPP PDI. Bahkan, terjadi *long-march* dari Jalan Diponegoro hingga DPC PDI Jakarta Utara Tanjung Priok, yang berjarak 15 kilometer. (*Bernas*, 28 Juli 1997)

Kutipan (2.5a) dari *Kedaulatan Rakyat* memperlihatkan pilihan tematik sebagai titik tolak pelaporan berupa “tindakan penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya”, sedangkan kutipan (2.5b) dari *Bernas* memperlihatkan

pilihan tematik "tindakan tabur bunga yang dilakukan Mahasiswa" sebagai titik tolak pelaporan beritanya. Perbedaan pilihan tematik dari dua laporan pemberitaan ini membawa konsekuensi pada perbedaan pengembangan informasi-informasi yang disajikan dalam berita.

Apa yang diperlihatkan dalam kutipan (2.5a) dan (2.5b) adalah adanya perbedaan sudut pandangan atau perspektif. Laporan dari *Kedaulatan Rakyat* memperlihatkan perspektif yang lebih memihak pada aparat, sebaliknya laporan *Bernas* memperlihatkan perspektif yang lebih memihak pada mahasiswa.

Selain pilihan tematik, perspektif juga dibangun dengan pemilihan judul tulisan atau teks yang tepat. Brown dan Yule (1983:138) menyatakan bahwa "judul suatu wacana sebaiknya tidak disamakan dengan topik, tetapi sebaiknya dipandang sebagai suatu ungkapan topik yang mungkin". Sebagai ungkapan topik yang mungkin, judul dalam hal ini berfungsi sebagai upaya tematisasi. Upaya tematisasi dengan menggunakan bentuk judul ini selain menjadi titik tolak pengembangan lebih lanjut mengenai informasi-informasi yang relevan dalam tulisan, juga menjadi titik tolak yang membatasi tafsiran makna dari informasi-informasi yang dikembangkan dalam isi berita. Pengembangan lebih lanjut dan pembatasan tafsiran pada informasi yang disajikan membangun suatu perspektif tertentu.

Berikut ini disajikan contoh (2.6a) dan (2.6b), yang dikutip dari Lee (1992:98), yang masing-masing merupakan judul berita dari *The Guardian* dan *TheTimes*.

(2.6a) Police shoot 11 dead in Salisbury riot (*The Guardian*)

(2.6b) Rioting Blacks shot dead by Police as ANC leader meet
(*TheTimes*)

Judul pada contoh (2.6a) secara tersirat menunjukkan rasa lebih bersimpati pada orang-orang kulit hitam Afrika daripada judul pada contoh (2.6b). Dengan perkataan lain, judul (2.6a) yang dibuat oleh wartawan *The Guardian* memperlihatkan perspektif orang kulit hitam Afrika, sebaliknya judul (2.6b) yang dibuat oleh wartawan *The Times* memperlihatkan perspektif orang kulit putih.

Terdapat dua alasan yang mendukung inferensi ini. Pertama, pada judul (2.6a), tindakan masyarakat kulit hitam di Salisbury Afrika Selatan dalam membuat kerusuhan tidak secara langsung diperlihatkan oleh wartawan *Guardian*. Tindakan orang-orang kulit hitam di Salisbury direduksi dengan menyatakan tempat kerusuhan, yakni *in Salisbury riot*. Upaya mereduksi “tindakan kerusuhan” menjadi “tempat kerusuhan” menyiratkan suatu pembelaan pada orang-orang kulit hitam oleh wartawan *Guardian*. Sebaliknya pada contoh (2.6b), wartawan *Times* secara terang-terangan menyatakan bahwa orang yang mati ditembak itu jelas-jelas adalah perusuh dari kulit hitam. Wartawan *Times* menyebutnya sebagai *rioting blacks*. Dari ungkapan ini

secara jelas terlihat tidak adanya upaya pembelaan terhadap orang-orang kulit hitam dari wartawan *Times* dalam kasus penembakan ini, tetapi justru memberi penegasan bahwa orang-orang kulit hitam itu “pantas ditembak menurut hukum” karena mereka adalah perusuh.

Kedua, judul pada (2.6a) dalam *Guardian* secara jelas menonjolkan pelaku penembakan terhadap 11 orang di Salisbury. Bagi orang Afrika judul tersebut memberi informasi yang sangat jelas bahwa polisi yang menembak orang Afrika adalah orang-orang kulit putih dan korban yang mati tertembak adalah orang-orang kulit hitam. Keberpihakan wartawan *Guardian* pada orang-orang kulit hitam Afrika diperlihatkan dengan menempatkan pelaku penembakan, yang adalah orang kulit putih, sebagai subjek pada judul dengan tujuan supaya mendapat fokus perhatian dari pembaca. Sebaliknya, judul (2.6b) dalam *Times* mengesankan penonjolan lebih pada korban penembakan dan bukan pada pelaku penembakan. Penempatan korban pada posisi subjek mengandung maksud agar fokus perhatian pembaca lebih tercurah pada korban penembakan daripada pelaku penembakan. Upaya seperti ini dapat ditangkap maknanya sebagai pembelaan, bentuk simpati, atau dukungan pada polisi, yang dalam hal ini orang kulit putih, daripada korbannya yang merupakan orang kulit hitam.

Perspektif dalam teks semakin kuat diperlihatkan apabila penulis tidak hanya memanfaatkan dua hal yang telah diuraikan di atas, yakni pilihan

tematik dan pilihan judul teks, tetapi juga memanfaatkan linearitas sebagai piranti pembangun perspektif. Linearitas dalam hal ini bermakna pengurutan informasi-informasi yang berupa peristiwa, keadaan, atau partisipan-partisipan yang terlibat di dalam suatu teks. Suatu peristiwa yang terjadi lebih dahulu akan ditempatkan pada urutan pertama dan kemudian diikuti oleh peristiwa yang terjadi kemudian. Model penyajian urutan peristiwa dalam produksi bahasa ini juga berkaitan dengan strategi pengurutan kata-kata tunggal menjadi kalimat-kalimat, dan kalimat-kalimat itu menjadi teks-teks. Levelt (1981) menyebut fenomena ini sebagai *ordo naturalis* dan Brown dan Yule (1983) menyebutnya sebagai fenomena urutan wajar atau *natural order*.

Van Dijk (1977) menyarankan suatu perspektif berdasarkan pada model pengaturan urutan atau linearitas yang berbeda dengan model kronologi di atas. Dia mengusulkan agar perspektif lebih dikaitkan dengan kemudahan persepsi sehingga apa-apa yang lebih menonjol disebutkan terlebih dahulu daripada hal-hal yang kurang menonjol dan tidak menonjol. Pengaturan linearitas itu didasarkan pada pola: (1) *general - particular*, (2) *whole - part/component*, (3) *set - subject - element*, (4) *including - included*, (5) *large - small*, (6) *outside - inside*, dan (7) *possessor - possessed*.

Tentang perspektif yang dibangun berdasarkan atas struktur penuturan secara alamiah, baik model kronologis maupun model yang diusulkan oleh van Dijk, sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah penyajian informasi (lihat

Renkema, 1993). Perbedaan dalam penataan informasi di dalam suatu struktur penulisan menyebabkan terjadinya perbedaan perspektif. Brown dan Yule (1983:145) melihat fenomena ini dalam konteks pembalikan urutan wajar yang menimbulkan “kesan khusus” tertentu. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa contoh berikut ini.

- (2.7a) There was a man at the bar. He looked up when the door opened. A woman came in, followed by a child.
- (2.7b) A woman opened the door for a child. He walked in and saw a man sitting at the bar.

Dalam (2.7a) peristiwa diceritakan oleh narator dari perspektif seorang laki-laki. Narator dalam hal ini menempatkan informasi tentang *a man* dalam kalimat pertama dan menempatkannya sebagai acuan untuk memberikan informasi-informasi lain dalam seluruh rangkaian peristiwa. Penempatan *a man* sebagai acuan untuk masuk ke dalam rangkaian peristiwa-peristiwa yang dibangun dalam (2.7a) membentuk suatu perspektif penceritaan, yakni perspektif laki-laki. Dalam (2.7b) peristiwa-peristiwa diceritakan oleh narator dari perspektif seorang anak (*child*). Narator menempatkan *child* sebagai acuan untuk masuk dalam rangkaian peristiwa selanjutnya, seperti *he walkd...[he] saw*, sehingga dalam (2.7b) perspektif yang terbangun adalah perspektif seorang anak.

Apa yang terjadi dalam (2.7a) dan (2.7b) memperlihatkan bahwa pengaturan linier tentang informasi dapat dimanipulasi untuk menonjolkan

unsur-unsur tertentu dan peristiwa-peristiwa tertentu lebih daripada yang lain. Fenomena ini selaras dengan metafora penahapan (*staging*) yang dikemukakan Grimes (1980: 323) bahwa “setiap klausa, kalimat, paragraf, episode, dan wacana diatur disekitar unsur tertentu yang dianggap sebagai titik tolaknya”. Clements (1979:287) memperluas metafora penahapan Grimes dengan menganggap bahwa penahapan adalah “suatu dimensi struktur prosa yang mengidentifikasikan penonjolan relatif yang diberikan kepada berbagai segmen wacana prosa”.

2.3.2.2 Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa sebagai Penanda Perspektif

Perspektif dalam produksi bahasa ternyata tidak hanya dapat diamati keberadaannya dalam struktur wacana, tetapi dapat juga diamati dalam struktur yang lebih rendah dari wacana. Tentang fenomena perspektif, sebagaimana yang ditampakkan dalam pemilihan bentuk-bentuk ekspresi bahasa, telah dibahas oleh beberapa analis wacana, sosiolinguis, dan ahli komunikasi, seperti Fowler (1991), Lee (1992), McCarthy dan Carter (1994), dan Rakhmat (1996). Pendapat-pendapat mereka secara singkat terangkum seperti berikut ini.

Fowler (1991) menjelaskan masalah perspektif dalam konteks pelaporan suatu berita. Menurut dia “karena tradisi dalam pelaporan dan penyajian berita diletakkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik, maka semua berita selalu dilaporkan dari suatu sudut pandang tertentu” (Fowler, 1991:10). Apa

saja yang dituliskan, misalnya tentang dunia, dinyatakan dari suatu posisi ideologi tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi secara sistematis pemilihan bentuk-bentuk ekspresi linguistiknya, baik dalam struktur sintaksis, leksikal, semantik, pragmatik atau tekstual.

Lee (1992) melihat fenomena perspektif dalam kaitannya dengan aspek-aspek linguistik dan transformasi ideologi dalam wacana surat kabar. Menurut dia, aspek-aspek dalam linguistik seperti metafora, pilihan kata, struktur nominalisasi, transitivitas, struktur tematik, struktur informasi lama dan baru, merefleksikan perbedaan perspektif diantara para penulis dalam bahasa yang sama.

Senada dengan Lee (1992), McCarthy dan Carter (1994) juga menjelaskan bahwa perspektif pemberitaan dapat diungkapkan dengan melihat hubungan antara pilihan aspek-aspek linguistik tertentu dan cara-cara bagaimana nilai-nilai budaya dan ideologi diekspresikan. Hubungan itu secara jelas dapat ditemukan dalam pilihan gaya bahasa (*stylistic choiche*) dan dalam struktur teks.

Fairclough (1995) menjelaskan bahwa perspektif pemberitaan dapat diungkap dengan melihat kaitan antara ideologi dan bahasa. Ideologi menurut Fairclough adalah suatu sifat dari struktur-struktur dan juga sifat dari kejadian-kejadian. Suatu ideologi, dengan demikian, dapat diketahui letaknya di dalam suatu bentuk dari sistem dalam praktek berbahasa, seperti kode, struktur,

sistem, atau formasi (misalnya seperangkat ekspresi dalam hubungan semantik tertentu).

Rakhmat (1996) melihat perspektif pemberitaan dalam rangka penyebaran ideologi pada masyarakat. Rakhmat menyatakan bahwa ideologi itu "*socially shared*". Ideologi yang oleh Craigh (1990) dimaknai sebagai serangkaian preferensi yang dimiliki bersama oleh komunitas politik, menurut Rakhmat terbentuk melalui suatu proses sosial. Ideologi dirumuskan secara jelas oleh elite intelektual dan kemudian disebarkan kepada anggota komunitas politik lainnya. Dalam perumusan dan penyebaran ideologi, peranan bahasa sangat menentukan. Di satu sisi ideologi membentuk bahasa dan di sisi lain, ideologi dibentuk oleh bahasa. Dengan ideologi orang memberi makna pada realitas sosial. Untuk memudahkan penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan makna, maka diperlukan bahasa. Pada gilirannya bahasa tertentu, yang ditampakkan pada pemilihan kata dan kalimat, membentuk realitas sosial.

Apa yang diungkapkan oleh Fowler (1991), Lee (1992), McCarthy dan Carter (1994), Fairclough (1995), dan Rakhmat (1996) memiliki kesamaan bahwa perspektif dapat diwujudkan dan diperlihatkan dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa. Secara umum bentuk-bentuk ekspresi bahasa itu adalah sistem ketransitifan, struktur leksikal dan pilihan kata, struktur nominalisasi, modalitas, tindak tutur, metafora, dan struktur informasi.

2.3.2.2.1 Sistem Ketransitifan

Bentuk pertama ekspresi bahasa yang menandakan perspektif surat kabar adalah sistem ketransitifan. Sistem ketransitifan, menurut Halliday (1985:101), berkaitan dengan tiga hal, yakni (1) proses itu sendiri, seperti yang tercermin dalam verba pengisi fungsi predikat, (2) partisipan yang muncul berkaitan dengan proses tersebut, dan (3) keadaan yang berkaitan dengan proses maupun partisipan itu. Berbeda dengan ketransitifan dalam pandangan tradisional yang lebih mengacu pada pembedaan secara sintaksis antara verba transitif dan verba intransitif yang ditengarai oleh kebutuhan verba tersebut akan hadirnya suatu objek, Halliday (1985) lebih menyoroti ketransitifan dalam kaitannya dengan fungsi ideasional yang dibawa suatu klausa, yakni sebagai alat untuk menganalisis representasi pola-pola pengalaman. Analisis ketransitifan model Halliday ini didasari oleh pandangan bahwa bahasa memungkinkan manusia untuk membangun suatu gambaran mental dari realitas, untuk membuat makna dari pengalaman yang terjadi disekitarnya dan yang terjadi di dalam dirinya. Lebih lanjut Halliday menyatakan bahwa suatu klausa merupakan unit gramatikal paling bermakna karena fungsinya dalam merepresentasikan proses-proses pengalaman tentang dunia, seperti (1) proses material yang berwujud perbuatan atau kejadian, (2) proses mental yang berupa pemikiran, penglihatan, atau perasaan, (3) proses verbal baik

dengan ucapan langsung maupun tidak langsung, dan (4) proses relasional baik yang bersifat atributif maupun posesif.

Apabila dianalisis dengan kerangka kerja ketransitifan Halliday (1985) dan Tomasowa (dalam Kaswanti Purwo, 1994), maka klausa (2.8) dan (2.9) berikut memperlihatkan representasi pengalaman yang berbeda.

(2.8) John kicked the ball

(2.9) Mary ran

Pada klausa (2.8), proses pengalaman yang ditampakkan adalah proses perbuatan. Proses perbuatan dengan verba *kick* ini mengharuskan munculnya dua partisipan di dalam sistem ketransitifan, yakni partisipan pelaku *John* dan partisipan tujuan *the ball*. Sama seperti klausa (2.8), klausa (2.9) juga memperlihatkan proses perbuatan. Perbedaan antara keduanya terletak pada fitur verbanya. Pada klausa (2.9), verba *ran* hanya mampu menghadirkan satu partisipan saja, yakni partisipan pelaku *Mary*. Namun demikian, pada kedua klausa ini proses pengalaman yang terbentuk melalui sistem ketransitifan adalah proses yang sama, yakni perbuatan. Implikasi lebih lanjut dari terbentuknya proses perbuatan ini adalah menonjolnya partisipan pelaku di dalam klausa-klausa tersebut.

Klausa (2.10) dan (2.11) berikut ini memperlihatkan proses pengalaman yang berbeda dengan klausa (2.8) dan (2.9) di atas. Pada kedua klausa ini,

proses-proses pengalaman yang terbentuk dalam sistem ketransitifan adalah proses relational dan proses mental.

(2.10) Jane is tall

(2.11) Peter meditates

Dari (2.10) ini dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang ditandakan pada frase verbal *is tall* adalah suatu deskripsi dari keadaan fisik dan bukan suatu perbuatan. Sementara itu pada klausa (2.11), sesuatu yang ditandakan pada verba *meditates*, berbeda dengan verba-verba lainnya, merupakan suatu proses mental dan bukan suatu perbuatan fisik seperti pada klausa (2.8) dan (2.9).

Dalam hubungannya dengan fenomena perspektif, ketransitifan sering dimanfaatkan oleh wartawan surat kabar (lihat Fowler, 1991; McCarthy dan Carter, 1994) untuk membangun suatu interpretasi tertentu dari peristiwa-peristiwa yang akan dilaporkan pada pembaca. Perspektif dari suatu peristiwa dapat diperlihatkan dengan cara pemakaian variasi ketransitifan, seperti verba yang memperlihatkan proses perbuatan atau proses kejadian yang membawa pengaruh pada partisipan-partisipan seperti pelaku dan tujuan, atau pemakaian verba lain yang membawa makna proses mental dari partisipan, atau pemakaian verba tertentu yang memperlihatkan proses verbal apabila tujuannya memang ingin menonjolkan apa yang diucapkan oleh sumber berita.

Fowler (1991), MacCarthy dan Carter (1994), dan Lee (1992) membuktikan bahwa masing-masing variasi bentuk ketransitifan memasukkan suatu pandangan maupun sikap penulis yang berbeda tentang peristiwa yang dilaporkan. Berikut ini disajikan klausa (2.12) - (2.17) sebagai ilustrasi pernyataan ini.

(2.12) polisi menembak mati enam demonstran

(2.13) enam demonstran ditembak mati oleh polisi

(2.14) enam demonstran tewas

(2.15) "enam demonstran tertembak mati", ujar saksi mata

(2.16) saksi mata melihat enam demonstran mati tertembak

(2.17) enam mahasiswa yang tewas itu adalah Elang Mulia [...]

Analisis ketransitifan terhadap klausa (2.12)-(2.17) menghasilkan fitur-fitur seperti yang terlihat dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3: Fitur-fitur Makna dalam Ketransitifan

Klausa	Proses Ketransitifan	Partisipan yang dimunculkan	Inferensi
(2.12)	perbuatan	pelaku, tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • proses yang diperlihatkan dari peristiwa yang dilaporkan adalah proses perbuatan • modus perbuatan disengaja • partisipan yang ditonjolkan adalah pelaku
(2.13)	kejadian	tujuan, pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • proses yang diperlihatkan dari peristiwa yang dilaporkan adalah proses kejadian • modus tindakan disengaja • partisipan yang ditonjolkan adalah tujuan
(2.14)	kejadian	tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • proses yang diperlihatkan dari peristiwa yang dilaporkan adalah proses kejadian • pelaku disamarkan, dianggap tak penting atau dapat ditafsirkan dari konteks; • partisipan yang ditonjolkan adalah tujuan
(2.15)	verbal	ucapan,	<ul style="list-style-type: none"> • proses yang diperlihatkan dari peristiwa

		pengucap	<p>yang dilaporkan adalah proses verbal</p> <ul style="list-style-type: none"> • partisipan yang ditonjolkan adalah par. ucapan • pelaku disamarkan, dianggap tak penting atau dapat ditafsirkan dari konteks, atau pelaku tidak diketahui; • modus perbuatan tidak disengaja
(2.16)	mental	pengindra, fenomena	<ul style="list-style-type: none"> • proses yang diperlihatkan dari peristiwa yang dilaporkan adalah proses mental • partisipan yang ditonjolkan adalah pengindra • pelaku disamarkan, dianggap tak penting atau dapat ditafsirkan dari konteks, atau pelaku tidak diketahui;
(2.17)	relasional	penunjuk, tertunjuk	<ul style="list-style-type: none"> • proses yang diperlihatkan dari peristiwa yang dilaporkan adalah proses relasional • pelaku tidak penting, dapat ditafsirkan dari konteks, atau pelaku tidak diketahui • partisipan yang ditonjolkan adalah partisipan penunjuk

Seorang penulis atau secara lebih spesifik, wartawan, ketika memutuskan untuk memproduksi salah satu variasi ketransitifan di atas dalam laporan beritanya tentu memiliki alasan dan pertimbangan tertentu. Alasan dan pertimbangan itu didasarkan pada persepsi wartawan terhadap peristiwa yang terjadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti (1) idealisme pers, yakni "fakta adalah suci" dan pers sebagai alat kontrol sosial serta perubahan, (2) prioritas keuntungan finansial bagi pemilik media dan modal, dan (3) berbagai kepentingan ideologis, baik pemerintah, partai politik, organisasi massa, institusi surat kabar yang bersangkutan, maupun kepentingan masyarakat (lihat McQuail, 1987; Ali, 1998).

2.3.2.2.2 Pilihan Kata

Bentuk kedua ekspresi bahasa yang menandai perspektif pemberitaan adalah pilihan kata atau diksi. Pilihan kata menurut Keraf (1986) bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi dan gaya bahasa. Fraseologi mencakup persoalan kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya. Gaya bahasa sebagai bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat individual dan memiliki nilai artistik tinggi.

Pilihan kata di dalam suatu teks menurut Fairclough (1989) menandai secara sosial maupun secara ideologis bidang-bidang pengalaman yang berbeda dari penulisnya, baik berupa nilai eksperimental, nilai relasional, dan nilai ekspresif. Nilai eksperimental berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan yang dibawakan oleh kata tersebut. Nilai relasional berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial yang tercipta oleh kata tersebut. Dan terakhir, nilai ekspresif berkaitan dengan penilaian atau evaluasi tentang sesuatu yang dicerminkan oleh kata tersebut. Ini berarti suatu kata tidak hanya menunjukkan pengalaman dalam istilah umum, tetapi juga berpotensi merepresentasikan adanya konsep pembedaan kelas, golongan, maupun ideologi. Kata-kata tertentu yang seperti itu memiliki fungsi kategorisasi.

Tabel 2.4, yang merupakan pengulangan Tabel 2.2, berikut ini memperlihatkan kategorisasi kosa kata atas dua kelompok organisasi, yakni kosa kata rezim Orde Lama dan kosa kata rezim Orde Baru. Kosa kata rezim Orde Lama adalah kosa kata yang merupakan atribut dari Pemerintahan Soekarno dan sangat produktif digunakan dalam masa pemerintahannya. Sementara itu, kosa kata rezim Orde Baru adalah kosa kata yang merupakan atribut dari Pemerintahan Soeharto dan sangat produktif digunakan dalam masa 32 tahun masa pemerintahannya.

Tabel 2.4: Kosa kata Rezim Orde Lama dan Rezim Orde Baru

Rezim Orde Lama	Rezim Orde Baru
revolusi	pembangunan
kontra-revolusi	anti pembangunan
Nekolim	bersih lingkungan
antek-antek Kapitalis-imperialis	gerakan pengacu keamanan
Nasakom	lepas landas
Manipol-Usdek	stabilitas nasional
indoktrinasi	penataran
kaum Marhaen	digebuk
berdikari	diamankan
panterei	makar

Dalam penelitian Fowler (1991), kategorisasi kosa kata merupakan satu bagian integral reproduksi ideologi dalam surat kabar. Pendapat ini benar mengingat beberapa alasan berikut ini. Pertama, kata sebagai bagian dari bahasa adalah tanda. Sebagai suatu tanda, menurut Volosinov (dalam Hall, 1982), ia selalu menghadirkan ideologi di dalamnya serta memiliki nilai semiotis. Kedua, ideologi itu dibentuk melalui suatu proses sosial, yakni

melalui suatu perumusan yang jelas oleh elite intelektual dan kemudian disebarluaskan kepada anggota komunitas politik lainnya. Dalam rangka penyebarluasan ideologi ini, surat kabar sebagai media komunikasi massa yang memiliki jangkauan luas di masyarakat merupakan piranti yang efektif untuk sosialisasi nilai-nilai ideologi.

Pada waktu seorang jurnalis melaporkan suatu peristiwa aktual yang terjadi disekitarnya dengan menggunakan pilihan-pilihan kata yang termasuk dalam wilayah "taksonomi organisasi" ideologi tertentu, maka jurnalis tersebut telah memasukkan perspektif ideologi tertentu di dalam beritanya. Jurnalis tersebut telah mempersepsi peristiwa aktual tersebut dalam kerangka berpikir ideologi tertentu dan kemudian melaporkannya menurut perspektif ideologi tertentu pula.

Untuk memperjelas pendapat di atas berikut diberikan kutipan (2.18) yang diambil dari teks yang dianalisis oleh Lee (1992).

(2.18) The black township of Soweto, which has been simmering with unrest since the riots on June 16 and shooting of 174 Africans, erupted again today.

At least three African were shot dead, according to witnesses, although police deny this. The black hospital of Baragwanath nearby was reported to be 'overcrowded' with injured Africans.

The Minister of Justice, Mr Jimmy Kruger, announced in Pretoria this evening that he is reimposing the ban on public gatherings which lapsed last Saturday. The ban will continue until the end of month. The nightmare of many whites in Johannesburg of a black march on their city almost came true today when between 20,000 and 25,000 angry Africans began moving in procession out of Soweto towards John Vorster Square, police

headquarters in Johannesburg, were they planned to protest against the detention of black pupils.

Police with automatic rifles and in camouflage uniform headed the marchers off after they had swept through a roadblock. They allegedly fired long bursts at the leading marchers and also rained a barrage of tear-gas canisters on them. A reporter said he took a dead African to hospital, and witnesses said at least two other Africans were lying dead in the veld.

Kutipan (2.18) ini lebih memperlihatkan perspektif orang kulit putih daripada perspektif orang kulit hitam. Ini berarti penulisnya adalah seorang kulit putih dan dia menuliskan berita ini untuk pembaca kulit putih. Penanda pertama yang menunjukkan bahwa ini merupakan perspektif kulit putih terlihat pada pilihan kata yang ditulis dengan huruf tebal dalam "*The **black** township of Soweto*". Pemilihan kata **black** untuk ditempatkan pada awal tulisan itu memperlihatkan adanya persoalan keetnisan yang melatarbelakangi penulisan laporan ini. Seandainya tidak ada masalah yang berkaitan dengan etnis, laporan ini sebenarnya dapat diawali dengan bentuk, "*The township of Soweto*". Masih banyak pemakaian kata yang dapat dirujuk sebagai penanda perspektif pada kutipan (2.18) antara lain pilihan kata *riot* dan bukan *demonstration* dalam "[...] which has been simmering with unrest since the **riots** on June 16 [...]", kemudian *nightmare* dan *white* dalam, "*The **nightmare** of many **whites** in Johannesburg [...]*". Pemakaian kata *riot* tidak menunjukkan adanya sikap netral penulis pada kasus orang-orang kulit hitam Afrika karena kata tersebut memiliki makna yang negatif dan identik dengan tindakan yang melanggar hukum, walaupun dalam konteks lain ada indikator seperti "[...]

when between 20.000 and 25.000 ...began moving in procession out of Soweto.....where they planned to protest against the detention of black pupils" yang semua tindakan itu dapat diungkapkan sebagai *demonstration*. Selanjutnya, pemakaian kata *nigtmare* yang digabungkan dengan *of many whites* memperlihatkan adanya prasangka negatif bahwa tindakan orang-orang kulit hitam selalu merugikan orang kulit putih, walaupun akhirnya terbukti tidak terjadi apa-apa pada orang kulit putih, seperti yang terlihat dalam kutipan ini, "*The nighmare of many whites in Johannesburg of a black march on their city almost came true today..*". Kata **almost** membuktikan bahwa tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan orang kulit putih.

2.3.2.2.3 Struktur Nominalisasi

Fowler (1991) menjelaskan bahwa nominalisasi adalah transformasi sintaktis secara radikal dalam suatu klausa, yang memiliki konsekuensi struktural yang luas, dan memberikan kesempatan ideologis yang besar. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, secara struktur sangat dimungkinkan bahwa predikat yang berupa verba direalisa-sikan secara sintaksis sebagai nomina, misalnya seperti contoh (2.19a) dan (2.19b) berikut ini.

(2.19a) Polisi menembaki para mahasiswa secara membabi buta dalam insiden Semanggi.

(2.19b) Penembakan secara membabi buta terjadi dalam insiden Semanggi.

Pada dua kalimat di atas terlihat bahwa kata *menembaki* pada (2.19a) diderivasikan menjadi *penembakan* pada (2.19b). Efek dari derivasi nominal seperti yang terlihat dalam (2.19b) adalah banyak informasi yang tidak terekspresikan, misalnya informasi tentang pelaku, yakni *polisi* dan korban-korbannya, yakni *para mahasiswa*. Dari segi keefisienan, bentuk ini lebih ringkas daripada bentuk klausa yang penuh dalam (2.19a).

Dari segi pertimbangan ideologis, bentuk (2.19b) adalah bentuk yang sering dianggap ideal karena dengan bentuk ini banyak informasi dapat disamarkan dan tidak perlu disebutkan secara formal. Penyamaran dan penyebutan hanya sebagian informasi-informasi tertentu ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan politik, misalnya untuk tidak memojokkan pihak-pihak tertentu atau bahkan membela kepentingan pihak-pihak tertentu. Berkaitan dengan masalah ini Fowler, dkk (1979) menyatakan bahwa nominalisasi adalah hal yang lazim dilakukan apabila merujuk pada bidang yang berhubungan dengan kekuasaan dan sikap penulis. Untuk memperjelas fenomena nominalisasi ini, berikut diberikan lagi contoh (2.20a), (2.20b), dan (2.20c).

- (2.20a) Meski Polri sedang memeriksa para tokoh oposisi, Ali Sadikin dan kawan-kawan, ribuan mahasiswa tetap turun ke jalan di Jakarta, Rabu (18/11) kemarin. (*Bernas*, 19 November 1998)
- (2.20b) Meski pemeriksaan terhadap para tokoh oposisi, Ali Sadikin dan kawan-kawan sedang berlangsung, ribuan mahasiswa tetap turun ke jalan di Jakarta, Rabu (18/1) kemarin.

- (2.20c) Meski pemeriksaan sedang berlangsung, ribuan mahasiswa tetap turun ke jalan di Jakarta, Rabu (18/1) kemarin.

Derivasi nominal dari kata *memeriksa* pada (2.20a) menjadi *pemeriksaan* pada (2.20b) dan (2.20c) secara jelas memperlihatkan adanya upaya-upaya menyamarkan atau tidak menyebutkan informasi-informasi penting yang seharusnya ada dan merupakan bagian dari keutuhan peristiwa yang tergambar dalam (2.20a). Upaya-upaya menyamarkan dan menyembunyikan informasi-informasi penting ini dari segi perspektif pemberitaan merupakan siasat dan manipulasi untuk kepentingan ideologi dan politik tertentu.

2.3.2.2.4 Modalitas

Bentuk ekspresi bahasa berikutnya yang dapat digunakan untuk menunjukkan perspektif adalah elemen-elemen interpersonal seperti modalitas. Modalitas oleh Fowler (1986;1991) dimengerti sebagai komentar atau sikap, yang berasal dari teks, baik secara eksplisit atau implisit diberikan oleh penulis terhadap hal yang dilaporkan, yakni keadaan, peristiwa, dan tindakan. Seperti halnya transitivitas, struktur leksikal dan pilihan kata, dan nominalisasi, modalitas memiliki peluang yang besar digunakan oleh jurnalis dalam rangka membangun perspektif pemberitaan, serta mempengaruhi opini para pembacanya, karena jurnalis dapat dengan mudah memasukkan pandangan pribadi atau institusinya ke dalam proposisi-proposisi yang dituliskannya melalui pilihan modalitas. Modalitas sebagai komentar atau sikap dari penulis

yang tertuang dalam teks dapat dibagi menjadi empat jenis, yakni (1) kebenaran, (2) keharusan, (3) izin, dan (4) keinginan.

Dengan modalitas kebenaran, Fowler (1991) menyatakan bahwa seorang penulis mengindikasikan atau menyatakan secara tidak langsung suatu komitmen pada kebenaran dari suatu proposisi/makna yang diutarakannya, atau pada suatu prediksi tingkat kemungkinan dari deskripsi suatu kejadian yang terjadi. Macam-macam modalitas kebenaran terentang sepanjang skala dari sangat pasti, seperti contoh (2.21), sampai tidak pasti, seperti contoh (2.22) berikut ini.

(2.21) Sampai tadi malam, kota Waikabubak, ibu kota Sumba Barat, *masih* terasa mencekam. (*Jawa Pos*, 7 November 1998)

(2.22) Sejauh ini, jumlah korban tewas dalam “perang” antara warga Loli dan Waejewa *mungkin* akan terus bertambah.

Dengan modalitas keharusan, penulis menetapkan bahwa partisipan dalam suatu proposisi *seharusnya* atau *tidak seharusnya* melakukan tindakan khusus dalam proposisi itu. Contoh untuk hal ini dapat dilihat dalam kalimat (2.23) dan (2.24) berikut ini.

(2.23) Dengan tap yang merupakan cermin kehendak rakyat itu, pemerintah *harus* berani memeriksa mantan Presiden Suharto. (*Jawa Pos*, 24 November 1998)

(2.24) Saat ini ada dua skenario besar yang *harus* dipilih rakyat Indonesia. (*Jawa Pos*, 7 November 1998)

Dalam modalitas izin, penulis mengindikasikan suatu persetujuan (izin) atau sebaliknya pada partisipan untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu. Kata-kata modal yang digunakan adalah *boleh*, *dapat*, dan *bisa*. Kata-kata yang digunakan sebagai penanda komentar dan sikap penulis dalam tipe ini lebih netral daripada kata-kata penanda komentar dan sikap penulis dalam tipe modalitas *kebenaran* dan *prediksi*. Contoh kata-kata modalitas izin adalah sebagai berikut ini.

(2.25) Sementara itu pendataan korban secara sistematis *belum bisa* dilakukan karena suasana masih tidak menentu. (*Jawa Pos*, 7 November 1998)

(2.26) Mahasiswa *boleh* melakukan demonstrasi di depan pintu gerbang DPR/MPR Senayan.

(2.27) Suharto *dapat* dikenai tuntutan pidana KKN

Dengan modalitas keinginan, penulis menyatakan persetujuan atau ketidakpersetujuannya tentang keadaan dari peristiwa yang dikomunikasikan dalam proposisi. Modalitas keinginan implisit terdapat dalam modalitas keharusan dan izin, dan eksplisit ada dalam suatu rentangan adjektif dan adverb evaluatif. Contoh untuk hal ini dapat dilihat dalam kalimat (2.28) berikut:

(2.28) Gagasan dialog nasional yang diprakarsai oleh Gubernur Lemhanas sebagai upaya mengatasi gejala disintegrasi bangsa *sangat tepat*.

Komentar dan sikap penulis yang tercermin dalam pilihan modalitasnya mampu memperlihatkan perspektif penulis tentang keadaan, peristiwa, dan tindakan yang dilakukan dalam proposisi. Contoh-contoh berikut ini

menggambarkan secara jelas perbedaan pemakaian modalitas yang menyiratkan perbedaan perspektif yang ada.

(2.29a) Suharto dan kroni-kroninya *harus* ditangkap.

(2.29b) Suharto dan kroni-kroninya *seharusnya* ditangkap.

(2.29c) Suharto dan kroni-kroninya *bisa* ditangkap.

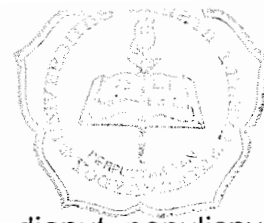
(2.29d) Suharto dan kroni-kroninya *mungkin saja* ditangkap.

(2.29e) Suharto dan kroni-kroninya *tidak seharusnya* ditangkap.

(2.29f) Suharto dan kroni-kroninya *tidak akan* ditangkap.

(2.29g) Tindakan penangkapan terhadap Suharto dan kroni-kroninya *sangat tepat*.

Pemakaian modalitas *harus*, *seharusnya* dan *sangat tepat* dalam (2.29a), (2.29b), (2.29g) memperlihatkan dukungan penulis terhadap tindakan yang tercermin dalam proposisi. Sementara itu, pada (2.29c) dan (2.29d), pemakaian modalitas *bisa* dan *mungkin saja* memperlihatkan sikap penulis yang lebih netral dan lunak terhadap tindakan yang tercermin dalam proposisi daripada sikap penulis pada (2.29a) dan (2.29b). Selanjutnya, pada (2.29e) dan (2.29f), pemakaian modalitas *tidak seharusnya* dan *tidak akan* memperlihatkan sikap penulis yang tidak mendukung kebijakan penangkapan terhadap "Suharto dan kroni-kroninya". Sikap yang berupa (a) dukungan terhadap tindakan penangkapan, (b) netral, dan © tidak mendukung kebijakan penangkapan, yang diwujudkan dalam pemakaian modalitas-modalitas yang



sesuai ini memperlihatkan pandangan politik yang dianut penulisnya yang didasari oleh ideologi tertentu.

2.3.2.2.5 Tindak Tutur

Bentuk ekspresi bahasa yang dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan perspektif adalah elemen-elemen interpersonal seperti tindak tutur atau *speech acts* (lihat Fowler , 1986;1991). Pandangan yang mendasari adalah dalam berbahasa apabila kita mengatakan sesuatu, kita juga melakukan sesuatu melalui tuturan itu. Ini merupakan aspek dalam fungsi interpersonal bahasa yang telah dikaji oleh Asutin (1962) dan pengikutnya, Searle (1969). Austin (1962) dan Searle (1969) lebih lanjut memperkenalkan makna *tindak ilokusi* dalam tindak tutur. Kalimat (30) berikut cenderung tidak hanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya tepat (lihat Leech, 1983).

(2.30) Ada demonstrasi!

Kalimat (2.30), apabila dituturkan oleh seorang polisi yang sedang memblokade jalan kepada para pejalan kaki, tidak hanya berfungsi menginformasikan sesuatu, tetapi juga berfungsi sebagai larangan lewat di jalan itu. Sebaliknya, apabila kalimat (2.30) itu, dituturkan oleh seorang aktivis mahasiswa dan ditujukan kepada sekelompok mahasiswa di suatu kampus, maka kalimat (2.30) ini tidak hanya sekedar berisi informasi tentang "adanya

demonstrasi” tetapi juga berupa “suatu ajakan keikutsertaan dalam demonstrasi tersebut”.

Tindak tutur ini di dalam laporan berita surat kabar banyak digunakan untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan suatu maksud terselubung dari jurnalis atau partisipan dalam peristiwa yang dilaporkan oleh jurnalis. Dalam kaitannya dengan politik dan ideologi, maksud terselubung yang dilatarbelakangi oleh sikap dan pandangan penulis atau sikap dan pandangan partisipan dalam peristiwa yang dilaporkan oleh jurnalis, sengaja disebarluaskan untuk mempengaruhi atau memperlokasi opini pembaca. Kutipan (2.31) berikut ini secara jelas mengindikasikan fenomena ini.

(2.31) Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) hari ini berakhir. Salah satu keputusan yang dikeluarkan [...]. Misalnya, *kongres merekomendasikan presiden dan wapres mendatang harus pria, beriman, dan bertakwa.* (Jawa Pos, 7 November 1998)

Pembaca yang selalu mengikuti perkembangan politik di Indonesia, apalagi pembaca yang bersimpati kepada salah satu partai politik di Indonesia, yakni PDI Perjuangan, akan dapat dengan cepat menangkap makna tindak ilokusi yang tersiratkan dalam *harus pria* dari rekomendasi hasil kongres itu. Keputusan kongres ini dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk “menghambat” atau “mematikan” peluang calon presiden wanita Indonesia yang dalam hal ini Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang oleh para pendukungnya dicalonkan sebagai presiden untuk pemilihan umum tahun 1999. Penafsiran ini benar mengingat situasi tutur yang melingkupi tuturan

dalam kutipan (2.31) ini adalah sebagai berikut: (1) penutur, dalam hal ini peserta kongres Umat Islam, sebagian pesertanya adalah anggota partai politik tertentu yang tidak mendukung Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden; (2) konteks sosial yang sedang berlangsung adalah suasana persaingan politik untuk memperebutkan simpati rakyat dalam menghadapi pemilihan umum tahun 1999; (3) suatu bentuk tuturan dapat mengungkapkan maksud dan tujuan tertentu dari penuturnya yang berbeda dengan makna yang tersurat dalam tuturan.

Kutipan (2.32) berikut juga mengindikasikan hal yang berlawanan dengan hasil keputusan kongres seperti yang dituturkan dalam kutipan (2.31).

(2.32) Gus Dur umumkan gerakan antidiskriminasi. (*Jawa Pos*, 7 November 1998)

Walaupun dalam kutipan (2.32) tidak disebutkan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap salah satu hasil Keputusan Kongres Umat Islam seperti yang tertuang dalam kutipan (2.31), namun pembaca yang selalu mengikuti peristiwa politik yang terjadi pada saat-saat kongres ini berlangsung dapat menafsirkan kutipan (2.32) sebagai suatu ajakan untuk menolak salah satu keputusan kongres yang bunyinya "*presiden dan wapres mendatang harus pria*".

2.3.2.2.6 Metafora

Metafora menurut Aristoteles (dalam Wahab, 1991) adalah ungkapan kebahasaan untuk menyatakan hal bersifat umum untuk hal yang bersifat

khusus dan sebaliknya, hal yang bersifat khusus untuk hal bersifat umum, serta hal bersifat khusus untuk hal lain yang juga bersifat khusus, atau dengan jalan analogi. Quintilian, (dalam Levin, 1977) dengan kriteria yang berbeda, menyatakan bahwa metafora adalah ungkapan kebahasaan untuk mengatakan sesuatu yang hidup untuk sesuatu lainnya yang juga hidup, yang hidup untuk sesuatu yang mati, sesuatu yang mati untuk yang hidup, dan sesuatu yang mati untuk sesuatu lainnya yang juga mati.

Berbeda dengan dua pendapat yang cenderung bersifat dikotomi, yakni umum-khusus dan hidup mati, Wahab (1991) mengartikan metafora sebagai ungkapan kebahasaan yang maknanya tidak dapat dijangkau secara langsung dari lambang karena makna yang dimaksud terdapat pada predikasi ungkapan kebahasaan itu. Singkatnya, metafora adalah pemahaman dan pengalaman akan sejenis hal yang dimaksudkan untuk perihal lain.

Dalam kaitannya dengan perspektif, Lee (1992) menyatakan bahwa metafora merupakan salah satu alat untuk membangun perspektif. Contoh untuk hal ini dapat dilihat dalam kutipan (2.33) berikut, yang diambil dari Lee (1992).

(2.33) The black township of Soweto, which has been simmering with unrest since the riots on June 16 and shooting of 174 Africans, erupted again today.

At least three African were shot dead, according to witnesses, although police deny this. The black hospital of Baragwanath nearby was reported to be 'overcrowded' with injured Africans.

Dalam kutipan (2.33) metafora terlihat dari cara penulis ketika membicarakan penduduk Soweto sebagai suatu jenis kekuatan alam, khususnya gunung yang telah bergejolak, dan kemudian meletus. Proses metaforis ini dapat dilihat dalam "*The black township of Soweto, which has been **simmering** with unrest since the riots on June 16, **erupted** again today*". Dari metafora ini terlihat juga bahwa emosi individual dan tindakan-tindakan yang mereka munculkan ditransfer ke dalam tempat di mana mereka tinggal. Tempat itu adalah "*township*" yang telah memanas dan yang sekarang meletus.

Pengaruh dari metafora ini adalah untuk menjauhkan pembaca, dalam hal ini orang kulit putih, dari subjek dalam laporan. Dalam membicarakan penduduk Soweto, sebagai suatu kekuatan alam dan sebagai suatu tempat, emosi orang-orang dilibatkan dan keputusan-keputusan yang mereka buat dalam menggunakan aksi-aksi tertentu dieliminasi dalam proses interpretasi. Situasi ini terlihat lebih sebagai suatu hasil dari hukum-hukum alam daripada perasaan dan keputusan manusia.

2.3.2.2.7 Struktur Informasi

Bentuk ekspresi bahasa yang juga dikaji dan dilihat dapat digunakan untuk mengungkapkan perspektif adalah struktur informasi (lihat Lee, 1992). Struktur informasi atau organisasi isi proposisional dalam kalimat secara umum dapat dibagi atas informasi lama atau latar atau *given information* dan informasi baru atau *new information*.

Informasi lama adalah informasi yang telah dimiliki atau informasi yang telah ada dalam memori pembaca. Di samping itu, menurut Halliday (1967:211) informasi lama “dapat ditemukan kembali secara anaforis atau situasional”. Informasi baru adalah informasi yang belum diketahui oleh pembaca dan menurut Halliday (1967:204) informasi tersebut “tidak dapat ditemukan kembali dari wacana sebelumnya”.

Pengaturan isi proposisi ke dalam informasi lama atau informasi baru dapat dimanipulasi untuk kepentingan penulis dan institusinya yang berdasarkan pada ideologi tertentu dengan cara membangun praanggapan atau *presupposition* yang berbeda dengan fakta sebenarnya. Pada kutipan (2.34) dan (2.35) berikut fenomena manipulasi informasi tersebut terlihat dengan jelas.

(2.34) Facade of Africa's unity collaps in the Rhodesia riots

The divisions within the African nasionalist movement deepened today as police announced that the number of dead in yesterday's riots in township on outskirts of Salisbury has risen to 13. (*The Guardian*)

(2.35) Split threatens ANC after Salisbury's riots

After Sunday's riots in which 13 Africans were killed and 28 injured, a serious rift in the rank of the African National Council became apparent today. (*The Times*)

Pada kutipan (2.34) frase nominal *the divisions within the African nationalist movement* diposisikan sebagai informasi latar sedangkan *police*

announced that the number of dead in yesterday's riots in township on the outskirts of Salisbury had risen to 13 diposisikan sebagai informasi baru.

Praanggapan yang ingin dibangun oleh penulis adalah keberadaan perpecahan dalam gerakan kaum nasionalis Afrika itu mendahului terjadinya kerusuhan. Apabila disederhanakan struktur proposisinya adalah sebagai berikut:

(2.34a) *disunity* → *riots* → *killings*

Apabila praanggapan ini diterima oleh pembaca sebagai 'dasar bersama', menurut Stalnaker (1978:321), dalam interaksinya dengan penulis, maka penempatan *the divisions within the African nationalist movement* sebagai informasi latar dapat mengalihkan penyebab kematian 13 orang Afrika dari polisi ke masalah perpecahan intern dalam gerakan kaum nasionalis Afrika. Dengan kata lain, penyebab kematian 13 orang Afrika adalah orang Afrika sendiri.

Pada kutipan (2.35) informasi yang ditempatkan sebagai informasi latar adalah *Sunday's riots in which 13 Africans were killed and 28 injured* dan informasi yang ditempatkan sebagai informasi baru adalah *a serious rift in the rank of African National Council became apparent today*. Praanggapan yang ingin dibangun oleh penulis adalah keberadaan perpecahan dalam ANC itu didahului oleh terjadinya kerusuhan yang menyebabkan 13 orang Afrika

terbunuh dan 28 luka-luka. Apabila disederhanakan, maka struktur proposisinya adalah sebagai berikut:

(2.35a) 'riots' → killings → disunity

Apabila praanggapan ini diterima oleh pembaca sebagai 'dasar bersama', menurut Stalnaker (1978:321), dalam interaksinya dengan penulis, maka penempatan *Sunday's riots in which 13 Africans were killed and 28 injured* sebagai informasi latar adalah faktor yang menyebabkan *a serious rift in the rank of African National Council*.

2.4 Pers Indonesia Pada Era Orde Baru

Berikut ini dibahas hal ihwal yang berkaitan dengan pers Indonesia pada era Orde Baru. Pembahasan meliputi empat hal, yakni hubungan antara pers dan negara, perkembangan pers Indonesia hingga era Orde Baru, paradigma pers Pancasila sebagai pers pembangunan, dan paradigma pers Indonesia pada akhir era Orde Baru. Pembahasan keempat hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi situasi dan kondisi pers Indonesia khususnya pada akhir era Orde Baru sebagai konteks budaya yang mendasari pemakaian bahasa Indonesia dalam pemberitan surat kabar Indonesia. Selain itu, juga bermanfaat sebagai dasar penafsiran nilai-nilai ideologis yang mendasari perspektif pelaporan berita dalam surat kabar Indonesia.

2.4.1 Hubungan Pers, Masyarakat, dan Negara

McQuail (1987) menjelaskan bahwa terdapat enam ragam sistem normatif media massa, dalam konteks ini dibatasi hanya pers, yang dapat diterapkan dalam suatu negara. Keenam sistem tersebut adalah (1) sistem pers otoriter, (2) sistem pers bebas, (3) sistem pers tanggung jawab sosial, (4) sistem pers Soviet, (5) sistem pers pembangunan, dan (6) sistem pers demokratis partisipan. Sistem pertama hingga sistem keempat merupakan pendapat dari Siebert, Peterson, dan Schramm (1956), sedangkan dua sistem terakhir merupakan tambahan dari McQuail (1987).

Sistem pers otoriter, yang lazim dipraktekkan dalam masyarakat prademokrasi atau masyarakat yang masih didominasi oleh kekuasaan otoriter ini, menurut McQuail (1987) memiliki karakteristik sebagai berikut ini. Pers tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak atau mengganggu wewenang yang berlaku. Itu berarti pers harus selalu tunduk pada pemegang otoritas kekuasaan. Selain itu, pers harus menghindari segala perbuatan yang menentang nilai-nilai moral dan politik dari kalangan mayoritas. Dalam kaitan dengan ini, pemegang otoritas kekuasaan dapat melakukan penyensoran untuk menegakkan prinsip-prinsip yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk di dalamnya pemegang otoritas dan kebijakannya, dapat dipandang sebagai tindak pidana. Singkatnya, dalam

sistem ini kalangan jurnalis dan profesional media lainnya tidak memiliki independensi dalam organisasi medianya.

Dalam sistem yang kedua, yakni sistem pers bebas, kehidupan pers sangat berbeda jauh. Publikasi dilakukan secara bebas dan tidak ada penyensoran dari pihak ketiga. Situasi ini didukung oleh kegiatan penerbitan dan pendistribusiannya yang terbuka bagi siapa saja tanpa memerlukan izin dan lisensi dari penguasa. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik, yang berbeda dari kecaman terhadap pribadi, seyogyanya tidak dapat dipidana. Demikian juga dengan pengungkapan opini dan keyakinan pribadi, baik tentang "kesalahan" maupun "kebenaran" tidak dilarang, malahan justru dilindungi. Selain itu, tidak perlu ada kewajiban untuk mempublikasikan segala hal, tidak perlu ada pembatasan-pembatasan dalam pengiriman dan penerimaan "pesan". Dan terakhir, semua itu bermuara pada keotonomian jurnalis dalam organisasi medianya.

Dalam sistem yang ketiga, yakni pers tanggung jawab sosial, dasar pemikiran yang dipakai adalah sistem pers bebas ternyata telah gagal untuk memenuhi tujuan kebebasan pers serta tidak mampu melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat banyak. Prinsip yang dianut oleh sistem ini adalah pers sebaiknya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut perlu dipenuhi dengan menetapkan standar-standar profesional yang menyangkut keinformasian, kebenaran,

akurasi, objektivitas, dan keseimbangan. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, media— walaupun mengatur diri sendiri— sebaiknya sesuai kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku sehingga upaya-upaya yang menjurus pada tindak kejahatan, kekerasan, merusak tatanan sosial, dan penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas dapat dihindari. Implikasi lebih lanjut adalah pers hendaknya bersifat pluralistik dan merefleksikan kebinekaan masyarakat yang diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama untuk mengekspresikan berbagai sudut pandang serta memberikan hak jawab. Implikasi ini memberikan kepada masyarakat dan publik kesempatan untuk menuntut standar kinerja yang tinggi dari pers, termasuk di dalamnya upaya intervensi. Singkatnya adalah jurnalis dan kalangan profesional media lainnya memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, pihak majikan, dan pasar.

Dalam sistem yang keempat, yakni sistem pers soviet, pers harus melayani kepentingan dari kelas pekerja dan oleh karenanya harus dikontrol oleh kelas pekerja. Dalam hal ini kalangan swasta tidak dibenarkan memiliki media pers. Di samping itu, pers harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan cara melakukan upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan, pendidikan, penerangan, motivasi, mobilisasi, dan memberikan pemikiran dan pandangan mengenai masyarakat dan dunia yang sesuai dengan ajaran Marxisme dan Leninisme, serta tanggap terhadap kebutuhan.

dan keinginan khalayaknya. Apabila pers melakukan publikasi yang bersifat anti sosial, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum terhadap jurnalis dan kalangan profesional karena seharusnya mereka mendukung cita-cita masyarakat dan gerakan-gerakan progresif di dalam dan di luar negeri.

Sistem yang kelima adalah sistem pers pembangunan. Di dalam sistem ini, pers diharapkan menerima dan melaksanakan tugas-tugas positif pembangunan sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan. Kebebasan pers perlu dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan. Implikasi lebih lanjut adalah pers perlu memprioritaskan isi berita dan informasi mengenai kebudayaan, bahasa nasional, baik pada masyarakat sendiri maupun masyarakat negara lain yang memiliki kedekatan geografis, budaya dan politik. Dalam sistem ini, di samping ada kebebasan dan tanggung jawab yang melekat pada jurnalis dan pekerja media lainnya dalam tugasnya mengumpulkan dan menyebarkan informasi, negara demi kepentingan pembangunan berhak ikut campur atau mengeluarkan pembatasan dalam pengoperasian dan pengendalian pers, penyensoran, serta pemberian subsidi.

Sistem yang terakhir adalah sistem pers demokratis partisipan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberdayakan masyarakat secara lebih egaliter. Lahirnya sistem ini pada dasarnya sebagai reaksi terhadap pola

komersialisasi, monopoli pemilikan modal, dan sentralisme pada birokrasi lembaga-lembaga siaran publik. Prinsip yang dianut adalah setiap individu dan kelompok minoritas berhak untuk memperoleh akses terhadap pers dan berhak untuk dilayani sesuai kebutuhan mereka. Organisasi dan isi pers tidak perlu tunduk pada pengendalian birokrasi negara dan kekuasaan politik, pihak pemilik organisasi pers, kalangan profesional atau klien pers, tetapi lebih ditujukan pada kepentingan khalayaknya. Pada prinsipnya, komunikasi terlalu penting untuk hanya diserahkan kepada kalangan profesional dan penguasa lainnya, dan oleh karenanya organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, dan komunitas-komunitas lokal hendaknya memiliki pers sendiri yang berskala kecil, interaktif, dan partisipatif.

Secara umum dari keenam sistem pers yang dikemukakan oleh McQuail di atas, Sendjaja (1998) mengemukakan adanya suatu dilema yang dihadapi oleh semua pers di negara manapun dia berada. Pers akan berada di dalam situasi benturan dan tarik menarik berbagai kepentingan. Kelangsungan hidup suatu pers, termasuk didalamnya surat kabar, tergantung pada bagaimana dia menempatkan diri dan memelihara keseimbangan di antara berbagai benturan dan tarik-menarik kepentingan-kepentingan yang ada.

Kepentingan yang pertama adalah kepentingan nasional, negara, atau bangsa yang dirumuskan oleh kalangan pembuat kebijakan. Kepentingan tersebut akan menentukan mekanisme operasionalisme media massa dalam

menjalankan fungsi dan tujuannya. Misalnya, apabila pihak pemerintah menginginkan agar pers berfungsi sebagai sarana penjaga kestabilan politik, integritas bangsa dan negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa, maka pihak pemerintah akan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk “memaksa” pers menjalankan fungsi dan tujuan pemerintah tersebut.

Kepentingan yang kedua adalah kepentingan masyarakat umum. Pers dihadapkan pada tuntutan masyarakat umum akan fungsinya sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, sebagai sarana pengetahuan dan budaya, dan sekaligus sebagai alat kontrol sosial atau *watchdog*, serta agen perubahan.

Kepentingan yang ketiga adalah kepentingan para pengusaha dan pemilik modal. Bagi mereka, pers adalah sarana bisnis. Oleh karena itu, mereka berharap pers adalah “mesin pencetak uang” sebanyak-banyaknya sehingga modal mereka kembali dan sekaligus meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kepentingan yang keempat adalah kepentingan para komunikator massa khususnya jurnalis dan karyawan pers lainnya. Yang mereka kejar adalah kepuasan profesi. Kepuasan profesi dalam hal ini berkaitan dengan idealisme pers seperti informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya yang didasari oleh keyakinan bahwa “fakta itu suci”.

2.4.2 Kondisi Pers Indonesia pada Era Orde Baru

Pers Indonesia pada era Orde Baru, seperti yang dikemukakan oleh Krisnawan (1997) dan Ali (1997), juga mengalami dilema benturan berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan itu adalah kepentingan masyarakat dan idealisme pers, kepentingan pemilik dan pengelola pers atau *profit oriented*, dan kepentingan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Orde Baru. Di satu pihak, pers diidealkan berperan sebagai alat kontrol sosial dan saluran suara hati rakyat sehingga pers harus memberikan kepada publik apa yang harus mereka ketahui berkaitan dengan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di Indonesia. Tetapi di pihak lain, pers sebagai suatu lembaga industri juga membutuhkan kelangsungan hidup, mendapatkan keuntungan finansial untuk dapat mengembalikan modal pinjaman, mensejahterakan jurnalis dan karyawan pers lainnya, serta mengembangkan lembaga industrinya. Sehingga sering karena alasan *profit oriented*, pers cenderung memprioritaskan pembentukan selera publik daripada apa yang seharusnya diketahui publik. Selain kepentingan para pemilik modal itu, pers Indonesia juga menghadapi kuatnya hegemoni pemerintah dalam kehidupan pers di Indonesia. Pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan, serta mekanisme formal untuk melakukan intervensi berbagai kepentingan ideologis dalam kehidupan pers di Indonesia.

Dalam prakteknya, dominasi kepentingan dan hegemoni pemerintahlah yang cenderung lebih dominan mewarnai kehidupan pers Indonesia pada era

Orde Baru daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan RI, sejak awal memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) kepada semua surat kabar yang akan diterbitkan. Surat kabar yang para pengelolanya dipandang “membahayakan” kehidupan pers nasional, misalnya Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis (lihat Wibisono, 1993), tidak akan mungkin mendapatkan SIUPP karena telah dua kali dibredel pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sementara itu, surat kabar yang para pengelolanya tidak atau bukan berprofesi sebagai wartawan, yang dipandang tidak akan membahayakan atau mengarahkan surat kabarnya menjadi *watchdog* dan hanya berorientasi pada bisnis, justru mendapat kemudahan untuk mendapatkan SIUPP. Fenomena perizinan yang seperti ini menciptakan diskriminasi dan “pemasungan” dalam dunia pers Indonesia.

Selain masalah pemberian perizinan ini, ancaman pencabutan, pembredelan, atau bahasa yang lebih halus “pembatalan” SIUPP dari pihak pemerintah adalah bentuk lain dari dominasi dan hegemoni pemerintah dalam kehidupan pers Orde Baru. Ancaman pencabutan SIUPP akan diberlakukan apabila pers dinilai –secara sepihak dan subjektif oleh Pemerintah—telah meresahkan masyarakat dan dianggap mengganggu stabilitas nasional. Pencabutan SIUPP ini menurut Hutabarat (1993:462) membawa makna “tamatlah investasi miliaran rupiah, dan sia-sialah betapa pun canggih dan

piawinya profesionalisme, serta betapa pun hebatnya etos kerja keras". Tercatat setelah "Peristiwa Malari 1974" hingga tahun 1994 beberapa media cetak besar seperti *Sinar Harapan*, *Prioritas*, *Tempo*, *Editor*, dan *DeTik* mengalami pencabutan SIUPP. Sejak peristiwa Malari tahun 1974 Indonesia, menurut Wibisono (1993), menganut garis keras terhadap pers dengan konsekuensi dominasi eksekutif dan birokrasi, yang sekaligus berdwifungsi juga menjadi hakim yang dapat mencabut SIUPP dan membredel pers secara sepihak, tanpa melalui proses hukum atau pengadilan.

Kuatnya pemaksaan kepentingan dan hegemoni negara, dalam hal ini Pemerintahan orde Baru, memang didukung oleh kenyataan kuatnya negara yang tidak tertandingi oleh kekuatan-kekuatan infrastruktur sosial-politik yang ada di masyarakat. Partai-partai politik di luar Golkar, yakni PPP dan PDI, serta keiompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, tokoh-tokoh politik, kaum intelektual, dan mahasiswa hanya mampu berperan sebatas sebagai pelengkap kekuasaan Golkar dan Pemerintahan Orde Baru. Akibatnya adalah Pemerintahan Orde Baru dapat dengan mudah mengendalikan kehidupan sosial politik dan tanpa kecuali menentukan "*mainstream*" komunikasi politik yang ada di masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, menurut Mallarangeng (1992) jalan yang aman bagi pers untuk tetap dapat bertahan adalah mengembangkan sikap akomodatif terhadap arus besar yang dikembangkan oleh rezim yang berkuasa. Pers Indonesia dengan

terpaksa harus mengurangi fungsi hakikinya sebagai alat kontrol sosial dan media penyalur aspirasi dari bawah, serta menjalani kehidupan pers yang kompromistik atau pragmatis dalam hal politik dan ideologi.

Akibat selanjutnya dari situasi dan keadaan kompromistik, serta sikap pragmatis ini menyebabkan pers Indonesia cenderung "rendah diri" dalam pengertian takut dan segan kepada pemerintah, serta melakukan apa yang dikemukakan oleh De Fleur dan Rokeach (1982) sebagai "*maintaining the system's stability*". Pers Indonesia cenderung memiliki sikap pro keamanan atau pro *status quo*. Ini berarti apabila terjadi konflik secara terbuka antara rakyat dengan pemerintah, dalam hal ini rakyat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah, pers akan mengambil sikap "netral" dalam pengertian tidak akan membela kepentingan publik. Akan tetapi apabila sikap netral itu tidak dapat dipertahankan karena keadaan yang memaksa, pers cenderung akan mendukung pemerintah atau "dapat memahami kebijakan pemerintah". Sikap tidak berani membuka konflik secara terbuka kepada pemerintah ini, bahkan dalam bentuk konflik yang paling sederhana, misalnya kritik, hampir menjadi kecenderungan umum pers Indonesia era Orde Baru.

Menyikap kondisi seperti ini Mochtar Lubis (dalam Hutabarat, 1993:453) menyatakan bahwa "pada saat sekarang, surat kabar yang mau berfungsi sebagai pers bebas dan bertanggungjawab tidak bisa *survive*. Dan yang *survive* adalah surat kabar yang tidak bebas dan tidak melaksanakan

tanggung-jawabnya". Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rosihan Anwar (dalam Hutabarat, 1993:453) sebagai berikut "saya akan berbohong pada kalian, bila saya mengatakan ada kemerdekaan pers".

2.4.3 Pers Pancasila sebagai Paradigma Pers Indonesia Era Orde Baru

Pers menurut Oetomo (1993) berada dalam keseluruhan sistem masyarakat. Ia merupakan bagian atau subsistem dari sistem yang lebih besar, karena itu betapapun ia memiliki pengaruh pada masyarakat, ia sendiri juga dipengaruhi serta ditentukan posisi dan fungsinya oleh sistem masyarakat. Pers Indonesia dalam era Orde Baru juga mengalami fenomena yang sama. Pers Indonesia berada dalam ideologi dan pandangan kenegaraan, serta sistem politik Orde Baru, yakni Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yang dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru adalah pancasila yang ditafsirkan sedemikian rupa berdasarkan atas dua keyakinan yakni (1) paham "pembangunanisme" atau *developmentalism*, dan (2) paham dwi-fungsi ABRI (lihat, Mas'oed, 1994). Paduan dua paham ini kemudian mewarnai karakteristik Pers Indonesia yang dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru, yakni pers yang memposisikan dan memfungsikan dirinya sebagai pers pembangunan yang selalu mengamalkan Pancasila di berbagai aspek kegiatan atau kehidupan masyarakat termasuk pembangunan pers itu sendiri (lihat Sukarno, 1988). Selain itu, pers juga menjunjung tinggi stabilitas di segala bidang sebagai syarat mutlak suksesnya pembangunan nasional. Stabilitas yang merupakan

syarat mutlak jalannya pembangunan ini merupakan perwujudan keyakinan akan paham militerisme yang dianut oleh Pemerintahan Orde Baru.

Karakteristik Pers Pancasila sebagai Pers Pembangunan ini selaras dengan sistem media massa pembangunan yang menjadi model di banyak negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin (lihat McQuail, 1987).

Karakter-karakter itu adalah sebagai berikut ini.

- (1) Media sebaiknya menerima dan melaksanakan tugas-tugas positif pembangunan sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan;
- (2) Kebebasan media perlu dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan;
- (3) Isi media perlu memprioritaskan kebudayaan dan bahasa nasional;
- (4) Media perlu memprioritaskan isi berita dan informasi kepada negara-negara berkembang lainnya yang memiliki kedekatan geografis, budaya, atau politik;
- (5) Wartawan dan pekerja media lainnya mempunyai tanggungjawab dan kebebasan dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi;
- (6) Demi kepentingan pembangunan, negara berhak ikut campur atau mengeluarkan pembatasan-pembatasan, dan pengoperasian media, melakukan penyensoran, dan memberikan subsidi dan pengendalian secara langsung dapat dibenarkan.

Kemudian hubungan antara pers, masyarakat dan pemerintah yang dikembangkan dalam konteks Pers Pancasila dan Pers Pembangunan adalah hubungan seiring, *partnership*, dan interaksi positif (lihat Oetomo, 1987). Seiring dalam pengertian bahwa kinerja pers dalam melaksanakan fungsi jurnalismenya tidak bertentangan dengan segala kebijakan pemerintah, khususnya semua kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan. Oleh karena itu, pers dalam mengkomunikasikan berita kepada masyarakat perlu menempatkan pemerintah sebagai sumber pokok pemberitaan pers.

Hubungan *partnership* adalah hubungan yang dibawa oleh kepentingan bersama antara pers dan pemerintah untuk menyampaikan dan menerima pesan, untuk menyampaikan dan menerima kontrol dalam semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Kebersamaan ini tidak meniadakan atau mengurangi posisi dan peran masing-masing tetapi menjadi sumber kreativitas untuk menemukan kompromi-kompromi yang serasi. Sudomo, selaku Kopkamtib pada masa Orde Baru, (lihat Hutabarat, 1993) menyatakan bahwa hubungan pers dan pemerintah itu sebagai hubungan keluarga besar. Implikasi dari adanya hubungan keluarga ini adalah pers harus memiliki kesadaran terhadap tanggungjawabnya atas dampak yang diakibatkan oleh pemberitaannya pada masyarakat.

Hubungan interaksi positif adalah hubungan yang dikembangkan antara pers dan pemerintah setelah “peristiwa Malari 1974”. Dalam interaksi ini, pers

tidak menempatkan diri secara ekstrim pada posisi-posisi sebagai alat pemerintah dan karena itu "tunduk" atau bersikap *untergeordnet* kepada pemerintah, sehingga dengan sendirinya tiada kebebasan dalam sistem interaksi ini. Namun, di sisi yang lain, pers juga bukan melulu hanya berfungsi sebagai *watch dog* yang harus selalu curiga dan bermusuhan dengan pemerintah. Hubungan interaksi positif ini membawa makna hubungan timbal balik, hubungan saling menghargai, hubungan yang didasarkan atas *check and balance*.

Oetomo (1987) melihat bahwa hubungan antara pers, masyarakat, dan pemerintah yang seiring, *partnership*, dan berinteraksi positif ini dalam konteks perkembangan sistem Demokrasi Pancasila adalah hubungan yang diidealkan. Namun dalam prakteknya, menilik perkembangan infrastruktur masyarakat termasuk organisasi-organisasi politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan tokoh-tokoh politik, serta kaum intelektual belum mampu menandingi atau berkedudukan sejajar dengan pemerintah, maka Pemerintah Orde Baru dalam sistem Demokrasi Pancasila tampil menjadi kekuatan yang paling dominan melebihi kekuatan-kekuatan lain manapun di Indonesia, tidak terkecuali pers Indonesia. Akibatnya adalah Pemerintahan Orde Baru dapat dengan mudah mengendalikan kehidupan sosial politik dan tanpa kecualli menentukan "*mainstream*" komunikasi politik yang ada di masyarakat.

Panuju (1997) melihat keadaan sistem sosial politik Indonesia pada era Orde baru ini didasari oleh beberapa hal berikut ini. Pertama, nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat Jawa sangat dominan dalam pemikiran politik Indonesia. Salah satunya adalah nilai-nilai keseimbangan (*equilibrium*). Sesuai dengan pemikiran politik Indonesia, bahwa tujuan mendasar dari proses kehidupan, termasuk kehidupan pers, adalah mencapai derajat keseimbangan yang mantap. Karena itulah di dalam wacana pemikiran komunikasi politik Indonesia, termasuk kehidupan persnya, dikenal konsep-konsep politik seperti *andap asor*, *teposeliro*, *musyawarah mufakat*, *mikul duwur mendem jero*, *tego larane ora tega patine*, dan sebagainya. Konsekuensinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan konflik, persaingan, oposisi, apalagi konfrontasi, dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis dan harus di jauhi.

Kedua, masyarakat Indonesia masih bersifat paternalistik, sehingga segala sesuatu yang menyangkut inisiatif, tauladan, dan kewenangan harus dimulai dari elite politik. Elit politik di Indonesia dalam hal ini adalah Golkar dan Militer yang menjadi penopang utama Pemerintahan Orde Baru. Tanpa ada kehendak baik yang datang dari atas dari kedua elit politik ini, maka segala inisiatif dan kebijakan-kebijakan untuk perubahan bagi kehidupan sosial politik masyarakat tidak akan pernah dapat terealisasi. Sistem komunikasi politik model *top down* ini muncul selama masa Orde Baru sebagai perwujudan dari nilai-nilai paternalistik yang tetap dipelihara dan bahkan dikembangkan oleh

rezim yang berkuasa. Tentang fenomena ini, Siregar seperti yang dikemukakan oleh Heryanto, dkk (1994) menyatakan bahwa pers Indonesia adalah alat politik yang datang dari atas. Pers Indonesia menurut Masoed (1994) dalam hal ini berada dalam "Negara Kekeluargaan" sehingga pers bersama masyarakat lebih dianalogikan sebagai anak yang harus selalu taat dan patuh pada apa yang ditentukan oleh ayah, yakni pemerintah.

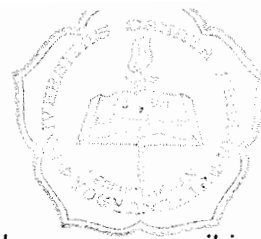
Ketiga, pola ungkap atau ekspresi komunikasi masyarakat, termasuk pers, terpolarisasi antara di satu pihak mereka yang mengidealkan cara ungkap implisit, tersamar, pemakaian bentuk-bentuk tidak langsung, dan pemakaian eufimisme, dan di pihak lain mereka yang mengidealkan cara ungkap eksplisit, jelas, dan pemakaian bentuk-bentuk langsung. Dalam komunikasi politik era Orde Baru, termasuk kehidupan pers, pola yang pertama inilah yang cenderung digunakan. Sebagai ilustrasi misalnya, kebijakan untuk melarang warga negara yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan G. 30 S/PKI untuk berpolitik, pemerintah menerapkan aturan "bersih lingkungan". Penahanan terhadap tokoh-tokoh politik yang kritis diistilahkan oleh pemerintah sebagai "diamankan". Kebijakan kenaikan harga oleh pemerintah dinyatakan sebagai "penyesuaian". Pemakaian istilah-istilah yang cenderung menyamarkan, mengurangi bobot atau penghalusan, dan sebagainya itu, merupakan kekhasan pola ungkap yang dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru sebagai realisasi nilai-nilai budaya Jawa seperti:

ngono yo ngono ning ojo ngono (begitu ya begitu tetapi jangan begitu), dan *enthuk iwake ning ojo nganti buthek banyune* (dapat ikannya tetapi tidak keruh airnya). Nilai-nilai seperti ini mencerminkan sikap tidak berani berterus terang terutama pada atasan dan orang tua, serta pihak-pihak yang berkuasa.

2.4.4 Paradigma Pers Indonesia Pada Akhir Era Orde Baru

Sejak bulan Maret hingga Mei 1998, dan mungkin akan berlangsung terus, keadaan pers Indonesia cenderung mengalami perubahan dari pers pembangunan, pers 'penjaga stabilitas' atau *pro status quo* menjadi pers yang membangun kesadaran kolektif rakyat untuk mensikapi realitas sosial politik yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Perubahan paradigma ini terkait dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di Indonesia secara radikal. Diawali dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, serta maraknya "Gerakan Mahasiswa Indonesia" dalam menuntut reformasi yang mencapai titik puncaknya pada bulan Mei 1998 ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Pada akhir era Orde Baru ini pers Indonesia menunjukkan fenomena perspektif yang kuat. Perbedaan sudut pandang antara "surat kabar Pemerintah" dan surat kabar independen dalam pelaporan suatu peristiwa kepada masyarakat cenderung meningkat. Fenomena ini, meminjam ungkapan Pabotinggi (1994:74), menunjukkan adanya keberanian dalam "usaha



penyebaran informasi dan kebenaran, pengembangan pemikiran kritis, demokratisasi dan pendidikan politik rakyat” oleh pers Indonesia.

Pers Indonesia mulai berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Ungkapan atau ekspresi yang digunakan oleh pers Indonesia tidak lagi tersamar dan menggunakan bentuk-bentuk tidak langsung, ataupun eufemisme tetapi tegas, lugas, dan menggunakan bentuk-bentuk langsung. Kritik atau bahkan konflik terbuka dengan Pemerintah Orde Baru menjadi hal yang biasa. Kontrol dan upaya pemerintah dalam menekan kehidupan pers Indonesia dan media lainnya dengan kebijakan *TV Pool* menjadi tidak efektif lagi. Bahkan ketika banyak pers yang terancam bubar karena krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ditambah dengan mahalannya harga kertas koran serta berkurangnya pendapatan karena menurunnya para pemasang iklan, pers Indonesia tetap menyuarakan tuntutan reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Ideologi pembangunisme dan stabilitas yang selama 24 tahunan, mulai sejak Peristiwa Malari 1974, telah menjadi ideologi pers Indonesia secara cepat ditinggalkan.

Pola-pola lama dalam Pers Orde Baru seperti menjaga keseimbangan, menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan pola komunikasi yang bergaya *top down*, mulai diganti dengan ideologi baru yakni pers yang membangun kesadaran kolektif rakyat, pers yang menyuarakan aspirasi rakyat, pers yang bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dan

mengarah pada pers yang bergaya *bottom up*. Suasana baru dalam pers Indonesia pada akhir era Orde Baru, yakni antara bulan Maret hingga bulan Mei 1998 ini, mirip sekali dengan kehidupan pers Indonesia pada awal Orde Baru, yakni antara tahun 1965-1967. Walaupun secara tegas belum menampakkan wujud sebagai pers liberal, atau pers tanggungjawab sosial, atau pers demokratik partisipan, paradigma baru dalam pers Indonesia mulai dibangun dengan beberapa karakteristik di atas.

2.5 Wacana Berita di dalam Surat Kabar

Berita adalah suatu bentuk pelaporan surat kabar tentang peristiwa, tindakan, pernyataan, atau masalah yang menarik perhatian orang, yang muncul dalam interaksi sosial masyarakat (lihat Campbell, dkk, 1961; Assegaff, 1991; dan LP3Y, 1996). Berita sebagai produk dari daya cipta atau daya kreativitas seorang jurnalis memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk-produk lain yang terdapat dalam surat kabar atau wacana jurnalistik, seperti tajuk rencana, surat pembaca, pojok, dan artikel di satu pihak, dan berbeda juga dengan wacana lain, seperti wacana literer, wacana akademik, wacana bisnis, dan wacana filosofik di pihak lain. Perbedan-perbedaan itu secara umum dapat berkaitan dengan isi, struktur wacananya, dan ragam bahasanya.

2.5.1 Isi Berita

Berita dapat dibedakan dengan tulisan-tulisan lain dalam surat kabar yang tergolong "halaman pendapat" atau *opinion page*, seperti tajuk rencana,

surat pembaca, pojok, artikel, maupun dengan tulisan yang berupa karangan khas atau *feature* (lihat, Assegaff, 1991). Perbedaan yang prinsip antara tulisan-tulisan ini adalah dalam hal isinya. Isi berita lebih menekankan pada fakta terjadinya suatu peristiwa di masyarakat, yang secara jelas disajikan dengan mengikuti formula apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana, sementara tulisan-tulisan pada halaman pendapat lebih menekankan pada segi penyajian opini.

Tajuk rencana, misalnya, isinya lebih membawakan pandangan dan sikap surat kabar atau organisasi surat kabar itu karena memang ditulis oleh pemimpin redaksi atau redaktur-redaktur senior yang mengerti visi dan misi surat kabar tersebut. Pada zaman Orde Baru, surat kabar *Suara Karya* tentunya membawakan pendapat dan pikiran Golongan Karya (lihat, Assegaff, 1991:64) karena memang *Suara Karya* diterbitkan oleh para kader Golkar dengan tujuan untuk menyebarluaskan pandangan, gagasan, dan cita-cita Golkar. Demikian juga dengan surat kabar *Angkatan Bersenjata*, tajuk rencananya tentu menyajikan pemikiran dan sikap dari militer Indonesia, dalam hal ini Angkatan Darat (AD), terhadap fenomena apa saja yang berkembang di masyarakat. Tujuan lebih lanjut dari penyajian pandangan dan sikap surat kabar ini antara lain adalah menjelaskan berita, menjelaskan latar belakang, meramalkan, atau menyampaikan pertimbangan moral pada para pembaca. Dan dalam penyajiannya, tajuk rencana dapat mengambil salah satu

atau keseluruhan peran dalam hal menjelaskan, meyakinkan, atau menilai fenomena yang mendapat perhatian itu.

Hampir serupa dengan tajuk rencana, surat pembaca juga menyajikan pendapat, sikap, kesan, pesan, harapan, kritik, saran dalam kaitannya dengan kepentingan umum maupun pribadi, yang ditulis oleh pembaca orang per orang maupun oleh lembaga atau organisasi. Surat pembaca biasanya dipicu oleh adanya peristiwa yang dapat dianggap sebagai (1) masalah yang merugikan sehingga melahirkan ketidakpuasan, kritik, saran, dan harapan, atau (2) masalah yang menguntungkan sehingga melahirkan pujian, kesan, dan penghargaan. Isi yang seperti ini tentu sangat berbeda dengan isi tajuk rencana, apalagi dengan berita.

Perbedaan yang mencolok antara berita dengan halaman pendapat terlihat dalam tulisan pojok. Tulisan ini memiliki kekhasan karena kesingkatannya, bahkan kadang hanya satu atau dua kalimat, sifat kelangsungannya dengan tanpa terlalu banyak kata-kata penghias, tapi lugas, dan terakhir sifat kritik dan sindirannya. Tulisan pojok ini pada intinya adalah sentilan yang juga mencerminkan sikap kolumnisnya dalam wujud yang paling singkat.

Di samping dengan ketiga tulisan di atas, berita juga berbeda dengan artikel. Wolseley (dalam Mappatoto, 1993) mendefinisikan artikel sebagai suatu karangan faktual tentang sesuatu soal secara lengkap, yang panjangnya tak tentu, untuk di muat di surat kabar, dan sebagainya, dengan tujuan

menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi berita hanya menyajikan informasi tentang fakta dan interpretasi terhadap fakta itu dan tidak menyajikan gagasan, apalagi bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kalaupun di dalam berita ada gagasan, gagasan itu berasal dari tokoh atau sumber berita yang dilaporkan dan bukan dari wartawan itu sendiri.

Dan terakhir, berita berbeda dengan *feature* atau karangan khas. Di dalam *feature* unsur 5 W dan 1 H, yang merupakan ciri khas berita, diabaikan. Selain itu, *feature* menyajikan isi tulisan yang sifatnya enteng dan memberi hiburan. Perbedaan lebih lanjut antara berita dan *feature* berkaitan dengan masalah ketergantungan waktu. Dibandingkan dengan berita, *feature* tidak terikat waktu sehingga tulisan *feature* itu dapat dibaca kapan saja dan tetap aktual, sebaliknya berita memiliki karakteristik aktualitas tinggi. Artinya berita itu dilaporkan dengan selang waktu yang tidak terlalu lama dengan peristiwanya itu sendiri.

2.5.2 Struktur Berita

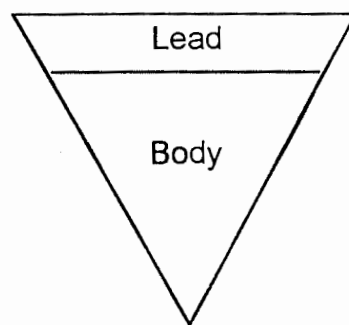
Berita sebagai suatu tulisan yang disajikan dalam surat kabar tentang peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat adalah suatu bentuk tulisan yang memiliki struktur tersendiri, unik, dan berbeda dengan struktur tulisan lainnya, misalnya editorial dan artikel. Struktur tulisan berita dikenal dengan istilah "piramida terbalik". Piramida terbalik menggambarkan bangunan-bangunan

informasi dalam berita yang tersusun atas *lead* atau teras berita, dan *body* atau tubuh berita (lihat Assegaff, 1991; dan Koesworo, dkk, 1993).

Dalam struktur piramida terbalik, bagian paling atas adalah *lead* atau teras berita yang terdiri atas satu paragraf. Pada bagian ini disajikan pengantar berita yang memberikan inti substansi berita dan gambaran umum situasi berita. Bagian ini dianggap sebagai bagian paling penting karena sifatnya yang ingin menonjolkan semua unsur pokok dari peristiwa yang dilaporkan namun secara singkat. Oleh karena itu, pada bagian ini idealnya harus bisa memuat semua komponen 5W dan 1 H, yakni *apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana*.

Bagian berikutnya adalah *body* atau tubuh berita. Bagian ini merupakan rincian lebih lanjut yang memuat semua unsur berita yang sudah dikemukakan dalam *lead*. Selain itu, juga mengungkapkan secara lengkap dan bertahap unsur-unsur *bagaimana* dan *mengapa* yang tidak mungkin secara tuntas disajikan dalam *lead*. Sebagai analogi, apabila *lead* merupakan janji, maka *body* merupakan pemenuhan akan janji itu. Lebih lanjut, apabila dalam *lead* para pembaca mendapatkan informasi mendasar tentang realitas yang menimbulkan sejumlah pertanyaan baru dalam benak para pembaca, maka isi berita dalam *body* harus memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Apabila digambarkan, maka bentuk piramida terbalik untuk struktur berita adalah seperti berikut ini.



Struktur berita yang seperti ini memiliki beberapa keuntungan, baik bagi pembaca berita maupun bagi para redaktur yang mengedit berita itu. Pertama, dengan adanya bagian *lead* yang merupakan ringkasan keseluruhan berita, para pembaca yang ingin mengetahui berita secara singkat dan cepat cukup hanya membaca bagian ini dan sudah dapat memperoleh gambaran umum dari keseluruhan peristiwa yang diberitakan. Kedua, bagi para redaktur yang bertugas mengedit dan menata berita ini dalam kolom-kolom yang tersedia, apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan keterbatasan tempat, maka sebagian isi *body* berita, terutama yang letaknya ada pada bagian akhir, dapat dipangkas atau dihilangkan. Ini dapat dilakukan mengingat informasi yang terdapat di dalam *body* berita makin ke bawah makin kurang penting nilainya. Singkatnya, piramida terbalik merupakan struktur penulisan berita yang kompromistis dengan sifat khalayak pembaca yang ingin mendapat informasi secara cepat dalam waktu singkat dan teknis editing yang terikat oleh keterbatasan ruang dalam surat kabar.

2.5.3 Ragam Bahasa Berita

Bahasa berita adalah bagian dari ragam bahasa jurnalistik yang memiliki fungsi sebagai penyampai informasi faktual kepada para pembaca. Informasi faktual yang dimaksudkan adalah informasi tentang peristiwa aktual atau baru (*timeliness*), peristiwa yang dekat (*proximity*) dengan persoalan pembaca, peristiwa penting (*importance*) yang berkenaan dengan orang besar dan berpengaruh, yang terjadi di masyarakat yang dianggap memiliki nilai oleh surat kabar yang bersangkutan. Dari sisi sebagai penyampai informasi faktual, bahasa berita termasuk dalam kategori bahasa transaksional menurut Brown dan Yule (1983) yang memiliki karakteristik lebih berorientasi pada penyampaian pesan secara efektif.

Karakteristik bahasa berita yang seperti ini memiliki perbedaan, misalnya, dengan ragam bahasa akademik. Perbedaan utama berkaitan dengan penggunaan kedua ragam bahasa tersebut. Bahasa akademik menurut Sudaryanto (1997) digunakan di lingkungan "manusia kampus perguruan tinggi" atau kaum akademisi yang keberadaannya di sana demi menimba ilmu, mengembangkan ilmu, dan memanfaatkan ilmu. Ragam ini digunakan dalam rangka pembicaraan ilmiah dan semata-mata ditujukan kepada lingkungan ahli atau peminat sesuatu bidang ilmu sehingga bahasa yang digunakan haruslah bahasa ilmiah, yakni bahasa yang pemakaian kata-kata, ungkapan-ungkapan, dan cara-cara penuturannya tepat dan seksama,

lugas, objektif, rasional dalam mengungkapkan kebenaran, serta memiliki daya abstraksi untuk konsep-konsep dan teori-teori. Selain itu, bahasa ragam akademik adalah bahasa ilmu yang bersifat pemikiran, denotatif, bertujuan pada korespondensi satu lawan satu antara tanda dan referensinya. Sementara itu, ragam bahasa berita digunakan oleh para jurnalis yang keberadaannya di sana untuk menyajikan suatu informasi faktual yang ditujukan kepada masyarakat pembaca yang heterogen baik dari segi tingkat pendidikan, disiplin ilmunya, maupun motif dan minat dalam membaca tulisan berita tersebut. Bagi mereka yang penting adalah mendapat informasi sehingga bahasa berita haruslah sederhana, mudah dipahami, singkat, padat, tidak bertele-tele, dan komunikatif.

Selain berbeda dengan bahasa akademik, bahasa berita berbeda juga dengan bahasa ragam bisnis. Bahasa ragam bisnis adalah bahasa yang digunakan oleh para usahawan untuk meyakinkan orang lain, dalam hal ini konsumen, agar mereka tersugesti dan tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu, misalnya membeli produk yang ditawarkannya. Bahasa ragam bisnis, misalnya bahasa iklan, memiliki karakter melebih-lebihkan produk yang ditawarkan dalam wujud bahasa hiperbola, karena dengan cara ini diharapkan konsumen akan terpengaruh dan tertarik untuk membeli produknya itu. Dari segi ini, jelas bahasa berita berbeda dengan bahasa ragam bisnis. Bahasa berita tidak diarahkan untuk mensugesti pembacanya agar melakukan sesuatu

seperti yang diisyaratkan dalam laporannya. Bahasa berita hanya menyajikan fakta aktual yang perlu diketahui oleh masyarakat pembacanya.

Demikian juga dengan bahasa literer, bahasa ragam ini memiliki kekhasan yang berbeda dengan bahasa berita. Bahasa literer menonjol dalam hal menyajikan daya kejut dan daya imajinasi pengarangnya. Bahasa literer bersifat emosional, cenderung mengandung ambiguitas, simbolisme bunyi ditekankan, konotatif, dan memiliki efek estetis (lihat Pradopo, 1997). Sementara itu, bahasa berita harus lugas, tidak emosional, tidak konotatif karena tujuannya adalah kejelasan informasi yang disajikan.

Dengan bahasa ragam filsafat, bahasa berita sangat berbeda. Bahasa yang dihasilkan para filsuf ini merupakan medium penyampai hasil renungan kontemplatif yang sangat sulit dipahami oleh orang awam karena sifat abstraksinya yang sangat tinggi, bahkan melebihi abstraksi yang dibawakan oleh bahasa akademik. Hal ini disebabkan bahasa ragam filsafat tidak biasa digunakan dalam keseharian, seperti halnya bahasa berita yang justru digunakan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi dalam keseharian.

2.6 Kerangka Berpikir

Setelah mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan (1) bahasa sebagai realitas sosial, (2) hubungan bahasa dan konteks situasi maupun budaya, (3) hubungan bahasa, ideologi, dan kekuasaan, (4)

perspektif di dalam wacana, (5) wacana berita, dan (6) pers Indonesia pada masa Orde Baru dan akhir Orde Baru, peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai dasar untuk menganalisis masalah penelitian sebagai berikut.

1. Karena penelitian ini lebih berorientasi pada pemakaian bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang digunakan oleh beberapa surat kabar Indonesia dalam interaksi sosialnya dengan masyarakat pembaca, maka peneliti memakai dasar pemikiran dan pandangan dari Firth dan Halliday mengenai bahasa, bahasa sebagai alat semiotik sosial.
2. Penelitian ini menggunakan kerangka teori sosiopolitikolinguistik dan sosiopolitikopragmatik untuk mengungkap fenomena perspektif dalam kaitannya dengan ideologi dalam bahasa surat kabar. Kajian ini lazim dikenal dengan istilah *Critical Discourse Analysis*.
3. Dalam kajian ini digunakan perangkat analisis linguistik dan wacana serta konteks sosial institusional, budaya, dan ideologi untuk mengungkapkan dua hal, yakni (1) perspektif teks berita yang dilatarbelakangi oleh pengetahuan, gagasan, dan keyakinan ideologis, dan (2) manifestasi perspektif pemberitaan pada struktur wacana, kalimat/klausa, frase, dan kata. Kerangka teori ini terutama mengacu pada pemikiran-pemikiran Fairclough (1989;1995), Fowler (1986;1991), Lee (1992), Halliday (1985a;1985b), Brown Yule (1983), dan Van Dijk (1977).

4. Kajian perspektif dalam penelitian ini mengacu pada teori Renkema (1993) tentang *vision*, yakni teori sudut pandang yang memakai dasar sosiologi politik dipadukan dengan analisis linguistik kritis. Kajian ini tidak berbeda dengan kajian perspektif dalam bidang sastra yang dikenal dengan *fokalisasi*, dan bidang psikologi yang dikenal dengan *empati*.
5. Analisis terhadap fenomena-fenomena perspektif pada data sampai pengambilan kesimpulan mengenai kaidah-kaidah manifestasinya dilakukan dengan menggunakan pola yang diadaptasi dari model Kibrik (1977). Sementara, itu keseluruhan pengelolaan data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan, mengikuti cara yang diisyaratkan Miles dan Haberman (1994).

BAB III

Metodologi Penelitian

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang "*Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru ke dalam Bahasa*" ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didorong oleh beberapa sifat yang tampak dalam objek penelitian yang dikaji dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Pertama, objek penelitian yang dikaji adalah fenomena perspektif dalam bahasa berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, yakni antara bulan Maret-Mei 1998. Fenomena yang dikaji ini memiliki latar alami. Kealamiahannya itu tampak dari data penelitian yang berupa pemakaian bahasa Indonesia ragam jurnalistik para wartawan Indonesia dari berbagai surat kabar yang memberitakan kejadian-kejadian aktual yang terjadi di masyarakat, seperti yang terdapat dalam teks-teks berita. Teks-teks berita tersebut juga memiliki latar alami lain, seperti: (1) berada dalam era pers Orde Baru, dan (2) berada dalam konteks sosial-politik kejatuhan Pemerintahan Orde Baru.

Selain itu, objek penelitian yang berupa fenomena perspektif dalam teks-teks berita itu hanya dapat ditafsirkan oleh peneliti sendiri, dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci, hanya dengan memahami konteks sosial politik yang melingkupi teks-teks berita, konteks wartawan dan surat kabar yang membuat dan memuat teks berita, dan konteks ideologis yang menjadi visi dan misi surat kabar-surat kabar tersebut. Interaksi yang mendalam antara peneliti sendiri dengan teks-teks berita itu di satu pihak dan latar sosial politik yang melingkupi teks tersebut di pihak lain merupakan kunci untuk memahami fenomena manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru dalam bahasa.

Kedua, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan yang ingin dicapai adalah deskripsi atau perian tentang penggunaan bahasa Indonesia yang ada di dalam media surat kabar serta penjelasan faktor-faktor di luar bahasa yang mempengaruhi penggunaan bahasa tersebut. Secara rinci perian itu mengenai (1) perspektif yang muncul dalam pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, (2) manifestasi perspektif pemberitaan dalam strategi penyajian informasi pada teks berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, dan (3) manifestasi perspektif pemberitaan dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa pada teks berita surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru

Selain itu, berkaitan dengan tujuan penelitian, “makna” merupakan sesuatu yang esensial. Penelitian tentang fenomena perspektif pemberitaan ini tidak hanya berhenti pada penemuan strategi penyajian informasi dan bentuk-bentuk ekspresi bahasa (*the forms of linguistic expression*) yang dipergunakan sebagai penanda perspektif dalam surat kabar, melainkan lebih jauh lagi menemukan “makna” yang dibawa oleh bentuk-bentuk bahasa itu. “Makna” yang diharapkan harus ditafsirkan dari konteks terdekat dalam teks dan konteks ideologis yang mendasari terbentuknya perspektif dalam teks-teks berita tersebut.

Walaupun di dalam penelitian ini diacu berbagai teori perspektif yang relevan seperti yang dikemukakan oleh Fowler (1991), Lee (1992), Renkema (1993), dan Fairclough (1995), tetapi teori-teori ini tidak dimaksudkan sebagai kerangka dasar yang mutlak mengikat peneliti dalam kaitannya dengan pencarian data dan analisis terhadap data. Teori-teori ini dimanfaatkan sebagai bahan penjelas. Model ini dilakukan agar pencarian data dan analisisnya dapat mengarah atau mendekati model yang diusulkan oleh Glaser dan Strauss (1967) dan Bogdan dan Biklen (1982). Peneliti dalam hal ini tetap bersikap kritis terhadap data yang terkumpul dan terhadap berbagai teori perspektif yang ada karena peneliti menyadari sepenuhnya bahwa teori perspektif yang ada itu disusun berdasarkan data-data dari bahasa asing,

dalam hal ini bahasa Inggris. Karakteristik bahasa Indonesia, dan nilai-nilai budaya dan ideologis yang dimiliki oleh masyarakat pers Indonesia sangat berbeda dengan karakteristik bahasa Inggris dan nilai-nilai budaya dan ideologis yang dimiliki oleh masyarakat pers asing, seperti masyarakat Eropa dan Amerika.

Selain cara tersebut di atas, jalannya penelitian juga dilakukan dengan berorientasi pada proses daripada hasil. Penekanan pada proses penelitian ini terlihat dalam upaya untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan fenomena manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia dalam bahasa melalui suatu proses penyelidikan seperti yang tergambar dalam formula berikut ini.

$\text{Data}_1 \longrightarrow \text{Hipotesis}_1 \longrightarrow \text{D}_2 \longrightarrow \text{H}_2 \longrightarrow \dots \longrightarrow \text{Teori yang diharapkan}$

Formula ini diadaptasi dari model Kibrik (1977:51). Intinya adalah untuk menemukan teori perspektif pemberitaan yang diharapkan, langkah-langkah penelitian yang ditempuh peneliti melalui suatu proses panjang berkesinambungan. Langkah-langkah itu adalah menganalisis data 1, diikuti dengan pembuatan abstraksi atau hipotesis 1, lalu hipotesis 1 dihadapkan pada data 2, kemudian dilanjutkan dengan revisi hipotesis 1 menjadi hipotesis 2, hipotesis 2 dihadapkan pada data 3, dan dilanjutkan dengan revisi

hipotesis 2 menjadi hipotesis 3, dan begitu seterusnya sampai data terakhir dan hipotesis itu tidak mengalami revisi lagi. Proses pembuatan teori yang demikian ini memperlihatkan sifat penelitian yang lebih berorientasi pada proses daripada hasil.

Selain memiliki karakteristik penelitian kualitatif secara umum, penelitian ini juga memiliki karakteristik khusus sebagai penelitian analisis dokumen dan analisis wacana. Karakteristik yang pertama adalah sumber datanya berupa surat kabar. Dari surat kabar ini, hal yang ditelaah adalah teks-teks berita yang dimuat dalam surat kabar tersebut, khususnya berita sosial politik. Best (1977) menyebutkan bahwa telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen, baik tertulis atau tercetak dalam buku, surat, majalah, surat kabar, buletin, gambar, film, dan sebagainya adalah analisis dokumen. Karakteristik yang kedua adalah analisisnya yang tidak hanya terfokus pada tataran kalimat, tapi juga di atas kalimat. Penelitian ini menganalisis unit-unit bahasa yang terdapat dalam teks berita yang digunakan sebagai alat penanda perspektif. Dalam tindak analisisnya, penelitian ini memanfaatkan piranti-piranti dalam linguistik seperti semantik, sintaksis, dan pragmatik, serta temuan dalam cabang linguistik lain seperti sosiolinguistik. Karakteristik-karakteristik penelitian seperti ini oleh Kartomihardjo (1992:1) disebut sebagai karakteristik penelitian analisis wacana.

Namun demikian, penelitian analisis wacana ini apabila dilihat dari segi tingkat penjelasan (*explanation*) yang ingin dicapai, penelitian ini termasuk dalam penelitian "Analisis Wacana Kritis" atau *Critical Discourse Analysis* seperti yang dikembangkan oleh Fairclough (1989;1995). Penjelasan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penjelasan sampai tingkat *global*, yakni penjelasan yang didasarkan pada interpretasi dalam tingkat institusi sosial dan pembentukan sosial, serta tidak hanya sekadar bersifat deskriptif saja, atau penjelasan berdasarkan interpretasi *lokal* atau konteks terdekat. Fairclough (1995) mengisyaratkan bahwa penjelasan berdasarkan interpretasi tingkat *global* adalah penjelasan yang tidak terbatas dalam konteks atau lingkungan teks itu, tetapi juga konteks budaya secara keseluruhan yang ada di belakang para pemeran serta, dan dibelakang jenis kegiatan yang mereka lakukan, yang menentukan signifikannya bagi budaya yang bersangkutan, baik itu bersifat praktis maupun bersifat ritual. Dalam penelitian ini, konteks budaya dan institusional yang diungkapkan adalah Pemerintahan Orde Baru yang sedang mengalami masa kejatuhan, pers Indonesia pada masa akhir era Orde Baru, dan nilai-nilai ideologis yang dianutnya.

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian

Untuk menjawab tujuan penelitian, seperti yang dinyatakan dalam 1.2.2, diperlukan data penelitian. Data penelitian dalam hal ini berupa objek

penelitian dan konteksnya. Objek penelitian dalam hal ini adalah fenomena perspektif pemberitaan yang terdapat dalam: (1) strategi penyajian informasi dalam wacana, dan (2) bentuk-bentuk ekspresi bahasa yang terdapat dalam kalimat/klausa, frase, dan kata. Dengan demikian wujud data penelitian ini ada dua, yakni wacana atau teks berita secara keseluruhan dan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks berita. Dari data pertama yang berupa teks berita dianalisis perspektif pemberitaan, dan manifestasi perspektif pemberitaan dalam strategi penyajian informasi yang terlihat dalam judul, tematisasinya, dan linearisasinya. Dari data kedua yang berupa kalimat-kalimat dalam teks berita dianalisis bentuk-bentuk ekspresi bahasa yang berpotensi mengungkapkan perspektif pemberitaan. Apabila diringkas, maka wujud data penelitian ini seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1.: Wujud Data Penelitian

Data	Wujud Data	Objek Penelitian
1.	teks berita	• Perspektif pemberitaan dalam teks
2.	teks berita, paragraf, kalimat, klausa	• manifestasi perspektif pemberitaan dalam strategi penyajian informasi
3.	kalimat, klausa, kata	• manifestasi perspektif pemberitaan dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa

Wujud data pertama berupa teks berita. Data teks berita dipergunakan untuk mengungkap objek penelitian yang berupa perspektif pemberitaan. Karakteristik teks berita yang dipergunakan sebagai data penelitian adalah

sebagai berikut ini. Pertama, teks berita ini berisi informasi *peristiwa sosial politik*. Subjek berita yang seperti ini cenderung memunculkan perbedaan perspektif di dalam pemberitaannya. Teks-teks berita yang berisi subjek lain di luar masalah itu tidak dijadikan data penelitian. Kedua, teks berita *peristiwa sosial politik* yang dipilih dimuat oleh beberapa atau semua surat kabar yang menjadi sumber data. Peristiwa atau kejadian yang dilaporkan oleh surat kabar-surat kabar itu terjadi dalam waktu dan tempat yang sama, yakni terjadi antara bulan Maret hingga Mei 1998 di seluruh Indonesia. Karakteristik data penelitian seperti ini mengacu pada model data yang digunakan oleh Trew (1979) pada dua surat kabar Inggris, yakni *The Guardian* dan *The Times*.

Wujud data kedua adalah teks berita, paragraf, kalimat, dan klausa. Data-data ini dipergunakan untuk mengungkap objek penelitian yang berupa manifestasi perspektif pemberitaan di dalam strategi penyajian informasi. Berikut ini secara rinci akan dijelaskan satu persatu. Data teks berita dipergunakan untuk mengungkapkan apakah perspektif pemberitaan ditandakan di dalam objek penelitian yang berupa struktur tematik berita. Selanjutnya, data paragraf digunakan untuk mengungkapkan apakah perspektif pemberitaan ditandakan di dalam objek penelitian yang berupa penahanan atau *staging*. Kemudian, data kalimat digunakan untuk mengungkapkan apakah perspektif pemberitaan ditandakan di dalam objek penelitian yang

berupa pilihan tematik berita. Dan yang terakhir, data klausa digunakan untuk mengungkapkan apakah perspektif pemberitaan ditandakan di dalam objek penelitian judul berita.

Wujud ketiga data penelitian adalah kalimat dan klausa. Data-data ini dipergunakan untuk mengungkap objek penelitian yang berupa manifestasi perspektif pemberitaan di dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa. Data kalimat dan klausa ini disajikan untuk melihat kemungkinan apakah ketransitifan, nominalisasi, metafora, pilihan kata, dan lain-lain menandakan suatu perspektif tertentu atau tidak.

Surat kabar yang dipilih sebagai sumber data untuk data-data di atas ada dua jenis, yakni surat kabar yang berafiliasi atau menurut istilah Krisnawan (1997:vi) *lebih bersimpati*, pada Pemerintah Orde Baru dan surat kabar yang tidak berafiliasi pada Pemerintah Orde Baru. Surat kabar jenis yang pertama adalah surat kabar yang memiliki keterkaitan manajemennya dengan Pemerintahan Orde Baru, sementara surat kabar jenis kedua adalah surat kabar yang tidak memiliki hubungan manajemen dengan Pemerintahan Orde Baru.

Surat kabar jenis pertama yang diambil sebagai sumber data adalah surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan *Suara Karya* sedangkan surat kabar yang masuk jenis kedua adalah *Kompas* dan *Republika*. Satu argumen dapat

dikemukakan di sini berkaitan dengan penentuan surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan *Suara Karya* sebagai sumber data. Kedua surat kabar ini pada zaman Orde Baru lahir dari “ Pilar-pilar” penyangga Pemerintahan Orde Baru, yakni militer khususnya Angkatan Darat (AD) untuk surat kabar *Angkatan Bersenjata*, dan birokrasi, Korpri, serta berbagai ormas Golkar untuk surat kabar *Suara Karya*. Kedua surat kabar ini diterbitkan untuk menjaga keseimbangan informasi dan opini publik nasional menghadapi propaganda dari luar pemerintah. Dengan demikian, keduanya dapat dikategorikan sebagai surat kabar yang berafiliasi pada Pemerintah Orde Baru (lihat Naina, 1982; Wibisono 1993; Abar 1998).

Sementara itu, alasan untuk pemilihan surat kabar *Kompas* dan *Republika* adalah sebagai berikut ini. Kedua surat kabar ini diterbitkan bukan oleh organisasi di bawah organisasi massa Golkar sehingga tidak ada keterikatan organisatoris dengan Golkar dan Pemerintahan Orde Baru. Surat kabar *Kompas* adalah surat kabar independen yang berada di bawah kelompok usaha Kompas Gramedia yang dimiliki oleh Yayasan Pers Katolik (lihat Aditjondro, 1991:23). Surat kabar *Republika* adalah surat kabar independen yang berada di bawah kelompok usaha PT Abdi Bangsa yang dimiliki oleh Yayasan Abdi Bangsa dan umat Muslim Indonesia (lihat Hutabarat, 1993). Karena kedua surat kabar ini tidak berafiliasi pada Golkar,

maka kedua surat kabar ini berbeda dengan surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan *Suara Karya* dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan pemerintah.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa surat kabar, membacanya, mengkajinya, dan menentukan bagian mana dari surat kabar itu yang memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai data penelitian. Secara rinci prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut ini. Pertama, peneliti mengumpulkan surat kabar-surat kabar sumber data, yakni *Angkatan Bersenjata*, *Suara Karya*, *Kompas*, dan *Republika*, khusus yang terbit pada bulan Maret hingga Mei 1998.

Kedua, peneliti membaca teks-teks berita dari keempat surat kabar tersebut secara cepat atau sekilas untuk melakukan seleksi teks berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam 3.2 di atas. Teks-teks berita yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berpotensi untuk dijadikan sebagai data penelitian.

Ketiga, peneliti mengklasifikasi teks-teks berita dari keempat surat kabar sumber data berdasarkan kesamaan peristiwa dilaporkan. Pada tahap ini peneliti menemukan sejumlah subjek berita yang dilaporkan tersebut.

Keempat, peneliti membaca teks-teks berita yang sudah diklasifikasi itu secara cermat dan kritis untuk menemukan data-data penelitian, baik berupa teks berita secara keseluruhan, paragraf-paragraf, kalimat dan klausa yang memperlihatkan objek penelitian seperti yang disajikan dalam Tabel 3.1.

Kelima, peneliti memasukkan data-data penelitian yang sudah ditemukan itu ke dalam file data di komputer. File data komputer terdiri atas tiga bagian, yakni (1) file data perspektif pemberitaan, (2) file data strategi penyajian informasi, dan (3) file data bentuk-bentuk ekspresi bahasa.

Keenam, peneliti menyusun satuan-satuan (*unityzing*) data pada masing-masing file data, dan memberi kode untuk masing-masing satuan data dengan kode seperti: (I) untuk data perspektif pemberitaan, (II) untuk data strategi penyajian informasi, dan (III) untuk data bentuk-bentuk ekspresi bahasa. Pada data perspektif pemberitaan, kode (I) masih dilengkapi lagi dengan subkode yang berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menandai urutan subjek berita yang dilaporkan. Pada masing-masing subkode ini masih dilengkapi dengan sub-subkode abjad a, b, c, dan d untuk menandai surat kabar sumber data. Apabila disajikan secara utuh, maka kode untuk data perspektif pemberitaan (I.1a.) dapat dibaca "data perspektif pemberitaan untuk subjek berita peristiwa *tragedi Trisakti* yang dilaporkan oleh surat kabar *Kompas*".

Pada data strategi penyajian informasi, kode (II) masih dilengkapi lagi dengan subkode yang berupa abjad kapital A, B,C,D. Abjad kapital A untuk menandai subdata judul berita, B untuk menandai sub data tema berita, C untuk menandai struktur tematik berita, dan D untuk menandai sub data penahapan atau *staging*. Subkode abjad kapital, A misalnya, masih dilengkapi lagi dengan sub-subkode yang berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menandai urutan subjek berita yang dilaporkan. Pada masing-masing sub-subkode ini masih dilengkapi dengan sub dari sub-subkode abjad a, b, c, dan d untuk menandai surat kabar sumber data. Apabila disajikan secara utuh, maka kode untuk data (II.C.1a.) dapat dibaca “data strategi penyajian informasi untuk aspek struktur tematik dengan subjek berita peristiwa *tragedi Trisakti* yang dilaporkan oleh surat kabar *Kompas*”.

Pada data bentuk-bentuk ekspresi bahasa, kode (III) masih dilengkapi lagi dengan subkode yang berupa abjad dalam kurung seperti (a), (b), ©, (d), (e), (f), dan (g). Abjad (a) untuk menandai data pilihan kata, (b) untuk menandai data metafora, © untuk menandai data modalitas, (d) untuk menandai data struktur informasi, (e) untuk menandai data struktur nominal, (f) untuk menandai data tindak tutur, dan (g) untuk menandai data ketransitifan. Subkode abjad, (a) misalnya, masih dilengkapi lagi dengan sub-subkode yang berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menandai urutan data. Apabila



disajikan secara utuh, maka kode untuk data (III.(g).1) dapat dibaca “data bentuk-bentuk ekspresi bahasa untuk aspek ketransitifan dengan nomor urut pertama”.

3.4 Analisis Data

Ketika data-data penelitian sedang dalam proses pengumpulan dalam file data dan baru sebagian data itu diberi kode, analisis data sudah dilakukan. Di dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Gambaran yang terjadi dalam proses analisis data ini adalah seperti yang terlihat dalam formula yang diadaptasi dari Kibrik (1977) dalam 3.1 (hal. 132). Prosedur analisis data yang seperti ini mengacu pada pendekatan Miles dan Haberman (1994).

3.4.1 Analisis Data Teks Berita Untuk Masalah Pertama

Analisis terhadap data teks berita dari keempat surat kabar itu dilakukan dengan mengacu pada teori analisis wacana yang dikemukakan oleh Brown dan Yule (1983) dan Kartomihardjo (1992). Dari analisis- analisis wacana ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis konteks yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan “makna” dari teks. Kartomiharjo lebih lanjut menyatakan bahwa dua atau tiga konteks yang menonjol dapat dipergunakan untuk menafsirkan teks dengan baik.

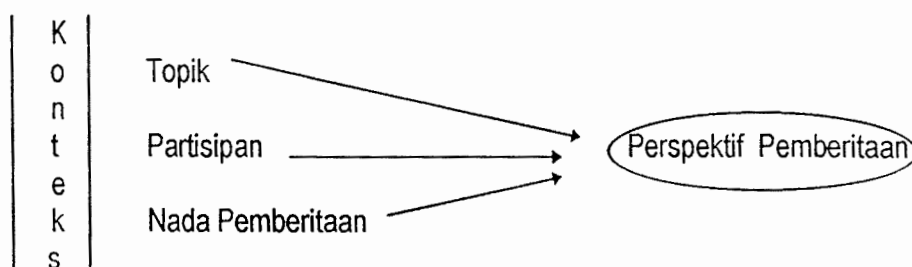
Dalam penelitian ini, perspektif yang terdapat dalam suatu teks juga diinterpretasikan dengan menggunakan tiga konteks yang ada, yakni *topik*, *partisipan*, dan *nada pemberitaan*. Rasionalnya adalah sebagai berikut ini. Pertama, banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan laporan berita oleh para wartawan. Wartawan dapat melaporkan peristiwa secara panjang lebar dengan beranjak dari satu titik pijakan awal. Titik pijakan awal itu atau *topik* untuk seterusnya mengikat dan mengarahkan isi keseluruhan yang dilaporkan. Dari sisi ini, keputusan memilih topik tertentu untuk diangkat sebagai titik tolak pemberitaan dan bukan topik lain dari suatu peristiwa yang terjadi berpotensi mencerminkan sikap, minat, dan motif dari wartawan yang pada akhirnya membentuk suatu perspektif pemberitaan.

Kedua, dalam suatu peristiwa atau kejadian selalu ada partisipan-partisipan yang terlibat di dalamnya. Keberadaan dan peran partisipan dalam suatu peristiwa dapat digunakan sebagai alat pelacak untuk menangkap perspektif pemberitaan. Keputusan untuk melaporkan berita dari sudut pandang partisipan tertentu dan bukan partisipan yang lainnya akan memperlihatkan sikap dan empati wartawan pada partisipan tersebut. Keputusan untuk menjadikan partisipan tertentu sebagai sumber informasi yang mendominasi pemberitaannya juga memperlihatkan keberpihakan wartawan pada partisipan tertentu.

Ketiga, dalam melaporkan suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan para partisipan, wartawan secara sadar atau tidak sadar memberikan penilaian-penilaian sebagai ekspresi dari apa yang diyakininya. Penilaian-penilaian tersebut terekspresikan dalam *nada pemberitaan* yang menurut Azwar (1988) dan Berkowitz (1972) dapat berwujud: (1) sikap mendukung atau memihak (*favorable*), seperti pujian, simpati, suka, menerima, setuju, (2) sikap tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*), seperti sinis, menolak, antipati, tidak suka, dan (3) sikap netral apabila sikap itu tidak memihak ataupun mendukung. Dalam konteks ini, nada pemberitaan merupakan representasi dari sikap wartawan yang didasari oleh ideologi atau pengetahuan, gagasan, dan keyakinan yang dimilikinya atau institusi surat kabarnya.

Apabila diskemakan, maka perspektif pemberitaan dapat diungkap dengan tiga indikator awal berikut ini.

Skema 3.1. Indikator Perspektif Pemberitaan



3.4.2 Analisis Data untuk Masalah Kedua

Data strategi penyajian informasi terdiri atas data judul berita, data pilihan tematik, data struktur tematik, dan data penahapan atau *staging*. Berikut ini analisis untuk masing-masing data diuraikan satu per satu.

3.4.2.1 Analisis Data Judul Berita

Judul dalam teks-teks berita berwujud klausa. Untuk menganalisis data ini maka digunakan kerangka teori dari Fowler (1986;1991), Fairclough (1989), dan Halliday (1985a;1985b). Data judul berita tersebut kemudian dianalisis dari segi: (1) struktur semantis klausa untuk mengetahui kemungkinan penandaan perspektif pemberitaan melalui sistem ketransitifan; (2) struktur sintaksis untuk mengetahui kemungkinan penandaan perspektif pemberitaan melalui struktur nominalisasi dan pemakaian modalitas; (3) semantik untuk mengetahui kemungkinan penandaan perspektif pemberitaan dalam pilihan kata dan metafora di dalam klausa, dan terakhir (4) pragmatik untuk mengetahui kemungkinan penandaan perspektif pemberitaan melalui piranti tindak tutur.

3.4.2.2. Analisis Data Pilihan Tematik

Data tema yang berwujud kalimat dianalisis dengan kerangka teori dari Halliday (1985), Halliday (dalam Coulthard, 1994), Brown dan Yule (1983:134-136). Dari data kalimat ini kemudian dicari referan apa dari subjek berita yang

dijadikan sebagai titik tolak pengembangan berita dan ditempatkan dalam posisi sebagai *latar depan*. Apakah referen itu mengacu pihak tertentu (*who*) ataukah mengacu pada hal tertentu (*what*). Kemudian sikap apakah dari wartawan yang ditampakkan pada referen yang diletakkan sebagai titik tolak pemberitaan dan *latar depan* itu, apakah *favorable*, *unfavorable*, ataukah netral. Pemilihan titik tolak pemberitaan dan penempatan referen tertentu pada posisi *latar depan* dan penyikapan terhadap referen itu memperlihatkan perspektif pemberitaan yang dibangun.

3.4.2.3. Analisis Data Struktur Tematik

Data struktur tematik yang berwujud wacana atau teks berita dianalisis dengan menggunakan teori struktur tematik dari Brown dan Yule (1983:139-143). Setelah masing-masing teks berita dianalisis pilihan tematiknya, seperti dalam 3.4.2.1 di atas, kemudian referen yang menjadi titik tolak pemberitaan dan yang ditempatkan dalam posisi *latar depan* itu dikaji lebih lanjut wujud-wujud pengembangannya di dalam paragraf-paragraf. Analisis terhadap aspek pengembangan referen ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana-kah wujud referen itu digunakan sebagai "rangka struktural" wacana. Pembentukan "rangka struktural" wacana berdasarkan referen yang dipilih itu menunjukkan upaya dari wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan.

3.4.2.4 Analisis Data Penahapan atau *Staging*

Data penahapan atau *staging* berwujud paragraf-paragraf. Data paragraf ini dianalisis dengan menggunakan teori penahapan dari Grimes (1975), Brown dan Yule (1983), Clements (1979), dan Van Dijk (1977). Dari data-data paragraf ini dianalisis cara bagaimana wartawan melaporkan peristiwa dan cara wartawan memerikan keadaan atau situasi. Cara wartawan melaporkan peristiwa melalui pola linearitas tertentu, yang membawa pengaruh pada penonjolan aspek-aspek tertentu dari peristiwa dan penyamaran, serta pereduksian aspek-aspek lain dari peristiwa itu, memperlihatkan suatu upaya dalam menandakan perspektif pemberitaan. Demikian juga dengan cara wartawan memerikan keadaan atau situasi, yang menggunakan logika dan kemudahan persepsi pembaca, memperlihatkan pula suatu upaya dalam menandakan perspektif pemberitaan.

3.4.3 Analisis Data untuk Masalah Ketiga

Data bentuk-bentuk ekspresi bahasa berwujud kalimat dan klausa. Data ini terdiri atas tujuh data, yakni ketransitifan, tindak tutur, pilihan kata, metafora, struktur informasi, modalitas, dan struktur nominalisasi. Untuk menganalisis data-data ini maka digunakan teori dari Fowler (1986;1991), Fairclough (1989), Halliday (1985a;1985b), Tomasowa (dalam Kaswanti

Purwo, 1994), Austin (1962) dan Searle (1969). Berikut ini analisis untuk masing-masing data diuraikan satu per satu.

3.4.3.1 Analisis Data Ketransitifan

Data ketransitifan ini berwujud kalimat dan klausa. Kalimat dan klausa dianalisis struktur semantisnya untuk mengetahui: (1) proses semantis yang dibawakannya, (2) partisipan-partisipan yang terlibat dalam proses tersebut, dan (3) keadaan yang berhubungan dengan proses tersebut. Pemilihan proses tertentu yang membawa pengaruh pada munculnya partisipan-partisipan tertentu, serta keadaan yang berhubungan dengan proses itu memperlihatkan perspektif pemberitaan tertentu.

3.4.3.2 Analisis Data Tindak Tutur

Data tindak tutur yang berwujud kalimat itu dianalisis dengan menggunakan teori tindak tutur dari Austin (1962) dan Searle (1969). Data yang berwujud kalimat itu dianalisis aspek tindak tuturnya dan konteks sosial institusional yang mengiringinya untuk mengetahui makna ilokusi dan perlokusi karena pada makna ilokusi dan perlokusi ini perspektif pemberitaan ditandakan.

3.4.3.3 Analisis Data Pilihan Kata

Data pilihan kata, termasuk di dalamnya frase, berwujud kalimat. Kalimat tersebut dianalisis dari segi semantisnya untuk mengetahui fitur nilai

eksperiensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif yang tercermin dalam pilihan kata. Fitur nilai eksperiensial mencerminkan pengetahuan dan keyakinan, fitur nilai relasional mencerminkan pola hubungan antar partisipan, dan fitur nilai ekspresif mencerminkan penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu hal. Ketiga fitur nilai ini apabila melekat pada suatu kata akan memperlihatkan perspektif pemberitaan tertentu.

3.4.3.4 Analisis Data Metafora

Data metafora berupa kalimat. Data kalimat ini kemudian dianalisis untuk mengetahui unsur apa dari kalimat yang diperbandingkan dengan unsur lain. Perspektif pemberitaan dapat diungkap melalui upaya perbandingan karena perbandingan itu mencerminkan atau menyiratkan sesuatu penilaian wartawan, baik itu bersifat *favorable*, *unfavorable*, atau netral, terhadap unsur yang diperbandingkan.

3.4.3.5 Analisis Data Struktur Informasi

Data struktur informasi berwujud kalimat. Data kalimat ini dianalisis atas unsur informasi lama dan informasi baru. Dalam kaitannya dengan perspektif pemberitaan, penempatan proposisi tertentu dari peristiwa sebagai informasi lama atau informasi baru berpotensi untuk menampakkan perspektif pemberitaan.

3.4.3.6 Analisis Data Modalitas

Data fenomena modalitas berwujud kalimat. Kata modalitas di dalam kalimat dianalisis maknanya untuk mengetahui sikap wartawan terhadap proposisi yang dibawakan dalam kalimat tersebut. Sikap wartawan itu mencerminkan pengetahuan, gagasan, dan keyakinan yang dianut yang terekspresikan di dalam modalitas kebenaran, keharusan, dan keinginan. Pilihan modalitas tertentu di dalam kalimat menunjukkan sikap tertentu yang dapat digunakan sebagai indikator perspektif pemberitaan yang dibangun.

3.4.3.7 Analisis Data Struktur Nominalisasi

Data struktur nominalisasi ini berwujud kalimat. Kalimat tersebut dianalisis proses nominalisasi pengisi subjeknya dan merekonstruksi wujud awal kalimatnya untuk mengetahui dua hal, yakni verba pengisi fungsi predikatnya dan partisipan-partisipan yang dalam wujud formalnya disamarkan, dihilangkan, atau dianggap tidak penting. Dua hal ini memperlihatkan motif wartawan berkaitan dengan perspektif pemberitaannya.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Rasionalnya adalah sebagai berikut. Data penelitian yang terdiri atas tiga jenis, yakni data perspektif pemberitaan, data strategi penyajian informasi, dan data bentuk-

bentuk ekspresi bahasa, hanya dapat diperoleh peneliti melalui keterlibatan langsung dengan teks-teks berita itu dengan cara membaca dan memahaminya. Agar peneliti dapat berperan sebagai instrumen pengumpul data yang efektif: (1) peneliti membekali diri dengan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan masalah perspektif, strategi penyajian informasi, dan bentuk-bentuk ekspresi bahasa, (2) peneliti menggunakan instrumen pembantu seperti komputer untuk memproses data di dalam file-file dokumen mulai dari pengetikan, penyimpanan, pengklasifikasian, dan pengkodean.

Selanjutnya, analisis data juga dilakukan oleh peneliti sendiri. Peneliti dengan bekal pengetahuan dalam bidang **sosiolingualistik** dan dengan mendasarkan diri pada teknik **analisis wacana kritis** melakukan analisis terhadap tiga data yang ada. Analisis terhadap tiga data tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen pembantu yang wujudnya adalah Format Lembar Analisis 1, 2, dan 3, seperti yang terdapat dalam Lampiran 1. Format Lembar Analisis 1 adalah format analisis data untuk mengidentifikasi perspektif yang dipergunakan oleh keempat surat kabar yang diteliti. Format Lembar Analisis 2 adalah format analisis data untuk mengidentifikasi manifestasi perspektif pemberitaan dalam strategi penyajian informasi berita. Format Lembar Analisis 3 adalah format analisis data untuk mengidentifikasi

manifestasi perspektif pemberitaan dalam wujud bentuk-bentuk ekspresi bahasa.

3.6 Triangulasi Hasil Analisis Data

Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang benar tentang: (1) perspektif yang muncul dalam pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, (2) manifestasi perspektif pemberitaan dalam strategi penyajian informasi berita, dan (3) manifestasi perspektif pemberitaan dalam pemakaian bentuk-bentuk ekspresi bahasa dalam berita, maka dilakukan pemeriksaan keabsahan temuan. Caranya adalah dengan melakukan triangulasi teoritis seperti yang dikemukakan Cohen dan Manion (1994) dan triangulasi logis menurut Miles dan Huberman (1984).

Triangulasi teoritis dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil analisis data dengan beberapa teori yang terkait seperti yang diuraikan dalam bab 2 *Tinjauan Pustaka*. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengukuhan akan kredibilitas temuan penelitian. Di samping itu, juga untuk menempatkan hasil temuan penelitian ini dalam konstelasi teori-teori perspektif yang ada.

Triangulasi logis dilakukan dengan cara mengkonfirmasi hasil analisis data pada beberapa wartawan dari surat kabar yang menjadi sumber data penelitian dan seorang lagi pakar komunikasi dan jurnalistik yang berkecimpung di bidang penelitian persuratkabaran di LP3Y, yakni Lembaga



Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogya. Peneliti melakukan diskusi yang mendalam dengan para wartawan dan pakar komunikasi tentang hasil analisis data dan simpulan-simpulan yang berkaitan dengan fenomena perspektif dan nilai-nilai ideologis yang mempengaruhi dan melatarbelakangi kinerja para wartawan Indonesia pada akhir Era Orde Baru. Hasil dari diskusi-diskusi dengan para wartawan dan pakar komunikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk memelihara dan meningkatkan keakuratan dan keterpercayaan hasil analisis data dan simpulan-simpulannya. Dengan demikian, bias dalam analisis data yang kemungkinan dilakukan oleh peneliti dapat dikurangi sampai taraf seminimal mungkin.

BAB IV HASIL ANALISIS DATA

Bab ini melaporkan hasil analisis data penelitian. Sistematika laporan bab IV ini disusun sebagai berikut: (1) perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir Era Orde Baru; (2) manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia dalam strategi penyajian informasi; (3) manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa.

4.1 Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru

Analisis perspektif pemberitaan dilakukan terhadap teks-teks berita yang melaporkan peristiwa sosial politik yang terjadi pada bulan April-Mei 1998, pada waktu kejatuhan rezim Orde Baru. Teks-teks berita itu berasal dari surat kabar *Kompas*, *Suara Karya*, *Republika*, dan *Angkatan Bersenjata*, dan secara keseluruhan berjumlah 48 teks berita, seperti yang terdapat dalam Lampiran 2. Berikut ini disajikan Tabel 4.1 yang memuat peristiwa-peristiwa sosial politik yang diangkat menjadi berita oleh keempat surat kabar di atas. Tanda (+) dalam Tabel 4.1 berikut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

suatu peristiwa diberitakan oleh surat kabar-surat kabar tersebut. Sebaliknya, tanda (x) dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa tidak diberitakan oleh surat kabar-surat kabar tersebut.

Tabel 4.1: Peristiwa Sosial Politik yang Diberitakan Empat Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru

Data Teks	Peristiwa	Kompas	Suara Karya	Republika	Angkatan Bersenjata
1	Insiden Trisakti	+	+	+	x
2	Pemberitaan Media Massa	x	+	+	+
3	Aksi Mahasiswa 1	x	+	+	+
4	Kasus Orang Hilang	+	+	+	+
5	Penanganan Aksi Unjuk Rasa	+	+	+	+
6	Kerusuhan di Medan	+	+	+	x
7	Pemakaman Korban Kebakaran	+	+	+	x
8	Aksi Mahasiswa 2	+	x	+	+
9	Aksi Mahasiswa 3	+	+	+	+
10	Pemberitaan Majalah D&R	+	+	+	+
11	Kematian Letda Pol Dadang	+	+	+	x
12	Mahasiswa ke Gedung DPR	+	+	+	x
13	Mahasiswa Meninggalkan Gedung DPR	+	+	+	+
14	Presiden Mengundurkan diri	x	+	+	+

Dari analisis terhadap 48 teks berita ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dalam Tabel 4.1 digunakan sebagai suatu ajang bertemunya dua pihak, yakni pihak pemerintah dan pihak yang anti pemerintah, dengan kepentingan dan latar belakang yang berbeda-beda.

Pihak-pihak itu saling menebarkan “kebenaran” masing-masing yang didukung oleh klaim, interpretasi, data, dan argumentasi berkaitan dengan peristiwa dalam Tabel 4.1. Keadaan seperti ini, sesuai dengan teori konflik dari Marx seperti yang ditulis oleh Fakhri (1999), secara jelas mengisyaratkan adanya polarisasi dua pihak atau kelas yang bertentangan dan memiliki kepentingan-kepentingan berbeda. Masing-masing pihak berusaha untuk mengeksploitasi, memaksakan, dan menonjolkan kepentingan-kepentingan mereka di dalam wacana berita pada pihak lainnya dan terutama pada para pembaca surat kabar.

Surat kabar Indonesia, dalam hal ini *Kompas*, *Republika*, *Angkatan Bersenjata*, dan *Suara Karya*, baik dalam proses produksi berita maupun dalam proses kehidupan pers yang lebih luas, berada di tengah-tengah situasi tarik menarik kepentingan dua pihak tersebut. Surat kabar Indonesia walaupun terikat oleh kaidah-kaidah objektivitas jurnalistik, yang mengajarkan bahwa dalam menghadirkan suatu wacana berita, pihak surat kabar harus dapat bersikap akomodatif dan netral terhadap semua pihak yang terlibat dalam wacana itu (*cover both side*) (lihat Sudibyo, 1998), namun pada kenyataannya surat kabar seringkali terkooptasi oleh kepentingan salah satu pihak tersebut. Surat kabar Indonesia pada masa akhir era Orde Baru masih diwarnai oleh pemaksaan basis interpretasi tertentu oleh pihak-pihak yang disebut

manipulator media, yang akhirnya membawa dampak pada terbentuknya suatu perspektif tertentu dalam memberitakan suatu peristiwa sosial politik.

Dalam konteks situasi sosial-politik di akhir era Orde Baru, pihak-pihak yang bersaing dalam mempengaruhi proses produksi berita dan proses kehidupan pers Indonesia adalah (1) mahasiswa Indonesia yang secara radikal memperjuangkan reformasi untuk perubahan, dan (2) Pemerintahan Orde Baru, sebagai kelompok yang berkuasa, yang dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan keadaan "status quo".

Hasil analisis terhadap empat surat kabar Indonesia, seperti yang tersajikan dalam Lampiran 3, memperlihatkan adanya tiga perspektif pemberitaan yang muncul pada masa akhir era Orde Baru, yakni (1) perspektif pro mahasiswa, (2) perspektif pro pemerintah, dan (3) perspektif netral. Perspektif pro mahasiswa adalah sudut pandang dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide, dan pandangan dari mahasiswa, serta pihak-pihak yang anti pemerintah, yang mendapatkan bentuk dan penyaluran dalam gerakan reformasi mahasiswa Indonesia. Perspektif pro pemerintah adalah sudut pandang dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide, dan pandangan pemerintah. Dan terakhir, perspektif netral adalah sudut pandang dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh sikap wartawan yang akomodatif dan netral terhadap semua pihak yang terlibat konflik dalam wacana berita, yakni pemerintah atau aparat

keamanan di satu sisi dan mahasiswa atau pihak yang anti pemerintah di sisi lain dalam peristiwa yang diberitakan.

Keempat surat kabar sumber data memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan dalam perspektif pemberitaan seperti yang terdapat dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2: Kecenderungan Keempat Surat Kabar dalam Perspektif Pemberitaan

Surat Kabar	Perspektif		
	Pro Pemerintah	Pro Mahasiswa	Netral
Angkatan Bersenjata	89%	0%	11%
Suara Karya	71%	7%	15%
Kompas	26%	36%	36%
Republika	42%	21%	35%

Dari Tabel 4.2 ini dapat disimpulkan bahwa selama masa akhir Era Orde Baru, surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan *Suara Karya* cenderung menggunakan perspektif pro pemerintah dalam memberitakan peristiwa-peristiwa sosial politik. Delapan puluh persen berita sosial politik yang diberitakan surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan tujuh puluh persen peristiwa sosial politik yang diberitakan surat kabar *Suara Karya* mengambil perspektif pro pemerintah. Sementara itu, surat kabar *Kompas* dan *Republika* dalam memberitakan peristiwa-peristiwa sosial politik cenderung merata dalam pemakaian perspektif, baik pro pemerintah, pro mahasiswa, ataupun netral.

Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan pada peristiwa-peristiwa sosial politik apakah keempat surat kabar menggunakan perspektif pro mahasiswa, perspektif pro pemerintah, dan perspektif netral.

Tabel 4.3: Peristiwa-Peristiwa Sosial Politik pada Akhir Era Orde Baru dan Perspektif Pemberitaannya

Peristiwa	Perspektif			Tidak Mem beritakan
	Pro Pemerintah	Pro Mahasiswa	Netral	
Insiden Trisakti	SK	KOM, REP	-	AB
Pemberitaan Med. Massa	SK, REP, AB	-	-	KOM
Aksi Mahasiswa 1	SK, AB	REP	-	KOM
Kasus Orang Hilang	SK, AB	-	KOM, REP	-
Penanganan Aksi Unjuk Rasa	SK, AB, KOM	REP	-	-
Kerusuhan di Medan	SK, AB	KOM, REP	-	-
Pemakaman Korban Kebakaran	-	-	SK, KOM, REP	AB
Aksi Mahasiswa 2	SK, AB	-	KOM, REP	-
Aksi Mahasiswa 3	SK, AB, REP	KOM	-	-
Pemberitaan Majalah D&R	SK, KOM	-	REP, REP	AB
Kematian Letda Pol Dadang	SK, REP	-	KOM	AB
Mahasiswa ke DPR	-	KOM, REP	SK	AB
Mahasiswa tinggalkan Gedung DPR	AB, REP, KOM	SK	-	-
Presiden Mengundurkan diri		-	REP, AB, SK	KOM

Keterangan: SK (*Suara Karya*), AB (*Angkatan Bersenjata*), KOM (*Kompas*)
REP (*Republika*)

Surat kabar *Suara Karya* memakai perspektif pro pemerintah ketika memberitakan peristiwa *Insiden Trisakti*, *pemberitaan media massa*, *aksi mahasiswa 1, 2 dan 3*, *kasus orang hilang*, *penanganan aksi unjuk rasa*, *kerusuhan di Medan*, *kematian Letda Pol. Dadang* dan *Presiden Soeharto*

mengundurkan diri. Di luar peristiwa-peristiwa ini, yakni *mahasiswa datang ke DPR dan mahasiswa tinggalkan gedung DPR*, surat Kabar *Suara Karya* memakai perspektif netral dan perspektif pro mahasiswa.

Selanjutnya, surat kabar *Angkatan Bersenjata* memakai perspektif pro pemerintah untuk memberitakan peristiwa *pemberitaan media massa, aksi mahasiswa 1, 2 dan 3, kasus orang hilang, penanganan aksi unjuk rasa, dan kerusuhan di Medan*. Di luar peristiwa-peristiwa ini, yakni *Insiden Trisakti, pemakaman korban, pemberitaan majalah D&R, kematian Letda Pol. Dadang, dan mahasiswa ke DPR*, surat Kabar *Angkatan Bersenjata* memakai perspektif netral dan sama sekali tidak menggunakan perspektif mahasiswa.

Berbeda dengan surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata*, surat kabar *Kompas* dan *Republika* memiliki kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. *Kompas* dan *Republika* lebih akomodatif pada semua pihak dalam pemberitaan. *Kompas* dan *Republika*, seperti yang terlihat dalam Tabel 4.2 dan 4.3 di atas, menyajikan berita-berita sosial politik dengan menggunakan perspektif yang lebih merata, baik pro pemerintah, pro mahasiswa, dan netral. Ketika melaporkan berita yang isinya berkaitan dengan *aksi-aksi mahasiswa dan apa yang terjadi dengan mahasiswa dalam berunjuk rasa*, kedua surat kabar ini cenderung menggunakan perspektif pro mahasiswa atau perspektif netral. Kedua surat kabar ini apabila tidak memperlihatkan rasa simpati dan sikap *favorable* pada partisipan mahasiswa, mereka cenderung

bersikap akomodatif dan netral. Demikian juga ketika melaporkan berita yang isinya terkait dengan *kebijakan pemerintah atau militer* dan *isu-isu negatif terhadap pemerintah atau militer*, kedua surat kabar ini apabila tidak menggunakan perspektif pro pemerintah, mereka cenderung akomodatif dan menggunakan perspektif netral.

4.2 Manifestasi Perspektif Pemberitaan di dalam Strategi Penyajian Informasi (SPI)

Dari analisis dalam subbab 4.1 ditemukan bahwa perspektif pemberitaan dari empat surat kabar Indonesia, yakni *Suara Karya*, *Angkatan Bersenjata*, *Kompas*, dan *Republika*, pada akhir era Orde Baru adalah (1) perspektif pro mahasiswa, (2) perspektif pro pemerintah, dan (3) perspektif netral. Ini berarti berita-berita sosial politik yang beredar di masyarakat pembaca pada akhir era Orde Baru adalah berita yang di satu sisi membawa sikap, ide-ide, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan dari mahasiswa dan pihak-pihak yang anti pemerintah, dan di sisi lain, membawa sikap, ide-ide, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan dari Pemerintah Orde Baru. Kemudian, ada pula berita yang disajikan dari perspektif yang akomodatif dan berimbang di antara dua "kutub" itu.

Untuk menjelaskan manifestasi perspektif pemberitaan dalam SPI perlu dilakukan analisis secara kritis pada bagian-bagian teks berita yang berpotensi untuk menampakkan sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan wartawan

atau surat kabar, yang kadangkala dapat secara jelas terlihat, namun seringkali tersamar dan tersembunyi dibalik lambang-lambang atau tanda-tanda (*sign*), atau dalam wujud struktur wacana. Analisis terhadap bagian-bagian ini akan mengungkap bagaimana perspektif berita yang dipilih wartawan atau surat kabarnya dimanifestasikan di dalam SPI.

Dari analisis terhadap 48 teks berita ditemukan bahwa pespektif pemberitaan seperti perspektif pro mahasiswa, perspektif pro pemerintah, atau perspektif netral dimanifestasikan ke dalam judul berita, tema berita, struktur tematik, dan penahapan (*staging*). Cara bagaimana perspektif berita itu diwujudkan dalam keempat bagian teks berita ini diuraikan secara rinci berikut ini.

4.2.1 Judul Berita

Dalam kajian ini judul berita dipisahkan dengan kajian tema berita karena dua alasan berikut ini. Pertama, judul berita selain merupakan wujud yang mungkin dari tema berita, dia dapat juga difungsikan untuk menarik perhatian pembaca. Seringkali karena hanya untuk kepentingan menarik perhatian pembaca, fungsi hakiki yang pertama dari judul berita diabaikan. Redaksi surat kabar, dalam hal ini, tidak membuat sendiri judul berita berdasarkan tema berita, tetapi hanya mengambil dari pernyataan, keterangan, atau pendapat dari salah satu partisipan yang ada dalam berita. Pola ini

seringkali ditemui dalam teks berita surat kabar seperti yang terlihat dalam kutipan (4.1) berikut ini.

(4.1) Menkeh: Kasus Orang "Hilang" harus Diklarifikasikan. (II.A.4a)

Kedua, dalam konteks sebagai fungsi tematisasi berita, judul berita memiliki wujud yang seringkali lebih konkret daripada tema berita. Judul berita ditampilkan dalam wujud frasa atau klausa sehingga dapat secara langsung dan eksplisit dipahami maknanya maupun dianalisis unsur-unsurnya. Sebaliknya tema berita, terkadang harus dicari dan ditafsirkan dari keseluruhan proposisi-proposisi yang ada dalam wacana. Tema berita dengan pola ini tampil dalam wujud yang implisit dan tersamar.

Dalam kaitannya dengan kepentingan institusional surat kabar, baik itu visi dan misi dalam konteks politik maupun ideologi, judul berita ternyata juga difungsikan pula sebagai manifestasi perspektif pemberitaan. Judul berita dalam hal ini dijadikan sebagai tempat untuk menampakkan sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan institusional terhadap peristiwa sosial politik yang dilaporkan dalam isi berita.

Dari analisis yang terdapat dalam Lampiran 5 terlihat bahwa dari 48 judul berita, 36 judul berita di antaranya mencerminkan perspektif pemberitaan, sedangkan 12 judul sisanya tidak. Ini berarti 36 judul berita atau 75%nya dipergunakan oleh redaksi surat kabarnya untuk menampakkan perspektif

pemberitaan, sedangkan 12 judul berita atau 25% sisanya tidak menampilkan perspektif pemberitaan yang ada dalam keseluruhan teks berita.

Kemudian dari analisis terhadap ke-36 judul berita yang menampilkan perspektif pemberitaan ditemukan ada 6 cara perspektif pemberitaan dimanifestasikan dalam judul berita. Keenam cara itu adalah pemanfaatan piranti ketransitifan, pemanfaatan piranti modalitas, pemanfaatan piranti nominalisasi, pemanfaatan pilihan kata, pemanfaatan tindak tutur, dan pemanfaatan metafora.

4.2.1.1 Piranti Ketransitifan

Berdasarkan analisis terhadap judul berita ditemukan bahwa perspektif pemberitaan dalam judul berita dapat ditengarai dari tiga hal, yakni (1) proses ketransitifan yang diangkat dalam judul berita, (2) pengisi partisipan yang dilibatkan oleh wartawan dalam proses itu, apakah entitas mahasiswa atukah entitas pemerintah, dan (3) keadaan yang ditonjolkan oleh wartawan berkaitan dengan partisipan-partisipan tersebut.

Perbedaan dalam memilih proses ketransitifan, seperti proses material, proses mental, atau proses verbal, sebagai realisasi dari persepsi wartawan terhadap peristiwa sosial politik yang terjadi di masyarakat merupakan indikator pertama dari pembentukan perspektif dalam judul berita. Ketiga proses ketransitifan tersebut sama-sama berpotensi membentuk perspektif pro mahasiswa, perspektif pro pemerintah, maupun perspektif netral. Di dalam

proses ketransitifan yang dipilih tersebut terindikasikan pandangan dan keyakinan wartawan terhadap peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat.

Penentuan entitas pengisi partisipan sebagai konsekuensi dari pemilihan ketiga proses ketransitifan di atas merupakan indikator kedua pembentukan perspektif di dalam judul berita. Perbedaan dalam menentukan siapa entitas yang ditempatkan sebagai partisipan pelaku dan partisipan tujuan, siapa pengisi partisipan pengindera dan apa pengisi partisipan fenomena, atau siapa pengisi partisipan pengucap dan apa partisipan ucapannya secara jelas memasukkan suatu pandangan redaksi yang berbeda tentang realitas sosial yang dilaporkan.

Dan terakhir, pandangan dan keyakinan wartawan juga dapat diungkapkan dari keadaan yang ditonjolkan dalam kaitannya dengan proses ketransitifan dan partisipan-partisipan yang sudah dipilih sebelumnya. Di dalam keadaan tersebut, dapat secara eksplisit maupun implisit, terlihat penilaian dan sikap dari wartawan yang dapat digunakan sebagai indikator ketiga, bersama-sama dengan dua indikator sebelumnya, untuk mengungkap perspektif di dalam judul berita.

4.2.1.2 Piranti Modalitas

Analisis terhadap data judul berita memperlihatkan bahwa wartawan dan institusinya memanifestasikan perspektif pemberitaan ke dalam judul berita

melalui modalitas, baik itu modalitas kebenaran, modalitas keharusan, dan modalitas keinginan. Dengan modalitas kebenaran, keempat surat kabar sumber data mengindikasikan atau menyatakan secara tidak langsung suatu komitmen pada kebenaran dari proposisi yang diutarakan dalam judul berita atau pada suatu prediksi tingkat kemungkinan dari deskripsi suatu kejadian yang terjadi. Dengan modalitas ini, pendirian, pandangan, dan keyakinan wartawan yang berupa dukungan atau penolakan terhadap partisipan tertentu terlihat.

Dengan modalitas keharusan, keempat surat kabar ini menetapkan bahwa partisipan dalam suatu proposisi *seharusnya* atau *tidak seharusnya* (1) melakukan tindakan khusus dalam proposisi itu, atau (2) dikenai tindakan khusus dalam proposisi itu. Sikap dan pandangan yang terkodekan melalui modalitas keharusan ini memperlihatkan pendirian, keberpihakan, dan keyakinan masing-masing surat kabar terhadap tindakan partisipan-partisipan yang ada dalam proposisi judul berita.

Dengan modalitas keinginan, masing-masing surat kabar menetapkan persetujuannya atas keinginan atau ketidakeinginan melakukan tindakan yang terdapat dalam proposisi itu. Keinginan yang terkodekan melalui modalitas ini mencerminkan sikap yang jelas dari wartawan atau institusinya dalam kerangka konflik antara partisipan-partisipan. Masing-masing surat kabar,



dengan modalitas ini, memperlihatkan dukungannya pada salah satu pihak melalui judul berita itu.

4.2.1.3 Piranti Nominalisasi

Dari analisis terhadap judul berita ditemukan bahwa selain dimanifestasikan melalui struktur ketransitifan dan modalitas, perspektif pemberitaan juga dimanifestasikan melalui struktur nominalisasi. Pada struktur ini verba pengisi predikat mengalami proses nominalisasi dan dipindahkan letaknya pada posisi subjek. Struktur nominalisasi seperti ini memperlihatkan dua fenomena berikut, yakni (1) upaya menonjolkan proses berlangsungnya tindakan dalam proposisi, dan (2) upaya mereduksi penonjolan partisipan pelaku di dalam proposisi. Dalam kaitannya dengan ini, keempat surat kabar seringkali memanfaatkan struktur nominalisasi, yang dilengkapi dengan keterangan tentang proses tindakan, untuk memperlihatkan perspektif pemberitaannya, baik itu perspektif pro pemerintah, perspektif pro mahasiswa, maupun perspektif netral.

4.2.1.4 Pemanfaatan Pilihan Kata

Analisis terhadap data judul berita memperlihatkan bahwa perspektif pemberitaan dimanifestasikan melalui kata-kata tertentu yang membentuk judul berita. Kata-kata tertentu tersebut tidak hanya memperlihatkan pengalaman dalam pengertian umum tetapi juga memperlihatkan latar belakang ideologi. Kata-kata yang dipilih itu menandai atau mengkodekan

kepentingan-kepentingan politik dan ideologi tertentu. Dalam hal ini pemilihan kata memperlihatkan latar belakang sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan ideologis yang dianut dan diperjuangkan oleh keempat surat kabar yang bersangkutan.

4.2.1.5 Pemanfaatan Tindak Tutur

Dari analisis terhadap data judul berita ditemukan bahwa wartawan dan surat kabarnya tidak hanya menyatakan sesuatu melalui suatu judul berita tetapi juga melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan itu dapat ditafsirkan dari makna proposisi dalam judul, baik makna lokusi, ilokusi, maupun perlokusi. Ada sebagian judul berita yang secara transparan dan lugas sudah mengkodekan sikap, keyakinan, dan pandangan surat kabarnya. Ini berarti makna lokusi dari proposisi sudah menampakkan perspektif pemberitaan.

Namun demikian, ditemukan pula dari analisis terhadap judul berita bahwa perspektif pemberitaan cenderung dimanifestasikan secara implisit melalui tindak bahasa ilokusi dan perlokusi. Surat kabar dalam hal ini menyampaikan "sesuatu", yakni sikap, keyakinan, dan pandangannya kepada masyarakat pembaca melalui makna tidak langsung yang dapat ditafsirkan dengan bantuan konteks, baik konteks dalam teks maupun konteks dalam teks lain sebelumnya atau yang mengiringinya.

4.2.1.6 Pemanfaatan Metafora

Dari analisis terhadap data judul berita teridentifikasi bahwa metafora dipergunakan oleh wartawan dan surat kabar untuk memanasikan perspektif pemberitaan. Cara yang digunakan adalah membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk singkat. Sifat-sifat pembanding tersebut dapat bersifat positif, negatif, maupun netral. Sifat positif diberikan apabila tujuannya adalah untuk mendukung partisipan-partisipan tertentu dan tindakan yang dilakukan dalam proposisi, sebaliknya sifat negatif diberikan apabila tujuannya adalah untuk menolak partisipan-partisipan tertentu dan tindakannya dalam proposisi. Dan terakhir, sifat netral atau tidak memihak apabila tujuannya adalah menyajikan informasi tanpa berpretensi mendukung atau menolak. Melalui penonjolan sifat-sifat yang tertentu itulah perspektif pemberitaan dimanifestasikan.

4.2.2 Pilihan Tematik

Seorang wartawan pada waktu melihat fakta peristiwa sosial politik dan memutuskan untuk mengangkatnya menjadi suatu berita, dia terlebih dahulu harus menentukan tema berita. Di dalam tema berita itu implisit terdapat: (1) topik pemberitaan yang merupakan inti atau pokok substansif berita, dan (2) tujuan atau motif yang akan dicapainya dengan topik itu. Selanjutnya, tema berita oleh wartawan digunakan sebagai titik tolak permulaan berita, seperti

yang terdapat dalam *lead* atau teras berita, sebagai acuan dalam menentukan kerangka wacana berita, dan dasar untuk pengembangan badan berita.

Dalam penelitian ini, tema berita yang dalam struktur berita seringkali ditempatkan dalam bagian *lead* atau teras berita, ternyata difungsikan pula sebagai manifestasi perspektif pemberitaan. Tema berita dijadikan sebagai tempat untuk menampakkan sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan terhadap peristiwa sosial politik yang berkembang di masyarakat, baik itu dari perspektif institusional surat kabar yang bersangkutan, maupun kepentingan yang lebih luas di luar institusi surat kabar tersebut.

Dari analisis terhadap 48 teks berita sosial politik dari 4 surat kabar sumber data ditemukan ada empat pola penyajian tema berita yang di dalamnya terkodekan perspektif pemberitaan, baik perspektif pro pemerintah, pro mahasiswa, atau perspektif netral. Keempat pola penyajian tema berita itu adalah (1) pola [*Who* ← (*favorable, unfavorable, netral*)] atau paduan unsur berita *Who* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* terhadap unsur *Who* tersebut; (2) pola [*What* ← (*favorable, unfavorable, netral*)] atau paduan unsur berita *What* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* terhadap unsur *What* tersebut; (3) pola [*Who* → (*favorable, unfavorable, netral*) → *What*] atau paduan unsur berita *Who* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* dari *Who*

terhadap unsur *What*, dan (4) pola [*Who*¹ → (*favorable, unfavorable, netral*) → *Who*²] atau paduan unsur berita *Who*¹ sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* terhadap unsur *Who*².

Dari analisis terhadap 48 teks berita, seperti yang terdapat dalam Lampiran 7, terlihat bahwa pola yang cenderung banyak digunakan oleh para wartawan adalah pola pertama dan kedua. Dari keseluruhan data terdapat 40% tema dibuat dengan pola [*Who* ← (*favorable, unfavorable, netral*)] dan 48% tema dibuat dengan pola [*What* ← (*favorable, unfavorable, netral*)]. Selengkapnya, dua pola yang lain, yakni [*Who*¹ → (*favorable, unfavorable, netral*) → *Who*²] dan [*Who* → (*favorable, unfavorable, netral*) → *What*], masing-masing hanya 6% digunakan oleh para wartawan.

Dari kecenderungan-kecenderungan ini dapat diinterpretasikan bahwa penyajian berita dengan fokus pada partisipan (*who*) atau peristiwa (*what*), yang dipadukan dengan sikap yang ditujukan kepadanya, merupakan pola yang banyak dipergunakan oleh para wartawan. Kedua pola ini lebih disukai daripada kedua pola lain seperti penyajian berita dengan fokus pada partisipan (*Who*) yang dipadukan dengan sikap yang ditujukan pada partisipan lain (*Who*²) atau pada peristiwa (*What*).

Dari segi wartawan, keputusan untuk memilih partisipan tertentu dari unsur berita *who* maupun *what* sebagai titik tolak pemberitaan dan menempatkannya pada posisi paling kiri dari struktur memperlihatkan upaya

pertama wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan. Selain itu, upaya lain yang dilakukan wartawan adalah mengembangkan unsur berita *who* atau *what* tersebut dengan memberi penilaian, penyikapan, penjelasan, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersifat *favorable*, *unfavorable*, atau *netral*.

4.2.3 Struktur Tematik Berita

Struktur tematik dalam istilah Brown dan Yule (1983) adalah "pagar-pagar" di dalam wacana yang berfungsi untuk memberi rangka struktural dan untuk menandai area topik penulis. Dengan struktur tematik ini pengembangan informasi di dalam wacana, lebih khusus lagi di dalam paragraf dan kalimat, tidak akan keluar atau menyimpang dari tema wacana. Struktur tematik dalam hal ini adalah selektor penting bagi penulis untuk memasukkan dan tidak memasukkan informasi-informasi tertentu di dalam wacana.

Di dalam penelitian ini, struktur tematik oleh wartawan juga difungsikan untuk membangun perspektif pemberitaan. Dengan struktur tematik ini, wartawan di satu sisi mengembangkan fakta, data, dan informasi menjadi suatu realitas baru di dalam wacana beritanya, dan di sisi lain, wartawan juga membatasi masuknya fakta, data, dan informasi tertentu. Hanya fakta, data, dan informasi yang relevan, mendukung, dan memperkuat perspektif pemberitaan yang dapat masuk ke dalam laporan beritanya. Sementara itu, fakta, data, dan informasi yang bertentangan, tidak mendukung, atau bahkan

memperlemah perspektif pemberitaan tidak dimasukkan di dalam laporan beritanya.

Di dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa pola struktur tematik yang digunakan untuk membentuk area topik penulis dan sekaligus memberikan rangka struktural pada wacana berita, serta untuk membangun perspektif pemberitaan. Pola-pola itu adalah (1) pola struktur tematik (frase) nominal pengisi subjek gramatikal; (2) pola struktur tematik paduan (frase) nominal pengisi subjek gramatikal dan frase preposisional pengisi keterangan waktu; dan (3) pola struktur tematik paduan (frase) nominal pengisi subjek gramatika! dan frase preposisional pengisi keterangan tempat.

Dari hasil analisis, seperti yang terdapat dalam Lampiran 8, dapat diketahui bahwa pola struktur tematik (frase) nominal pengisi subjek gramatikal adalah pola struktur tematik yang paling dominan digunakan oleh para wartawan dalam pembentukan perspektif pemberitaan dibandingkan dengan dua pola yang lain. Apabila dipresentasikan, maka pemakaian pola struktur tematik (frase) nominal pengisi subjek gramatikal pada seluruh data mencapai 70%, sementara dua pola yang lain masing-masing 15%. Fenomena ini mengandung arti bahwa wartawan lebih menyukai menandai area topik dan rangka struktural wacana dengan menggunakan (frase) nominal sebagai pengisi subjek gramatikal wacana berita. Dalam hal ini, wartawan lebih banyak menonjolkan atau memfokuskan berita tentang partisipan atau apa yang

dilakukan atau apa yang terjadi dengan partisipan daripada menonjolkan tentang waktu terjadinya peristiwa ataupun tempat terjadinya peristiwa.

4.2.4 Penahapan

Dalam penelitian ini, penahapan atau *staging* berkaitan dengan strategi penyajian informasi oleh wartawan, baik berupa pengaturan teks secara linier, seperti yang dikemukakan oleh Grimes (1975) dan Brown dan Yule (1983), maupun penonjolan aspek-aspek tertentu dari wacana, seperti yang dikemukakan oleh Clements (1979), serta pereduksian atau dalam bahasa Van Dijk (1977) pengimplisitan aspek-aspek tertentu dari wacana. Dari hasil analisis ditemukan bahwa strategi-strategi penahapan ini tidak hanya digunakan untuk menciptakan *suspens*, untuk meyakinkan pembacanya akan kebenaran apa yang ditulis dengan menambahkan perincian-perincian penunjang yang masuk akal, untuk membujuk pembacanya agar menerima sajian aksi, atau untuk mengguncangkan atau mengejutkan perhatian pembaca menurut sudut pandangan wartawan atau surat kabarnya, namun terutama untuk membangun perspektif pemberitaan.

Berdasarkan analisis terhadap teks-teks berita dari keempat surat kabar sumber data ditemukan ada dua pola penyajian informasi yang dipergunakan untuk membangun perspektif pemberitaan. Kedua pola itu adalah (1) pola

urutan kewajaran, dan (2) pola keeksplisitan. Secara rinci kedua pola ini beserta sub-sub polanya disajikan di dalam Tabel berikut ini.

Tabel : Pola Penyajian Informasi sebagai Piranti Pembangun Perspektif Pemberitaan

Pola Penyajian Informasi	Sub Pola Penyajian Informasi
1. Pola Urutan Kewajaran	1.1 Urutan Wajar
	1.2 Urutan Tidak Wajar
	1.3 Urutan Umum-Khusus
2. Pola Ukuran Keeksplisitan	2.1 eksplisit
	2.1 emplisit

4.2.4.1 Penyajian Informasi dalam Urutan Kewajaran

Berikut ini disajikan tiga subpola urutan peristiwa dalam penahapan yang digunakan oleh para wartawan untuk membangun perspektif berita. Ketiga subpola urutan ini adalah urutan wajar, urutan tidak wajar, dan urutan umum-khusus. Urutan wajar mengacu pada penyajian informasi berdasarkan pada urutan terjadinya peristiwa. Urutan tidak wajar mengacu pada penyajian informasi yang tidak didasarkan pada urutan terjadinya peristiwa tetapi lebih dimaksudkan untuk menonjolkan aspek-aspek tertentu dari berita. Dan terakhir, Urutan umum-khusus mengacu pada penyajian informasi yang didasarkan pada kemudahan persepsi bagi pembaca.

4.2.4.1.1 Pola Urutan Wajar

Urutan wajar atau *natural order* menurut Brown dan Yule (1983) sejajar dengan konsep *ordo naturalis* menurut Levelt (1981) dan *normal order* menurut

Van Dijk (1977). Urutan wajar ini berkaitan dengan penyajian rangkaian penuturan peristiwa yang berpijak pada urutan terjadinya peristiwa. Suatu peristiwa yang terjadi lebih dahulu akan dilaporkan mendahului peristiwa yang terjadi kemudian. Dalam konsep ini, urutan-urutan penyajian dalam rangkaian kalimat menunjukkan urutan-urutan terjadinya peristiwa itu dalam dunia nyata.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pola penyajian urutan wajar digunakan sebagai salah satu cara untuk menandakan perspektif pemberitaan. Berdasarkan analisis pada data penahapan dapat diinferensikan beberapa hal berikut ini. Pertama, urutan wajar dalam suatu pelaporan peristiwa bersifat relatif, yakni antara surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain dapat berbeda. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain dalam memandang suatu realitas sosial.

Kedua, perbedaan persepsi atas suatu realitas sosial yang terjadi menyebabkan perbedaan dalam pemilihan peristiwa tertentu sebagai peristiwa yang harus diletakkan pada urutan yang lebih dulu dan peristiwa-peristiwa lain dalam urutan berikutnya.

Ketiga, urutan wajar dari suatu peristiwa, yang memperlihatkan peristiwa tertentu pada urutan yang lebih dulu dan peristiwa lain dalam urutan yang berikutnya, membentuk suatu perspektif pemberitaan tertentu. Perspektif itu

ditentukan terutama oleh pemilihan aspek tertentu dari peristiwa sebagai dasar untuk membentuk hubungan sebab-akibat dalam rangkaian peristiwa.

4.2.4.1.2 Pola Urutan Tidak Wajar

Dalam penelitian ini ditemukan juga suatu fenomena urutan penyajian yang tidak wajar atau tidak kronologis di dalam berita. Peristiwa yang terjadi belakangan di dalam dunia nyata justru ditempatkan pada urutan-urutan awal mendahului peristiwa-peristiwa lain yang terjadi lebih dahulu. Pembolak-balikan urutan ini merupakan strategi dalam penahapan yang bertujuan untuk menonjolkan aspek-aspek tertentu dari wacana. Dalam kaitannya dengan perspektif suatu berita, pembolak-balikan urutan peristiwa ini dapat dimanipulasikan untuk kepentingan membangun perspektif tertentu.

Berdasarkan analisis data penahapan (lihat Lampiran 9 dan 10), dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, urutan tidak wajar merupakan salah satu strategi penyajian peristiwa sebagai hasil dari pembolak-balikan urutan peristiwa yang kronologis dengan atau tanpa kata tugas, seperti konjungsi dan frase preposisional penanda keterangan waktu. Kedua, urutan tidak wajar merupakan strategi untuk menimbulkan suatu "kesan khusus" tertentu. Kesan khusus itu berupa penonjolan yang lebih pada peristiwa-peristiwa tertentu melebihi peristiwa-peristiwa yang lain, yang kemudian dapat melahirkan relasi sebab-akibat di dalam rangkaian peristiwa tersebut. Ketiga,

kesan khusus tertentu yang muncul dari urutan tidak wajar membentuk suatu perspektif pemberitaan tertentu. Perspektif pemberitaan itu terbentuk dengan cara memanipulasi penyajian urutan peristiwa yang berbeda dengan urutan dalam dunia nyata.

4.2.4.1.3 Pola Urutan Umum-Khusus

Di dalam berita, wartawan tidak hanya terbatas melaporkan suatu peristiwa. Sering juga dia melaporkan keadaan atau situasi yang melatarbelakangi suatu peristiwa, mengiringi suatu peristiwa, atau bahkan yang muncul sebagai akibat dari peristiwa itu. Untuk melaporkan keadaan atau situasi tersebut, dia mempergunakan kriteria pola urutan wajar yang berbeda dengan pola ketika dia melaporkan suatu peristiwa. Di dalam penelitian ini, ditemukan pola penyajian informasi yang tidak didasarkan pada kronologi waktu, tetapi didasarkan pada prinsip kemudahan persepsi seperti yang dikemukakan oleh Van Dijk (1977). Dalam kaitan dengan kemudahan pembaca mempersepsi informasi-informasi, informasi umum (*general*), keseluruhan (*whole*), besar (*large*) lebih mudah dipahami apabila disajikan lebih dahulu, baru kemudian menyusul informasi khusus (*particular*), komponen-komponen (*part*), dan hal-hal yang kecil (*small*).

Dalam penelitian ini, pengaturan urutan dalam deskripsi mengenai keadaan atau situasi dengan pola umum-khusus, termasuk di dalamnya

keseluruhan-komponen atau besar-kecil ini, dapat dipergunakan untuk membangun perspektif berita. Perspektif berita yang sudah ditandakan pada bagian awal wacana dalam bentuk suatu deskripsi umum diperjelas, diperkuat, dan dilengkapi dengan suatu deskripsi khusus, atau deskripsi mengenai komponen-komponennya, dan hal-hal yang mendetail atau kecil-kecil.

Berdasarkan kasus urutan penyajian umum-khusus dalam data penahanan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, urutan umum-khusus merupakan strategi dalam mendeskripsikan suatu keadaan atau situasi dengan cara menyajikan sesuatu fenomena yang terkait dengan peristiwa dalam wujud yang umum dan dilanjutkan dengan rincian, penggambaran lebih lanjut yang spesifik atau khusus.

Kedua, urutan umum-khusus dari deskripsi keadaan atau situasi membentuk suatu perspektif pemberitaan tertentu. Perspektif itu terbentuk ketika wartawan memilih fenomena tertentu, baik yang terkait dengan partisipan mahasiswa maupun pemerintah, sebagai proposisi dalam wujud pernyataan umum yang biasanya diletakkan pada awal kalimat atau awal paragraf. Apabila tidak terkait pada kedua partisipan tersebut, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif netral.

4.2.4.2 Penyajian Informasi Pola Keeksplisitan

Van Dijk (1977) menjelaskan bahwa informasi-informasi yang disajikan di dalam wacana alami tidaklah selalu bersifat eksplisit. Ada informasi-informasi tertentu yang diekspresikan secara tidak langsung atau implisit. Informasi-informasi seperti itu secara formal tidak ada di dalam deretan-deretan kalimat wacana, akan tetapi dia hanya dapat diinterpretasikan dari informasi-informasi lain yang diekspresikan secara eksplisit. Van Dijk (1977) lebih lanjut menyebut fenomena informasi implisit dalam wacana seperti ini sebagai "mata rantai yang hilang" atau *missing links*. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyajian informasi secara implisit dan eksplisit di dalam wacana berita surat kabar dapat digunakan sebagai strategi untuk membangun perspektif pemberitaan.

4.2.4.2.1 Pola Penyajian Informasi secara Implisit

Dalam penelitian ini, informasi implisit dipergunakan sebagai salah satu strategi penahanan untuk membangun perspektif pemberitaan. Wartawan dan surat kabar seringkali menyajikan suatu informasi dalam berita dengan strategi ini untuk kepentingan-kepentingan mereka, seperti untuk menyamarkan, membuat tidak jelas, mereduksi, atau bahkan menghilangkan sesuatu yang dapat memojokkan dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Di dalam penelitian ini ditemukan juga adanya kecenderungan bahwa penyajian informasi secara implisit ini banyak digunakan oleh surat kabar yang pemberitaannya berperspektif pro pemerintah. Kecenderungan pemakaian strategi penyajian implisit ini tampak pada penyajian berita yang berkaitan dengan tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, atau lebih khusus lagi aparat keamanan.

4.2.4.2.2 Pola Penyajian Informasi secara Eksplisit

Penyajian informasi secara eksplisit di dalam berita surat kabar sebenarnya merupakan hal yang wajar dan merupakan keharusan karena salah satu prinsip dari jurnalisme adalah kejelasan informasi. Kejelasan informasi ini dibentuk salah satunya dengan mewujudkan proposisi-proposisi dalam deretan kalimat-kalimat atau klausa-klausa dalam wacana. Artinya adalah suatu kalimat atau klausa hendaknya mengandung satu proposisi. Dengan demikian, semua informasi di dalam wacana dapat ditemukan secara langsung di dalam deretan kalimat-kalimat wacana berita tanpa harus menginterpretasikannya dari kalimat-kalimat lain.

Di dalam konteks Pemerintahan Orde Baru, menyajikan informasi secara eksplisit terkadang sangat sulit untuk dilakukan apabila informasi tersebut bersifat "sensitif", berupa kritik, memojokkan, dan berpotensi menimbulkan polemik yang luas, serta dipandang membahayakan Pemerintah Orde Baru.

Mochtar Lubis (dalam Hutabarat, 1993:453) untuk fenomena seperti ini menyatakan bahwa “pada saat sekarang (*Pemerintahan Orde Baru: penulis*), surat kabar yang mau berfungsi sebagai pers bebas dan bertanggung jawab tidak bisa *survive*. Dan yang *survive* adalah surat kabar yang tidak bebas dan tidak melaksanakan tanggung-jawabnya”. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rosihan Anwar (dalam Hutabarat, 1993:453) sebagai berikut “saya akan bohong pada kalian, bila saya mengatakan ada kemerdekaan pers”. Apa yang dinyatakan oleh Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar ini merupakan suatu kesaksian bahwa surat kabar untuk dapat melakukan tugas-tugas jurnalistiknya, yang salah satunya adalah menyajikan informasi secara eksplisit pun, rasanya sangat sulit.

Namun demikian, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada akhir Era Orde Baru, terjadi suatu perkembangan yang sangat berarti dalam penyajian informasi surat kabar Indonesia. Penyajian informasi secara eksplisit berkaitan dengan berita-berita yang sensitif, yang mengkritik pemerintah, yang mengecam kebijakan pemerintah, banyak dilakukan oleh surat kabar-surat kabar Indonesia. Sebaliknya, penyajian informasi secara eksplisit yang menyoroti segala aktivitas mahasiswa yang bersifat negatif dan merugikan Pemerintah Orde Baru pun juga semakin banyak dilakukan oleh surat kabar-surat kabar tertentu.

4.3 Manifestasi Perspektif Pemberitaan Berbagai Surat Kabar Indonesia dalam Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa

Manifestasi perspektif pemberitaan dalam produksi bahasa dapat diamati keberadaannya tidak hanya dalam tataran wacana seperti yang diuraikan pada 4.2, tetapi dapat juga diamati dalam tataran kalimat, klausa, frasa, dan kata. Dari data yang ada, seperti dalam Lampiran 11, ditemukan tujuh pilihan bentuk-bentuk ekspresi bahasa yang merupakan manifestasi perspektif pemberitaan. Ketujuh pilihan bentuk-bentuk ekspresi bahasa yang dimaksud adalah ketransitifan, tindak tutur, pilihan kata, metafora, struktur informasi, modalitas, dan struktur nominalisasi. Berikut ini ketujuh hal tersebut akan dibahas satu persatu.

4.3.1 Ketransitifan

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketransitifan dengan berbagai macam proses yang dibawakannya, seperti proses material, proses mental, dan proses verbal, dipergunakan oleh para wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan. Pemilihan dan pemakaian proses tertentu dan bukan proses yang lain dalam deretan klausa atau kalimat oleh para wartawan, untuk menggambarkan realitas sosial yang terjadi berdasarkan persepsi mereka masing-masing, memperlihatkan suatu upaya membuat kesan khusus tertentu, seperti (1) menonjolkan, menyamarkan atau membuat tidak jelas, (2)

bersimpati, antipati, mendukung, menolak, dan sebagainya, terhadap aspek-aspek tertentu dari realitas sosial. Kesan khusus tersebut merupakan suatu indikator untuk mengetahui perspektif pemberitaan tertentu.

Berikut ini macam-macam proses yang dihasilkan oleh sistem ketransitifan, yang dipergunakan oleh para wartawan untuk membangun perspektif di dalam teks berita, dibahas satu persatu.

4.3.1.1 Proses Material

Proses-proses material menurut Halliday (1985) adalah proses-proses tindakan. Di dalam suatu kalimat atau klausa terbentuknya proses-proses material dalam rangka pemerian "apa yang tengah berlangsung (*goings on*)" pertama-tama ditentukan oleh pemilihan verba pengisi fungsi predikat. Verba pengisi fungsi predikat ini, baik yang bermakna proses perbuatan (*doing*) atau proses kejadian (*happening*), menentukan muncul tidaknya entitas yang berperan sebagai pelaku dan entitas yang berperan sebagai tujuan. Pemerian "apa yang tengah berlangsung (*goings on*)" dengan menggunakan proses-proses material juga semakin lengkap apabila ditambah dengan keterangan-keterangan yang terkait dengan proses material.

Dalam pelaporan berita surat kabar, proses-proses material ini sering dipergunakan oleh para wartawan untuk menampakkan perspektif pemberitaan. Dalam penelitian ini ditemukan ada dua cara perspektif

pemberitaan dibangun melalui proses-proses material, yakni (1) pemerian peristiwa dengan verba proses perbuatan, dan (2) pemerian peristiwa dengan verba proses kejadian.

4.3.1.1.1 Proses Perbuatan

Membangun perspektif dalam suatu kalimat atau klausa dengan menggunakan proses material dapat dilakukan dengan cara menampilkan proses perbuatan. Proses ini mengisyaratkan pemerian tentang apa yang dilakukan oleh partisipan tertentu, yang disebut sebagai partisipan pelaku, pada partisipan yang lain, yang disebut sebagai partisipan tujuan.

Apabila di dalam suatu kalimat atau klausa ingin diperikan suatu proses perbuatan dari perspektif tertentu, maka wartawan harus memilih dan memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan: (1) verba pengisi fungsi predikat, (2) partisipan-partisipan yang harus dimunculkan untuk melengkapi verba tersebut, dan keterangan yang berkaitan dengan proses perbuatan.

Berdasarkan analisis data, seperti yang terdapat dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, perspektif pemberitaan pada kalimat atau klausa yang membawakan proses perbuatan dapat dibangun sejak dari pemilihan verba pengisi fungsi predikat, kemudian partisipan-partisipan yang dihadirkan, terutama partisipan pelaku, serta keterangan yang terkait dengan proses perbuatan tersebut. Ketiga unsur ini masing-masing menyumbang dalam pembentukan perspektif dari suatu kalimat atau klausa.

Pemilihan dan pemakaian verba yang bermakna proses perbuatan seperti *pergi, masuk, menggiring, menguasai, berdemo, menggelar aksi*, dan sebagainya, menentukan sekali aspek-aspek apa dari peristiwa yang diperikan oleh wartawan. Pemerian peristiwa hanya pada aspek-aspek tertentu dan bukan aspek-aspek yang lain dapat dimanipulasikan untuk kepentingan membangun perspektif dalam kalimat atau klausa.

Kedua, di samping verba pengisi fungsi predikat, pemilihan (frase) nomina atau pronomina tertentu sebagai pengisi partisipan pelaku atau tujuan menentukan juga perspektif yang ingin ditampakkan dalam kalimat atau klausa. Keputusan untuk menempatkan entitas tertentu, misalnya *mahasiswa* atau *petugas keamanan*, sebagai partisipan pelaku mendampingi verba proses perbuatan menjadikan entitas tersebut sumber pemerian peristiwa, yang sekaligus menandai perspektif dalam kalimat atau klausa.

Ketiga, keterangan yang terkait dengan proses perbuatan dapat menimbulkan kesan tertentu yang memperkuat perspektif di dalam kalimat atau klausa. Keterangan yang menimbulkan kesan dan penilaian negatif terhadap proses perbuatan akan menampakkan suatu hal yang *unfavorable* terhadap partisipan pelakunya, sebaliknya keterangan yang menimbulkan kesan dan penilaian positif terhadap proses perbuatan akan menampakkan suatu hal yang *favorable* terhadap partisipan pelaku. Dari indikator *favorable* dan *unfavorable* inilah perspektif pemberitaan dapat diketahui.

4.3.1.1.2 Proses Kejadian

Membangun perspektif dalam suatu kalimat atau klausa dengan menggunakan proses material tidak hanya dilakukan dengan cara menampilkan proses perbuatan saja, tapi dapat juga dilakukan dengan menampilkan proses kejadian. Keduanya cara ini memiliki perbedaan dalam penekanan pemerian. Pemerian peristiwa dengan proses perbuatan lebih ditujukan untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh partisipan tertentu pada partisipan yang lain, sedangkan pemerian peristiwa dengan proses kejadian lebih mengungkapkan apa yang terjadi pada partisipan tertentu.

Apabila di dalam suatu kalimat atau klausa ingin diperikan suatu proses kejadian dari perspektif tertentu, maka wartawan harus memilih dan memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan verba pengisi fungsi predikat dan partisipan-partisipan yang harus dimunculkan untuk melengkapi verba tersebut. Verba pengisi fungsi predikat haruslah verba yang memiliki makna proses kejadian dan partisipan-partisipan yang harus dimunculkan untuk mendampingi verba tersebut adalah (1) partisipan tujuan, atau (2) partisipan tujuan dan pelaku. Dalam struktur kalimat atau klausa seperti ini partisipan tujuan menjadi sumber pemerian peristiwa sehingga partisipan ini akan mendapat penonjolan yang lebih daripada partisipan pelaku dan sekaligus akan menandai perspektif tertentu.

Berdasarkan analisis data, seperti yang terdapat dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, perspektif pemberitaan pada kalimat atau klausa yang membawakan proses kejadian dapat dibangun sejak dari pemilihan verba pengisi fungsi predikat, kemudian partisipan-partisipan yang dihadirkan, terutama partisipan tujuan, serta keterangan yang terkait dengan proses kejadian tersebut. Ketiga unsur ini masing-masing menyumbang dalam pembentukan perspektif dari suatu kalimat atau klausa. Pemilihan dan pemakaian verba yang bermakna proses kejadian seperti *tewas*, *tertembak*, *meninggal*, *terluka*, *diduduki*, dan sebagainya, menentukan sekali aspek-aspek apa dari peristiwa yang diperikan oleh wartawan. Pemerian peristiwa hanya pada aspek-aspek tertentu dan bukan aspek-aspek yang lain dapat dimanipulasikan untuk kepentingan membangun perspektif dalam kalimat atau klausa.

Kedua, di samping verba pengisi fungsi predikat, pemilihan (frase) nomina atau pronomina tertentu sebagai pengisi partisipan tujuan atau pelaku menentukan juga perspektif yang ingin ditampakkan dalam kalimat atau klausa. Keputusan untuk menempatkan entitas tertentu, misalnya *mahasiswa* atau *petugas keamanan*, sebagai partisipan tujuan mendampingi verba proses kejadian menjadikan entitas tersebut sumber pemerian peristiwa, yang sekaligus menandai perspektif dalam kalimat atau klausa.

Ketiga, keterangan yang terkait dengan proses kejadian memperlihatkan kesan tertentu yang dapat menentukan perspektif pemberitaan, bahkan dapat mengubah perspektif pemberitaan yang sudah ditandakan pada pemilihan partisipan tujuan. Apabila kesan tertentu itu bersifat negatif terhadap pihak mahasiswa atau bersifat positif terhadap pihak pemerintah, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif pro pemerintah. Sebaliknya, apabila kesan tertentu itu bersifat positif terhadap pihak mahasiswa atau bersifat negatif terhadap pihak pemerintah, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif pro mahasiswa.

4.3.1.2 Proses Mental

Proses-proses mental menurut Halliday (1985) adalah proses-proses pengideraan (*sensing*). Di dalam suatu kalimat atau klausa terbentuknya proses-proses mental dalam rangka pemerian "apa yang tengah berlangsung (*goings on*)" pertama-tama ditentukan oleh pemilihan verba pengisi fungsi predikat, baik yang bermakna proses perasaan (*feeling*), proses pemikiran (*thinking*), atau proses penglihatan (*perceiving*). Proses-proses pengideraan ini menentukan (1) munculnya nomina, frase nominal, atau pronomina yang berperan sebagai partisipan tertentu seperti pengidera dan fenomena, dan (2) hubungan antara partisipan-partisipan tersebut dalam proses-proses pengideraan.

Dalam pelaporan berita surat kabar, proses-proses mental sering dipergunakan oleh para wartawan untuk menampakkan perspektif pemberitaan. Dalam penelitian ini ditemukan ada tiga cara perspektif pemberitaan dibangun melalui proses-proses mental, yakni melalui: (1) pemerian peristiwa dengan penonjolan pada proses penglihatan, (2) pemerian peristiwa dengan penonjolan pada proses pemikiran, dan (3) pemerian peristiwa dengan penonjolan pada proses perasaan.

4.3.1.2.1 Proses Penglihatan (*Perceiving*)

Membangun perspektif dalam suatu peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan dengan cara menonjolkan proses mental yang dialami oleh wartawan atau partisipan yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan. Proses mental tersebut salah satunya didasarkan pada apa saja yang dilihat atau didengar tentang suatu peristiwa atau aspek-aspek tertentu dari peristiwa. Di dalam proses ini diisyaratkan adanya dua hal, yakni partisipan yang melihat atau mendengar, biasa disebut *pengindera*, dan apa yang dilihat atau didengar, biasa disebut *fenomena*. Unsur di dalam partisipan fenomena dapat berupa peristiwa, hal, orang, ditambah dengan sikap dari partisipan pengindera yang terimplikasikan di dalamnya.

Apabila di dalam suatu kalimat atau klausa ingin diperikan proses penglihatan terhadap suatu fenomena dari perspektif tertentu, maka wartawan harus memilih dan memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan verba

pengisi fungsi predikat dan partisipan-partisipan pendampingnya. Verba pengisi fungsi predikat haruslah diisi oleh verba yang memperlihatkan makna persepsi (*perception*) seperti *melihat, mendengar, menyimak, menyaksikan*, dan sebagainya. Selanjutnya, partisipan-partisipan yang harus dimunculkan untuk mendampingi verba-verba tersebut adalah pengindera dan fenomena. Keputusan untuk memilih (frase) nomina atau pronomina tertentu sebagai pengisi partisipan pengindera atau fenomena menentukan perspektif yang terbangun dalam kalimat atau klausa.

Berdasarkan analisis data, seperti yang terdapat dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perspektif pada kalimat atau klausa yang mengekspresikan proses penglihatan terutama ditentukan oleh entitas pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena, serta pemilihan partisipan yang dijadikan sebagai sumber pemerian fenomena.

Apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah aparat pemerintah atau para pendukung pemerintah, baik individu maupun lembaga dan fenomena yang dilihat dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap pemerintah, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses penglihatan itu adalah perspektif pro pemerintah. Sebaliknya, apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah mahasiswa atau para pendukung aksi mahasiswa, baik individu maupun lembaga, dan fenomena yang dilihat dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap mahasiswa,



maka perspektif yang diekspresikan dalam proses penglihatan adalah perspektif mahasiswa. Selanjutnya, apabila fenomena yang dilihat dan dikemukakan oleh partisipan pengindera, baik itu mahasiswa, pemerintah, atau pihak diluar keduanya itu, memperlihatkan kecenderungan tidak memihak atau mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif netral.

4.3.1.2.2 Proses Pemikiran (*Thinking*)

Membangun perspektif dalam suatu peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan dengan cara menonjolkan proses mental yang dialami oleh wartawan atau partisipan yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan. Proses mental tersebut salah satunya didasarkan pada apa yang dipikirkan tentang peristiwa atau aspek-aspek tertentu dari peristiwa tersebut. Proses yang seperti ini oleh Halliday (1985) dinamai proses pemikiran, yang di dalamnya terimplikasikan adanya partisipan pengindera, sebutan untuk partisipan yang mengalami proses itu, dan partisipan fenomena, sebutan untuk sesuatu hal yang memicu terjadinya proses itu.

Apabila di dalam suatu kalimat atau klausa ingin diperikan proses pemikiran terhadap suatu fenomena dari perspektif tertentu, maka wartawan harus memilih dan memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan verba pengisi fungsi predikat dan partisipan-partisipan pendampingnya. Verba pengisi fungsi predikat haruslah diisi oleh verba yang memperlihatkan makna

kognisi (*cognition*) seperti *menilai, menduga, diperkirakan, mengetahui, memikirkan, menimbang*, dan sebagainya. Selanjutnya, partisipan-partisipan yang harus dimunculkan untuk mendampingi verba-verba tersebut adalah partisipan pengindera dan fenomena. Pemilihan (frase) nomina atau pronomina tertentu sebagai pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena menentukan perspektif yang terbangun dalam kalimat atau klausa.

Berdasarkan analisis data seperti yang terdapat dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perspektif pada kalimat atau klausa yang mengekspresikan proses pemikiran, terutama ditentukan oleh entitas pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena.

Apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah aparat pemerintah atau para pendukung pemerintah, baik individu maupun lembaga dan fenomena yang dilihat dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap pemerintah, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses pemikiran itu adalah perspektif pro pemerintah. Sebaliknya, apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah mahasiswa atau para pendukung aksi mahasiswa, baik individu maupun lembaga, dan fenomena yang dipikirkan dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap mahasiswa, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses pemikiran adalah perspektif mahasiswa. Selanjutnya, apabila fenomena yang dipikirkan dan dikemukakan oleh partisipan pengindera, baik itu mahasiswa, pemerintah, atau pihak diluar

keduanya itu, memperlihatkan kecenderungan tidak memihak atau mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif netral.

4.3.1.2.3 Proses Perasaan (*Feeling*)

Membangun perspektif dalam suatu peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan dengan cara menonjolkan proses mental yang dialami oleh wartawan atau partisipan yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan. Proses mental tersebut dapat didasarkan pada apa saja yang dirasakan tentang suatu peristiwa atau aspek-aspek tertentu dari peristiwa. Proses yang seperti ini oleh Halliday (1985) dinamai proses perasaan, yang di dalamnya terimplikasikan adanya partisipan pengindera, sebutan untuk partisipan yang mengalami dan merasakan proses itu, dan partisipan fenomena, sebutan untuk sesuatu hal yang memicu terjadinya proses itu.

Apabila di dalam suatu kalimat atau klausa ingin diperikan proses perasan terhadap suatu fenomena dari perspektif tertentu, maka wartawan harus memilih dan memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan verba pengisi fungsi predikat dan partisipan-partisipan pendampingnya. Verba pengisi fungsi predikat haruslah diisi oleh verba yang memperlihatkan makna afeksi (*affection*) seperti *menyesal*, *memprihatinkan*, *merisaukan*, *semakin emosi*, *mengkuatirkan*, *mencintai*, *menyenangkan*, dan sebagainya. Selanjutnya, partisipan-partisipan yang harus dimunculkan untuk mendampingi

verba-verba tersebut adalah partisipan pengindera dan fenomena. Pemilihan (frase) nomina atau pronomina tertentu sebagai pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena menentukan perspektif yang terbangun dalam kalimat atau klausa.

Berdasarkan analisis data, seperti yang terdapat dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perspektif pada kalimat atau klausa yang mengekspresikan proses perasaan, terutama ditentukan oleh entitas pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena.

Apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah aparat pemerintah atau para pendukung pemerintah, baik individu maupun lembaga dan substansi fenomena yang dirasakan dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap pemerintah, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses perasaan itu adalah perspektif pro pemerintah. Sebaliknya, apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah mahasiswa atau para pendukung aksi mahasiswa, baik individu maupun lembaga, dan substansi fenomena yang dirasakan dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap mahasiswa, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses perasaan adalah perspektif mahasiswa. Selanjutnya, apabila substansi fenomena yang dilihat dan dikemukakan oleh partisipan pengindera, baik itu mahasiswa, pemerintah, atau pihak diluar keduanya itu, memperlihatkan

kecenderungan tidak memihak atau mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif netral

4.3.1.3 Proses Verbal

Proses verbal menurut Halliday (1985) adalah proses pengucapan. Di dalam proses ini diisyaratkan adanya dua hal, yakni (1) adanya verba pengisi predikat yang bermakna pengucapan, dan (2) adanya partisipan yang mengucapkan atau disebut pengucap (*sayer*) dan apa-apa yang diucapkan, dikatakan, atau dibilang, yang disebutkan ucapan. Proses-proses verbal ini secara sintaktis diekspresikan di dalam kalimat subordinatif. Partisipan pengucap berada pada klausa utama dan partisipan ucapan berada di dalam klausa sematan.

Dalam pemberitaan, proses verbal ini dapat juga digunakan oleh para wartawan untuk menampakkan perspektif pemberitaan. Dalam penelitian ini ditemukan ada dua cara perspektif pemberitaan ditampakkan dalam proses verbal, yakni (1) dengan kutipan langsung, dan (2) dengan kutipan tidak langsung.

4.3.1.3.1 Proses Verbal dengan Kutipan Langsung

Penyajian proses verbal dengan kutipan langsung mengisyaratkan bahwa wartawan menulis apa yang diucapkan oleh sumber berita persis apa adanya tanpa mengubah, menambahi, atau mengurangi. Apa-apa yang

diucapkan, dikatakan, atau diujarkan tersebut dituliskan di antara tanda petik dalam suatu klausa tersendiri, yakni klausa sematan, dan kemudian diikuti oleh bentuk asal dari verba, seperti *ujar, kata, jelas, tutur, tandas*, dan diikuti pula oleh partisipan pengucap dalam bentuk klitik-nya atau pronomina lain, (frase) nomina, atau nama pengucapnya.

Dalam pemberitaan, proses verbal dengan kutipan langsung dapat juga dipergunakan untuk memanifestasikan perspektif dalam suatu kalimat atau klausa. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa para wartawan ketika melaporkan suatu peristiwa seringkali mengutip secara langsung ucapan seorang tokoh, aparat keamanan, pemerintah, atau siapa saja untuk memperkuat perspektif yang dibangunnya dalam wacana. Apabila yang akan dibangun adalah perspektif pro mahasiswa, maka pemilihan nara sumber untuk berita itu mengambil partisipan mahasiswa atau pihak-pihak yang mendukung gerakan mahasiswa. Sebaliknya, apabila yang akan dibangun adalah perspektif pro pemerintah, maka narasumber yang dipilih sebagai sumber berita adalah pihak pemerintah, aparat keamanan, elemen-elemen pendukung Orde Baru, seperti Golkar dan ormas-ormas politiknya.

4.3.1.3.2 Proses Verbal dengan Kutipan Tidak Langsung

Penyajian proses verbal dengan kutipan tidak langsung mengisyaratkan bahwa wartawan menulis apa saja yang diucapkan oleh sumber berita dengan kata-katanya sendiri. Oleh karena itu, ekspresi proses verbalnya berbeda

dengan kutipan langsung. Perbedaan itu terlihat dalam dua hal, yakni pada (1) verba yang menandakan proses pengucapan, dan (2) partisipan ucapan yang dihadirkan. Pertama, pada kutipan tidak langsung, verba yang dimunculkan untuk membawakan proses verbal adalah verba kompleks, seperti *menurut*, *mengatakan*, *menegaskan*, *mengaku*, *menyebutkan*, *menambahkan*, *menghimbau*, dan *menjelaskan*. Kedua, apa yang diucapkan, dikatakan, atau diujarkan oleh sumber berita pada kutipan tidak langsung dipadukan dengan apa yang dituliskan oleh wartawan di dalam suatu kalimat subordinatif. Dengan cara yang demikian, kemungkinan lebih lanjut yang dapat terjadi adalah wartawan dapat melakukan perubahan berupa penggantian, penambahan, atau pengurangan kata-kata dalam partisipan ucapan. Dari segi sintaktis, apa yang diucapkan, dikatakan, atau diujarkan sumber berita ditempatkan dalam klausa sematan yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari pengisi fungsi objek dalam kalimat subordinatif.

Dalam pelaporan suatu berita, proses verbal dengan kutipan tidak langsung dapat juga dipergunakan untuk memanasifasikan perspektif dalam suatu kalimat atau klausa. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa para wartawan ketika melaporkan suatu peristiwa seringkali mengutip secara tidak langsung ucapan seorang tokoh, aparat keamanan, pemerintah, atau pihak mana saja yang terkait untuk memperkuat perspektif yang dibangunnya dalam wacana berita.

4.3.2. Tindak Tutur

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa kalimat-kalimat tertentu di dalam teks berita selain berisi proposisi atau informasi yang mengisyaratkan tindak lokusi, juga mengisyaratkan tindak ilokusi dan tindak perlokusi. Tindak lokusi di dalam kalimat kadang sudah memperlihatkan perspektif pemberitaan, namun kadang ada pula yang belum memperlihatkan perspektif pemberitaan. Pada kasus seperti ini, perspektif pemberitaan baru dapat diungkap dari tindak ilokusi dan tindak perlokusi yang secara sengaja atau pun tidak sengaja dikreasikan oleh wartawannya.

Hasil analisis tindak tutur pada data, seperti yang terdapat dalam Lampiran 13, menunjukkan beberapa hal berikut ini. Pertama, perspektif pemberitaan pada kalimat-kalimat tertentu sudah dapat dikenali hanya dengan mengandalkan pada analisis tindak lokusi tanpa harus melakukan analisis tindak ilokusi dan perlokusi. Pada kasus ini analisis tanpa memperhitungkan konteks tuturan pun sudah mencukupi untuk menemukan perspektif pemberitaan yang ditandakan. Kedua, pada beberapa kalimat lain, perspektif pemberitaan baru dapat diungkapkan apabila dianalisis tindak ilokusi dan tindak perlokusinya dengan mendasarkan diri pada konteks tuturan teks berita tersebut dan teks-teks lain. Pada kasus ini, analisis tindak ilokusi dan tindak

perlokusi menjadi cara penting untuk menemukan perspektif pemberitaan yang terkadang hanya kelihatan samar-samar atau meragukan.

4.3.3 Pilihan Kata

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa pilihan kata dipergunakan oleh surat kabar-surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru untuk membangun perspektif pemberitaan. Pemilihan kata tertentu yang memiliki fitur nilai eksperiental, nilai relasional, atau nilai ekspresif merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perspektif yang dibangun oleh masing-masing surat kabar. Nilai eksperiental pada kata menandakan pandangan, pengetahuan, dan keyakinan yang diperlihatkan oleh surat kabar. Nilai relasional pada kata menandakan hubungan-hubungan sosial antar partisipan yang digambarkan surat kabar. Dan terakhir, nilai ekspresif menandakan penilaian atau evaluasi surat kabar atas identitas atau ciri sosial dari partisipan atau subjek yang dilaporkan. Ketiga nilai ini memperjelas fenomena bahwa pilihan kata memiliki fungsi kategorisasi dalam kaitannya dengan perbedaan perspektif di dalam kalimat maupun klausa.

4.3.3.1 Pilihan Kata Berfitur Nilai Eksperiental

Kata-kata tertentu menurut Fairclough (1989) memiliki fitur nilai eksperiental karena menandakan suatu jejak dan isyarat di mana pengalaman penghasil teks tentang dunia alam atau dunia sosial direpresentasikan.

Berbedanya pengalaman para penghasil teks tentang dunia alam dan dunia sosial yang sama akan ditampakkan atau dikodekan dalam pilihan kata mereka. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh para wartawan tentang gerakan reformasi mahasiswa dan tentang Pemerintahan Orde Baru direpresentasikan dalam pilihan-pilihan kata mereka. Perbedaan pengalaman antar wartawan dan antar surat kabar itu ditampakkan dalam relasi leksikal, seperti sinonimi dan hiponimi.

4.3.3.2 Pilihan Kata Berfitur Nilai Relasional

Kata yang memiliki fitur nilai relasional menurut Faiclough (1989) menandakan suatu jejak dan isyarat dari penghasil teks di mana hubungan sosial antar partisipan direpresentasikan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemakaian kata-kata tertentu yang memiliki fitur nilai relasional di dalam kalimat berpotensi membentuk dan menandakan hubungan-hubungan sosial antar partisipan, seperti hubungan atas-bawah dalam tingkatan sosialnya, yang berupa penguasa-rakyat, pimpinan-pegawai, dan sebagainya. Selanjutnya, kata-kata yang berfitur relasional itu juga dipergunakan oleh para wartawan untuk menandakan perspektif pemberitaan yang dibangun oleh surat kabarnya.

4.3.3.3 Pilihan Kata Berfitur Nilai Ekspresif

Kata-kata tertentu yang memiliki fitur nilai ekspresif menurut Faiclough (1989) menandakan suatu jejak dan isyarat dari penghasil teks di mana

evaluasinya tentang realitas sosial, yang berupa nilai rasa simpati, suka, menyenangkan, membenci, antipati, dan sebagainya, direpresentasikan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk mempengaruhi sikap pembaca agar sesuai dengan sikap penghasil teksnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemakaian kata-kata tertentu yang memiliki fitur nilai ekspresif di dalam teks-teks berita karena menunjukkan penilaian tertentu dari wartawannya terhadap subjek yang diberitakan, maka kata-kata tersebut berpotensi menampakkan perspektif pemberitaan.

4.3.4 Metafora

Dari analisis terhadap data-data metafora, seperti yang terdapat dalam Lampiran 15, ditemukan bahwa metafora tidak hanya berfungsi sebagai alat penggambaran suatu objek dengan cara analogi, tetapi berfungsi pula sebagai penanda perspektif pemberitaan di dalam kalimat. Kata-kata tertentu penanda metafora ternyata menandakan pula sikap dan penilaian wartawan terhadap suatu objek yang diberitakan. Baik atau buruknya penilaian, simpati atau antipati, keberpihakan atau ketidakberpihakan wartawan terhadap suatu peristiwa dan partisipan-partisipan yang terlibat di dalamnya dapat digunakan sebagai indikator untuk menemukan perspektif pemberitaan yang dibangun dalam kalimat.

4.3.5 Struktur Informasi

Pengaturan struktur informasi atau organisasi isi proposisional dalam kalimat atas informasi latar dan informasi baru dapat dipergunakan untuk menandai perspektif pemberitaan. Perspektif pemberitaan akan terlihat dari pemilihan bagian proposisi tertentu sebagai informasi baru dan bagian proposisi yang lain sebagai informasi latar.

Analisis terhadap data, seperti yang terlihat dalam Lampiran 16, memperlihatkan beberapa temuan berikut ini. Pertama, praanggapan-praanggapan yang terbentuk sebagai hasil penataan proposisi-proposisi tertentu sebagai pengisi informasi latar dan pengisi informasi baru dapat dijadikan indikator untuk mengungkap perspektif pemberitaan yang dibangun dalam kalimat. Apabila wartawan bertujuan menandakan perspektif pemberitaan tertentu, apakah itu pro pemerintah, pro mahasiswa, atau netral, dia dapat mengisi informasi latar dan baru dengan proposisi yang sesuai dan mendukung tujuannya itu.

4.3.6 Modalitas

Bentuk ekspresi bahasa berikutnya yang digunakan untuk memanifestasikan perspektif pemberitaan dalam tataran kalimat adalah elemen-elemen interpersonal seperti modalitas. Modalitas oleh Fowler (1986;1991) dimengerti sebagai komentar atau sikap yang diberikan oleh penulis terhadap hal yang dilaporkan, yakni keadaan, peristiwa, dan tindakan.

Seperti halnya ketransitifan, pilihan kata, metafora, tindak tutur, dan struktur informasi, modalitas juga memiliki peluang yang besar untuk digunakan oleh wartawan dalam memanifestasikan perspektif pemberitaan, serta mempengaruhi opini para pembacanya. Dalam hal ini, wartawan dapat dengan mudah memasukkan pandangan pribadi atau institusinya ke dalam proposisi-proposisi yang dituliskannya melalui pilihan modalitas.

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa modalitas sebagai manifestasi perspektif pemberitaan dalam tataran kalimat cenderung digunakan oleh wartawan untuk menampakkan perspektif pemberitaan yang pro pemerintah daripada perspektif pemberitaan pro mahasiswa maupun netral. Apabila dipresentasikan dari data modalitas yang ada, 75% data digunakan wartawan untuk menampakkan perspektif pemberitaan pro pemerintah, 10% perspektif pemberitaan pro mahasiswa, dan 15% untuk perspektif pemberitaan netral.

Modalitas sebagai komentar atau sikap dari wartawan atau institusinya yang tertuang dalam teks, seperti yang terdapat dalam Lampiran 17, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni (1) kebenaran, (2) keharusan, dan (3) izin. Berikut ini masing-masing modalitas akan diuraikan satu persatu.

4.3.6.1 Modalitas Kebenaran

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa seorang wartawan dengan modalitas kebenaran mengindikasikan atau menyatakan secara tidak langsung pada pembaca: (1) suatu komitmen pada kebenaran dari suatu proposisi yang

dituliskannya, atau (2) suatu prediksi tingkat kemungkinan dari deskripsi suatu kejadian yang terjadi. Komitmen dan prediksi yang diberikan ini secara eksplisit maupun implisit mengungkap perspektif pemberitaan dalam suatu kalimat, baik itu perspektif pro pemerintah, perspektif pro mahasiswa, maupun perspektif netral.

4.3.6.2 Modalitas Keharusan

Dengan modalitas keharusan, wartawan menetapkan bahwa partisipan dalam suatu peristiwa *seharusnya* atau *tidak seharusnya* melakukan tindakan khusus dalam proposisi itu. Pemakaian modalitas ini mencerminkan penilaian, sikap, dan pandangan wartawan terhadap fenomena-fenomena sosial yang dilaporkan. Penilaian, sikap, dan pandangan wartawan ini secara eksplisit maupun implisit mencerminkan perspektif pemberitaan yang ingin ditampilkan.

4.3.6.3 Modalitas Izin

Dengan modalitas izin, wartawan atau partisipan yang dilaporkan oleh wartawan mengindikasikan suatu persetujuan atau sebaliknya penolakan pada partisipan (lain) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata-kata modalitas yang digunakan adalah *boleh*, *dapat*, dan *bisa*, yang mungkin juga divariasikan dengan kata modalitas lain, seperti *sangat*, *kurang*, *hanya*, *tidak*, *tak*, dan sebagainya. Kata-kata yang digunakan sebagai penanda komentar

dan sikap penulis dalam tipe ini lebih netral daripada kata-kata penanda komentar dan sikap penulis dalam tipe modalitas *kebenaran*.

4.3.7. Struktur Nominalisasi

Berdasarkan analisis data struktur nominalisasi, seperti yang terdapat dalam Lampiran 18, ditemukan beberapa hal berikut ini. Pertama, perspektif pemberitaan dapat dimanifestasikan melalui struktur nominalisasi dengan cara mereduksi penonjolan pada partisipan pelaku atau partisipan tujuan dan mengalihkannya ke proses tindakan yang dilakukan oleh partisipan. Kedua, apabila dilihat dari segi strukturnya, konsekuensi dari pereduksian penonjolan pada partisipan, baik pelaku maupun tujuan, berupa tematisasi subjek yang berupa verba yang telah mengalami proses nominalisasi. Ketiga, dari segi kehadiran partisipan, dalam struktur semacam ini salah satu atau bahkan semua partisipan berpotensi tidak muncul secara formal dalam struktur kalimat. Keempat, apabila di dalam kalimat terdapat keterangan yang berkaitan dengan proses tindakan, maka keterangan tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya perspektif pemberitaan, baik itu perspektif pro mahasiswa, perspektif pro pemerintah, ataupun perspektif netral.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL-HASIL PENELITIAN

Bab ini melaporkan pembahasan temuan-temuan penelitian yang sudah dilaporkan dalam Bab IV di muka. Sistematika pelaporan disusun sebagai berikut: (1) pembahasan temuan tentang perspektif pemberitaan yang muncul pada surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, (2) pembahasan temuan tentang manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru ke dalam strategi penyajian informasi, dan (3) pembahasan temuan tentang manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru ke dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa.

5.1 Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru

Pada 4.1 di muka telah ditemukan bahwa perspektif pemberitaan yang tampak dalam surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru adalah perspektif pro mahasiswa, perspektif pemerintah, dan perspektif netral. Dari Tabel 4.2 pada sub bab 4.1 dapat ditemukan bahwa selama masa akhir era Orde Baru, surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan *Suara Karya* cenderung menggunakan perspektif pro pemerintah dalam memberitakan peristiwa-peristiwa sosial politik. Delapan puluh persen berita sosial politik yang

diberitakan surat kabar *Angkatan Bersenjata* dan tujuh puluh persen peristiwa sosial politik yang diberitakan surat kabar *Suara Karya* mengambil perspektif pro pemerintah. Sementara itu, surat kabar *Kompas* dan *Republika* dalam memberitakan peristiwa-peristiwa sosial politik cenderung merata dalam pemakaian perspektif, baik pro pemerintah, pro mahasiswa, ataupun netral.

5.1.1 Tiga Perspektif Pemberitaan

Berikut ini ketiga perspektif pemberitaan, yakni perspektif pro mahasiswa, perspektif pro pemerintah, dan perspektif netral, dibahas satu persatu dan diberi ilustrasi secukupnya.

5.1.1.1 Perspektif Pro Mahasiswa

Perspektif pro mahasiswa adalah sudut pandangan dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide, dan pandangan dari mahasiswa, serta pihak-pihak yang anti pemerintah, yang mendapatkan bentuk dan penyaluran dalam gerakan reformasi mahasiswa Indonesia. Apabila seorang wartawan atau surat kabar melaporkan suatu peristiwa dari perspektif pro mahasiswa, dapat diduga wartawan atau surat kabar tersebut memiliki sikap: (1) mendukung atau memihak (*favorable*), (2) positif atau setuju, dan (3) suka, senang, serta simpati pada aksi-aksi mahasiswa berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan itu. Sikap-sikap ini otomatis membawa dampak yang sebaliknya pada pihak lain yang berada dalam posisi berhadapan dengan gerakan mahasiswa dalam peristiwa yang dilaporkan. Sikap-sikap itu adalah

(1) perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*), (2) negatif, tidak setuju, berkeberatan, dan (3) tidak suka atau tidak simpati terhadap pihak lain yang berada dalam posisi berseberangan dengan mahasiswa.

Berikut ini diberikan kutipan (5.1) yang memperlihatkan sikap wartawan atau surat kabar yang mendukung dan memihak pada mahasiswa.

**(5.1) Insiden di Universitas Trisakti:
Enam Mahasiswa Tewas**

Enam mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (12/5). Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol (*Grogol fly over*). Puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan [...]. (1.1a)

Dari kutipan (5.1) dapat diungkapkan sikap wartawan dan surat kabar yang mencerminkan perspektif pro mahasiswa berdasarkan tiga indikator awal, yakni topik, partisipan, dan nada pemberitaan. Dari segi topik, wartawan memutuskan memilih "*tewasnya 6 mahasiswa Trisakti oleh tembakan aparat keamanan*" sebagai topik yang diangkat dari peristiwa atau insiden Trisakti yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei 1998. Keputusan mengangkat topik ini dan bukan topik yang lain, seperti "unjuk rasa mahasiswa yang melanggar hukum, anarkis, destruktif, atau bahkan topik-topik yang berkaitan dengan aparat keamanan", tentunya bukan tanpa alasan. Ada sikap-

sikap tertentu yang didasari oleh (1) keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki para wartawan, atau (2) visi dan misi yang diperjuangkan oleh lembaga surat kabar tempat wartawan itu bekerja. Dari topik yang dikembangkan dalam paragraf pertama dalam kutipan (5.1) terlihat bahwa wartawan memiliki sikap memihak dan mendukung (*favourable*) pada gerakan mahasiswa dan bersikap tidak memihak dan tidak mendukung tindakan pihak aparat keamanan.

Dari indikator partisipan dalam insiden Trisakti terlihat bahwa hanya partisipan mahasiswa sajarah yang mendapat fokus dalam pemberitaan. Ini terlihat dari disebutkan secara berulang-ulang partisipan mahasiswa dalam setiap awal kalimat pada paragraf pertama, seperti: *Enam mahasiswa [...]*; *Keenam mahasiswa [...]*; *Puluhan mahasiswa lainnya [...]*.

Dari indikator nada pemberitaan terlihat bahwa wartawan menilai positif aksi-aksi mahasiswa. Wartawan menyebut aksi-aksi mahasiswa dengan *aksi keprihatinan* dan bukan dengan istilah lain seperti *aksi kerusuhan*. Selain itu, wartawan menyebut intensitas penembakan oleh aparat itu dengan kata-kata *berondongan peluru* yang membawa kesan “membabi buta dan asal menembak”. Kesan ini memperlihatkan penilaian negatif terhadap aparat keamanan.

Contoh lain untuk sikap positif, mendukung, dan simpati terhadap aksi mahasiswa juga terlihat seperti dalam kutipan (5.2) berikut ini.

(5.2) Bentrokan lagi, Puluhan Terluka

Dipo Alam: Aksi Mahasiswa Bukan Langkah Sia-sia

Aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia, menurut mantan ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977, merupakan langkah efektif untuk mendorong perubahan. "Apa yang mereka lakukan bukan langkah yang sia-sia, dan akan membuahkan hasil," ujar Dipo ketika dihubungi *Republika*, kemarin, berkaitan dengan aksi unjuk rasa belakangan ini.

Dalam beberapa hari ini di berbagai kampus banyak digelar aksi keprihatinan. Pada hari Rabu lalu, misalnya, secara serentak sejumlah kampus di tanah air melancarkan aksi keprihatinan dengan tuntutan yang beragam dan cara yang bermacam-macam pula. Bahkan, pada hari itu para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga mengirimkan wakil-wakilnya untuk ikut aksi bersama di kampus UI Salemba.

Menanggapi tuntutan mahasiswa itu, alumnus Jurusan Kimia UI ini berpendapat semua pihak mestinya cepat merespon, jangan ABRI saja. [...]

Menurut pandangan Dipo, aksi mahasiswa saat ini masih wajar dan tidak menyimpang. "Saya senang melihat mahasiswa sekarang kritis," tambahnya. Ia secara tegas mendukung [...]. (l. 3b).

Dari indikator topik, wartawan memutuskan memilih "*aksi mahasiswa bukan langkah sia-sia*" sebagai topik yang diangkat dari peristiwa unjuk rasa mahasiswa di seluruh Indonesia. Keputusan mengangkat topik ini secara implisit memperlihatkan adanya dukungan dan sikap positif terhadap aksi mahasiswa Indonesia.

Dari indikator partisipan, yang mendapat fokus perhatian dan menjadi sumber berita adalah partisipan Dipo Alam, yakni, seorang mantan ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977, alumnus Jurusan Kimia UI, dan juga

Kepala Biro Industri dan Perdagangan Bappenas ini. Dalam tiga paragraf pertama, partisipan Dipo Alam selalu muncul mendapat fokus perhatian yang lebih dari partisipan lainnya. Selain itu, pernyataan-pernyataan Dipo Alam dijadikan sebagai topik wacana daripada pernyataan-pernyataan partisipan-partisipan lain yang ada dalam teks, seperti Prof. Dr. M. Budyatna, aparat keamanan, dan lain sebagainya.

Dari indikator nada pemberitaan terlihat bahwa wartawan mendukung dan menilai positif gerakan mahasiswa. Ini terlihat dari diberinya porsi yang banyak terhadap pernyataan-pernyataan Dipo Alam dalam berita yang secara terang-terangan mendukung mahasiswa, seperti pernyataan: "*Apa yang mereka lakukan bukan langkah yang sia-sia, dan akan membuahkan hasil.*" (paragraf 1); dan "*Saya senang melihat mahasiswa sekarang kritis,*" (paragraf 4).

5.1.1. 2 Perspektif Pro Pemerintah

Perspektif pro pemerintah adalah sudut pandangan dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide, dan pandangan pemerintah. Apabila wartawan atau surat kabar melaporkan suatu peristiwa dari perspektif pemerintah, dapat diduga wartawan atau surat kabar tersebut memiliki sikap-sikap: (1) mendukung atau memihak (*favorable*), (2) positif atau setuju, dan (3) suka, senang, serta simpati pada kebijakan dan tindakan pemerintah atau aparat keamanan berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.

Sikap-sikap ini otomatis membawa dampak yang sebaliknya pada pihak lain yang berada dalam posisi berhadapan dengan pemerintah dalam peristiwa yang dilaporkan. Sikap-sikap itu adalah (1) tidak mendukung, mengecam, menyalahkan, dan tidak memihak (*unfavorable*), (2) negatif, tidak setuju, berkeberatan, dan (3) tidak suka, tidak simpati atau antipati terhadap partisipan lain yang berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintah dan aparat.

Berikut ini diberikan kutipan (5.3) yang memperlihatkan sikap wartawan yang mendukung dan memihak pada pemerintah atau aparat.

(5.3) Mahasiswa turun ke jalan, yang rugi rakyat

Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto mengatakan, keinginan mahasiswa untuk tetap turun ke jalan merupakan suatu ancaman terhadap pemerintah. Sebab kalau turun ke jalan dikhawatirkan akan disusupi oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan politik maupun finansial.

"Kalau turun ke jalan yang rugi siapa? Saya kira rakyat yang akan rugi, karena mahasiswa turun ke jalan sudah pasti akan disusupi oleh pihak lain yang akan memanfaatkan situasi itu. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, buntutnya nanti ada anarkis-destruktif yang merugikan rakyat." Jendral Wiranto mengemukakan itu dalam dialog 15 Menteri [...].

Pemerintah, tegasnya, tetap pada ketentuannya, bahwa para mahasiswa hanya boleh melakukan kegiatan di dalam kampus. [...]. Jangan sampai ke luar, sebab masyarakat akan terganggu dan kalian dikhawatirkan disusupi pihak lain," ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan [...]

“Di Solo sudah banyak korban, begitu juga di Yogya. Saya ingin bertanya kenapa mahasiswa bersikeras turun ke jalan [...]. (1 3c).

Dari indikator topik, wartawan memutuskan memilih “*mahasiswa turun ke jalan merupakan ancaman terhadap pemerintah*” sebagai topik yang diangkat dari peristiwa unjuk rasa mahasiswa di seluruh Indonesia. Keputusan mengangkat topik ini secara implisit memperlihatkan, di satu sisi adanya dukungan terhadap pemerintah dalam menghadapi aksi-aksi mahasiswa; dan di sisi lain, tampak adanya sikap negatif terhadap aksi mahasiswa.

Dari indikator partisipan, yang mendapat fokus perhatian dan menjadi sumber berita adalah Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto. Hampir semua paragraf hanya merupakan pengembangan lebih lanjut dari pernyataan Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto, yang dalam setiap paragraf ditampilkan dengan bentuk pronomina seperti: *Saya* (paragraf 2 kalimat 2); *-nya* (paragraf 4 kalimat 1); *la* (paragraf 5 kalimat 1); *Saya* (paragraf 7 kalimat 2).

Dan terakhir dari nada pemberitaan, wartawan lebih banyak menyajikan pernyataan Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto sebagai titik tolak pengembangan beritanya. Ini berarti, wartawan mendukung semua sikap pemerintah melalui Jendral Wiranto yang menganggap aksi mahasiswa sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang mengganggu dan merugikan masyarakat. Nada pemberitaan yang negatif, sinis, tidak senang, dan tidak

setuju ini mewarnai keseluruhan pemberitaan dari surat kabar *Angkatan Bersenjata* ini.

Contoh lain untuk perspektif pemerintah ini dapat dicermati dari kutipan (5.4) berikut ini.

(5.4) Aksi Mahasiswa Mengarah Pada Parlemen Jalanan

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang kian marak di beberapa daerah saat ini cenderung mengarah kepada "parlemen jalanan", bahkan dapat berkembang menjadi semacam *people power*. Citra sebagai insan kampus yang membawa bendera intelektualitas terasa makin memudar.

"Aksi unjuk rasa mahasiswa seperti di UNS Solo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lain-lain, misalnya, hanya menambah masalah saja. Yang terjadi siapa menganiaya siapa sehingga masalah pokoknya tidak tercapai dan sengketanya bertambah," kata Irsyad Sudiro [...]. Irsyad mengingatkan, mahasiswa jangan membuat parlemen jalanan. [...]

Jika mahasiswa menyalurkan aspirasi ke DPR, Irsyad yakin posisi DPR akan makin menguat [...]. (I. 3a).

Wartawan dalam teks berita ini mengambil topik "*aksi mahasiswa mengarah pada parlemen jalanan dan dapat berkembang menjadi people power*". Topik ini memperlihatkan sikap negatif dan sinis wartawan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sikap ini secara jelas memperlihatkan perspektif yang berseberangan dengan mahasiswa, yakni perspektif pro pemerintah.

Dari segi partisipan, wartawan memberi fokus perhatian yang lebih pada partisipan Irsyad Sudiro, yakni tokoh dari Fraksi Karya Pembangunan DPR

Republik Indonesia. Partisipan ini dimunculkan pada paragraf 1, 2, 3, dan 4 lebih banyak daripada partisipan yang lain. Partisipan ini adalah tokoh Golkar yang tentunya akan selalu membela kepentingan Pemerintahan Orde Baru dan tidak segan-segan mengkritik dan mengecam aksi-aksi mahasiswa.

Nada pembicaraan yang dapat tertangkap dari kutipan di atas antara lain adalah sindiran, kecaman, dan justru sikap menyalahkan. Ini terlihat dari kalimat-kalimat dalam paragraf 1 dan 2, yakni "*citra sebagai insan kampus yang membawa bendera intelektualitas terasa makin memudar,*" dan "*aksi unjuk rasa mahasiswa [...] hanya menambah masalah saja. Yang terjadi siapa menganiaya siapa, sehingga masalah pokoknya tidak tercapai dan sengketyanya bertambah.*"

5.1.1. 3 Perspektif Netral

Perspektif netral adalah sudut pandangan dalam melihat suatu peristiwa yang didasari oleh sikap wartawan yang akomodatif dan netral terhadap semua pihak yang terlibat konflik dalam wacana berita, yakni pemerintah atau aparat keamanan di satu sisi dan mahasiswa atau pihak yang anti pemerintah di sisi lain dalam peristiwa yang diberitakan. Wartawan dalam hal ini melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut secara proporsional. Pihak mahasiswa dan pihak pemerintah, dan pihak-pihak di luar keduanya yang menjadi pendukungnya selalu diperhitungkan dalam proses produksi berita. Selain itu, wartawan lebih mengandalkan pada hasil pemantauan lapangan secara

mandiri untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak bias, dan tidak hanya mendasarkan informasi dari sumber-sumber berita yang memiliki rasa keberpihakan.

Berikut ini diberikan kutipan (5.5) yang memperlihatkan sikap wartawan yang netral, tidak mendukung dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah atau aparat dan mahasiswa Indonesia atau masyarakat. Wartawan dalam kutipan ini bersikap akomodatif. Semua pihak yang terlibat langsung, atau hanya terkait saja dalam wacana berita ini, mendapat kesempatan yang proporsional untuk dilaporkan dalam teks berita.

(5.5) ABRI Bantah Tangkap Sejumlah Aktivistis

Sejumlah aktivis dikabarkan raib. Tak jelas di mana kini mereka berada. Isu yang beredar mereka "dibawa" sekelompok orang tak dikenal. Namun, Kapuspen ABRI Brigjen TNI Wahab Mokodongan membantah bahwa mereka ditangkap aparat keamanan.

[...] Menurut Mokodongan, orang yang berambut cepak dan berbadan tegap—figur penangkap yang digambarkan di media massa—belum tentu anggota ABRI. "Jangan membuat opini yang salah terhadap masyarakat bahwa yang melakukan penculikan itu anggota ABRI," katanya.

Tokoh Partai Rakyat Demokratik (PRD) Andi Arief, sejak Sabtu pekan lalu dibawa sekelompok orang saat berada di ruko milik keluarganya, di Palembang. [...]

Keluarganya menduga Andi Arief ditangkap aparat keamanan. Selain melakukan konfirmasi kepada aparat keamanan tentang keberadaannya, mereka kemudian mengadukan masalah itu ke LBH Bandar Lampung. [...]



[...] Kabar hilangnya sejumlah aktivis juga menarik perhatian Menkeh Prof. Dr. Muladi. Ia mengaku tidak tahu latar belakang raibnya para aktivis itu. "Ini perlu *clearance*, bukan saja dari pihak Pemerintah, namun juga dari pihak keluarga masing-masing," ujar Muladi yang anggota Komnas HAM.

Raibnya sejumlah aktivis mengundang reaksi dari Dr. Andan Buyung Nasution. Ia menyatakan penangkapan para aktivis disebutkan telah melanggar hak asasi manusia. Buyung mengancam akan melaporkan hal itu ke Komisi HAM PBB. (l. 4d).

Dari teks berita (5.5) ini terlihat bahwa wartawan mengangkat "*raibnya sejumlah aktivis*" sebagai topik. Topik ini masih masuk dalam kategori netral karena tidak memvonis pihak-pihak tertentu sebagai pelaku raibnya sejumlah aktivis. Topik ini juga memperlihatkan dua hal, yakni (1) sikap tidak terpengaruhnya wartawan dengan isu-isu yang berkembang yang menyatakan bahwa pelaku penculikan adalah aparat sendiri; dan (2) wartawan masih objektif dan menjunjung sikap "praduga tidak bersalah".

Dari segi partisipan, wartawan memasukkan semua pihak yang berkepentingan dengan berita ini. Partisipan-partisipan itu adalah aktivis mahasiswa, aparat, Pimpinan ABRI, tokoh PRD Andi Arief, keluarganya, LBH Bandar Lampung, Menkeh dan anggota Komnas HAM Prof. Dr. Muladi, dan Dr. Adnan Buyung Nasution.

Dari segi nada pemberitaan, di dalam teks berita di atas memang terdapat semacam tuduhan bahwa ABRI lah pelaku penangkapan para aktivis, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Buyung Nasution. Namun pada

bagian yang lain, wartawan juga memberi kesempatan pada Pimpinan ABRI untuk menanggapi, seperti yang dikemukakan oleh Kapuspen ABRI Brigjen TNI Wahab Mokodongan. Dan terakhir, wartawan juga menyajikan pernyataan Menkeh dan anggota Komnas HAM Prof. Dr. Muladi, SH., yang isinya tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi lebih mengisyaratkan perlunya *clearence* yang dilakukan oleh semua pihak.

Kutipan lain (5.6) berikut makin menguatkan sinyalemen bahwa ada juga perspektif netral dalam pemberitaan. Bahkan kenetralan itu dapat ditangkap dari nada pemberitaan yang tidak emosional, dan tidak mensugesti para pembaca untuk benci, anti pati, senang, simpati, dan sebagainya pada salah satu atau beberapa pihak yang terlibat dalam wacana berita.

(5.6) Ratusan Mayat tak Dikenal Dikubur Massal

Ratusan mayat tak dikenal hari ini dikuburkan secara massal. Pihak RSCM telah memutuskan akan menguburkan secara massal jenazah korban kebakaran dalam kerusuhan beberapa hari lalu. Penguburan akan dilakukan di TPU Pondok Rangun, Jakarta Timur, hari ini.

[...] Kadispen Polda Metro Jaya, Letkol Pol Edward Aritonang, ketika ditanya wartawan membenarkan rencana penguburan massal tersebut. "Kita sudah berkoordinasi dengan pihak RSCM," kata Aritonang.

[...] Hingga Ahad siang (17/8) sebanyak 163 jenazah korban kebakaran dari berbagai tempat lokasi kebakaran, hingga Ahad pukul 13.00 masih tergeletak di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. "Sebagian besar jenazah telah diambil keluarganya," jelas dr. Budi. (l. 7c).

5.1.2 Latar Belakang Konteks Perspektif Pemberitaan

Berikut ini dibahas tiga konteks, yakni konteks Institusional, konteks ideologi, dan konteks budaya yang melatarbelakangi kehidupan pers Indonesia pada masa akhir era Orde Baru. Ketiga konteks ini berguna untuk memahami fenomena yang tergambar dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 pada sub bab 4.1, yakni adanya kecenderungan-kecenderungan yang berbeda dalam dua kelompok surat kabar sumber data. Surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* lebih banyak menampilkan berita sosial politik dengan memakai perspektif pro pemerintah, dan sebaliknya, surat kabar *Kompas* dan *Republika* dalam melaporkan berita sosial politik lebih merata antara perspektif pro pemerintah, perspektif pro mahasiswa, dan perspektif netral.

5.1.2.1 Konteks Institusional

Berdasarkan analisis konteks institusional dapat dijelaskan bahwa kecenderungan surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* lebih memilih perspektif pro pemerintah dalam memberitakan peristiwa sosial politik karena dilatarbelakangi oleh keterikatan organisatoris *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* dengan Pemerintahan Orde Baru. Kedua surat kabar ini memiliki afiliasi politis dengan “pilar-pilar” penyangga Pemerintahan Orde Baru.

Surat kabar *Suara Karya* lahir dari kalangan birokrasi (Korpri) dan berbagai ormas Golkar yang ada. Sementara itu, kalangan birokrasi (Korpri)

dan berbagai ormas Golkar pada saat itu adalah beberapa dari “pilar” penyangga Pemerintahan Orde Baru. Surat kabar ini diterbitkan dengan beberapa misi, antara lain: (1) menjaga keseimbangan informasi dan opini publik nasional menghadapi propaganda dari luar pemerintah, dan (2) menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masyarakat banyak.

Selanjutnya, surat kabar *Angkatan Bersenjata* juga memiliki keterikatan organisatoris dengan Pemerintahan Orde Baru. Surat kabar *Angkatan Bersenjata* lahir dari kalangan pihak militer, khususnya Angkatan Darat (AD). Pihak militer, seperti halnya birokrasi, Korpri, serta berbagai ormas Golkar, juga termasuk satu dari beberapa “pilar” penyangga Pemerintahan Orde Baru. Dalam kaitan dengan ini, surat kabar *Angkatan Bersenjata* diterbitkan juga untuk menjaga keseimbangan informasi dan opini publik nasional menghadapi propaganda dari luar pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan *Dwi Fungsi ABRI*.

Selanjutnya, berdasarkan analisis konteks institusional dapat dijelaskan pula bahwa kecenderungan yang terlihat dari surat kabar *Kompas* dan *Republika* dalam memberitakan peristiwa sosial politik ini dilatarbelakangi oleh hal berikut ini. Secara umum kedua surat kabar ini tidak memiliki keterikatan organisatoris dengan elemen-elemen pendukung Pemerintahan Orde Baru. *Kompas* dan *Republika* lahir dari basis massa keagamaan yang berbeda, yakni Katolik dan Islam, yang tidak berafiliasi politis pada Pemerintah Orde Baru.

Surat kabar *Kompas* menurut Aditjondro (1991:23) berada di bawah kelompok usaha Kompas Gramedia yang dimiliki oleh Yayasan Pers Katolik. Sementara itu, surat kabar *Republika* menurut Hutabarat (1993) berada di bawah kelompok usaha PT Abdi Bangsa yang dimiliki oleh Yayasan Abdi Bangsa dan umat Muslim Indonesia. Dengan demikian, kedua surat kabar ini lebih independen, baik dalam visi dan misi, manajemen, dan keuangannya daripada surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata*.

5.1.2.2 Konteks Ideologi

Pers menurut Oetomo (1993) berada dalam keseluruhan sistem masyarakat. Ini berarti pers merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar dalam masyarakat. Meskipun pers memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat, pers sendiri sangat dipengaruhi atau bahkan ditentukan posisi dan fungsinya oleh sistem masyarakat tersebut. Pers Indonesia berada dalam ideologi dan pandangan kenegaraan, serta sistem politik Orde Baru, yakni Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yang dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru adalah pancasila yang ditafsirkan sedemikian rupa berdasarkan atas dua keyakinan yakni (1) paham "pembangunanisme" atau *developmentalism*, dan (2) paham dwi-fungsi ABRI (lihat, Mas'ood, 1994).

Paduan dua paham ini kemudian mewarnai karakteristik Pers Indonesia yang dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru, yakni pers yang memosisikan dan memfungsikan dirinya sebagai pers pembangunan yang

selalu mengamalkan Pancasila di berbagai aspek kegiatan atau kehidupan masyarakat termasuk pembangunan pers itu sendiri (lihat Sukarno, 1988). Selain itu, pers juga menjunjung tinggi stabilitas di segala bidang sebagai syarat mutlak suksesnya pembangunan nasional. Stabilitas yang merupakan syarat mutlak jalannya pembangunan ini merupakan perwujudan keyakinan akan paham militerisme yang dianut oleh Pemerintahan Orde Baru.

Surat kabar *Suara Karya*, *Angkatan Bersenjata*, *Kompas*, dan *Republika* adalah bagian dari pers Indonesia. Keempat surat kabar ini sudah tentu diwarnai dan dipengaruhi oleh sistem yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 terlihat bahwa pengaruh ideologi Pancasila dengan dua paham yang dikembangkan Pemerintah Orde Baru, yakni *pembangunanisme* yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan *dwi fungsi ABRI* yang mendorong terwujudnya stabilitas di segala bidang, terutama sangat berpengaruh pada surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* dalam melihat, menginterpretasikan, dan melaporkan peristiwa sosial politik. Sementara itu, pada surat kabar *Kompas* dan *Republika* pengaruh itu tetap ada namun tidak sebesar pada surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata*. Contoh-contoh berita yang memperlihatkan fenomena ini dapat dilihat dalam kutipan (5.3) dan (5.4) pada 5.1.1.2.

5.1.2.3. Konteks Budaya

Nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat Jawa sangat dominan dalam pemikiran politik Indonesia (lihat Panuju, 1997), yang implikasinya terlihat dalam sistem komunikasi politik Indonesia, termasuk di dalamnya komunikasi politik melalui pers. Beberapa nilai budaya yang dimaksud adalah (1) keseimbangan (*equilibrium*), (2) paternalistik, dan (3) pola ungkap atau ekspresi tidak langsung.

Pertama, sesuai dengan pemikiran politik Indonesia, bahwa tujuan yang mendasar dari proses kehidupan adalah mencapai derajat keseimbangan yang mantap. Karena itulah di dalam wacana pemikiran komunikasi politik Indonesia, termasuk kehidupan persnya, dikenal konsep-konsep politik seperti *andap asor*, *teposeliro*, *musyawarah mufakat*, *mikul duwur mendem jero*, *tego larane ora tega patine*, dan sebagainya. Konsekuensinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan konflik, persaingan, oposisi, apalagi konfrontasi, dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis dan harus dihindari.

Kedua, masyarakat Indonesia masih bersifat paternalistik, sehingga segala sesuatu yang menyangkut inisiatif, tauladan, dan kewenangan harus dimulai dari elite politik. Elit politik di Indonesia dalam hal ini adalah Golkar dan militer yang menjadi penopang utama Pemerintahan Orde Baru. Tanpa ada kehendak baik yang datang dari atas dari kedua elit politik ini, maka segala inisiatif dan kebijakan-kebijakan untuk perubahan bagi kehidupan sosial politik

masyarakat tidak akan pernah dapat terealisasi. Sistem komunikasi politik model *top down* ini muncul selama masa Orde Baru sebagai perwujudan dari nilai-nilai paternalistik yang tetap dipelihara dan bahkan dikembangkan oleh rezim yang berkuasa. Tentang fenomena ini, Siregar, seperti yang dikemukakan oleh Heryanto, dkk (1994), menyatakan bahwa pers Indonesia adalah alat politik yang datang dari atas. Pers Indonesia menurut Masoed (1994) dalam hal ini berada dalam "Negara Kekeluargaan" sehingga pers bersama masyarakat lebih dianalogikan sebagai anak yang harus selalu taat dan patuh pada apa yang ditentukan oleh ayah, yakni pemerintah.

Ketiga, pola ungkap atau ekspresi komunikasi masyarakat, termasuk pers, terpolarisasi antara di satu pihak mereka yang mengidealkan cara ungkap implisit, tersamar, pemakaian bentuk-bentuk tidak langsung, dan pemakaian eufimisme, dan di pihak lain, mereka yang mengidealkan cara ungkap eksplisit, jelas, dan pemakaian bentuk-bentuk langsung. Dalam komunikasi politik era Orde Baru, termasuk kehidupan pers, pola yang pertama inilah yang cenderung digunakan.

Berkaitan dengan ketiga nilai budaya ini, fenomena kecenderungan perspektif pemberitaan yang tampak pada surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* di satu pihak dan kecenderungan yang tampak pada surat kabar *Kompas* dan *Republika* di pihak lain, dapat dijelaskan latar belakangnya. *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* sebagai surat kabar yang

berafiliasi politis pada Pemerintah Orde Baru memiliki kewajiban untuk mendukung segala pemikiran dan tindakan politik Pemerintah Orde Baru yang dilandasi oleh nilai-nilai keseimbangan, paternalistik, dan pola ungkap tidak langsung. Sebaliknya, *Kompas* dan *Republika* walaupun terikat dengan sistem yang berlaku dalam kehidupan pers Indonesia, namun tingkat keterikatan dan tingkat kewajibannya berbeda dengan *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata*.

Dukungan *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* terhadap Pemerintahan Orde Baru diwujudkan dalam beberapa bentuk penyajian berita sosial politik yang memiliki karakteristik berikut ini. Pertama, penyajian berita sosial politik cenderung tidak konfrontatif, tidak berisi kritikan tajam, dan cenderung menghindari segala bentuk konflik dengan Pemerintah Orde Baru. Bahkan lebih tepat apabila dikatakan bahwa penyajian berita kedua surat kabar ini lebih sebagai ajang penyaluran aspirasi pemerintah. Kebijakan pemberitaan seperti ini dilandasi oleh semangat menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan komunikasi politik di Indonesia, terutama dengan Pemerintah Orde Baru.

Kedua, penyajian berita sosial politik cenderung menggunakan sumber berita dari pihak Pemerintah Orde Baru, seperti presiden, para menteri, para pejabat militer dan kepolisian, serta pihak-pihak yang mendukung Pemerintah Orde Baru, baik yang ada di legislatif maupun ormas-ormas bentukan Pemerintah Orde Baru. Sangat sedikit ditemukan kedua surat kabar ini

menggunakan sumber berita dari pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintah. Kebijakan pemberitaan seperti ini dilandasi oleh semangat paternalistik yang bersifat *top down*. Semua informasi yang berkaitan dengan peristiwa sosial politik harus mendapat "pengesahan" dari para elit politik di atas.

Ketiga, penyajian berita sosial politik yang terkait dengan masalah-masalah seperti konfrontasi pemerintah dengan mahasiswa atau masyarakat, kegagalan Pemerintah Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan, dan sebagainya, selalu disajikan dalam pola ungkap atau ekspresi tidak langsung. Bentuk-bentuk penyajian yang tersamar, implisit, dan eufimistis ini menjadi pilihan kedua surat kabar ini apabila terpaksa harus memberitakan kasus-kasus seperti di atas. Kebijakan pemberitaan seperti ini dilandasi oleh semangat dan nilai budaya seperti *enthuk iwake ning aja nganti buthek banyune* (dapat ikannya tetapi jangan sampai keruh airnya) dan *mikul duwur mendem jero* (menjunjung tinggi mengubur dalam-dalam).

Berbeda dengan surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* yang memiliki intensitas hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah, surat kabar *Kompas* dan *Republika* memiliki pola hubungan yang berbeda. Kedua surat kabar ini walaupun terikat dengan sistem hubungan pers yang *patnership*, *kekeluargaan*, dan *interaksi positif* dengan pemerintah, namun mulai menunjukkan adanya kecenderungan untuk kritis, untuk menyuarakan

aspirasi mahasiswa dan rakyat, dan mengarah pada pers yang bergaya *bottom up*, serta mengarah pada pola ungkap atau ekspresi yang lugas, tegas dan menggunakan bentuk-bentuk langsung untuk mengkritik maupun berbeda pendapat dengan pemerintah.

Informasi dalam Tabel 4.2 pada 4.1 di muka secara jelas menggambarkan bahwa kedua surat kabar ini tidak hanya memberitakan peristiwa sosial politik dari perspektif pro pemerintah, melainkan juga memberitakan peristiwa sosial politik dengan menggunakan perspektif pro mahasiswa dan perspektif netral. Sebesar 36% dan 36% berita *Kompas* disajikan dengan perspektif pro mahasiswa dan perspektif netral. Sementara itu, sebesar 21% dan 35% berita *Republika* disajikan dengan perspektif pro mahasiswa dan perspektif netral.

Kecenderungan yang ditampakkan oleh *Kompas* dan *Republika* ini dipengaruhi oleh adanya perubahan sistem sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang dipicu oleh gerakan mahasiswa Indonesia yang menuntut reformasi pada bulan Maret, April, dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998. Sistem sosial budaya seperti keseimbangan (*equilibrium*), paternalistik, dan pola ungkap atau ekspresi tidak langsung, yang dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru secara nyata mulai ditinggalkan.

5.2 Manifestasi Perspektif Pemberitaan di dalam Strategi Penyajian Informasi (SPI)

Untuk menjelaskan manifestasi perspektif pemberitaan dalam SPI langkah yang dilakukan adalah menganalisis secara kritis bagian-bagian teks berita yang berpotensi untuk menampakkan sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan wartawan atau surat kabar, yang kadangkala dapat secara jelas terlihat, namun seringkali tersamar dan tersembunyi dibalik lambang-lambang atau tanda-tanda (*sign*), atau dalam wujud struktur wacana. Analisis terhadap bagian-bagian ini akan mengungkap bagaimana perspektif pemberitaan yang dipilih wartawan atau surat kabarnya dimanifestasikan di dalam SPI.

Dari analisis terhadap bagian-bagian teks berita ditemukan bahwa perspektif pemberitaan, seperti perspektif pro mahasiswa, perspektif pro pemerintah, atau perspektif netral, dimanifestasikan ke dalam judul berita, tema berita, struktur tematik, dan penahapan (*staging*). Cara perspektif pemberitaan dimanifestasikan dalam bagian-bagian itu diuraikan secara rinci berikut ini.

5.2.1 Judul Berita

Dari analisis terhadap ke-36 judul berita, seperti terlihat dalam Lampiran 5a, ditemukan ada 6 cara perspektif pemberitaan dimanifestasikan dalam judul berita. Keenam cara itu adalah pemanfaatan piranti ketransitifan, pemanfaatan piranti modalitas, pemanfaatan piranti nominalisasi, pemanfaatan pilihan kata, pemanfaatan tindak tutur, dan pemanfaatan metafora.

5.2.1.1 Pemanfaatan Piranti Ketransitifan

Manifestasi perspektif pemberitaan di dalam judul berita dengan memanfaatkan piranti ketransitifan dapat dideskripsikan melalui data judul (5.8) untuk perspektif pro mahasiswa, judul (5.9) untuk perspektif pro pemerintah, dan (5.10) untuk perspektif netral.

(5.8) Ribuan mahasiswa banjir DPR. (II.A.12a)

Verba tindakan *banjiri* + [___ Pelaku, Tujuan]

(5.9) Aparat bersihkan mahasiswa di kompleks DPR. (II.A.13a)

Verba tindakan *bersihkan* + [___ Pelaku, Tujuan, Lokasi]

(5.10) Kerusakan di Medan meluas. (II.A.6d)

Verba proses *meluas* + [___ Tujuan, Lokasi]

Berdasarkan fitur-fitur semantik yang diinterpretasikan dari struktur ketransitifan dalam konstruksi judul (5.8) dan (5.9), maka dapat disimpulkan bahwa kedua konstruksi ini sama-sama memiliki verba dengan fitur makna tindakan, yakni *banjiri* (5.8) dan *bersihkan* (5.9). Perbedaan afiksasi *-i* dan *-kan* pada kedua verba ini menyebabkan berbedanya peran-peran tertentu yang dimunculkannya. Akan tetapi kesamaan fitur pada kedua judul ini adalah menonjolnya peran partisipan pelaku, yakni *ribuan mahasiswa* dan *aparat* serta tindakan yang dilakukannya.

Keputusan untuk memilih dan menepatkan *ribuan mahasiswa* pada (5.8) dan *aparat* pada (5.9) sebagai partisipan pelaku sudah tentu didasarkan pada pemahaman atau penangkapan redaksi surat kabar yang bersangkutan terhadap realitas atau “apa yang tengah berlangsung” di *gedung DPR*.

Pemahaman atas realitas atau “apa yang tengah berlangsung” itu di *gedung DPR* dipengaruhi oleh banyak kepentingan, baik itu kepentingan mahasiswa, pemerintah, maupun kepentingan institusional surat kabarnya. Kepentingan-kepentingan tersebut memunculkan konflik di dalam realitas. Dalam konteks situasi reformasi pada bulan-bulan Maret hingga Mei 1998, konflik yang muncul adalah konflik antara mahasiswa dan Pemerintah Orde Baru. Dalam kaitan ini, pemilihan dan penempatan *ribuan mahasiswa* sebagai pelaku dalam konstruksi (5.8) memperlihatkan adanya pemahaman redaksi atas realitas yang dipengaruhi oleh kepentingan mahasiswa, sebaliknya pemilihan dan penempatan *aparatus* sebagai pelaku dalam konstruksi (5.9) memperlihatkan adanya pemahaman redaksi atas realitas yang dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah.

Sementara itu, judul (5.8) dan (5.9) berbeda sekali dengan judul (5.10) di atas. Perbedaan mendasar terletak pada fitur semantik verbanya. Verba *banjiri* pada (5.8) dan *bersihkan* pada (5.9) bermakna tindakan, sedangkan verba *meluas* pada (5.10) bermakna proses. Verba *meluas* pada (5.10) berpotensi menghadirkan peran tertentu dalam konstruksi ketransitifan yang dibentuknya. Pada judul (5.10) peran tertentu yang muncul bersama verba *meluas* adalah partisipan tujuan dan lokasi. Dengan memilih verba *proses* dan bukan verba *tindakan*, redaksi surat kabar ini lebih menyoroti proses dari

kerusuhan dan bukan siapa yang melakukan kerusuhan serta apa tindakannya.

Berdasarkan judul (5.8), (5.9), dan (5.10) dapat diinterpretasikan bahwa perbedaan variasi bentuk ketransitifan memasukkan suatu pandangan redaksi yang berbeda tentang realitas yang dilaporkan. Pada peristiwa di *gedung DPR*, perspektif pro mahasiswa memakai struktur ketransitifan *verba tindakan* + [Pelaku, Tujuan] karena ingin menonjolkan partisipan mahasiswa dan tindakan yang dilakukannya. Sedangkan perspektif pro pemerintah memakai struktur ketransitifan yang sedikit berbeda, yakni *verba tindakan* + [pelaku, tujuan, lokasi]. Struktur ketransitifan seperti ini juga menonjolkan partisipan pemerintah dan tindakan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, perspektif netral memakai struktur ketransitifan dengan pola *verba proses* + [tujuan, lokasi] karena ingin menonjolkan proses dari realitas itu dan bukan partisipan pelakunya maupun tindakan dalam realitas itu. Dengan cara demikian, maka netralitas yang ditampakkan dalam perspektif semakin nyata karena tidak perlu memihak pada salah satu partisipan, apakah itu mahasiswa atau pemerintah.

5.2.1.2 Pemanfaatan Piranti Modalitas

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam judul berita dengan memanfaatkan piranti modalitas dapat dideskripsikan melalui data judul (5.11), (5.12), (5.13), dan (5.14) untuk perspektif pro pemerintah dan judul (5.15) untuk perspektif pro mahasiswa, dan (5.16) untuk perspektif netral.

- (5.11) Polri *tidak* keras hadapi aksi mahasiswa. (II.A.5c.)
- (5.12) Pemimpin redaksi Majalah D&R *harus* diganti. (II.A.10c)
- (5.13) ABRI *akan* tindak pelaku kerusuhan di luar kampus. (II.A.8c)
- (5.14) Unjuk rasa *makin* beringas. (II.A. 9a.)
- (5.15) Bentrokan lagi, puluhan terluka
Dipo Alam: Aksi mahasiswa *bukan* langkah sia-sia. (II.A.3b)
- (5.16) Menkeh: Kasus orang "nilang" *harus* diklarifikasikan. (II.A.4a)

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam judul berita dengan menggunakan piranti modalitas terlihat pada kata *tidak* (5.11), *harus* (5.12), *akan* (5.13), *makin* (5.14), *bukan* (5.15), dan *harus* (5.16). Keenam modalitas ini membawakan sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan dari wartawan atau institusinya terhadap peristiwa yang dilaporkan, atau membawakan sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan dari salah satu partisipan yang dilaporkan, yang kemudian diadopsi menjadi perspektif surat kabar yang bersangkutan.

Apabila dianalisis dengan menggunakan kerangka teori Fowler (1991), keenam modalitas di atas dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni modalitas kebenaran: *tidak*, *makin*, *bukan*; modalitas keharusan *harus*; dan modalitas keinginan *akan*, *tidak akan*. Dengan modalitas kebenaran pada judul berita, surat kabar yang bersangkutan mengindikasikan atau menyatakan secara tidak langsung suatu komitmen pada kebenaran dari proposisi yang diutarakan

dalam judul berita atau pada suatu prediksi tingkat kemungkinan dari deskripsi suatu kejadian yang terjadi.

Modalitas *tidak* pada (5.11) memperlihatkan komitmen dan keyakinan surat kabar *Angkatan Bersenjata* terhadap kebenaran dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa, bahwa Polri bertindak proporsional, sesuai aturan, jauh dari tindakan represif dalam menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa. Dengan modalitas *makin* pada (5.14), surat kabar *Suara Karya* memperlihatkan komitmen dan keyakinannya terhadap kebenaran dari meningkatnya intensitas keberingasan perilaku mahasiswa dalam berunjuk rasa. Dengan modalitas *bukan* pada (5.15) surat kabar *Republika* memperlihatkan komitmen dan keyakinannya terhadap kebenaran dari aksi unjuk rasa mahasiswa, bahwa aksi tersebut sangat perlu dan penting artinya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dengan modalitas keharusan pada judul berita, surat kabar yang bersangkutan menetapkan bahwa partisipan dalam suatu proposisi *seharusnya* atau *tidak seharusnya* (1) melakukan tindakan khusus dalam proposisi itu, atau (2) dikenai tindakan khusus dalam proposisi itu. Dengan modalitas *harus* pada (5.12), surat kabar *Kompas* setuju atau mendukung tindakan yang diberlakukan pada pemimpin redaksi D&R atas pembuatan sampul halaman dengan yang dianggap melecehkan Presiden Soeharto dan pemerintah. Dengan modalitas *harus* pada (5.16), surat kabar *Kompas* mendukung upaya

untuk memperjelas isu tentang orang “hilang” sehingga diharapkan tidak ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan atau dipojokkan dengan isu itu, baik pihak pemerintah maupun masyarakat, mahasiswa, dan keluarga korban.

Dengan modalitas keinginan pada judul berita, surat kabar yang bersangkutan menetapkan persetujuannya atas keinginan atau ketidakinginan melakukan tindakan dalam proposisi itu. Modalitas *akan* pada (5.13) menetapkan persetujuannya atas rencana ABRI menindak pelaku kerusuhan di luar kampus. Sikap setuju dari surat kabar *Angkatan Bersenjata* terhadap keinginan partisipan dalam proposisi mencerminkan sikap pemerintah dalam menghadapi aksi mahasiswa.

Tabel 5.1 berikut ini berisi ringkasan analisis peran modalitas kebenaran, keharusan, dan keinginan dalam hubungannya dengan perspektif surat kabar seperti yang terlihat dalam judul (5.11)-(5.16).

Tabel 5.1: Peran Modalitas dalam Menandakan Perspektif

Peristiwa	Kebenaran Proposisi Melalui Modalitas	Perspektif	Surat Kabar
Aksi unjuk rasa mahasiswa	Dengan modalitas <i>tidak</i> berarti membenarkan tindakan aparat dalam menangani unjuk rasa mahasiswa	ProPemerintah	Angkatan Bersenjata
Aksi unjuk rasa mahasiswa	Dengan modalitas <i>makin</i> berarti membenarkan meningkatnya tingkat keberingasan aksi mahasiswa	Pro Pemerintah	Suara Karya
Aksi unjuk rasa mahasiswa	Dengan modalitas <i>bukan</i> berarti membenarkan atau mendukung aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa	Pro Mahasiswa	Republika
Majalah D&R	Dengan modalitas <i>harus</i> berarti menyetujui tindakan secara mutlak terhadap partisipan atau peristiwa yang ada dalam proposisi	Pro Pemerintah	Kompas
Kasus Orang “hilang”	Dengan modalitas <i>harus</i> berarti menyetujui tindakan secara mutlak terhadap partisipan atau peristiwa yang	Pro Mahasiswa	Kompas

	ada dalam proposisi		
Penindakan pada pelaku kerusuhan	Dengan modalitas <i>akan</i> berarti menyetujui tindakan secara mutlak terhadap partisipan atau peristiwa yang ada dalam proposisi	Pro Pemerintah	Kompas

5.2.1.3 Pemanfaatan Piranti Nominalisasi

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam judul berita dengan memanfaatkan piranti nominalisasi dapat dideskripsikan melalui data judul (5.16) untuk perspektif pro pemerintah, judul (5.17) untuk perspektif pro mahasiswa, dan judul (5.18) untuk perspektif netral.

(5.16) *Penanganan* unjuk rasa sesuai pelanggarannya. (II.A.5d.)

(5.17) *Penanganan* unjuk rasa tak seragam. (II.A.5b)

(5.18) *Demo* mahasiswa mulai keluar kampus. (II.A.8b)

Judul (5.16) yang ditulis oleh surat kabar *Kompas* dan judul (5.17) yang ditulis oleh *Republika* memiliki variasi sintaktis seperti dalam (5.19), (5.20) dan (5.21) berikut ini.

(5.19) X menangani unjuk rasa Y {sesuai pelanggarannya}.
 {(secara) tak seragam}

(5.20) X menangani Y dalam berunjuk rasa {sesuai pelanggarannya}.
 {(secara) tak seragam}

(5.21) Unjuk rasa Y ditangani oleh X {sesuai pelanggarannya}
 { (secara) tak seragam}

Dari konteks judul (5.19), (5.20), dan (5.21) sangat mudah untuk mengetahui bahwa partisipan X adalah *polisi*, *aparatus*, atau *petugas keamanan*, sementara

partisipan Y adalah *mahasiswa* atau *massa*. Surat kabar *Kompas* dan *Republika*, lebih memilih judul (5.16) dan (5.17) daripada judul (5.19), (5.20), maupun (5.21) karena ingin lebih menonjolkan penilaian mereka terhadap proses berlangsung tindakan yang terdapat dalam proposisi daripada pelaku yang melakukan tindakan dan pasiennya yang terkena tindakan. Konsekuensi dari penonjolan penilaian terhadap proses berlangsungnya tindakan dalam proposisi adalah dipakainya struktur nominalisasi dengan menominalkan verba pengisi predikatnya, memindahkan posisinya pada urutan pertama, dan melengkapi konstruksi itu dengan keterangan yang berkaitan dengan proses itu pada judul.

Dalam judul dengan pemakaian struktur nominal seperti pada (5.16) dan (5.17) ini, perspektif pemberitaan kedua surat kabar dapat diketahui dari keterangan yang berkaitan dengan proses itu, yakni *sesuai dengan pelanggarannya* dan *(secara) tak seragam*. Kedua keterangan ini mencerminkan penilaian kedua surat kabar terhadap proses berlangsungnya tindakan di dalam proposisi. Pada judul (5.16), keterangan *sesuai dengan pelanggarannya* mencerminkan perspektif pro pemerintah, sedangkan pada judul (5.17), keterangan *(secara) tak seragam* mencerminkan perspektif pro mahasiswa. Implisit dalam judul (5.16) adanya suatu pembenaran akan cara memperlakukan unjuk rasa mahasiswa. Sementara itu, implisit pula dalam judul

(5.17) adanya suatu kritikan terhadap pemerintah dalam memperlakukan unjuk rasa mahasiswa.

Agak berbeda dengan judul (5.16) dan (5.17), judul (5.18) memperlihatkan pemakaian struktur nominalisasi yang lain. Judul (5.18) memiliki variasi sintaktis yang mungkin seperti dalam (5.22) berikut ini.

(5.22) Mahasiswa mulai berdemo keluar kampus.

Variasi sintaksis dari (5.18) yang wujudnya seperti (5.22) ini memperlihatkan penonjolan pada partisipan pelaku *mahasiswa*. Surat kabar *Republika* dengan struktur nominalisasi seperti pada (5.18) ini mereduksi penonjolan pada pelaku *mahasiswa* menjadi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, yakni *demo mahasiswa*. Upaya nominalisasi dari *berdemo* pada (5.22) menjadi *demo mahasiswa* pada (5.18) membawa dampak pada perubahan perspektif pemberitaan dari perspektif pro mahasiswa menjadi perspektif netral.

Dari analisis terhadap data judul (5.16), (5.17), dan (5.18), serta variasi sintaktisnya yang mungkin dalam (5.19), (5.20), (5.21) dan (5.22) dapat disimpulkan bahwa derivasi nominal atau nominalisasi dari verba dalam judul berita memperlihatkan dua fenomena berikut, yakni (1) upaya menonjolkan proses berlangsungnya tindakan dalam proposisi, dan (2) upaya mereduksi penonjolan partisipan pelaku di dalam proposisi. Dalam kaitannya dengan ini, surat kabar-surat kabar seringkali memanfaatkan struktur nominalisasi, yang dilengkapi dengan keterangan tentang proses tindakan, untuk memperlihatkan

perspektif pemberitaannya, baik itu perspektif pro pemerintah, perspektif pro mahasiswa, maupun perspektif netral.

5.2.1.4 Pemanfaatan Pilihan Kata

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam judul berita dengan memanfaatkan pilihan kata dapat dideskripsikan melalui data judul (5.23) dan (5.24) untuk perspektif pro pemerintah, dan judul (5.25) untuk perspektif pro mahasiswa, dan judul (5.26) untuk perspektif netral.

(5.23) *Perusuh* membakar kendaraan dan toko di Medan, 47 ditangkap.
(II.A 5a.)

(5.24) Perusuh di Medan *menggarong* dan membakar rumah penduduk. (II.A 6c.)

(5.25) *Evakuasi* mahasiswa dari gedung DPR berlangsung mengganggu. (II.A.13c)

(5.26) *Amuk massa* di Medan berlanjut. (II.A.6b.)

Kata *perusuh*, *menggarong*, *evakuasi*, dan *amuk massa* yang dipergunakan dalam judul-judul berita di atas, mencerminkan suatu sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan wartawan atau redaksi terhadap partisipan dan tindakan dalam peristiwa yang dilaporkan.

Pemakaian kata *perusuh* dan bukan *demontran* pada judul (5.23) secara jelas memperlihatkan sikap dan pandangan *Suara Karya* yang negatif pada partisipan yang terlibat dalam pembakaran kendaraan dan toko di Medan. Partisipan tersebut diklasifikasikan sebagai pelaku kriminal dan tindak

kejahatan, dan bukan sebagai orang yang berbeda paham politik atau lawan politik. Perbedaan dalam melihat dan menilai partisipan pelaku seperti ini mempengaruhi dalam bentuk-bentuk ekspresi judul terutama dalam pilihan kata.

Pilihan kata *menggarong* pada judul (5.24) secara jelas memperlihatkan sikap dan pandangan *Suara Karya* yang sangat negatif terhadap tindakan massa di Medan. Kata *menggarong* identik dengan *merampok*, *menjarah rayah* dan *mencuri* yang dilaksanakan oleh segerombolan orang. Dengan pemakaian kata *menggarong* ini, *Suara Karya* tidak melihat indikasi politis yang melatarbelakangi perbuatan yang tercermin dalam proposisi (5.24), melainkan lebih melihat sebagai tindakan kriminal.

Sebaliknya, pemakaian frasa *amuk massa* dan bukan *kerusuhan* atau *demonstrasi* untuk judul peristiwa di Medan itu (5.26) oleh *Kompas* memperlihatkan suatu bentuk yang lebih netral. Makna konotasi *amuk massa* masih lebih positif daripada *kerusuhan* yang pelakunya identik dengan *perusuh*, namun masih lebih negatif daripada *demonstrasi* yang pelakunya identik dengan *demonstran*. Pilihan frasa ini memperlihatkan sikap *Kompas* yang kompromistis, yakni tidak mau condong pada perspektif pro pemerintah yang menganggap peristiwa Medan sebagai kerusuhan, namun juga tidak mau mendukung perspektif pro mahasiswa yang menganggap peristiwa Medan sebagai demonstrasi atau unjuk rasa.

Dan terakhir, pilihan kata *evakuasi mahasiswa* pada judul (5.25) memperlihatkan sikap yang lebih positif apabila dibandingkan dengan kata *bersihkan mahasiswa* seperti data judul (I.B.13a). Pilihan kata *evakuasi* memperlihatkan sikap positif dan tidak memusuhi mahasiswa. Pilihan kata ini memperlihatkan adanya perspektif pro mahasiswa pada judul (5.25).

Berdasarkan analisis-*analisis* ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan kata *perusuh* dalam (5.23), *menggarong* dalam (5.24), *evakuasi* dalam (5.25) dan *amuk massa* dalam (5.26) memperjelas fenomena bahwa *kosa kata* memiliki fungsi kategorisasi. *Kosa kata* tidak hanya berupa pengalaman dalam istilah umum tetapi juga memerinci perbedaan antar ideologi. Pada keempat judul di atas, pemilihan kata tertentu secara jelas memperlihatkan latar belakang sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan yang dianut oleh surat kabar yang bersangkutan. Pada judul (5.23) dan (5.24) terlihat bagaimana *Suara Karya* memanasifasikan pandangan dari perspektif pro pemerintah dengan menggunakan kata *perusuh* dan *menggarong*. Namun pada (5.25) *Suara Karya* memperlihatkan perspektif yang sebaliknya, yakni pro mahasiswa dengan menggunakan kata *evakuasi* pada konteks *evakuasi mahasiswa*. Pada judul (5.26) terlihat pula bagaimana *Kompas* berusaha bersikap netral dengan tidak memihak pada perspektif pro pemerintah maupun perspektif pro mahasiswa dengan menggunakan frasa *amuk massa*.



5.2.1.5 Pemanfaatan Tindak Tutur

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam judul berita dengan memanfaatkan piranti tindak tutur dapat dideskripsikan melalui data judul (5.27) untuk perspektif pro pemerintah, judul (5.28) untuk perspektif netral, dan judul (5.29) untuk perspektif pro mahasiswa.

(5.27) Presiden risaukan pemberitaan media massa. (II.A. 2a.)

(5.28) Menkeh: Kasus orang “hilang” harus diklarifikasikan. (II.A.4a)

(5.29) [...] Dipo Alam: Aksi mahasiswa bukan langkah sia-sia. (II.A.3b)

Judul (5.27) berisi informasi mengenai *perasaan Presiden terhadap pemberitaan media massa*. Dalam fungsinya membawakan informasi ini, judul (5.27) memiliki makna tindak lokusi. Namun apabila judul ini diinterpretasikan berdasarkan konteks situasi tuturnya, seperti konteks (5.27) berikut, maka judul ini membawakan suatu tindakan tertentu, yakni tindak ilokusi.

Konteks Tutur (5.27): Pada pertengahan April 1998 media massa di Indonesia mulai berani dalam menyoroti kebijakan-kebijakan Pemerintah Orde Baru secara kritis. Bahkan sangat sering pemberitaan itu ditambah dengan interpretasi dan opini dari para wartawan yang sangat memojokkan Pemerintah Orde Baru. Surat kabar *Angkatan Bersenjata* membuat judul (5.27) di atas untuk berita tentang pertemuan Presiden Soeharto dengan Menteri Penerangan dan Kepala BP7 Pusat Alwi Dahlan.

Tindak ilokusi yang dapat ditangkap dari judul (5.27) berdasarkan konteks tuturannya di atas adalah suatu peringatan atau teguran. Peringatan atau teguran Presiden Soeharto ini ditujukan kepada seluruh insan pers dan

media massa Indonesia yang sering bersikap kritis terhadap Pemerintah Orde Baru. Berdasarkan tindak ilokusi yang bermakna *peringatan* atau *teguran* ini, maka efek atau daya pengaruh (*perlocutionary force*) yang diharapkan adalah agar insan pers dan media massa yang selama ini kritis terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru menjadi lebih bijaksana, arif, dan tidak hanya sekedar menyoroti kegagalan, tetapi juga keberhasilan serta prestasi yang telah dicapai.

Dari segi surat kabar *Angkatan Bersenjata* yang membuat dan menyajikan peristiwa pertemuan Presiden Soeharto dan Menteri Penerangan/Kepala BP7 Pusat, maka judul (5.27) sengaja dibuat untuk menampakkan perspektif pemberitaannya melalui *tindak ilokusi* dan *tindak perlokusinya*.

Seperti halnya judul (5.27), judul (5.28) juga hanya memiliki makna tindak lokusi apabila hanya berisi kutipan pernyataan Menkeh Muladi tentang kasus *orang hilang*. Namun apabila judul ini diinterpretasikan berdasarkan konteks situasi tuturnya, seperti konteks (5.28) berikut, maka judul ini membawakan suatu tindakan tertentu, yakni tindak ilokusi.

Konteks Tutur (5.28): Media massa Indonesia, termasuk surat kabar, pada akhir bulan Maret banyak memberitakan kasus hilangnya para aktivis. Di masyarakat terbentuk opini bahwa mereka diculik oleh aparat. Aparat melalui Menhankam/Pangab membantah isu itu. Lalu terjadi perbantahan yang berlarut-larut di media massa perihal kasus ini. Surat kabar *Kompas* menyajikan judul (5.28) di atas untuk berita kasus orang "hilang".

Tindak ilokusi yang dapat ditangkap dari judul (5.28) berdasarkan konteks tuturannya di atas adalah permintaan untuk meneliti kebenaran kasus orang "hilang", seperti keberadaannya, sebab-sebab hilangnya, dan sebagainya. Permintaan Menkeh Muladi ini ditujukan kepada semua pihak, mulai dari pihak keluarga korban, seluruh insan pers dan media massa Indonesia yang gencar memberitakan kasus orang "hilang", dan aparat keamanan baik polisi maupun ABRI. Berdasarkan tindak ilokusi yang bermakna *permintaan* ini, maka efek atau daya pengaruh (*perlocutionary force*) yang diharapkan adalah semua pihak melakukan klarifikasi, cek dan recek, bersikap positif, serta mengembangkan sikap praduga tak bersalah, serta bersama-sama bertanggungjawab untuk menemukan orang "hilang" tersebut.

Dari segi surat kabar *Kompas* yang membuat dan menyajikan berita kasus orang "hilang" dari perspektif netral, maka judul (5.28) sengaja dibuat untuk menampakkan perspektif pemberitaannya melalui *tindak ilokusi* dan *tindak perlokusinya*.

Judul (5.29) di atas juga menampakkan fenomena tindak tutur seperti halnya judul (5.27) dan (5.28). Judul (5.29) memiliki makna tindak lokusi karena hanya berisi pernyataan dari Dipo Alam tentang aksi-aksi mahasiswa.

Namun apabila dikaitkan dengan konteks tuturnya, seperti yang dituliskan berikut ini, maka judul (5.29) juga memiliki makna tindak ilokusi.

Konteks Tutur (5.29): Banyak komentar negatif terhadap aksi-aksi mahasiswa, antara lain dari aparat keamanan melalui para Pimpinan ABRI dan anggota DPR, bahwa aksi mahasiswa hanya menyusahkan saja, menimbulkan anarki, merugikan rakyat, dan sebagainya. Surat Kabar *Republika* membuat berita tentang aksi mahasiswa ini dengan judul seperti pada (5.29) ini.

Tindak ilokusi yang dapat ditangkap dari judul (5.29) berdasarkan konteks tuturannya di atas ini adalah bantahan terhadap opini yang berkembang di masyarakat bahwa aksi mahasiswa itu merusak dan merugikan rakyat. Berdasarkan tindak ilokusi yang bermakna *bantahan* ini, maka efek atau daya pengaruh (*perlocutionary force*) yang diharapkan adalah agar mahasiswa jangan berkecil hati, terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia baru dengan cara reformasi.

Dari data judul dalam (5.27), (5.28), dan (5.29) teridentifikasi bahwa makna *tindak ilokusi* dan makna *tindak perlokusi* adalah makna terselubung yang ingin disampaikan oleh surat kabar pada masyarakat pembaca. Dalam makna terselubung inilah tersiratkan perspektif pemberitaan, baik itu perspektif pro mahasiswa, perspektif pro pemerintah, dan perspektif netral ke dalam judul berita masing-masing surat kabar.

5.2.1.6 Pemanfaatan Piranti Metafora

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam judul berita dengan memanfaatkan piranti metafora dapat dideskripsikan melalui data judul (5.30) untuk perspektif pro mahasiswa.

(5. 30) Ribuan mahasiswa *banjiri* DPR. (II.A.12a)

Judul (5.30) adalah judul yang dibuat oleh surat kabar *Republika* untuk peristiwa *demonstrasi ribuan mahasiswa di DPR* yang diberitakan dari sisi perspektif pro mahasiswa. Metafora dalam judul (5.30) itu terlihat dari kata *banjiri*. Surat kabar *Republika* dengan memilih kata *banjiri* ini ingin memperlihatkan adanya tiga kesamaan sifat antara *ribuan mahasiswa* dengan *air*. Tiga sifat yang sama itu adalah dalam hal (1) *tiada henti-hentinya dan tiada habis-habisnya ribuan mahasiswa itu mendatangi gedung DPR* seperti halnya aliran air; (2) *tidak terbendungnya kedatangan ribuan mahasiswa itu ke DPR* seperti datangnya air bah; dan (3) *banyaknya mahasiswa yang terkonsentrasi di gedung DPR* seperti halnya air yang terpusat dan menggenang di daerah yang lebih rendah.

Penggambaran tiga sifat *air* pada *demonstrasi mahasiswa di DPR* ini tidak berkonotasi negatif, melainkan memberi kesan pujian akan kekuatan dan besarnya pengaruh demonstrasi itu. Konotasi positif yang diperlihatkan oleh surat kabar *Republika* melalui kata *banjiri* ini mengindikasikan adanya manifestasi perspektif pemberitaan pada judul berita yang dibuatnya.

Berikut ini diberikan data lain untuk memperjelas fenomena metafora yang diungkapkan di atas. Judul (5.31) berikut adalah judul yang dibuat oleh *Republika* untuk peristiwa *pengosongan gedung DPR* yang disajikannya dengan perspektif pro pemerintah.

(5.31) *Aparat bersihkan mahasiswa di kompleks DPR.* (II.A.13a)

Metafora dalam judul (5.31) itu terlihat dari kata *bersihkan*. Surat kabar *Republika* dengan memilih kata *bersihkan* ingin memperlihatkan bahwa *mahasiswa itu* tidak ubahnya *kotoran*. Karena *kotoran* itu di mana-mana selalu menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap dan dapat mendatangkan berbagai macam penyakit, maka *kotoran* itu harus dibersihkan.

Penggambaran sifat *kotoran* untuk diterapkan pada *mahasiswa yang berada di kompleks DPR* memperlihatkan sikap dan pandangan yang sangat negatif terhadap mahasiswa. Di kompleks DPR itu, mahasiswa dianggap sebagai pihak yang menimbulkan keonaran dan ketidaknyamanan. Selain itu, aksi mahasiswa juga dinilai berpotensi mendatangkan bermacam-macam kesulitan bagi pihak pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa harus dipindahkan atau diusir dari gedung DPR. Konotasi negatif yang diperlihatkan oleh surat kabar *Republika* melalui kata *bersihkan* ini mengindikasikan adanya manifestasi perspektif pemberitaan pada judul berita yang dibuatnya.

Dari analisis terhadap judul (5.30) dan (5.31) teridentifikasi bahwa metafora dipergunakan dalam judul berita untuk memperlihatkan perspektif

pemberitaan, baik perspektif pro pemerintah maupun pro mahasiswa. Cara analogi dengan membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk singkat ini sangat potensial digunakan untuk menampakkan perspektif pemberitaan. Sifat-sifat pembandingan dalam analogi, baik yang bersifat positif maupun negatif, dipergunakan untuk mensifati objek tertentu dalam proposisi. Melalui sifat-sifat yang tertentu itulah perspektif pemberitaan ditampakan.

5.2.2 Pilihan Tematik

Seorang wartawan pada waktu melihat fakta peristiwa sosial politik dan memutuskan untuk mengangkatnya menjadi suatu berita, dia terlebih dahulu harus menentukan tema berita. Di dalam tema berita itu implisit terdapat: (1) topik pemberitaan yang merupakan inti atau pokok substansif berita, dan (2) tujuan atau motif yang akan dicapai dengan topik itu. Selanjutnya, tema berita oleh wartawan digunakan sebagai titik tolak permulaan berita, seperti yang terdapat dalam *lead* atau teras berita, sebagai acuan dalam menentukan kerangka wacana berita, dan dasar untuk pengembangan badan berita.

Dalam penelitian ini, tema berita yang dalam struktur berita seringkali ditempatkan dalam bagian *lead* atau teras berita, ternyata difungsikan pula sebagai manifestasi perspektif pemberitaan. Tema berita dijadikan sebagai tempat untuk menampakkan sikap, nilai-nilai keyakinan, dan pandangan terhadap peristiwa sosial politik yang berkembang di masyarakat, baik itu dari

perspektif institusional surat kabar yang bersangkutan, maupun kepentingan yang lebih luas di luar institusi surat kabar tersebut.

Dari analisis terhadap 48 teks berita sosial politik dari 4 surat kabar Indonesia pada akhir Era Orde Baru ditemukan ada empat pola penyajian tema berita yang di dalamnya terkodekan perspektif pemberitaan, baik perspektif pro pemerintah, pro mahasiswa, atau perspektif netral. Keempat pola penyajian tema berita itu adalah (1) pola [*Who* ← (*favorable*, *unfavorable*, *netral*)] atau paduan unsur berita *Who* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* terhadap unsur *Who* tersebut; (2) pola [*What* ← (*favorable*, *unfavorable*, *netral*)] atau paduan unsur berita *What* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* terhadap unsur *What* tersebut; (3) pola [*Who* → (*favorable*, *unfavorable*, *netral*) → *What*] atau paduan unsur berita *Who* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* dari *Who* terhadap unsur *What*, dan (4) pola [*Who*¹ → (*favorable*, *unfavorable*, *netral*) → *Who*²] atau paduan unsur berita *Who*¹ sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* terhadap unsur *Who*².

Dari analisis terhadap 48 teks berita, seperti yang terdapat dalam Lampiran 7, terlihat bahwa pola yang cenderung banyak digunakan oleh para wartawan adalah pola pertama dan kedua. Dari keseluruhan data terdapat 40%

tema dibuat dengan pola [*Who* ← (*favorable, unfavorable, netral*)] dan 48% tema dibuat dengan pola [*What* ← (*favorable, unfavorable, netral*)]. Selibuhnya, dua pola yang lain, yakni [*Who*¹ → (*favorable, unfavorable, netral*) → *Who*²] dan [*Who* → (*favorable, unfavorable, netral*) → *What*], masing-masing hanya 6% digunakan oleh para wartawan.

Dari kecenderungan-kecenderungan ini dapat diinterpretasikan bahwa penyajian berita dengan fokus pada partisipan (*who*) atau peristiwa (*what*), yang dipadukan dengan sikap yang ditujukan kepadanya, merupakan pola yang banyak dipergunakan oleh para wartawan. Kedua pola ini lebih disukai daripada kedua pola lain seperti penyajian berita dengan fokus pada partisipan (*Who*) yang dipadukan dengan sikap yang ditujukan pada partisipan lain (*Who*²) atau pada peristiwa (*What*).

5.2.2.1 Pola [*Who* ← (*Favorable, Unfavorable, Netral*)]

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam pilihan tematik dengan menggunakan pola [*Who* ← (*favorable, unfavorable, netral*)] atau “paduan unsur berita *Who* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap netral terhadap unsur *Who* tersebut” dapat dideskripsikan melalui data tema (5.30)-(5.33) berikut ini.

(5.30) *Polri* tidak keras dalam menghadapi aksi mahasiswa. (II.B.5c)

[*Who* ← *Favorable*]

(5.31) *Enam mahasiswa Trisakti* tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat sewaktu terjadi aksi keprihatinan

ribuan mahasiswa di kampus Trisakti. (II.B.1a)
 [Who ← Favorable]

(5.32) *Tim Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSCM* telah memeriksa 258 jenazah. (II.B.7b)
 [Who ← Netral]

Tema (5.30) memperlihatkan perspektif pro pemerintah. Perspektif ini tampak dari dipilihnya unsur berita *Who*, yakni *Polri* sebagai titik tolak pemberitaan dan apa yang dikatakan oleh wartawan berkenaan dengan partisipan *Polri*. Unsur *Who* atau *Polri* oleh wartawan surat kabar ini ditempatkan pada posisi paling kiri sehingga unsur ini mendapat penonjolan yang lebih daripada unsur berita lainnya. Selain itu, apa yang dikatakan wartawan berkaitan dengan unsur berita *who*, yakni *tidak keras menghadapi aksi mahasiswa* adalah bentuk ekspresi yang mencerminkan sikap dan penilaian yang baik, positif, dan menguntungkan institusi *Polri* dan Pemerintah.

Tema (5.31) memperlihatkan perspektif pro mahasiswa. Perspektif ini tampak dari dipilihnya unsur berita *Who*, yakni *enam mahasiswa Trisakti* sebagai titik tolak pemberitaan dan apa yang dikatakan oleh wartawan berkenaan dengan *enam mahasiswa Trisakti* itu. Unsur *Who* yang dipilih ini ditempatkan pada posisi paling kiri dalam struktur oleh wartawan sehingga unsur ini mendapat penonjolan yang lebih daripada unsur berita lainnya. Selain itu, apa yang dikatakan wartawan berkaitan dengan unsur berita *who*, yakni *tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat [...]* adalah bentuk

ekspresi yang mencerminkan sikap dan penilaian yang *unfavorable* pada aparat atau lebih menyalahkan pihak aparat daripada pihak mahasiswa. Pada masa Orde Baru sangat jarang suatu surat kabar berani demikian jelasnya mengangkat tema aparat keamanan sebagai pihak yang menyebabkan kematian mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan wartawan berkaitan dengan titik tolak pemberitaan pada (5.31) adalah sikap dan penilaian yang secara tidak langsung *favorable* terhadap mahasiswa.

Tema (5.32) memperlihatkan perspektif netral. Perspektif ini tampak dari dipilihnya unsur berita *Who* di luar dua pihak yang terlibat konflik, yakni mahasiswa dan pemerintah. Unsur *Who* tersebut adalah *Tim forensik Fakultas Kedokteran UI dan RSCM*. Kemudian, apa yang dikatakan wartawan berkaitan dengan unsur berita *who*, yakni *telah memeriksa 258 jenazah* tidak memperlihatkan, mengindikasikan, atau mengkodekan suatu kepentingan politis tertentu.

Dari analisis terhadap tema berita (5.30) sampai (5.32), dan data-data lain dalam Lampiran 7, teridentifikasi bahwa pilihan tematik berita dengan pola [*who* ← (*favorable, unfavorable, netral*)] dipergunakan untuk memperlihatkan perspektif pemberitaan, baik perspektif pro pemerintah, pro mahasiswa, maupun perspektif netral. Keputusan untuk memilih partisipan tertentu dari unsur berita *who* sebagai titik tolak pemberitaan dan menempatkannya pada

posisi paling kiri dari struktur memperlihatkan upaya pertama wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan. Selain itu, upaya lain yang dilakukan wartawan adalah mengembangkan unsur berita *who* tersebut dengan memberi penilaian, penyikapan, penjelasan, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersifat *favorable*, *unfavorable*, atau *netral*.

5.2.2.2 Pola [*What* ← (*Favorable*, *Unfavorable*, *Netral*)]

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam pilihan tematik dengan menggunakan pola [*What* ← (*favorable*, *unfavorable*, *netral*)] atau "paduan unsur berita *What* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap netral terhadap unsur *What* tersebut" dapat dideskripsikan melalui data tema (5.33)-(5.35) berikut ini.

- (5.33) *Aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia* merupakan langkah efektif mendorong perubahan. (II.B.3b)
[*What* ← *Favorable*]
- (5.34) *Aksi mahasiswa* mengarah pada parlemen jalanan dan dapat berkembang menjadi semacam *people power*. (II.C.3a)
[*What* ← *unfavorable*]
- (5.35) *Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa berbagai PT* berlanjut di mana-mana. (II.B.9d)
[*what* ← *Netral*]

Tema berita (5.33) sampai dengan (5.35) memiliki titik tolak pemberitaan yang sama, yakni unsur berita *what* yang berupa *aksi mahasiswa*. Perbedaan yang mencolok antara ketiga tema tersebut terletak pada apa yang dinyatakan oleh wartawan berkenaan dengan unsur *what* tersebut. Pada tema (5.33)

wartawan surat kabar yang bersangkutan menyatakan bahwa unsur *what* tersebut merupakan langkah efektif mendorong perubahan. Ini adalah bentuk ekspresi yang *favorable* atau mencerminkan sikap dan penilaian yang baik, positif, dan menguntungkan mahasiswa. Implisit di dalam ungkapan ini adalah adanya penilaian bahwa aksi mahasiswa memiliki peran yang penting dan strategis.

Sebaliknya, pada (5.34) wartawan menyatakan bahwa unsur *what* tersebut mengarah pada parlemen jalanan dan dapat berkembang menjadi semacam *people power*. Ini adalah bentuk ekspresi yang cenderung *unfavorable* atau mencerminkan sikap dan penilaian yang tidak baik, negatif, dan tidak menguntungkan mahasiswa. Dalam hal ini, aksi mahasiswa dianggap mengarah pada tindakan yang inskonstitusional serta berpotensi memicu *people power*.

Sementara itu, tema berita (5.35) memiliki perspektif pemberitaan yang netral. Walaupun titik tolak pemberitaan yang dipilih dalam tema adalah aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa, akan tetapi apa yang dinyatakan oleh wartawan berkenaan dengan aksi itu, yakni *berlanjut di mana-mana* tidak mengindikasikan suatu sikap dan penilaian yang *favorable* atau *unfavorable*. Apa yang dinyatakan wartawan ini lebih merupakan suatu realitas yang dikemas secara lugas.

Dari analisis terhadap tema berita (5.33) sampai dengan (5.35), dan data-data lain dalam Lampiran 7, teridentifikasi bahwa pilihan tematik berita dengan pola [*what* ← (*favorable, unfavorable, netral*)] dipergunakan untuk memperlihatkan perspektif pemberitaan, baik perspektif pro pemerintah, pro mahasiswa, maupun perspektif netral. Keputusan untuk memilih kejadian atau aktivitas tertentu dari unsur berita *what* sebagai titik tolak pemberitaan dan menempatkannya pada posisi paling kiri dalam struktur memperlihatkan upaya pertama wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan. Selain itu, upaya lain yang dilakukan wartawan adalah mengembangkan unsur berita *what* tersebut dengan memberi penilaian, penyikapan, penjelasan, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersifat *favorable, unfavorable, atau netral*.

5.2.2.3 Pola [*Who*¹ → (*Favorable, Unfavorable, Netral*) → *Who*²]

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam pilihan tematik dengan menggunakan pola [*Who*¹ → (*favorable, unfavorable, netral*) → *Who*²] atau "paduan unsur berita *Who*¹ sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* dari *Who*¹ terhadap unsur *Who*²ⁿ dapat dideskripsikan melalui data tema (5.36)-(5.37) berikut ini.

- (5.36) Korps Reserse Mabes Polri memeriksa Pemimpin Redaksi Majalah D&R. (II.B.10a)
[*who*¹ → *netral* → *who*²]
- (5.37) Dewan Kehormatan PWI merekomendasikan sanksi skor dua tahun bagi Pemred D&R. (II.B.10d)
[*who*¹ → *unfavorable* → *who*²]

Kedua tema berita memiliki titik tolak pemberitaan yang sama, yakni unsur berita *who*¹ (partisipan atau orang), yang berupa *Korps Reserse Mabes Polri* (5.36) dan *Dewan Kehormatan PWI* (5.37). Pada (5.36), unsur berita *who*¹ oleh wartawan dipadukan dengan sikap netral *who*¹ terhadap *who*², seperti yang tercermin dalam proposisi *memeriksa Pemimpin Redaksi Majalah D&R*. Kata “*memeriksa*” dalam konteks ini bersifat netral karena pemeriksaan oleh polisi itu ditujukan untuk mengungkap kebenaran yang didasari oleh praduga tak bersalah terhadap unsur berita *who*². Dengan demikian proposisi *memeriksa Pemimpin Redaksi Majalah D&R* tidak memperlihatkan sikap *favorable* atau *unfavorable* terhadap *who*², yakni Pemimpin Redaksi Majalah D&R. Pada (5.37), unsur berita *who*¹ oleh wartawan dipadukan dengan sikap *unfavorable who*¹ terhadap *who*², seperti yang tercermin dalam proposisi *merekomendasikan sanksi skor dua tahun bagi Pemred D&R*. Pada proposisi ini tercermin suatu sikap yang didasari pandangan bahwa *who*² bersalah.

Sikap *netral* pada (5.36) dan *unfavorable* pada (5.37) menandakan manifestasi perspektif yang berbeda. Pada (5.36) perspektif yang terbangun adalah perspektif netral. Sebaliknya, pada (5.37) perspektif yang terbangun adalah perspektif pro pemerintah.

Dari analisis terhadap tema berita (5.36) dan (5.37), dan data-data lain dalam Lampiran 7, teridentifikasi bahwa pilihan tematik berita dengan pola [*who*¹ → (*favorable, unfavorable, netral*) → *who*²] dipergunakan untuk

memperlihatkan perspektif pemberitaan. Keputusan untuk memilih unsur berita *who*¹ tertentu sebagai titik tolak pemberitaan dan menempatkannya pada posisi paling kiri dalam struktur tema memperlihatkan upaya pertama wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan. Selain itu, upaya lain yang dilakukan wartawan dengan mengembangkan unsur berita *who*¹ tersebut dengan memberi penilaian, penyikapan, penjelasan, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersifat *favorable*, *unfavorable*, atau *netral* terhadap unsur berita *who*² memperlihatkan makin kuatnya perspektif pemberitaan yang dibangun.

5.2.2.4 Pola [*Who* → (*Favorable, Unfavorable, Netral*) → *What*]

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam pilihan tematik dengan menggunakan pola [*Who* → (*favorable, unfavorable, netral*) → *What*] atau “paduan unsur berita *who* sebagai titik tolak pemberitaan dan sikap *favorable* atau sikap *unfavorable* atau sikap *netral* dari *who* terhadap unsur *what*” dapat dideskripsikan melalui data tema (5.38)-(5.39) berikut ini.

- (5.38) Presiden Soeharto risaukan pemberitaan-pemberitaan media massa yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah. (II.B.2a)

who → *unfavorable* → *what*

- (5.39) Presiden Soeharto risau atas pemberitaan pers akhir-akhir ini yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. (II.B.2b)

who → *unfavorable* → *what*

Kedua tema berita ini memiliki titik tolak pemberitaan yang sama, yakni unsur berita *who*, *Presiden Soeharto*. Pada kedua tema ini unsur berita *who* oleh wartawan juga dipadukan dengan sikap *unfavorable who* terhadap unsur berita *what* seperti yang tercermin dalam proposisi (5.38) *risaukan pemberitaan-pemberitaan media massa yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya [...] dan proposisi (5.39) risau atas pemberitaan pers akhir-akhir ini yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya* (lihat 5.39). Pada kedua proposisi ini tercermin suatu sikap yang didasari pandangan bahwa unsur berita *what*, yakni *pemberitaan pers* maupun *media massa* telah keliru ataupun salah. Pandangan yang seperti itu terhadap *pemberitaan pers* maupun *media massa* memperlihatkan perspektif yang pro pemerintah.

Dari analisis terhadap tema berita (5.38) dan (5.39), dan data-data lain dalam Lampiran 7, teridentifikasi bahwa pilihan tematik berita dengan pola [*who* → (*favorable, unfavorable, netral*) → *what*] dipergunakan untuk memperlihatkan perspektif pemberitaan. Keputusan untuk memilih unsur berita *who* tertentu sebagai titik tolak pemberitaan dan menempatkannya pada posisi paling kiri dalam struktur tema memperlihatkan upaya pertama wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan. Selain itu, upaya lain yang dilakukan

wartawan dengan cara mengembangkan sikap *unfavorable* unsur berita *who* tersebut terhadap unsur berita *what* memperlihatkan makin kuatnya perspektif pemberitaan yang dibangun.

5.2.3 Struktur Tematik Berita

Struktur tematik dalam istilah Brown dan Yule (1983) adalah “pagar-pagar” di dalam wacana yang berfungsi untuk memberi rangka struktural dan untuk menandai area topik penulis. Dengan struktur tematik ini pengembangan informasi di dalam wacana, lebih khusus lagi di dalam paragraf dan kalimat, tidak akan keluar atau menyimpang dari tema wacana. Struktur tematik dalam hal ini adalah selektor penting bagi penulis untuk memasukkan dan tidak memasukkan informasi-informasi tertentu di dalam wacana.

Di dalam penelitian ini, struktur tematik oleh wartawan juga difungsikan untuk membangun perspektif pemberitaan. Dengan struktur tematik ini, wartawan di satu sisi mengembangkan fakta, data, dan informasi menjadi suatu realitas baru di dalam wacana beritanya, dan di sisi lain, wartawan juga membatasi masuknya fakta, data, dan informasi tertentu. Hanya fakta, data, dan informasi yang relevan, mendukung, dan memperkuat perspektif pemberitaan yang dapat masuk ke dalam wacana berita. Sementara itu, fakta, data, dan informasi yang bertentangan, tidak mendukung, atau bahkan memperlemah perspektif pemberitaan tidak dimasukkan di dalam berita.

Di dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa pola struktur tematik yang digunakan untuk membentuk area topik penulis dan sekaligus memberikan rangka struktural pada wacana berita, serta untuk membangun perspektif pemberitaan. Pola-pola itu adalah (1) pola struktur tematik (frase) nominal pengisi subjek gramatikal; (2) pola struktur tematik paduan (frase) nominal pengisi subjek gramatikal dan frase preposisional pengisi keterangan waktu; dan (3) pola struktur tematik paduan (frase) nominal pengisi subjek gramatikal dan frase preposisional pengisi keterangan tempat.

Dari hasil analisis, seperti yang terdapat dalam Lampiran 8, dapat diketahui bahwa pola struktur tematik (frase) nominal pengisi subjek gramatikal adalah pola struktur tematik yang paling dominan digunakan oleh para wartawan dalam pembentukan perspektif pemberitaan dibandingkan dengan dua pola yang lain. Apabila dipresentasikan, maka pemakaian pola struktur tematik (frase) nominal pengisi subjek gramatikal pada seluruh data mencapai 70%, sementara dua pola yang lain masing-masing 15%. Fenomena ini mengandung arti bahwa wartawan lebih menyukai menandai area topik dan rangka struktural wacana dengan menggunakan (frase) nominal sebagai pengisi subjek gramatikal wacana berita. Dalam hal ini, wartawan lebih banyak menonjolkan atau memfokuskan berita tentang partisipan atau apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dengan partisipan daripada menonjolkan tentang waktu terjadinya peristiwa ataupun tempat terjadinya peristiwa

5.2.3.1 Pola Struktur Tematik (Frase) Nominal Pengisi Subjek Gramatikal

Pola struktur tematik (frase) nominal pengisi subjek gramatikal secara jelas dapat dideskripsikan dari kutipan badan berita (5.40) di bawah ini yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari tema (II.C.2b), seperti yang terdapat dalam *lead* berita.

Presiden Soeharto risau atas pemberitaan pers akhir-akhir ini, yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. (II.C.2b)

(5.40) "*Presiden* tadi mengungkapkan kerisauan beliau mengenai pemberitaan-pemberitaan yang tidak memberikan gambaran sesungguhnya," kata Menteri Penerangan [...]. *Presiden* minta hal ini hendaknya diperhatikan Departemen Penerangan sebagai pembina pers.

Presiden tidak memberikan contoh konkret [...]. Namun menurutnya, banyak sekali informasi yang kurang tepat [...].

[...] Ditegaskan *Presiden*, kebijakan atau langkahnya ada tetapi tidak dijelaskan dengan baik. "jadi kelihatannya kata *beliau*, itu seolah-olah tidak memahami keadaan," kata Menpen.

Alwi melihat tidak hanya media cetak, tayangan media elektronik pun banyak yang tidak proporsional atau tidak mencerminkan perspektif yang sesungguhnya. [...].

Tindakan itu menurut *Alwi*, tidak memberikan perspektif kepada masyarakat. *Masyarakat* tidak diberi informasi [...].

Alwi mencontohkan IMF plus dalam pidato pertanggungjawaban *Presiden*. *IMF plus* untuk memperbaiki keadaan itu sedang dirumuskan [...]. *Plusnya CBS itu* mempengaruhi rupiah.

Walaupun tidak ikut mengambil keputusan, *Pers* ikut kena bebannya [...].

Presiden mengatakan, kepercayaan terhadap pemerintah sebetulnya juga merupakan kepercayaan pada diri sendiri. [...].

Presiden mengatakan, masyarakat kini tidak cukup hanya diberi informasi (penerangan) tetapi perlu informasi plus, yaitu ditambah dengan informasi yang mempunyai nilai tambah. [...].

Presiden minta Menpen melakukan koordinasi dengan menteri lain supaya pers mendapat informasi selengkap mungkin. *Alwi* mencontohkan [...].

Dari kutipan badan berita pada (5.40), terlihat bahwa struktur tematik berita yang menandai area topik penulis dan rangka struktural wacana berwujud deretan frase nominal, nomina, atau pronomina yang mengisi fungsi subjek pada masing-masing kalimat.

Struktur tematik (5.40):

Presiden Soeharto

Presiden

Presiden

Presiden

-nya

Presiden

beliau

Alwi

Tindakan itu

Masyarakat

Alwi

IMF Plus

Plusnya CBS itu

Pers

Presiden

Presiden

Presiden

Dari struktur tematik (5.40) ini dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut ini. Pertama, bahwa wujud-wujud topik yang dikembangkan dari tema (II.C.2b) di dalam badan berita adalah (frase) nominal *Presiden Soeharto*, *Alwi*, *tindakan itu*, *masyarakat*, *IMF Plus*, *plusnya CBS*, dan *pers*. Wujud-wujud

topik ini membentuk apa yang oleh Brown dan Yule (1983) diistilahkan sebagai area topik penulis dan rangka struktural wacana. Walaupun wujud-wujud topik yang disajikan itu beragam, akan tetapi wujud topik yang paling dominan yang mengikat pembicaraan sejak awal berita sampai akhir berita adalah wujud topik *Presiden Soeharto*. Wujud-wujud topik yang lain dihadirkan di dalam berita untuk memperkuat apa yang dibicarakan oleh topik utama berita, yakni *Presiden Soeharto*, dari titik-titik tolak yang agak berbeda.

Kedua, dari segi perspektif pemberitaan, keputusan untuk mentematisasikan frase nominal *Presiden Soeharto* mengisi fungsi subjek dalam kalimat-kalimat pada badan berita memperlihatkan upaya wartawan dalam memandang, menilai, dan melaporkan masalah *pemberitaan pers* seperti dalam tema (II.C.2b) dari perspektif yang pro pemerintah karena partisipan *Presiden Soeharto* adalah representasi dari Pemerintahan Orde Baru.

Fenomena serupa untuk struktur tematik (frase) nominal dapat dideskripsikan dari kutipan badan berita (5.41), yang dikembangkan dari tema (II.C.1b) berikut ini.

Enam mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) kemarin meninggal setelah terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menuntut reformasi yang digelar di kampus mereka. (II.C.1b)

(5.41) Menurut *Dekan FH Usakti Adi Andoyo*, yang ikut berbicara pada aksi unjuk rasa itu, *empat jenazah* tadi malam masih terbaring di RS Sumbe Waras, Jakarta Barat. *Mereka* adalah Hafidin Royan [...]. *Para*

keluarga mereka malam kemarin telah sampai di RS Sumber Waras. *Dua* lagi meninggal di RS Pertamina [...]. Sedangkan *Vera Vasilya* sampai berita ini diturunkan pukul 24.00 masih koma di RSCM.

“Saya tidak bisa terima,” *Ny Teti*, warga Graha Permai, Ciputat, menangis ketika mendapatkan anaknya *Elang* telah meninggal [...]. “*Anak* saya pamit untuk mid-test, tapi tiba-tiba saya dikabari, dia meninggal [...].

Aksi damai di Universitas Trisakti dan Tarumanegara, di daerah Grogol, Jakarta Barat, kemarin diikuti sekitar 10 ribu orang. [...]

Dalam aksinya, *sebagian mahasiswa* membujuk aparat, agar menizinkan mereka pergi ke Gedung DPR. *Adi* juga sempat bernegosiasi [...] agar *mahasiswa* dibolehkan turun ke jalan [...].

[...]. *Adi Andojo* dan *Dekan FE Usakti Chairuman*, bernegosiasi dengan Dandim dan Kapolres Jakbar, untuk mengatur agar *mahasiswa* bisa bubar dengan tertib.

[...] *Para mahasiswa* menemukan seorang yang dicurigai sebagai intel, berada dalam kerumunan mahasiswa. *Sebagian mahasiswa* mencoba mengamankan orang itu, *sebagian (mahasiswa) lagi* mengejar dan mencoba memukul.

Melihat ribut-ribut itu, *para mahasiswa* maju ke depan mengambil posisi berhadapan dengan barisan aparat – yang saat itu juga bergerak merapat ke arah mahasiswa.

Suasana tegang ini berlangsung sekitar sepuluh menit. Tiba-tiba terdengar *aparat* mengokang senapan dan menembakkan senapan ke udara. Saat itu juga, *barisan aparat terdepan* berhamburan mengejar dan memukuli massa dengan pentungan. *Aparat* juga sempat memukuli seorang wartawan ABC.

Dari kutipan badan berita pada (5.41), terlihat bahwa struktur tematik berita yang menandai area topik penulis dan rangka struktural wacana berwujud deretan frase nominal, nomina, atau pronomina sebagai berikut ini.

Struktur tematik (5.41):
Enam mahasiswa Universitas Trisakti
Dekan FH Usakti Adi Andojo

Empat jenazah
Mereka (empat jenazah)
Para keluarga mereka
Dua lagi
Vera Vasilya (mahasiswa yang tertembak)
Ny. Teti (Ibu dari Mahasiswa yang tertembak)
Anak saya (Elang Mulya)
Aksi damai (mahasiswa)
Sebagian mahasiswa
Mereka
Adi Andoyo
Mahasiswa
Adi Andoyo dan Dekan FE Usakti Chairuman
Mahasiswa
Para mahasiswa
Sebagian Mahasiswa
Sebagian lagi
Para mahasiswa
Suasana tegang itu
Aparat
Barisan aparat terdepan
Aparat

Dari struktur tematik (5.41) ini dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut ini. Pertama, bahwa area topik pemberitaan berkisar pada masalah meninggalnya *enam mahasiswa Trisakti* yang disajikan dari segi partisipan pengisi subjek gramatikal, seperti *mahasiswa Universitas Trisakti, Dekan FH Adi Andoyo dan Dekan FE Usakti Chairuman, para keluarga korban, dan Ny. Teti (orang tua Korban)*. Fakta, data, dan informasi yang dilaporkan dalam berita ini hanya berkaitan dengan partisipan-partisipan tersebut. Walaupun dalam struktur tematis ini terdapat subjek gramatikal lain, seperti *situasi tegang itu* dan *aparat* namun semua itu dihadirkan untuk mendukung fakta,

data, dan informasi mengenai *meninggalnya enam mahasiswa Universitas Trisakti*.

Kedua, partisipan *mahasiswa Universitas Trisakti, Dekan FH Adi Andojo dan Dekan FE Usakti Chairuman, para keluarga korban, dan Ny. Teti (orang tua Korban)*, yang mendominasi pengisian subjek gramatikal di dalam wacana berita adalah representasi dari pihak-pihak yang mendukung gerakan mahasiswa. Menonjolnya partisipan-partisipan ini sebagai titik tolak pengembangan berita dan ditambah dengan sajian fakta, data, dan informasi yang dikembangkan berkaitan dengan partisipan-partisipan tersebut membentuk perspektif pemberitaan, yakni perspektif pro mahasiswa.

Berbeda dengan dua kutipan di atas, yakni (5.40) dan (5.41), yang masing-masing memperlihatkan perspektif pro pemerintah dan perspektif pro mahasiswa, kutipan (5.42) memperlihatkan pemilikan struktur tematik (frase) nominal yang memanasifestasikan perspektif netral di dalamnya. Kutipan (5.42) ini dikembangkan dari tema berita berikut ini.

Kasus orang "hilang" harus diklarifikasi. (II.C.4a)

(5.42) *Menteri kehakiman Muladi* menegaskan, persoalan orang "hilang" yang diramaikan masyarakat saat ini harus segera diklarifikasikan. *Klarifikasi itu* tak hanya dari aparat keamanan, namun juga dari keluarga dan kenalan orang-orang yang dikabarkan. Tanpa ada *klarifikasi*, soal hilangnya seseorang [...].

"Saya kira yang paling penting adalah harus segera ada klarifikasi mengenai orang hilang itu. [...].



Sementara itu, *Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigjen TNI Abdul Wahab Mokodongan*, mengatakan [...].

"*Pimpinan ABRI* telah memerintahkan seluruh jajaran, mulai dari Kodam hingga Koramil maupun Polda hingga ke Polsek-polsek untuk mencari para aktivis yang diduga ditahan [...]. (paragraf 4)

Pada hari yang sama, *Saudara kandung Andi Arief (Ketua Umum SMID), Dr. Eddy Irawan SE. MSc.*, yang didampingi Kepala Operasional LBH Lampung [...].

Sebagai anggota Komnas HAM, *Muladi* mengaku pernah mencari orang yang dikabarkan hilang [...].

Sekalipun demikian, *Muladi* memprihatinkan fenomena orang hilang tersebut. [...]

Hal senada dikemukakan Ketua Komisi I DPR, *Aisyah Amini* [...]. *Ia* berharap hilangnya orang-orang tersebut bukan akibat praktek-praktek tidak terpuji [...].

Ia mengaku belum yakin betul apakah hilangnya beberapa warga masyarakat belakangan ini akibat perbuatan oknum aparat atau benar-benar diculik warga masyarakat lainnya.[...].

Menurut *Wahab Mokodongan*, untuk kepentingan klarifikasi, *pimpinan ABRI* telah memerintah kepada seluruh jajaran Kodam, Korem, sampai ke tingkat Koramil dan Babinsa untuk melakukan pencekan. *Perintah yang sama* juga telah diberikan kepada seluruh Polda sampai Polsek.

Menurut *Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjoyanto*, kakak kandung Andi Arief itu dalam laporannya menyebutkan, *pihaknya* telah mendapatkan sejumlah petunjuk awal. *Petunjuk dimaksud* adalah berdasarkan laporan yang diterima para tetangga di sekitar rumah Andi Arief [...].

Maksud kedatangan Eddy selaku wakil keluarga Andi Arief ke YLBHI adalah meminta bantuan mengenai kejelasan dan status adiknya. [...]

Dikatakan, *pihak keluarga* telah rela jika *Andi* dikenai proses hukum. [...]

Direktur eksekutif PBHI, Hendaridi, mempertanyakan sikap pemerintah yang sebenarnya dalam memandang kasus orang hilang ini. [...]

Dari kutipan badan berita pada (5.42) terlihat bahwa struktur tematik berita yang menandai area topik penulis dan rangka struktural wacana berwujud deretan frase nominal, nomina, atau pronomina sebagai berikut ini.

Struktur tematik (5.42):

Menteri Kehakiman Muladi

Klarifikasi

Klarifikasi

Saya (Muladi)

Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigjen TNI A. Wahab Mokodongan

Pimpinan ABRI

Saudara kandung Andi Arief (Ketua Umum SMID), Dr. Eddy Irawan SE. MSc.

Muladi

Muladi

Hal senada

Aisyah Amini

Ia

Ia (Aisyah Amini)

Wahab Mokodongan

Pimpinan ABRI

Perintah yang sama

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

(YLBHI) Bambang Widjoyanto

Pihaknya

Petunjuk dimaksud

Maksud kedatangan Eddy selaku wakil keluarga Andi Arief ke YLBHI

Pihak keluarga

Andi Arief

Direktur eksekutif PBHI, Hendarji

Dari struktur tematik (5.42) ini dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut ini. Pertama, bahwa area topik pemberitaan adalah kasus orang "hilang" yang dilaporkan berkaitan dengan kelompok partisipan, yakni (1) Polisi, ABRI dan Pemerintah, (2) keluarga Andi Arief dan pembelanya, dan (3) partisipan di luar keduanya, seperti anggota DPR RI Aisyah Amini. Fakta,

data, dan informasi yang dilaporkan dalam berita ini juga berkaitan dengan ketiga partisipan tersebut.

Kedua, ketiga kelompok partisipan yang mendominasi pengisian subjek gramatikal di dalam wacana berita adalah representasi dari semua pihak, baik pihak yang pro mahasiswa maupun pro pemerintah. Di dalam wacana berita ini, semua pihak ini terakomodasi kepentingannya. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa dalam struktur tematik yang seperti ini, perspektif pemberitaan yang tampak adalah perspektif netral, yakni pemberitaan yang akomodatif terhadap semua kepentingan yang ada serta berimbang.

Dari analisis terhadap badan berita (5.40), (5.41) dan (5.42) terlihat bahwa di dalam pola struktur tematik (frasa) nominal dapat dibangun perspektif pemberitaan, baik itu perspektif pro mahasiswa, perspektif pro pemerintah, maupun perspektif netral. Caranya adalah dengan mentematisasikan secara konsisten frase-frase nominal yang berisi partisipan-partisipan tertentu dan menambahkan pula fakta, data, dan informasi yang terkait dengan partisipan tertentu itu. Apabila yang ingin dibangun adalah perspektif pro mahasiswa, maka wartawan cenderung mentematisasikan partisipan mahasiswa atau partisipan lain yang mendukung, bersimpati, dan membela mahasiswa. Sebaliknya, apabila yang ingin dibangun adalah perspektif pro pemerintah, maka wartawan cenderung mentematisasikan partisipan dari kalangan Pemerintah Orde Baru atau partisipan lain yang mendukung, bersimpati, atau

membela pemerintah. Dan terakhir, apabila yang ingin ditampakkan adalah perspektif netral, maka wartawan akan bersikap akomodatif dalam mentematisasikan partisipan yang pro mahasiswa maupun yang pro pemerintah. Kedua partisipan ini mendapat tematisasi secara berimbang.

5.2.3.2 Pola Struktur Tematik Paduan Frase Nominal Pengisi Subjek Gramatikal dan Frase Preposisional Keterangan Waktu

Pada pola ini, frase nominal pengisi subjek gramatikal dan frase preposisional pengisi keterangan waktu, dalam istilah Brown dan Yule (1983), adalah "pagar-pagar" di dalam wacana yang berfungsi untuk memberi rangka struktural serta untuk menandai area topik penulis. Pola struktur tematik paduan frase nominal dan frase preposisional ini secara jelas dapat dideskripsikan dari kutipan badan berita (5.43) di bawah ini yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari tema (II.C.13b).

Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad dan Marinir, yang tergabung dalam Komando Operasi Jaya (Koopsjaya) "membersihkan" gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu dinihari dari sisa mahasiswa yang bertahan. (II.C.13b)

(5.43) *Sebelumnya, mahasiswa tersebut sejak Selasa (19/5) "menguasai" gedung tersebut dan tinggal di dalamnya guna menuntut reformasi menyeluruh. (paragraf 2)*

"Pembersihan" tersebut dimulai sekitar pukul 23.30 WIB [...]. (paragraf 3)

Pada pukul 23.45 WIB, petugas mulai memasuki gedung Lokawirasabha dan memerintahkan mahasiswa di lantai atas gedung tersebut turun dan menggiring mereka ke luar gedung atau masuk lobi gedung Graha Karana dan tangga Pustaka Loka. (paragraf 4)

Pada pukul 00.05 WIB, sekitar 3.000 mahasiswa dikumpulkan di Lobi [...]. Selanjutnya, pada pukul 00.10 WIB, mahasiswa di ruangan tersebut secara berangsur-angsur keluar sampai seluruhnya berkumpul di jalan masuk sisi barat. (paragraf 5)

Sejak pukul 00.10 WIB, mahasiswa secara perlahan-lahan didesak mundur ke arah luar pintu masuk gedung [...]. (paragraf 6)

Sekitar delapan dari 200 bus yang disiapkan [...]. (paragraf 7)

Sudarso, sopir bus Mayasari pool Cijantung, mengaku tidak tahu kalau bus yang dikemudikannya untuk mengangkut mahasiswa.

Pada Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB, rombongan dari empat bus pertama, yang mengangkut mahasiswa, berangkat meninggalkan gedung DPR/MPR, sementara ribuan sisanya masih bertahan. (paragraf 11).

Upaya persuasif petugas semakin berhasil setelah sekitar pukul 02.00 WIB mahasiswa masuk bus. Pada pukul 02.15 WIB, bus yang penuh berisi mahasiswa, bahkan di bagian atasnya, mulai bergerak meninggalkan pelataran parkir gedung menuju bebagai kampus di Jakarta [...]. (paragraf 12)

Teriakan "hidup reformasi" dan lagu "halo-halo Bandung" mengiringi kepergian bus tersebut menuju tujuan. Hingga sekitar pukul 02.44 WIB, seluruh bus penuh sesak sisa mahasiswa meninggalkan halaman gedung, sedangkan bus yang lain keluar dalam keadaan kosong. (paragraf 13)

Sesaat setelah bus terakhir keluar dari halaman gedung, petugas keamanan langsung menutup seluruh jalan masuk gedung tersebut. (paragraf 14)

Sementara itu, Pangkoopsjaya, yang juga Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin hanya tampak sebentar dalam operasi tersebut, yaitu sekitar pukul 11.45 WIB hingga 12.10 wib [...]. (paragraf 15)

Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Hendarji saat diserbu wartawan se usai operasi pembersihan menyambut gembira keberhasilan operasi tersebut. [...] (paragraf 16)

Ia mengatakan [...]. (paragraf 17)

Dari kutipan badan berita pada (5.43), terlihat bahwa struktur tematik berita yang menandai area topik penulis dan rangka struktural wacana berwujud: (1) deretan frase nominal yang ditematisasikan pada awal paragraf, awal kalimat, atau awal klausa, dan (2) frase nominal yang didahului oleh penanda rangka waktu yang berupa frase preposisional yang ditematisasikan, seperti yang terdapat dalam Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2: Struktur Tematik (5.43):

Struktur Tematik (5.43)	
Frase Nominal*	Frase Preposisional** + Frase Nominal
1. <i>Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad dan Marinir, yang tergabung dalam Komando Operasi Jaya (Koopsjaya)</i>	2. <u>Sebelumnya</u> + mahasiswa tersebut
3. <i>"Pembersihan" tersebut</i>	4. <u>Pada pukul 23.45 WIB</u> + petugas
	5. <u>Pada pukul 00.05 WIB</u> + sekitar 3000 mahasiswa
	6. <u>Selanjutnya, pada pukul 00.10 WIB</u> + mahasiswa
	7. <u>Sejak pukul 00.10 WIB</u> + mahasiswa
8. <i>Sekitar delapan dari 200 bus</i>	
9. <i>Sudarso, sopir bus Mayasari pool Cijantung</i>	10. <u>Pada Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB</u> + rombongan dari empat bus pertama, yang mengangkut mahasiswa
11. <i>Upaya persuasif petugas</i>	12. <u>setelah sekitar pukul 02.00 WIB</u> + mahasiswa
	13. <u>Pada pukul 02.15 WIB</u> + bus yang penuh berisi mahasiswa, bahkan di bagian atasnya
14. <i>Teriakan "hidup reformasi" dan lagu "halo-halo Bandung"</i>	15. <u>Hingga sekitar pukul 02.44 WIB</u> + seluruh bus penuh sesak sisa mahasiswa
	16. <u>Sesaat setelah bus terakhir keluar dari halaman gedung</u> + petugas keamanan
	17. <u>Sementara itu</u> + Pangkoopsjaya, yang juga Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin
18. <i>Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Hendarji</i>	
19. <i>Ia</i>	

*pronomina karena jumlahnya terbatas, no. 19, maka dimasukkan dalam

frase nominal

**frase preposisional sengaja diberi garis bawah untuk membedakan dengan frase nominal

Dari struktur tematik (5.43) ini dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut ini. Pertama, dari tema (II.C.13b), area topik dan rangka struktural berita yang dibangun oleh wartawan berupa rangkaian *wujud topik* yang disajikan berganti-ganti dari frase nominal *petugas keamanan* lalu beranjak ke frase nominal *mahasiswa tersebut*, pindah lagi ke frase nominal *petugas keamanan*, diselingi frase nominal *sopir bus*, dan *bus*, dan kembali lagi ke frase nominal *petugas keamanan*. Walaupun terkesan longgar karena terbentuk dari empat *wujud topik* yang berbeda, namun area topik ini tetap berbicara tentang frase nominal *petugas keamanan*.

Kedua, ketika pelaporan berita berkaitan dengan proses “pembersihan” gedung DPR/MPR oleh partisipan petugas keamanan, wujud-wujud topik yang disajikan didasarkan pada rangka waktu, yakni seperti yang terlihat dalam kejadian-kejadian 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, dan 17, dengan mentematisasikan frase preposisional pengisi keterangan waktu. Cara ini sangat efektif untuk menggambarkan dan menjelaskan proses “pembersihan” gedung DPR/MPR oleh petugas keamanan dari titik-titik tolak waktu yang berbeda-beda sehingga informasi-informasi yang disajikan menjadi rinci, lengkap atau utuh, dan padu.

Ketiga, karena area topik berita lebih mengembangkan wujud topik *petugas keamanan* dan rangka waktu yang ditematisasikan memberikan informasi yang lebih rinci, lengkap atau utuh, dan padu tentang apa yang dilakukan oleh *petugas keamanan*, maka perspektif pemberitaan yang terbangun dalam struktur tematik (5.43) adalah perspektif pro pemerintah. Dalam hal ini, partisipan *petugas keamanan* adalah representasi dari pihak Pemerintah Orde Baru.

Berbeda dengan struktur tematik pada kutipan (5.43) di atas yang memperlihatkan perspektif pro pemerintah, struktur tematik dari kutipan (5.44) yang merupakan pengembangan dari tema (II.C.12a) berikut ini memperlihatkan perspektif pro mahasiswa.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan para tokoh masyarakat ke gedung DPR/MPR untuk berdemo, bertemu dengan fraksi-fraksi, dan melakukan rapat dengar pendapat umum. (II.C.12a)

(5.44) *Mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi se-Jabotabek dan datang sendiri-sendiri, sejak sekitar pukul 09.00 dari kampus masing-masing, dan berkumpul di DPR. Mereka menamakan dirinya [...].*

Mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru dengan kendaraan umum itu, [...]

Mahasiswa terpaksa berjubel di depan pintu. Mereka diizinkan masuk satu persatu berdasarkan rombongan masing-masing. Sekitar pukul 12.00 hampir semua mahasiswa sudah melewati pagar. Mereka berkumpul. Setelah itu mereka berjalan bersama menuju gedung utama.

Aparat keamanan tampak sibuk mencegah agar mahasiswa tidak bisa mencapai tangga tersebut. Pagar betis disusun. Pagar betis awalnya [...]

[...] mahasiswa banyak meneriakkan turunkan Soeharto. [...]

Setelah berkumpul, aksi dimulai sekitar pukul 10.00. Mereka bergantian melakukan orasi [...]. Aparat keamanan tampak terus berjaga-jaga [...]. Barisan aparat keamanan yang terlalu dekat dengan kumpulan mahasiswa diperintahkan komandannya untuk menjauh.

Sementara mereka mengadakan aksi di luar [...]. Ketua PP Muhamadyah Amin Rais dengan didampingi pakar hukum Yusril Ihza Mahendra melakukan rapat [...].

Amin datang dengan kawalan banyak mahasiswa. Mahasiswa yang mengawal Amin kebanyakan [...]. Mereka meneriakkan yel-yel [...].

Sementara itu di tempat lain FABRI tengah menerima [...]. Mereka datang bersama tokoh masyarakat seperti Romo Manguwijaya.

Pada sore harinya, kemudian Harmoko mengumumkan secara resmi sikap dewan agar presiden mengundurkan diri. Akhirnya sekitar pukul 16.00 mahasiswa kembali ke kampus masing-masing.

Para mahasiswa yang berunjuk rasa di DPR yang tampaknya belum cukup puas atas hasil pernyataan ketua DPR RI [...]. Sebanyak seratus orang yang terdiri atas ketua dan anggota senat mahasiswa dari sekitar 30 PT memutuskan untuk bermalam di gedung DPR RI.

Dari kutipan badan berita pada (5.44), terlihat bahwa struktur tematik berita yang menandai area topik penulis dan rangka struktural wacana berwujud: (1) deretan (frase) nominal yang ditematisasikan pada awal paragraf, awal kalimat, atau awal klausa, dan (2) frase nominal yang didahului oleh penanda rangka waktu yang berupa frase preposisional yang ditematisasikan, seperti yang terdapat dalam Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3: Struktur Tematik (5.44):

Struktur Tematik (5.44)	
Frase Nominal*	Frase Preposisional** + Frase Nominal
1. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan para tokoh masyarakat	
2. Mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi se-Jabotabek dan datang sendiri-sendiri	
3. Mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru dengan kendaraan umum itu	
4. Mahasiswa	
5. Mereka	
	6. <u>Sekitar pukul 12.00</u> + hampir semua mahasiswa
	7. Mereka
	8. <u>Setelah itu</u> + mereka
9. Aparat keamanan	
10. Mahasiswa	
11. Pagar betis	
12. Pagar betis	
13. Mahasiswa	
	14. <u>Setelah berkumpul</u> , + aksi
15. Mereka	
16. Aparat keamanan	
17. Barisan aparat keamanan yang terlalu dekat dengan kumpulan mahasiswa	
	18. <u>Sementara</u> + mereka
19. Ketua PP Muhamadiyah Amin Rais dengan didampingi pakar hukum Yusni Ihsa Mahendra	
20. Amin	
21. Mahasiswa yang mengawal Amin	
22. Mereka	
	23. <u>Sementara itu di tempat lain</u> + FABRI
24. Mereka	
	25. <u>Pada sore harinya, kemudian</u> + Harmoko
26. Presiden	
	27. <u>Akhirnya sekitar pukul 16.00</u> + mahasiswa
28. Para mahasiswa [...]	
29. Sebanyak seratus orang [...]	

*pronomina karena terkait dengan nomina, maka dalam struktur ini dimasukkan dalam (frase) nominal

**frase preposisional sengaja diberi garis bawah untuk membedakan dengan frase nominal

Dari struktur tematik (5.44) ini dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut ini. Pertama, dari tema (II.C.12a), area topik berita yang dipilih oleh wartawan berupa rangkaian *wujud topik* yang disajikan berganti-ganti dari frase nominal *ribuan mahasiswa* lalu disajikan dalam bentuk pronomina *mereka* dan beranjak ke frase nominal *aparat keamanan* dan *pagar betis*, berganti lagi ke frase nominal *Ketua Muhammadiyah* dan diteruskan dengan nomina *Amin, FABRI, Harmoko, Presiden*, dan akhirnya kembali lagi ke frase nominal *para mahasiswa*. Walaupun wujud-wujud topiknya banyak atau beragam, namun area topik dan rangka struktural berita tetap berbicara tentang frase nominal *para mahasiswa*.

Kedua, ketika pelaporan berita berkaitan dengan kejadian-kejadian kronologis di gedung DPR/MPR, wujud-wujud topik disajikan berdasarkan rangka waktu, yakni seperti yang terlihat dalam kejadian-kejadian 6, 7, 8, 14, 18, 23, 25, dan 27. Cara ini sangat efektif untuk menggambarkan dan menjelaskan proses atau jalannya kejadian-kejadian yang terjadi di gedung DPR/MPR dari titik-titik tolak waktu yang berbeda-beda sehingga informasi-informasi yang disajikan menjadi rinci, lengkap atau utuh, dan padu.

Ketiga, karena area topik berita lebih mengembangkan wujud topik *mahasiswa* dan rangka waktu yang ditematisasikan memberikan informasi yang lebih rinci, lengkap atau utuh, dan padu tentang apa yang dilakukan oleh

mahasiswa, maka perspektif pemberitaan yang terbangun dalam struktur tematik (5.44) adalah perspektif pro mahasiswa. Dengan demikian, pengembangan struktur tematik (5.44) tidak menyimpang dari perspektif yang diperlihatkan oleh pilihan tematiknya.

Dari analisis terhadap badan berita (5.43) dan (5.44) terlihat bahwa pola struktur tematik paduan (frase) nominal dan frase preposisional pengisi keterangan waktu dapat digunakan oleh wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan, baik itu perspektif pro pemerintah maupun perspektif pro mahasiswa. Caranya adalah dengan mentematisasikan secara konsisten: (1) wujud-wujud topik yang berupa frase-frase nominal untuk menempati fungsi subjek dalam kalimat-kalimat, dan (2) menambahkan pula fakta, data, dan informasi yang terkait dengan frase nominal tersebut dengan menggunakan titik-titik tolak waktu yang berbeda-beda dalam wujud tematisasi frase preposisional mendahului frase nominal pengisi subjek. Apabila yang ingin dibangun adalah perspektif pro mahasiswa, maka wartawan cenderung mentematisasikan partisipan mahasiswa atau partisipan lain yang mendukung, bersimpati, dan membela kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, apabila yang ingin dibangun adalah perspektif pro pemerintah, maka wartawan cenderung mentematisasikan partisipan dari kalangan Pemerintah Orde Baru atau partisipan lain yang mendukung, bersimpati, atau membela kepentingan pemerintah. Dan terakhir, perspektif pemberitaan yang dibangun di dalam

struktur tematik berita menjadi lebih kuat apabila wartawan memanfaatkan cara penggambaran, penjelasan, maupun pemerincian tentang kejadian tidak hanya dari satu rangka waktu, tetapi dari rangka waktu yang berbeda-beda.

5.2.3.3 Pola Struktur Tematik Paduan Frase Nominal dan Frase Preposisional Keterangan Tempat

Di dalam pola ini, frase nominal dan frase preposisional tempat, dalam istilah Brown dan Yule (1983), menjadi “pagar-pagar” di dalam wacana yang berfungsi untuk memberi rangka struktural serta untuk menandai area topik penulis. Fenomena ini secara jelas dapat dideskripsikan dari kutipan badan berita (5.45) di bawah ini yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari tema (II.C.9a), yang memiliki perspektif pro pemerintah.

Unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air sudah semakin beringas. (II.C.9a)

(5.45) Di Jakarta, aksi keprihatinan melibatkan hampir semua perguruan tinggi di Jakarta, dan dipusatkan menurut wilayah masing-masing. Di Jakarta timur, unjuk rasa dipusatkan [...]. Di Jakarta Pusat dipusatkan di kampus UI [...]. Sedangkan di Jakarta Selatan dipusatkan di Kampus [...]. *Semua aksi itu* memacetkan jalan raya beberapa jam karena mahasiswa turun ke jalan. (paragraf 2)

Unjuk rasa di IKIP Jakarta diwarnai bentrokan mahasiswa dan petugas [...]. (paragraf 4)

Di UI Salemba, nyaris terjadi bentrokan. *Perwakilan mahasiswa* [...]. (paragraf 5)

Unjuk rasa tunggal [...] di kota Yogyakarta, Sabtu. Mengenakan jubah putih [...]. (paragraf 6).

Ribuan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta masih terus melakukan aksi keprihatinan, misalnya di Kampus ISI [...]. (paragraf 7)

Sejumlah perguruan tinggi di Semarang, Sabtu, juga mengadakan aksi keprihatinan secara serempak [...]. (paragraf 8)

Unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang tampak [...]. (paragraf 9).

Di Surabaya, aksi serupa menyebabkan 4 mahasiswa luka-luka [...]. (paragraf 10)

Aksi yang paling bringas dan brutal barangkali yang terjadi di Kota Medan [...]. (paragraf 11)

Dari kutipan badan berita pada (5.45), terlihat bahwa struktur tematik berita yang menandai area topik penulis dan rangka struktural wacana berwujud: (1) deretan (frase) nominal yang ditematisasikan pada awal paragraf, awal kalimat, atau awal klausa, yang dapat diikuti oleh frase preposisional penanda rangka tempat, dan (2) frase nominal yang didahului oleh penanda rangka tempat yang berupa frase preposisional yang ditematisasikan, seperti yang terdapat dalam Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4: Struktur Tematik (5.45):

Struktur Tematik (5.45)	
Frase Nominal*	Frase Preposisional** + Frase Nominal
5. <i>Semua aksi itu</i>	1. <i>Di Jakarta</i> , + aksi keprihatinan
6. <i>Unjuk rasa + di IKIP Jakarta</i>	2. <i>Di Jakarta timur</i> , + unjuk rasa
	3. <i>Di Jakarta Pusat</i> , + (unjuk rasa)
	4. <i>di Jakarta Selatan</i> + (unjuk rasa)
8. <i>Perwakilan mahasiswa</i>	7. <i>Di UI Salemba</i> ,
9. <i>Unjuk rasa tunggal</i>	
10. <i>Ribuan mahasiswa + di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta</i>	
11. <i>Sejumlah perguruan tinggi + di Semarang</i>	
12. <i>Unjuk rasa ribuan mahasiswa + dari berbagai perguruan tinggi di Malang</i>	13. <i>Di Surabaya</i> , + aksi serupa
14. <i>Aksi yang paling bringas dan brutal barangkali yang terjadi + di Kota Medan</i>	

Dari struktur tematiknya (5.45) dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut ini. Pertama, area topik berita yang dipilih oleh wartawan berupa rangkaian wujud-wujud topik yang disajikan berganti-ganti dari frase nominal *aksi keprihatinan mahasiswa*, ke frase nominal *unjuk rasa mahasiswa*, berganti ke frase nominal *ribuan mahasiswa*, dan akhirnya beralih ke frase nominal *sejumlah perguruan tinggi* dan kembali lagi ke frase nominal *aksi unjuk rasa mahasiswa*. Wujud-wujud topik ini relevan dan tidak menyimpang dari tema berita dalam (II.C.9a) di atas.

Kedua, frase-frase preposisional penanda makna tempat yang ditematisasikan ke dalam badan berita dan membentuk rangka struktural tempat dalam struktur tematik (5.45) merupakan pengembangan lebih lanjut dari frase preposisional pengisi keterangan tempat *di Jakarta dan berbagai kota lainnya* yang terdapat dalam tema berita (II.C.9a). Frasa *di Jakarta* oleh wartawan dikembangkan menjadi 4 paragraf, yakni paragraf 2, 3, 4, dan 5. Sementara itu, frasa *berbagai kota lainnya di Indonesia* dikembangkan lebih lanjut dalam paragraf 6 dan 7 (*Kota Yogyakarta*), paragraf 8 (*Kota Semarang*), paragraf 9 (*kota Malang*), paragraf 10 (*kota Surabaya*), dan paragraf 11 (*Kota Medan*).

Ketiga, dari segi perspektif pemberitaan, pengembangan wujud topik berita seperti dalam interpretasi pertama, dan rangka tempat berita seperti

dalam interpretasi kedua memperlihatkan upaya yang konsisten dari wartawan yang menulis berita ini untuk memperkuat perspektif pemberitaan seperti yang terlihat dalam temanya, yakni perspektif pro pemerintah.

Berbeda dengan struktur tematik (5.45) di atas yang memperkuat perspektif pro pemerintah, struktur tematik (5.46) berikut memperkuat perspektif pro mahasiswa. Struktur tematik (5.46) ini merupakan pengembangan dari tema (II.C.12a), yang memperlihatkan perspektif pro mahasiswa.

Gelombang aksi keprihatinan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, Kamis (7/5), diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan korban berjatuh di kedua pihak.

(5.46) Di Unsur Purwokerto, 65 mahasiswa luka-luka dan menurut PR III Unsur, Komari SH. M.Hum, 28 orang di antaranya terpaksa dirawat di rumah sakit. *Mereka yang dirawat itu* kebanyakan luka-luka di kepala akibat terkena pentungan dan peluru karet. *Delapan mahasiswa di antaranya [...]. Posko gabungan mahasiswa mencatat sembilan mahasiswa* belum diketahui keberadaannya.

Bentrokan terjadi ketika *para mahasiswa* berupaya berjalan kaki dengan damai ke gedung DPRD [...]

Di Solo, *bentrokan mahasiswa dan aparat keamanan* diwarnai dengan hujan batu dan bom molotov [...].

Bentrokan meletus ketika *sekitar 1000 mahasiswa* bergerak keluar kampus. *Mereka* mendesak ke arah petugas [...]

Di Riau, *bentrokan mahasiswa dan aparat* menyebabkan 10 mahasiswa luka-luka

Dari kutipan badan berita pada (5.46), terlihat bahwa struktur tematik berita yang menandai area topik penulis dan rangka struktural wacana

berwujud: (1) deretan (frase) nominal yang ditematisasikan pada awal paragraf, awal kalimat, atau awal klausa, dan (2) frase nominal yang didahului oleh penanda rangka tempat yang berupa frase preposisional yang ditematisasikan, seperti yang terdapat dalam Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5.: Struktur Tematik (5.46):

Struktur Tematik (5.46)	
Frase Nominal	Frase Preposisional** + Frase Nominal
2. <i>Mereka yang dirawat itu</i> 3. <i>Delapan mahasiswa di antaranya</i> 4. <i>Posko gabungan mahasiswa</i> 5. <i>sembilan mahasiswa</i> 6. <i>Bentrokan</i> 7. <i>para mahasiswa</i> 9. <i>Bentrokan</i> 10. <i>sekitar 1000 mahasiswa</i> 11. <i>Mereka</i>	1. <i>Di <u>Unsur Purwokerto</u> + 65 mahasiswa</i> 8. <i>Di <u>Solo</u>, bentrokan mahasiswa dan aparat keamanan</i> 12. <i>Di <u>Riau</u>, bentrokan mahasiswa dan aparat</i>

Dari struktur tematiknya (5.46) dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut ini. Pertama, area topik berita yang dipilih oleh wartawan berupa rangkaian wujud-wujud topik yang berupa frase nominal *para mahasiswa* dan frase nominal *bentrokan mahasiswa dan aparat*. Dua wujud topik ini relevan dan tidak menyimpang dari tema berita dalam (II.C.12a) di atas.

Kedua, frase-frase preposisional penanda makna tempat, yang ditematisasikan ke dalam badan berita dan membentuk rangka struktural tempat dalam struktur tematik (5.46), merupakan pengembangan lebih lanjut dari frase preposisional pengisi keterangan tempat *di Indonesia* yang terdapat

dalam tema berita (II.C.12a). Frase *di Indonesia* oleh wartawan dikembangkan secara lebih spesifik dalam badan berita menjadi frase *di Unsud Purwokerto, di Solo, dan di Riau*.

Ketiga, dari segi perspektif pemberitaan, pengembangan wujud topik berita seperti dalam interpretasi pertama, dan rangka tempat berita seperti dalam interpretasi kedua memperlihatkan upaya yang konsisten dari wartawan yang menulis berita ini untuk memperkuat perspektif pemberitaan seperti yang terlihat dalam tema (II.C.12a), yakni perspektif pro mahasiswa.

Dari analisis terhadap badan berita (5.45) dan (5.46) terlihat bahwa pola struktur tematik paduan (frase) nominal dan frase preposisional pengisi keterangan tempat dapat digunakan oleh wartawan untuk membangun perspektif pemberitaan, baik itu perspektif pro pemerintah maupun perspektif pro mahasiswa. Caranya adalah dengan mentematisasikan: (1) wujud-wujud topik yang berupa frase-frase nominal yang konsisten dengan tema berita, dan (2) menambahkan pula fakta, data, dan informasi yang terkait dengan frase nominal tersebut dengan menggunakan titik-titik tolak tempat yang berbeda-beda dalam wujud tematisasi frase preposisional mendahului frase nominal pengisi subjek.

5.2.4 Penahapan

Dalam penelitian ini, penahapan atau *staging* berkaitan dengan strategi penyajian informasi oleh wartawan, baik berupa pengaturan teks secara linier,

seperti yang dikemukakan oleh Grimes (1975) dan Brown dan Yule (1983), maupun penonjolan aspek-aspek tertentu dari wacana, seperti yang dikemukakan oleh Clements (1979), serta pereduksian atau dalam bahasa Van Dijk (1977) pengimplisitan aspek-aspek tertentu dari wacana. Strategi-strategi penahanan ini digunakan untuk menciptakan *suspens*, untuk meyakinkan pembacanya akan kebenaran apa yang ditulis dengan menambahkan perincian-perincian penunjang yang masuk akal, untuk membujuk pembacanya agar menerima sajian aksi, atau untuk mengguncangkan atau mengejutkan perhatian pembaca menurut sudut pandangan wartawan atau surat kabarnya.

Berdasarkan analisis terhadap teks-teks berita dari keempat surat kabar sumber data ditemukan ada dua pola penyajian informasi yang dipergunakan untuk membangun perspektif berita. Kedua pola itu adalah (1) penyajian informasi dalam urutan kewajaran, dan (2) penyajian informasi dalam ukuran keeksplisitan. Berikut ini kedua pola akan dibahas satu persatu.

5.2.4.1 Penyajian Informasi dalam Urutan Kewajaran

Berikut ini disajikan tiga subpola urutan peristiwa dalam penahanan yang digunakan oleh para wartawan untuk membangun perspektif berita. Ketiga subpola urutan ini adalah urutan wajar, urutan tidak wajar, dan urutan umum-khusus. Urutan wajar mengacu pada penyajian informasi berdasarkan pada urutan terjadinya peristiwa. Urutan tidak wajar mengacu pada penyajian informasi yang tidak didasarkan pada urutan terjadinya peristiwa tetapi lebih

dimaksudkan untuk menonjolkan aspek-aspek tertentu dari berita. Dan terakhir, Urutan umum-khusus mengacu pada penyajian informasi yang didasarkan pada kemudahan persepsi bagi pembaca.

5.2.4.1.1 Pola Urutan Wajar

Urutan wajar atau *natural order* menurut Brown dan Yule (1983) sejajar dengan konsep *ordo naturalis* menurut Levelt (1981) dan *normal order* menurut Van Dijk (1977). Urutan wajar ini berkaitan dengan penyajian rangkaian penuturan peristiwa yang berpijak pada urutan terjadinya peristiwa. Suatu peristiwa yang terjadi lebih dahulu akan dilaporkan mendahului peristiwa yang terjadi kemudian. Dalam konsep ini, urutan-urutan penyajian dalam rangkaian kalimat menunjukkan urutan-urutan terjadinya peristiwa itu dalam dunia nyata.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pola penyajian urutan wajar digunakan sebagai salah satu cara untuk menandakan perspektif pemberitaan. Fenomena ini secara jelas dapat dideskripsikan dari kutipan (5.47) dan (5.48) berikut ini, yang melaporkan peristiwa *bentrokan mahasiswa dan aparat keamanan di Universitas Trisakti*.

- (5.47) Adi Andoyo dan Dekan FE Usakti Chiruman, bernegosiasi dengan Dandim dan Kapolres Jakbar, untuk mengatur agar mahasiswa bisa bubar dengan tertib.

Namun saat itu, terjadi keributan. Para mahasiswa menemukan seorang yang dicurigai sebagai intel, berada dalam kerumunan mahasiswa. Sebagian mahasiswa mencoba mengamankan orang itu, sebagian lagi mengejar dan mencoba memukul.

Melihat ribut-ribut itu, para mahasiswa maju ke depan mengambil posisi berhadapan dengan aparat—yang saat itu juga bergerak merapat ke arah mahasiswa.

Suasana tegang ini berlangsung sekitar sepuluh menit. Tiba-tiba terdengar aparat mengokang senapan dan menembakkan senapan ke udara. Saat itu juga, barisan aparat terdepan berhamburan mengejar dan memukuli massa dengan pentungan. Aparat juga memukuli seorang wartawan ABC.

Suasana menjadi kacau balau. Wartawan *Republika*, yang berada di halaman gedung Walikota Jakbar melaporkan aparat berteriak-teriak meminta massa bubar, sambil terus menembakkan senapan ke udara. Namun, massa mahasiswa berlarian, sebagian menyelamatkan diri masuk ke gedung Walikota Jakarta Barat. (II.D.1b).

- (5.48) Diperoleh informasi, peristiwa bentrokan mahasiswa dengan petugas keamanan di Universitas Trisakti bermula ketika para mahasiswa menolak permintaan petugas keamanan agar masuk ke areal kampus sekitar pukul 18.00 dari jalan raya. Tiba-tiba muncul sejumlah orang mengendarai beberapa sepeda motor melepaskan tembakan. Ada yang melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa dari aksi mereka di Jalan S Parman. Tapi ada pula yang melepaskan tembakan ke arah massa mahasiswa di jalanan.

Para mahasiswa membalas dengan lemparan batu ke arah petugas keamanan. Tidak jauh dari tempat kejadian dua bus kota Patas hangus terbakar. Kemudian muncul mobil-mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah mahasiswa.

Aparat keamanan yang tidak sabar lagi dengan tindakan persuasif, secara serentak melakukan tindakan pembubaran aksi duduk dan mimbar bebas di Jalan S. Parman. Tak pelak lagi, bentrokan fisik antara ratusan petugas dan ratusan mahasiswa tidak bisa dielakkan. Sebagian mahasiswa lari menyelamatkan diri, sebagian lagi berusaha melawan petugas dengan melemparkan batu. Menghadapi itu aparat keamanan melepaskan tembakan gas air mata, peluru karet, dan tembakan peringatan dengan peluru tajam. (II.D.1c).

Dari kutipan (5.47) dan (5.48) di atas terlihat bahwa urutan wajar untuk peristiwa *bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan di Universitas*

Trisakti berbeda. Perbedaan antara keduanya dalam hal peristiwa awal dan rangkaian peristiwa berikutnya dapat dilihat dalam Tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5.6.: Urutan Wajar dalam Teks Berita (5.47) dan (5.48)

Urutan Wajar	Peristiwa Bentrokan di Univ. Trisakti	
	Kutipan (5.47)	Kutipan (5.48)
peristiwa 1	Adi Andoyo dan Dekan FE Usakti Chiruman, bernegosiasi dengan Dandim dan Kapolres Jakbar	Para mahasiswa menolak permintaan petugas keamanan agar masuk ke areal kampus sekitar pukul 18.00 dari jalan raya
peristiwa 2	Terjadi keributan karena mahasiswa menemukan intel	Tiba-tiba muncul sejumlah orang mengendarai beberapa sepeda motor melepaskan tembakan.
peristiwa 3	Mahasiswa ada yang mengamankan dan ada pula yang mengejar dan mencoba memukul intel itu	Ada yang melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa, ada pula yang melepas tembakan ke arah mahasiswa di jalanan
peristiwa 4	Mahasiswa dan aparat saling merapat	Para mahasiswa membalas dengan lemparan batu ke arah petugas keamanan.
Peristiwa 5	Suasana tegang berlangsung sekitar sepuluh menit	Tidak jauh dari tempat kejadian dua bus kota Patas hangus terbakar.
Peristiwa 6	Aparat mengongkang senapan dan menembakkan ke udara	Muncul mobil-mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah mahasiswa.
Peristiwa 7	Aparat terdepan mengejar dan memukul mahasiswa dengan pentungan, juga wartawan ABC	Aparat keamanan serentak melakukan tindakan pembubaran aksi duduk dan mimbar bebas di Jalan S. Parman.
Peristiwa 8	Suasana kacau balau	Bentrokan fisik antara ratusan petugas dan ratusan mahasiswa terjadi
Peristiwa 9	Aparat berteriak-teriak meminta massa bubar sambil terus menembakkan senapan ke udara	Sebagian mahasiswa lari menyelamatkan diri, sebagian lagi berusaha melawan petugas dengan melemparkan batu.
Peristiwa 10	Massa mahasiswa berlarian, sebagian menyelamatkan diri ke gedung Walikota, Jakbar	Menghadapi itu aparat keamanan melepaskan tembakan gas air mata, peluru karet, dan tembakan peringatan dengan peluru tajam

Urutan wajar pada kedua kutipan ini membentuk perspektif pemberitaan yang tidak sama, yakni perspektif pro mahasiswa (kutipan 5.47) dan perspektif pro pemerintah (kutipan 5.48). Ini terjadi karena dasar penyusunan urutan wajar dari peristiwa *bentrokan di Universitas Trisakti* ini berbeda. Pada kedua kutipan ini, aspek mengapa (*why*) yang dipilih sebagai penyebab atau pemicu rangkaian peristiwa bentrokan itu berlainan, yakni *tertangkapnya intel dalam kerumunan mahasiswa* (lihat peristiwa 2) dalam kutipan (5.47), dan

mahasiswa menolak permintaan petugas keamanan agar masuk ke areal kampus (lihat peristiwa 1) dalam kutipan (5.48). Perbedaan persepsi kedua surat kabar terhadap aspek mengapa (*why*) dari peristiwa *bentrokan* ini menyebabkan rangkaian sebab-akibat yang terbangun dalam peristiwa ini menjadi berbeda. Pada kutipan (5.47) terlihat bahwa rangkaian peristiwa 3 hingga 10 muncul kemudian secara kronologis sebagai konsekuensi logis dari adanya peristiwa 2, sedangkan pada kutipan (5.48), rangkaian peristiwa 2 hingga 10 muncul kemudian secara kronologis sebagai konsekuensi logis dari adanya peristiwa 1.

Berdasarkan kasus urutan wajar dalam (5.47) dan (5.48), serta kasus-kasus lain dalam data penahanan, dapat diinferensikan beberapa hal berikut ini. Pertama, urutan wajar dalam suatu pelaporan peristiwa bersifat relatif, yakni antara surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain dapat berbeda. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain dalam memandang suatu realitas sosial.

Kedua, perbedaan persepsi atas suatu realitas sosial yang terjadi menyebabkan perbedaan dalam pemilihan peristiwa tertentu sebagai peristiwa yang harus diletakkan pada urutan yang lebih dulu dan peristiwa-peristiwa lain dalam urutan berikutnya.

Ketiga, urutan wajar dari suatu peristiwa, yang memperlihatkan peristiwa tertentu pada urutan yang lebih dulu dan peristiwa lain dalam urutan yang berikutnya, membentuk suatu perspektif pemberitaan tertentu. Perspektif itu ditentukan terutama oleh pemilihan aspek tertentu dari peristiwa sebagai dasar untuk membentuk hubungan sebab-akibat dalam rangkaian peristiwa.

5.2.4.1.2 Pola Urutan Tidak Wajar

Dalam penelitian ini ditemukan juga suatu fenomena urutan penyajian yang tidak wajar atau tidak kronologis di dalam berita. Peristiwa yang terjadi belakangan di dalam dunia nyata justru ditempatkan pada urutan-urutan awal mendahului peristiwa-peristiwa lain yang terjadi lebih dahulu. Pembolak-balikan urutan ini merupakan strategi dalam penahapan yang bertujuan untuk menonjolkan aspek-aspek tertentu dari wacana. Dalam kaitannya dengan perspektif suatu berita, pembolak-balikan urutan peristiwa ini dapat dimanipulasikan untuk kepentingan membangun perspektif tertentu. Fenomena ini secara jelas dapat dideskripsikan dari kutipan (5.49) dan (5.50) berikut ini.

Kutipan (5.49)

Insiden di Universitas Trisakti, Enam Mahasiswa Tewas

Urutan Peristiwa:

- 1) aksi keprihatinan ribuan mahasiswa di kampus Universitas Trisakti;
- 2) aparat yang berada di Jalan layang Grogol (*Grogol fly over*) diduga menembak dengan peluru tajam ke arah mahasiswa;

- 3) enam mahasiswa tertembak atau terkena peluru tajam;
- 4) enam mahasiswa tersebut tewas;
- 5) puluhan mahasiswa lainnya luka-luka berat dan ringan.

Urutan Penyajian dalam berita:

⁴Enam mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas ³terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan ¹sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti Grogol, Jakarta Barat, Selasa (12/5). ³Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru ²yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol (Grogol *fly over*). ⁵Puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan. (II.D.1a).

Kutipan (5.50)

6 Mahasiswa Trisakti Tewas, 4 Petugas Luka-luka

Urutan Peristiwa:

- 1) terjadi aksi unjuk rasa dan keprihatinan dalam bentuk mimbar bebas dan aksi duduk ratusan mahasiswa di Jalan S. Parman, Grogol, Jakarta barat;
- 2) petugas berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk ratusan mahasiswa;
- 3) bentrokan mahasiswa dan petugas;
- 4) korban jiwa mulai berjatuh dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa;
- 5) enam mahasiswa trisakti tewas;
- 6) jenazah 4 mahasiswa dikirim ke kamar jenazah RS Sumber Waras Grogol;
- 7) dua korban luka berat dilarikan ke RS Pusat Pertamina;
- 8) dua korban luka berat dirawat beberapa lama;
- 9) dua korban luka berat menghembuskan nafas terakhir. (A.1c)

Urutan penyajian dalam berita:

⁴Korban jiwa mulai berjatuh dalam ¹aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. ⁵Enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang *setelah* ³bentrok dengan petugas yang ²berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk ratusan mahasiswa di Jalan S. Parman, Grogol, Jakarta barat, Selasa siang hingga petang hari. ⁶Jenazah 4 mahasiswa yang tewas di tempat itu semalam dikirim ke kamar jenazah RS Sumber Waras Grogol, ⁷sedangkan dua korban luka berat yang dilarikan ke RS Pusat Pertamina Jakarta ⁸menghembuskan nafas terakhir setelah ⁹beberapa lama dirawat. (II.D.1c).



Dari kutipan (5.49) dan (5.50) di atas terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara urutan peristiwa yang sesungguhnya terjadi dengan urutan penyajiannya di dalam berita. Pada (5.49) terdapat pembalikan urutan peristiwa dari #1 2 3 4 5# menjadi #4 3 1 3 2 5#, sementara itu pada (5.50) terdapat pembalikan urutan peristiwa dari # 1 2 3 4 5 6 7 8 9# menjadi # 4 1 5 3 2 6 7 8 9#. Penempatan peristiwa nomor 4 dan 3 di dalam klausa pertama dan kedua pada kalimat pertama dari kutipan (5.49) dan penempatan peristiwa nomor 4 dan 1 di dalam klausa pertama dan kedua pada kalimat pertama dari kutipan (5.50) menimbulkan “kesan khusus” tertentu.

Pada kutipan (5.49) ditunjukkan bahwa rangkaian peristiwa nomor 4, yakni *enam mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas* dan peristiwa nomor 3, yakni *(enam mahasiswa tersebut) terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan* adalah peristiwa-peristiwa yang paling menonjol dan paling penting, dibandingkan dengan rangkaian peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Dua peristiwa ini walaupun dirangkaikan tanpa menggunakan suatu kata tugas tertentu namun memperlihatkan adanya hubungan sebab-akibat antara keduanya. Tersirat dari kutipan (5.49) bahwa peristiwa 4 terjadi karena ada peristiwa 3.

Dalam konteks situasi Pemerintahan Orde Baru, di mana pers Indonesia dikendalikan oleh pemerintah, apa yang terdapat dalam kutipan berita (5.49) dengan menempatkan dan merangkaikan peristiwa 4 dan peristiwa 3 dalam

kalimat pertama, merupakan keputusan surat kabar yang sungguh berani. Kutipan berita (5.49) secara jelas memperlihatkan bahwa pelaku yang menyebabkan tewasnya enam mahasiswa itu adalah aparat keamanan. Fenomena pemberitaan yang seperti ini, apabila dilihat dalam kerangka konflik antara mahasiswa dan pemerintah, mengandung dua makna, yakni berita dalam (5.49) cenderung: (1) membela kepentingan mahasiswa (publik), dan (2) tidak mendukung kepentingan pemerintah atau "tidak dapat memahami kebijakan pemerintah (aparat)". Berita (5.49) dalam hal ini menempatkan perspektifnya berseberangan dengan perspektif pemerintah.

Sebaliknya, kutipan berita (5.50) menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa nomor 4, yakni *korban jiwa mulai berjatuhan* dan peristiwa nomor 1, yakni *terjadinya aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa* adalah peristiwa-peristiwa yang paling menonjol, peristiwa yang paling penting, dibandingkan dengan rangkaian peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Dua peristiwa ini dirangkaikan tanpa menggunakan kata tugas. Perangkaian dua peristiwa ini dalam kutipan (5.50) juga memperlihatkan adanya hubungan sebab-akibat antara keduanya, yakni peristiwa 4 terjadi karena ada peristiwa 1 atau dengan ungkapan lain, peristiwa 4 terjadi sebagai eksese atau akibat dari adanya peristiwa 1.

Dalam kaitannya dengan kerangka konflik antara mahasiswa dan pemerintah, apa yang terlihat dalam kutipan berita (5.50), secara jelas

memperlihatkan perspektif pro pemerintah. Dari kutipan berita ini dapat diinferensikan dua makna berikut, yakni teks berita (5.50) ini cenderung: (1) membela kepentingan pemerintah (aparatur), dan (2) mendukung perspektif pemerintah atau “dapat memahami kebijakan pemerintah (aparatur)”. Teks berita (5.50) dalam hal ini menempatkan perspektifnya berseberangan dengan perspektif pro mahasiswa.

Berbeda dengan berita (5.49) dan (5.50) di atas yang lebih menunjukkan rangkaian hubungan sebab-akibat, pada kasus ini peristiwa yang disusun dengan urutan tidak wajar ini ditandai dengan pemakaian kata tugas yang berupa konjungsi temporal tertentu. Walaupun urutan penyajian berita tidak sesuai dengan urutan terjadinya peristiwa dalam dunia nyata, namun dengan adanya konjungsi tersebut hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain menjadi kelihatan wajar. Fenomena ini secara jelas dapat dideskripsikan dari kutipan berita (5.51) berikut ini.

Kutipan (5.51)

Koopsjaya “bersihkan” gedung DPR/MPR dengan damai

Urutan peristiwa:

1. mahasiswa menguasai gedung DPR/MPR sejak hari Selasa (19/5);
2. mahasiswa tinggal di dalamnya guna menuntut reformasi menyeluruh;
3. petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad dan Marinir, yang tergabung dalam Komando Operasi Jaya (Koopsjaya) “membersihkan” gedung DPR/MPR, pada hari Sabtu dari sisa mahasiswa yang bertahan;
4. “pembersihan” dimulai sekitar pukul 23.30 WIB.

Urutan penyajian dalam berita:

³Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad dan Marinir, yang tergabung dalam Komando Operasi Jaya (Koopsjaya) "membersihkan" gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu dari sisa mahasiswa yang bertahan.

¹*sebelumnya*, mahasiswa tersebut sejak Selasa (19/5) "menguasai" gedung tersebut dan ²tinggal di dalamnya guna menuntut reformasi menyeluruh.

⁴"pembersihan" dimulai sekitar pukul 23.30 WIB [...]. (Il.D.13b)

Dari kutipan (5.51) ini terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian urutan peristiwa yang sesungguhnya terjadi dengan urutan penyajiannya di dalam berita. Pada (5.51) terdapat pembalikan urutan peristiwa dari #1 2 3 4# menjadi #3 1 2 4#. Pembalikan urutan peristiwa ini ditandai dengan adanya konjungsi temporal *sebelumnya* pada awal dari peristiwa 1. Penempatan peristiwa nomor 3 mendahului peristiwa nomor 1 dan 2 dan adanya konjungsi temporal *sebelumnya* pada peristiwa 1 menimbulkan "kesan khusus" tertentu.

Berita (5.51) memperlihatkan peristiwa nomor 3 sebagai peristiwa yang paling penting, menonjol, dan mendapat perhatian utama dibandingkan peristiwa-peristiwa lainnya. Peristiwa nomor 3 ini berisi proposisi yang memperlihatkan tindakan aparat dalam mengosongkan gedung DPR/MPR dari para mahasiswa. Dengan pengaturan yang demikian itu, perspektif yang ingin ditonjolkan adalah perspektif pro aparat atau pemerintah.

Berdasarkan kasus urutan tidak wajar dalam (5.49), (5.50) dan (5.51), serta kasus-kasus lain dalam data penahanan (lihat Lampiran 9 dan 10), dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, urutan tidak wajar merupakan salah satu strategi penyajian peristiwa sebagai hasil dari pembolak-balikan urutan peristiwa yang kronologis dengan atau tanpa kata tugas, seperti

konjungsi dan frase preposisional penanda keterangan waktu. Kedua, urutan tidak wajar merupakan strategi untuk menimbulkan suatu "kesan khusus" tertentu. Kesan khusus itu berupa penonjolan yang lebih pada peristiwa-peristiwa tertentu melebihi peristiwa-peristiwa yang lain, yang kemudian dapat melahirkan relasi sebab-akibat di dalam rangkaian peristiwa tersebut. Ketiga, kesan khusus tertentu yang muncul dari urutan tidak wajar membentuk suatu perspektif pemberitaan tertentu. Perspektif pemberitaan itu terbentuk dengan cara memanipulasi penyajian urutan peristiwa yang berbeda dengan urutan dalam dunia nyata.

5.2.4.1.3 Pola Urutan Umum-Khusus

Di dalam berita, wartawan tidak hanya terbatas melaporkan suatu peristiwa. Sering juga dia melaporkan keadaan atau situasi yang melatarbelakangi suatu peristiwa, mengiringi suatu peristiwa, atau bahkan yang muncul sebagai akibat dari peristiwa itu. Untuk melaporkan keadaan atau situasi tersebut, dia mempergunakan kriteria pola urutan wajar yang berbeda dengan pola ketika dia melaporkan suatu peristiwa. Di dalam penelitian ini, ditemukan pola penyajian informasi yang tidak didasarkan pada kronologi waktu, tetapi didasarkan pada prinsip kemudahan persepsi seperti yang dikemukakan oleh Van Dijk (1977). Dalam kaitan dengan kemudahan pembaca mempersepsi informasi-informasi, informasi umum (*general*), keseluruhan (*whole*), besar (*large*) lebih mudah dipahami apabila disajikan lebih dahulu,

baru kemudian menyusul informasi khusus (*particular*), komponen-komponen (*part*), dan hal-hal yang kecil (*small*).

Dalam penelitian ini, pengaturan urutan dalam deskripsi mengenai keadaan atau situasi dengan pola umum-khusus, termasuk di dalamnya keseluruhan-komponen atau besar-kecil ini, dapat dipergunakan untuk membangun perspektif berita. Perspektif berita yang sudah ditandakan pada bagian awal wacana dalam bentuk suatu deskripsi umum diperjelas, diperkuat, dan dilengkapi dengan suatu deskripsi khusus, atau deskripsi mengenai komponen-komponennya, dan hal-hal yang mendetail atau kecil-kecil.

Fenomena pengaturan informasi tentang keadaan atau situasi dengan pola yang dimaksud di atas dapat dideskripsikan melalui kutipan (5.52) berikut ini.

(5.52) Kompleks DPR/MPR, kemarin, menjadi milik mahasiswa. Mahasiswa se Jabotabek, datang dan pergi sepanjang hari. Boulevard, halaman parkir, plaza, dan semua ruang terbuka di gedung wakil rakyat itu dipenuhi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Dari kantor wakil rakyat itulah, tuntutan reformasi datang silih berganti dalam berbagai bentuk. Puluhan poster dipasang di berbagai tempat strategis. Bahkan ratusan mahasiswa memadati tangga hingga atap gedung bundar yang bercat hijau, gedung utama DPR/MPR.

Kalimat pertama dalam kutipan (5.52) yang berbunyi "*Kompleks DPR/MPR, kemarin, menjadi milik mahasiswa*" memperlihatkan perspektif berita yang pro mahasiswa. Dalam kalimat pertama ini, *kompleks DPR/MPR* dan *mahasiswa* merupakan bentuk yang umum (*general*), keseluruhan (*whole*),

dan besar (*large*). Dalam kalimat-kalimat berikutnya, untuk memperkuat perspektif yang dibangun, surat kabar ini mendeskripsikan *kompleks DPR/MPR* dan *mahasiswa* dalam wujud yang khusus (*particular*), dalam wujud komponen-komponennya (*part*), dan hal-hal yang kecil (*small*), seperti yang terdapat dalam Tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5.7 : Pola Umum-Khusus dalam Teks Berita (5.52)

Data	Pola Umum	Pola Khusus
(552)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleks DPR/MPR 	<ul style="list-style-type: none"> • boulevard • halaman parkir • plaza • semua ruang terbuka di gedung wakil rakyat itu • tangga • atap gedung bundar yang bercat hijau • gedung utama DPR/MPR
	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • mahasiswa se-Jabotabek • mahasiswa berbagai perguruan tinggi • ratusan mahasiswa

Kutipan (5.53) dan (5.54) berikut ini memperlihatkan fenomena pemakaian pola umum-khusus seperti pada (5.52). Hanya saja pada kedua kutipan ini, perspektif pemberitaan yang dibangun adalah perspektif pro pemerintah dan perspektif netral.

(5.53) Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tyasno Sudarto meminta kepada para mahasiswa agar tidak menghambur-hamburkan waktu hanya untuk demonstrasi. "Tolong, manfaatkan waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat," pintanya, saat berada di Yogya, Kamis (30/4).

Tyasno memberi contoh, mahasiswa bisa ikut berkarya dengan membuka lahan tidur, menanam tanaman pangan untuk meringankan beban pemerintah dalam rangka persediaan pangan. "Dan, untuk

meringankan beban mereka yang di PHK, bisa ikut padat karya. Itu imbuhan saya," katanya. (II.D.8b).

- (5.54) Sampai tadi malam, situasi kota Medan nyaris seperti kota mati. Warga pun kini banyak yang tak berani keluar rumah. Anak sekolah pun dilaporkan banyak yang tidak berani pergi sekolah. Situasi ini terasa kian mencekam pada malam harinya, karena banyak pemilik ruko yang mematikan penerangan di dalam rumah. (II.D.6d)

Pada paragraf pertama kutipan (5.53), wartawan menyajikan pernyataan yang bersifat umum dari partisipan yang pro pemerintah, yakni Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tyasno Sudarto. Pernyataan yang berisi harapan pada mahasiswa agar menggunakan waktu secara lebih bermanfaat ini didasarkan atas penilaian Pangdam Mayjen Tyasno Sudarto tentang keadaan mahasiswa yang cenderung menghambur-hamburkan waktu. Pernyataan yang bersifat umum itu kemudian diperjelas, diperinci, dan dibuat lebih khusus dalam paragraf kedua. Dalam kerangka konflik antara pemerintah dan mahasiswa, pernyataan Pangdam IV/Diponegoro ini secara jelas berperspektif pro pemerintah.

Pada kutipan (5.54), kalimat pertama yang berbunyi "*Sampai tadi malam, situasi kota Medan nyaris seperti kota mati*", adalah deskripsi keadaan yang bersifat umum. Kalimat pertama ini kemudian diperinci, dibuat lebih khusus, dan diperjelas dalam kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Dalam kerangka konflik antara pemerintah dan mahasiswa, deskripsi yang bersifat umum dan khusus ini tidak menandakan dukungan atau keberpihakan pada

salah satu pihak. Dalam penelitian ini, deskripsi yang seperti ini dikategorikan berperspektif netral.

Apabila disajikan dalam bentuk tabel, maka penyajian deskripsi dari bentuk umum ke bentuk khusus dari kutipan (5.53) dan (5.54) adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.8 : Pola Umum-Khusus dalam Teks Berita
(5.53) dan (5.54)

Data	Pola Umum	Pola Khusus
(5.53)	<ul style="list-style-type: none"> para mahasiswa agar memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> mahasiswa bisa ikut berkarya dengan membuka lahan tidur menanami tanaman pangan untuk meringankan beban pemerintah dalam rangka persediaan pangan dan, untuk meringankan beban mereka yang di PHK, bisa ikut padat karya.
(5.54)	<ul style="list-style-type: none"> situasi kota Medan nyaris seperti kota mati 	<ul style="list-style-type: none"> warga pun kini banyak yang tak berani keluar rumah anak sekolah pun dilaporkan banyak yang tidak berani pergi sekolah situasi ini terasa kian mencekam pada malam harinya, karena banyak pemilik ruko yang mematikan penerangan di dalam rumah.

Berdasarkan kasus urutan penyajian umum-khusus dalam (5.52), (5.53) dan (5.54), serta kasus-kasus lain dalam data penahanan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, urutan umum-khusus merupakan strategi dalam mendeskripsikan suatu keadaan atau situasi dengan cara menyajikan sesuatu fenomena yang terkait dengan peristiwa dalam wujud yang umum dan dilanjutkan dengan rincian, penggambaran lebih lanjut yang spesifik atau khusus.

Kedua, urutan umum-khusus dari deskripsi keadaan atau situasi membentuk suatu perspektif pemberitaan tertentu. Perspektif itu terbentuk ketika wartawan memilih fenomena tertentu, baik yang terkait dengan partisipan mahasiswa maupun pemerintah, sebagai proposisi dalam wujud pernyataan umum yang biasanya diletakkan pada awal kalimat atau awal paragraf. Apabila tidak terkait pada kedua partisipan tersebut, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif netral.

5.2.4.2 Penyajian Informasi Berdasarkan Ukuran Keeksplisitan

Van Dijk (1977) menjelaskan bahwa informasi-informasi yang disajikan di dalam wacana alami tidaklah selalu bersifat eksplisit. Ada informasi-informasi tertentu yang diekspresikan secara tidak langsung atau implisit. Informasi-informasi seperti itu secara formal tidak ada di dalam deretan-deretan kalimat wacana, akan tetapi dia hanya dapat diinterpretasikan dari informasi-informasi lain yang diekspresikan secara eksplisit. Van Dijk (1977) lebih lanjut menyebut fenomena informasi implisit dalam wacana seperti ini sebagai “mata rantai yang hilang” atau *missing links*. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyajian informasi secara implisit dan eksplisit di dalam wacana berita surat kabar dapat digunakan sebagai strategi untuk membangun perspektif pemberitaan.

5.2.4.2.1 Pola Penyajian Informasi secara Implisit

Dalam penelitian ini, informasi implisit dipergunakan sebagai salah satu strategi penahapan untuk membangun perspektif pemberitaan. Wartawan dan surat kabar seringkali menyajikan suatu informasi dalam berita dengan strategi ini untuk kepentingan-kepentingan mereka, seperti untuk menyamarkan, membuat tidak jelas, mereduksi, atau bahkan menghilangkan sesuatu yang dapat memojokkan dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Di dalam penelitian ini ditemukan juga adanya kecenderungan bahwa penyajian informasi secara implisit ini banyak digunakan oleh surat kabar yang pemberitaannya berperspektif pro pemerintah. Kecenderungan pemakaian strategi penyajian implisit ini tampak pada penyajian berita yang berkaitan dengan tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, atau lebih khusus lagi aparat keamanan.

Fenomena informasi implisit sebagai manifestasi perspektif pemberitaan seperti yang dimaksudkan di atas dapat dideskripsikan dan diidentifikasi dari kutipan (5.55) berikut ini.

- (5.55a) Korban jiwa mulai berjatuhan dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. Enam orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk yang dilakukan ratusan mahasiswa di Jalan S. Parman, Grogol, Jakarta Barat, Selasa siang hingga petang hari. Jenazah empat mahasiswa yang tewas di tempat itu semalam dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, sedangkan dua korban luka berat yang dilarikan ke RS Pusat Pertamina Jakarta menghembuskan nafas terakhir setelah beberapa lama dirawat. (II.D.1c)

Dari kutipan (5.55a) ini terlihat bahwa ada 2 informasi yang disajikan secara implisit sehingga menimbulkan ketidakjelasan, yakni informasi yang berkaitan dengan aspek *how* dan *who* dalam berita. Aspek *how* berkaitan dengan cara tewasnya enam mahasiswa Trisakti dan aspek *who* berkaitan dengan siapa pelaku yang menyebabkan tewasnya 6 mahasiswa itu. Teks berita ini hanya menjelaskan bahwa *Enam orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas, Selasa (12/5) petang, setelah bentrok dengan petugas*. Informasi yang diberikan ini sangat minim dan tidak jelas. Tidak ada penjelasan yang lebih rinci dan mencukupi berkaitan dengan peristiwa bentrokan itu dan pelaku yang menyebabkan tewasnya enam mahasiswa.

Berbeda dengan kutipan data (5.55a) di atas yang menyajikan aspek *how* dan *who* secara implisit, kutipan (5.56) berikut ini yang berperspektif pro mahasiswa menyajikan kedua aspek berita itu secara eksplisit. Pada kutipan ini kedua bagian yang dimaksud ditulis dengan huruf miring.

(5.56) Enam mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, *tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan* sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti Grogol, Jakarta Barat, Selasa (12/5). Keenam mahasiswa itu *tertembak* sewaktu berada di dalam kampus *oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol (Grogol fly over)*. Puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan. (II.D.1a)

Kutipan (5.56) melaporkan cara tewasnya enam mahasiswa Trisakti secara lebih jelas dan lugas, yakni *terkena peluru tajam yang ditembakkan* dan

pelakunya, yakni *aparatus keamanan yang berada di Grogol Fly over*. Informasi ini lebih eksplisit daripada yang dilaporkan dalam (5.55a) di atas. Para pembaca berita ini tidak perlu menduga-duga dan menafsirkan kedua aspek di atas dari deretan kalimat lain yang terdapat dalam berita.

Tampak bahwa informasi yang sangat minim dalam (5.55a) sengaja diberikan oleh surat kabar yang bersangkutan untuk mengesankan bahwa peristiwa yang terjadi memang masih belum jelas. Interpretasi ini didukung dengan fakta disajikannya informasi pada bagian lain yang terkesan masih simpang siur. Di satu sisi disajikan informasi dari pihak keluarga dan pihak Universitas Trisakti yang isinya sebagai berikut:

(5.55b) Dari keluarga Hasidin Royani diperoleh informasi *bahwa korban tewas akibat tembakan*. "Besok (hari ini, Red) almarhum akan dibawa ke Bandung untuk dimakamkan," ujarnya.

[...]

Namun Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Adi Andoyo SH mengatakan bahwa penyebab meninggalnya keenam korban adalah *terkena tembakan*.

Namun pada bagian lain, surat kabar yang membuat berita ini, menambahkan informasi yang mementahkan informasi pertama mengenai penyebab tewasnya enam mahasiswa itu, seperti yang terdapat dalam (5.55c) berikut ini.

(5.55c) Belum diperoleh informasi dari pihak keamanan *penyebab tewasnya* para mahasiswa tersebut.

[...]

Kapuspen ABRI Brigjen TNI A. Wahab Mokodongan yang dihubungi *Suara Karya* melalui telepon sekitar pukul 20.30 semalam untuk meminta konfirmasi mengenai bentrokan di Trisakti yang meminta korban jiwa, mengaku bahwa ia memang mendengar kabar adanya korban 4 orang tewas dan 10 luka-luka. Tetapi Wahab Mokodongan

[...] mengatakan, ABRI masih akan meneliti kebenaran informasi yang diterimanya

[...]

Kadispen Polda Metro Jaya Letkol Pol. Edward Aritonang yang dihubungi sekitar pukul 20.00 semalam mengaku belum menerima laporan mengenai korban tewas akibat bentrokan pengunjung rasa di Universitas Trisakti dengan petugas keamanan kemarin petang.

Dan dari versi surat kabar ini, yang sumber beritanya tidak jelas ---dalam teks berita hanya ditulis *diperoleh informasi* ---, peristiwa bentrokan yang menyebabkan tewasnya enam mahasiswa itu dilukiskan sebagai berikut:

- (5.55d) Diperoleh informasi, peristiwa bentrokan mahasiswa dengan petugas keamanan di Universitas Trisakti bermula ketika para mahasiswa menolak permintaan petugas keamanan agar masuk ke areal kampus sekitar pukul 18.00 dari jalan raya. Tiba-tiba muncul *sejumlah orang mengendarai sepeda motor* melepas tembakan. Ada yang melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa dari aksi mereka di Jalan S. Parman. Tapi ada pula yang *melepaskan tembakan ke arah massa mahasiswa di jalanan*.

Dan terakhir, ketidakjelasan informasi mengenai penyebab tewasnya enam mahasiswa dan pelakunya itu makin kentara ketika pada bagian akhir berita disajikan informasi (5.55e) yang bertentangan dengan informasi pada (5.55d) di atas.

- (5.55e) Aparat keamanan yang tidak sabar lagi dengan tindakan persuasif, secara serentak melakukan tindakan pembubaran aksi duduk dan mimbar bebas di Jalan S. Parman. Tak pelak lagi, bentrokan fisik antara ratusan petugas dan ratusan mahasiswa tidak bisa dielakkan. Sebagian mahasiswa lari menyelamatkan diri, sebagian lagi berusaha melawan petugas dengan melemparkan batu. Menghadapi itu *aparatus keamanan melepaskan tembakan gas air mata, peluru karet, dan tembakan peringatan dengan peluru tajam*.

Dari informasi dalam (5.55d) dan (5.55e) terlihat bahwa ada tembakan yang dilepaskan, baik itu peluru karet maupun peluru tajam. Walaupun tidak eksplisit disebutkan bahwa tembakan peluru karet maupun peluru tajam itu sebagai penyebab tewasnya enam mahasiswa. Di samping itu, terlihat pula ada dua pihak yang berpotensi diinterpretasikan sebagai pelaku penembakan itu, yakni *sejumlah orang mengendarai sepeda motor* (5.55d) dan *aparatus keamanan* (5.55e).

Apabila analisis ini diletakkan dalam konteks perspektif surat kabar yang pro pemerintah, maka informasi yang implisit ini disengaja untuk menyamarkan peristiwa penembakan dan pelaku penembakannya. Informasi yang implisit ini tentu menguntungkan pihak aparat keamanan dan pemerintah karena dengan demikian pihak aparat keamanan dan pemerintah belum atau tidak dapat dipersalahkan dalam peristiwa tewasnya enam mahasiswa itu.

Fenomena lain tentang informasi implisit ini dapat juga dicermati dari kutipan (5.57a) berikut ini.

(5.57a) Menurut Pak Harto, keputusan berhenti dari jabatan sebagai Presiden, ia ambil setelah mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional, terutama *aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.* (II.D.14a)

Berdasarkan *knowledge of the world* atau pengetahuan tentang dunia, khususnya tentang gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi di Indonesia, ditemukan adanya informasi yang hilang dari kutipan (5.57a), yakni tuntutan

rakyat melalui mahasiswa yang isinya Presiden Suharto harus mundur dari jabatan presiden. Demikian juga dengan kutipan (5.57b) berikut ini, ada satu "mata rantai" peristiwa yang hilang. Peristiwa ini dapat diketahui oleh pembaca dengan mencermati dan menafsirkan kalimat yang ditulis miring berikut ini.

(5.57b) Oleh karena *keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, "kata Pak Harto. (II.D.14a)

Ada dua Informasi implisit yang terdapat dalam kutipan (5.57b), yakni (1) gedung DPR dikuasai oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi selama beberapa hari mulai tanggal 19 Mei 1999 hingga pernyataan mundur dari Presiden Suharto tanggal 21 Mei 1999, dan (2) penyerahan kekuasaan dari Soeharto kepada B.J. Habibie.

5.2.4.2.2 Pola Penyajian Informasi secara Eksplisit

Penyajian informasi secara eksplisit di dalam berita surat kabar sebenarnya merupakan hal yang wajar dan merupakan keharusan karena salah satu prinsip dari jurnalisme adalah kejelasan informasi. Kejelasan informasi ini dibentuk salah satunya dengan mewujudkan proposisi-proposisi dalam deretan kalimat-kalimat atau klausa-klausa dalam wacana. Artinya adalah suatu kalimat atau klausa hendaknya mengandung satu proposisi. Dengan demikian, semua informasi di dalam wacana dapat ditemukan secara

langsung di dalam deretan kalimat-kalimat wacana berita tanpa harus menginterpretasikannya dari kalimat-kalimat lain.

Di dalam konteks Pemerintahan Orde Baru, menyajikan informasi secara eksplisit terkadang sangat sulit untuk dilakukan apabila informasi tersebut bersifat "sensitif", berupa kritik, memojokkan, dan berpotensi menimbulkan polemik yang luas, serta dipandang membahayakan Pemerintah Orde Baru. Mochtar Lubis (dalam Hutabarat, 1993:453) untuk fenomena seperti ini menyatakan bahwa "pada saat sekarang (*Pemerintahan Orde Baru: penulis*), surat kabar yang mau berfungsi sebagai pers bebas dan bertanggung jawab tidak bisa *survive*. Dan yang *survive* adalah surat kabar yang tidak bebas dan tidak melaksanakan tanggung-jawabnya". Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rosihan Anwar (dalam Hutabarat, 1993:453) sebagai berikut "saya akan bohong pada kalian, bila saya mengatakan ada kemerdekaan pers". Apa yang dinyatakan oleh Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar ini merupakan suatu kesaksian bahwa surat kabar untuk dapat melakukan tugas-tugas jurnalistiknya, yang salah satunya adalah menyajikan informasi secara eksplisit pun, rasanya sangat sulit.

Namun demikian, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada akhir Era Orde Baru, terjadi suatu perkembangan yang sangat berarti dalam penyajian informasi surat kabar Indonesia. Penyajian informasi secara eksplisit berkaitan dengan berita-berita yang sensitif, yang mengkritik pemerintah, yang

mengancam kebijakan pemerintah, banyak dilakukan oleh surat kabar-surat kabar Indonesia. Sebaliknya, penyajian informasi secara eksplisit yang menyoroti segala aktivitas mahasiswa yang bersifat negatif dan merugikan Pemerintah Orde Baru pun juga semakin banyak dilakukan oleh surat kabar-surat kabar tertentu.

Kutipan (5.58)-(5.60) berikut ini menunjukkan betapa berani beberapa surat kabar Indonesia yang berperspektif pro mahasiswa menyajikan informasi secara eksplisit berkaitan dengan berita-berita yang sensitif sifatnya.

(5.58) Melalui *car call* itu pula, tuntutan reformasi hingga desakan agar Pak Harto turun dari jabatannya, bergulir sepanjang hari. "Kami juga menuntut Harmoko segera turun," lanjutnya disambut teriakan setujuuu.(II.D.12a)

(5.59) Suasana tegang ini berlangsung sekitar sepuluh menit. Tiba-tiba terdengar aparat mengongkang senapan dan menembakkan senapan ke udara. Saat itu juga barisan aparat terdepan berhamburan mengejar dan memukuli massa mahasiswa dengan pentungan. Aparat juga sempat memukuli seorang wartawan ABC.

Suasana menjadi kacau balau. Wartawan *Republika*, yang berada di halaman gedung Walikota Jakbar melaporkan aparat berteriak-teriak meminta massa bubar, sambil terus menembakkan senapan ke udara. Namun, massa mahasiswa berlarian, sebagian menyelamatkan diri dengan masuk ke gedung Walikota Jakarta Barat. (II.D.1b)

(5.60) Namun, jalannya evakuasi sempat diwarnai sikap kasar petugas. Sejumlah mahasiswa dan wartawan mengaku dibentak-bentak petugas dan bahkan sejumlah oknum petugas berpakaian preman sempat melakukan kekerasan fisik dengan menendang ataupun memukul mahasiswa. (II.D.13c)

Ketiga kutipan di atas memperlihatkan kelugasan dan kejelasan informasi itu diwujudkan dalam kalimat-kalimat atau klausa-klausa wacana.

Pada (5.58) diperlihatkan bagaimana tuntutan reformasi, yakni mundurnya Presiden Soeharto dan Ketua MPR Harmoko disajikan secara eksplisit dalam dua kalimat. Pada (5.59) dan (5.60) dideskripsikan kronologi peristiwa pembubaran secara kasar aksi mahasiswa oleh petugas keamanan. Rangkaian kalimat yang menggambarkan kekasaran, seperti pemukulan terhadap massa dan wartawan, disajikan secara lengkap membentuk apa yang oleh Van Dijk (1977) disebut sebagai "mata rantai" peristiwa. Dalam kutipan (5.59) terlihat tidak ada "mata rantai yang hilang" atau terimplisitkan dalam kalimat-kalimat lain.

Kutipan (5.61)-(5.63) berikut ini menunjukkan beberapa surat kabar Indonesia yang berperspektif pro pemerintah menyajikan informasi secara eksplisit berkaitan dengan berita-berita yang negatif tentang mahasiswa dan aksinya.

- (5.61) Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol. Dadang, kemarin tewas setelah dipukuli puluhan mahasiswa, usai mereka berunjuk rasa di Kampus Universitas Djuanda, Bogor. Selain Dadang, Pasi Intel Kodim 0621 Bogor, Kapten Ali, juga terluka dan dirawat di rumah sakit.

Menurut Kapolwil Bogor, Kol Pol Abubakar N, peristiwa bermula saat kedua petugas itu mengamankan unjuk rasa di Kampus Unida. Ketika aksi reda, Kapten Ali bersalat Ashar di Masjid Amaliah di dekat Kampus Unida. Sejumlah mahasiswa rupanya memergoki Ali. Usai salat [...] para mahasiswa menggiring Ali ke luar Masjid dan memukulinya beramai-ramai.

Melihat Ali dipukuli, [...] Letda Dadang berusaha membantu Ali. Namun kedatangan Dadang tidak membuat para mahasiswa gentar. Dengan batu dan kayu [...], para mahasiswa menghajar Dadang. (Il.D.11a)

- (5.62) Aparat keamanan akan bertindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dalam menindak aksi unjuk rasa mahasiswa yang akhir-akhir ini cenderung anarkis.

Menko Polkam Feisal Tanjung sebelum Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekuin di Bina Graha, Jakarta, Rabu, mengatakan, aksi mahasiswa akhir-akhir ini mulai melenceng dan tidak tertutup kemungkinan ditunggangi pihak di luar kampus.

"Untuk mengatasinya kita akan tegakkan hukum," kata Feisal. Sejumlah aksi mahasiswa di beberapa tempat, kata Feisal, sudah menjurus pada pelanggaran hukum, seperti menggarong, anarkis, dan melanggar hukum," katanya. (Il.D.9b)

- (5.63) Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto, kemarin, kembali mengimbau mahasiswa agar tidak turun ke jalan. Bila ingin berunjuk rasa, katanya, sebaiknya dilakukan di dalam kampus saja. Sebab, menurutnya, aksi ke jalan selama ini terbukti mengarah ke tindakan anarkis dan destruktif. (Il.D.9c)

Kutipan (5.61)-(5.63) ini memperlihatkan pemakaian kalimat-kalimat yang secara eksplisit memperlihatkan proposisi-proposisi yang bernada negatif terhadap mahasiswa. Proposisi-proposisi tersebut disajikan secara langsung dan tanpa diimplisitkan dalam kalimat-kalimat lain. Pada (5.61), proses peristiwa tewasnya Letda Pol Dadang secara lugas dan lengkap, tanpa direduksi disajikan dalam tiga paragraf. Pada (5.62) dan (5.63), penilaian Menko Polkam Feisal Tanjung dan Menhankam/Pangab Jendral Wiranto terhadap aksi mahasiswa secara eksplisit terlihat dalam deretan kalimat-kalimatnya.

Kutipan (5.64)-(5.65) berikut ini menunjukkan beberapa surat kabar Indonesia yang berperspektif netral dalam pemberitaan menyajikan informasi

secara eksplisit sebagai suatu cara untuk menunjukkan ketidak-berpihakannya dalam konflik antara terhadap pihak mahasiswa dan pemerintah. Ketidakberpihakan itu diwujudkan dengan cara menyajikan informasi di luar yang berkaitan dengan kedua pihak tersebut secara eksplisit seperti pada kutipan (5.64) dan (5.65) berikut ini.

- (5.64) Tim Forensik FKUI dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, sampai Minggu (17/5) telah memeriksa 258 jenazah yang semuanya dalam kondisi hangus. Para korban tewas terpenggang di pusat-pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jakarta sepanjang kerusuhan massa yang terjadi 13-15 Mei lalu. Mereka yang tewas diantaranya penjarah barang di tempat kejadian. (II.D.7b)
- (5.65) Ratusan mayat tak dikenal hari ini dikuburkan secara massal. Pihak RSCM telah memutuskan akan mengubur secara massal jenazah korban kebakaran dalam kerusuhan beberapa hari lalu. Penguburan akan dilakukan di TPU Pondok Rangun, Jakarta Timur, hari ini. (II.D.7c)

Pada kutipan (5.64) dan (5.65) surat kabar tersebut menyajikan informasi tentang *korban kebakaran dalam kerusuhan di Jakarta dalam hubungannya dengan kerja TIM Forensik FKUI dan RSCM* dan bukan berhubungan dengan *aksi mahasiswa* maupun *aparatus keamanan dan pemerintah*. Informasi yang eksplisit ini makin mengukuhkan bahwa berita ini tidak dilaporkan dari perspektif pro mahasiswa atau pro pemerintah.

Kalaupun terpaksa menyajikan informasi mengenai kedua pihak tersebut, maka surat kabar yang bersangkutan akan menyajikan informasi secara eksplisit dan akomodatif pada kedua pihak. Masing-masing pihak

mendapat kesempatan yang sama dan proporsional dalam penyajian informasi secara eksplisit tersebut, seperti kutipan (5.66) berikut ini.

(5.66) Gelombang aksi keprihatinan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, Kamis (7/5), diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan korban berjatuh di kedua pihak. [...] Bentrokan terparah terjadi di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. [...]

Di Solo, bentrokan mahasiswa dan aparat diwarnai dengan hujan batu dan bom molotov yang mengakibatkan korban jatuh di kedua belah pihak. Sebanyak 11 mahasiswa mengalami luka-luka, dua di antaranya dirawat di RS Yarsis [...]. (II.B.8a)

5.3 Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia dalam Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa

Temuan tentang manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada tataran kalimat ke bawah, seperti yang dilaporkan dalam 4.3, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ekspresi bahasa seperti ketransitifan, tindak tutur, pilihan kata, metafora, struktur informasi, nominalisasi, dan modalitas, merupakan cara yang lazim digunakan oleh wartawan dan surat kabar untuk menandakan nilai-nilai keyakinan, gagasan, dan sikapnya berkaitan dengan suatu fenomena sosial politik yang terjadi. Berikut ini ketujuh hal tersebut akan dibahas satu persatu.

5.3.1 Ketransitifan

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketransitifan dengan berbagai macam proses yang dibawakannya, seperti proses material, proses mental,

Data (5.67) dan (5.68) diambil dari dua surat kabar yang berbeda, yang melaporkan peristiwa yang sama, yakni *pengosongan Gedung DPR/MPR dari mahasiswa oleh petugas keamanan*. Pada klausa (5.67), wartawan surat kabar yang bersangkutan memilih frase *telah pergi* sebagai pengisi fungsi predikat. Konsekuensi dari pemilihan frase verbal ini adalah terbentuknya struktur semantis klausa yang berupa {*verba proses perbuatan* + ___ [pelaku]}. Untuk membentuk perspektif pemberitaan yang pro mahasiswa, partisipan pelaku dalam struktur ini diisi oleh frase nominal *ribuan mahasiswa* dan bukan nomina lain seperti *petugas*. Keputusan memilih frase nominal *ribuan mahasiswa* sebagai partisipan pelaku menjadikan frase nominal ini sebagai sumber pemerian peristiwa dalam *pengosongan gedung DPR/MPR*, yang sekaligus menampakkan perspektif pemberitaan, yakni pro mahasiswa.

Agak berbeda dengan klausa (5.67), klausa (5.68) memperlihatkan perspektif pemberitaan yang lain. Wartawan surat kabar yang bersangkutan memilih verba *masuk* sebagai pengisi predikat. Pola struktur semantis klausa yang terbentuk adalah {*verba proses perbuatan* + ___ [pelaku]}. Untuk membentuk perspektif pemberitaan yang pro pemerintah, partisipan pelaku pada struktur semantis ini diisi oleh nomina *petugas*. Nomina *petugas* dalam hal ini menjadi sumber pemerian peristiwa dalam *pengosongan gedung*

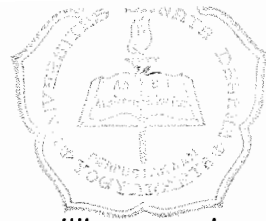
DPR/MPR dan sekaligus menandai perspektif pemberitaan yang pro pemerintah.

Data (5.69) dan (5.70) berikut berbeda dengan dua data di atas dalam hal jumlah partisipan yang dihadirkan oleh verba pengisi predikatnya. Namun begitu, kedua data ini juga memiliki verba proses perbuatan yang berpotensi menampakkan perspektif pemberitaan di dalamnya.

(5.69) Petugas keamanan dengan simpatik *menggiring* mereka ke luar
 pelaku ket. cara proses tujuan ket. lokatif
 perbuatan
gedung tersebut. (III.(g).81)

(5.70). Para mahasiswa sejak Selasa *menguasai* gedung tersebut. III.(g).80
 pelaku ket. waktu proses tujuan
 perbuatan

Pada (5.69) wartawan surat kabar yang bersangkutan memilih verba *menggiring* sebagai pengisi fungsi predikat. Konsekuensi dari pemilihan verba ini adalah terbentuknya struktur semantis {*verba proses perbuatan* + __ [pelaku, tujuan]}. Untuk membentuk perspektif pro pemerintah, partisipan pelaku dalam kalimat diisi oleh nomina *petugas* dan partisipan tujuan diisi oleh pronomina *mereka* (*mahasiswa*). Pemilihan nomina *petugas* sebagai partisipan pelaku dalam (5.69) menjadikan nomina ini sumber pemerian peristiwa dalam *pengosongan gedung DPR/MPR*. Selain itu, keberadaan keterangan yang terkait dengan proses perbuatan, yakni *dengan simpatik*, menimbulkan kesan positif dan penilaian yang baik pada partisipan pelaku.



Berdasarkan fenomena ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan nomina *petugas* sebagai partisipan pelaku dan *mereka* sebagai partisipan tujuan, serta frase *dengan simpatik* sebagai keterangan menampakkan perspektif pro pemerintah dalam kalimat.

Hampir sama dengan data (5.69), data (5.70) juga memiliki dua partisipan yang berperan sebagai pelaku dan tujuan. Pada (5.70), verba proses perbuatan yang dipilih untuk mengisi fungsi predikat adalah verba *menduduki*. Verba proses perbuatan ini menghasilkan pola struktur semantis {*verba proses perbuatan* + ___ [pelaku, tujuan]}. Selanjutnya, untuk membentuk perspektif pemberitaan yang pro mahasiswa, partisipan pelaku diisi dengan frase nominal *para mahasiswa* dan partisipan tujuan diisi dengan frase nominal *gedung tersebut*. Partisipan pelaku *para mahasiswa* dalam struktur semantis ini dijadikan sebagai sumber pemerian peristiwa dalam *pengosongan gedung DPR/MPR* sekaligus sebagai penanda perspektif pemberitaan yang pro mahasiswa.

Berdasarkan analisis data (5.67) - (5.70), serta data-data lain dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan bahwa tiga temuan tentang proses material perbuatan yang dilaporkan dalam 4.3.1.1.1 di muka didukung oleh data. Ketiga temuan itu adalah (1) perspektif pemberitaan pada kalimat atau klausa yang membawakan proses perbuatan dapat dibangun sejak dari pemilihan verba pengisi fungsi predikat, (2) pemilihan (frase) nomina atau pronomina

tertentu sebagai pengisi partisipan pelaku atau tujuan menentukan juga perspektif yang ingin ditampakkan dalam kalimat atau klausa, dan (3) keterangan yang terkait dengan proses perbuatan dapat menimbulkan kesan tertentu yang memperkuat perspektif di dalam kalimat atau klausa.

5.3.1.2 Proses Material Kejadian

Membangun perspektif dalam suatu kalimat atau klausa dengan menggunakan proses material tidak hanya dilakukan dengan cara menampilkan proses perbuatan saja, tapi dapat juga dilakukan dengan menampilkan proses kejadian. Keduanya cara ini memiliki perbedaan dalam penekanan pemerian. Pemerian peristiwa dengan proses perbuatan lebih ditujukan untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh partisipan tertentu pada partisipan yang lain, sedangkan pemerian peristiwa dengan proses kejadian lebih mengungkapkan apa yang terjadi pada partisipan tertentu.

Berikut ini diberikan data (5.71)-(5.74) untuk mendukung temuan penelitian.

- (5.71) Enam mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta *tewas* terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Trisakti. (III.(g).1)
- (5.72) Keenam mahasiswa itu *tertembak* sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan Layang, Grogol (*Grogol Fly Over*). (II.(g).2)
- (5.73) Enam mahasiswa Universitas Trisakti kemarin *meninggal* setelah terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa yang

melakukan unjuk rasa menuntut reformasi yang digelar di kampus mereka. (III.(g).3)

- (5.74) Enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk yang dilakukan ratusan mahasiswa di jalan S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. (III.(g).4).

Data (5.71)-(5.74) diambil dari beberapa surat kabar yang berbeda, yang melaporkan peristiwa yang sama, yakni *tragedi Trisakti*. Pada klausa (5.71), wartawan surat kabar yang bersangkutan memilih verba *tewas* sebagai pengisi fungsi predikat. Konsekuensi dari pemilihan verba ini adalah terbentuknya struktur semantis klausa yang berupa {*verba proses kejadian* + ___ [tujuan]}. Untuk membentuk perspektif pemberitaan yang pro mahasiswa, partisipan tujuan dalam struktur ini diisi oleh frase nominal *enam mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta* dan bukan frase nominal yang lain seperti *petugas keamanan*. Keputusan memilih frase nominal *enam mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta* sebagai partisipan tujuan menjadikan frase nominal ini sumber pemerian peristiwa dalam *tragedi Trisakti*, yang sekaligus menampilkan perspektif pemberitaan.

Perspektif pro mahasiswa pada klausa (5.71) ini semakin diperkuat dengan adanya keterangan yang terkait dengan proses kejadian seperti berikut ini.

- (5.71a) [...] terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Trisakti.

Keterangan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa aparat keamananlah yang menyebabkan tewasnya enam mahasiswa tersebut. Selain itu, aksi keprihatinan mahasiswa diberi kesan tidak melanggar peraturan karena dilakukan *di kampus Trisakti* dan bukan di jalanan. Kedua hal ini makin menguatkan perspektif pro mahasiswa yang tampak dalam kalimat atau klausa.

Seperti halnya data (5.71), data (5.72) pun juga memiliki verba proses kejadian sebagai pengisi fungsi predikat, yakni *tertembak*. Verba yang berkarakteristik seperti ini membentuk struktur semantis klausa yang berupa {*verba proses kejadian* + ___ [tujuan]}. Untuk membangun perspektif pemberitaan yang pro mahasiswa, partisipan tujuan sebagai sumber pemerian peristiwa *tragedi Trisakti* diisi oleh frase nominal *keenam mahasiswa itu*. Penempatan frase nominal ini sebagai partisipan tujuan menjadikan frase nominal ini sebagai penanda perspektif pemberitaan.

Selain itu, perspektif pada klausa (5.72) ini semakin kuat dengan adanya keterangan yang terkait dengan proses kejadian seperti berikut ini.

(5.72a) [...] sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan Layang, Grogol (Grogol Fly Over).

Dari keterangan ini dapat diketahui dua hal berikut, yakni (1) aparat keamanan secara eksplisit disebutkan sebagai penyebab tewasnya enam mahasiswa Trisakti, dan (2) hal yang masih belum jelas dalam keterangan ini berkaitan

dengan aparat yang ada di mana yang menembaknya. Namun demikian, dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa perspektif klausa yang sudah ditampakkan pada partisipan tujuan diperkuat lagi dengan adanya keterangan ini.

Perspektif pemberitaan pada (5.73) dapat diidentifikasi dari pemilihan verba proses kejadian pengisi fungsi predikatnya, partisipan tujuan yang dihadirkannya, serta keterangan yang terkait dengan proses kejadian tersebut. Pengisi verba proses kejadian pada (5.73) adalah verba *meninggal*. Verba yang berkarakteristik seperti ini membentuk struktur semantis kalimat atau klausa, {*verba proses kejadian* + __ [tujuan]}. Pada struktur semantis ini peristiwa yang diperikan melalui verba *meninggal* adalah suatu kejadian yang menimpa atau terjadi pada partisipan tujuan.

Pada (5.73) perspektif kalimat atau klausa yang tampak adalah perspektif pro mahasiswa. Ini terlihat dari dipilihnya frase nominal *enam mahasiswa Trisakti* sebagai pengisi partisipan tujuan. Dengan demikian maka pemerian proses kejadian pada (5.73), yang menjadikan *enam mahasiswa Trisakti* sebagai sumbernya, lebih diarahkan untuk menampakkan kesan bahwa mahasiswa adalah pihak yang menjadi korban.

Perspektif pro mahasiswa pada (5.73) menjadi lebih kuat terbangun dengan adanya keterangan yang terkait dengan proses kejadian seperti berikut ini.

(5.73a) [...] setelah terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menuntut reformasi yang digelar di kampus mereka.

Dari keterangan ini dapat diinferensikan dua hal berikut. Pertama, aparat keamanan implisit disebut sebagai penyebab tewasnya enam mahasiswa. Kedua, mahasiswa diberi kesan yang positif dan tidak melanggar peraturan karena mereka melakukan unjuk rasa *di dalam kampus* dan bukan *di jalananan*. Berdasarkan dua inferensi ini maka perspektif pro mahasiswa dalam (5.73) semakin kuat terlihat.

Pada (5.74) perspektif yang terbentuk pada kalimat atau klausa lebih banyak ditentukan oleh keterangan yang terkait dengan proses kejadian daripada oleh partisipan tujuan. Walaupun struktur semantis yang terbentuk oleh verba *tewas* adalah {*verba proses kejadian* + ___ [tujuan]}, yang seharusnya memungkinkan partisipan tujuan *enam mahasiswa Universitas Trisakti* menjadi sumber pemerian peristiwa dan menandai perspektif pro mahasiswa, namun kehadiran keterangan yang terkait dengan proses kejadian menyebabkan perspektif itu berganti menjadi perspektif pro pemerintah.

Keterangan yang terkait dengan proses kejadian pada (5.74) itu berbunyi:

(5.74a) [...] setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk yang dilakukan ratusan mahasiswa di jalan S. Parman, Grogol, Jakarta Barat.

Dari keterangan ini dapat diinferensikan beberapa hal, yakni (1) ada upaya untuk menyamarkan atau mengimplisitkan pelaku yang menyebabkan tewasnya enam mahasiswa, (2) lebih ditonjolkan bahwa peristiwa *bentrokan* itu sebagai penyebab tewasnya enam mahasiswa, (3) *bentrok* terjadi sebagai konsekuensi petugas menjalankan tugasnya, dan (4) mahasiswa diberi kesan negatif karena melakukan mimbar bebas dan aksi unjuk rasanya di Jalan S. Parman dan bukan di lingkungan kampusnya.

Berdasarkan analisis data (5.71) - (5.74), serta data-data lain dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan bahwa tiga temuan tentang proses material kejadian yang dilaporkan dalam 4.3.1.1.2 di muka didukung oleh data. Ketiga temuan itu adalah (1) perspektif pemberitaan pada kalimat atau klausa yang membawakan proses kejadian dapat dibangun sejak pemilihan verba pengisi fungsi predikat, seperti *tewas*, *tertembak*, *meninggal*, *terluka*, *diduduki*, dan sebagainya, (2) pemilihan (frase) nomina atau pronomina tertentu sebagai pengisi partisipan tujuan atau pelaku menentukan juga perspektif yang ingin ditampakkan dalam kalimat atau klausa, (3) keterangan yang terkait dengan proses kejadian memperlihatkan kesan tertentu yang dapat menentukan perspektif pemberitaan, bahkan dapat mengubah perspektif pemberitaan yang sudah ditandakan pada pemilihan partisipan tujuan.

5.3.1.2 Proses Mental

Pada bagian 4.3.1.2 telah dilaporkan bahwa perspektif pemberitaan dapat pula dimanifestasikan ke dalam ketransitifan dengan menggunakan proses mental yang berupa penglihatan, pemikiran, ataupun perasaan. Berikut ini ketiga proses mental ini dibahas satu persatu.

5.3.1.2.1 Proses Mental Penglihatan (*Perceiving*)

Fenomena manifestasi perspektif pemberitaan di dalam ketransitifan dengan proses mental penglihatan dapat dicermati dari data (5.75)-(5.77) berikut ini.

- (5.75) Alwi *melihat* tidak hanya media cetak, tayangan media elektronik pun banyak yang tidak proporsional atau tidak mencerminkan perspektif yang sesungguhnya. (III.(g).31)
- (5.76) Saya (Dipc Alam) *melihat* mahasiswa sekarang kritis. (III.(g).62)
- (5.77) Pelaksanaan evakuasi korban jiwa langsung *disaksikan* Bupati Tangerang Agus Sudjana. (III.(g).76)

Pada ketiga data ini, verba pengisi fungsi predikat adalah verba-verba yang mengekspresikan proses mental penglihatan, seperti *melihat* (5.75), *melihat* (5.76), dan *disaksikan* (5.76). Ketiga verba ini menghasilkan struktur semantis yang sama, yakni {*verba proses penglihatan* + __ [pengindra, fenomena]}. Namun demikian, ketiga data ini memiliki perspektif kalimat yang

berbeda. Perbedaan itu terjadi karena entitas pengisi partisipan pengindera dan fenomena yang dihasilkannya ketiganya berlainan.

Pada (5.75), pengisi partisipan pengindera adalah *Alwi*. Lengkapnya adalah Prof. Dr. Alwi Dahlan. Entitas yang mengisi partisipan pengindera ini mencerminkan perspektif pro pemerintah karena (1) entitas ini adalah Menteri Penerangan dan Kepala BP 7 dalam Kabinet terakhir Pemerintahan Orde Baru, (2) entitas ini menjadi sumber pemerian fenomena dalam (5.75).

Perspektif yang sudah ditampakkan dalam partisipan pengindera pada (5.75) semakin diperkuat lagi dengan adanya partisipan fenomena yang isinya mencerminkan perspektif pro pemerintah, seperti berikut ini.

(5.75a) [...] tidak hanya media cetak, tayangan media elektronik pun banyak yang tidak proporsional atau tidak mencerminkan perspektif yang sesungguhnya

Latar belakang mengapa Alwi memunculkan fenomena ini adalah banyaknya tayangan media cetak dan elektronik yang mulai berani mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti menunjukkan kelemahan, keburukan, dan kekurangan pemerintah maupun kebijakan-kebijakannya. Berdasarkan latar belakang ini, maka Alwi, selaku Menteri Penerangan dan Kepala BP 7 yang harus menyuarakan pandangan-pandangan pemerintah, melihat bahwa tayangan media cetak dan media elektronik yang banyak berkembang itu sebagai *tayangan yang tidak proporsional atau tidak mencerminkan perspektif yang sesungguhnya*. Apa yang dilihat oleh Alwi dan diekspresikan dalam kalimat

oleh wartawan mencerminkan sikap dan pandangan pemerintah yang tentunya lebih suka apabila tayangan-tayangan tersebut lebih santun dan lebih bertanggung-jawab dalam kerangka pers Pancasila.

Pada (5.76), pengisi partisipan pengindera adalah pronomina *saya*. Pronomina ini mengacu pada orang yang bernama Dipo Alam, yakni mantan Ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977. Pemilihan entitas ini sebagai pengisi partisipan pengindera dan penempatan entitas ini sebagai sumber pemerian peristiwa dalam (5.76) lebih berpotensi memperlihatkan perspektif pro mahasiswa.

Perspektif yang sudah ditampakkan dalam partisipan pengindera pada (5.76) semakin diperkuat lagi dengan adanya partisipan fenomena yang isinya mencerminkan perspektif pro mahasiswa, seperti berikut ini.

(5.76a) [...]mahasiswa sekarang kritis

Fenomena *mahasiswa sekarang kritis* dalam (5.76) hanya mungkin diungkapkan oleh partisipan pengindera yang bersimpati dan mendukung gerakan reformasi mahasiswa. Dalam pemberitaan-pemberitaan lainnya, partisipan pengindera yang tidak bersimpati pada gerakan reformasi mahasiswa akan melihat mahasiswa itu sebagai *anarkis* (III.(a)10), *beringas* (III.(a)18), dan *parlemen jalanan* (III.(a)17).

Pada (5.77), pengisi partisipan pengindera adalah Bupati Tangerang Agus Sudjana. Partisipan pengindera ini berpotensi mencerminkan perspektif

pro pemerintah. Namun demikian, perspektif yang ditampakkan dalam partisipan pengindera ini belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan perspektif keseluruhan kalimat karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, partisipan fenomena *pelaksanaan evakuasi korban jiwa* tidak menguatkan perspektif pada partisipan pengindera. Justru partisipan fenomena ini tidak memperlihatkan kesan pemihakan atau dukungan pada salah satu pihak yang terlibat konflik dalam gerakan aksi reformasi mahasiswa, yakni mahasiswa atau pemerintah. Kedua, partisipan yang menjadi sumber pemerian peristiwa bukan partisipan pengindera melainkan partisipan fenomena karena struktur sintaktis kalimat menggunakan pola pasif. Berdasarkan dua hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa perspektif yang ditandakan pada kalimat (5.77) adalah perspektif netral.

Berdasarkan analisis terhadap data (5.75)-(5.77) dan data-data lain dalam Lampiran 12 dapat disimpulkan bahwa pembentukan perspektif pada kalimat atau klausa yang mengekspresikan proses mental penglihatan terutama ditentukan oleh entitas pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena, serta pemilihan partisipan yang dijadikan sebagai sumber pemerian fenomena.

Apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah aparat pemerintah atau para pendukung pemerintah, baik individu maupun lembaga dan fenomena yang dilihat dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat

positif terhadap pemerintah, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses penglihatan itu adalah perspektif pro pemerintah. Sebaliknya, apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah mahasiswa atau para pendukung aksi mahasiswa, baik individu maupun lembaga, dan fenomena yang dilihat dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap mahasiswa, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses penglihatan adalah perspektif mahasiswa. Selanjutnya, apabila fenomena yang dilihat dan dikemukakan oleh partisipan pengindera, baik itu mahasiswa, pemerintah, atau pihak diluar keduanya itu, memperlihatkan kecenderungan tidak memihak atau mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif netral.

5.3.1.2.2 Proses Mental Pemikiran (*Thinking*)

Fenomena manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam ketransitifan dengan proses mental pemikiran dapat ditemukan dari data (5.78)-(5.80) berikut ini.

(5.78) [...] Presiden Soeharto *menilai* banyak sekali informasi yang kurang tepat. (III.(g).60)

(5.79) Keluarganya *menduga* Andi Arief ditangkap petugas. (III.(g).63)

(5.80) *Diperkirakan* korban jiwa itu berasal dari tiga pasar swalayan yang terbakar tersebut. (III.(g).75)

Pada ketiga data ini, verba pengisi fungsi predikat adalah verba-verba yang mengekspresikan proses mental pemikiran, seperti *menilai* (5.78),

menduga (5.79), dan *diperkirakan* (5.80). Ketiga verba ini berpotensi menghasilkan struktur semantis yang sama, yakni {*verba proses pemikiran* + ___ [pengindra, fenomena]}. Namun demikian, ketiga data ini memiliki perspektif kalimat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu terjadi karena entitas pengisi peran pengindra dan fenomena antara ketiganya berlainan.

Pada (5.78), pengisi partisipan pengindra adalah *Presiden Soeharto*. Entitas pengisi partisipan pengindra ini merupakan representasi dari Pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya, keberadaan partisipan ini dapat dikatakan menandakan perspektif pro pemerintah. Perspektif yang sudah ditampakkan dalam partisipan pengindra ini dikukuhkan lagi dengan adanya partisipan fenomena yang isinya juga mencerminkan perspektif pro pemerintah, seperti berikut ini.

(5.78a) [...] banyak sekali informasi yang tidak tepat

Latar belakang munculnya fenomena yang dikemukakan oleh partisipan pengindra *Presiden Soeharto* adalah berkembangnya informasi di media massa yang berbeda dengan versi pemerintah. Informasi tersebut merupakan informasi alternatif yang mulai banyak beredar di masyarakat melalui media massa. Beredarnya informasi alternatif ini membawa akibat yang negatif bagi Pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya, menyikapi berkembangnya informasi alternatif ini, *Presiden Soeharto* menilai informasi tersebut sebagai

informasi yang tidak tepat. Fenomena yang memperlihatkan penilaian seperti (5.78) ini memperlihatkan perspektif pemerintah.

Pada (5.79), pengisi partisipan pengindera adalah *keluarga Andi Arief*. Entitas pengisi partisipan pengindera ini merupakan representasi yang mungkin dari kelompok pendukung mahasiswa. Oleh karena itu, keberadaan partisipan ini di dalam struktur semantis dapat diidentifikasi menandakan perspektif pro mahasiswa. Identifikasi ini makin mendekati kebenaran dengan adanya partisipan fenomena yang isinya mencerminkan perspektif pro mahasiswa, seperti berikut ini.

(5.79a) [...] Andi Arief ditangkap petugas

Fenomena *penangkapan Andi Arief* dalam pemikiran keluarganya dilakukan oleh petugas. Logikanya adalah pihak-pihak yang selama ini sangat dirugikan oleh aksi-aksi yang dilakukan kelompok Andi Arief adalah pihak pemerintah. Di samping itu, para penangkap Andi Arief menurut keterangan para saksi, seperti yang diberitakan dalam berbagai surat kabar, memiliki ciri-ciri fisik dan cara kerja profesional yang dapat diinferensikan sebagai petugas keamanan. Dugaan seperti yang terdapat dalam (5.79) ini hanya mungkin dilontarkan oleh pihak-pihak yang pro mahasiswa.

Pada (5.80), pengisi partisipan pengindera tidak dihadirkan, walaupun secara struktur sintaktis dimungkinkan. Dari konteks sumber data dapat diketahui bahwa partisipan pengindera yang dimaksudkan adalah wartawan

penulis berita ini. Keberadaan dia sebagai partisipan pengindera berada di luar dua pihak yang sedang mengalami konflik, yakni mahasiswa atau pemerintah. Kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah partisipan ini mengidentifikasi perspektif yang netral. Perspektif yang netral ini makin dikukuhkan dengan adanya partisipan fenomena yang isinya seperti berikut ini.

(5.80a) [...] korban jiwa itu berasal dari tiga pasar swalayan yang terbakar tersebut

Berdasarkan analisis terhadap data (5.78)-(5.80) dan data-data lain dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perspektif pada kalimat atau klausa yang mengekspresikan proses mental pemikiran, terutama ditentukan oleh entitas pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena.

Apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah aparat pemerintah atau para pendukung pemerintah, baik individu maupun lembaga dan fenomena yang dilihat dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap pemerintah, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses pemikiran itu adalah perspektif pro pemerintah. Sebaliknya, apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah mahasiswa atau para pendukung aksi mahasiswa, baik individu maupun lembaga, dan fenomena yang dipikirkan dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap mahasiswa, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses pemikiran adalah perspektif mahasiswa. Selanjutnya, apabila fenomena yang dipikirkan dan dikemukakan

oleh partisipan pengindera, baik itu mahasiswa, pemerintah, atau pihak diluar keduanya itu, memperlihatkan kecenderungan tidak memihak atau mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif netral.

5.3.1.2.3 Proses Mental Perasaan (*Feeling*)

Pada 4.3.1.2.3 ditemukan bahwa membangun perspektif dalam suatu peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan dengan cara menonjolkan proses mental yang dialami oleh wartawan atau partisipan yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan. Proses mental tersebut dapat didasarkan pada apa saja yang dirasakan tentang suatu peristiwa atau aspek-aspek tertentu dari peristiwa. Proses yang seperti ini oleh Halliday (1985) dinamai proses mental perasaan, yang di dalamnya terimplikasikan adanya partisipan pengindera, sebutan untuk partisipan yang mengalami dan merasakan proses itu, dan partisipan fenomena, sebutan untuk sesuatu hal yang memicu terjadinya proses itu.

Apabila di dalam suatu kalimat atau klausa ingin diperikan proses mental perasan terhadap suatu fenomena dari perspektif tertentu, maka wartawan harus memilih dan memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan verba pengisi fungsi predikat dan partisipan-partisipan pendampingnya. Verba pengisi fungsi predikat haruslah diisi oleh verba yang memperlihatkan makna afeksi (*affection*) seperti *menyesal*, *memprihatinkan*,

merisaukan, semakin emosi, menguatirkan, mencintai, menyenangkan, dan sebagainya. Selanjutnya, partisipan-partisipan yang harus dimunculkan untuk mendampingi verba-verba tersebut adalah partisipan pengindera dan fenomena. Pemilihan (frase) nomina atau pronomina tertentu sebagai pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena menentukan perspektif yang terbangun dalam kalimat atau klausa. Berikut ini diberikan ilustrasi dari data (5.81)-(5.83) untuk mendukung temuan ini.

(5.81) Presiden *merisaukan* pemberitaan yang tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah. (III.(g).23).

(5.82) Melihat hal itu, ribuan mahasiswa *semakin emosi*. (III.(g).64)

(5.83) Anggota Komnas HAM Albert Hasibuan *menyesalkan* terjadinya kerusuhan. (III.(g).55)

Pada (5.81), pengisi partisipan pengindera adalah *presiden*. Entitas pengisi partisipan pengindera ini merupakan representasi Pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, keberadaan partisipan ini di dalam struktur semantis, sebagai pengindera dan sumber pemerian fenomena, dapat diidentifikasi menandakan perspektif pro pemerintah. Identifikasi awal ini semakin terdukung dengan adanya partisipan fenomena, seperti berikut ini.

(5.81a) [...] pemberitaan yang tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah

Pada (5.81a), latar belakang munculnya fenomena yang dikemukakan oleh partisipan pengindera *presiden* adalah maraknya pemberitaan di media massa yang cenderung bebas pada bulan Maret-Mei 1998. Pada bulan-bulan tersebut surat kabar-surat kabar mulai berani memberikan gambaran, interpretasi dan pendapat sendiri mengenai kebijakan pemerintah tanpa harus takut berbeda dengan yang diberikan pemerintah. Fenomena pemberitaan seperti ini dari perspektif pemerintah dirasakan berpotensi sebagai suatu ancaman terhadap kehidupan pers Pancasila, khususnya, dan kehidupan Pemerintahan Orde Baru pada umumnya. Oleh karena itu, ketika mengekspresikan perasaannya tentang pemberitaan media massa Indonesia, *presiden* pada (5.81) mengungkapkan *kerisauannya*.

Pada (5.82), pengisi partisipan pengindera adalah *ribuan mahasiswa*. Keberadaan partisipan ini di dalam struktur semantis, sebagai pengindera dan sumber pemerian fenomena, dapat diidentifikasi menandakan perspektif pro mahasiswa. Identifikasi awal ini semakin dikukuhkan dengan adanya partisipan fenomena, seperti berikut ini.

(5.82a) melihat hal itu [...]

Fenomena *melihat hal itu* pada (5.82a) mengacu pada *sikap kasar petugas yang merebut dan membanting pengeras suara milik mahasiswa* (data III.(g).64). Fenomena ini di dalam klausa tersebut dianggap sebagai penyebab

meningkatnya *emosi ribuan mahasiswa*. Pengekspresian proses mental perasaan seperti pada (5.82) ini menonjolkan perspektif pro mahasiswa.

Dan terakhir pada (5.83); pengisi partisipan pengindera adalah *anggota Komnas HAM Albert Hasibuan*. Pengisi partisipan ini adalah entitas yang netral. Entitas yang berada di luar konflik kepentingan antara mahasiswa dan pemerintah. Entitas ini dapat dikatakan sebagai representasi dari perspektif netral. Indikasi awal ini diperkuat dengan isi dari partisipan fenomena yang tidak memperlihatkan kecenderungan pemihakan pada mahasiswa atau pemerintah.

(5.83a) [...] terjadinya kerusuhan

Pada (5.83), fenomena yang memicu pengekspresian proses mental perasaan *menyesalkan* adalah *terjadinya kerusuhan*. Fenomena ini tidak menyoroti orang atau pihak penyebab kerusuhan, pelaku kerusuhan, dan korban kerusuhan, tetapi lebih menyoroti kejadiannya. Dengan menyoroti kejadiannya, maka yang ingin diperlihatkan dalam klausa ini adalah tidak ada pemihakan pada salah satu pihak yang terlibat kerusuhan, baik itu mahasiswa ataupun petugas.

Berdasarkan analisis terhadap data (5.81)-(5.83) dan data-data lain dalam Lampiran 12, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perspektif pada kalimat atau klausa yang mengekspresikan proses mental perasaan, terutama ditentukan oleh entitas pengisi partisipan pengindera dan partisipan fenomena.

Apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah aparat pemerintah atau para pendukung pemerintah, baik individu maupun lembaga dan substansi fenomena yang dirasakan dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap pemerintah, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses mental perasaan itu adalah perspektif pro pemerintah. Sebaliknya, apabila entitas pengisi partisipan pengindera adalah mahasiswa atau para pendukung aksi mahasiswa, baik individu maupun lembaga, dan substansi fenomena yang dirasakan dan dikemukakan itu bersifat mendukung dan bersifat positif terhadap mahasiswa, maka perspektif yang diekspresikan dalam proses mental perasaan adalah perspektif mahasiswa. Selanjutnya, apabila substansi fenomena yang dilihat dan dikemukakan oleh partisipan pengindera, baik itu mahasiswa, pemerintah, atau pihak diluar keduanya itu, memperlihatkan kecenderungan tidak memihak atau mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik, maka perspektif yang terbentuk adalah perspektif netral.

5.3.1.3 Proses Verbal

Pada 4.3.1.3 dalam penelitian ini ditemukan ada dua cara perspektif pemberitaan ditampakkan dalam proses verbal, yakni (1) dengan kutipan langsung, dan (2) dengan kutipan tidak langsung.

5.3.1.3.1 Proses Verbal dengan Kutipan Langsung

Penyajian proses verbal dengan kutipan langsung mengisyaratkan bahwa wartawan menulis apa yang diucapkan oleh sumber berita persis apa adanya tanpa mengubah, menambahi, atau mengurangi. Apa-apa yang diucapkan, dikatakan, atau diujarkan tersebut dituliskan di antara tanda petik dalam suatu klausa tersendiri, yakni klausa sematan, dan kemudian diikuti oleh bentuk asal dari verba, seperti *ujar, kata, jelas, tutur, tandas*, dan diikuti pula oleh partisipan pengucap dalam bentuk klitik-*nya* atau pronomina lain, (frase) nomina, atau nama pengucapnya.

Dalam pemberitaan ditemukan bahwa proses verbal dengan kutipan langsung dapat juga dipergunakan untuk menampakkan perspektif dalam suatu kalimat atau klausa. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa para wartawan ketika melaporkan suatu peristiwa seringkali mengutip secara langsung ucapan seorang tokoh, aparat keamanan, pemerintah, atau siapa saja untuk memperkuat perspektif yang dibangunnya dalam wacana. Data (5.84) dan (5.85) berikut merupakan beberapa dari fenomena yang dimaksud.

- (5.84) "Aksi unjuk rasa mahasiswa seperti di UNS Solo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lain-lain, misalnya, hanya menambah masalah saja," kata Irsyad Sudiro dalam jumpa pers di gedung DPR/MPR. (III.(g).89)
- (5.85) "Apa yang mereka (mahasiswa) lakukan bukan langkah sia-sia, dan akan membuahkan hasil," ujar Dipo ketika dihubungi *Republika*. (III.(g).90)

Kedua data ini merupakan kutipan langsung dari dua surat kabar yang berbeda, yang membicarakan tentang *aksi unjuk rasa mahasiswa*. Keduanya merupakan ekspresi bentuk proses verbal yang menandakan perspektif yang berbeda dalam partisipan ucapan. Berikut ini diberikan analisis proses verbal terhadap dua data ini.

Tabel 5.12: Analisis Proses Verbal dalam Kutipan Langsung

Data	Partisipan Ucapan	Proses Verbal	Partisipan Pengucap	Kondisi
(5.84)	Aksi unjuk rasa mahasiswa seperti di UNS Solo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lain-lain, misalnya, hanya menambah masalah saja	kata	Irsyad Sudiro	dalam jumpa pers di gedung PR/MPR
(5.85)	Apa yang mereka (mahasiswa) lakukan bukan langkah sia-sia dan akan membuahkan hasil	ujar	Dipo Alam	ketika dihubungi <i>Republika</i>

Pada (5.84), perspektif yang ditandakan adalah perspektif pro pemerintah. Ada dua indikator yang memperlihatkan perspektif ini dalam (5.84), yakni partisipan ucapan dan partisipan pengucap. Pertama, partisipan ucapan berisi proposisi yang mengekspresikan sikap negatif terhadap *aksi unjuk rasa mahasiswa*. Sikap negatif itu terlihat dari frase *hanya menambah masalah saja*. Kedua, partisipan pengucap, yakni *Irsyad Sudiro*, adalah Ketua FKP di DPR. FKP di DPR adalah representasi dari Golkar yang merupakan salah satu pendukung Pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, pengisi partisipan pengucap ini secara jelas menandakan perspektif pro pemerintah.

Berbeda dengan (5.84), pada (5.85) perspektif yang ditandakan adalah perspektif pro mahasiswa. Perspektif ini diinterpretasikan dari proposisi dalam partisipan ucapan dan pengisi partisipan-pengucap. Pertama, partisipan ucapan berisi proposisi yang mengekspresikan sikap positif terhadap *aksi unjuk rasa mahasiswa*. Sikap positif itu terlihat dari frase *bukan langkah sia-sia dan akan membuahkan hasil*. Kedua, pengisi partisipan-pengucap adalah *Dipo Alam*, seorang mantan Ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977. Partisipan ini berpotensi menandai perspektif pro mahasiswa.

Fenomena yang terdapat dalam (5.84) dan (5.85) di atas juga dapat ditemukan dalam data (5.86) dan (5.87) berikut ini. Hanya saja perspektif yang ditampakan dalam dua data ini adalah perspektif netral dan perspektif pro pemerintah.

(5.86) "Saya kira yang paling penting adalah harus segera ada klarifikasi mengenai orang hilang, bukan saja dari pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga dari keluarga", ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3). (III.(g).91)

(5.87) "Tidak benar anggapan kalau hilangnya sejumlah orang-orang itu adalah rekayasa ABRI", ujar Kapuspen ABRI. (III.(g).94)

Kedua data ini merupakan kutipan langsung dari dua surat kabar berbeda, yang membicarakan tentang *kasus orang hilang*. Keduanya merupakan ekspresi bentuk proses verbal yang menandakan perspektif yang berbeda dalam partisipan ucapan. Berikut ini diberikan analisis proses verbal terhadap dua data ini.

Tabel 5.13: Analisis Proses Verbal dalam Kutipan Langsung

Data	Partisipan Ucapan	Proses Verbal	Partisipan Pengucap	Kondisi
(5.86)	Saya kira yang paling penting adalah harus segera ada klarifikasi mengenai orang hilang, bukan saja dari pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga dari keluarga	ujar	-nya (Prof. Dr. Muladi anggota Komnas HAM, Menteri Kehakiman)	kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3)
(5.87)	Tidak benar anggapan kalau hilangnya sejumlah orang-orang itu adalah rekayasa ABRI	ujar	Kapuspen ABRI	-

Pada (5.86), perspektif yang ditandakan adalah perspektif netral. Ada dua indikator yang memperlihatkan perspektif di dalam (5.84), yakni partisipan ucapan dan partisipan pengucap. Pertama, partisipan ucapan berisi proposisi yang mengekspresikan sikap netral atau tidak memihak pada dua pihak yang terlibat konflik dalam kasus *orang hilang*, yakni mahasiswa, aktivis, dan keluarganya di satu pihak dan aparat keamanan atau pemerintah di pihak lain. Sikap netral itu terlihat dari bagian proposisi *harus segera ada klarifikasi mengenai orang hilang, bukan saja dari pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga dari keluarga*.

Kedua, partisipan pengucap berwujud klitik *-nya*. Klitika *-nya* di sini mengacu pada tokoh yang bernama Prof. Dr. Muladi, SH., seorang Guru Besar dari Universitas Diponegoro Semarang, anggota Komnas HAM, dan terakhir menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Partisipan ini walaupun merupakan bagian dari Pemerintahan Orde Baru, tetapi dia juga dekat dengan mahasiswa

sehingga pernyataan-pernyataannya pada kasus-kasus lain tentang aksi mahasiswa cenderung bersifat netral. Dalam kasus *orang hilang* ini, dia juga memperlihatkan pandangan-pandangan yang netral dan tidak memperlihatkan kesan mendukung pihak pemerintah maupun pihak mahasiswa.

Pada (5.87), perspektif yang ditandakan adalah perspektif pro pemerintah. Penafsiran ini didasarkan pada indikator partisipan ucapan dan partisipan pengucap. Pertama, partisipan ucapan berisi proposisi yang mengekspresikan bantahan pihak ABRI atas keterlibatannya dalam kasus *orang hilang*. Bantahan itu terlihat dalam pilihan frase *tidak benar anggapan [...]*. Kedua, partisipan pengucap adalah *Kapuspen ABRI*. Dalam hal ini *Kapuspen ABRI* adalah representasi dari pihak pro pemerintah.

5.3.1.3.2 Proses Verbal dengan Kutipan Tidak Langsung

Penyajian proses verbal dengan kutipan tidak langsung mengisyaratkan bahwa wartawan menulis proposisi atau apa yang diucapkan oleh sumber berita dengan kata-katanya sendiri. Oleh karena itu, ekspresi proses verbalnya berbeda dengan kutipan langsung. Dalam pelaporan suatu berita, ditemukan bahwa proses verbal dengan kutipan tidak langsung dapat dipergunakan untuk menampakkan perspektif dalam suatu kalimat atau klausa. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa para wartawan ketika melaporkan suatu peristiwa seringkali mengutip secara tidak langsung ucapan seorang tokoh, aparat keamanan, pemerintah, atau pihak mana saja yang terkait untuk memperkuat



perspektif yang dibangunnya dalam wacana. Data-data berikut merupakan ilustrasi dari fenomena yang dimaksud.

- (5.88) Aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia, menurut mantan Ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977, merupakan langkah efektif mendorong perubahan. (III.(g).32)
- (5.89) Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto mengatakan, keinginan mahasiswa untuk tetap turun ke jalan merupakan suatu ancaman terhadap pemerintah. (III.(g).34)

Kedua data ini merupakan kutipan tidak langsung dari dua surat kabar berbeda, yang memhicarakan tentang *aksi unjuk rasa mahasiswa*. Keduanya memperlihatkan ekspresi bentuk proses verbal yang menandakan perspektif berlainan dalam partisipan ucapan. Berikut ini diberikan analisis proses verbal terhadap dua data ini.

Tabel 5.14.: Analisis Proses Verbal dalam Kutipan tidak Langsung

Data	Partisipan Pengucap	Proses Verbal	Partisipan Ucapan
(5.88)	mantan Ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977	menurut	aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia merupakan langkah efektif mendorong perubahan
(5.89)	Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto	mengatakan	keinginan mahasiswa untuk tetap turun ke jalan merupakan suatu ancaman terhadap pemerintah

Pada (5.88), perspektif yang ditandakan adalah perspektif pro mahasiswa. Perspektif ini secara jelas dapat diinterpretasikan dari dua partisipan dalam (5.88), yakni partisipan ucapan dan partisipan pengucap Pertama, partisipan ucapan berisi proposisi yang mengekspresikan pandangan

positif terhadap *aksi unjuk rasa mahasiswa*. Pandangan positif itu terlihat dalam frase *merupakan langkah efektif mendorong perubahan*, yang terdapat dalam klausa sematan. Kedua, partisipan pengucap adalah *mantan Ketua Dewan Mahasiswa 1975-1977*. Partisipan ini berotensi menyuarakan pandangan-pandangan yang cenderung pro mahasiswa.

Pada (5.89), perspektif yang ditandakan adalah perspektif pro pemerintah. Ada dua indikator yang memperlihatkan perspektif ini dalam (5.89), yakni partisipan ucapan dan partisipan pengucap. Pertama, partisipan ucapan berisi proposisi yang mengekspresikan inferensi negatif terhadap *aksi unjuk rasa mahasiswa*. Inferensi negatif ini terlihat dalam frase *merupakan suatu ancaman terhadap pemerintah* yang terdapat dalam klausa sematan. Kedua, partisipan pengucap adalah *Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto*. Partisipan ini secara jelas merupakan representasi dari Pemerintahan Orde Baru.

Fenomena yang terdapat dalam (5.88) dan (5.89) di atas juga dapat ditemukan dalam data (5.90) dan (5.91) berikut ini. Hanya saja perspektif yang ditampakkan dalam dua data ini adalah perspektif netral dan perspektif pro mahasiswa.

(5.90) Menteri Kehakiman Muladi *menegaskan*, persoalan orang "hilang" yang diramaikan masyarakat saat ini harus diklarifikasikan.
(III.(g).35)

(5.91) Ketua *Crisis Centre* Universitas Trisakti, Adi Andoyo Soecipto, S.H. dalam jumpa pers, Selasa malam, *mengemukakan*, Universitas Trisakti akan mengajukan protes keras kepada pihak berwajib khususnya Kapolri dan Menhankam. (III.(g).82)

Pada (5.90), perspektif yang ditandakan adalah perspektif netral. Perspektif ini secara jelas dapat diinterpretasikan dari dua partisipan dalam (5.90), yakni partisipan ucapan dan partisipan pengucap. Pertama, partisipan ucapan berisi proposisi yang mengekspresikan usulan atau ajakan yang simpatik, tidak memihak pada salah satu pihak yang terlibat konflik dalam kasus *hilangnya sejumlah aktivis mahasiswa*, dan tidak mendeskreditkan pihak-pihak tertentu. Usulan dan ajakan simpatik ini terlihat dalam frase *harus diklarifikasikan*. Berdasarkan konteks dalam wacana, frase *harus diklarifikasikan* mengandung dua makna, yakni semua pihak harus mencari orang hilang tersebut, baik aparat maupun keluarga, dan semua pihak harus mengembangkan praduga tak bersalah. Kedua, partisipan pengucap adalah Menkeh Muladi. Menteri ini walaupun merupakan bagian dari Pemerintahan Orde Baru akan tetapi pandangan-pandangan yang ditampakkannya selama ini dalam teks-teks berita lainnya memperlihatkan sikap yang netral. Ini dapat terjadi mengingat menteri ini sebelumnya adalah tokoh akademisi yang terkenal dekat dengan mahasiswa dan pernah menjadi anggota Komnas HAM.

Pada (5.91), perspektif yang ditandakan adalah perspektif pro mahasiswa. Ada dua indikator yang memperlihatkan perspektif ini dalam

(5.91), yakni partisipan ucapan dan partisipan pengucap. Pertama, partisipan ucapan berisi proposisi yang berupa ancaman terhadap pemerintah dalam kasus *Tragedi Trisakti*. Ancaman yang dimaksud ini terlihat dalam frase *akan mengajukan protes keras kepada pihak berwajib*. Kedua, partisipan pengucap dalam (5.91) adalah *Ketua Crisis Centre Universitas Trisakti, Adi Andojo Soecipto, S.H.* Partisipan ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang selalu mendampingi mahasiswa Trisakti dalam setiap unjuk rasa. Partisipan ini merupakan salah satu representasi dari para pendukung pro mahasiswa.

5.3.2 Tindak Tutur

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa kalimat-kalimat tertentu di dalam teks berita selain berisi proposisi atau informasi yang mengisyaratkan tindak lokusi, juga mengisyaratkan tindak ilokusi dan tindak perlokusi. Tindak lokusi di dalam kalimat kadang sudah memperlihatkan perspektif pemberitaan, namun kadang ada pula yang belum memperlihatkan perspektif pemberitaan. Pada kasus seperti ini, perspektif pemberitaan baru dapat diungkap dari tindak ilokusi dan tindak perlokusi yang secara sengaja atau pun tidak sengaja dikreasikan oleh wartawannya.

Pada data-data berikut ini, tindak lokusi di dalam suatu kalimat sudah secara jelas memperlihatkan perspektif pemberitaan.

- (5.92) Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air sudah semakin beringas. (III.(f).6)
- (5.93) Aksi unjuk rasa mahasiswa seperti di UNS Solo, Universitas Muha-madiyah Yogyakarta dan lain-lain, misalnya, hanya menambah masalah saja. (III.(f).9)
- (5.94) Aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia, menurut mantan Ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977, merupakan langkah efektif untuk mendorong perubahan. (III.(f).10).
- (5.95) Apa yang mereka (mahasiswa) lakukan bukan langkah yang sia-sia, dan akan membuahkan hasil. (III.(f).23)

Pada kalimat (5.92) dan (5.93), tindak lokusi berupa proposisi yang menyatakan informasi tentang *keberingasan mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lain* dan *aksi unjuk rasa yang menambah masalah saja* sudah memperlihatkan perspektif pemberitaan, yakni pro pemerintah. Sementara itu, pada (5.94) dan (5.95), tindak lokusi berupa proposisi yang menyatakan *pendapat mantan Ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977* dan *aksi mahasiswa bukan langkah sia-sia* juga sudah memperlihatkan perspektif pemberitaan, yakni pro mahasiswa. Dengan demikian, pada keempat data ini hanya dengan mengandalkan analisis tindak lokusi dari kalimat sudah dapat diungkapkan perspektif pemberitaannya.

Namun pada data (5.96) berikut ini, perspektif pemberitaan baru dapat diungkapkan secara jelas setelah diketahui tindak ilokusi dan tindak perlokusi berdasarkan konteks tuturan yang ada.

(5.96) Pemberitaan pers mendapat sorotan Presiden Soeharto.
(III.(f).16.)

Pada data (5.96) ini, perspektif pemberitaan tidak sejelas data (5.92) hingga (5.95). Pada kasus ini diperlukan analisis tindak lokusi dan tindak perlokusi dalam data-data tersebut dengan mengandalkan konteks tuturan yang ada dalam teks berita maupun konteks teks berita lainnya. Dengan cara ini dapat diketahui dengan jelas perspektif berita yang dibangun oleh wartawan dan surat kabarnya.

Pada data (5.96), konteks tuturannya adalah sebagai berikut. Tuturan itu diucapkan oleh Menpen Alwi Dahlan setelah menghadap Presiden Soeharto. Sebelumnya, Presiden Soeharto dan Menpen Alwi Dahlan membahas situasi akhir pers Indonesia pada pertengahan bulan April 1998. Kesimpulan dari pembahasan itu adalah adanya kecenderungan pers Indonesia (*baca media massa*) berani bersikap keras dan kritis terhadap segala kebijakan Pemerintahan Orde Baru. Pers Indonesia bahkan berani mengungkap kegagalan, kelemahan, dan penyimpangan-penyimpangan dalam bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah. Kecenderungan pemberitaan pers yang seperti itu dinilai oleh presiden dapat merugikan pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis yang berkepanjangan. Berdasarkan konteks tutur yang seperti ini, Presiden Soeharto, seperti yang diungkapkan Menpen Alwi Dahlan, menaruh perhatian yang serius terhadap pemberitaan pers Indonesia.

Dengan konteks tutur yang seperti itu, tindak ilokusi yang dapat ditafsirkan adalah Presiden Soeharto memberikan peringatan dan kritikan terhadap pers Indonesia. Presiden Soeharto mengungkapkan peringatan dan kritikan ini dalam bentuk tindak tutur tidak langsung tidak literal. Dikatakan tindak tutur tidak langsung karena peringatan dan kritikan itu diungkapkan dalam proposisi yang tidak secara eksplisit berisi peringatan dan kritikan, namun dapat ditafsirkan dari ungkapan *mendapat sorotan Presiden Soeharto*. Dalam konteks budaya Jawa, yang melatarbelakangi pola pemikiran Presiden Soeharto, ungkapan *mendapat sorotan* menunjukkan sikap Presiden Soeharto yang menganggap kecenderungan pers Indonesia sebagai masalah serius yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Menpen Alwi Dahlan dan jajaran Departemen Penerangan.

Pernyataan (5.96) dikatakan sebagai tindak tutur tidak literal karena tindak tutur yang dimaksudkan tidak sama persis dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Pernyataan (5.96) yang berupa *pemberitaan pers mendapat sorotan Presiden Soeharto* tidak sama dengan maksud yang berupa *pemberitaan pers mendapat peringatan dan kritikan Presiden Soeharto*.

Berdasarkan makna tindak ilokusi ini, maka tindak perlokusi yang ditandakan untuk dipahami para pembaca, terutama mereka dari kalangan pers Indonesia adalah agar mereka menghentikan pemberitaan yang berisi kritikan dan pemberitaan yang hanya memuat kegagalan, kelemahan, dan

penyimpangan-penyimpangan pemerintah. Mereka diharapkan juga menyajikan pemberitaan yang berimbang.

Dari analisis terhadap tindak ilokusi dan tindak perlokusi pada data (5.96) di atas dapat ditemukan bahwa perspektif pemberitaan yang ditandakan adalah perspektif pemberitaan pro pemerintah. Tindak ilokusi dan tindak perlokusi dalam kasus ini, baik secara sengaja ataupun tidak, dikreasikan untuk menampakkan perspektif pemberitaan.

Kasus yang sama dengan data (5.96) ini dapat ditemukan juga pada data berikut ini.

(5.97) Menteri Kehakiman Muladi menegaskan, persoalan orang "hilang" yang diramalkan masyarakat saat ini harus segera diklarifikasikan. (III.(f).17.)

Pada data (5.97) ini, perspektif pemberitaan tidak begitu jelas seperti halnya data (5.96). Perspektif pemberitaan ini perlu diungkap dengan cara menemukan tindak ilokusi dan tindak perlokusi. Pernyataan pada data (5.97) berupa proposisi tentang *perlunya klarifikasi orang "hilang" menurut Menkeh Muladi* perlu diinterpretasikan lebih lanjut konteks tuturan yang menyertainya dalam teks berita maupun teks-teks lainnya untuk menemukan tindak ilokusi dan tindak perlokusinya.

Pada data (5.97), konteks tuturannya adalah sebagai berikut. Tuturan itu diucapkan oleh Muladi, seorang Guru Besar dari UNDIP, mantan anggota Komnas HAM, dan terakhir pada waktu itu menjabat sebagai Menteri

Kehakiman. Latar belakang yang mendorong Muladi mengungkapkan pernyataan (5.97) adalah pada awal bulan April 1998 berkembang isu di media massa tentang penculikan para aktivis mahasiswa oleh aparat keamanan. Kemudian terjadi suasana saling curiga dan saling tuduh antara mahasiswa, keluarga aktivis yang hilang, LSM, dan aparat keamanan. Dalam konteks tutur yang seperti itu, Muladi mengungkapkan pernyataan (5.97).

Dengan konteks tutur yang seperti itu, tindak ilokusi yang dapat ditafsirkan adalah Menkeh Muladi meminta semua pihak di atas untuk mencari dan mengecek keberadaan aktivis yang dikabarkan hilang itu. Menkeh Muladi mengungkapkan permintaan itu dalam bentuk tindak tutur tidak langsung literal. Dikatakan tindak tutur tidak langsung karena permintaan itu diungkapkan dalam proposisi yang tidak secara eksplisit berisi permintaan, namun berisi penegasan. Selain itu, tindak tutur ini dikatakan literal karena makna kata-kata yang menyusun (5.97) sama dengan maksud yang dikandungnya.

Berdasarkan makna tindak ilokusi ini, maka tindak perlokusi yang ditandakan untuk dipahami para pembaca, terutama mereka yang terlibat konflik, yakni mahasiswa, keluarga aktivis, LSM, dan aparat keamanan, adalah hentikan saling curiga dan saling tuduh dalam kaitannya dengan orang hilang ini. Mereka diminta untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi.

Dari analisis terhadap tindak ilokusi dan tindak perlokusi pada data (5.97) di atas dapat ditemukan bahwa perspektif pemberitaan yang ditandakan adalah perspektif netral. Tindak ilokusi dan tindak perlokusi dalam kasus ini, baik secara sengaja ataupun tidak, dikreasikan untuk menampakkan perspektif pemberitaan yang netral ini.

Hasil analisis tindak tutur pada data (5.92) sampai (5.97), serta data-data lain dalam Lampiran 13, menunjukkan beberapa hal berikut ini. Pertama, perspektif pemberitaan pada kalimat-kalimat tertentu sudah dapat dikenali hanya dengan mengandalkan pada analisis tindak lokusi tanpa harus melakukan analisis tindak ilokusi dan perlokusi. Pada kasus ini analisis tanpa memperhitungkan konteks tuturan pun sudah mencukupi untuk menemukan perspektif pemberitaan yang ditandakan. Kedua, pada beberapa kalimat lain, perspektif pemberitaan baru dapat diungkapkan apabila dianalisis tindak ilokusi dan tindak perlokusinya dengan mendasarkan diri pada konteks tuturan teks berita tersebut dan teks-teks lain. Pada kasus ini, analisis tindak ilokusi dan tindak perlokusi menjadi cara penting untuk menemukan perspektif pemberitaan yang terkadang hanya kelihatan samar-samar atau meragukan.

5.3.3 Pilihan Kata

Pada bagian 4.3.3 di muka ditemukan bahwa pilihan kata dipergunakan oleh surat kabar-surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru untuk membangun perspektif pemberitaan. Pemilihan kata tertentu yang memiliki fitur

nilai eksperimental, nilai relasional, atau nilai ekspresif merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perspektif yang dibangun oleh masing-masing surat kabar.

5.3.3.1 Pilihan Kata Berfitur Nilai Eksperimental

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh para wartawan tentang gerakan reformasi mahasiswa dan tentang Pemerintahan Orde Baru direpresentasikan dalam pilihan-pilihan kata mereka. Sebagai ilustrasi berikut ini diberikan data (5.98) hingga (5.103) yang membicarakan tentang *aksi mahasiswa*.

- (5.98) Aksi mahasiswa mengarah pada *parlemen jalanan*. (III.(a).17)
- (5.99) Kol. Pol Drs. Abubakar dan juga keluarga korban menyesalkan, bahwa *aksi kebrutalan* para mahasiswa tersebut dilakukan di halaman masjid. (III.(a).79)
- (5.100) *Aksi unjuk rasa* para mahasiswa di berbagai kota seperti Medan, Riau, Semarang, Jambi, Yogyakarta, Ujungpandang, Bogor dan Jakarta terus berlanjut, Sabtu. (III.(a).75)
- (5.101) Di Surabaya, mahasiswa yang tergabung dalam arek-arek pro reformasi (ARP) menggelar *aksi keprihatinan* menuntut pencabutan keputusan kenaikan harga BBM [...]. (III.(a).77)
- (5.102) Di Bandung *demo* mahasiswa juga terjadi di kampus IAIN Sunan Gunung Jati. (III.(a).78)
- (5.103) *Aksi damai* di Universitas Trisakti dan Tarumanegara, di daerah Grogol, Jakarta Barat, kemarin diikuti sekitar 10 ribu orang. (III.(a).80).

Perbedaan pengalaman para wartawan ataupun surat kabarnya tentang *aksi mahasiswa* secara jelas diwujudkan dalam enam pilihan kata yang berbeda, yakni *parlemen jalanan* (5.98), *aksi kebrutalan* (5.99), *aksi unjuk rasa* (5.100), *aksi keprihatinan* (5.101), *demo* (5.102), dan *aksi damai* (5.103). Perbedaan pengalaman ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya latar belakang pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki institusi surat kabar, seperti visi, misi, maupun kepentingan yang diperjuangkannya, serta adanya tekanan-tekanan dari pihak eksternal terhadap surat kabar seperti yang lazim terjadi pada era Orde Baru.

Pada kalimat (5.98) *aksi mahasiswa* diidentikkan dengan *parlemen jalanan*. Pilihan kata ini memperlihatkan suatu fitur nilai eksperiensial berupa pandangan, pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh surat kabar bahwa *aksi mahasiswa* merupakan tindakan legislasi yang inkonstitusional. *Aksi mahasiswa turun ke jalan* ini dianggap sebagai hal yang tidak demokratis dan sebagai bentuk ketiadaan penghargaan terhadap lembaga legislatif, yakni DPR.

Hampir mirip dengan (5.98), pada data (5.99), *aksi mahasiswa* diidentikkan dengan *aksi kebrutalan*. Pilihan kata ini memperlihatkan suatu fitur nilai eksperiensial bahwa *aksi mahasiswa* penuh dengan kekerasan, tidak berdasarkan aturan, dan bersifat brutal. Pilihan kata (5.98) dan (5.99) di atas

cenderung bersifat *unfavorable*. Kedua surat kabar ini memiliki pengalaman negatif dan tidak menyenangkan dengan aksi-aksi mahasiswa.

Pada kalimat (5.100), (5.101), dan (5.102), aksi mahasiswa diidentifikasi sebagai *aksi unjuk rasa*, *aksi keprihatinan*, dan *demo*. Ketiga pilihan kata ini memperlihatkan suatu fitur nilai eksperiensial berupa pandangan, pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh surat kabar bahwa aksi mahasiswa dalam bentuk unjuk rasa merupakan hal yang biasa dalam alam demokrasi. Aksi unjuk rasa merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi.

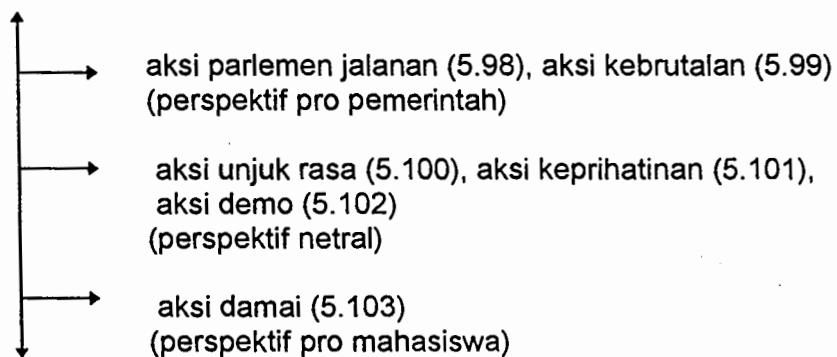
Dan terakhir pada (5.103), aksi mahasiswa diidentifikasi dengan *aksi damai*. Pilihan kata ini memperlihatkan suatu fitur nilai eksperiensial berupa pandangan, pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh surat kabar bahwa aksi mahasiswa selalu berjalan tertib, tidak menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan sebagainya, karena aksi mahasiswa hanya merupakan gerakan moral.

Dari uraian-uraian ini dapat diidentifikasi beberapa hal berikut. Pada kalimat (5.98) dan (5.99) perspektif yang ditandakan melalui kata *parlemen jalanan* dan *aksi kebrutalan* adalah perspektif pro pemerintah. Pada kalimat (5.100), (5.101), dan (5.102), perspektif yang ditampakkan melalui kata *aksi unjuk rasa*, *aksi keprihatinan*, dan *demo* adalah perspektif netral. Pada kalimat (5.103) perspektif yang ditampakkan melalui kata *aksi damai* adalah perspektif pro mahasiswa. Hasil analisis dari data (5.98)-(5.103) ini dan data-data lain

memperlihatkan perbedaan pengalaman wartawan atau surat kabarnya terhadap dunia alam dan dunia sosial di sekitarnya membawa implikasi pada perbedaan pilihan kata yang dipilihnya. Selanjutnya, perbedaan pilihan kata tersebut membawa dampak pada perbedaan perspektif pemberitaan yang ditandakan di dalam surat kabarnya.

Apabila dibuat dalam suatu skema rentangan, maka relasi makna yang tampak dari keenam kata dalam (5.98)-(5.103) adalah relasi oposisional gradual. Keenam kata ini menunjukkan makna yang memiliki relasi yang wujud logisnya sangat berbeda atau bahkan bertentangan. Skema 5.1 berikut memperjelas pernyataan ini.

Skema 5.1.: Relasi Antonimi atau Oposisional
Pilihan-Pilihan Kata Pembeda Perspektif
Pemberitaan



Berikut ini diberikan data lain, yakni (5.104)-(5.107), untuk memperjelas fenomena perspektif pemberitaan melalui pilihan kata yang berfitur nilai eksperiental.

- (5.104) ABRI membantah pemberitaan yang menyebutkan hilangnya sejumlah orang akhir-akhir ini karena *diamankan* pihak keamanan dan rekayasa ABRI. (III.(a).56)
- (5.105) Isu yang beredar mereka *dibawa* sekelompok orang tak dikenal. (III.(a). 25)
- (5.106) Kapuspen ABRI membantah bahwa mereka *ditangkap* aparat keamanan. (III.(a).26)
- (5.107) [...] lima hari sebelum Andi *diculik*, banyak orang tak dikenal yang mengintai terus rumah orang tua Andi. (III.(a).54)

Keempat data ini membicarakan tentang *penyebab hilangnya sejumlah aktivis mahasiswa*. Penyebab hilangnya sejumlah aktivis mahasiswa diwujudkan dengan pilihan kata *diamankan* pada (5.104), *dibawa* pada (5.105), *ditangkap* pada (5.106), dan *diculik* pada (5.107). Keempat kata ini memiliki makna kognitif yang sama, yakni *diambil dengan paksa*. Namun begitu, keempat kata yang masing-masing memiliki makna konotasi berbeda ini dimunculkan oleh beberapa surat kabar karena masing-masing memiliki latar belakang pandangan, pengetahuan, dan keyakinan yang berbeda pula.

Pada (5.104), pilihan kata *diamankan* menampakkan pandangan dan keyakinan surat kabar yang dilandasi motif untuk melindungi dan menyelamatkan sejumlah aktivis mahasiswa dari tindakan main hakim sendiri dengan cara menyembunyikan mereka. Pada (5.105), pilihan kata *dibawa* memperlihatkan pandangan dan keyakinan surat kabar bahwa hilangnya sejumlah aktivis itu dilandasi motif yang bersifat umum, yakni diajak pergi

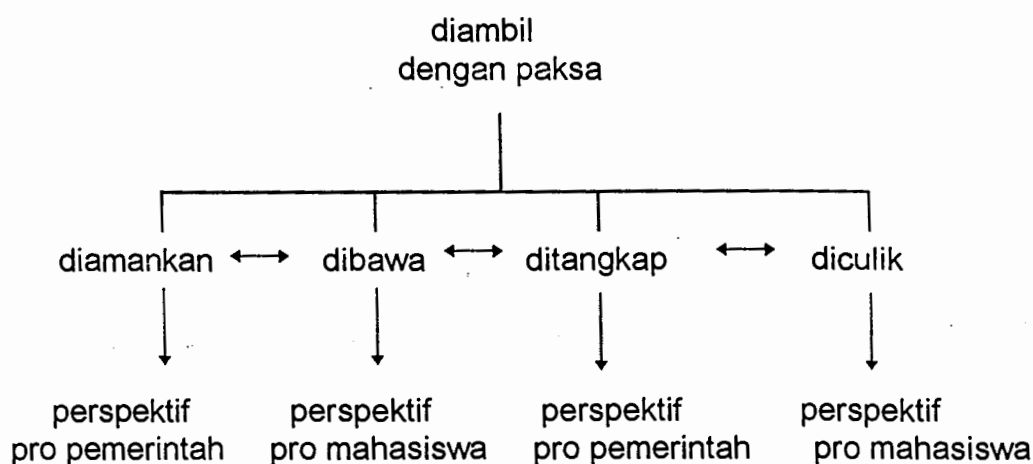
dengan paksa, sedangkan motif yang lebih spesifik, seperti untuk dilindungi, diselamatkan, atau dibunuh, dan sebagainya masih belum jelas. Pada (5.106), pilihan kata *ditangkap* memperlihatkan pandangan dan keyakinan surat kabar yang dilandasi motif adanya tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah aktivis mahasiswa. Dan terakhir pada (5.107), pilihan kata *diculik* memperlihatkan pandangan dan keyakinan surat kabar tentang adanya upaya pembunuhan dan penyanderaan yang dilandasi motif politik.

Dari uraian-uraian ini dapat diidentifikasi bahwa pilihan kata *diamankan* pada kalimat (5.104), *dibawa* pada kalimat (5.105), *ditangkap* pada kalimat (5.106), dan *diculik* pada (5.107), memiliki fitur nilai eksperiental. Kata *diamankan* dan *ditangkap* biasa dipakai oleh Pemerintah Orde Baru untuk merujuk pada *proses pengambilan dengan paksa terhadap seseorang* dengan motif yang hampir sama. Kedua kata ini mengkodekan perspektif pemberitaan yang pro pemerintah. Dan terakhir, pada kalimat (5.105) dan (5.107) perspektif yang ditampakkan melalui kata *dibawa* dan *diculik* adalah perspektif pro mahasiswa. Di dalam kata ini tersiratkan adanya motif politik yang melatarbelakanginya yang ditujukan pada mahasiswa.

Uraian-uraian di atas memperlihatkan suatu fenomena bahwa pilihan kata yang bersinonim pun dapat menyebabkan perbedaan perspektif pemberitaan. Selanjutnya, perbedaan perspektif itu mencerminkan pula adanya perbedaan pandangan, pengetahuan, dan keyakinan masing-masing surat

kabar. Apabila dibuat dalam suatu skema, maka relasi makna yang muncul dari keempat kata dalam (5.104)-(5.107) adalah relasi sinonimi. Pada kasus ini, walaupun keempat pilihan kata itu bersinonim, masing-masing kata memiliki makna konotatif yang berlainan, yang menandakan perbedaan: (1) latar belakang pandangan dan keyakinan surat kabar tentang penyebab hilangnya sejumlah aktivis mahasiswa, dan (2) perspektif kalimat yang dibangun.

Skema 5.2.: Relasi Sinonimi Antar Kata
Pembeda Perspektif Pemberitaan



Data-data berikut ini, (5.107)-(5.108), juga memperlihatkan fenomena perspektif pemberitaan melalui pilihan kata yang berfitur nilai eksperiental. Hanya saja hubungan antar kata pembeda perspektif pemberitaan yang tampak bukan hubungan antonimi dan sinonimi, melainkan hiponimi.

(5.107) Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, buntutnya nanti ada *anarkis*, *destruktif* yang merugikan rakyat. (III.(a).12)

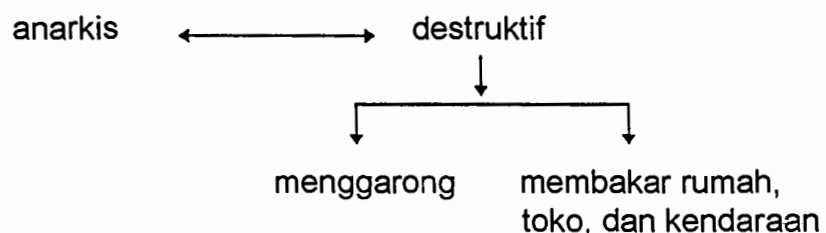
(5.108) Sejumlah aksi mahasiswa di beberapa tempat [...] sudah menjurus pada pelanggaran hukum, seperti *menggarong, membakar rumah, toko dan kendaraan*. (III.(a).15)

Kedua data ini membicarakan aksi mahasiswa dari perspektif pro pemerintah.

Aksi mahasiswa diungkapkan dengan pilihan kata sebagai *anarkis* dan *destruktif* pada (5.107), dan *menggarong, membakar rumah, toko, dan kendaraan* pada (5.108). Pilihan kata ini menampakkan pandangan dan keyakinan surat kabar bahwa aksi mahasiswa tidak ada bedanya dengan aksi yang dilakukan oleh para perusuh. Aksi mahasiswa tidak lagi mencerminkan gerakan moral dan tindakan kaum intelektual, bahkan merupakan ancaman bagi Pemerintah Orde Baru.

Dua data ini walaupun sama-sama memiliki latar belakang pandangan dan keyakinan tentang aksi mahasiswa, namun memiliki wujud yang berbeda dalam hal pilihan katanya. Kata *anarkis* dan *distruktif* memiliki kandungan komponen makna yang lebih luas daripada *menggarong* dan *membakar rumah, toko, dan kendaraan*. Apabila diskemakan, relasi antara kata dalam kedua data ini membentuk relasi hiponimi seperti berikut ini.

Skema 5.3.: Relasi Hiponimi Antar Kata Pembentuk Perspektif Pemberitaan



5.3.3.2 Pilihan Kata Berfitur Nilai Relasional

Pemilihan kata tertentu yang memiliki fitur nilai relasional menandakan suatu jejak dan isyarat dari penghasil teks di mana hubungan sosial antar partisipan direpresentasikan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemakaian kata-kata tertentu yang memiliki fitur nilai relasional di dalam kalimat berpotensi membentuk dan menandakan hubungan-hubungan sosial antar partisipan, seperti hubungan atas-bawah dalam tingkatan sosialnya, yang berupa atasan-bawahan, penguasa-rakyat, dan sebagainya. Selanjutnya, kata-kata yang berfitur relasional itu juga dipergunakan oleh para wartawan untuk menandakan perspektif pemberitaan yang dibangun oleh surat kabarnya.

Berikut ini diberikan data (5.109)-(5.112) untuk mendukung temuan penelitian bahwa relasi sosial atas-bawah antar partisipan yang ditandakan dalam pilihan kata, juga menandakan perspektif pemberitaan tertentu.

- (5.109) Presiden juga *menginstruksikan* kepada Menpen untuk mengadakan koordinasi dengan menteri-menteri terkait [...]. (III.(a).58)
- (5.110) Jendral berbintang empat itu menambahkan, hari Rabu ia sudah *memerintahkan* Kapolri Jendral Diby Widodo untuk menjelaskan masalah orang-orang hilang tersebut. (III.(a).61)
- (5.111) Wiranto menyatakan pihaknya akan *menindak* oknum mahasiswa yang melakukan pengrusakan. (III.(a).72)
- (5.112) Korps Reserse Mabes Polri, kemarin, *memeriksa* Pemimpin Redaksi Majalah D&R. (III.(a).73)

Pada data (5.109) dan (5.110) ini, pilihan kata *menginstruksikan* dan *memerintah*, memiliki fitur nilai relasional yang menunjukkan bahwa partisipan pengucap merupakan atasan dari partisipan penerima. Pada (5.109), partisipan pengucap adalah *presiden* dan partisipan penerima adalah *Menpen atau Menteri Penerangan*. Pada (5.110), partisipan pengucap adalah *Menhankam/Pangab* dan partisipan penerima adalah *Kapolri Jendral Dibydo Widodo*. Pada kedua data ini kedudukan dari entitas pengisi partisipan pengucap adalah atasan dari partisipan penerima.

Sementara itu pada data (5.111) dan (5.112), verba *menindak* dan *memeriksa* memiliki fitur nilai relasional yang menunjukkan bahwa partisipan pelaku merupakan pihak yang lebih berkuasa daripada partisipan tujuan. Pada (5.111), partisipan pelaku adalah *pihaknya (aparatur keamanan)* dan partisipan tujuan adalah *oknum mahasiswa*. Pada (5.112), partisipan pelaku adalah *Korps Reserse Mabes Polri* dan partisipan tujuan adalah *Pemimpin Redaksi Majalah D&R*. Pada kedua data ini kedudukan dari entitas pengisi partisipan pelaku adalah yang memerintah atau mengatur partisipan tujuan.

Untuk menguji kebenaran identifikasi ini pada data (5.109) dan (5.110) serta data (5.111) dan (5.112), maka kedua pasang data ini dapat diuji dengan cara menukar pengisi partisipan pengucap dengan partisipan penerima dan partisipan pelaku dengan partisipan tujuan. Apabila data tersebut tetap berterima, maka partisipan pengucap dan partisipan pelaku tidak memiliki

kedudukan yang lebih tinggi dalam hubungan sosialnya daripada partisipan penerima dan partisipan tujuan. Sebaliknya, apabila data yang terbentuk menjadi takberterima, maka partisipan pengucap dan partisipan pelaku memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada partisipan penerima dan partisipan tujuan.

(5.109a)* **Menpen** juga *menginstruksikan* kepada Presiden untuk mengadakan koordinasi dengan menteri-menteri terkait [...]. (III.(a).58)

(5.110a)* **Kapolri Jendral Diby Widodo** menambahkan, hari Rabu ia sudah *memerintahkannya* Jendral berbintang empat (Menhankam/ Pangab) untuk menjelaskan masalah orang-orang hilang tersebut. (III.(a).61)

(5.111a)* **Wiranto** menyatakan **oknum mahasiswa yang melakukan pengrusakan** akan *menindak* pihaknya. (III.(a).72)

(5.112a)* **Pemimpin Redaksi Majalah D&R**, kemarin, *memeriksa* Korps Reserse Mabes Polri. (III.(a).73)

Dari pengujian pada kasus data (5.109)-(5.112) terbukti bahwa pengisi partisipan penerima, yakni *Menpen* dan *Kapolri Jendral Diby Widodo* dan pengisi partisipan tujuan, yakni *oknum mahasiswa* dan *Pemimpinan Redaksi majalah D&R* masing-masing tidak dapat mengganti tempat partisipan pengucap dan partisipan pelaku. Ini membuktikan bahwa verba pada keempat data ini menandai perbedaan hubungan sosial partisipan-partisipannya. Selain menandakan hubungan sosial, keempat verba itu juga menandakan perspektif pemberitaan tertentu. Kata *menginstruksikan*, *memerintahkannya*, *menindak*, dan

memeriksa menandakan perspektif pro pemerintah karena kata-kata ini merupakan bagian dari kosa kata yang khas dalam dunia kemiliteran dan birokrasi pemerintahan. Kemunculan kata-kata ini merupakan representasi dari Pemerintahan Orde Baru.

Berikut ini diberikan data-data lain yang juga menandai adanya hubungan sosial dan perspektif pemberitaan.

(5.113) [...] *dialog* antara mahasiswa dan pimpinan ABRI sangat banyak manfaatnya. (III.(a).84)

(5.114) "Presiden tadi mengungkapkan kerisauan *beliau* mengenai pemberitaan-pemberitaan yang tidak memberikan gambaran sesungguhnya", kata Menteri Penerangan [...]. (III.(a).59)

Pada (5.113), pilihan kata *dialog* memperlihatkan adanya hubungan kesejajaran antara partisipan mahasiswa dan partisipan pimpinan ABRI. Antara kedua partisipan itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah seperti pada (5.109)-(5.112) di atas. Namun pada (5.114), pilihan kata *beliau* memperlihatkan bahwa partisipan pengucap *Menteri Penerangan* memiliki hubungan sosial yang lebih rendah daripada partisipan *Presiden* sehingga untuk menyebutnya perlu digunakan kata ganti yang sangat sopan. Pada (5.113), karena yang tampak adalah hubungan kesejajaran, maka perspektif yang tertandakan adalah perspektif netral. Kata *dialog* dalam hal ini tidak menempatkan salah satu partisipan yang ada di dalamnya dalam posisi lebih tinggi daripada yang lain. Sementara itu, pada (5.114), perspektif pemberitaan

yang tampak adalah perspektif pro pemerintah karena kata *beliau* yang diacu dengan nilai rasa hormat itu adalah representasi dari Pemerintah Orde Baru.

Selanjutnya, pada data (5.115) dan (5.116) berikut pemakaian kata *tewas* dan *meninggal* memperlihatkan latar belakang motif yang berbeda antara dua surat kabar pada “peristiwa di mana jiwa seseorang telah meninggalkan badannya”.

(5.115) Enam mahasiswa *tewas* terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat [...] (III.(a).51.)

(5.116) Enam mahasiswa *meninggal* setelah terjadi bentrokan antara aparat kemanan dengan mahasiswa [...] (III.(a).52)

Kata *tewas* pada (5.115) memperlihatkan makna konotatif adanya bencana atau insiden yang melatarbelakangi peristiwa matinya enam mahasiswa tersebut, sedangkan kata *meninggal* pada (5.116) lebih menunjukkan makna konotatif kewajaran dalam peristiwa matinya enam mahasiswa. Perspektif yang terbangun pada (5.115) adalah perspektif pro mahasiswa sedangkan pada (5.116) adalah perspektif pro pemerintah. Pemakaian kata *meninggal* pada (5.116), dan bukan kata *tewas*, mengisyaratkan bahwa wartawan memandang kematian yang terjadi pada enam mahasiswa itu sebagai suatu hal yang wajar dan alami.

5.3.3.3 Pilihan Kata Berfitur Nilai Ekspresif

Kata-kata tertentu yang memiliki fitur nilai ekspresif terbukti menandakan suatu jejak dan isyarat dari penghasil teks di mana evaluasinya

tentang realitas sosial, yang berupa nilai rasa simpati, suka, menyenangkan, membenci, antipati, dan sebagainya, direpresentasikan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk mempengaruhi sikap pembaca agar sesuai dengan sikap penghasil teksnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemakaian kata-kata tertentu yang memiliki fitur nilai ekspresif di dalam teks-teks berita selain menunjukkan penilaian tertentu dari wartawannya terhadap subjek yang diberitakan, juga menampakkan perspektif pemberitaan. Data (5.117)-(5.119) berikut ini memperjelas fenomena yang dimaksud.

(5.117) [...] apa yang dilakukan majalah D&R *sangat tidak etis* [...].
(III.(a).38)

(5.118) Pemuatan gambar ini dinilai *sebagai pelecehan dan penghinaan kepada Presiden Soeharto* [...]. (III.(a).39)

(5.119) Mahasiswa sekarang *kritis*. (III.(a).8)

Data (5.117) dan (5.118) membicarakan tentang *pemuatan gambar Presiden Soeharto pada sampul majalah D&R*. Kedua data ini sama-sama memperlihatkan penilaian yang negatif dan *unfavorable* terhadap majalah D&R. Pada (5.117), penilaian negatif itu diwujudkan dalam ekspresi frasa *sangat tidak etis*, yang mengisyaratkan apa yang dilakukan majalah D&R itu dianggap keluar dari norma sosial dan norma kesopanan. Pada (5.118), penilaian negatif itu diwujudkan dalam ekspresi frasa *sebagai pelecehan dan penghinaan kepada Presiden Soeharto*. Pemuatan gambar itu oleh majalah D&R dinilai telah merendahkan dan tidak menghargai martabat Presiden

Soeharto. Pada dua data ini secara jelas perspektif yang ditandakan adalah perspektif pro pemerintah. Penilaian-penilaian negatif terhadap apa yang mengancam Presiden Soeharto merupakan suatu jejak dan isyarat dari penghasil teks atau wartawan yang berupa keberpihakan mereka terhadap Pemerintahan Orde Baru. Keberpihakan ini merupakan indikator penting dari perspektif pemberitaan yang dibangun, yakni perspektif pro pemerintah.

Namun sebaliknya pada (5.119), penilaian yang *favorable* dilakukan terhadap mahasiswa dalam wujud pilihan kata *kritis*. Pilihan kata ini menunjukkan bahwa ada keberpihakan dan sikap positif wartawan terhadap mahasiswa. Keberpihakan dan sikap positif ini akan menjadi jejak dan isyarat dari wartawan berkaitan dengan perspektif pemberitaan yang dibangunnya, yakni perspektif pro mahasiswa.

Seperti halnya data-data (5.117)-(5.119) di atas, data-data (5.120)-(5.124) berikut ini juga mengungkapkan fenomena pilihan kata yang memperlihatkan penilaian dari wartawannya terhadap subjek yang diberitakan dan sekaligus menampakkan perspektif pemberitaan.

(5.120) Apa yang mereka lakukan *bukan langkah yang sia-sia*, dan akan *membuahkan hasil*. (III.(a).22)

(5.121) Unjuk rasa mahasiswa *makin beringas*. (III.(a).18)

(5.122) Aksi mahasiswa [...] merupakan *langkah efektif untuk mendorong perubahan*. (III.(a).7).

(5.123) Aksi mahasiswa saat ini *masih wajar dan tidak menyimpang*. (III.(a).9)

(5.124) Aksi unjuk rasa mahasiswa akhir-akhir ini *cenderung melenceng, anarkis*. (III.(a).10)

Kelima data ini berisi pilihan kata yang memuat penilaian tentang aksi mahasiswa. Pada kalimat (5.120) dan (5.122), aksi mahasiswa dinilai secara positif dan *favorable*. Aksi mahasiswa dikatakan sebagai *bukan langkah yang sia-sia, dan akan membuahkan hasil, serta langkah efektif untuk mendorong perubahan*. Pilihan-pilihan kata ini memperlihatkan penilaian yang memihak pada mahasiswa. Pada kalimat (5.121) dan (5.124), aksi mahasiswa dinilai secara negatif dan *unfavorable*. Aksi mahasiswa dikatakan *makin beringas, cenderung melenceng, dan anarkis*. Pilihan-pilihan kata ini menunjukkan ketidakberpihakan dan rasa tidak senang wartawan surat kabar ini pada mahasiswa. Dan terakhir, pada kalimat (5.123) aksi mahasiswa dinilai dengan nada yang netral, tidak *unfavorable* maupun *favorable*. Aksi mahasiswa dikatakan sebagai *masih wajar dan tidak menyimpang*.

Dari uraian-uraian ini dapat diidentifikasi beberapa hal berikut ini. Pada kalimat (5.120) dan (5.122) perspektif yang ditandakan melalui frase *bukan langkah yang sia-sia, dan akan membuahkan hasil, serta langkah efektif untuk mendorong perubahan* adalah perspektif pro mahasiswa. Pada kalimat (5.121) dan (5.124) perspektif yang ditandakan melalui frase *makin beringas, cenderung melenceng, dan melalui kata anarkis* adalah perspektif pro

pemerintah. Dan terakhir, pada (5.123) perspektif yang ditampakkan melalui frase *masih wajar* dan *tidak menyimpang* adalah perspektif netral.

5.3.4 Metafora

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam kalimat dengan memanfaatkan piranti metafora dapat dideskripsikan melalui data-data berikut ini.

(5.125) Para mahasiswa sepertinya tidak pernah kehabisan *bahan bakar* dalam berdemo. (III.(b).1)

(5.126) *Gelombang* aksi keprihatinan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, Kamis (7/5), diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan korban berjatuh di kedua pihak. (III.(b).2).

(5.127) Ribuan mahasiswa *banjiri* DPR. (III.(b).3).

Ketiga data ini membicarakan tentang mahasiswa dan aksinya. Metafora di dalam ketiga data ini dapat diidentifikasi dari kata *bahan bakar* sebagai analog dari semangat mahasiswa pada (5.125), kata *gelombang* sebagai analog dari intensitas aksi keprihatinan mahasiswa pada (5.126), dan kata *banjiri* sebagai analog dari gerakan mahasiswa yang datang ke gedung DPR pada (5.127).

Pada data (5.125), semangat mahasiswa dianalogikan sebagai energi, daya, tenaga, atau kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Analogi semangat mahasiswa dengan *bahan bakar* ini memperlihatkan penilaian positif dari wartawan terhadap mahasiswa. Apabila dikaitkan dengan pembentukan

perspektif pemberitaan di dalam kalimat, maka metafora pada data (5.125) ini membentuk perspektif pro mahasiswa.

Hampir sama dengan data (5.125), metafora pada data (5.127) ini juga memperlihatkan penilaian yang positif terhadap aksi keprihatinan mahasiswa. Intensitas aksi keprihatinan mahasiswa disamakan dengan sifat *ombak di lautan*. Aksi keprihatinan mahasiswa digambarkan seperti *ombak yang datang bergulung-gulung tiada habis-habisnya*. Penggambaran aksi keprihatinan mahasiswa seperti ini menyiratkan penilaian positif terhadap mahasiswa. Dan dalam kaitannya dengan perspektif pemberitaan, metafora ini membentuk perspektif pro mahasiswa.

Data (5.127) adalah kalimat yang dibuat untuk peristiwa *demonstrasi ribuan mahasiswa di DPR*. Metafora dalam judul (5.127) itu terlihat dari kata *banjiri*. Surat kabar ini dengan memilih kata *banjiri* ini ingin memperlihatkan adanya tiga kesamaan sifat antara *ribuan mahasiswa* dengan *air*. Tiga sifat yang sama itu adalah dalam hal (1) *tiada henti-hentinya dan tiada habis-habisnya ribuan mahasiswa itu mendatangi gedung DPR* seperti halnya aliran air; (2) *tidak terbendungnya kedatangan ribuan mahasiswa itu ke DPR* seperti datangnya air bah; dan (3) *banyaknya mahasiswa yang terkonsentrasi di gedung DPR* seperti halnya air yang terpusat dan menggenang di daerah yang lebih rendah. Penggambaran tiga sifat *air* pada *demonstrasi mahasiswa di DPR* ini tidak berkonotasi negatif, melainkan memberi kesan pujian akan

kekuatan dan besarnya pengaruh demonstrasi itu. Konotasi positif yang diperlihatkan oleh surat kabar ini melalui kata *banjiri* mengindikasikan adanya manifestasi perspektif pemberitaan yang pro mahasiswa.

Berikut ini diberikan data-data lain untuk mengukuhkan manifestasi perspektif pemberitaan melalui metafora di dalam kalimat.

- (5.128) Koopsjaya *membersihkan* gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu dinihari dari sisa mahasiswa yang bertahan. (III.(b).4)
- (5.129) Dalam kerusuhan yang disertai penjarahan di Tangerang tersebut diperkirakan telah *menelan* korban jiwa sebanyak 200 orang lebih. (III.(b).8)
- (5.130) Walaupun aksi telah *memakan* korban, tapi mahasiswa tetap bersikeras menuntut turun ke jalan. (III.(b).9)

Pada data (5.128) mahasiswa dianalogikan sebagai *kotoran*, yang memiliki sifat bau, membuat tidak sedap pemandangan, dan oleh karena itu harus dibersihkan. Karena analogi yang seperti itu, maka wartawan memilih kata *membersihkan*. Metafora dalam data (5.128) ini mencerminkan penilaian negatif terhadap mahasiswa. Penilaian negatif seperti ini hanya mungkin diberikan oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap mahasiswa dan aksinya. Dalam hal ini, penilaian negatif terhadap mahasiswa di dalam data ini menandakan perspektif pemberitaan yang lebih pro pemerintah.

Sementara itu, pada data (5.129) dan data (5.130), kerusuhan dan aksi mahasiswa digambarkan dengan kata yang memiliki makna yang sama, yakni

menelan dan *memakan korban*. Kerusuhan dan aksi mahasiswa dianalogikan sebagai *binatang pemangsa*. Analogi seperti ini mencerminkan penilaian yang sangat negatif terhadap aksi massa dan aksi mahasiswa. Dilihat dari segi pembentukan perspektif pemberitaan, maka pilihan metafora seperti ini membentuk perspektif pro pemerintah.

Berbeda dengan dua kelompok data di atas, yang menunjukkan bahwa metafora dipergunakan sebagai pembentuk perspektif pro mahasiswa dan perspektif pro pemerintah, data-data berikut ini memperlihatkan bahwa metafora dapat juga digunakan untuk membentuk perspektif pemberitaan yang netral.

(5.131) Namun, sebagaimana disaksikan *Republika*, massa kembali *menyemut* setelah petugas keamanan melonggarkan blokadanya. (III.(b).6)

(5.132) Di Jakarta aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta Timur sempat diwarnai *kucing-kucingan* antara mahasiswa dengan petugas. (III.(b).10)

Metafora pada data (5.131) dan data (5.132) dapat diidentifikasi dari kata *menyemut* dan *kucing-kucingan*. Pada data (5.131), untuk menggambarkan jumlah massa yang sangat banyak, wartawan menggunakan analogi *semut*. Kumpulan massa yang sangat banyak digambarkan seperti halnya kerumunan semut yang berdesak-desakan. Penggambaran ini hanya menunjukkan banyaknya jumlah massa dan tidak berkaitan dengan penilaian

positif atau negatif terhadap massa. Oleh karena itu, metafora ini tidak menandakan perspektif pro mahasiswa maupun pro pemerintah, tetapi lebih cenderung menandakan perspektif netral.

Pada data (5.132), aksi unjuk rasa mahasiswa dianalogikan seperti permainan-*kucing-kucingan*. Analogi ini menggambarkan bagaimana upaya mahasiswa untuk lolos dari penjagaan petugas, dan sebaliknya, menggambarkan pula bagaimana upaya petugas menjaga aksi unjuk rasa mahasiswa itu. Metafora ini hanya menggambarkan upaya-upaya itu, baik yang dilakukan mahasiswa maupun petugas, dan tidak menimbulkan penilaian yang bersifat positif atau negatif terhadap mahasiswa maupun petugas. Oleh karena itu, metafora ini lebih menandakan perspektif pemberitaan yang netral.

Dari uraian-uraian berdasarkan data (5.125) hingga (5.132) dapat disimpulkan bahwa metafora tidak hanya berfungsi sebagai alat penggambaran suatu objek dengan cara analogi, tetapi berfungsi pula sebagai penanda perspektif pemberitaan di dalam kalimat. Kata-kata tertentu penanda metafora ternyata menandakan pula sikap dan penilaian wartawan terhadap suatu objek yang diberitakan. Baik atau buruknya penilaian, simpati atau antipati, keberpihakan atau ketidakberpihakan wartawan dapat digunakan sebagai indikator penting menemukan perspektif pemberitaan yang dibangun dalam kalimat.

5.3.5 Struktur Informasi

Pengaturan struktur informasi atau organisasi isi proposisional dalam kalimat atas informasi latar dan informasi baru dapat dipergunakan untuk menandai perspektif pemberitaan. Perspektif pemberitaan akan terlihat dari pemilihan bagian proposisi tertentu sebagai informasi baru dan bagian proposisi yang lain sebagai informasi latar. Data-data berikut ini merupakan ilustrasi yang tepat untuk fenomena ini.

(5.133) Enam orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk yang dilakukan ratusan mahasiswa di Jalan S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. (III.(d).12).

(5.134) Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol. (III.(d).11)

Kedua data ini menginformasikan tentang tewasnya *enam mahasiswa Trisakti*. Perbedaan yang tampak dalam kedua data ini terletak dalam proposisi pengisi informasi latar dan baru. Apabila disederhanakan, struktur proposisi kedua data ini adalah sebagai berikut.

(5.133a) mimbar bebas dan aksi duduk mahasiswa di jalan → *petugas membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk* → *mahasiswa bentrok dengan petugas* → enam mahasiswa tewas

(5.134a) mahasiswa berada di dalam kampus → *aparat di Jalan Grogol menembak* → keenam mahasiswa tertembak

Pada kedua data ini yang ditulis dengan huruf miring adalah informasi baru dan yang ditulis dengan huruf tegak adalah informasi latar. Untuk mendukung analisis ini, berikut disajikan kalimat yang mendahului kedua data ini.

(5.135) Korban jiwa mulai berjatuhan dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. (III.(d).4).

(5.136) Enam mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Trisakti (III.(d).3).

Dari struktur proposisi pada (5.133) dan konteks data sebelumnya, yakni (5.135), terlihat bahwa proposisi *mimbar bebas dan aksi duduk mahasiswa di jalan* dan *enam mahasiswa tewas* merupakan informasi latar. Kedua informasi ini dapat ditemukan rujukannya dalam data (5.135), yakni *aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa* dan *Korban jiwa mulai berjatuhan*. Sementara itu, proposisi *petugas membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk mahasiswa* dan *mahasiswa bentrok dengan petugas* dalam (5.133) merupakan informasi baru karena dalam data sebelumnya, yakni (5.135) tidak ditemukan rujukannya. Dengan demikian, dua informasi tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Pada data (5.134) dan konteks data sebelumnya (5.136) terlihat bahwa proposisi *mahasiswa berada di dalam kampus* dan *keenam mahasiswa tertembak* merupakan informasi latar. Kedua informasi ini dapat ditemukan rujukannya dalam data (5.136), yakni *sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan*

mahasiswa yang berlangsung di kampus Trisakti dan enam mahasiswa Universitas Trisakti [...] terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan. Sedangkan proposisi aparat di Jalan Grogol menembak merupakan informasi baru karena tidak ditemukan rujukan informasi ini pada bagian wacana sebelumnya, seperti data (5.136).

Perbedaan proposisi pengisi informasi latar dan baru pada data (5.133) dan (5.134) dapat dirinci seperti dalam Tabel 5.15 berikut ini.

Tabel 5.15: Perbedaan Proposisi Pengisi Informasi Latar dan Baru pada data (5.133) dan (5.134)

Data	Perbedaan Proposisi Pengisi	
	Informasi Latar	Informasi Baru
(5.133)	aksi mahasiswa di jalan	petugas membubarkan aksi dan terjadi bentrok antara mahasiswa dan aparat
(5.134)	aksi mahasiswa di dalam kampus	aparat menembak

Dari Tabel 5.15 ini dapat disimpulkan bahwa proposisi yang mengisi informasi latar dan informasi baru berbeda. Pada (5.133) pengisi informasi latar mengisyaratkan praanggapan bahwa *mahasiswa melanggar aturan demo karena aksinya dilakukan di jalan*, sementara pada (5.134) pengisi informasi latar mengisyaratkan praanggapan bahwa *mahasiswa tidak melanggar aturan demo karena demo dilakukan di dalam kampus*. Selanjutnya, pada (5.133) pengisi informasi baru mengisyaratkan praanggapan bahwa *aparat tidak*

menggunakan senjata, sebaliknya pada (5.134) pengisi informasi baru mengisyaratkan praanggapan bahwa *aparat menggunakan senjata*.

Berdasarkan indikator struktur proposisi kedua data ini dan konteks data sebelumnya, serta indikator praanggapan yang diisyaratkan masing-masing proposisi pengisi informasi latar dan informasi baru, dapat disimpulkan bahwa perspektif yang terbentuk dalam (5.133) adalah perspektif pro pemerintah dan dalam (5.134) adalah perspektif pro mahasiswa.

Berikut ini diberikan data lain, yakni (5.137)-(5.139), untuk memperjelas fenomena di atas.

(5.137) Berbeda dengan Peristiwa 27 Juli 1996 di mana pembebasan Gedung PDI berlangsung keras dan berdarah, bahkan banyak orang hilang, aksi pembebasan Gedung MPR/DPR itu berlangsung damai. (III.(d).13)

(5.138) Namun, jalannya evakuasi sempat diwarnai sikap kasar petugas. (III.(d).15).

(5.139) Koopsjaya "bersihkan" gedung DPR/MPR dengan damai (III.(d).17).

Ketiga data ini menginformasikan tentang *upaya pengosongan gedung MPR/DPR dari mahasiswa oleh aparat*. Perbedaan yang tampak dalam ketiga data ini terletak dalam proposisi pengisi informasi latar dan informasi baru. Apabila disederhanakan, struktur proposisi ketiga data ini adalah sebagai berikut.

(5.137a) pembebasan gedung PDI berlangsung keras → aksi pembebasan gedung DPR/MPR → *aksi berlangsung damai*

(5.138a) evakuasi mahasiswa → *adanya sikap kasar petugas*

(5.139a) Koopsjaya bersihkan gedung DPR/MPR → *Koopsjaya memakai cara damai*

Pada ketiga data ini, informasi baru ditulis dengan huruf miring dan sebaliknya informasi latar ditulis dengan huruf tegak. Untuk mendukung analisis ini, berikut disajikan kalimat-kalimat yang mendahului ketiga data ini.

(5.140) Gedung MPR/DPR yang diduduki mahasiswa sejak Senin lalu, Sabtu dinihari pukul 02.10 WIB masih dalam proses pengosongan 1000 pasukan gabungan [...]. (III.(d).31)

(5.141) Sekitar pukul 23.30 WIB evakuasi yang dipimpin Kasdam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi dimulai. (III.(d).29)

(5.142) Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad dan Marinir, yang tergabung dalam Koopsjaya membersihkan gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu dari sisa mahasiswa yang bertahan. (III.(d).30)

Dari struktur proposisi pada (5.137a) dan konteks data sebelumnya, yakni data (5.140), dapat diidentifikasi bahwa proposisi *pembebasan gedung PDI* dan *aksi pembebasan gedung DPR/MPR* adalah informasi latar. Proposisi *pembebasan gedung PDI* dapat ditemukan dalam teks-teks berita tahun 1996 bulan Juli sedangkan proposisi *aksi pembebasan gedung DPR/MPR* dapat ditemukan rujukannya dalam data yang mendahuluinya, yakni (5.140). Dengan demikian menjadi jelas bahwa kedua proposisi ini merupakan pengisi informasi latar dalam data (5.137). Selanjutnya, proposisi *aksi berlangsung damai*

merupakan informasi baru karena informasi tersebut tidak dapat ditemukan dalam kalimat-kalimat sebelumnya, termasuk pula dalam data (5.140).

Pada (5.138a) dan konteks data sebelumnya, yakni data (5.141), terlihat bahwa proposisi *evakuasi mahasiswa* merupakan informasi latar karena proposisi ini dapat ditemukan rujukannya dalam data (5.141). Sementara itu, proposisi *adanya sikap kasar petugas* merupakan informasi baru karena proposisi ini tidak dapat ditemukan rujukannya dalam data (5.141). Ini berarti informasi ini baru pertama kalinya dimunculkan.

Selanjutnya pada (5.139a) dan konteks data sebelumnya, yakni (5.142), dapat diidentifikasi bahwa proposisi *Koopsjaya bersihkan gedung DPR/MPR* merupakan informasi latar karena proposisi ini dapat ditemukan rujukannya dalam data (5.142). Sebaliknya, proposisi *Koopsjaya memakai cara damai* diklasifikasikan sebagai informasi baru karena rujukan proposisi ini di dalam data (5.142), yang merupakan kalimat sebelumnya, tidak ditemukan.

Perbedaan proposisi pengisi informasi latar dan baru pada data (5.137)-(5.139) dapat dirinci seperti dalam Tabel 5.16 berikut ini.

Tabel 5.16: Perbedaan Proposisi Pengisi Informasi Latar dan Baru pada data (5.137)-(5.139)

Data	Perbedaan Proposisi Pengisi	
	Informasi Latar	Informasi Baru
(5.137)	<ul style="list-style-type: none"> • pembebasan Gedung PDI pada peristiwa 27 Juli 1996 • pembebasan Gedung 	aksi berlangsung damai

	MPR/DPR	
(5.138)	evakuasi mahasiswa dari gedung MPR/DPR	petugas bersikap kasar
(5.139)	Koopsjaya bersihkan gedung DPR/MPR	pembersihan berlangsung damai

Dari Tabel 5.16 ini dapat disimpulkan bahwa proposisi yang mengisi informasi latar dan informasi baru berbeda. Pada (5.137), proposisi pengisi informasi latar dan baru menunjukkan praanggapan bahwa *pembebasan gedung MPR/DPR tidak sama dengan pembebasan gedung PDI*. Pada (5.138), proposisi pengisi informasi latar dan baru mengisyaratkan praanggapan bahwa *mahasiswa sebagai korban*. Dan terakhir pada (5.139), proposisi pengisi informasi latar dan baru mengisyaratkan praanggapan bahwa *keberadaan mahasiswa di gedung DPR/MPR sangat mengganggu*.

Berdasarkan indikator struktur proposisi ketiga data ini dan konteks data sebelumnya, serta indikator praanggapan yang diisyaratkan masing-masing proposisi pengisi informasi latar dan informasi baru, dapat disimpulkan bahwa perspektif yang terbentuk adalah perspektif pro pemerintah untuk data (5.137) dan data (5.139), dan perspektif pro mahasiswa untuk data (5.138).

Dalam kaitannya dengan perspektif pemberitaan dapat disimpulkan bahwa praanggapan-praanggapan yang terbentuk sebagai hasil penataan proposisi-proposisi tertentu sebagai pengisi informasi latar dan pengisi informasi baru dapat dijadikan indikator untuk mengungkap perspektif

pemberitaan yang dibangun dalam kalimat. Apabila wartawan bertujuan menandakan perspektif pemberitaan tertentu, apakah itu pro pemerintah, pro mahasiswa, atau netral, dia dapat mengisi informasi latar dan baru dengan proposisi yang sesuai dan mendukung tujuannya itu. Ilustrasi pada (5.133), misalnya, memperlihatkan bahwa untuk menandakan perspektif pro pemerintah, wartawan menyajikan proposisi yang cenderung memihak pemerintah dan tidak memihak mahasiswa, yakni *mimbar bebas dan aksi duduk mahasiswa di jalan* sebagai informasi latar. Informasi latar ini mengisyaratkan praanggapan bahwa *apa yang dilakukan mahasiswa tersebut telah melanggar aturan berdemo, yakni ke luar dari kampus*. Dari ilustrasi pada (5.134) dapat dilihat hal yang sebaliknya. Untuk menandakan perspektif pro mahasiswa, wartawan menyajikan proposisi yang lebih memihak mahasiswa, yakni *aksi mahasiswa berada di dalam kampus* sebagai informasi latar. Praanggapan yang ingin diperlihatkan oleh wartawan dalam hal ini adalah *mahasiswa tidak melanggar aturan dalam berdemonstrasi*.

Hal yang sama juga dapat dicermati dalam pengisian informasi baru pada data (5.133) dan (5.134). Pada (5.133), untuk menandakan perspektif pro pemerintah, wartawan menyajikan proposisi yang cenderung memihak pada pemerintah, yakni *petugas membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk mahasiswa yang mengakibatkan bentrok dengan mahasiswa*. Sementara itu, pada (5.134), wartawan memasukkan proposisi yang tidak memihak pada

pemerintah, yakni *aparatus di jalan Grogol menembak*. Dari dua proposisi yang berbeda ini, praanggapan yang terbentuk adalah *petugas tidak memakai senjata dalam pembubaran aksi yang dilanjutkan bentrok dengan mahasiswa* untuk (5.133), dan *petugas/aparatus menggunakan senjata dalam menangani aksi mahasiswa*.

5.3.6 Modalitas

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa modalitas sebagai manifestasi perspektif pemberitaan dalam tataran kalimat cenderung digunakan oleh wartawan untuk menampakkan perspektif pemberitaan yang pro pemerintah daripada perspektif pemberitaan pro mahasiswa maupun netral. Apabila dipresentasikan dari data modalitas yang ada, 75% data digunakan wartawan untuk menampakkan perspektif pemberitaan pro pemerintah, 10% perspektif pemberitaan pro mahasiswa, dan 15% untuk perspektif pemberitaan netral.

Penjelasan yang logis untuk fenomena ini adalah kepentingan-kepentingan pemerintah lebih banyak diadopsi oleh para wartawan daripada kepentingan mahasiswa. Hal ini dapat terjadi mengingat kondisi pers Indonesia pada saat itu lebih bersifat *top down* dan sangat diwarnai oleh suasana "ketakutan" akan kekuasaan pemerintah dalam hal pencabutan SIUPP atau pembredelan. Penjelasan lebih lanjut untuk fenomena ini telah diuraikan dalam 2.5.2 dan 2.5.3. pada di muka.

Modalitas sebagai komentar atau sikap dari wartawan atau institusinya yang tertuang dalam teks dapat dibagi menjadi empat jenis, yakni (1) kebenaran, (2) keharusan, (3) izin, dan (4) keinginan. Berikut ini masing-masing modalitas akan diuraikan satu persatu.

5.3.6.1 Modalitas Kebenaran

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa seorang wartawan dengan modalitas kebenaran mengindikasikan atau menyatakan secara tidak langsung pada pembaca: (1) suatu komitmen pada kebenaran dari suatu proposisi yang dituliskannya, atau (2) suatu prediksi tingkat kemungkinan dari deskripsi suatu kejadian yang terjadi. Komitmen dan prediksi yang diberikan ini merupakan indikator penting untuk mengungkap perspektif pemberitaan dalam suatu kalimat.

Data (5.143) hingga (5.146) berikut merupakan ilustrasi yang tepat untuk fenomena manifestasi perspektif pemberitaan dengan modalitas kebenaran.

- (5.143) [...] aksi mahasiswa saat ini *masih* wajar dan *tidak* menyimpang. (III.(c).9)
- (5.144) Aksi Unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air *sudah* semakin beringas. (III.(g).13).
- (5.145) Aksi mahasiswa akhir-akhir ini *mulai* melenceng dan *tidak* tertutup kemungkinan ditunggangi pihak di luar kampus. (III.(g).14).

(5.146) Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi *masih* berlanjut di mana-mana, Sabtu (25/4). (III.(g).17).

Keempat data ini berisi proposisi tentang *aksi mahasiswa yang terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei tahun 1998*. Pada masing-masing data ini, sikap dan komentar wartawan dapat diketahui dari pilihan modalitasnya.

Pada (5.143), wartawan menggunakan modalitas *masih* dan *tidak* untuk menandai sikap dan komentar positif terhadap aksi mahasiswa. Dengan modalitas *masih*, sebagai atribut untuk verba *wajar*, wartawan menunjukkan prediksi tingkat kemungkinan dari *kewajaran aksi mahasiswa*. Dengan modalitas *tidak*, sebagai atribut untuk verba *menyimpang*, wartawan menunjukkan komitmennya akan kebenaran proposisi bahwa *aksi mahasiswa berlangsung dengan tertib*. Ketika ada proposisi yang sebaliknya, yakni *aksi mahasiswa menyimpang*, wartawan menunjukkan penolakannya dengan menggunakan modalitas *tidak*. Prediksi dan komitmen wartawan yang diwujudkan melalui dua modalitas ini merupakan indikator yang kuat untuk perspektif pro mahasiswa dalam kalimat. Bandingkan data (5.143) dengan variasinya pada (5.143a) berikut, di mana komitmen dan prediksi wartawan justru sebaliknya.

(5.143a) [...] aksi mahasiswa saat ini *tidak* wajar dan *sudah* menyimpang.

Pada (5.143a), wartawan memiliki komitmen dan prediksi yang negatif terhadap aksi mahasiswa. Wujud dari komitmen dan prediksi negatif ini adalah

dipilihnya modalitas *tidak* sebagai atribut verba *wajar* dan modalitas *sudah* sebagai atribut verba *menyimpang*.

Pada (5.144), wartawan menggunakan modalitas *sudah* untuk menguatkan sikap dan komentar negatif terhadap *aksi mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya* yang dikatakan *semakin beringas*. Dengan modalitas *sudah*, sebagai atribut frase verbal *semakin beringas*, wartawan menunjukkan komitmen pada kebenaran proposisi bahwa *intensitas keberingasan aksi mahasiswa meningkat*. Wartawan juga menunjukkan prediksi tingkat kemungkinan dari deskripsi tentang *keberingasan aksi mahasiswa*. Prediksi dan komitmen wartawan yang diwujudkan melalui modalitas *sudah* merupakan indikator yang kuat untuk perspektif pro pemerintah.

Pada (5.145), wartawan menggunakan modalitas *mulai* dan *tidak* untuk menandai sikap dan komentar negatif terhadap aksi mahasiswa. Dengan modalitas *mulai*, wartawan memperlihatkan prediksi tingkatan *kemlencengan aksi mahasiswa*. Dengan modalitas *tidak*, wartawan memperlihatkan komitmennya pada kebenaran proposisi bahwa *segala sesuatu bisa terjadi pada aksi mahasiswa*. Prediksi dan komitmen wartawan yang diwujudkan melalui modalitas *mulai* dan *tidak* merupakan indikator yang kuat untuk perspektif pro pemerintah.

Dan terakhir pada (5.146), wartawan menggunakan modalitas *masih* untuk menguatkan sikap dan komentar yang netral tentang aksi mahasiswa.

Modalitas *masih*, sebagai atribut verba *berlanjut*, memperlihatkan komitmen kebenaran dari *berlanjutnya aksi mahasiswa di mana-mana*. Komitmen wartawan yang diwujudkan melalui modalitas *masih* merupakan indikator yang kuat untuk perspektif netral karena kehadiran modalitas ini tidak mengindikasikan penilaian baik dan buruk dari wartawan terhadap aksi ribuan mahasiswa.

5.3.6.2 Modalitas Keharusan

Dengan modalitas keharusan, wartawan menetapkan bahwa partisipan dalam suatu proposisi *seharusnya* atau *tidak seharusnya* melakukan tindakan khusus dalam proposisi itu. Contoh untuk hal ini dapat dilihat dalam data (5.147) berikut ini.

(5.147) Ia berpendapat, *seharusnya* jika mahasiswa ingin menyelesaikan persoalan, ada dua dari Tri Dharma perguruan tinggi yang bisa dipakai. (III.(c).19)

Pada (5.147), dengan modalitas *seharusnya*, secara eksplisit wartawan menganjurkan bahwa mahasiswa dapat melakukan dua tindakan Tri Dharma perguruan tinggi, seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat, untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Secara implisit berdasarkan konteks dalam teks, wartawan tidak menyetujui tindakan mahasiswa seperti demonstrasi, unjuk rasa, maupun mimbar bebas. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan mahasiswa, menurut pandangan wartawan, mengindikasikan nilai-nilai keyakinan dan pandangan yang

dimilikinya. Nilai-nilai keyakinan dan pandangan wartawan tersebut menjadi dasar bagi perspektif pemberitaan yang ditandakan dalam kalimat, yakni perspektif pro pemerintah.

Untuk mendukung analisis awal pada (5.147) berikut ini diberikan data (5.148) yang juga menggambarkan fenomena pemakaian modalitas keharusan.

(5.148) Karena itu mahasiswa *tidak perlu* menolak untuk berdialog dengan ABRI. (III.(c).20)

Pada (5.148), dengan modalitas *tidak perlu*, secara eksplisit wartawan menganjurkan agar mahasiswa sebaiknya melakukan dialog dengan ABRI. Implisit dalam data ini adalah adanya ketidaksetujuan wartawan terhadap sikap mahasiswa yang tidak bersedia berdialog dengan ABRI. Tindakan apa yang disetujui dan tidak disetujui oleh wartawan dari aksi mahasiswa mencerminkan nilai-nilai keyakinan dan pandangan wartawan terhadap aksi mahasiswa tersebut. Dua hal ini menjadi indikator penting untuk menemukan perspektif pemberitaan yang ditandakan dalam kalimat, yakni perspektif pro pemerintah.

Hasil analisis data (5.149) berikut ini makin mengukuhkan kesimpulan yang diambil dari analisis data (5.147) dan data (5.148).

(5.149) [...] persoalan orang "hilang" yang diramalkan masyarakat saat ini *harus segera* diklarifikasikan. (III.(c).21)

Pada (5.149) ini modalitas yang digunakan oleh wartawan adalah *harus segera*. Modalitas ini mengindikasikan tindakan yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan berkaitan dengan *persoalan orang hilang*.

Tindakan yang seharusnya dilakukan yang disetujui oleh wartawan adalah tindakan klarifikasi. Berdasarkan konteks dalam teks diketahui bahwa tindakan klarifikasi itu ditujukan kepada semua pihak, yakni keluarga, pihak berwajib, teman-teman orang yang hilang, dan semua pihak yang terkait. Sebaliknya, secara implisit tindakan yang tidak diharapkan oleh wartawan adalah tindakan yang selama ini terjadi, seperti saling menuduh, mengecam, curiga antara pihak berwajib dengan pihak keluarga dan LSM, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan tindakan yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan ini, nilai-nilai keyakinan dan pandangan wartawan terhadap persoalan orang hilang dapat diketahui, yakni tidak memihak pada pihak-pihak yang terlibat konflik, yakni pihak aparat keamanan dan pihak aktivis mahasiswa. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa perspektif pemberitaan yang ditandakan dalam kalimat melalui kata modalitas *harus segera* adalah perspektif netral.

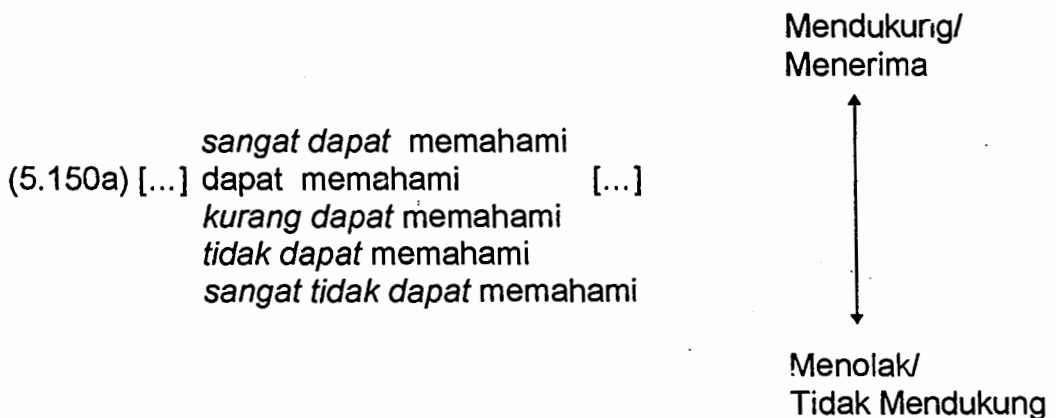
5.3.6.3 Modalitas Izin

Dengan modalitas izin, wartawan atau partisipan yang dilaporkan oleh wartawan mengindikasikan suatu persetujuan atau sebaliknya ketidaksetujuan pada partisipan (lain) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata-kata modalitas yang digunakan adalah *boleh*, *dapat*, dan *bisa*, yang mungkin juga divariasikan dengan kata modalitas lain, seperti *sangat*, *kurang*, *hanya*, *tidak*, *tak*, dan sebagainya. Kata-kata yang digunakan sebagai penanda

komentar dan sikap penulis dalam tipe ini lebih netral daripada kata-kata penanda komentar dan sikap penulis dalam tipe modalitas *kebenaran* dan *prediksi*. Data berikut merupakan contoh yang tepat untuk fenomena yang dimaksud.

(5.150) Dewan kehormatan PWI *dapat* memahami peringatan keras pemerintah terhadap majalah D&R. (III.(c).2)

Pada (5.150), modalitas *dapat* oleh wartawan merupakan hasil interpretasinya terhadap reaksi partisipan *Dewan kehormatan PWI* atas peringatan keras pemerintah yang ditujukan pada majalah D&R. Pilihan modalitas *dapat* ini mengindikasikan prediksi atas tingkat pemahaman dan penerimaan *Dewan kehormatan PWI* terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini diberikan variasi pilihan modalitas izin untuk data yang sama.



Tingkat pemahaman dan penerimaan yang digambarkan dalam pilihan modalitas *dapat* menunjukkan pada apa yang dilakukan partisipan dalam

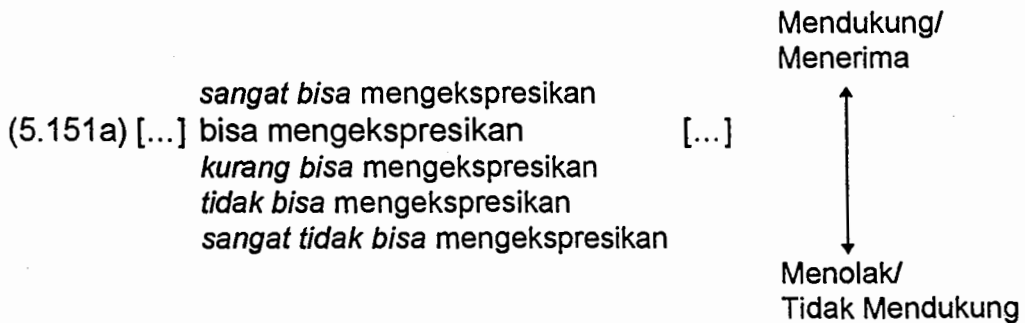
proposisi. Dalam kasus (5.150), semakin tinggi tingkat pemahaman dan penerimaan yang diwujudkan dalam modalitas izin *sangat dapat* dan *dapat* semakin menunjukkan tingkat keberpihakan wartawan pada partisipan dan tindakan yang dilakukannya, yang pada akhirnya menandai perspektif pemberitaan yang pro pemerintah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pemahaman dan penerimaan yang digambarkan dengan pilihan modalitas di atas, *tidak dapat* dan *sangat tidak dapat* semakin menampakkan tingkat ketidakberpihakan wartawan pada partisipan dan tindakan yang dilakukannya, yang pada akhirnya menandai perspektif pemberitaan yang pro mahasiswa.

Data (5.151) berikut juga menunjukkan fenomena yang sama dengan data (5.150) di atas.

(5.151) Di kampus mahasiswa *bisa* mengekspresikan opininya, *bisa* menjelaskan konsep-konsepnya. (III.(c).31)

Pada (5.151), pilihan modalitas *bisa* oleh wartawan merupakan hasil interpretasinya terhadap kondisi dan situasi yang berkembang pada bulan-bulan Maret, April, Mei 1998 dalam kaitannya dengan aksi mahasiswa. Wartawan melalui pilihan modalitas izin *bisa* mengindikasikan dua hal, yakni secara implisit menandai persetujuan terhadap demo mahasiswa di kampus dan menandai penolakan demo mahasiswa di luar kampus. Pemaknaan yang tercipta dengan adanya modalitas ini mengarahkan interpretasi pada pandangan-pandangan yang dipunyai oleh pihak pemerintah, yakni

demonstrasi mahasiswa hanya diizinkan di dalam kampus. Sebagai bahan pembandingan, berikut ini diberikan variasi pilihan modalitas izin untuk data yang sama.

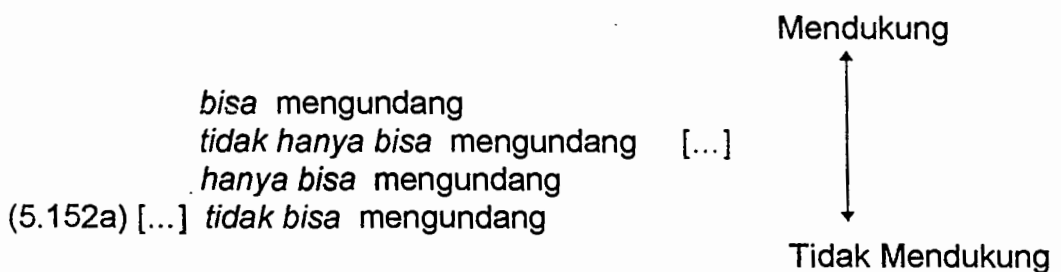


Pada (5.151a) terlihat bahwa di antara variasi modalitas izin yang lain, modalitas *bisa* dan variasinya *sangat bisa* secara implisit menunjukkan tingkat persetujuan wartawan yang tinggi terhadap aksi mahasiswa di kampus, dan sebaliknya, secara implisit juga menunjukkan tingkat penolakan yang tinggi wartawan terhadap aksi mahasiswa di luar kampus. Interpretasi ini menuntun pada inferensi perspektif pemberitaan yang tercipta, yakni perspektif pro pemerintah.

Dan terakhir, data (5.152) berikut ini juga mengukuhkan inferensi pada data (5.151) bahwa pilihan modalitas izin menandai perspektif pemberitaan di dalam kalimat.

(5.152) [...] mahasiswa *tidak bisa* mengundang Sidang Istimewa MPR [...]. (III.©.16)

Pada (5.152), pilihan modalitas *tidak bisa* oleh wartawan merupakan hasil interpretasinya terhadap kondisi dan situasi sistem politik di Indonesia pada zaman Orde Baru. Wartawan melalui pilihan modalitas *tidak bisa* secara implisit myakini bahwa Sidang Istimewa MPR hanya dapat dilakukan atas permintaan fraksi-fraksi di DPR dan bukan oleh mahasiswa. Pemaknaan yang tercipta dengan adanya modalitas ini mengarahkan interpretasi pada pandangan pihak pemerintah, yakni mahasiswa sebaiknya menyalurkan aspirasinya, yang berupa tuntutan reformasi, kepada wakil-wakilnya di DPR. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini diberikan variasi pilihan modalitas izin untuk data yang sama.



Pada (5.152a) terlihat bahwa di antara variasi modalitas izin yang lain, modalitas *tidak bisa* secara implisit menunjukkan tingkat persetujuan wartawan yang tinggi terhadap proposisi *Sidang Istimewa MPR hanya dapat dilakukan atas permintaan fraksi-fraksi di DPR dan bukan oleh mahasiswa*, dan sebaliknya, secara implisit juga menunjukkan tingkat penolakan yang tinggi wartawan terhadap *aksi mahasiswa di luar aturan itu*. Interpretasi ini menuntun



pada inferensi perspektif pemberitaan yang tercipta, yakni perspektif pro pemerintah.

5.3.6.4 Modalitas Keinginan

Dengan modalitas keinginan, wartawan mengindikasikan persetujuan atau ketidakpersetujuannya terhadap keadaan atau hal dalam proposisi yang dikomunikasikan. Kata-kata modalitas yang digunakan adalah *ingin*, *mau*, dan *akan*, yang mungkin juga divariasikan dengan kata modalitas lain, seperti *sangat*, *kurang*, *hanya*, *tidak*, *tak*, dan sebagainya. Contoh untuk hal ini dapat dilihat dalam kalimat (5.153) berikut:

(5.153) Kelompok ini berpikir dan *ingin* menyampaikan aspirasinya melalui tangga-tangga yang benar. (III.(c).17)

Pada (5.153), pilihan modalitas *ingin* oleh wartawan merupakan hasil interpretasinya berdasarkan pengamatan atas perilaku kelompok mahasiswa tertentu yang disebutnya moderat. Wartawan melalui pilihan modalitas *ingin* mengindikasikan evaluasinya yang positif terhadap kelompok mahasiswa ini dibandingkan dengan kelompok mahasiswa lainnya yang bersifat radikal. Cara yang ditempuh kelompok mahasiswa ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak pemerintah, yakni menyampaikan aspirasi melalui wakil-wakil rakyat di DPR dan tidak melalui cara parlemen jalanan. Dengan demikian pilihan modalitas ini dapat diinferensikan menandai perspektif pemberitaan yang pro pemerintah.

Berbeda dengan data (5.153), pada data (5.154) pilihan modalitas *akan* mengindikasikan perspektif pemberitaan yang netral.

(5.154) Komnas HAM *akan* menemui Pangab untuk mengusut kasus ini segera. (III.(c).14)

Pada (5.153), pilihan modalitas *akan* oleh wartawan memperlihatkan keinginan salah satu partisipan dalam proposisi untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan partisipan lainnya. Modalitas ini dalam kaitannya dengan proposisi dalam (5.154) tidak memperlihatkan indikasi atau kecenderungan pemihakan pada pihak-pihak tertentu yang dapat diinferensikan menandai perspektif pemberitaan tertentu. Partisipan *Komnas HAM* dalam konteks ini adalah pihak yang netral. Oleh karena itu, apa yang ingin dilakukannya tidak menandai perspektif pemberitaan, baik pro pemerintah maupun pro mahasiswa, melainkan netral.

Berbeda dengan dua data di atas yang menggunakan modalitas keinginan *ingin* dan *akan*, data (5.155) berikut memperlihatkan penggunaan pilihan modalitas keinginan *mau* dan variasinya.

(5.155) Mereka *tidak mau* berdialog dengan ABRI. (III.(c).18)

Pada (5.155), pilihan modalitas *tidak mau* oleh wartawan merupakan hasil interpretasinya berdasarkan pengamatan atas perilaku kelompok mahasiswa tertentu yang oleh Pemerintah Orde Baru disebut sebagai kelompok radikal. Wartawan melalui pilihan modalitas *tidak mau* mengindikasikan evaluasinya

yang negatif terhadap kelompok mahasiswa ini dibandingkan dengan kelompok mahasiswa lainnya yang bersifat moderat. Cara yang ditempuh kelompok mahasiswa ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak pemerintah, yakni mau berdialog dan tidak perlu turun ke jalan. Dengan demikian pilihan modalitas ini dapat diinferensikan menandai perspektif pemberitaan yang pro pemerintah.

5.3.7. Struktur Nominalisasi

Manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam struktur nominalisasi dapat diidentifikasi dalam subjek kalimat (5.156) berikut ini.

(5.156) *Penangkapan* para mahasiswa Unida tersebut berdasarkan keterangan 15 saksi yang terdiri atas mahasiswa Unida, karyawan Unida, dan anggota masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut. (III.(e).2)

Pemilihan kata *penangkapan* pada kalimat (5.156) sebagai elemen pengisi subjek membawa dua konsekuensi sintaktis, yakni (1) ada pengalihan penonjolan atau fokus perhatian dari partisipan ke tindakan yang dilakukan oleh partisipan, dan (2) ada aspek tertentu dari proposisi yang diabaikan dalam konstruksi.

Pertama, pengalihan penonjolan atau fokus perhatian yang dimaksud di atas dapat dibuktikan dengan analisis terhadap variasi struktur kalimat (5.156a) dan (5.156b) berikut ini.

(5.156a) Para mahasiswa Unida tersebut *ditangkap* [oleh aparat keamanan] berdasarkan keterangan 15 saksi yang terdiri atas

mahasiswa Unida, karyawan Unida, dan anggota masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut

- (5.157b) [Aparat keamanan] *menangkap* para mahasiswa Unida tersebut berdasarkan keterangan 15 saksi yang terdiri atas mahasiswa Unida, karyawan Unida, dan anggota masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut.

Aspek yang ditonjolkan pada kedua kalimat ini adalah partisipan *para mahasiswa Unida tersebut* (5.156a) dan *aparat keamanan* (5.156b). Ketika verba kedua kalimat ini dinominalisasikan dan difungsikan sebagai subjek kalimat menjadi *penangkapan* (5.156), maka penonjolan atau fokus kalimat beralih dari partisipan pelaku atau tujuan ke proses tindakan yang dilakukan oleh partisipan. Dalam hal ini proses tindakan yang dimaksud adalah tindakan dalam menangkap para mahasiswa.

Kedua, aspek yang diabaikan dalam proposisi adalah partisipan yang terkait dengan proses tersebut, yakni pelaku penangkapan yang berupa *aparat keamanan*. Pelaku dalam kalimat (5.156) oleh wartawan diyakini sudah dapat diketahui oleh pembaca berdasarkan *pengetahuan tentang dunia* yang dimilikinya. Oleh karena itu, partisipan pelaku dipandang tidak perlu dimunculkan secara formal atau diabaikan saja keberadaannya dalam kalimat.

Kalimat (5.157) berikut ini juga memperlihatkan fenomena yang sama seperti kalimat (5.156) di atas.

- (5.157) Sebelum *pemeriksaan* Margiono, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi ahli. (III.(e).4).

Seperti halnya kasus pada kalimat (5.156) di atas, pemilihan kata *pemeriksaan* pada kalimat (5.157) sebagai elemen pengisi subjek membawa beberapa konsekuensi, yakni (1) ada pengalihan penonjolan atau fokus penekanan dari partisipan ke proses tindakan yang dilakukan oleh partisipan, dan (2) ada aspek tertentu dari proposisi yang diabaikan dalam konstruksi.

Pertama, pengalihan atau penonjolan fokus penekanan yang dimaksud di atas dapat dibuktikan dengan analisis terhadap variasi struktur kalimat (5.157a) dan (5.157b) berikut ini.

(5.157a) Sebelum Margiono *diperiksa* [...], pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi ahli. (III.(e).4).

(5.157b) Sebelum [...] *memeriksa* Margiono, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi ahli. (III.(e).4).

Aspek yang ditonjolkan pada kedua kalimat ini adalah partisipan tujuan *Margiono* (5.157a) dan partisipan pelaku *aparat keamanan* (tidak dimunculkan) (5.157b). Ketika verba kedua kalimat ini dinominalisasikan dan difungsikan sebagai subjek kalimat menjadi *pemeriksaan* (5.157), maka penonjolan atau fokus kalimat beralih dari partisipan pelaku atau tujuan ke proses tindakan yang dilakukan oleh partisipan. Dalam hal ini proses tindakan yang dimaksud adalah tindakan dalam memeriksa Margiono.

Kedua, aspek yang diabaikan dalam proposisi adalah partisipan yang terkait dengan proses tersebut, yakni pelaku pemeriksaan yang berupa *aparat*

keamanan. Pelaku dalam kalimat (5.157) oleh wartawan diyakini sudah dapat diketahui oleh pembaca berdasarkan *pengetahuan tentang dunia* yang dimilikinya, bahwa pihak yang dapat memeriksa seseorang hanyalah *aparatus keamanan* atau *polisi*. Oleh karena itu, partisipan pelaku dipandang tidak perlu dimunculkan secara formal atau diabaikan saja keberadaannya dalam kalimat.

Dari indikator yang pertama pada analisis kalimat (5.156) dan (5.157), yakni pengalihan penonjolan atau fokus perhatian dari partisipan ke proses tindakan, dapat ditafsirkan sebagai upaya wartawan untuk mereduksi penonjolan terhadap partisipan tertentu. Dari indikator yang kedua pada analisis kalimat (5.156) dan (5.157), penghilangan partisipan pelaku lebih didasarkan pada alasan bahwa partisipan tersebut sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya atau sudah dapat dipahami dari konteks yang tersedia, dan bukan oleh alasan yang didorong motif-motif tertentu. Berdasarkan dua indikator ini, dapat disimpulkan bahwa perspektif pemberitaan yang dikodekan dalam struktur nominalisasi pada (5.156) dan (5.157) adalah perspektif netral.

Kalimat (5.158) berikut juga memperlihatkan fenomena manifestasi perspektif pemberitaan dalam struktur nominalisasi seperti dua kalimat sebelumnya, akan tetapi perspektif pemberitaan yang terbentuk adalah perspektif pro pemerintah.

(5.158) *Pemberitaan* pers seringkali dengan interpretasi yang tidak tepat dan gambaran yang salah. (III.(e).3)

Pemilihan kata *pemberitaan* pada kalimat (5.158) sebagai elemen pengisi subjek membawa beberapa konsekuensi, yakni (1) ada pengalihan penonjolan atau fokus penekanan dari partisipan ke proses tindakan yang dilakukan oleh partisipan, dan (2) ada aspek tertentu dari proposisi yang diabaikan dalam konstruksi.

Pertama, pengalihan penonjolan atau fokus penekanan yang dimaksud di atas dapat dibuktikan dengan analisis terhadap variasi struktur kalimat (5.158a) dan (5.158b) berikut ini.

(5.158a) Pers seringkali memberitakan [...] dengan interpretasi yang tidak tepat dan gambaran yang salah. (III.(e).3)

(5.158b) [...] seringkali diberitakan oleh pers dengan interpretasi yang tidak tepat dan gambaran yang salah

Aspek yang ditonjolkan pada kedua kalimat ini adalah partisipan pelaku *pers* (5.158a) dan partisipan tujuan *kebijakan pemerintah* (tidak dimunculkan karena sudah disebutkan dalam kalimat sebelumnya) (5.158b). Ketika verba kedua kalimat ini dinominalisasikan dan difungsikan sebagai subjek kalimat menjadi *pemberitaan* (5.158), maka penonjolan atau fokus kalimat beralih dari partisipan pelaku atau tujuan ke proses tindakan yang dilakukan oleh partisipan. Dalam hal ini proses tindakan yang dimaksud adalah tindakan dalam memberitakan (kebijakan pemerintah).

Kedua, aspek yang diabaikan dalam proposisi adalah partisipan yang terkait dengan proses tersebut, yakni partisipan tujuan yang berupa *kebijakan*

pemerintah. Partisipan tujuan dalam kalimat (5.158) oleh wartawan diyakini sudah dapat diketahui oleh pembaca karena sudah disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, partisipan tujuan dipandang tidak perlu dimunculkan secara formal atau diabaikan saja keberadaannya dalam kalimat (5.158).

Berbeda dengan dua kalimat sebelumnya (5.156) dan (5.158), keterangan yang berkaitan dengan proses tindakan dalam (5.158), yang berupa *dengan interpretasi yang tidak tepat dan gambaran yang salah* sangat menentukan perspektif pemberitaan yang terbentuk. Apabila tanpa keterangan ini, maka perspektif pemberitaan kalimat (5.158) adalah perspektif netral karena struktur nominalisasi bersifat mereduksi penonjolan pada partisipan. Akan tetapi dengan kehadiran keterangan yang berkaitan dengan proses tindakan itu, maka perspektif pemberitaan yang terbentuk adalah perspektif pro pemerintah. Keterangan *dengan interpretasi yang tidak tepat dan gambaran yang salah* merupakan penilaian Presiden Soeharto atau pihak Pemerintah Orde Baru.

Berdasarkan analisis terhadap kalimat (5.156)-(5.158) dan analisis data dalam Lampiran 18 dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, perspektif pemberitaan dapat ditandakan melalui struktur nominalisasi dengan cara mereduksi penonjolan pada partisipan pelaku atau tujuan ke proses tindakan yang dilakukan oleh partisipan. Perspektif yang terbentuk dengan

cara ini cenderung perspektif netral. Kedua, apabila di dalam kalimat terdapat keterangan yang berkaitan dengan proses tindakan, maka keterangan tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya perspektif pemberitaan, seperti kasus pada kalimat (5.158).

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini disajikan dua hal, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait dengan hasil-hasil penelitian dalam menjawab masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, saran terkait dengan implikasi lebih lanjut hasil-hasil penelitian ini baik pada secara teoritis maupun secara praktis.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasannya dapat disimpulkan butir-butir temuan penelitian yang meliputi (1) perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru, (2) manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru ke dalam SPI, dan (3) manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru ke dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa.

6.1.1 Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru

Perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru yang ditemukan dalam teks-teks berita sumber data adalah perspektif pro pemerintah, perspektif pro mahasiswa, dan perspektif netral. Perspektif pro

pemerintah adalah sudut pandangan dalam melihat dan melaporkan suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide, dan pandangan pemerintah. Perspektif pro mahasiswa adalah sudut pandangan dalam melihat dan melaporkan suatu peristiwa yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan, ide-ide, dan pandangan dari mahasiswa, serta pihak-pihak yang anti pemerintah, yang mendapatkan bentuk dan penyaluran dalam gerakan reformasi mahasiswa Indonesia. Dan terakhir, perspektif netral adalah sudut pandangan dalam melihat dan melaporkan suatu peristiwa yang didasari oleh sikap wartawan yang akomodatif dan netral terhadap semua pihak yang terlibat konflik dalam wacana berita, yakni pemerintah di satu sisi dan mahasiswa atau pihak yang anti pemerintah di sisi lain. Ketiga perspektif ini digunakan secara bervariasi oleh surat kabar sumber data untuk memberitakan peristiwa sosial politik yang terjadi pada akhir era Orde Baru, yakni antara bulan Maret hingga Mei 1998.

Surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* cenderung lebih menggunakan perspektif pro pemerintah dalam memberitakan peristiwa sosial politik. Sementara itu, dua surat kabar yang lain, *Kompas* dan *Republika* cenderung merata dalam menggunakan ketiga perspektif itu. Kecenderungan-kecenderungan yang diperlihatkan oleh dua kelompok surat kabar ini dipengaruhi oleh konteks institusional, konteks ideologis, dan konteks budaya, yang melatarbelakanginya.

(1) Konteks Institusional

Dilihat dari konteks institusional, surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* memiliki keterkaitan organisatoris dengan Pemerintahan Orde Baru. Surat kabar *Suara Karya* lahir dari kalangan ormas Golkar dan birokrasi Pemerintah Orde Baru. Sementara itu, surat kabar *Angkatan Bersenjata* lahir dari kalangan militer Indonesia, terutama Angkatan Darat (AD). Pada masa Pemerintahan Orde Baru, kalangan ormas Golkar, birokrasi pemerintahan, dan militer adalah tiga unsur atau tiga "pilar" penyangga Pemerintahan Orde Baru. Ketiga unsur tersebut "membidani" lahirnya dua surat kabar ini dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan komunikasi politik di Indonesia terhadap informasi-informasi sepihak yang berasal dari pers asing maupun pers non-pemerintah, termasuk di dalamnya tujuan sebagai pengutara segala kebijakan Pemerintah Orde Baru.

Selanjutnya, dua surat kabar yang lain, yakni *Kompas* dan *Republika* memiliki konteks institusional yang berbeda dengan dua surat kabar terdahulu. Secara umum kedua surat kabar ini tidak memiliki keterkaitan organisatoris dengan elemen-elemen pendukung Pemerintahan Orde Baru. *Kompas* dan *Republika* lahir dari basis massa keagamaan yang berbeda, yakni Katolik dan Islam, yang tidak berafiliasi politis pada Pemerintah Orde Baru. Surat kabar *Kompas* menurut Aditjondro (1991:23) berada di bawah kelompok usaha Kompas Gramedia yang dimiliki oleh Yayasan Pers Katolik. Sementara itu,

surat kabar *Republika* menurut Hutabarat (1993) berada di bawah kelompok usaha PT Abdi Bangsa yang dimiliki oleh Yayasan Abdi Bangsa dan umat Muslim Indonesia. Dengan demikian, kedua surat kabar ini lebih independen, baik dalam visi dan misi, manajemen, dan keuangannya daripada surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata*. Latar belakang konteks institusional yang lebih independen ini mempengaruhi kecenderungan dalam penyajian berita, khususnya dalam penggunaan perspektif pemberitaan.

(2) Konteks Ideologis

Dilihat dari konteks ideologis, keempat surat kabar sumber data sebagai bagian dari pers Indonesia berada dalam ideologi dan pandangan kenegaraan, serta sistem politik Orde Baru, yakni Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yang dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru adalah pancasila yang ditafsirkan sedemikian rupa berdasarkan atas dua keyakinan terhadap paham pembangunanisme dan dwi-fungsi ABRI.

Paduan dua paham ini kemudian mewarnai karakteristik Pers Indonesia yang dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru, yakni pers yang memosisikan dan memfungsikan dirinya sebagai pers pembangunan yang selalu mengamalkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat. Selain itu, pers juga menjunjung tinggi stabilitas di segala bidang sebagai syarat mutlak suksesnya pembangunan nasional.

Surat kabar *Suara Karya*, *Angkatan Bersenjata*, *Kompas*, dan *Republika* sudah tentu diwarnai dan dipengaruhi oleh sistem yang berlaku pada saat itu. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 terlihat bahwa pengaruh ideologi Pancasila versi Orde Baru pada surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* dalam melihat, menginterpretasikan, dan melaporkan peristiwa sosial politik sangat besar. Sebaliknya, pada surat kabar *Kompas* dan *Republika* pengaruh itu tetap ada namun tidak sebesar surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata*. Dalam hal ini tingkat "kewajiban" dalam mengamalkan dan menyebarkan ideologi Pancasila versi Orde Baru oleh surat kabar *Kompas* dan *Republika* tidak sebesar surat kabar *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata*. Perbedaan dalam tingkat kewajiban ini dilatarbelakangi oleh perbedaan tingkat dependensi antara dua kelompok surat kabar ini pada Pemerintah Orde Baru.

(3) Konteks Budaya

Dilihat dari konteks budaya, keempat surat kabar sumber data sebagai bagian dari pers Indonesia berada dalam dominasi nilai-nilai budaya Jawa yang menjadi dasar dalam sistem komunikasi politik Indonesia. Beberapa nilai budaya yang dimaksud adalah keseimbangan (*equilibrium*), paternalistik, dan pola ungkap atau ekspresi tidak langsung.

Berkaitan dengan ketiga nilai budaya ini, fenomena kecenderungan perspektif pemberitaan yang tampak pada surat kabar *Suara Karya* dan

Angkatan Bersenjata di satu pihak dan kecenderungan yang tampak pada surat kabar *Kompas* dan *Republika* di pihak lain, dapat dijelaskan latar belakangnya. *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata* sebagai surat kabar yang berafiliasi politis pada Pemerintah Orde Baru memiliki kewajiban untuk mendukung segala pemikiran dan tindakan politik Pemerintah Orde Baru yang dilandasi oleh nilai-nilai keseimbangan, paternalistik, dan pola ungkap tidak langsung. Sebaliknya, *Kompas* dan *Republika* walaupun terikat dengan sistem yang berlaku dalam kehidupan pers Indonesia, namun tingkat keterikatan dan tingkat kewajibannya berbeda dengan *Suara Karya* dan *Angkatan Bersenjata*. Implikasi lebih lanjut adalah kedua surat kabar ini mulai terlihat berani menunjukkan kecenderungan untuk kritis, untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa dan rakyat, untuk mengarahkan pemberitaan pers pada gaya *bottom up*, dan menggunakan pola ungkap atau ekspresi yang lugas dan tegas, serta menggunakan bentuk-bentuk langsung untuk mengkritik dan berbeda pendapat dengan pemerintah.

Kecenderungan yang ditampakkan oleh *Kompas* dan *Republika* ini dipengaruhi oleh adanya perubahan sistem sosial budaya yang dipicu oleh gerakan mahasiswa Indonesia dalam menuntut reformasi yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998. Sistem sosial budaya seperti keseimbangan (*equilibrium*), paternalistik, dan pola ungkap atau ekspresi tidak langsung, yang

dikembangkan oleh Pemerintahan Orde Baru secara perlahan namun pasti mulai ditinggalkan.

6.1.2 Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru ke dalam SPI

Surat kabar yang diteliti memperlihatkan manifestasi perspektif pemberitaan di dalam SPI. Hal ini secara jelas dapat dibuktikan dari hasil analisis terhadap bagian judul berita, pilihan tematik berita, struktur tematik berita, dan penahapannya.

Dalam judul berita, manifestasi perspektif pemberitaan itu dapat diketahui secara formal dari sistem ketransitifan, pilihan modalitas, struktur nominalisasi, pilihan kata, tindak tutur, dan pemakaian metafora yang dipergunakannya. Keenam piranti bahasa ini, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan, dengan caranya masing-masing menandakan perspektif pemberitaan.

Dalam pilihan tematik berita, manifestasi perspektif pemberitaan itu dapat diketahui dengan mengungkap unsur berita apakah yang ditonjolkan atau yang dijadikan titik tolak pemberitaannya. Disamping itu, manifestasi perspektif pemberitaan itu juga dapat diketahui dengan mengungkapkan sikap apakah yang diberikan wartawan terhadap unsur berita itu. Dari dua indikator itu, akhirnya ditemukan adanya empat variasi pola penyajian tema berita yang digunakan untuk memanifestasikan perspektif pemberitaan. Keempat pola

yang dimaksud adalah pola [*Who* ← (*Favorable, Unfavorable, Netral*)], pola [*What* ← (*Favorable, Unfavorable, Netral*)], pola [*Who*¹ → (*Favorable, Unfavorable, Netral*) → *Who*²], dan pola [*Who* → (*Favorable, Unfavorable, Netral*) → *What*]. Pada keempat pola ini perspektif pemberitaan ditandakan.

Dalam struktur tematik berita, manifestasi perspektif pemberitaan itu dapat diketahui dari rentetan topikalisasi yang dikembangkan pada setiap kalimat dalam masing-masing paragraf. Rentetan topik tersebut memberi rangka struktural pengembangan berita dan sekaligus menandai area topik secara keseluruhan dalam wacana berita. Dengan rentetan topikalisasi tersebut, hanya informasi tertentu saja dari peristiwa yang dilaporkan, yang mendukung perspektif pemberitaan, yang dapat masuk dalam pemberitaan. Dari indikator ini ditemukan tiga pola struktur tematik berita, yakni pola struktur tematik frase nominal pengisi subjek gramatikal, pola struktur tematik paduan frase nominal pengisi subjek gramatikal dan frase preposisional keterangan waktu, dan pola struktur tematik paduan frase nominal pengisi subjek gramatikal dan frase preposisional keterangan tempat. Pada ketiga pola inilah manifestasi perspektif pemberitaan ditandakan.

Selanjutnya dalam penahapan wacana berita, manifestasi perspektif pemberitaan dapat diketahui dari pengembangan dan pengaturan informasi secara linier, dan dari penonjolan aspek-aspek tertentu dalam rangkaian informasi, serta dari pereduksian atau pengimplisitan aspek-aspek tertentu dari

rangkaian informasi dalam wacana berita. Dari indikator pengembangan dan pengaturan informasi secara linier dihasilkan apa yang disebut sebagai penyajian urutan wajar dan penyajian urutan tidak wajar. Urutan kronologis maupun tidak kronologis dalam hal ini dapat dimanipulasikan untuk kepentingan membangun perspektif pemberitaan. Dari indikator penonjolan aspek-aspek tertentu dalam wacana dihasilkan apa yang disebut penyajian urutan umum-khusus. Urutan umum-khusus dapat diarahkan untuk membentuk perspektif tertentu. Perspektif yang sudah ditandakan dalam informasi umum kemudian ditekankan lebih lanjut dalam informasi-informasi khusus. Jalinan hubungan informasi umum dan khusus ini secara jelas menampakkan perspektif pemberitaan tertentu. Dan terakhir, dari indikator pereduksian atau pengimplisitan aspek-aspek tertentu ditemukan penyajian secara implisit dan eksplisit dalam penahapan. Perspektif dalam wacana dapat dengan mudah dibentuk melalui penyajian informasi tertentu secara samar, tidak jelas, atau minimal. Dan sebaliknya, pada aspek lain, informasi disajikan secara gamblang, lugas, lengkap, atau bahkan diulang-ulang. Cara penyajian seperti ini menampakkan secara jelas perspektif pemberitaan. Dengan kelima pola penyajian dalam penahapan inilah perspektif pemberitaan terlihat kuat ditandakan dalam wacana berita.

6.1.3 Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru ke dalam Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa

Surat kabar yang diteliti memperlihatkan manifestasi perspektif pemberitaan di dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa dalam tataran kalimat, klausa, frase, ataupun kata. Hal ini secara jelas dapat dibuktikan dari hasil analisis terhadap sistem ketransitifan, tindak tutur yang diimplikasikan, pilihan kata, pilihan modalitas, struktur nominalisasi, struktur informasi, dan metafora yang terdapat dalam data-data penelitian.

Dalam sistem ketransitifan, manifestasi perspektif pemberitaan dapat diketahui dari proses-proses ketransitifan yang dimunculkan, seperti proses material, proses mental, dan proses verbal. Masing-masing proses ini menekankan aspek-aspek tertentu yang dapat menandakan perspektif pemberitaan. Dari proses material, hal yang ditekankan dari pemberitaan adalah perbuatan dan kejadian. Dari proses mental, hal yang mendapat perhatian dalam pemberitaan adalah apa yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan tertentu. Dan terakhir, dari proses verbal, yang ditonjolkan adalah apa yang diutarakan oleh partisipan tertentu dalam pemberitaan.

Dengan tindak tutur, manifestasi perspektif pemberitaan dapat diketahui dari makna lokusi, ilokuasi, dan perlokusi yang dihasilkan oleh konteks dalam teks berita. Perspektif pemberitaan dalam hal ini dapat terkodekan secara

langsung dalam makna lokusi, atau perlu ditafsirkan dari makna ilokusi dan makna perlokusi.

Melalui pilihan kata, manifestasi perspektif pemberitaan dapat diketahui dengan mengungkap fitur-fitur nilai yang ditandakan, seperti eksperiental, relasional, dan ekspresif. Dari nilai eksperiental pada kata dapat ditafsirkan pandangan, pengetahuan, dan keyakinan yang ingin diperlihatkan dalam pemberitaan. Dari nilai relasional pada kata dapat ditafsirkan hubungan-hubungan sosial antar partisipan yang ingin dinyatakan dalam pemberitaan. Dan terakhir, dari nilai ekspresif pada kata dapat ditafsirkan penilaian atau evaluasi atas identitas sosial dari partisipan dalam pemberitaan. Masing-masing nilai yang tersirat ataupun tersuratkan pada pilihan kata itu mengkodekan perspektif pemberitaan yang dibangun.

Melalui modalitas yang dipergunakan dalam kalimat, manifestasi perspektif pemberitaan dapat diketahui dari sikap surat kabar terhadap partisipan atau peristiwa yang dilaporkan. Sikap tersebut mencerminkan pengetahuan, gagasan, dan keyakinan yang dianut atau diyakini, yang terekspresikan dalam modalitas kebenaran, keharusan, dan keinginan.

Dengan struktur nominalisasi, manifestasi perspektif pemberitaan dapat dikaji berdasarkan orientasi kalimat pada proses dan penyamaran partisipan-partisipan tertentu dalam kalimat. Struktur nominalisasi dengan menderivasi

verba pengisi predikat menjadi nomina dan mengedepankannya dalam posisi subjek merupakan salah satu cara untuk mengkodekan perspektif pemberitaan.

Dengan struktur informasi, manifestasi perspektif pemberitaan dapat dilihat dalam penempatan unsur berita tertentu sebagai informasi latar dan unsur lainnya sebagai informasi baru. Penempatan unsur-unsur berita tertentu sebagai informasi latar atau baru dapat dimanipulasi untuk kepentingan menandakan perspektif pemberitaan.

Dan terakhir, dalam metafora, manifestasi perspektif pemberitaan dapat diketahui dari analogi yang dipilih untuk partisipan tertentu atau peristiwa tertentu dalam kalimat. Analogi-analogi tersebut bukan hanya sekedar menggambarkan perbandingan satu unsur dengan unsur yang lain, melainkan mencerminkan suatu penilaian, baik itu bersifat *favorable*, *unfavorable*, maupun *netral* terhadap unsur yang diperbandingkan itu.

6.2 Saran-Saran

Pada bagian ini diberikan saran-saran berkaitan dengan implikasi lebih lanjut dari temuan-temuan penelitian. Implikasi tersebut berkaitan dengan hal yang bersifat teoritis maupun praktis. Hal tersebut meliputi (1) pengembangan bidang sosiopolitikolinguistik, (2) pengembangan teori perspektif dalam wacana, (3) penelitian lanjutan, (4) pengembangan bahasa Indonesia ragam Jurnalistik, (5) pengajaran Jurnalistik, dan pembinaan penulisan berita.

6.2.1 Pengembangan Sosiopolitikolinguistik

Sosiopolitikolinguistik atau dikenal juga dengan sebutan linguistik kritis adalah suatu bidang khusus dari sosiolinguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan. Bidang ini relatif masih baru dan belum banyak mendapat perhatian secara memadai oleh para linguis Indonesia, khususnya sosiolinguis dan analisis wacana. Selama ini pengembangan bidang ini cenderung didominasi oleh pakar-pakar bidang politik maupun komunikasi. Akibatnya adalah tulisan-tulisan maupun penelitian-penelitian bidang sosiopolitikolinguistik lebih banyak memperlihatkan nuansa bidang politik maupun komunikasi daripada bidang bahasa. Bidang bahasa tampak tidak terolah dan tidak tersentuh secara substansial dalam kajian antardisipliner ini.

Dari bidang linguistik sendiri, minat terhadap kajian sosiopolitiko-linguistik atau linguistik kritis masih sangat rendah. Banyak ahli bahasa Indonesia yang lebih menyukai kajian bahasa yang bercirikan "bebas konteks", seperti kebanyakan kajian-kajian model Amerika dengan strukturalismenya dan Chomskianismenya dari pada kajian bahasa yang mengikuti tradisi "peka konteks" seperti yang dikembangkan Firth dan Halliday. Kajian terhadap bahasa yang bercirikan "peka konteks" inilah yang menjadi "embrio" lahirnya kajian sosiopolitikolinguistik.

Bidang sosiopolitikolinguistik ini perlu dikembangkan karena alasan-alasan berikut ini. Pertama, kajiannya yang bersifat multidisipliner tersebut dapat memberikan pemahaman yang luas dan komprehensif terhadap fenomena-fenomena sosial politik yang terjadi di masyarakat daripada kajian yang hanya berdasarkan pada satu disiplin ilmu. Kedua, kompleksitas permasalahan sosial politik yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya komunikasi politik melalui media massa pada tahun 2000-an, menuntut pengkajian secara multidisipliner (linguistik, sosiologi politik, komunikasi) untuk menemukan solusi yang tepat. Ketiga, sudah waktunya linguistik memperlihatkan peranannya yang nyata dalam pemecahan masalah-masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi politik di Indonesia.

Dalam penelitian *Manifestasi Perspektif Pemberitaan Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru ke dalam Bahasa* ini, kajian sosiopolitikolinguistik atau linguistik kritis terbukti mampu mengungkap (1) latar belakang ideologi yang mendasari terbentuknya suatu perspektif pemberitaan surat kabar, dan (2) manifestasi perspektif pemberitaan ke dalam kode-kode bahasa, sistem atau struktur bahasa, baik dalam tataran wacana, sintaksis, maupun struktur leksikal. Sehingga berdasarkan temuan-temuan penelitian ini dapat dikembangkan sosiopolitikolinguistik dan sosiopolitikopragmatik Indonesia. Selain itu, dapat juga diberikan verifikasi tentang adanya pengaruh

ideologi dan kekuasaan dalam penggunaan bahasa media massa, khususnya surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru.

6.2.2 Pengembangan Studi Perspektif dalam Wacana Berita

Temuan penelitian ini berupa teori perspektif dalam wacana berita Indonesia. Teori ini dikembangkan dengan mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Renkema (1993) dalam studi wacana, khususnya pendekatan visi dan bukan pendekatan fokalisasi maupun empati.

Temuan penelitian pada kasus pemakaian bahasa Indonesia ragam jurnalistik pada masa akhir Era Orde Baru ini dapat dipergunakan untuk melengkapi khasanah studi perspektif dalam wacana berita, seperti studi yang dilakukan Renkema (1993), Fowler (1991), Lee (1992), dan Teun van Dijk (1987; 1988). Teori perspektif yang dikembangkan ini tidak hanya terbatas dalam tataran sintaksis dan struktur leksikal saja, seperti kebanyakan studi perspektif yang sudah ada, namun juga pada tataran wacana dengan memanfaatkan kajian-kajian bidang semantik dan pragmatik.

6.2.3 Pengembangan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik

Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Bahasa Indonesia ragam jurnalistik, di samping ragam-ragam lain, seperti ragam akademik, ragam sastra, ragam bisnis, dan ragam filsafat (lihat Sudaryanto, 1995) perlu untuk dikembangkan karena bahasa ragam ini ada di masyarakat, memiliki masyarakat penutur, dan

digunakan oleh masyarakat penuturnya, yakni wartawan dan pembaca, untuk mengkomunikasikan berita. Di samping itu, seperti layaknya bahasa-bahasa ragam lain, bahasa jurnalistik juga mengalami dinamika perkembangan.

Agar bahasa jurnalistik ini terus berkembang dan tidak mengalami kemandegan atau kemunduran, bahasa jurnalistik perlu “dipelihara” dan direkayasa. Salah satu bentuk “pemeliharaan” dan perekayasaan terhadap bahasa jurnalistik adalah dengan melakukan penelitian.

Temuan penelitian ini merupakan suatu deskripsi yang komprehensif tentang salah satu aspek dari bahasa jurnalistik, yakni fenomena perspektif dalam strategi penyajian informasi pada tataran wacana dan dalam bentuk-bentuk ekspresi bahasa pada tataran kalimat, frase, dan kata. Temuan-temuan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu masukan untuk perencanaan, pembenahan, maupun rekayasa bahasa jurnalistik.

6.2.4 Penelitian Lanjutan

Penelitian bidang bahasa dalam hubungannya dengan kekuasaan, ideologi, dan media massa dengan menggunakan kajian sosiopolitikolinguistik belum begitu banyak. Pendekatan dan hasil-hasil penelitian atas kasus fenomena perspektif pemberitaan dalam surat kabar Indonesia pada akhir era Orde Baru ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi analis wacana, sosiolog, politikus, wartawan, dan ahli komunikasi untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam



media massa Indonesia, khususnya pada masa-masa awal reformasi Indonesia. Fenomena-fenomena seperti bergesernya pola komunikasi politik dari model *top down* ke model *bottom up* dalam media massa, tarik-menarik ideologi dalam media massa Indonesia, dan bergesernya ideologi Orde Baru ke ideologi partai seperti yang tercermin dalam bahasa media massa, merupakan beberapa hal yang cenderung menguat dalam media massa Indonesia pada awal tahun 2000 ini. Fenomena-fenomena seperti ini sangat tepat dikaji dengan memanfaatkan pendekatan scsiopolitikolinguistik atau linguistik kritis.

6.2.5 Pengajaran Jurnalistik dan Pembinaan Penulisan Berita

Temuan penelitian ini berupa deskripsi fenomena manifestasi perspektif pemberitaan: (1) di dalam struktur wacana berita, seperti perspektif dalam judul, pilihan tema, struktur tematik, dan penahapan (*staging*), dan (2) di dalam struktur kalimat atau klausa, seperti perspektif dalam sistem ketransitifan, struktur nominalisasi, modalitas, sistem tindak tutur, struktur informasi, serta (3) di dalam struktur leksikal seperti pilihan kata dan metafora. Temuan ini dapat dimanfaatkan oleh para pengajar jurnalistik maupun para wartawan surat kabar untuk mendukung profesi mereka masing-masing. Para pengajar jurnalistik dapat memanfaatkan temuan ini untuk melengkapi bahan ajar jurnalistiknya, terutama yang berkaitan dengan bahasa jurnalistik dan teknik penciptaan perspektif dengan SPI dan bentuk-bentuk ekspresi bahasa. Sementara itu, para wartawan dapat memanfaatkan temuan-temuan ini untuk meningkatkan

kualitas tulisan beritanya, terutama dalam kaitannya dengan strategi penyajian informasi di dalam judul berita, pilihan tematik berita, struktur tematik berita, dan *staging*; dan bentuk-bentuk ekspresi bahasa melalui ketransitifan, tindak tutur, struktur informasi, struktur nominalisasi, modalitas, pilihan kata, dan metafora.

Daftar Rujukan

- Aditjondro, George, 1993. *The Media as Development "Textbook": A Case Study on Information Distortion in The Debate about the Social Impact of Indonesian Dam*. Disertasi tidak diterbitkan. Cornell University.
- Ali, Novel. 1998. Pers Objektif, Media Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia: Komunikasi dan Demokratisasi*, Vol 1. Juli: 13-23.
- Anderson, Benedict. 1966. Bahasa Politik Indonesia. *Indonesia I*, April: 89-116.
- Assegaff, Dja'far H. 1982. *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*.: Oxford: Clarendon Press.
- Azca, M. Najib. 1998. *Hegemoni Tentara*. Yogyakarta: LKiS.
- Barthes, Roland. 1996. Unsur-Unsur Semiologi: Langue dan Parole. Dalam Sujiman dan Zoest (Eds.), *Serba-Serbi Semiotika* (hlm. 80-88). Jakarta: Gramedia.
- Best, John W. 1977. *Research in Education*. Englewood Cliffs, N.Y.: Prentice-Hall.
- Bogdan, R.D. dan S.K. Bikien. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon.
- Brown, G. dan George Yule. 1983. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clark, Herbert H. dan Eve V. Clark. 1977. *Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.
- Clement, P. 1979. The effect of staging on recall from prose, dalam R.O Freedle (ed.), *New Directions in Discourse Processing*. Norwood, N.J.: Ablex.

- Cohen, L. dan L. Monion. 1994. *Research Methods in Education*. London: Routledge.
- Connor, Ulla. 1996. *Contrastive Rethoric: Cross-cultural Aspect of Second Language Writing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coulthard, Malcolm. (Ed.) 1994. *Advances in Written Text Analysis*. London: Routledge.
- Craigh, Allern Smith. 1990. *Political Communication*. New York: Harcourt Brace Javanovich.
- Crystal, D. 1987. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Winthrop Publisher, Inc.
- De Fleur, Malvin L. dan Sandra Ball-Rokearch. 1982. *Theories of Mass Communication*. London: Longman.
- Dhakidae, Daniel. 1991. *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry*. Disertasi tidak diterbitkan. Cornell University.
- Dhakidae, Daniel. 1993. Negara dan Ekonomi Pers Indonesia, dalam Siahaan, Hotman M. dan Tjahjo Purnomo W. (Eds.), *Tajuk-Tajuk Dalam Terik Matahari* (hlm. 363-381). Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti.
- Dhakidae, Daniel. 1996. Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru, dalam Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (hlm. 246-251). Bandung: Penerbit Mizan.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Group UK.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis*. New York: Longman Publishing.
- Faizin, Muhammad. 1989. Berita-berita Luar Negeri dalam Koran-koran Indonesia Terpilih: Suatu Analisa Isi, dalam Don Michael Flournoy

(ed.). *Analisis Isi Surat Kabar-Surat kabar Indonesia* (hlm.213-246). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fowler, R., R. Hodge, G. Kress, dan T. Trew. 1979. *Language and Control*. London: Routledge & Kegan Paul.

Fowler, Roger. 1986. *Linguistic Criticism*. Oxford: Oxford University Press.

Fowler, Roger. 1991. *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. London: Routledge.

Garnham, Alan. 1985. *Psycholinguistics: Central Topics*. London: Methuen & Co. Ltd.

Glaser, B. dan A. Strauss. 1979. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Hawthorne, NY: Aldine.

Grimes, Joseph E. 1975. *The Thread of Discourse*. New York: Mouton Publishers.

Grimes, Joseph E. (ed.). 1980. *Papers on Discourse*. Santa Ana: Summer Institute of Linguistics, Inc.

Hall, Stuart. 1982. Culture, the Media and the Ideological Effect, dalam Curran, et all. *Mass Communication and Society* (hal. 329). London: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. 1978. *Language as Social Semiotics*. London: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. dan R. Hassan. 1985a. *Language, Context, dan Text*. Geelong, Victoria: Deakin University Press.

Halliday, M.A.K. 1985b. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. 1994. The construction of knowledge and value in the grammar of scientific discourse, with reference to Charles Darwin's *The Origin of Species*. Dalam Coulthard, Malcom (Ed.), *Advances in Written Text Analysis* (hlm. 136-156). London: Routledge.

- Hayakawa, S.I. dan Alan. R. Hayakawa. 1990. *Language In Thought and Action*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.
- Haryanto, Ariel, dkk. 1994. *Pers, Hukum, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Bentang.
- Hikam, Muhammad A.S. 1995. Bahasa dan Politik: Penghampiran *Discursive Practice*, dalam Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (eds.) *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. (hlm. 77-93). Bandung: Penerbit Mizan.
- Hill, Jane H. 1988. Language, Culture, and World-view, dalam Newmeyer, FJ (Eds.). *Language: The Socio-cultural Context*. (Hlm. 14-36). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hokker, Virginia Matheson. 1990. The New Standardization of Language. Dalam *Prisma: The Indonesian Indicator*. No.50. hlm. 54-72.
- Hokker, Virginia Matheson.(Ed.) 1995. *Culture and Society in New Order indonesia*.Oxford: Oxford University Press.
- Hutabarat, Saur. 1993. Kemandirian Pers dalam Era industri dan Kebudayaan Birokrasi, dalam Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnomo W. (eds). *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari: Empat Puluh tahun Surabaya Post*. (h.455-466). Surabaya: Surabaya Post.
- Kartomihardjo, Soeseno. 1992. *Analisis Wacana dan Penerapannya*. Naskah Pidato disajikan dalam pengukuhan Guru Besar IKIP Negeri Malang. Malang: IKIP Malang.
- Kartomihardjo, Soeseno. 1988. *Bahasa Cermin Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: P2LPTK.
- Kartosaputro, Ishadi Sutopo. 1989. Analisa Peliputan Berita Pembangunan, dalam Don Michael Flournoy (ed.). *Analisis Isi Surat Kabar-surat kabar Indonesia*. (hlm.65-100). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Keraf, Gorys. 1983. *Komposisi*. Flores: Arnoldus Ende.
- Kibrik, A.E. 1977. *The Methodology of Field Investigations in Linguistics*. Paris: The Houge.

- Koesworo, F.X., J.B. Margantoro, dan Ronnie S. Viko. 1994. *Di Balik Tugas Kuli Tinta*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Krampen, Martin. 1996. Ferdinand de Saussure dan Perkembangan Semiologi. Dalam Sujiman dan Zoest (Eds.), *Serba-Serbi Semiotika*. (hlm 55-63). Jakarta: Gramedia.
- Krisnawan, Y. 1997. *Pers Memihak Golkar? Suara Merdeka Dalam Pemilu 1992*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Kulsum, Ulmi, Kristianto, dan Purwantari. 1998, 17 Mei. Informasi Siapa yang Paling Dipercaya?. *Kompas*, hlm. 9.
- Kuno, S. dan E. Kaburaki. 1977. Empathy and Syntax. *Linguistic Inquiry* 8: hal. 627-672.
- Langenberg, Michael van. 1990. The New Order State: Language, Ideology, Hegemony, dalam Arief Budiman (Ed.), *State and Civil Society in Indonesia* (hlm. 22-124). Monash: Center of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Lanur, Alex. 1984. Manipulasi dalam Media Massa. *Basis*. November XXXIII-II.
- Leech, G.N. 1983. *Principles of Pragmatics*. New York: Longman.
- Lee, David. 1992. *Competing Discourses: Perspective and Ideology in Language*. Singapore: Longman Singapore Publisher Ltd.
- Lenneberg, E.H. dan Robert, J.M. 1958. The Language of Experience: A Study in Methodology. *International Journal of American Linguistics*, Memoir 13.
- Levin, Samuel R. 1977. *The Semantics of Metaphor*. Baltimore: The John Hopkins University.
- Lindgren, H.C. 1973. *An Introduction to Social Psychology*. New York: Wiley & Son.

- LP3Y. 1996. *Analisis Isi Kecenderungan Isi Pers Indonesia: Pergulatan Mencari Pangsa Pasar*. Yogyakarta: LP3Y dan The Asia Foundation.
- Mallarangeng, Rizal. 1992. *Pers Orde Baru, Tinjauan Isi Harian Kompas dan Suara Karya*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Malinowski, B. 1923. The Problem of Meaning in Primitive Languages. Dalam Ogden dan I. A. Richards. (Eds.) *The Meaning of Meaning*. New York: Harcourt Brace.
- Mappatoto, Andi Baso. 1993. *Siaran Pers: Suatu Kiat Penulisan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mas'oed, Mohtar. 1994. *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McCarthy, M. dan Ronald Carter. 1994. *Language as Discourse: Perspective for Language Teaching*. New York: Longman Publishing.
- McQuail, D. 1987. *Mass Communication Theory: An Introduction*. Beverly Hills, California: Sage Publication.
- Miles, M.B. dan A.M Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Newmeyer, Federick J. (Ed.). 1988. *Language: The Socio-cultural Context*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nunan, David. 1992. *Research Methods in Language learning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oetomo, Dede. 1996. Bahasa Indonesia Kelas Menengah Indonesia. Dalam Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (hlm. 195-212). Bandung: Penerbit Mizan.
- Oetomo, Jakob. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Oetomo, Jakob. 1993. Kemandirian Pers Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Mendatang. Dalam Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnomo W. (eds).

Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari: Empat Puluh tahun Surabaya Post. (h.477-487). Surabaya: Surabaya Post.

Pabottingi, M. 1996. Bahasa, Politik, dan Ototentris. Dalam Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (hlm. 213-220). Bandung: Penerbit Mizan.

Pabottingi, M. 1994. Penutupan Tempo: Batas Orde Baru, Batas Bangsa. Dalam Ayu Utami, Imran Hasibuan, Santoso, Liston P. Siregar (eds.), *Bredel 1994: Kumpulan Tulisan Tentang Pembredelan TEMPO, DETIK, EDITOR* (hlm. 74). Jakarta: Aliansi Jurnalistik Independen.

Panuju, Redi. 1997. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Perfetti, C.A. dan Goldman, S.R. 1974. Thematization and sentence retrieval. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13: 97-116.

Pradopo, Rachmat Joko. 1997. Ragam Bahasa Sastra. *Gatra*. Juni. Th.XIII. No. 18 : 23-35.

Rakhmat, Jalaluddin. 1996. Komunikasi dan Perubahan Politik Indonesia. Dalam Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (hlm 49-55). Bandung: Penerbit Mizan.

Razak, Abdul. 1989. Analisa Kebebasan Pers dalam Isi Tajuk Rencana, dalam Don Michael Flounoy (ed.). *Analisis Isi Surat Kabar-surat kabar Indonesia* (hlm.151-181). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Renkema, Jan. 1993. *Discourse Studies: An Introductory Textbook*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

River, William R, Bryce McIntyre, dan Alison Work. 1988. *Writing Opinions: Editorials*. Iowa: Iowa State University Press.

Sampson, Geoffrey. 1980. *Schools of Linguistics*. Stanford: Stanford University Press.

- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1998. Sistem Media Massa yang Adil dan demokratis Sesuai Tuntutan Reformasi. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol 1: 4-12.
- Schiller, James. 1978. *Development Ideology in New Order Indonesia*. Tesis M.A. tidak diterbitkan. Ohio: Ohio University.
- Searle, J.R. 1969. *Speech Acts*. London: Cambridge University Press.
- Sidharta, Priguna. 1989. Segi Medis Gangguan Ekspresi Verbal. Dalam Kaswanti Purwo (ed.), *PELLBA 2* (hlm. 163-179). Jakarta: Lembaga Bahasa Atmajaya.
- Spradley, James. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Stalnaker R. C. 1978. Assertion; dalam Cole, P. (ed). *Syntax & Semantics 9: Pragmatics* (hlm. 321). New York: Academic Press.
- Storey, John. 1993. *An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture*. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Strentz, Herbert. 1993. *Reporter dan Sumber Berita: Persekongkolan dalam Mengemas dan Menyesatkan Berita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudaryanto. 1995. *Ragam Jurnalistik Bahasa Indonesia sebagai ragam Bahasa Kreatif: Posisinya di antara Ragam-ragam Kreatif yang Lain serta Prospeknya pada Abad Kedua Puluh Satu*, makalah disajikan pada Simposium Ragam Bahasa Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia di IKIP PGRI Semarang.
- Sudaryanto. 1997. Bahasa Indonesia Ragam Akademik: Keberadaannya & Masalah Pengembangannya. *Gatra*. Th. XIII. Juni. No. 18 : 9-17.
- Tamin, Indrawadi. 1989. Analisa Pers Nasional. Dalam Don Michael Flournoy (ed.). *Analisis Isi Surat Kabar-surat kabar Indonesia* (hlm.22-43). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tibbetts, A.M. dan Charlene Tibbetts. 1991. *Strategies of Rhetoric with Handbook*. 6th edition. New York: Harper Collins Publishers.

- Tobing, Sumita. 1989. Analisa Pers Daerah. Dalam Don Michael Flournoy (ed.). *Analisis Isi Surat Kabar-surat kabar Indonesia* (hlm.44-64). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tomasowa, Francien Herlen. 1994. Analisis Klausa Bahasa Indonesia: pendekatan sistemik M.A.K. Halliday. Dalam Kaswanti Purwo, Bambang (Ed.), *PELLBA 7* (hlm. 35-51). Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atmajaya, Jakarta.
- Trew, A. 1979. Theory and Ideology at Work. Dalam Fowler *et. al* (Eds.) *Language and Control*. London: Routledge and Kegan Paul.
- van Dijk, Teun A. 1977. *Text and Context*. London: Longman.
- van Dijk, Teun A. 1985. *Handbook of Discourse Analysis: Discourse and Dialogue*. Vol 3. London: Academic Press.
- van Dijk, Teun A. 1992. *Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse*. London: Longman.
- Wahab, Abdul. 1991. *Isu Linguistik Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wahyudi, J.B. 1991. *Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Alumni.
- Wardhaugh, Ronald. 1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. UK: Basil Blackwell.
- Wibisono, Christianto. 1993. Pers Indonesia, Antara Industri dan Profesi. Dalam Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnomo W. (eds). *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari: Empat Puluh tahun Surabaya Post* (hlm.441-453). Surabaya: Surabaya Post.
- Zaini Abar, Akhmad. 1997. Sejarah Pers Nasional: Perspektif Relasi Pers dan Militer. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Vol 1/Juli : 57-61.
- Zoest, Aart van. 1996a. Interpretasi dan Semiotika. Dalam Sujiman dan Zoest (Eds.), *Serba-Serbi Semiotika* (hlm 1-25). Jakarta: Gramedia.
- Zoest, Aart van. 1996b. Peranan Konteks Kebudayaan, dan Ideologi di dalam

Semiotika. Dalam Sujiman dan Zoest (Eds.), *Serba-Serbi Semiotika*.
(hlm. 81-88). Jakarta: Gramedia.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Lembar Analisis Data

Format 1.1 Analisis Perspektif Pemberitaan

No Data	Unit Analisis	Kategori			Keterangan
1	Topik	Fokus Utama / Titi tolak Pemberitaan		Fokus Sampingan	
2	Partisipan	Fokus Utama	Fokus Sampingan	Sumber Berita	
3	Nada Pemberitaan	Mendukung Salah Satu Partisipan		Tidak Mendukung Salah Satu Partisipan	

Format 1.2 Analisis Manifestasi Perspektif Pemberitaan dalam SPI

Data	Unit Analisis	Piranti Bahasa yang digunakan	Keterangan
Data judul berita	Judul Berita		
Data tema berita	Tema Berita		
Data teks berita	Struktur Tema		
Data teks berita	Penahapan		

Format 1.3. Analisis Manifestasi Perspektif Pemberitaan dalam Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa

Data No.	Unit Analisis	Piranti Bahasa							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Kalimat/Klausa								
	frasa/kata								

Keterangan:

1. Ketransitifan
2. Tindak Tutur
3. Pilihan Kata
4. Modalitas
5. Struktur Nominal
6. Metafora
7. Struktur Informasi
8. Lain-Lain

Lampiran 2: Data 48 Teks Berita

data (I.1.c)

6 Mahasiswa Trisakti Tewas

4 Petugas Luka-luka

JAKARTA (Suara Karya): Korban jiwa mulai berjatuhan dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. Enam orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk yang dilakukan ratusan mahasiswa di Jalan S Parman, Grogol, Jakarta Barat, Selasa siang hingga petang hari. Jenazah empat mahasiswa yang tewas di tempat itu semalam dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, sedangkan dua korban luka berat yang dilarikan ke RS Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta menghembuskan nafas terakhir setelah beberapa lama dirawat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di tempat kejadian dan di RS Sumber Waras, empat korban yang tewas di tempat kejadian adalah Heri Haryanto (mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri), Elang Mulya Lesmana (Arsitektur), Hendriawan (Fakultas Ekonomi), dan Hasidin Royani (Teknik Sipil). Sedangkan dua korban yang tewas di RSPP adalah Arfan dan Alan. Sebanyak 11 korban luka-luka masih dirawat di RS Sumber Waras, tapi pihak RS Sumber Waras tidak bersedia menyebutkan nama-nama mereka. Sebagian mahasiswa yang menderita luka-luka itu akibat terkena tembakan peluru karet. Sementara itu akibat lemparan batu dan benda keras lainnya, setidaknya empat petugas luka-luka serius. Dari keluarga Hasidin Royani diperoleh informasi bahwa korban tewas akibat tembakan. "Besok (hari ini, Red) almarhum akan dibawa ke Bandung untuk dimakamkan," ujarnya. Belum diperoleh informasi dari pihak keamanan penyebab tewasnya para mahasiswa tersebut. Namun Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Adi Andojo SH mengatakan bahwa penyebab meninggalnya keenam korban adalah terkena tembakan. Kapuspen ABRI Brigjen TNI A Wahab Mokodongan yang dihubungi *Suara Karya* melalui telepon sekitar pukul 20.30 semalam untuk meminta konfirmasi mengenai bentrokan di

Lihat halaman IX kol.3

Trisakti yang meminta korban jiwa, mengaku bahwa ia memang mendengar kabar adanya korban 4 orang tewas dan 10 luka-luka. Tetapi Wahab Mokodongan yang dihubungi lewat telepon mengatakan, ABRI masih akan meneliti kebenaran informasi yang diterimanya itu. Sebab, hingga saat ditelepon *Suara Karya* semalam ABRI belum menerima laporan secara resmi.

"ABRI akan meneliti apa yang terjadi sebenarnya. Kita masih akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak," kata Kapuspen ABRI yang mengakui peluru karet yang ditembakkan dari jarak dekat bisa mematikan korban yang terkena tembakan.

Kadispen Polda Metro Jaya Letkol Pol Edward Aritonang yang dihubungi sekitar pukul 20.00 semalam mengaku belum menerima laporan mengenai korban tewas akibat bentrokan pengunjuk rasa di Universitas Trisakti dengan petugas keamanan kemarin petang.

Peristiwanya

Diperoleh informasi, peristiwa bentrokan mahasiswa dengan petugas keamanan di Universitas Trisakti bermula ketika para

mahasiswa menolak permintaan petugas keamanan agar masuk ke areal kampus sekitar pukul 18.00 dari jalan raya. Tiba-tiba muncul sejumlah orang mengendarai beberapa sepeda motor melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa dari aksi mereka di Jalan S Parman. Tapi ada pula yang melepaskan tembakan ke arah massa mahasiswa di jalanan.

Para mahasiswa membalas dengan lemparan batu ke arah petugas keamanan. Tidak jauh dari tempat kejadian dua buah bus kota Patas hangus terbakar. Kemudian muncul mobil-mobil pemadam kebakaran menyempatkan air ke arah mahasiswa.

Para mahasiswa Trisakti, dosen dan alumni sejak pukul 11.00 WIB menggelar mimbar bebas di kampusnya. Pada awalnya, para mahasiswa tampak tertib. Pada pukul 13.00, sebagian dari ratusan mahasiswa mulai turun ke Jalan S Parman. Petugas keamanan yang sejak awal mem-

blokade kampus tampak kewalahan menghadapi para mahasiswa tersebut. Satu persatu mahasiswa berhasil menembus "pagar betis" petugas.

Selanjutnya para mahasiswa melakukan mimbar bebas di tepi Jalan S Parman, mulai dari depan kampus Trisakti hingga ke halaman bekas kantor Walikotamadya Jakarta Barat. Arus lalu lintas kendaraan macet total di Jalan S Parman. Ditambah ratusan warga masyarakat yang menonton mimbar bebas itu, membuat kendaraan tidak bisa bergerak.

Melihat suasana yang semakin memanas, Adi Andoyo SH, mantan Hakim Agung, yang tadinya ikut naik panggung di mimbar bebas di kampus Trisakti meminta para mahasiswa yang sempat ke luar agar kembali ke kampusnya. Kapolres Jakarta Barat Letkol Pol Timur Pradopo dan Kadit Samapta Kol Pol Arthur Damanik juga berusaha menenangkan para mahasiswa, dan meminta agar kembali ke kampusnya. Terjadi tawar-menawar, para mahasiswa setuju kembali masuk ke kampusnya jika petugas yang "memagar betis" kampus Trisakti juga ditarik mundur. Namun, setelah petugas keamanan mundur sedikit, para mahasiswa tidak segera masuk kembali ke kampusnya. Bahkan yang masih tertahan di kampus berhamburan dan membaur dengan teman-temannya di Jalan S Parman dan di halaman bekas kantor Walikotamadya Jakarta Barat. Para mahasiswa tidak hanya melakukan aksi duduk di halaman bekas kantor Pemda Jakarta Barat itu, tetapi juga di tengah Jalan S Parman. "Aksi duduk di tengah jalan ini sebagai protes kami atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam menangani aksi keprihatinan yang dilancarkan teman-

teman selama ini," demikian seorang mahasiswa.

Aparat keamanan yang tidak sabar lagi dengan tindakan perusasiif, secara serentak melakukan tindakan pembubaran aksi duduk dan mimbar bebas di Jalan S Parman. Tak pelak lagi, bentrokan fisik antara ratusan petugas dengan ratusan mahasiswa tidak bisa dielakkan. Sebagian mahasiswa lari menyelamatkan diri, sebagian lagi berusaha melawan petugas dengan melemparkan batu. Menghadapi itu, aparat keamanan melepaskan tembakan gas air mata, peluru karet, dan tembakan peringatan dengan peluru tajam. (S-20/L-3/S-12/W-3)

data (1.2.a)

Presiden Risaukan Pemberitaan Media Massa

17 April 1998

JAKARTA, (AB)- Presiden Soeharto mengungkapkan kerisauannya terhadap pemberitaan-pemberitaan media massa yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah.

Kerisauan Kepala Negara terhadap pemberitaan media massa tersebut dikemukakannya ketika menerima Menpen/Kepala BP-7 Pusat Alwi Dahlan di Bina Graha, Kamis (16/4).

"Presiden merisaukan pemberitaan yang tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya," kata Alwi Dahlan kepada pers setelah diterima Kepala Negara.

Menggambarkan kerisauan Kepala Negara, Menpen menyebutkan sejumlah berita kadangkala diberi penafsiran keliru oleh pengelola media massa itu sehingga setiap langkah pemerintah dicari salahnya. Akibatnya masyarakat pembaca baik di dalam negeri maupun luar negeri seringkali mendapat gambaran yang salah mengenai langkah-langkah yang ditempuh pemerintah.

Karena itulah, Presiden minta Menpen dan seluruh jajaran Depen untuk mengikuti secara seksama setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

"Depen tidak cukup hanya memberikan keterangan, tapi juga harus mengetahui latar belakang pengambilan keputusan itu," kata Alwi Dahlan mengutip

pernyataan Presiden.

Dengan memberikan keterangan baik yang menyangkut kebijakan pemerintah maupun latar belakang kebijakan itu, masyarakat bisa memperoleh keterangan yang jelas mengenai langkah pemerintah.

Menteri juga menyebutkan ada pemberitaan yang tidak memberikan pengetahuan yang sebenarnya. Sebagai contoh disebutkan televisi yang memberitakan suatu kejadian di suatu tempat, namun gambar yang ditayangkan adalah kejadian di tempat lain yang disiarkan berulang-ulang.

"Itu tidak memberikan informasi kepada masyarakat tetapi memberikan disinformasi," ujarnya sambil menambahkan bahwa pemberitaan yang seperti itu tidak membantu memulihkan keadaan. "Padahal saat ini kita perlu memulihkan keadaan dan kepercayaan."

Presiden juga menginstruksikan kepada Menpen untuk mengadakan koordinasi dengan menteri-menteri terkait agar pers, termasuk koresponden asing, memperoleh informasi yang lengkap dan selengkap mungkin.

Ketika ditanya tentang munculnya kesimpangsiuran keterangan di antara para pejabat pemerintah, Alwi Dahlan menyebutkan, munculnya berbagai keterangan itu antara lain akibat "keuletan" wartawan untuk memancing keterangan pejabat.

"Itu memang karena keuletan untuk memancing," kata Alwi Dahlan yang juga menduduki jabatan Kepala BP-7 Pusat.

Hanya bidang tugasnya

Menurut menteri, Kepala Negara juga telah minta para pejabat untuk hanya berbicara atau menjelaskan sesuatu hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya saja dan tidak menyinggung hal-hal di luar tugasnya.

Karena itu, ia akan menyarankan kepada para pejabat agar berani tidak memberikan komentar atau tanggapannya jika ditanya wartawan mengenai hal-hal yang di luar bidangnya.

"Jika seseorang pejabat mengatakan "no comment" maka bukan berarti dia tidak mengetahui masalah," katanya ketika meminta pengertian para wartawan.

Harapan itu disampaikan Alwi Dahlan karena kadangkala penolakan seorang pejabat untuk memberikan keterangan juga diberitakan oleh media bersangkutan, sehingga menimbulkan kesan bahwa pejabat itu tidak mau memberikan keterangan atau tidak menguasai masalah yang ditanyakan. ~ (1.6)

data (1.2.b)

Pemberitaan Pers Merisaukan



Alwi Dahlan

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Soeharto risau atas pemberitaan pers akhir-akhir ini yang tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya. Pemberitaan pers sering kali diberi interpretasi yang tidak tepat dan memberi gambaran yang salah.

"Presiden tadi mengungkapkan kerisauan beliau mengenai pemberitaan-pemberitaan yang tidak memberikan gambaran sesungguhnya," kata Menteri Penerangan Prof Dr Alwi Dahlan lepas lapor Presiden di Bina Graha (16/4). Presiden minta hal ini hendaknya diperhatikan Departemen Penerangan sebagai pembina pers.

Presiden tidak memberikan contoh kongkret pemberitaan pers yang tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya. Namun menurutnya, banyak sekali informasi yang kurang tepat yang menerjemahkan setiap langkah pemerintah itu seolah salah.

Jadi walaupun ada langkah-langkah yang diambil, pers mencari kesalahan kebijakan tersebut dan itu pun secara teoritis. Itulah yang kemudian ditonjolkannya. Ditegaskan Presiden, kebijakan atau langkahnya ada tetapi tidak dijelaskan dengan baik. "Jadi kelihatannya kata beliau, itu seolah-olah tidak memahami keadaan," kata Menpen.

Alwi melihat tidak hanya media cetak, tayangan media elektronik pun banyak yang

tidak proporsional atau tidak mencerminkan perspektif yang sesungguhnya. Misalnya gambar suatu peristiwa ditayangkan berulang-ulang untuk peristiwa yang lain.

Kepercayaan

Tindakan itu menurut Alwi tidak memberikan perspektif kepada masyarakat. Masyarakat tidak diberi informasi tetapi justru disinformasi. Tentu hal itu tidak membantu memulihkan keadaan, padahal sekarang ini semua pihak perlu memulihkan keadaan.

Alwi mencontohkan IMF plus dalam pidato pertanggungjawaban Presiden. IMF plus untuk memperbaiki keadaan itu sedang dirumuskan bagaimana pasnya tetapi kemudian ditanggapi plus-

nya adalah sistem dewan mata uang/CBS (Steve Hanke). Plusnya CBS itu mempengaruhi rupiah.

Walaupun tidak ikut mengambil keputusan, pers ikut kena bebannya—dalam arti seperti omongan pejabat—bisa mempengaruhi nilai rupiah. Kalau pemberitaan menonjolkan seolah-olah Indonesia sudah kacau balau, maka luar negeri mengatakan, "Oh tunggu dulu, jangan dulu kirim barang ke Indonesia, jangan kasih kredit karena keadaan begini. Padahal mereka mengambil interpretasi dari pers".

Presiden mengatakan, kepercayaan terhadap pemerintah sebetulnya juga merupakan kepercayaan pada diri sendiri.

Lihat halaman IX kol.5

PEMBERITAAN — Dari halaman 1

Kehilangan kepercayaan pada pemerintah berarti seolah-olah kita kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Apa yang dikatakan atau diinterpretasikan oleh media asing, itulah yang seakan sungguh-sungguh terjadi. Padahal ini sebetulnya kenyataannya tidak demikian.

Informasi Plus

Presiden mengatakan, masyarakat kini tidak cukup hanya diberi informasi (pencerangan) tetapi perlu informasi plus yaitu ditambah dengan informasi yang mempunyai nilai tambah. Sering kali penjelasan pejabat sumir sekali, hanya bersifat keterangan saja dan tidak dilengkapi dengan mengapa keputusan itu diambil. Sedangkan keputusan itu kalau ditelusuri kembali kepada Pancasila dan UUD '5. Akibat pencerangan tidak lengkap masyarakat tidak tahu apa manfaatnya bagi mereka. Timbul kemudian salah interpretasi dan salah pengertian akan perkembangan keadaan. Padahal dalam keadaan krisis moneter sekarang ini, masyarakat luas perlu mencoba mencari peluang baru.

Presiden minta Menpen melakukan koordinasi dengan menteri lain supaya pers mendapat informasi selengkap mungkin. Alwi mencontohkan, kadang-kadang baru ada pengumuman di *network* sudah ada interpretasi, yang sebetulnya bertentangan dan tidak didukung oleh kenyataan. Hanya karena ada yang disodorkan secara cepat, itu yang dipegang. Sumber-sumber informasi diminta Presiden hendaknya dapat dipertemukan juga dengan pers, termasuk koresponden asing.

Kesulitan Pers

Salah satu keluhan yang diterima Menpen adalah pers kadang-kadang tidak tahu pada siapa harus mendapatkan informasi. Untuk itu ia berjanji akan mengubah mekanisme Deppen sehingga pers tidak ketinggalan informasi. Sebab kalau ketinggalan informasinya dan kemudian menyadap dari luar, yang belum tentu benar, akibatnya diperoleh gambaran salah.

Mehjawab kesulitan pers seperti belum adanya persepsi sama di antara pejabat mengenai "politik praktis", Menpen menga-

takan, Mendikbud mempunyai wewenang untuk merumuskannya. Hanya saja kemudian pejabat yang tidak begitu tahu (bukan bidangnya) tergoda oleh wartawan untuk ikut memberikan komentar.

Barangkali yang perlu dibiaskan adalah bahwa wartawan itu jangan kecil hati kalau pejabat itu mengatakan tidak tahu dan kemudian dibesarkan oleh pers; pejabat ini tidak tahu. Tidak mempunyai kemampuan politik. Kami akan menganjurkan kepada bapak dan ibu-ibu menteri supaya kalau tidak tahu bilang saja *no comment*. Tidak ada salahnya begitu," ucapnya.

Kira-kira

Pemberitaan aksi unjuk rasa mahasiswa menurut penilaian Alwi, tidak profesional dan hanya berdasarkan ilmu kira-kira. Angka yang hadir oleh pers cenderung dilonjakkan. Apa yang akan terjadi nanti akan begini, akan begitu. Terkadang pers wawancara mahasiswa yang belum apa-apa tetapi namanya menjadi mencuat karena diberitakan pers. Karena itu besoknya ia dikejar-kejar oleh media lain.

Tayangan seperti itu, menurut Alwi, merupakan pengembangan kader masa depan yang semu. Kenapa tidak disebutkan sementara di sini rame-rame, di sana ada bagian terbesar yang tetap belajar atau ada mahasiswa-mahasiswa yang turun ke-desa melakukan berbagai kegiatan. Jadi perspektif tidak ada. Seolah-olah Indonesia ini sedang penuh dengan aksi unjuk rasa mahasiswa.

Kalau pers tetap mengulang-ulang akhirnya orang lain mengatakan kita memang begitu. Akhirnya orang berpandangan, "Sudahlah saya ikut juga kan banyak yang ikut-ikutan".

Masalah sekarang adalah sedang krisis ekonomi, yang tidak dapat dipecahkan dengan emosi. Semuanya harus menahan diri dan berkorban. Sekarang kata Alwi, di Yogyakarta banyak sekali mahasiswa yang keluar dari pondokannya dan tinggal di langgar-langgar karena itu dia kesal. Makin dia kesal makin banyak yang ke luar dan masuk langgar sehingga membikin pelanggaran emosi dsb. (N-1)

REPUBLIKA, JUMAT 17 APRIL 1998.

Presiden Risaukan Pemberitaan Pers

JAKARTA — Pemberitaan pers mendapat sorotan Presiden Soeharto. Presiden, kata Menpen Alwi Dahlan, menyatakan risau atas pemberitaan yang bias. Karena berita yang bias, selain tidak memberikan gambaran sesungguhnya, sering menimbulkan disinformasi.

"Beliau mengatakan agar hal ini perlu mendapat perhatian oleh Departemen Penerangan dalam rangka pembinaan pers," ujar Alwi Dahlan usai menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, kemarin. Alwi ketika itu, selain melaporkan persiapan peringatan Harkitnas, juga mendapat arahan agar melakukan sinergi antara Deppen dengan BP7.

Alwi memberikan contoh. Menurutnya, sering sebuah perkembangan diberitakan bukan sekadar perkembangan itu sendiri. Tetapi didahului atau diberikan interpretasi yang tidak tepat. "Selain tidak tepat, bahkan juga memberi gambaran yang salah."

Pemberitaan seperti itu, menurut Alwi, bukan hanya dilakukan oleh media cetak, namun juga dilakukan oleh media elektronik. "Banyak tayangan berita yang tidak proporsional atau mencerminkan perspektif yang sesungguhnya," ujarnya.

Alwi mengungkapkan, Presiden Soeharto menilai banyak sekali informasi yang kurang tepat. Sebab, lebih menonjolkan atau menerjemahkan setiap langkah itu sebagai suatu kesalahan. "Jadi walaupun langkah-langkah diambil tetapi dicari apa salahnya. Salahnya itulah yang kemudian ditonjolkan," ujarnya. Sedangkan, langkah kebijaksanaan itu sendiri tidak dijelaskan.

Selain itu, menurut Alwi, sebuah substansi masalah sedang dalam pertimbangan kemudian diberitakan seolah-olah sudah diputuskan. Bahkan ditambahkan masukan yang terpengaruh oleh interpretasi. "Padahal keputusannya itu sendiri belum diambil."

Contohnya, menurut Alwi, adalah soal IMF Plus yang mulanya berasal dari Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soeharto di DPR. "IMF Plus ketika itu sedang dirumuskan bagaimana pasnya. Lantas Pak Hanke (Steve Henke — red) mengatakan IMF Plus itu saya punya," ujarnya.

Kemudian, IMF Plus-hya Hanke inilah yang me-

nurut Alwi banyak diberitakan oleh berbagai media. Selanjutnya berbagai pihak di luar negeri mempercayai masalah ini. "Akibatnya, pandangan asing ini mempengaruhi mata uang kita," ujarnya.

Oleh sebab itulah, Alwi Dahlan mengingatkan berita media massa bisa mempengaruhi nilai rupiah. "Ini betul. Meski sebenarnya anda tidak ikut mengambil keputusan itu," tegasnya.

Jika pemberitaan hanya menonjolkan seolah-olah di Indonesia ini keadaannya kacau, maka akan sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. "Pihak asing bisa saja akan menunda mengirimkan barang atau memberikan kredit ke Indonesia," ujarnya.

Padahal pihak asing itu, menurut Alwi, hanya sekadar melakukan interpretasi atas berita-berita di berbagai media. Karena penilaian tadi, membuat nilai kurs menjadi tidak riil. "Ini tanggung jawab kita bersama yang tidak ada urusannya dengan kemampuan ekonomi," ujarnya.

Menurut Alwi, diskusi mendalam yang dilakukan bersama Presiden Soeharto juga menyangkut interpretasi hilangnya kepercayaan. "Apa yang diinterpretasikan oleh media asing seolah-olah kita itu telah kehilangan kepercayaan," ujarnya. Padahal kalau melihat kenyataannya tidaklah sedemikian itu.

Diungkapkan pula oleh Alwi, saat ini masih sering terjadi wartawan mengembangkan berita dengan menanyai para pejabat yang bukan berwenang menjawab pertanyaan tersebut. Karena tidak mengetahui secara persis, dengan sendirinya tak bisa memberikan komentar. "Seperti dengan mengatakan *no comment*, karena memang tidak atau belum mengetahuinya."

Tetapi, karena terus didesak atau digoda oleh wartawan — karena adat Timurnya — tidak sampai hati untuk mengatakan *no comment*. "Padahal *no comment* itu sendiri memiliki arti yang bisa macam-macam," ujarnya.

Namun, menurut Alwi, pihaknya akan menganjurkan kepada para Menteri serta para pejabat jika memang tidak mengetahui persoalannya untuk menjawab *no comment* saja. "Tetapi jangan dikira pejabat yang bersangkutan tertutup. Bukan. Kita tidak ingin memberikan informasi yang salah," ujarnya. ■ ris/dan

Jumat, 3 April 1998

Aksi Mahasiswa Mengarah Pada Parlemen Jalanan

JAKARTA (Suara Karya): Aksi unjuk rasa mahasiswa yang kian marak di beberapa daerah saat ini cenderung mengarah kepada parlemen "jalanan", bahkan dapat berkembang menjadi semacam *people power*. Citra sebagai insan kampus yang membawa bendera intelektualitas terasa makin memudar.

"Aksi unjuk-rasa mahasiswa seperti di UNS Solo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lain-lain, misalnya, hanya menambah masalah saja. Yang terjadi siapa menganiaya siapa, sehingga masalah pokoknya tidak tercapai dan sengketa bertambah," kata Irsyad Sudiro dalam jumpa pers di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (2/4). Dalam acara tersebut, Irsyad didampingi Wakil Ketua Bidang Ekku FKP Andi Matulatta, Wakil Ketua FKP Bidang Polkam Slamet Effendy Yusuf, dan Sekretaris FKP Syamsul Mu'arif.

Irsyad mengingatkan mahasiswa jangan membuat parlemen jalanan. Jika mau menyampaikan aspirasi, sampaikanlah secara konstitusional lewat DPR. "Mahasiswa harus ikut memberdayakan DPR. Kalau menganggap peran dan fungsi DPR ini masih kurang, marilah sama-sama diperbaiki," ujarnya.

Jika mahasiswa menyalurkan aspirasi ke DPR, Irsyad yakin, posisi DPR akan makin menguat. "Mahasiswa kan tidak bisa mengundang Sidang Istimewa MPR, yang bisa itu DPR," katanya.

Sekretaris FKP Syamsul Mu'arif mengatakan, ada dua kelompok mahasiswa yang kini unjuk rasa. Pertama, kelompok yang sangat radikal. Kelompok tersebut mendesak dan meminta adanya pergantian pimpinan negara. Te-

manya bukan untuk mengatasi krisis, tetapi krisis sebagai sebuah tempat untuk menempelkan persoalan.

Kedua, kelompok mahasiswa yang berpikiran moderat. Kelompok ini berpikir dan ingin menyampaikan aspirasinya melalui tangga-tangga yang benar. Daya dorongnya berbeda dengan kelompok mahasiswa yang radikal.

Aliran-aliran seperti itu selalu ada, bahkan juga di pemerintahan. Di pemerintahan pun ada kelompok oposan.

Karena itu, ketika orang akan berdialog, kata Syamsul, untuk soal representasi saja sangat sulit. Sekarang mahasiswa Indonesia, siapa di antara mereka yang berhak untuk berdialog dengan Presiden Soeharto. Ini saja dirumuskan oleh mahasiswa akan sulit. Salah satu contoh, mereka tidak mau berdialog dengan ABRI. Mereka juga tidak mau ada mediator, berarti ada kecurigaan terhadap IKBLA ARH. Karena IKBLA dianggap sebagai perantara.

Aspek berikutnya adalah mereka menganggap bukan representasi. Misalnya, Unhas tidak bersedia berdialog karena merasa bukan mewakili mahasiswa Indonesia bagian Timur. Demikian juga Universitas Cendrawasih dan lain-lainnya. Alam berpikir itu, alam berpikir representasi, yakni siapa yang berhak datang dalam dialog yang direncanakan.

"Berbeda dengan dulu. Para mahasiswa tergabung dalam Dewan Mahasiswa dan kumpulan mahasiswa intra universitas," kata Syamsul. Itu yang pernah berdialog dengan Pak Harto tahun 1966. Tahun 1970-an juga masih ada karena pada waktu itu ketika Dewan Mahasiswa mengadakan pertemuan, hasil pertemuannya yang dibawa.

Sekarang ini, menurut Syamsul, mahasiswa menghadapi dilema. Ketika diinginkan untuk dialog, banyak mengalami dilema, antara lain, soal representatif, dan dilema kontain, yaitu apa masalah yang akan dibawa. Yang satu berpikiran moderat, yang satu radikal.

Ketika fraksi-fraksi DPR berdialog dengan mahasiswa di UI, baru-baru ini, banyak persoalan yang dikenikikan mahasiswa, bahkan mereka menyalahkan Dewan habishabisan. "Kenapa Dewan menerima orang yang telah menciptakan pemerintahan situasi krisis ini. Kok masih dipilih kembali. Hal-hal seperti itu dimunculkan," tuturnya. Jadi, apa isi yang akan didialogkan itu juga jadi persoalan.

Sehingga, demikian Syamsul, masalah permintaan dialog mahasiswa dengan presiden akan menjadi persoalan politis. Ketika sudah menjadi persoalan politis, tidak ada satu kata yang pas untuk menyelesaikan persoalan itu.

Ia berpendapat, seharusnya jika mahasiswa ingin menyelesaikan suatu persoalan, ada dua dari tri dharma perguruan tinggi yang bisa dipakai. Yakni, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dua aspek itu yang dikembangkan.

Banyak Manfaat

Sementara itu, Staf Ahli Menristek ZA Maulani mengatakan, dialog antara mahasiswa dan pimpinan ABRI sangat banyak manfaatnya, terutama untuk menyamakan persepsi dalam mengatasi masalah bangsa. Karena itu, para mahasiswa tidak perlu menolak untuk berdialog dengan ABRI atau menteri Kabinet Pembangunan VII (K-I/DH)

Dipo Alam: Aksi Mahasiswa bukan Langkah Sia-sia

JAKARTA — Aksi mahasiswa yang naik ke seluruh Indonesia, menurut mantan ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977, merupakan langkah efektif untuk mendorong perubahan. "Apa yang mereka lakukan bukan langkah yang sia-sia, dan akan membuahkan hasil," ujar Dipo ketika hubungi *Republika*, kemarin, berkaitan uraknya aksi unjuk rasa belakangan ini. Dalam beberapa hari ini di berbagai kampus banyak digelar aksi keprihatinan. Pada Rabu lalu, misalnya, secara serentak puluhan kampus di tanah air melancarkan aksi keprihatinan dengan tuntutan yang beragam dan cara yang bermacam-macam. Bahkan, pada hari itu para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga mengirim wakil-wakilnya untuk ikut aksi bersama di kampus UI Salemba. Menanggapi tuntutan mahasiswa itu, Janus Jurusan Kimia UI ini berpendapat semua pihak mestinya cepat merespon, jangan ABRI saja. "Golkar harus cepat turun tangan, jangan diam saja. Masak, kalih oleh

ABRI," tambah lelaki yang sekarang menjabat kepala Biro Industri dan Perdagangan Bappenas ini.

Menurut pandangan Dipo, aksi mahasiswa saat ini masih wajar dan tidak menyimpang. "Saya senang melihat mahasiswa sekarang kritis," tambahnya. Ia secara tegas mendukung, namun juga mengingatkan. "Jangan sampai melakukan aksi secara radikal."

Sedangkan pakar komunikasi politik Prof Dr M Budyatna berpendapat mahasiswa belum waktunya turun ke jalan. "Pelarangan ini [turun ke jalan] ada baiknya karena akan berbahaya bila ditanggapi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi, termasuk para pencoleng," katanya di Jakarta, Kamis.

Namun, Budyatna dapat memahami aksi mahasiswa akhir-akhir ini karena yang mereka suarakan adalah demi kebaikan bangsa. Dan, aksi berbagai universitas di Indonesia secara bersama-sama itu, lanjutnya, bisa terwujud karena kemajuan teknologi informasi.

Setelah demo serentak Rabu lalu, kemarin, aksi unjuk rasa digelar di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) dan kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Aksi keprihatinan itu pun berakhir memprihatinkan: 30 orang lebih mengalami luka-luka. Korban luka ini dialami oleh mahasiswa dan aparat keamanan setelah kedua pihak saling baku-lempar.

Unjuk rasa di ITB yang dimulai pukul 10.00 diawali mimbar bebas di pintu gerbang kampus Ganesha. Ketika adzan Dzuhur dikumandangkan Masjid Salman, aksi sempat terhenti, dan baru digelar lagi pukul 12.30.

Bentrokan bermula ketika mahasiswa berniat *long march* menuju kampus Unpad di Jalan Dipatiukur. Namun, upaya mereka terhenti ketika puluhan petugas keamanan mencoba menghalangi langkah mereka agar tidak keluar dari lokasi kampus. Tawar-menawar coba dilakukan. Selangkah demi selangkah mahasiswa pun maju, berusaha membobol blokade petugas keamanan. Saling dorong terjadi. Suasana pun jadi panas.

Puncaknya terjadi pada sekitar pukul 14.00. Ratusan petugas keamanan — berasal dari Polresta Bandung Tengah, Polda, Zipur, dan kesatuan lain — kembali terlibat saling dorong dengan mahasiswa. Tiba-tiba dari arah parkir timur ITB terlihat beberapa batu dan benda lain beterbangan ke arah petugas. Sebaliknya, dari kejauhan juga terlihat tongkat yang dipegang petugas mulai diayunkan.

Hal itu membuat ribuan mahasiswa bertamburan menyelamatkan diri. Sebagian besar mereka masuk ke kampus ITB dan berkumpul di sekitar parkir timur. Seketika itu pula mahasiswa yang luka-luka langsung dirawat di sekitar lapangan parkir.

Menurut data tim kesehatan, mereka yang terluka adalah Riza (geofisika dan meteorologi), Eka Gunawan (kimia), Billy (tambang), Syam, dan Sigit (elektro '93). Selain itu juga Patar (matematika '96), Widi (planning '95), serta Wingki (mesin).

DIPO ALAM dari Him. 1

Di Purwokerto, Jateng, bentrok fisik kemarin adalah yang kedua kalinya, setelah Senin lalu. Sebanyak 26 orang — 21 mahasiswa dan lima petugas — menderita luka memar dan seorang di antaranya diangkut ke Unit Gawat Darurat (UDG) RSUD Prof Margono Soekarjo karena keeningnya sobek. Aksi sebelumnya mengakibatkan 13 orang luka-luka.

Kejadian ini disesalkan Rektor Unsoed Prof Rubijanto Misman. Ia meminta aparat keamanan untuk mengusut kasus bentrokan tersebut. "Mengapa harus terjadi bentrok fisik, ini harus diusut oleh pihak keamanan," pinta Rubijanto Misman kepada wartawan, kemarin.

Demo keprihatinan yang diselenggarakan Forum Aksi Mahasiswa Purwokerto untuk Reformasi (FA-MPR) kembali melibatkan lima perguruan tinggi, yaitu Unsoed, STAIN, UMP, Unwiku, dan STIE. Petugas keamanan pada mulanya berhasil mendorong kerumunan mahasiswa agar masuk kampus. Namun, sekitar pukul 10.40 terjadi bentrokan. Tak jelas siapa yang memulai. Tiba-tiba terjadi saling lempar batu dan aspal. Beberapa mahasiswa yang berada di barisan depan terkena pentungan petugas.

Kapolwil Kol Pol Eddy Karnadi yang ikut memantau aksi tersebut menyatakan di pihaknya ada lima petugas yang cedera terkena lemparan batu. Menurutnya, lemparan batu itu berasal dari mahasiswa yang paling belakang. Lemparan yang sengaja ditujukan kepada petugas, lanjut Eddy, ternyata mengenai mahasiswa sendiri. "Mereka yang memulai melempar batu, kita cuma bawa pentungan dan tameng. Tidak ada yang bawa batu," tegasnya.

Namun, menurut koordinator aksi Agus Wahyudi, pemicu terjadi pelemparan batu justru berasal dari petugas. Menurutnya ada tiga orang dari petugas yang melempar batu, ke arah mahasiswa. ■ www.bijokipri.com

Mahasiswa Turun Ke Jalan, yang Rugi Rakyat

20 April 1998

JAKARTA, (AB) — Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, keinginan mahasiswa untuk tetap turun ke jalan merupakan suatu ancaman terhadap pemerintah. Sebab kalau turun ke jalan dikhawatirkan akan disusupi oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan politik maupun finansial.

"Kalau turun ke jalan yang rugi siapa? Saya kira rakyat yang akan rugi, karena mahasiswa turun ke jalan sudah pasti akan disusupi oleh pihak lain yang akan memanfaatkan situasi. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, biasanya nanti ada anarkis-destruktif yang merugikan rakyat."

Jenderal Wiranto mengemukakan itu dalam dialog 15 Menteri Kabinet Pembangunan VII dengan sekitar 250 peserta yang mewakili mahasiswa, pemuda, cendekiawan, tokoh masyarakat, ulama dan pejabat pemerintahan dari seluruh Indonesia di gedung utama PRJ Kemayoran Jakarta, Sabtu (18/4).
"Pemerintah, tugasnya tetap pada ketentuannya, bahwa para mahasiswa hanya boleh melakukan kegiatan di dalam kampus. Silakan ekspresikan semua aspirasi yang ada, asal tetap dalam kampus. Jangan sampai ke luar, sebab masyarakat akan terganggu dan akan dikhawatirkan disusupi

pi pihak lain," ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan ketika para mahasiswa di Yogyakarta diperbolehkan ke luar kampus, maka dalam sekejap toko-toko di sana tutup. "Kalau diizinkan setiap hari mahasiswa turun ke jalan di setiap universitas, maka setiap hari toko akan tutup. Kalau toko tutup berarti perekonomian juga tutup. Yang rugi adalah rakyat," jelas Wiranto.

Dan karena mahasiswa ngotot tetap ingin turun ke jalan, sedang petugas tetap kukuh memagari mereka, maka jatuhnya korban di kedua pihak pastilah tidak bisa dihindari.

"Di Solo sudah banyak korban, begitu juga di Yogya. Saya ingin bertanya kenapa mahasiswa bersikeras akan turun ke jalan," kata Menhankam/Pangab menanggapi suara sementara mahasiswa yang hadir yang mengatakan "kalau reformasi tidak segera dilakukan, maka tidak segan-segan mahasiswa akan turun ke jalan."

Berama 15 menteri lainnya

yang hadir dalam dialog itu, hadir pula seluruh petinggi ABRI seperti Kasad, Kasal, Kasau, Kapolri, KasumABRI, Kaspospol ABRI serta sejumlah rektor perguruan tinggi swasta dan negeri. Juga hadir Wakil Ketua MPR/DPR Syarwan Hamid.

Dialog yang dipandu oleh Tim Moderator yang terdiri dari Prof. Dr. Ryas Rasyid, DR. Salim Said, Dr. Gunawan Sumodiningrat, Dr. Anggito Abimanyu dan Prof. Dr. Yusril Iha Mahendra tersebut berlangsung dalam suasana egaliter, di mana semua bebas mengeluarkan pendapatnya. Akibatnya teras-a berlangsung riuh-rendah karena tidak disiplinnya peserta berbicara.

Pelopori reformasi

Menanggapi perlunya reformasi yang banyak ditanyakan para peserta dialog, Menhankam/Pangab mengatakan, ABRI berani memelopori reformasi dan tidak menolak reformasi. Namun reformasi yang dipeloporinya itu haruslah yang gradual, konstitusional dan berkesinambungan.

"Tentang reformasi ini, saya kiraperluada klarifikasi karena sakan-akan pemerintah/ABRI menolak reformasi, sedangkan mahasiswa memperjuangkan reformasi," kata Jenderal Wiranto sambil meminta agar visi terhadap reformasi disamakan lebih dahulu.

data (I.4.b)



ABRI Prihatinkan Orang Hilang

BANDUNG (Suara Karya) — Jendral TNI Su-Menhankam/Pangab. Jenderal TNI Wiranto menegaskan, saat ini tidak ada kebijakan untuk menghilangkan orang-orang tertentu dalam peraturan politik. "Sebab kami tahu risiko untuk itu sangat berat," kata Jenderal Wiranto ketika memberi ceramah di hadapan perwira, siswa Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoed) di Bandung, Rabu.

Menurut Jenderal Wiranto yang pada kesempatan itu didampingi Komandan Seskoed Mayjen TNI Affandi SIP, sikap ABRI menghadapi adanya orang-orang hilang belakangan ini adalah membantu mencarinya. "ABRI prihatin atas adanya orang-orang hilang di tengah belakangan ini," kata Wiranto.

Jendral berbintang empat itu menambahkan, hari Rabu (16/1/83) ia sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Dobyo Wi-

dodo untuk menjelaskan masalah orang-orang yang hilang tersebut. "Hari ini saya sudah perintahkan Kapolri," kata Menhankam/Pangab singkat, menjawab pertanyaan wartawan sesuai tema, berikan paparan kepada perwira siswa Seskoed.

Akan Terlihat



Jenderal TNI Wiranto

AD (Kasad), Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, sesuai perintah pengurus Fusdiklat PBSI Cabang Jabar di Bandung, Rabu, mengemukakan, dengan adanya kasus orang hilang ini, masyarakat jangan berprasangka buruk terhadap ABRI. Kasus ini masih terus diusut. "Kalau ada bukti-bukti yang menguatkan nanti akan terlihat siapa yang salah dan siapa yang benar," kata Kasad.

Menurut Kasad, pada prinsipnya masyarakat jangan gampang menuduh atau memvonis. Kalau kasus itu tidak benar, maka akan terbentuk opini yang merugikan ABRI bahwa seolah-olah ABRI terlibat dalam kasus orang hilang tersebut. "Kita jangan mudah berprasangka buruk terhadap sesuatu kasus yang belum jelas," kata Subagyo Hadisiswoyo.

Sejak Februari lalu sejumlah orang seperti Pius Lustiflanang, Haryanto Taslam, dan Desmond

Lihat halaman IX kol.2

ABRI PRIHATINKAN

Mahesa hilang tidak diketahui rimbanya. Pada pertengahan April ini mereka tiba-tiba muncul kembali namun tidak bersedia menyatakan di mana mereka berada selama menghilang, kecuali Pius yang Senior (27/4) mengungkapkan "kehilangannya" itu kepada Komnas HAM.

Pembenaran

Sementara itu Kapuspen ABRI Brigjen TNI Wahab Mokodongan mengatakan, aparat kepolisian akan menelusuri pengakuan Pius seperti yang diungkapkannya di Komnas HAM. "Kasus orang hilang kan urusan Polisi," kata Kapuspen ABRI yang ikut dalam rombongan Menhankam/Pangab.

Brigjen Wahab juga mengatakan, biarlah polisi yang akan

menyelesaikan kasus Pius tersebut. "Dia (Pius) kan sudah ngomong. Ngomong, apa saja silakan, polisi tinggal cari pembonaarannya ada tidak dengan bukti-buktinya," kata Wahab Mokodongan.

Aktivis mahasiswa Pius Lustiflanang, dalam kesaksianannya di Komnas HAM Senior lalu mengatakan, ia diculik orang tidak dikenal pada 4 Februari lalu di depan RSCM Jakarta. Ia disel dan disiksa dalam suatu tempat yang sampai kini tidak ia ketahui lokasinya, sebab matanya ditutup dan tangannya diborgol ketika dibawa ke tempat tersebut.

Dalam kaitan adanya orang-orang hilang tersebut, Kapuspen meminta agar jangan mudah menuduh bahwa ABRI berada di

Dari halaman I

balik peristiwa itu, "ABRI tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, kalau ada oknum, ya memang ada," katanya.

Kapuspen ABRI mengatakan, siapa pun yang melanggar aturan di negeri ini, apakah itu anggota ABRI, anggota LSM ataupun anggota masyarakat biasa maka secara pasti mereka akan berhadapan dengan hukum. "Kita tidak melihat baju, pakaian, muka orang, tetapi yang kita lihat sebagai warga negara Indonesia.

Kalau bersalah pasti dihukum. Artinya, siapa pun dia, baik dari LSM, pemerintah, atau petani, siapa saja kalau melanggar akan diproses secara hukum untuk tegaknya hukum," kata Kapuspen ABRI. (S-12/MH)

ABRI Cari Orang yang "Hilang"

1 April 1998

JAKARTA, (AB) - ABRI membantah pemberitaan yang menyebutkan hilangnya sejumlah orang akhir-akhir ini karena diamankan pihak keamanan atau rekayasa ABRI. Kapuspen ABRI Brigjen TNI Abdul Wahab Mokodongan menegaskan itu menjawab pertanyaan wartawan di Dephankam/Mabes ABRI, Selasa (31/3) kemarin.

Sejumlah orang dikabarkan "hilang" belakangan ini seperti di Lampung mantan Ketua Umum SMID, Andi Arief dan di Jakarta seperti aktivis PDI Haryanto Taslam, beberapa aktivis KPND dan aktivis Aldera Pius Lustrilantang.

Tidak benar anggapan kalau hilangnya sejumlah orang-orang itu adalah rekayasa ABRI. Kita ini sudah mati-matian mencari mereka," ujar Kapuspen ABRI. Justru ABRI tegasnya sangat tidak suka kalau ternyata orang yang dikatakan hilang diculik atau diamankan ABRI itu malah sedang duduk-duduk di kedai kopi atau aman-aman saja di suatu tempat.

Menurutnya, semua aparat di Lampung dan di Jakarta sudah diperintahkan untuk mencari orang-orang yang diberitakan hilang tersebut yang dikatakan telah diculik. Karena itu masyarakat jangan mudah percaya akan anggapan-anggapan bahwa mereka-mereka itu diamankan pihak keamanan. Pencarian orang-orang hilang tentu tidak bisa dilakukan aparat keamanan saja. Tapi masyarakat juga.

Coba cari di polsek-polsek atau di Polres atau di Instansi ABRI lainnya. Ada atau tidak orangnya. Memang tidak ada di sana," jelas Brigjen TNI Mokodongan lagi.

Tak ada mahasiswa hilang Sementara itu Pimpinan Uni-

versitas Lampung (Unila) menegaskan tidak ada mahasiswanya yang "hilang" menyusul insiden bentrok peserta aksi keprihatinan di Unila dengan aparat keamanan, Kamis (19/3) dengan sedikitnya 77 mahasiswa sempat diamankan, tapi malamnya dilepas lagi.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (PR III) Unila, Drs Sulthon Djasmi, MPd di Bandar Lampung Selasa menegaskan seluruh mahasiswa yang dilaporkan oleh Posko Keprihatinan yang dibentuk mahasiswa aktivis di Unila "hilang", sudah ditemu-

kan. Mereka umumnya sudah berada di rumah masing-masing, malahan ada yang sama sekali tak tahu menahu dan mengaku kaget disebut-sebut sebagai mahasiswa yang "hilang" dalam peristiwa tersebut," kata Sulthon.

Pengecekan terakhir dilakukan melalui Pembantu Dekan III Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila yang mengecek ulang kabar masih ada beberapa mahasiswanya termasuk mahasiswi yang belum ketahuan nasibnya setelah insiden tersebut.

"Setelah dicek melalui alamat masing-masing, ternyata mereka sudah ketahuan semua, kondisi mereka umumnya sehat wal afiat tak kurang suatu apapun," ujar Sulthon.

Namun Koordinator Posko Keprihatinan Mahasiswa di Unila, Ricki Tamba—tetap meneri-

ma laporan meskipun aksi keprihatinan dan mogok makan sudah dihentikan—menyatakan sejauh ini masih ada beberapa mahasiswa Unila yang belum jelas keberadaannya dan beberapa peserta aksi nonmahasiswa yang masih "hilang".

Tapi Ricki belum bersedia merinci nama mereka dan alamatnya secara jelas. Beberapa nama yang disebutkan sebelumnya sebagai mahasiswi FKIP Unila yang "hilang" justru menurut PR III Unila—sesuai laporan PD III FKIP Unila—telah jelas keberadaannya di rumah masing-masing.

Beberapa nama yang menurut catatan Posko Keprihatinan belum jelas keberadaannya, tapi menurut saksi mata ikut dalam aksi kepedulian antara lain Bahrul Alam dan Ananda B. Sementara Okyanti, Utami Pribadi Putri dan Ummy Syarifah yang semula juga dilaporkan hilang, setelah dicek ada di rumah masing-masing.

Menepis keras

Tentang kemungkinan masih ada mahasiswa atau peserta aksi yang bersembunyi karena takut dengan aparat keamanan setelah mengetahui sebagian rekan mereka sempat diamankan—meskipun akhirnya dilepas lagi, tapi ada yang kemudian dipanggil polisi lagi—PR III Unila Sulthon Djasmi menepis keras.

"Kenapa harus takut, pimpinan Unila sudah menjamin seluruh mahasiswa yang ikut aksi keprihatinan selama melakukan aksi di dalam kampus dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dijamin tidak akan terkena tindakan hukum dari pihak keamanan," kata Sulthon.

ABRI Bantah Tangkap Sejumlah Aktivistis

REPUBLIKA, RABU 1 APRIL 1998

JAKARTA — Sejumlah aktivis dikabarkan raib. Tak jelas di mana kini mereka berada. Isu yang beredar mereka 'dibawa' sekelompok orang tak dikenal. Namun, Kapuspen ABRI Brigjen TNI Wahab Mokodongan membantah bahwa mereka ditangkap aparat keamanan.

"Kami saat ini justru tengah berusaha mencari orang-orang yang dikatakan hilang itu. Kami sudah cek dari polsek, koramil, kodim, polwil, dan seterusnya. Ternyata kami tidak menemukan mereka ditahan atau berada di sana," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Mokodongan, orang yang berambut cepak dan berbadan tegap — figur penangkap yang digambarkan di media massa — belum tentu anggota ABRI. "Jangan membuat opini yang salah terhadap masyarakat bahwa yang melakukan penculikan itu anggota ABRI," katanya.

• Pangdam Jaya, Mayjen TNI Syafrie

Syamsuddin mengaku baru mengetahui masalah itu dari surat kabar. "Saya belum terima laporan resmi," kata Pangdam di Jakarta, kemarin. Tentang mereka yang dinyatakan hilang itu Pangdam berjanji akan membantu menemukan mereka. "Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparat akan ikut membantu (mencari mereka — Red)."

Tokoh Partai Rakyat Demokratik (PRD) Andi Arief, sejak Sabtu pekan lalu dibawa sekelompok orang saat berada di ruko milik keluarganya, di Palembang. Saksi mata menyebutkan sejumlah orang tak dikenal memaksa Andi Arief masuk ke mobil. Tak diketahui di mana ketua umum SMID ini sekarang berada.

Keluarganya menduga Andi Arief ditangkap aparat keamanan. Selain melakukan konfirmasi kepada aparat keamanan tentang keberadaannya, mereka kemudian mengadakan masalah itu ke

LBH Bandar Lampung. HM Arief Makhya dan Edi Irawan — ayah dan kakak Andi Arief — memberikan kuasa untuk melakukan upaya hukum demi mencari kejelasan keberadaan Andi Arief.

Ketua Bakortumasda Lampung, Kol (inf) Cornel Simbolon menepis adanya sinyalemen bahwa aparat keamanan menangkap aktivis PRD tadi.

"Saya sudah mengecek semua kesatuan yang ada di Lampung ini, dan ternyata mereka tidak melakukan penangkapan terhadap Andi Arief," kata Simbolon yang juga Danrem 043 Garuda Hitam.

Namun demikian, Simbolon menjanjikan akan melakukan penyelidikan ihwal hilangnya tokoh aktivis mahasiswa tersebut. "Saya akan melakukan penyidikan, mengapa ada gaya-gaya (penculikan — Red) seperti ini di Lampung," katanya. Sanggahan senada juga disampaikan Kapolda Lampung

• Kol (Pol) Drs Gendro Budi Santoso.

Selain Andi Arief, Pius Lustrilaning aktivis Aldera, Desmon J Mahesa (PBHI), Haryanto Taslam (PDI pro-Megawati), Rahardjo Waluyo Djati (KNIPD), Hermun Hendradan, dan Faisal Reza juga tak diketahui di mana keberadaannya mereka sejak 12 Maret lalu.

Kabar hilangnya sejumlah aktivis juga menarik perhatian Menkrel Prof Dr Muladi. Ia mengaku tidak tahu latar belakang raibnya para aktivis itu. "Ini perlu *clearance*, bukan saja dari pihak Pemerintah, namun juga dari pihak keluarga masing-masing," ujar Muladi yang anggota Komnas HAM.

Muladi mengingatkan bahwa raibnya sejumlah aktivis tadi harus dilaporkan. "Nanti dilaporkan hilang, padahal tidak," kata Muladi sambil menunjuk laporan hilangnya sejumlah aktivis pada peristiwa 27 Juli 1996. "Saya menemukan seorang dari me-

reka yang dilaporkan hilang di Pekalongan," ujar Muladi.

Raibnya sejumlah aktivis mengundang reaksi dari Dr Adnan Buyung Nasution. Ia menyatakan penangkapan para aktivis disebutkan telah melanggar hak asasi manusia. Buyung mengancam akan melaporkan hal itu ke Komisi HAM PBB.

Ia menyatakan hilangnya para aktivis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat dan kekuasaan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berpendapat bahwa sikap aparat terkesan lamban menangani kasus itu, bahkan seolah-olah tidak peduli.

Tentang laporan ke Komisi HAM PBB, Buyung mengisyaratkan bahwa hal itu akan direalisasikan akhir bulan ini. Ia mengharapkan agar Pemerintah memberikan klarifikasi mengenai hal ini. "Pemerintah bisa melakukan penyelidikan."

■ vie/bsa/nan

data (1.5.b)

'Penanganan Unjuk Rasa tak Seragam'

SEMARANG — Pola penanganan berbagai unjuk rasa, menurut anggota Koimnas HAM Satjipto Rahardjo, tak seragam. Ada daerah bersikap akomodatif terhadap mahasiswa, ada daerah yang bersikap sebaliknya.

"Karena itu, perlu ada penyeragaman pola penanganan dan pengendalian unjuk rasa. Ini hanya bisa dilakukan bila Mabes ABRI mengeluarkan garis-garis kebijakan," ujar Satjipto di Semarang, Sabtu (4/4), menanggapi insiden unjuk rasa belakangan ini.

Akibat belum adanya penyeragaman kebijakan dari tingkat pusat, menurutnya, masing-masing komandan memiliki visi berbeda menangani kasus unjuk rasa. Di Ujungpandang, mahasiswa dan aparat bisa berdialog, sedangkan di daerah lain terjadi bentrokan.

"Dengan adanya garis kebijakan dari Mabes ABRI, aparat keamanan memiliki pedoman. Tidak seperti sekarang ini, cenderung diserahkan kepada 'kreativitas' komandan di daerah," jelasnya.

Belakangan ini unjuk rasa mahasiswa diwarnai insiden. Di Yogyakarta, Jumat (3/4), aparat bentrok dengan Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY) di Boulevard UGM, Yogyakarta. Akibatnya, sebanyak 29 mahasiswa luka parah. Sehari sebelumnya 92 orang juga terluka karena bentrokan mahasiswa dan petugas.

Salah seorang korbannya adalah Timur Angin, 19 tahun. Putra Wakil Pemimpin Redaksi Majalah *Jakarta Jakarta* Seno Gumira Ajidarma itu, masih dirawat di Unit Gawat Darurat (UGD) RS Panti Rapih.

"Anak saya hanya melihat aksi itu, yang kebetulan lokasi unjuk rasa di dekat tempat tinggalnya," kata Seno, Sabtu (4/4). Timur Angin, mahasiswa Semester II Akademi Komunikasi Indonesia, tinggal bersama kakeknya di kompleks perumahan dosen UGM Bulaksumur.

Melalui LBH Yogyakarta, Seno akan menggugat Pangab. Ini karena Timur — yang mengaku sempat diborgol aparat — sama sekali tidak terlibat aksi mahasiswa. "Kami minta Pangab mengakui kesalahan petugas keamanan yang menangani unjuk rasa," ujar Budi Hartono, anggota Tim Khusus LBH Yogyakarta, Sabtu. Sebelum gugatan dilayangkan, LBH lebih dahulu melakukan somasi.

Insiden Bulaksumur itu juga mendatangkan reaksi penyesalan dari Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal

MA, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta (FKSMY), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), SMPT UGM, Keluarga Mahasiswa UGM, dan HMI Yogyakarta.

"Reaksi aparat terlalu berlebihan," kata Ichlasul di depan peserta mimbar bebas di halaman Balairung UGM, Sabtu. "Aparat sudah terlalu jauh masuk ke dalam kampus. Agar tak terulang, kami minta tidak ada lagi kekuatan luar masuk kampus." Pada kesempatan itu, Ichlasul membantah ada mahasiswa yang tewas dalam aksi kekerasan itu.

Menyusul insiden di Bulaksumur itu, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Yogyakarta (FKSMY) membentuk Tim Advokasi, yang terdiri atas Sigit Danang Joyo (FKSMY), Iwan Satriawan SH (LKBHI Yogya), dan Hillarus Ng Merro SH (LBH Yogya). Selain melakukan klarifikasi akibat kekerasan itu, tim ini juga melayangkan surat ke Komnas HAM dan Pangab.

"Kami minta Pangab menindak tegas aparat yang melakukan tindak kekerasan," ujar Sigit. Mereka juga mengundang Komnas HAM bertemu orangtua korban. Dari hasil klarifikasi Tim Advokasi, diketahui sedikitnya 31 orang terluka dan 10 orang belum diketahui nasibnya.

Kapolda DIY Kol Pol Drs Bani Siswono mengatakan pihaknya pada dasarnya mengerti apa yang disampaikan oleh Tim Advokasi. "Siapa pun menyesalkan semua itu terjadi. Tapi, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu adalah risiko logis dari sebuah kerusuhan," katanya setelah menerima Tim Advokasi FKSMY, Sabtu.

Ihwal adanya orang hilang, Kapolda mengatakan pengaduan FKSMY belum akurat. Sebab, hingga Sabtu menurutnya, belum ada satu pun keluarga mengadu kehilangan keluarganya ke Polda. Namun, Kapolda mengakui pihaknya menangkap 11 perusuh. Mereka, selain mahasiswa, juga terdapat pelajar SLTP, tukang becak, pedagang keliling, dan pengamen.

Saat ini tinggal tiga pengamen — Agus Pamiji alias Wawan, Ferdinandus Suhardono, dan Muhammad Kadarisman — yang masih dalam pemeriksaan. Mereka, menurut Kapolda, ikut unjuk rasa karena mendapat imbalan uang dan makan dari seseorang.

REPUBLIKA, SENIN 6 APRIL 1998

*Penas
Pangab
Khs*

Polri tidak keras hadapi aksi mahasiswa

Kupang, (AB)

- Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Letjen Pol Drs Luthfi Dahlan menegaskan anggotanya tidak melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di kampus-kampus belakangan ini, tetapi hanya reaktif.

"Kita (Polri) kalau dikatakan terlalu keras dalam menangani para demonstran, sebenarnya tidak. Kita hanya reaktif menghadapi aksi mereka saja," kata Jenderal Polisi berbintang tiga itu kepada para wartawan usai serah terima jabatan Kapolda NTT di Kupang, Selasa.

Jabatan Kapolda NTT yang baru dipegang Kol Pol Drs Engkesman Rangkoeng Hillep (50), menggantikan Kol Pol Drs Sawal Hariadi (51) yang baru tujuh bulan dua puluh lima hari menjabat Kapolda NTT sejak 20 Agustus 1997.

Lulusan Akabri Kepolisian 1970 itu sebelumnya mantan Wakapolda Sulawesi Utara yang baru usai mengikuti pendidikan Lemhannas. Sementara Sawal Hariadi selanjutnya menjadi staf Irjen Polri di Mabes Polri.

Kadispen Polri Brigjen Pol Da'i Bachtiar kepada wartawan sebelum acara serah terima jabatan Kapolda NTT mengatakan tidak ada bentrokan antara para mahasiswa dengan aparat keamanan.

"Yang terjadi hanya desak-desakan di pintu kampus. Saya tegas, tidak ada aksi penyerbuan aparat keamanan ke dalam kampus," kata Kadispen Polri.

Ia menambahkan bahwa anggota Polri tidak melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran seperti yang berkembang selama ini.

Wakapolri mengatakan, "Polri itu pada dasarnya kalau dikatakan terlalu keras, kita reaktif sebenarnya. Jadi kalau tindakan terkeerd keras, sebenarnya kita hanya reaktif."

Ada batasnya

Ia mengatakan anggota Polri di lapangan yang melakukan tindakan reaktif terhadap para mahasiswa itu karena ada aksi dari para demonstran itu sendiri.

"Kalau kita dilempari batu seperti di Yogyakarta itu, apa kita nunggu sampai polisi meninggal semua baru bertindak. Kan tidak. Tindakan kita juga ada batas-batasnya. Kita pakai tameng, tidak pakai hal-hal yang membahayakan, kecuali di dalam kepentingan untuk menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

"Saya kira anda tahu aparat Polri adalah aparat yang dipercayai untuk mengemban tugas keamanan dalam negeri. Karena itu kita berupaya sebaik-baiknya melalui antisipasi. Jadi kalau sesuatu kelompok gerakan itu diprediksi akan menimbulkan ketidakamanan.

(Bersambung ke Hal.VII kol. 6)

Polri tidak.... (Sambungan dari Hal.1)

dan ketidaktenraman, maka kita harus mengambil langkah-langkah," katanya.

Ketika ditanya mengenai tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap para mahasiswa yang dilakukan aparat Kepolisian Yogyakarta, Wakapolri membantahnya dan menegaskan bahwa anggotanya tidak melakukan penyiksaan.

"Tidak ada penyiksaan itu. Nggak ada itu. Dan tidak ada aktivis mahasiswa yang dihilangkan aparat keamanan. Nggak ada itu," katanya menegaskan.

Orang hilang

Sementara Kadispen Polri Brigjen Pol Da'i Bachtiar ketika ditanya wartawan secara terpisah mengatakan bahwa Mabes Polri saat ini sedang menginventarisir orang yang hilang, terutama para aktivis mahasiswa seperti yang berkembang dewasa ini.

"Kami masih menginventarisir. Tetapi saya kira tidak ada aktivis yang hilang. Ada aktivis yang dilaporkan hilang itu, ternyata sudah kembali ke rumahnya. Jadi sepertinya nggak ada. Tetapi kami tetap menginventarisirnya," kata Kadispen Polri. ~ (Ant/2.1)

Kadispen Polri: Penanganan Unjuk Rasa Sesuai Pelanggarannya

Jakarta, Kompas

Kepala Dinas Penerangan Kepolisian RI (Kadispen Polri), Brigjen (Pol) Da'i Bachtiar mengakui, aturan hukum yang jelas soal unjuk rasa hingga kini belum ada. Untuk sementara, acuannya adalah unjuk rasa sepanjang tidak melanggar norma-norma hukum, norma agama, dan ketertiban umum, tidak dilarang. Soal adanya kesan penanganannya beragam, itu lebih disebabkan jenis pelanggarannya.

"Unjuk rasa adalah salah satu bentuk dari keinginan untuk menyampaikan pendapat, yang tentunya kita acu dari pasal 28 UUD 1945, yang memberikan jaminan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, yang selanjutnya diatur UU (undang-undang). Untuk menyampaikan semua itu 'kan banyak cara. Kalau menurut konstitusi, bisa melalui DPR/MPR, atau melalui media massa, menulis surat, menyampaikan pendapat di koran serta lainnya," ucap Da'i

samaan, Da'i Bachtiar mengatakan, "Kalau dia tidak mengganggu ketertiban umum, di tempat mana pun unjuk rasa itu, termasuk di kampus, ya kita diamkan. Itu contoh. Tapi perlu diingat, sekalipun di kampus, kalau dia melanggar hal-hal yang saya sebutkan tadi, oknumnya perlu ditindak. Tempatnya boleh, karena tidak mengganggu ketertiban umum, tapi sekarang apa yang dia perbuat? Kalau dia melanggar hukum, contohnya, menghina, menista, ya kita tindak pelakunya."

Polisi, katanya, juga mempunyai wewenang membubarkan unjuk rasa jika hal itu dinilai berbahaya. Sebagai contoh, kalau pengunjuk rasa akan menuju satu tempat di mana ada kerumunan orang banyak, ada kerawanan, yang bila dilewati akan menimbulkan massa, hal seperti itu bisa dibubarkan polisi.

Kewenangan untuk membubarkan pengunjuk rasa, lanjut

Bachtiar ketika dihubungi Kompas di Jakarta, Kamis (5/3).

Bagaimana bentuk penyampaian pendapat dalam unjuk rasa, Da'i Bachtiar mengakui, hal itu hingga kini belum diatur secara jelas dalam UU. Karena itu, sementara ini acuannya adalah sepanjang pengunjuk rasa tidak melanggar norma-norma hukum, agama, serta tidak melanggar ketertiban umum, tidak membahayakan orang lain, dan tidak melanggar hak asasi orang lain, mereka dapat ditolerir.

"Kita akan jaga dan awasi. Se-

Da'i Bachtiar lagi, berdasarkan UU No 28/Tahun 1997 tentang Kepolisian RI Dalam pasal 18 ayat 1 UU itu disebutkan, untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak sesuai penilaiannya sendiri.

Diminta pendapatnya tentang penerapan UU No 5/PNPS/1963 terhadap 123 anggota "Barisan Merah Putih". Bachtiar hanya berucap, "Terhadap kasus ini, kita tunggu saja pengadilannya. Saya tidak ingin mengomentari. Yang jelas, UU itu masih berlaku apa *nggak*? Kalau masih berlaku, ya diterapkan. Soal benar tidaknya, nanti lihat pengadilan."

"Re-schedule"

Sementara itu, Sekretaris Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan HAM Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Clementino dos Reis Amaral mengemukakan, dari hasil dialog Komnas HAM de-

hingga ada unjuk rasa yang dibiarkan. Tetapi manakala ada pelanggaran, polisi bertindak. Kok berbeda-beda penanganannya? Itu tergantung pada apa yang dia langgar. Kalau dia melanggar keramaian, kena pasal 510 KUHP. Tapi kalau ada perbuatan yang bermuatan politik, kita bisa kenakan pasal-pasal tertentu," kata Da'i Bachtiar.

Menurut catatan Kompas, para pengunjuk rasa ditindak dengan pasal-pasal yang berbeda, meski mereka melakukan unjuk rasa bersamaan. Ada yang berdasarkan pasal 510 KUHP, yaitu tindak pidana ringan (tipiring), ada yang dikenakan UU No 5/PNPS/1963 tentang Kegiatan Politik. Tidak jarang, pengunjuk rasa diancam pasal-pasal penyebar kebencian.

Diamkan

Menyinggung perlakuan berbeda terhadap pengunjuk rasa yang melakukan unjuk rasa ber-

ngan pihak Polri beberapa waktu lalu diketahui, Polri sebenarnya tidak pernah mengeluarkan perintah larangan untuk melakukan unjuk rasa. Sebab, sejauh ini belum ada aturan hukum yang jelas tentang itu.

Namun, untuk berbagai kegiatan yang berbau politik saat Sidang Umum MPR 1998 memang ada instruksi di *re-schedule*. "Sedang untuk kegiatan lain seperti seminar, hajatan atau kegiatan keagamaan, tetap diizinkan," tegas Amaral.

Ditambahkan, dari dialog itu kemudian terbangun rasa saling pengertian. "Tetapi dalam rangka menindaklanjuti dialog itu, Komnas HAM tetap berpegang pada janji Polri untuk memberikan semacam buku pegangan operasional (*manual handbook*) dari Polri kepada Komnas HAM, yang sampai saat ini belum terealisasi. Sementara buku sejenis sudah kami terima dari TNI AD," paparnya. (ff/bw)

6 Maret 1998

Aksi mahasiswa sudah menjurus pada pelanggaran hukum

Jakarta (AB) — Aparat keamanan akan bertindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dalam menindak aksi unjuk rasa mahasiswa yang akhir-akhir ini cenderung anarkis.

Menko Polkam Feisal Tanjung sebelum Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekuin di Bina Graha, Jakarta, Rabu, mengatakan, aksi mahasiswa akhir-akhir ini mulai melenceng dan tidak tertutup kemungkinan ditunggangi pihak di luar kampus.

"Untuk mengatasinya kita akan tegakkan hukum," kata Feisal. Sejumlah aksi mahasiswa di beberapa tempat, kata Feisal, sudah menjurus pada pelanggaran hukum, seperti menggarong, membakar rumah, toko dan kendaraan. "Sudah melenceng, anarkis dan melanggar hukum," katanya.

Dia kembali mengimbau agar mahasiswa menyalurkan aspirasinya ke lembaga-lembaga resmi. Aspirasi tersebut pasti akan ditampung, dibahas dan dicarikan jalan keluarnya, kata Feisal.

Tentang kemungkinan maraknya aksi mahasiswa dan masyarakat berkaitan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), listrik dan ongkos transportasi, Feisal menyatakan, jangan menduga-duga sesuatu yang belum terjadi.

"Ah, kata siapa? Itu kan kaja kau. Jangan menduga-duga dulu lah," katanya.

Dia menjelaskan, pemerintah sudah mengantisipasi semua kemungkinan tersebut. "Kita sudah pikirkan," katanya.

Aksi mahasiswa Yogya disusupi residivis. Sementara itu Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tyasno Sudarto mengungkapkan, aksi mahasiswa di Yogyakarta yang diwarnai kerusuhan pada Selasa (6/5), telah disusupi pihak luar seperti pelaku tindak kriminal dan residivis.

Kepada pers sesuai menghadiri peresmian kegiatan Program Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter (PPDSK) di Kelurahan Tanjungmas, Semarang, Rabu, Pangdam menegaskan, aksi mahasiswa ke jalan raya memang mudah ditunggangi pihak luar.

"Karena itu aparat keamanan tetap tidak mentolerir mahasiswa turun ke jalan dalam setiap aksi," katanya.

Temuan aparat keamanan bahwa aksi mahasiswa di Yogyakarta disusupi pihak luar, menurut Pangdam, karena setelah mahasiswa yang melakukan aksi dipisahkan, maka ditemukan residivis yang

(Bersambung ke Hal. VII kol. 4)

Aksi mahasiswa... (Sambungan dari Hal. I)

mencoba memanfaatkan aksi mahasiswa tersebut.

Ditanya mengenai jumlah orang yang diamankan dalam aksi yang diwarnai kerusuhan di Yogyakarta itu, Pangdam menyatakan kurang-lebih 10 orang, namun bila tidak cukup bukti melakukan tindakan kriminal, mereka akan dilepaskan.

Aksi mahasiswa di Yogyakarta yang berlangsung di Jalan Gejayan, berlangsung Selasa hingga Rabu subuh.

Aksi yang menuntut reformasi di segala bidang dan memprotes kenaikan BBM itu tidak saja membawa korban luka, juga menyebabkan pengrusakan sarana umum, seperti saluran telepon.

Peserta aksi itu juga dilaporkan sempat "menyandera" Ketua DPRD DIY, Subagyo Waryadi.

Karena aksi sudah dilakukan di luar kampus, menurut Pangdam, maka hal itu sangat mudah ditunggangi pihak luar yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengambil keuntungan sepihak.

Oleh karena itu, ia minta mahasiswa tidak melakukan aksi di luar kampus, agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan pihak luar.

Sebelumnya, sosiolog UGM Yogyakarta Prof Dr Lockman Soetrisno menyatakan, setelah memperhatikan beberapa kali aksi mahasiswa di Yogyakarta, ia berkesimpulan bahwa radikalisme mahasiswa Yogyakarta semakin tampak.

Radikalisme mahasiswa itu, antara lain disebabkan tanggapan elit politik atas tuntutan mahasiswa cenderung berlawanan dengan aspirasi mahasiswa, kata Lockman Soetrisno awal pekan ini di Semarang dalam sebuah sarasehan format reformasi. —(Ant/3.1/1.6)

Unjuk Rasa Mahasiswa Berlanjut Dimana-mana

Jakarta, Kompas

Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi masih berlanjut dimana-mana. Sabtu (25/4). Bentrokan dengan aparat keamanan tak terhindari, hingga lemparan batu mahasiswa disambut tembakan peluru karet, bahkan gas air mata, mewarnai unjuk rasa.

Di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, delapan mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu dan tembakan peluru karet. Empat orang di antaranya terpaksa harus dirawat di RSUD Mataram.

Aksi keprihatinan mahasiswa di Medan, khususnya di Universitas Sumatera Utara (USU) berubah jadi bentrokan hebat. Petugas keamanan mendobrak pintu utama dan masuk kampus. Dalam pengamatan Kompas, empat mahasiswa ditangkap. Kendaraan taktis Sat Brimob Polda Sumut, menembakkan gas air mata berulang kali. Bahkan petugas berpakaian sipil sempat mengeluarkan pistol saat menangkap mahasiswa.

Dua mahasiswa Universitas Jambi (Unja) di Kodya Jambi, cedera. Seorang pingsan terinjak temannya, satu lagi kena peluru karet. Namun mereka tidak cedera serius, dan boleh pulang hari itu juga.

Sedikitnya 700 mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat, unjuk rasa dengan membacakan "tiga sumpah" mahasiswa. Pertama, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan aparat. Kedua, berbangsa satu, bangsa tanpa monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, berbahasa satu, bahasa kebenaran, keadilan, serta reformasi.

Sementara itu ditengah-tengah acara wisuda 677 sarjana Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jember menggelar aksi kepri-

hatinan. Mereka menggugat teman-temannya yang diwisuda, supaya peduli dengan keprihatinan yang dihadapi masyarakat kecil di negeri ini.

Tidak diculik

Para mahasiswa di Mataram, Lombok, hendak menggelar mimbar bebas di halaman Kantor DPRD NTB, Jalan Langko. Mereka berangkat dari kampus lama Universitas Mataram (Unram), namun dicegat aparat keamanan dan terjadi bentrokan ditandai pelemparan batu. Mahasiswa pun menggelar mimbar bebas dan menaikkan bendera setengah tiang. Lemparan batu disambut sekitar 20 kali tembakan peringatan aparat.

Rektor Unram, Prof Dr dr Mulyanto, minta supaya mahasiswa pulang dan berdasar pembicaraan dengan Kapolda NTB, Kolonel (Pol) Drs Dadang Sutrisno, Kapolda menjamin tidak ada di antara pengunjung yang akan "diculik". Bila perlu rektor berdiri di depan aparat dan menunggu mahasiswa pulang (keluar kampus).

Ditangkap

Terjadinya kerusuhan di Medan, sekitar pukul 17.30 WIB ketika mahasiswa gagal negosiasi dengan Komandan Kodim Tabes 0201/BS Letkol (Inf) Hadi Suharto. Mahasiswa minta, Dandim menarik pasukannya, namun Dandim minta mahasiswa segera meninggalkan kampus dengan tertib tanpa pelemparan batu. "Anda tidak ditangkap dan keselamatan Anda dijamin. Tapi, pulanglah dengan tertib," ungkap Letkol Hadi.

Mahasiswa tetap tidak mau pulang, dan melempari petugas yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Saat itulah sejumlah petugas berpakaian sipil dan militer mendobrak pintu gerbang, menangkap dan memu-

kuli mahasiswa

Rektor USU, Prof Chairuddin P Lubis DTMH SpAK kepada Kompas mengatakan, belum mengetahui adanya penangkapan dan pemukulan mahasiswa. "Saya hanya tahu dua mahasiswa Fakultas Teknik yang ditangkap siang hari, lalu dilepas. Kejadian sore itu, saya belum tahu. Kalau pemukulan dan penangkapan di dalam kampus, seharusnya tidak dilakukan petugas karena itu tanggung jawab saya," ungkapinya.

Sampai pukul 19.00 WIB, sekitar kampus USU masih dijaga ketat ratusan petugas dengan dua mobil kendaraan taktis.

Sekitar 1.500 mahasiswa Universitas Jambi (Unja) di Telanaipua, Kodya Jambi, bentrok dengan aparat keamanan. Gas air mata dan tembakan peluru karet meletus untuk membubarkan mahasiswa yang ingin keluar kampus dan bergabung dengan mahasiswa IAIN, yang sudah lebih dulu unjuk rasa ke DPRD.

Mahasiswa yang beraksi di Pontianak Universitas Tanjungpura (Untan), Universitas Panca Bhakti, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri (STLAN), Universitas Muhammadiyah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Mereka menggelar aksi keprihatinan di halaman depan Gedung Auditorium Untan Pontianak.

Prof Dr Syarif Ibrahim Al-qadrie, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untan yang didaulat berbicara menyatakan, keberadaan kaum birokrat selalu terbelenggu dalam kerangkeng besi, sehingga sulit berkeaktifitas, berinisiatif, bahkan jiwa dan hati pun tertutup. Untuk itu reformasi birokrasi harus menjadi agenda penting dalam upaya penataan kembali sistem pemerintahan.

(rul/smu/nat/jjj/sir)

Kasat Intel Polres Bogor Tewas Dipukuli Mahasiswa

BOGOR — Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol Dadang, kemarin tewas setelah dipukuli puluhan mahasiswa, usai mereka berunjuk-rasa di Kampus Universitas Djuanda, Bogor. Selain Dadang, Pasi Intel Kodin 0621 Bogor, Kapten Ali, juga terluka dan dirawat di rumah sakit.

Menurut Kapolwil Bogor, Kol Pol Abubakar N, peristiwa bermula saat kedua petugas itu mengamanakan unjuk-rasa di Kampus Unida. Ketika aksi reda, Kapten Ali bersalat Ashar di mesjid Amaliah di dekat Kampus Unida. Sejumlah mahasiswa rupanya memergoki Ali. Usai salat, kata Kapolwil, para mahasiswa menggiring Ali ke luar mesjid dan memukulinya beramai-ramai.

Melihat Ali pukuli, lanjut Kapolwil, Letda Dadang berusaha membantu Ali. Namun kedatangan Dadang tidak membuat para mahasiswa gentar. Dengan batu dan kayu, kata Kapolwil, para mahasiswa menghajar Dadang.

Sejumlah aparat yang melihat kejadian itu berusaha menyelamatkan Dadang dan Ali. Dadang dilarikan ke rumah sakit PMI Bogor. Namun akibat banyaknya darah yang keluar nyawanya tidak terolong. Perwira polisi ini menghembuskan napas di RS PMI sekitar 15.00. Sementara Ali, dengan tangan hampir patah dan luka-luka di badan dan kepala, dilarikan ke RS Salak.

Abubakar mengatakan kejadian ini membuktikan para mahasiswa sudah sangat brutal dan tidak lagi menunjukkan jati dirinya sebagai kaum intelektual. Hingga kemarin, katanya, pihaknya telah menahan tujuh mahasiswa yang diduga terlibat penganiayaan.

Aksi mahasiswa di Unida — menuntut reformasi dan penurunan harga BBM — berlangsung mulai pukul 11.00. Petugas berhasil menahan niat

rahasian mahasiswa yang ingin bergabung dengan rekan-rekannya di DPRD Kodya Bogor. Sekitar pukul 14.00 terjadi perang batu. Sejumlah anak SLTP juga ikut dalam aksi. Sekitar pukul 15.00, para mahasiswa sudah mulai meninggalkan kampus. Namun sejumlah mahasiswa lalu menemukan Kapten Ali di mesjid.

Di Yogyakarta, Moses Gatokaca, 40, warga Jl Brojo Lamatan 9A, juga menjadi korban dalam kerusuhan di Jl Gejayan, menyusul aksi unjuk-rasa mahasiswa.

Malam Jumat itu, menurut temannya, Moses keluar untuk melihat keributan di Jl Gejayan. Di saat yang sama massa berarian menghindari penyisiran *sweeping* yang dilakukan petugas keamanan. Usai *sweeping*, warga menemukan Moses tergeletak di tengah jalan dekat Kampus Universitas Sanata Dharma dengan tubuh penuh luka pukulan.

Bujangan asal Banjarmasin ini, alumnus Akprind Yogyakarta, meninggal saat dibawa ke RS Panti Rapih.

Kami yakin, Moses menjadi korban kekerasan pihak aparat saat melakukan *sweeping* terhadap para pengunjuk-rasa, kata para mahasiswa USD, yang mengantarkan Moses ke rumah sakit.

Aksi massa di Yogyakarta berlangsung mulai Jumat malam, menyusul unjuk-rasa di kampus-kampus. Aksi itu merembet ke jalan-jalan dan baru berakhir Sabtu pagi.

Pada aksi itu, massa cenderung destruktif, merusakkan prasana umum di Jl Gejayan, Jl Kolombo, dan Jl Adi Sutjipto, seperti *traffic light*, telepon umum dan pos polisi. Sebuah mobil minibus dibakar dan *show room* Yamaha dan gedung BHS dihancurkan.

(i.11.b)

Tiga Tersangka Pembunuh Letda Dadang Ditangkap, 5 Dikejar

BOGOR (Suara Karya) : Tiga mahasiswa Universitas Juanda tersangka pembunuh Kasat Intel Polres Bogor Letda Pol Dadang Rusmana ditangkap lima lainnya sampai Senin (11/5) terus dikejar. Penangkapan para mahasiswa Unida tersebut berdasarkan keterangan 15 saksi yang terdiri atas mahasiswa Unida, karyawan Unida, dan anggota masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut.

Sementara itu jenazah Letda Pol Dadang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung dengan upacara militer, Minggu. Bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman di Bandung adalah Letkol Pol Drs Hertian Yunus. Karena jasanya dalam melaksanakan tugas, pangkat almarhum Letda Dadang dinaikkan menjadi letnan satu Polisi anumerta.

Kapolwil Bogor Kol Pol Drs Abubakar Nata-prawira, menyatakan bahwa sampai Senin, pengejaran terus dilakukan. Tiga dari 8 tersangka yang terlibat penganiayaan tersebut, ditangkap di rumah orangtua mereka di daerah Bandung, Lampung, dan Ciawi. Penangkapan dilakukan sejak hari Minggu malam dan Senin dinihari. Mereka sampai Senin sore masih diperiksa secara intensif. Identitas kelima mahasiswa Unida lainnya sudah diperoleh petugas Polres Bogor dari pengakuan ketiga mahasiswa tersebut. "Lebih baik mereka menyerah saja. Lebih cepat lebih baik", kata Kol Pol Drs Abubakar.

Padahal para tersangka ini termasuk orang-orang yang menonjol dalam kegiatan unjuk rasa di kampus Unida. Mereka termasuk kelompok intelektual, dan mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi mereka melakukan perbuatan tidak berperikemanusiaan.

Akibat kebrutalan mereka, istri Letda Dadang Ny Teti dan dua anaknya Heri (12 th) dan Tian (5 th) harus menderita.

Kol Pol Drs Abubakar dan juga keluarga korban menyayangkan, bahwa aksi kebrutalan para mahasiswa tersebut dilakukan di halaman masjid. Kapten Ali diseret dari dalam masjid sesaat perwira pertama ABRI itu hendak menunaikan ibadah salat. Pama TNI AD tersebut dikeroyok, dipukul dengan potongan kayu, batu, dan ditendang di halaman masjid. Melihat itu Letda Dadang yang usai salat di masjid yang sama, berusaha untuk melerai. Tetapi dia dikeroyok dan dianiaya dengan pukulan batu.

"Dia saat itu berusaha melerai penganiayaan terhadap Kapten Ali dan mencegah agar para mahasiswa tidak terjerumus dalam tindak pidana," kata Kol Pol Drs Abubakar. Tetapi para mahasiswa malah memukul Letda Dadang dan mereka sempat mempertontonkan penganiayaan terhadap kedua Pama ABRI tersebut kepada masyarakat dan petugas di luar kampus.

Ditambahkan oleh Kapolwil Bogor, bahwa penangkapan para tersangka penganiaya Letda Dadang dan Kapten TNI Ali dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 7 mahasiswa Unida dan 8 saksi lainnya yang diperiksa sebelumnya. Di samping itu dari rumah kos para tersangka ini polisi menemukan sejumlah pakaian para tersangka yang digunakan ketika mereka mengeroyok kedua korban.

Tanggung Jawab

"Pakaian mereka ada bercak darahnya", kata Kapolwil Bogor. Pakaian para tersangka ini secepatnya akan dikirim ke Puslatfor Mabes Polri untuk diselidiki golongan darah pemakainya dan jenis darah yang menempel di baju. Di samping pakaian bermoda darah polisi juga menemukan puluhan batu yang digunakan untuk memukul para korban.

Kapolwil Bogor menyatakan bahwa dalam waktu dekat pimpinan Unida dan juga Perek III akan dipanggil untuk diminta tanggung jawab mereka. Kol Pol Abubakar dalam kesempatan ini sangat menyayangkan tindakan para mahasiswa yang terlibat penganiayaan sehingga menyebabkan tewasnya Letda Dadang.

Mereka yang terlibat berusaha lari dari tanggung jawabnya. Mereka lari setelah melihat kedua korban yang perwira pertama ABRI tersebut sekarat.

Akan Dikejar

"Kita pasti akan kejar mereka sampai dapat, karena mereka terlibat tindak pidana," kata Kapolwil Bogor sesaat usai pemakaman jenazah perwira pertama Polres Bogor di Bandung Minggu. Ditambahkan bahwa tuduhan terhadap mereka adalah melakukan penganiayaan terhadap petugas negara yang sedang melaksanakan tugasnya. Di samping itu para mahasiswa dalam penganiayaan tersebut telah merencanakannya terlebih dahulu.

Sementara Kapolda Jawa Barat Mayjen Pol Drs Chaerudin Ismail menyatakan prihatinnya atas kasus tersebut. Meskipun sudah banyak korban yang jatuh dari pihak Polri, pihaknya akan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanpa ada dendam. Dalam kesempatan ini Kapolda Jawa Barat menilai bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini sudah ditanggapi. Oleh karenanya sesuai dengan pengarahannya ABRI, pihaknya akan tetap mencegah para mahasiswa turun ke jalan.

data (I.11.c)

Aksi Mahasiswa Tewaskan Perwira Polisi

Jakarta, Kompas

Aksi mahasiswa di Bogor, Sabtu (9/5) menewaskan Letnan Dua (Pol) Dadang Rusmana, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor. Beberapa mahasiswa Universitas Djuanda (Unida) Ciawi, Kabupaten Bogor, memukul kepala Dadang dengan batu, dan meninggal di rumah sakit beberapa saat kemudian. Perwira polisi lulusan Sekolah Calon Perwira ini, meninggalkan seorang istri dan dua anak.

Perwira lain, yang menjadi korban pemukulan mahasiswa Unida, adalah Kapten (Inf) Ali, Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer Bogor. Ali mengalami luka parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor.

Dalam keterangannya kepada wartawan di RS PMI, Bogor, kemarin, Kepala Kepolisian Wilayah Kolonel (Pol) Abubakar mengatakan, sekitar sembilan mahasiswa diperiksa tim penyidik.

Menurut Abubakar, Sabtu siang sekitar 150 mahasiswa Unida Ciawi yang ingin melakukan aksi jalan kaki ke luar kampus dicegah aparat keamanan. Sempat terjadi pelemparan batu terhadap aparat.

Sekitar pukul 15.00, Kapten Ali, yang berpakaian preman akan sholat Ashar bersama mahasiswa Unida di mesjid dekat kampus. Namun, mahasiswa Unida mengenalinya sebagai petugas, lalu dibawa ke luar mesjid, dipukuli, ditendangi beramai-ramai, dan dilempari batu.

Letda Dadang yang ada di dekat mesjid memerintahkan anak buahnya untuk "mengatasi" pengeroyokan itu. Namun, sesaat kemudian, seorang mahasiswa menghajar kepalanya dengan batu. Ia tersungkur dan pingsan, kemudian dibawa ke RS Ciawi dan selanjutnya dipindahkan di RS PMI Bogor. Pukul 16.00, Letda Dadang meninggal dunia.

Aparat keamanan lalu menyerbu masuk kanipus untuk mengamankan petugas yang dikeroyok mahasiswa.

Bentrokan
Di Bandung, bentrokan terjadi antara aparat dengan mahasiswa di Jl Dipati Ukur, depan kampus Universitas Padjadjaran (Unpad). Sejumlah mahasiswa dan aparat mengalami luka-luka.

Unjuk rasa juga terjadi di depan kampus Sekolah Tinggi Sains Teknologi, Universitas Pasundan, dan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Namun aksi di tiga kampus itu cenderung terkendali.

Data tim medis Unpad menyebutkan, 31 mahasiswa dan seorang pengamen luka-luka. Juga diperoleh keterangan, tiga aparat keamanan luka-luka. Salah satunya, Kepala Satuan Binmas Polres Bandung Tengah Kapten (Pol) Dwi.

Massa sekitar 2.000 orang dari Unpad, Institut Teknologi Adityawarman, Universitas Pasundan, Universitas Islam Bandung, Institut Teknologi Bandung, Universitas Winaya Mukti serta Institut Koperasi Indonesia. Mahasiswa juga menggelar mimbar bebas dengan menampilkan Harry Roesly dan Prof Dr Sri Sumantri.

Di Jakarta, unjuk rasa mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta diwarnai bentrokan dengan aparat. Sebanyak 20 mahasiswa luka-luka, tujuh di antaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Awalnya, unjuk rasa mahasiswa USNI bersama mahasiswa STMIK Budi Luhur, Universitas

Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Universitas Moestopo (Beragama), berlangsung damai. Bentrokan terjadi saat ada lemparan batu terhadap petugas dari arah luar kampus (bukan dari arah mahasiswa). Aparat yang marah menyerang mahasiswa, sementara mahasiswa yang merasa tidak bersalah balas menyerang. Bentrokan berlangsung sekitar 15 menit.

Kepada wartawan, usai acara. Ketua Umum Senat Mahasiswa USNI Nurhasanah mengatakan, pihaknya akan mengajukan protes kepada Panglima ABRI sehubungan dengan terjadinya penyerangan aparat keamanan terhadap aksi damai mahasiswa.

Aksi damai juga dilakukan sekitar 150 mahasiswa Universitas Attahiriyah Jakarta, dan sempat terhenti karena dihalau aparat. Aksi damai digelar di beberapa perguruan tinggi Jakarta, Bina Sarana Informatika, Swa Dharma, Bina Nusantara, Satya Negara, Al Kamal.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melakukan aksi "simpatik" di ruas jalan Ir H Juanda, dengan memberi air minum kemasan kepada sopir angkutan umum secara gratis. Setiap kemasan dilengkapi secarik kertas berisi pesan mahasiswa untuk masyarakat luas. "Rakyat sengsara mahasiswa ikut merasakan. Rakyat dan mahasiswa bersatulah untuk perubahan," bunyi pesan itu.

data (I.13.a)

Aparat bersihkan Mahasiswa di Kompleks DPR

JAKARTA— Gedung DPR/MPR yang sejak Senin lalu diduduki mahasiswa dari berbagai kampus, mulai tengah malam dikosongkan dari para demonstran. Mereka semula menolak untuk meninggalkan sebelum tuntutan reformasi total versi mereka diteliti.

Kabar akan dilakukan pembersihan itu sudah dilengar para mahasiswa sejak sore hari. Namun mereka banyak yang menanggapi dengan dingin. Bahkan mereka tidak yakin aparat berani membersihkaninya. Dan para mahasiswa yang jumlahnya tinggal sekitar 2.000 itu tetap berada di setiap ruangan yang ada di DPR. Bahkan mereka menempati hampir seluruh lantai di Gedung Baru DPR/MPR.

Namun, begitu waktu menunjukkan pukul 23.30, atusan aparat datang memasuki gedung DPR. Dengan menggunakan pengeras suara, aparat pamong raja masuk ke gedung DPR dan menyerukan agar mereka segera mengosongkan gedung karena akan segera direnovasi untuk sidang-sidang anggota DPR.

Mahasiswa yang sebenarnya sudah tidak murni lagi itu kian terdesak ketika anggota pamong raja, Kodam Jaya, Polisi Militer, dan Marinir mengepung mereka di setiap lantai dan ruangan yang ada.

Ketika dikumpulkan di halaman DPR, para mahasiswa tetap menawar bahwa mereka tidak merusak. Tapi aparat tak mau peduli, pokoknya mahasiswa harus keluar. Yang bisa dilakukan mahasiswa hanya menyanyikan lagu-lagu kebangsaan secara bersama-sama.

Dalam melakukan pembersihan ini, aparat menggunakan cara yang persuasif. Tidak ada tembakan yang terdengar, bahkan senjata aparat hanya mengkilang di belakang. Namun jumlah aparat tergolong besar.

Ada puluhan truk tentara dan puluhan bus Mayajari Bhakti disediakan. Ini sesuai dengan keinginan mahasiswa yang sebelumnya mengelak pulang karena tidak ada kendaraan.

Begitu waktu melewati tengah malam, aparat mulai bergerak dengan serius dan membuat mahasiswa erdesak. Tak ada pilihan lain bagi para mahasiswa untuk meninggalkan Gedung DPR/MPR. Puluhan bus dan truk mulai memasuki halaman DPR dan siap nengangkut mereka.

Sampai berita ini diturunkan tanda-tanda pengongongan sudah tampak. Lampu-lampu gedung yang semula mati, mulai dinyalakan. Ini untuk memudahkan melakukan evakuasi mahasiswa. Bentrok fisik belum terjadi serius. Dan harapan aparat, Sabtu hari ini gedung DPR/MPR sudah bersih.

Penutupan jalan-jalan di luar Gedung Senayan sudah dilakukan sejak pukul 23.00 WIB. Misalnya penutupan jalan Palmerah menuju Gedung DPR, juga jalan Lapangan Tembak yang menuju ke DPR tak bisa dilewati.

Sebenarnya jumlah mahasiswa yang berada di Gedung DPR/MPR sekarang tinggal sedikit, sekitar 1.000. Tidak seperti Senin lalu yang jumlahnya sampai puluhan ribu. Puncak kolosal mahasiswa adalah tanggal 20 Mei lalu, ketika Soeharto belum mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Namun, setelah Pak Harto mundur, sebagian besar mahasiswa sudah beranjak kembali ke rumah masing-masing, kecuali aktivis yang memang tidak menghendaki naiknya BJ Habibie menjadi Presiden.

Sebelum 21 Mei untuk masuk ke Gedung DPR/MPR hanya mereka yang bisa menunjukkan kartu mahasiswa yang diizinkan. Namun setelah itu, pintu DPR/MPR sudah longgar, masyarakat boleh masuk. Oleh karena itu, para pendemo yang ada sekarang bukan hanya mahasiswa, tapi juga aktivis LSM, seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang datang menggunakan seragam biru dengan tulisan SBSI punggung. Sejak diduduki mahasiswa, gedung sekarang terkesan kumuh dan jorok.

data (I.13.b)

Koopsjaya "bersihkan" gedung DPR/MPR dengan damai

Jakarta, (AB)

Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad dan Marinir, yang tergabung dalam Komando Operasi Jaya (Koopsjaya), "membersihkan" gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu dinihari dari sisa mahasiswa yang bertahan.

Sebelumnya, mahasiswa tersebut sejak Selasa (19/5) "menguasai" gedung tersebut dan tinggal di dalamnya guna menuntut reformasi menyeluruh.

"Pembersihan" tersebut dimulai sekitar pukul 23.30 WIB melalui gerakan petugas lewat pintu masuk bagian belakang gedung tersebut, membendung jalan masuk dan mulai mengumpulkan mahasiswa di bagian luar gedung DPR/MPR.

Pada pukul 23.45 WIB, petugas mulai memasuki gedung Lokawirasabha dan memerintahkan mahasiswa di lantai atas gedung tersebut turun dan menggiring mereka ke luar gedung atau masuk lobi gedung Graha Karana dan tangga Pustaka Loka.

Pada pukul 00.05 WIB, sekitar 3.000 mahasiswa dikumpulkan di lobi Graha Karana dan sisi barat jalan menuju gedung DPR/MPR. Selanjutnya, pada pukul 00.10 WIB, mahasiswa di ruangan tersebut secara berangsur-angsur keluar sampai seluruhnya berkumpul di jalan masuk sisi barat.

Sejak pukul 00.10 WIB, mahasiswa secara perlahan didesak mundur ke arah luar pintu masuk gedung, disertai permintaan petugas melalui pengeras suara pada dua mobil pamong praja agar mahasiswa meninggalkan gedung DPR/MPR secara sukarela, karena gedung itu akan diperbaiki untuk sidang Dewan guna kelangsungan reformasi.

Sekitar delapan dari 200 bus yang disiapkan untuk mengangkut mahasiswa masuk dari pintu depan dan diparkir menghadap jalan.

Sudarso, sopir bus Mayasari pool Cijantung, mengaku tidak tahu kalau bus yang dikemudikannya akan digunakan untuk mengangkut mahasiswa.

"Saya tadi pulang naik jam 09.00 WIB dan sekitar jam 10.00 WIB saya diperintahkan menuju Senayan. 'Ndak' tahunya ke sini," katanya.

Menurut dia, jumlah bus yang dikerahkan ratusan, terdiri atas bus Mayasari Bhakti, Himpurna dan Maya Raya dari berbagai pool, seperti Cijantung, Klender dan Cibitung.

Persuasif

Pada Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB, rombongan dari empat bus pertama, yang mengangkut mahasiswa, berangkat meninggalkan gedung DPR/MPR, sementara ribuan sisanya masih bertahan.

Upaya persuasif petugas semakin berhasil setelah sekitar pukul 02.00 WIB mahasiswa masuk bus. Pada pukul 02.15 WIB, bus yang penuh berisi mahasiswa, bahkan di bagian atasnya, mulai bergerak meninggalkan pelataran parkir gedung menuju berbagai kampus di Jakarta, seperti di UKI Cawang, Unika Atmajaya, Borobudur, IISIP dan lain-lain.

Teriakan "hidup reformasi" dan lagu "Halo-Halo Bandung" mengiringi kepergian bus tersebut menuju tujuan. Hingga sekitar pukul 02.44 WIB, seluruh bus penuh sesak sisa mahasiswa meninggalkan halaman gedung, sedangkan bus yang lain keluar dalam keadaan kosong.

Selesai setelah bus terakhir keluar dari halaman gedung, petugas keamanan langsung menutup seluruh jalan masuk gedung tersebut.

Sementara itu, Pangkoopsjaya, yang juga Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsuddin, hanya tampak sebentar dalam operasi tersebut, yaitu sekitar pukul 11.45 WIB hingga 12.10 WIB dan pelaksanaan operasi diambil alih Kasdam Jaya Brigien TNI Sudi Silalahi didampingi Kapendam Jaya Letkol DJ Nachrowi.

Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Hen-
(Bersambung ke Hal. VII kol. 1)

darji saat diserbu wartawan sesuai operasi pembersihan menyambut gembira keberhasilan operasi tersebut. "Keberhasilan ini karena saling pengertian antara mahasiswa dengan petugas," katanya.

Ia mengatakan, operasi pembersihan tersebut harus dilakukan, karena gedung tersebut harus segera direnovasi, karena banyak kerusakan selama "dikuasai" massa yang sebagian besar mahasiswa.

Setelah renovasi, Dewan diharapkan dapat melakukan sidang untuk membahas proses reformasi. "Kalau gedung ini tetap dipenuhi mahasiswa seperti saat ini, apa bisa anggota Dewan bersidang dengan baik," katanya.

Saat menanggapi penggunaan kekerasan oleh petugas terhadap mahasiswa dan wartawan, ia menyatakan tidak melihat kejadian itu. "Namun, jika hal tersebut memang terjadi, akan diselidiki," katanya.

Kelelahan

Pada Sabtu dinihari, sesuai operasi pembersihan, petugas keamanan tampak kelelahan, sehingga terlelap di halaman gedung.

Menurut seorang komandan regu dari kesatuan Kostrad, petugas tersebut kelelahan setelah sehari-hari mengamankan Jakarta. "Saya saja sudah sepuluh hari tidak pulang," katanya.

Sampai Sabtu sekitar pukul 04.00 WIB, petugas kebersihan, yang tiba lebih kurang pukul 02.40 WIE, telah membersihkan hampir 90 persen halaman.

Sebelumnya, halaman tersebut dipenuhi sampah botol air minum, kertas dan plastik, sisa makanan massa yang sempat "menguasai" gedung perwakilan rakyat tersebut.

Sementara itu, bus berisi ribuan mahasiswa sempat membuat macet arus lalu lintas dinihari di kawasan Jl Gatot Subroto.

Rombongan tersebut sembari meneriakan yel reformasi menuju Unika Atmajaya, kendati seharusnya menuju kampus masing-masing.

Permintaan Setjen

Petugas keamanan mengevakuasi para mahasiswa yang berkumpul gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sejak beberapa hari lalu karena ada permintaan dari Sekretaris Jenderal DPR/MPR RI. "Alasan permintaan tersebut karena sejumlah peralatan dan fasilitas gedung DPR ada yang rusak," ujar Kasdam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Sudi mengemukakan rusaknya peralatan dan fasilitas wakil rakyat itu secara tidak langsung merugikan rakyat juga, karena barang tersebut milik negara. "Kita tidak menuduh kerusakan itu dilakukan oleh mahasiswa tapi bisa saja dilakukan orang yang mengambil kesempatan. Kalau sudah rusak, siapa yang mau bertanggung jawab," ujar Kasdam dengan nada bertanya.

"Kita mengajak mahasiswa keluar dari gedung MPR/DPR dengan baik-baik tanpa menggunakan kekerasan sama sekali," ucap Sudi.

Hal itu juga dibenarkan Kapendam Jaya Letkol Inf. DJ Nachrowi. "Menghadapi mahasiswa tidak boleh dilakukan cara kekerasan tapi dengan cara pendekatan, sehingga mereka mengerti apa yang kita kehendaki," ungkap Nachrowi yang ikut pada evakuasi mahasiswa tersebut.

Bahkan Nachrowi menggunakan alat mengeras suara menyampaikan maksud petugas kepada mahasiswa untuk mengosongkan lingkungan gedung DPR/MPR RI. Nachrowi dengan menggunakan kendaraan Trantib DKI Jakarta memberikan penjelasan kepada mahasiswa yang berada di gedung DPR. -(5,28/2.31Ant/5.21)

Evakuasi Mahasiswa Dari Gedung DPR Berlangsung Menegangkan

JAKARTA (Suara Karya): "Perjuangan belum selesai, kami pasti kembali ke gedung ini. Salam Reformasi, Hidup Rakyat, Hidup Mahasiswa...!" teriak para mahasiswa berulang-ulang saat meninggalkan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu dini hari (23/5). Teriakan ini pun disambut dengan sorak-sorai meriah oleh puluhan warga masyarakat, penjual makanan, wartawan dalam dan luar negeri yang ada di pintu gerbang depan gedung wakil rakyat itu.

Suasana gedung megah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang selama beberapa hari hiruk-pikuk kemudian menjadi hening dan tenang. Ribuan mahasiswa telah pergi. Hiruk-pikuk serta teriakan menyerukan tuntutan reformasi, tidak ada lagi di sana. Tidak terdengar lagi teriakan "yel-yel", lagu-lagu perjuangan, atau orasi-orasi dari para mahasiswa dan tokoh kritis yang selama lima hari menyetiak di sana.

Pemandangan di gedung DPR sejak Sabtu (23/5) dan Minggu (24/5), telah berubah dengan kesibukan para petugas kebersihan dan anggota ABRI. Mereka bekerja sama membersihkan setiap sudut gedung, ruangan dan halaman yang penuh dengan ongkongan sampah, kotoran, corat-coret, tulisan, serta poster/spanduk, yang sejak 18 Mei lalu memenuhi gedung tersebut. Mereka juga membenahi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan.

Kerusakan

Menurut siaran pers Biro Humas Setjen DPR RI

yang diterima *Suara Karya*, Minggu malam, berbagai kerusakan yang ditimbulkan selama pendudukan mahasiswa atas gedung itu terdapat di ruang Graha Sabha Paripurna (pintu kaca samping VIP dan semua pintu toilet), Grahatania (pintu kristal air mancur), Lokawirasabha (pintu otomatis kaca di lantai 12, pentri, arsip dan rekaman dokumen yang akan disimpan di Arsip Nasional hancur/hilang, Grahakara (ruang kerja bagian atas, kertas-kertas, komputer, dan faksimile rusak). Di samping itu terjadi kerusakan sejumlah insulasi, serta kerusakan taman. Diperkirakan kerugian akibat berbagai kerusakan itu mencapai milyar rupiah.

Menurut Biro Humas dan Hukum Setjen DPR RI, FX Subandrio BA, dengan adanya kerusakan-kerusakan, sebenarnya pihaknya sudah memberitahukan para mahasiswa melalui para koordinatornya agar segera meninggalkan gedung. Permintaan ini mengingat gedung sudah harus segera digunakan para wakil rakyat melaksanakan tugasnya, juga agar para pegawai Setjen DPR RI bisa kembali bekerja dengan tenang. Namun permintaan ini tidak pernah dihiraukan, sehingga akhirnya pihak Kepala Setjen DPR RI minta bantuan Kodam Jaya memindahkan mahasiswa

Curiga

Sebelum dilakukan evakuasi massal, para ber-tahuan dilakukan sedemikian rupa, baik melalui

Lihat halaman 42 kol.1

pimpinan dewan maupun aparat keamanan. Seperti pada saat diadakan konpres pers antara pimpinan dewan dengan perwakilan mahasiswa, di mana saat itu disepakati mahasiswa akan berangsur-angsur meninggalkan gedung. Demikian pula saat Kasdam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi meninjau kerusakan-kerusakan gedung, Rabu siang, permintaan meninggalkan gedung sudah dilontarkan. Sampai akhirnya Menhankam Pangab Jenderal TNI Wiranto mengintruksikan pengosongan gedung itu. Namun toh detik-detik menjelang evakuasi (Jumat tengah malam), ketegangan, bahkan suasana mencekam masih sempat terjadi.

Peringatan petugas agar gedung segera dikosongkan, tidak ditanggapi oleh sebagian mahasiswa, meski sebagian dari mereka sudah meninggalkan gedung DPR sebelumnya. Sekitar 5.000 mahasiswa diperkirakan Jumat malam itu masih berada di gedung DPR. Mereka ada yang bernyanyi-nyanyi ditirungi petikan gitar, yang lain berkumpul dengan teman-temannya sambil tidurditan.

Namun, ada juga sebagian mahasiswa yang berjaga-jaga di pintu gerbang depan dan belakang gedung DPR. Mereka tampaknya tahu kalau malam itu akan terjadi "sesuatu" di gedung yang "didudukinya". "Bayangkan Mas, sejak pukul 08.00 WIB puluhan aparat keamanan keluar-masuk pintu. Saya juga melihat truk-truk penuh dengan prajurit ABRI di jalan, serta dua mobil pemadam kebakaran ditempatkan di halaman bagian belakang. Ini membuat kami curiga, jangan-jangan akan terjadi apa-apa di sini," kata seorang mahasiswa.

Para mahasiswa akhirnya membentuk pagar betis dengan bergandengan tangan. Tidak ketinggalan, mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan seperti Indonesia Raya, Padamu Negeri, Maju Tak Gentar, dan lain-lainnya untuk memberi dorongan semangat dan melepas ketegangan. Aparat keamanan pun hanya berjaga-jaga tanpa bersuara sambil terus siaga dengan senjatanya.

Kasar

Sekitar pukul 23.30 WIB evakuasi yang dipimpin Kasdam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi dimulai. Gerakan pasukan anti huru hara Kodam Jaya sungguh di luar perkiraan mahasiswa. Mahasiswa yang memusatkan pertahanan di pintu depan, ternyata kecolongan, karena pasukan Kodam Jaya masuk lewat pintu belakang. Pada saat penyerbuan, sempat terdengar suara pecahan kaca dan teriakan aparat yang disertai dengan bentakan-bentakan. Suasana menjadi tegang. Namun, suara cukup simpatik terdengar pula lewat corong megaphone yang diucapkan oleh seorang perwira menengah. "Adik-adik mahasiswa mohon segera keluar dan meninggalkan gedung, karena gedung ini akan dibersihkan dan direhabilitasi," demikian petugas itu mengimbau.

Namun, jalannya evakuasi sempat diwarnai sikap kasar petugas. Sejumlah mahasiswa dan wartawan mengaku dibentak-bentak petugas, dan bahkan sejumlah oknum petugas berpakaian preman sempat melakukan kekerasan fisik dengan menendang ataupun memukul mahasiswa. Kontan, perlakuan dan sikap kasar ini diadukan mahasiswa dan wartawan kepada Dan Pom Jaya Kolonel CPM Hendarji. "Kami akan mencek pengaduan adik-adik, dan kalau benar demikian tentu akan dikenakan tindakan tegas. Sebab, instruksi Panglima petugas harus berlaku simpatik kepada adik-adik," kata Hendarji.

Dalam waktu satu setengah jam, evakuasi berlangsung dengan lancar. Para mahasiswa dikumpulkan menurut kelompoknya masing-masing dan dimasukkan ke dalam bus. Mereka yang sebelumnya ketakutan, menjadi bersemangat lagi mendengar "yel-yel" dan teriakan tuntutan reformasi yang bergema lagi. Para mahasiswa kemudian diantarkan dengan menggunakan puluhan bus ke kampus Atmajaya, Jalan Sudirman, Jakarta. Di kampus Atmajaya "pejuang" reformasi itu disambut oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Setelah beristirahat para mahasiswa itu kembali ke kampusnya masing-masing. (S-20)

data (I.13.d)

Ribuan Mahasiswa Tinggalkan Gedung MPR/DPR

Jakarta, Kompas

Gedung MPR/DPR yang diduduki mahasiswa sejak Senin (18/5) lalu, Sabtu (23/5) dini hari pukul 02.10 WIB masih dalam proses pengosongan oleh sekitar 1.000 pasukan gabungan ABRI yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi. Pasukan gabungan ini masuk dari arah belakang Gedung MPR/DPR pukul 23.35 WIB itu, sempat membuat sekitar 4.000 mahasiswa panik.

Berbeda dengan Peristiwa 27 Juli 1996 di mana pembebasan

Gedung PDI berlangsung keras dan berdarah, bahkan banyak orang yang hilang, aksi pembebasan Gedung MPR/DPR itu berlangsung damai. Pasukan ABRI menunjukkan sikap yang sangat simpatik dan sabar. Ketika pasukan memasuki kompleks Gedung MPR/DPR, para mahasiswa menyanyikan lagu *Indonesia Raya* dan *Padamu Negeri*.

Sampai berita ini diturunkan pukul 01.45 WIB, mahasiswa mencapai kesepakatan dengan Kepala Dinas Penerangan Kodam Jaya Letkol

(Inf) DJ Nachrowi, yakni mahasiswa bersedia keluar gedung asalkan dikawal pasukan marinir. Pada pukul 01.50 WIB mereka mulai menaiki bus menuju Universitas Atma Jaya, yang terletak sekitar 2 kilometer dari kompleks Gedung MPR/DPR.

Komandan Batalyon Arhanud Marinir, Letkol (Mar) S Panjaitan, berhasil meyakinkan mahasiswa bahwa keselamatan mereka dijamin sampai ke tempat tujuan.

Melalui pengeras suara, Kepala Penerangan Kodam Jaya

Letkol (Inf) DJ Nachrowi meminta agar mahasiswa dengan sukarela meninggalkan Gedung MPR/DPR, karena gedung itu akan segera direnovasi.

Namun, permintaan Nachrowi yang berulang-ulang diucapkan dengan pengeras suara itu, tidak diindahkan mahasiswa. Mahasiswa yang berada di dalam atau luar gedung DPR membentuk kelompok-kelompok kecil dan mencoba bertahan.

Aparat keamanan juga dipecah ke dalam beberapa kelompok, dan mulai memasuki

ruangan-ruangan di Gedung DPR/MPR dan dengan simpatik meminta dan menggiring mahasiswa ke luar ruangan, lantas berkumpul di halaman. Ruangan-ruangan yang telah dikosongkan mahasiswa, langsung dipagar betis oleh aparat. Menjelang pukul 01.00 WIB, pasukan gabungan ABRI berhasil mengosongkan Gedung DPR. Seluruh proses pengosongan kompleks itu disiarkan secara langsung oleh CNN.

Lampiran 3: Hasil Analisis Perspektif Pemberitaan Berbagai Surat Kabar Indonesia pada Akhir Era Orde Baru Berdasarkan Tiga Indikator (topik, partisipan, dan nada pemberitaan)

Data No.	Surat Kabar	Berita Tentang	Perspektif
I.1a.	Kompas	Insiden Trisakti	Persp. Pro Mahasiswa
I.1b.	Republika	Insiden Trisakti	Persp. Pro Mahasiswa
I.1c.	Suara Karya	Insiden Trisakti	Persp. Pro Pemerintah
I.2a.	AB	Pemberitaan Media Massa	Persp. Pro Pemerintah
I.2b.	Suara Karya	Pemberitaan Media Massa	Persp. Pro Pemerintah
I.2c.	Republika	Pemberitaan Media Massa	Persp. Pro Pemerintah
I.3a.	Suara Karya	Aksi Mahasiswa 1	Persp. Pro Pemerintah
I.3b.	Republika	Aksi Mahasiswa 1	Persp. Pro Mahasiswa
I.3c.	AB	Aksi Mahasiswa 1	Persp. Pro Pemerintah
I.4a.	Kompas	Kasus Orang Hilang	Netral
I.4b.	Suara Karya	Kasus Orang Hilang	Persp. Pro Pemerintah
I.4c.	AB	Kasus Orang Hilang	Persp. Pro Pemerintah
I.4d.	Republika	Kasus Orang Hilang	Netral
I.5a.	Suara Karya	Penanganan Aksi Unjuk rasa	Persp. Pro Pemerintah
I.5b.	Republika	Penanganan Aksi Unjuk rasa	Netral
I.5c.	AB	Penanganan Aksi Unjuk rasa	Persp. Pro Pemerintah
I.5d.	Kompas	Penanganan Aksi Unjuk rasa	Persp. Pro Pemerintah
I.6a.	Suara Karya	Kerusuhan di Medan	Persp. Pro Pemerintah
I.6b.	Kompas	Kerusuhan di Medan	Netral
I.6c.	Suara karya	Kerusuhan di Medan	Persp. Pro Pemerintah
I.6d.	Republika	Kerusuhan di Medan	Netral
I.7a.	Suara Karya	Pemakaman Korban Kebakaran	Netral
I.7b.	Kompas	Pemakaman Korban Kebakaran	Netral
I.7c.	Republika	Pemakaman Korban Kebakaran	Netral
I.8a.	Kompas	Aksi Mahasiswa 2	Netral
I.8b.	Republika	Aksi Mahasiswa 2	Netral
I.8c.	AB	Aksi Mahasiswa 2	Persp. Pro Pemerintah
I.9a.	Suara Karya	Aksi Mahasiswa 3	Persp. Pro Pemerintah
I.9b.	AB	Aksi Mahasiswa 3	Persp. Pro Pemerintah
I.9c.	Republika	Aksi Mahasiswa 3	Persp. Pro Pemerintah
I.9d.	Kompas	Aksi Mahasiswa 3	persp. Pro Mahasiswa
I.10a.	Republika	Pemberitaan Majalah D&R	Netral
I.10b.	Suara Karya	Pemberitaan Majalah D&R	Persp. Pro Pemerintah
I.10c.	Kompas	Pemberitaan Majalah D&R	Persp. Pro Pemerintah
I.10d.	Republika	Pemberitaan Majalah D&R	Netral
I.11a.	Republika	Kematian Letda Pol Dadang	Persp. Pro Pemerintah
I.11b.	Suara Karya	Kematian Letda Pol Dadang	Persp. Pro Pemerintah
I.11c.	Kompas	Kematian Letda Pol Dadang	Netral
I.12a.	Republika	Mahasiswa Ke Gedung DPR	Persp. Pro Mahasiswa
I.12b.	Kompas	Mahasiswa Ke Gedung DPR	Persp. Pro Mahasiswa

I.12c.	Suara Karya	Mahasiswa Ke Gedung DPR	Netral
I.13a.	Republika	Mahasiswa Meninggalkan Gedung DPR	Persp. Pro pemerintah
I.13b.	AB	Mahasiswa Meninggalkan Gedung DPR	Persp. Pro Pemerintah
I.13c.	Suara Karya	Mahasiswa Meninggalkan Gedung DPR	Persp. Pro Mahasiswa
I.13d.	Kompas	Mahasiswa Meninggalkan Gedung DPR	Persp. Pro Pemerintah
I.14a.	Republika	Presiden Mengundurkan diri	Netral
I.14b.	AB	Presiden Mengundurkan diri	Netral
I.14c.	Suara Karya	Presiden Mengundurkan diri	Netral

Lampiran 4: Data Judul Ke-48 Teks Berita

Data No	Surat Kabar	Judul Teks
II.A. 1a.	Kompas	Insiden di Universitas Trisakti: Enam Mahasiswa Tewas
II.A. 1b.	Republika	Bentrokan di Kampus Trisakti: 6 Mahasiswa Tewas, 1 koma
II.A. 1c.	Suara Karya	6 Mahasiswa Trisakti Tewas, 4 Petugas Luka-luka
II.A. 2a.	Angkatan Bersenjata	Presiden Risaukan Pemberitaan Media Massa
II.A. 2b.	Suara Karya	Pemberitaan Pers Merisaukan
II.A. 2c.	Republika	Presiden Risaukan Pemberitaan Pers
II.A. 3a.	Suara Karya	Aksi Mahasiswa Mengarah pada Parlemen Jalanan
II.A. 3b.	Republika	Bentrokan lagi, Puluhan Terluka Dipo Alam: Aksi Mahasiswa bukan Langkah sia-sia
II.A. 3c.	Angkatan Bersenjata	Mahasiswa Turun ke jalan, yang Rugi Rakyat
II.A. 4a.	Kompas	Menkeh: Kasus Orang "hilang" harus diklarifikasikan
II.A. 4b.	Suara Karya	ABRI Prihatinkan orang hilang
II.A. 4c.	Angkatan Bersenjata	ABRI Cari orang yang "hilang"
II.A. 4d.	Republika	ABRI Bantah Tangkap Sejumlah Aktivistis
II.A. 5a.	Suara Karya	Petugas Gunakan Peluru Karet
II.A. 5b.	Republika	Penanganan Unjuk Rasa Tak Seragam
II.A. 5c.	Angkatan Bersenjata	Polri tidak Keras Hadapi Aksi Mahasiswa
II.A. 5d.	Kompas	Penanganan Unjuk Rasa Sesuai Pelanggarannya
II.A. 6a.	Suara Karya	Perusuh Membakar Kendaraan dan Toko di Medan, 47 ditangkap
II.A. 6b.	Kompas	Amuk Massa di medan Berlanjut
II.A. 6c.	Suara Karya	Perusuh di Medan Menggarong dan Membakar Rumah Penduduk
II.A. 6d.	Republika	Kerusuhan di Medan Meluas
II.A. 7a.	Suara Karya	Korban Kerusuhan Dimakamkan Massal
II.A. 7b.	Kompas	258 Jenasah Korban Kebakaran Selesai Diperiksa
II.A. 7c.	Republika	Ratusan Mayat tak Dikenal Dikubur Massal
II.A. 8a.	Kompas	Aksi Mahasiswa Meluas, Korban terus Berjatuh
II.A. 8b.	Republika	Demo Mahasiswa Mulai Keluar Kampus
II.A. 8c.	Angkatan Bersenjata	ABRI akan Tindak Pelaku Kerusuhan di Luar Kampus
II.A. 9a.	Suara Karya	Unjuk Rasa makin Berangas
II.A. 9b.	Angkatan Bersenjata	Aksi Mahasiswa sudah Menjurus pada Pelanggaran Hukum
II.A. 9c.	Republika	Aksi Mahasiswa ke Jalan Mengarah ke Tindakan Anarkis
II.A. 9d.	Kompas	Unjuk Rasa Mahasiswa Berlanjut di mana-mana
II.A. 10a.	Republika	Pemred D&R Diperiksa Polisi
II.A. 10b.	Suara Karya	Menpen Sesalkan Majalah D&R
II.A. 10c.	Kompas	Pemimpin Redaksi D&R harus Diganti
II.A. 10d.	Republika	Dewan Kehormatan PWI: Pemred D&R Diskors 2 Tahun
II.A. 11a.	Republika	Kasat Intel Polres Bogor Tewas Dipukuli Mahasiswa
II.A. 11b.	Suara Karya	Tiga Tersangka Pembunuh Letda Dadang Ditangkap, 5 Dikejar
II.A. 11c.	Kompas	Aksi Mahasiswa Tewaskan Perwira Polisi
II.A. 12a.	Republika	Ribuan Mahasiswa Banjiri DPR
II.A. 12b.	Kompas	Puluhan Ribu Mahasiswa "Duduki" DPR
II.A. 12c.	Suara Karya	Mahasiswa Gelar Tuntutan di Halaman DPR
II.A. 13a.	Republika	Aparat Bersihkan Mahasiswa di Kompleks DPR
II.A. 13b.	Angkatan Bersenjata	Koopsjaya "Bersihkan" gedung DPR/MPR dengan Damai
II.A. 13c.	Suara Karya	Evakuasi Mahasiswa dari Gedung DPR Berlangsung

		menegangkan
II.A. 13d.	Kompas	Ribuan Mahasiswa Tinggalkan Gedung MPR/DPR
II.A. 14a.	Republika	HM Soeharto Berhenti, BJ Habibie Presiden
II.A. 14b.	Angkatan Bersenjata	Pak Harto Berhenti, Habibie Presiden RI
II.A. 14c.	Suara Karya	Pak Harto Berhenti, BJ Habibie Presiden

Lampiran 5: Hasil Analisis Perspektif Judul Berita

Data No	Judul Teks	Perspektif
II.A. 1a.	Insiden di Universitas Trisakti: Enam Mahasiswa Tewas	Perspektif Netral
II.A. 1b.	Bentrokan di Kampus Trisakti: 6 Mahasiswa Tewas, 1 koma	Perspektif Netral
II.A. 1c.	6 Mahasiswa Trisakti Tewas, 4 Petugas Luka-luka	Perspektif Netral
II.A. 2a.	Presiden Risaukan Pemberitaan Media Massa	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 2b.	Pemberitaan Pers Merisaukan	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 2c.	Presiden Risaukan Pemberitaan Pers	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 3a.	Aksi Mahasiswa Mengarah pada Parlemen Jalanan	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 3b.	Dipo Alam: Aksi Mahasiswa bukan Langkah sia-sia	Perspektif Pro Mahasiswa
II.A. 3c.	Mahasiswa Turun ke jalan, yang Rugi Rakyat	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 4a.	Menkeh: Kasus Orang "Hilang" harus diklarifikasikan	Netral
II.A. 4b.	ABRI Prihatinkan orang hilang	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 4c.	ABRI Cari orang yang "hilang"	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 4d.	ABRI Bantah Tangkap Sejumlah Aktivis	Netral
II.A. 5a.	Petugas Gunakan Peluru Karet	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 5b.	Penanganan Unjuk Rasa Tak Seragam	Netral
II.A. 5c.	Polri tidak Keras Hadapi Aksi Mahasiswa	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 5d.	Penanganan Unjuk Rasa Sesuai Pelanggarannya	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 6a.	Perusuh Membakar Kendaraan dan Toko di Medan, 47 ditangkap	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 6b.	Amuk Massa di medan Berlanjut	Netral
II.A. 6c.	Perusuh di Medan Menggarong dan Membakar Rumah Penduduk	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 6d.	Kerusuhan di Medan Meluas	Netral
II.A. 7a.	Korban Kerusakan Dimakamkan Massal	Netral
II.A. 7b.	258 Jenazah Korban Kebakaran Selesai Diperiksa	Netral
II.A. 7c.	Ratusan Mayat tak Dikenal Dikubur Massal	Netral
II.A. 8a.	Aksi Mahasiswa Meluas, Korban terus Berjatuhan	Netral
II.A. 8b.	Demo Mahasiswa Mulai Keluar Kampus	Netral
II.A. 8c.	ABRI akan Tindak Pelaku Kerusakan di Luar Kampus	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 9a.	Unjuk Rasa makin Beringas	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 9b.	Aksi Mahasiswa sudah Menjurus pada Pelanggaran Hukum	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 9c.	Aksi Mahasiswa ke Jalan Mengarah ke Tindakan Anarkis	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 9d.	Unjuk Rasa Mahasiswa Berlanjut di mana-mana	Perspektif Pro Mahasiswa
II.A. 10a.	Pemred D&R Diperiksa Polisi	Netral
II.A. 10b.	Menpen Sesalkan Majalah D&R	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 10c.	Pemimpin Redaksi D&R harus Diganti	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 10d.	Dewan Kehormatan PWI: Pemred D&R Diskors 2 Tahun	Netral
II.A. 11a.	Kasat Intel Polres Bogor Tewas Dipukuli Mahasiswa	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 11b.	Tiga Tersangka Pembunuh Letda Dadang Ditangkap, 5 Dikejar	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 11c.	Aksi Mahasiswa Tewaskan Perwira Polisi	Netral
II.A. 12a.	Ribuan Mahasiswa Banjiri DPR	Perspektif Pro Mahasiswa
II.A. 12b.	Puluhan Ribu Mahasiswa "Duduki" DPR	Perspektif Pro Mahasiswa
II.A. 12c.	Mahasiswa Gelar Tuntutan di Halaman DPR	Netral
II.A. 13a.	Aparat Bersihkan Mahasiswa di Kompleks DPR	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 13b.	Koopsjaya "Bersihkan" gedung DPR/MPR dengan Damai	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 13c.	Evakuasi Mahasiswa dari Gedung DPR Berlangsung Menegangkan	Perspektif Pro Mahasiswa

II.A. 13d.	Ribuan Mahasiswa Tinggalkan Gedung MPR/DPR	Perspektif Pro Pemerintah
II.A. 14a.	HM Soeharto Berhenti, BJ Habibie Presiden	Netral
II.A. 14b.	Pak Harto Berhenti, Habibie Presiden RI	Netral
II.A. 14c.	Pak Harto Berhenti, BJ Habibie Presiden	Netral

Lampiran 5a: Piranti Penanda Perspektif Pemberitaan dalam Judul Berita

Data No	Manifestasi Perspektif Pemberitaan dalam					
	Ketransitifan	Modalitas	Str. Nom	Pil. kata	Tindak Tut	Metafora
II.A. 1a.	+					
II.A. 1b.	+		+			
II.A. 1c.	+					
II.A. 2a.	+				+	
II.A. 2b.	+		+			
II.A. 2c.	+					
II.A. 3a.	+			+		
II.A. 3b.	+	+		+	+	
II.A. 3c.	+			+	+	
II.A. 4a.	+	+		+	+	
II.A. 4b.	+				+	
II.A. 4c.	+				+	
II.A. 4d.	+				+	
II.A. 5a.	+				+	
II.A. 5b.	+	+	+			
II.A. 5c.	+	+			+	
II.A. 5d.	+		+			
II.A. 6a.	+			+		
II.A. 6b.	+			+		
II.A. 6c.	+			+		
II.A. 6d.	+					
II.A. 7a.	+					
II.A. 7b.	+					
II.A. 7c.	+	+				
II.A. 8a.	+	+				
II.A. 8b.	+	+	+			
II.A. 8c.	+	+				
II.A. 9a.	+	+				
II.A. 9b.	+	+				
II.A. 9c.	+					
II.A. 9d.	+					
II.A. 10a.	+					
II.A. 10b.	+					
II.A. 10c.	+	+				
II.A. 10d.	+					
II.A. 11a.	+					
II.A. 11b.	+					
II.A. 11c.	+					
II.A. 12a.	+					+
II.A. 12b.	+					
II.A. 12c.	+					

II.A. 13a.	+					+
II.A. 13b.	+					
II.A. 13c.	+			+		
II.A. 13d.	+					
II.A. 14a.	+					
II.A. 14b.	+					
II.A. 14c.	+					

Lampiran 6: Data Tema Berita

1. Enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa di kampus Trisakti. (II.B.1a)
2. Enam mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah terjadi bentrokan antara aparat dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menuntut reformasi. (II.B.1b)
3. Korban jiwa mulai berjatuhan dalam aksi unjukrasa dan keprihatinan mahasiswa. (II.B.1c)
4. Presiden Soeharto risaukan pemberitaan-pemberitaan media massa yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah. (II.B.2a)
5. Presiden Soeharto risau atas pemberitaan pers akhir-akhir ini yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. (II.B.2b)
6. Pemberitaan pers mendapat sorotan Presiden Soeharto. (II.B.2c)
7. Aksi mahasiswa mengarah pada parlemen jalanan dan dapat berkembang menjadi semacam people power. (II.B.3a)
8. Aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia merupakan langkah efektif mendorong perubahan. (II.B.3b)
9. Keinginan mahasiswa turun ke jalan merupakan ancaman terhadap pemerintah. (II.B.3c)
10. Kasus orang "hilang" harus diklarifikasi. (II.B.4a)
11. Tidak ada kebijakan ABRI untuk menghilangkan orang-orang tertentu dalam percaturan politik. (II.B.4b)
12. Bantahan ABRI atas keterlibatan pada penghilangan sejumlah aktivis politik. (II.B.4c)
13. ABRI bantah tangkap sejumlah aktivis. (II.B.4d)
14. Petugas gunakan gas air mata dan peluru karet. (II.B.5a)
15. Pola penanganan unjuk rasa tak seragam. (II.B.5b)
16. Polri tidak keras hadapi aksi mahasiswa. (II.B.5c)
17. Penanganan unjuk rasa sesuai pelanggarannya. (II.B.5d)
18. Sebanyak 47 tersangka yang terlibat dalam kasus kerusuhan di Medan ditangkap dan diperiksa Polda Sumut. (II.B.6a)
19. Amuk massa di Medan masih berlanjut, diwarnai aksi pengrusakan, penjarahan, pembakaran toko-toko, mobil dan sepeda motor. (II.B.6b)
20. Kerusuhan di Medan merupakan tindakan anarki dan melanggar hukum. (II.B.6c)
21. Aksi pengrusakan dan pembakaran masih berlanjut di Medan. (II.B.6d)
22. Korban-korban yang tewas akibat terbakar dalam kerusuhan 13-14 Mei sebagian besar akan dikuburkan secara massal di TPU Jakarta dan Tangerang. (II.B.7a)
23. Tim Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSCM telah memeriksa 258 jenazah. (II.B.7b)
24. Ratusan mayat tak dikenal dikubur massal. (II.B.7c)
25. Gelombang aksi keprihatinan mahasiswa diberbagai kampus di Indonesia diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan korban berjatuhan di kedua pihak. (II.B.8a)
26. Demo mahasiswa mulai keluar kampus. (II.B.8b)
27. Unjuk rasa mahasiswa sebaiknya tetap di kampus sebab jika turun ke jalan bisa menimbulkan kegiatan yang anarkis dan destruktif. (II.B.8c)
28. Aksi unjuk rasa mahasiswa sudah semakin beringas. (II.B.9a)
29. Aksi mahasiswa akhir-akhir ini cenderung anarkis dan melanggar hukum. (II.B.9b)
30. Aksi mahasiswa ke jalan mengarah ke tindakan anarkis dan destruktif. (II.B.9c)



31. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi berlanjut di mana-mana. (II.B.9d)
32. Korps Reserse Mabes Polri memeriksa Pemimpin Redaksi Majalah D&R. (II.B.10a)
33. Menteri Penerangan R. Hartono menyisahkan kulit muka majalah mingguan D&R edisi terbaru yang memuat sosok Kepala Negara dibingkai kartu remi. (II.B.10b)
34. Dewan Kehormatan PWI merekomendasikan PWI agar menjatuhkan skorsing terhadap Pemred majalah D&R dengan mencabut keanggotaannya sebagai anggota PWI selama 2 tahun. (II.B.10c)
35. Dewan Kehormatan PWI merekomendasikan sanksi skor dua tahun bagi Pemred D&R. (II.B.10d)
36. Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol Dadang tewas setelah dipukuli puluhan mahasiswa usai mereka berunjuk rasa di kampus Universitas Juanda, Bogor. (II.B.11a)
37. Tiga mahasiswa tersangka pembunuh Letda Dadang ditangkap, Lima lainnya terus dikejar. (II.B.11b)
38. Aksi mahasiswa di bogor menewaskan Letnan Dua Dadang Rusmana, Kepala Satuan Intelijen kepolisian Resor Bogor. (II.B.11c)
39. Ribuan Mahasiswa banjir DPR. (II.B.12a)
40. Puluhan ribu mahasiswa menduduki DPR. (II.B.12b)
41. Ribuan mahasiswa menggelar tuntutan di halaman DPR. (II.B.12c)
42. Gedung DPR/MPR yang sejak senin lalu diduduki mahasiswa dari berbagai kampus, mulai tengah malam dikosongkan dari para demonstran. (II.B.13a)
43. Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad, dan Marinir, yang tergabung dalam komando Operasi Jaya "membersihkan" gedung DPR/MPR dari sisa mahasiswa yang bertahan. (II.B.13b)
44. Ribuan Mahasiswa telah pergi dari gedung MPR/DPR. (II.B.13c)
45. Gedung MPR/DPR yang diduduki mahasiswa sejak senin lalu, Sabtu dini hari masih dalam proses pengosongan oleh sekitar 1000 pasukan gabungan ABRI yang dipimpin Brigjen TNI Sudi Silalahi. (II.B.13d)
46. Terhitung mulai pukul 09.00 WIB, Kamis 21 mei 1998, Haji Muhammad Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. (II.B.14a)
47. Jendral Besar TNI (Pum) Soeharto yang dikenal akrab dengan panggilan Pak Harto memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI. (II.B.14b)
48. H. Muhammad Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI periode 1998-2003, terhitung mulai Kamis. (II.B.14c)

**Lampiran 7: Hasil Analisis Pola Penyajian Tema Berita
dalam Hubungannya dengan Perspektif Pemberitaan**

Data	Analisis
1. Enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa di kampus Trisakti. (II.B.1a)	[who (<i>mahasiswa</i>) ← favorable]
2. Enam mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah terjadi bentrokan antara aparat dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menuntut reformasi. (II.B.1b)	[who (<i>mahasiswa</i>) ← netral]
3. Korban jiwa mulai berjatuhan dalam aksi unjukrasa dan keprihatinan mahasiswa. (II.B.1c)	[what (<i>korban jiwa</i>) ← unfavorable]
4. Presiden Soeharto risaukan pemberitaan-pemberitaan media massa yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah. (II.B.2a)	[who (<i>Presiden Soeharto</i>) → unfavorable] → what (<i>pemberitaan</i>)]
5. Presiden Soeharto risau atas pemberitaan pers akhir-akhir ini yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. (II.B.2b)	[who (<i>Presiden Soeharto</i>) → unfavorable] → what (<i>pemberitaan pers</i>)]
6. Pemberitaan pers mendapat sorotan Presiden Soeharto. (II.B.2c)	[what (<i>pemberitaan pers</i>) ← unfavorable]
7. Aksi mahasiswa mengarah pada parlemen jalanan dan dapat berkembang menjadi semacam <i>people power</i> . (II.B.3a)	[what (<i>aksi mahasiswa</i>) ← unfavorable]
8. Aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia merupakan langkah efektif mendorong perubahan. (II.B.3b)	[what (<i>aksi mahasiswa</i>) ← favorable]
9. Keinginan mahasiswa turun ke jalan merupakan ancaman terhadap pemerintah. (II.B.3c)	[what (<i>keinginan mahasiswa</i>) ← unfavorable]
10. Kasus orang "hilang" harus diklarifikasi. (II.B.4a)	[what (<i>kasus orang hilang</i>) ← netral]
11. Tidak ada kebijakan ABRI untuk menghilangkan orang-orang tertentu dalam percaturan politik. (II.B.4b)	[what (<i>tidak ada kebijakan ABRI</i>) ← favorable]
12. Bantahan ABRI atas keterlibatan pada penghilangan sejumlah aktivis politik. (II.B.4c)	[what (<i>bantahan ABRI</i>) ← favorable]
13. ABRI bantah tangkap sejumlah aktivis. (II.B.4d)	[who (<i>ABRI</i>) ← favorable]

14. Petugas gunakan gas air mata dan peluru karet. (II.B.5a)	[who (<i>petugas</i>) ← netral]
15. Pola penanganan unjuk rasa tak seragam. (II.B.5b)	[what (<i>pola penanganan</i>) ← unfavorable]
16. Polri tidak keras hadapi aksi mahasiswa. (II.B.5c)	[who (<i>Polri</i>) ← favorable]
17. Penanganan unjuk rasa sesuai pelanggarannya. (II.B.5d)	[what (<i>penanganan unjuk rasa</i>) ← favorable]
18. Sebanyak 47 tersangka yang terlibat dalam kasus kerusuhan di Medan ditangkap dan diperiksa Polda Sumut. (II.B.6a)	[who (<i>47 tersangka</i>) ← netral]
19. Amuk massa di Medan masih berlanjut, diwarnai aksi pengrusakan, penjarahan, pembakaran toko-toko, mobil dan sepeda motor. (II.B.6b)	[what (<i>amuk massa</i>) ← unfavorable]
20. Kerusuhan di Medan merupakan tindakan anarki dan melanggar hukum. (II.B.6c)	[what (<i>kerusuhan</i>) ← unfavorable]
21. Aksi pengrusakan dan pembakaran masih berlanjut di Medan. (II.B.6d)	[what (<i>aksi pengrusakan dan pembakaran</i>) ← netral]
22. Korban-korban yang tewas akibat terbakar dalam kerusuhan 13-14 Mei sebagian besar akan dikuburkan secara massal di TPU Jakarta dan Tangerang. (II.B.7a)	[who (<i>korban-korban yang tewas</i>) ← netral]
23. Tim Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSCM telah memeriksa 258 jenazah. (II.B.7b)	[who (<i>tim forensik</i>) ← netral]
24. Ratusan mayat tak dikenal dikubur massal. (II.B.7c)	[who (<i>ratusan mayat</i>) ← netral]
25. Gelombang aksi keprihatinan mahasiswa diberbagai kampus di Indonesia diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan korban berjatuh di kedua pihak. (II.B.8a)	[what (<i>gelombang aksi keprihatinan</i>) ← unfavorable]
26. Demo mahasiswa mulai keluar kampus. (II.B.8b)	[what (<i>demo mahasiswa</i>) ← netral]
27. Unjuk rasa mahasiswa sebaiknya tetap di kampus sebab jika turun ke jalan bisa menimbulkan kegiatan yang anarkis dan destruktif. (II.B.8c)	[what (<i>unjuk rasa mahasiswa</i>) ← unfavorable]
28. Aksi unjuk rasa mahasiswa sudah semakin beringas. (II.B.9a)	[what (<i>aksi unjuk rasa mahasiswa</i>) ← unfavorable]
29. Aksi mahasiswa akhir-akhir ini cenderung anarkis dan melanggar hukum. (II.B.9b)	[what (<i>aksi mahasiswa</i>) ← unfavorable]
30. Aksi mahasiswa ke jalan mengarah ke tindakan anarkis dan destruktif. (II.B.9c)	[what (<i>aksi mahasiswa</i>) ← unfavorable]
31. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi berlanjut di mana-mana. (II.B.9d)	[what (<i>aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa</i>) ← unfavorable]
32. Korps Reserse Mabes Polri memeriksa Pemimpin Redaksi Majalah D&R. (II.B.10a)	[who ¹ → (<i>Korps Reserse Mabes Polri</i>) unfavorable → who ² (<i>pemimpin Redaksi Majalah</i>)

	D&R]
33. Menteri Penerangan R. Hartono menyesalkan kulit muka majalah mingguan D&R edisi terbaru yang memuat sosok Kepala Negara dibingkai kartu remi. (II.B.10b)	[who (<i>Menpen</i>) → unfavorable → what (<i>kulit muka majalah D&R</i>)]
34. Dewan Kehormatan PWI merekomendasikan PWI agar menjatuhkan skorsing terhadap Pemred majalah D&R dengan mencabut keanggotaannya sebagai anggota PWI selama 2 tahun. (II.B.10c)	[who ¹ (<i>DK PWI</i>) → unfavorable → who ² (<i>Pemred majalah D&R</i>)]
35. Dewan Kehormatan PWI merekomendasikan sanksi skor dua tahun bagi Pemred D&R. (II.B.10d)	[who ¹ (<i>DK PWI</i>) → unfavorable → who ² (<i>Pemred D&R</i>)]
36. Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol Dadang tewas setelah dipukuli puluhan mahasiswa usai mereka berunjuk rasa di kampus Universitas Juanda, Bogor. (II.B.11a)	[who (<i>Kasat Intel Polres Bogor</i>) ← favorable]
37. Tiga mahasiswa tersangka pembunuh Letda Dadang ditangkap, Lima lainnya terus dikejar. (II.B.11b)	[who (<i>mahasiswa</i>) ← favorable]
38. Aksi mahasiswa di bogor menewaskan Letnan Dua Dadang Rusmana, Kepala Satuan Intelijen kepolisian Resor Bogor. (II.B.11c)	[what (<i>aksi mahasiswa</i>) ← unfavorable]
39. Ribuan Mahasiswa banjiri DPR. (II.B.12a)	[who (<i>Ribuan Mahasiswa</i>) ← favorable]
40. Puluhan ribu mahasiswa menduduki DPR. (II.B.12b)	[who (<i>Puluhan Ribu mahasiswa</i>) ← favorable]
41. Ribuan mahasiswa menggelar tuntutan di halaman DPR. (II.B.12c)	[who (<i>Ribuan mahasiswa</i>) ← favorable]
42. Gedung DPR/MPR yang sejak senin lalu diduduki mahasiswa dari berbagai kampus, mulai tengah malam dikosongkan dari para demonstran. (II.B.13a)	[what (<i>gedung DPR/MPR</i>) ← netral]
43. Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad, dan Marinir, yang tergabung dalam komando Operasi Jaya “membersihkan” gedung DPR/MPR dari sisa mahasiswa yang bertahan. (II.B.13b)	[who (<i>petugas keamanan</i>) ← favorable]
44. Ribuan Mahasiswa telah pergi dari gedung MPR/DPR. (II.B.13c)	[who (<i>ribuan mahasiswa</i>) ← netral]
45. Gedung MPR/DPR yang diduduki mahasiswa sejak senin lalu, Sabtu dini hari masih dalam proses pengosongan oleh sekitar 1000 pasukan gabungan ABRI yang dipimpin Brigjen TNI Sudi Silalahi. (II.B.13d)	[what (<i>gedung MPR/DPR</i>) ← netral]
46. Haji Muhammad Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung mulai pukul 09.00 WIB, Kamis 21 mei 1998,. (II.B.14a)	[who (<i>H.M. Soeharto</i>) ← netral]
47. Jendral Besar TNI (Purn) Soeharto yang dikenal akrab	[who (<i>Jendral Besar TNI (Purn)</i>)

dengan panggilan Pak Harto memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI. (II.B.14b)	<i>Soeharto</i>) ← favorable]
48. H. Muhammad Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI periode 1998-2003, terhitung mulai Kamis. (II.B.14c)	[who (<i>H. M. Soeharto</i>) ← unfavorable]

Lampiran 8: Manifestasi Perspektif dalam Struktur Tematik dalam Badan Berita

Data*	Analisis Pola Struktur Tematik	Perspektif
II.C. 1a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Mahasiswa
II.C. 1b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal dan Fprep ket. waktu	Perspektif Pro Mahasiswa
II.C. 1c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 2a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 2b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 2c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 3a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 3b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Mahasiswa
II.C. 3c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 4a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 4b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 4c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 4d.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 5a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. tempat	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 5b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 5c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 5d.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 6a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. tempat	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 6b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 6c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 6d.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. waktu	Netral
II.C. 7a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 7b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. tempat	Netral
II.C. 7c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. tempat	Netral
II.C. 8a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. tempat	Netral
II.C. 8b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. tempat	Netral
II.C. 8c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 9a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. tempat	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 9b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 9c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 9d.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	perspektif Pro Mahasiswa
II.C. 10a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 10b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 10c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 10d.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 11a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 11b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 11c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. waktu	Netral
II.C. 12a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Mahasiswa
II.C. 12b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Mahasiswa
II.C. 12c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. waktu	Netral
II.C. 13a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. waktu	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 13b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal + Fprep ket. waktu	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 13c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Mahasiswa
II.C. 13d.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Perspektif Pro Pemerintah
II.C. 14a.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 14b.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral
II.C. 14c.	Struktur FN pengisi subjek gramatikal	Netral

*Data badan berita diambil dari Lampiran 3 di muka, yang pada bagian ini diberi kode (II.C. dst.)

Lampiran 9: Data Penahanan

Data 1

Enam mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti Grogol, Jakarta Barat, Selasa (12/5). Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol (*Grogol fly over*). Puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan. (II.D.1a)

Data 2

Enam mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) kemarin meninggal setelah terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menuntut reformasi yang digelar di kampus mereka. Puluhan pengunjung rasa lainnya tertuka terkena pukulan dan peluru, sebagian harus dirawat. (II.D.1b)

Data 3

Aksi damai di Universitas Trisakti dan Tarumanegara, di daerah Grogol, Jakarta Barat, kemarin diikuti sekitar 10 ribu orang. Dalam aksi itu tampil berbicara dekan FH Usakti, Adi Andojo, mantan Hakim Agung.

Dalam aksinya, sebagian mahasiswa membujuk aparat agar mengizinkan mereka pergi ke Gedung DPR. Adi juga sempat bernegosiasi dengan pihak aparat agar mahasiswa dibolehkan turun ke jalan, namun tetap ditolak.

Sekitar pukul 16.00 unjuk rasa sebetulnya nyaris usai. Adi Andojo dan Dekan FE Usakti Chiruman, bernegosiasi dengan Dandim dan Kapolres Jakbar, untuk mengatur agar mahasiswa bisa bubar dengan tertib.

Namun saat itu, terjadi keributan. Para mahasiswa menemukan seorang yang dicurigai sebagai intel, berada dalam kerumunan mahasiswa. Sebagian mahasiswa mencoba mengamankan orang itu, sebagian lagi mengejar dan mencoba memukul.

Melihat ribut-ribut itu, para mahasiswa maju ke depan mengambil posisi berhadapan dengan aparat—yang saat itu juga bergerak merapat ke arah mahasiswa.

Suasana tegang ini berlangsung sekitar sepuluh menit. Tiba-tiba terdengar aparat mengokang senapan dan menembakkan senapan ke udara. Saat itu juga, barisan aparat terdepan berhamburan mengejar dan memukul massa dengan pentungan. Aparat juga memukul seorang wartawan ABC.

Suasana menjadi kacau balau. Wartawan *Republika*, yang berada di halaman gedung Walikota Jakbar melaporkan aparat berteriak-teriak meminta massa bubar, sambil terus menembakkan senapan ke udara. Namun, massa mahasiswa bertarian, sebagian

menyelamatkan diri masuk ke gedung Walikota Jakarta Barat. (II.D.1b).

Data 4

Korban jiwa mulai berjatuh dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. Enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk ratusan mahasiswa di Jalan S. Parman, Grogol, Jakarta barat, Selasa siang hingga petang hari. Jenasah 4 mahasiswa yang tewas di tempat itu semalam dikirim ke kamar jenasah RS Sumber Waras Grogol, sedangkan dua korban luka berat yang dilarikan ke RS Pusat Pertamina Jakarta menghembuskan nafas terakhir setelah beberapa lama dirawat. (II.D.1c).

Data 5

Diperoleh informasi, peristiwa bentrokan mahasiswa dengan petugas keamanan di Universitas Trisakti bermula ketika para mahasiswa menolak permintaan petugas keamanan agar masuk ke areal kampus sekitar pukul 18.00 dari jalan raya. Tiba-tiba muncul sejumlah orang mengendarai beberapa sepeda motor melepaskan tembakan. Ada yang melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa dari aksi mereka di Jalan S Parman. Tapi ada pula yang melepaskan tembakan ke arah massa mahasiswa di jalanan.

Para mahasiswa membalas dengan lemparan batu ke arah petugas keamanan. Tidak jauh dari tempat kejadian dua bus kota Patas hangus terbakar. Kemudian muncul mobil-mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah mahasiswa. (II.D.1c)

Data 6

Di Purwokerto, Jateng, bentrok fisik kemarin adalah yang kedua kalinya, setelah Senin lalu. Sebanyak 26 orang—21 mahasiswa dan lima petugas—menderita luka memar dan seorang diantaranya diangkut ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Prof Margono Soekardjo karena keinginnya sobek. Aksi sebelumnya mengakibatkan 13 orang luka-luka. (II.D.3b)

Data 7

Aksi unjuk rasa para mahasiswa di berbagai kota seperti Medan, Riau, Semarang, Jambi, Yogyakarta, Ujungpandang, Bogor dan Jakarta terus berlanjut, Sabtu. Para mahasiswa berusaha melanjutkan aksinya ke luar kampus dan melawan petugas dengan melemparkan batu dan bom molotov. Untuk menjaganya jangan sampai aksi mahasiswa meluas ke luar kampus, petugas terpaksa melepaskan gas air mata dan tembakan peluru karet.

[...]

Di Medan, aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Katolik Santo Thomas, dan Universitas Sumatera Utara. Mereka memanfaatkan Jalan Dr. Masyur yang menghubungkan kampus USU. Mereka gagal untuk

Di Solo, bentrokan mahasiswa dan aparat diwarnai dengan hujan batu dan bom molotov yang mengakibatkan korban jatuh di kedua belah pihak. Sebanyak 11 mahasiswa mengalami luka-luka, dua di antaranya dirawat di RS Yarsis [...]. (II.B.8a)

Data 16

Menurut data RSCM, hingga kemarin Tim Forensik RSCM-FKUI pimpinan dr. Abdul Mun'im Idries telah memeriksa sekitar 259 jenazah. Ke-259 jenazah itu berasal dari Jakarta Utara (22), Jakarta Barat (46), Jakarta Pusat (1), Jakarta Selatan (3), Jakarta Timur (90), Tangerang (91), dan dari Mangga Dua (5). (II.D.7c)

Data 17

Sejumlah petinggi ABRI ikut dalam kerja bakti pembersihan puing-puing sisa kerusuhan itu. Salah satu contohnya adalah Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksda TNI Mujito, yang turun bersama anak buahnya membersihkan puing-puing. (II.D.7c)

Data 18

Para mahasiswa yang memulai berdemo pada pukul 09.30, rencananya akan melakukan *long march* dari kampus IAIN ke UMJ, ITI, dan berakhir di kampus PTIQ. Tapi, karena rencana itu bocor, maka mahasiswa yang keluar kampus langsung dihadang para aparat.

Rupanya niatan yang tak tersalurkan itu membuat ribuan mahasiswa kembali "mengamuk". Mereka lalu melemparkan batu, bata, dan kayu ke arah petugas. Mendapat serangan dadakan itu, para petugas kewalahan. Dalam keadaan emosi, seorang oknum petugas akhirnya merebut *megaphone* yang dipegang oleh kiki, pimpinan aksi, dan membantingnya.

Melihat hal itu, ribuan mahasiswa semakin emosi. Aksi pelemparan batupun semakin gencar dilakukan mahasiswa. Karena kewalahan, akibatnya para petugas pun membalas.

Perang batupun tak terhindarkan. Kejadian itu sempat menjadi perhatian masyarakat, dan membuat macet lalu lintas di Jl. Ciputat Raya. Untuk menghindari kerusuhan, maka toko-toko yang berada di depan kampus IAIN diperintahkan petugas untuk ditutup.

Akibat aksi saling lempar batu, empat petugas terpaksa dilarikan untuk mendapat perawatan. Sedangkan empat mahasiswa yang terluka terkena lemparan batu diangkut ke klinik. (II.D.8b)

Data 19

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tyasno Sudarto meminta kepada para mahasiswa agar tidak menghambur-hamburkan waktu hanya untuk demonstrasi. "Tolong, manfaatkan waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, " pintanya, saat berada di Yogya, Kamis (30/4).

Tyasno memberi contoh, mahasiswa bisa ikut berkarya dengan membuka lahan tidur, menanam tanaman pangan untuk meringankan beban pemerintah dalam rangka persediaan pangan untuk meringankan beban pemerintah dalam rangka persediaan pangan. "Dan, untuk meringankan beban mereka yang di PHK, bisa ikut padat karya. Itu imbuhan saya," katanya. (II.D.8b).

Data 20

Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol. Dadang, kemarin tewas setelah dipukuli puluhan mahasiswa, usai mereka berunjuk rasa di Kampus Universitas Djuanda, Bogor. Selain Dadang, Pasi Intel Kodim 0621 Bogor, Kapten Ali, juga terluka dan dirawat di rumah sakit.

Menurut Kapotwil Bogor, Kol Pol Abubakar N, peristiwa bermula saat kedua petugas itu mengamankan unjuk rasa di Kampus Unida. Ketika aksi reda, Kapten Ali bersalat Ashar di Mesjid Amaliah di dekat Kampus Unida. Sejumlah mahasiswa rupanya memergoki Ali. Usai salat [...] para mahasiswa menggiring Ali ke luar Masjid dan memukulinya beramai-ramai.

Melihat Ali dipukuli, [...] Letda Dadang berusaha membantu Ali. Namun kedatangan Dadang tidak membuat para mahasiswa gentar. Dengan batu dan kayu [...], para mahasiswa menghajar Dadang.

Sejumlah aparat yang melihat kejadian itu berusaha menyela-matkan Dadang dan Ali. Dadang dilarikan ke rumah sakit PMI Bogor. Namun akibat banyaknya darah yang keluar, nyawanya tidak tertolong. Perwira polisi ini menghembuskan napas di RS PMI sekitar 16.00. Sementara Ali, dengan tangan hampir patah dan luka-luka di badan dan kepala, dilarikan ke RS Salak. (II.D.11a)

Data 21

Korps Reserse Mabes Polri, kemarin, memeriksa Pemimpin Redaksi Majalah D&R Margiono. Ini merupakan kelanjutan permintaan Menpen R. Hartono berkaitan dengan kasus sampul majalah D&R yang dinilai menghina Kepala Negara. Rencananya, hari ini (Selasa, 10/3) pemeriksaan atas Margiono akan dilanjutkan.

Sebelum pemeriksaan itu, tim jaksa dari Kejaksaan Agung juga telah memeriksa Pemred dan Pelaksana Harian majalah D&R, Margiono dan Bambang Bujono, Sabtu lalu. (II.D.10a).

Data 22

Dalam edisi No 29/XXI/7 Maret 1998 dengan judul majalah "Presiden di tengah krisis" digambarkan raut muka Kepala Negara sedang tersenyum dengan menggunakan baju bermotif kartu remi. Di kulit muka itu tergambar daun sirih simbol kartu remi dan di ujung bawah dan atas ada huruf P. Kulit muka itu bila dibolak-balik menampilkan gambar dan tulisan yang sama. (II.D.10b).

Data 23

Kol Pol Drs Abubakar dan juga keluarga korban menyesalkan bahwa aksi kebrutalan para mahasiswa tersebut dilakukan di halaman Masjid. Kapten Ali diseret dari dalam masjid *sesaat* perwira pertama ABRI itu hendak menunaikan ibadah salat. Pama TNI AD tersebut dikeroyok, dipukul dengan potongan kayu, batu, dan ditendang di halaman masjid. Melihat itu Letda Dadang yang usai salat di masjid yang sama, berusaha melerai. Tetapi dia dikeroyok dan dianiaya dengan pukulan batu. (II.D.11b)

Data 24

Kompleks DPR/MPR, kemarin, menjadi milik mahasiswa. Mahasiswa se Jabotabek, datang dan pergi sepanjang hari. Boulevard, halaman parkir, plaza, dan semua ruang terbuka di gedung wakil rakyat itu dipenuhi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Dari kantor wakil rakyat itulah, tuntutan reformasi datang silih berganti dalam berbagai bentuk. Puluhan poster dipasang di berbagai tempat strategis. Bahkan ratusan mahasiswa memadati tangga hingga atap gedung bundar yang bercat hijau, gedung utama DPR/MPR. (II.D.12b)

Data 25

Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air sudah semakin beringas. Korban tidak lagi [...].

Di Jakarta, aksi keprihatinan melibatkan hampir semua perguruan tinggi di Jakarta, dan dipusatkan menurut wilayah masing-masing. Di Jakarta Timur, unjuk rasa dipusatkan [...]. Di Jakarta Pusat dipusatkan di kampus UI [...]. Sedangkan di Jakarta Selatan dipusatkan di Kampus [...]. Semua aksi itu memacetkan jalan raya beberapa jam karena mahasiswa turun ke jalan.

Dalam unjuk rasa di Jakarta sebanyak 38 mahasiswa [...].

Unjuk rasa di IKIP Jakarta diwarnai bentrokan mahasiswa dan petugas [...].

Di UI Salemba, nyaris terjadi bentrokan. Perwakilan [...].

Unjuk rasa tunggal [...] di kota Yogyakarta, Sabtu. Mengenakan jubah putih [...].

Ribuan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta masih terus melakukan aksi keprihatinan, misalnya di Kampus ISI [...].

Sejumlah perguruan tinggi di Semarang, Sabtu, juga mengadakan aksi keprihatinan secara serempak [...].

Unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang tampak [...].

Di Surabaya, aksi serupa menyebabkan 4 mahasiswa luka-luka [...].

Aksi yang paling bringas dan brutal barangkali yang terjadi di Kota Medan [...]. (II.D.9a).

Data 26

Menurut Pak Harto, keputusan berhenti dari jabatan sebagai Presiden, ia ambil setelah mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. (II.D.14a)

Data 27

Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "kata Pak Harto. (II.D.14a)

Data 28

Kabar akan dilakukan pembersihan itu sudah didengar para mahasiswa sejak sore hari. Namun mereka banyak yang menanggapi dengan dingin. Bahkan mereka tidak yakin aparat berani membersihkannya. [...]

Namun, begitu waktu menunjukkan pukul 23.30, ratusan aparat datang memasuki gedung DPR. Dengan menggunakan peneras suara, aparat pamong praja masuk ke gedung DPR dan menyerukan agar mereka segera mengosongkan gedung karena akan segera direnovasi untuk sidang-sidang anggota DPR.

Mahasiswa [...] kian terdesak ketika anggota pamong praja, Kodam Jaya, Polisi Militer, dan marinir mengepung mereka di setiap lantai dan ruangan yang ada.

Ketika dikumpulkan di halaman DPR, para mahasiswa tetap menawar bahwa mereka tidak merusak. Tapi aparat tak mau peduli, pokoknya mahasiswa harus keluar. Yang bisa dilakukan mahasiswa hanya menyanyikan lagu-lagu kebangsaan secara bersama-sama.

[...]

Begitu waktu melewati tengah malam, aparat mulai bergerak dengan serius dan membuat mahasiswa terdesak. Tak ada pilihan lain bagi para mahasiswa untuk meninggalkan Gedung DPR/MPR. Puluhan bus dan truk mulai memasuki halaman DPR dan siap mengangkut mereka. (II.D.13d).

Data 29

Korban jiwa mulai berjatuhan dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. Enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk ratusan mahasiswa di Jalan S. Parman, Grogol, Jakarta barat, Selasa siang hingga petang hari. Jenasah 4 mahasiswa yang tewas di tempat itu semalam dikirim ke kamar jenasah RS Sumber Waras Grogol, sedangkan dua korban luka berat yang dilarikan ke RS Pusat Pertamina Jakarta menghembuskan nafas terakhir setelah beberapa lama dirawat.

[...]

Diperoleh informasi, peristiwa bentrokan mahasiswa dengan petugas keamanan di Universitas Trisakti bermula ketika para mahasiswa menolak permintaan petugas agar masuk ke areal kampus sekitar pukul 18.00 dari jalan raya. [...]

Aparat keamanan yang tidak sabar lagi dengan tindakan persuasif, secara serentak melakukan tindakan pembubaran aksi duduk dan mimbar bebas di Jalan S. Parman. Tak pelak lagi, bentrokan fisik antara ratusan petugas dan ratusan mahasiswa tidak bisa dielakkan. Sebagian mahasiswa lari menyelamatkan diri, sebagian lagi berusaha melawan petugas dengan melemparkan batu. Menghadapi itu aparat keamanan melepaskan tembakan gas air mata, peluru karet, dan tembakan peringatan dengan peluru tajam. (II.D.1c).

Data 30

Presiden Soeharto risau atas pemberitaan pers akhir-akhir ini yang tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya. Pemberitaan pers seringkali diberi interpretasi yang tidak tepat dan memberi gambaran yang salah. (II.D.2b)

Data 31

Mahasiswa terpaksa berjubel di depan pintu (gerbang DPR/MPR). Mereka diizinkan masuk satu persatu berdasarkan rombongannya masing-masing. Sekitar pukul 12.00 hampir semua mahasiswa sudah melewati pagar. Mereka berkumpul. Setelah itu mereka berjalan bersama menuju gedung utama.

Aparat keamanan tampak sibuk mencegah agar mahasiswa tidak bisa mencapai tangga tersebut. Pagar betis disusun. Pagar betis awalnya ditangga terbawah, kemudian pindah ke yang teratas. (II.D.12a)

Data 32

Ia kemudian mencontohkan ketika para mahasiswa di Yogyakarta diperbolehkan ke luar kampus, maka dalam sekecap toko-toko di sana tutup. "Kalau diizinkan setiap hari mahasiswa turun ke jalan di setiap universitas, maka setiap hari toko akan tutup. Kalau toko tutup berarti perekonomian juga tutup. Yang rugi adalah rakyat," jelas Wiranto.

Dan karena mahasiswa ngotot tetap ingin turun ke jalan, sedang petugas tetap bersikukuh *memagari* mereka,

maka jatuh korban di kedua pihak pastilah tidak bisa dihindari. (II.D.3c).

Data 33

Melalui *car call* itu pula, tuntutan reformasi hingga desakan agar Pak Harto turun dari jabatannya, bergulir sepanjang hari. "Kami juga menuntut Harmoko segera turun," lanjutnya disambut teriakan setujuuu. (II.D.12a)

Data 34

Suasana tegang ini berlangsung sekitar sepuluh menit. Tiba-tiba terdengar aparat mengongkang senapan dan menembakkan senapan ke udara. Saat itu juga barisan aparat terdepan berhamburan mengejar dan memukuli massa dengan pentungan. Aparat juga sempat memukuli seorang wartawan ABC.

Suasana menjadi kacau balau. Wartawan *Republika*, yang berada di halaman gedung Walikota Jakbar melaporkan aparat berteriak-teriak meminta massa bubar, sambil terus menembakkan senapan ke udara. Namun, massa mahasiswa berlarian, sebagian menyelamatkan diri dengan masuk ke gedung Walikota Jakarta Barat. (II.D.1b)

Data 35

Petugas keamanan mengevakuasi para mahasiswa yang berkumpul di gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sejak beberapa hari lalu karena ada permintaan dari Sekretaris Jendral DPR/MPR RI. "Alasan permintaan tersebut karena sejumlah peralatan dan fasilitas gedung DPR ada yang rusak," ujar Kasdam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu. (II.D.13b)

Data 36

Sudi mengemukakan rusaknya peralatan dan fasilitas wakil rakyat itu secara tidak langsung merugikan rakyat juga, karena barang tersebut milik negara. "Kita tidak menuduh kerusakan itu dilakukan oleh mahasiswa tapi bisa saja dilakukan orang yang mengambil kesempatan. Kalau sudah rusak, siapa yang mau bertanggung jawab," ujar kasdam dengan nada bertanya. (II.D.13b)

Lampiran 10: Hasil Analisis Penahapan dan Perspektif yang Ditimbulkannya

No	Kode Data	Pola Penyajian dalam Penahapan	Perspektif Yang Dihasilkan
1	II.D.1a	Pola Urutan tidak Wajar	Pro Mahasiswa
2	II.D.1b	Pola Urutan tidak Wajar	Netral
3	II.D.1b	Pola Urutan Wajar	Pro Mahasiswa
4	II.D.1c	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Pemerintah
5	II.D.1c	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Pemerintah
6	II.D.3b	Pola Urutan tidak wajar	Netral
7	II.D.5c	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Mahasiswa
8	II.D.5b	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Mahasiswa
9	II.D.13b	Pola Urutan tidak Wajar	Pro Pemerintah
10	II.D.6a	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Mahasiswa
11	II.D.6d	Pola Urutan tidak Wajar	Pro Pemerintah
12	II.D.6d	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Pemerintah
13	II.D.6d	Pola Urutan Umum-Khusus	Netral
14	II.D.6d	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Pemerintah
15	II.D.8a	Pola Urutan Umum-Khusus	Netral
16	II.D.7c	Pola Urutan Umum-Khusus	Netral
17	II.D.7c	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Pemerintah
18	II.D.8b	Pola Urutan Wajar	Netral
19	II.D.8b	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Pemerintah
20	II.D.11b	Pola Urutan tidak Wajar	Pro Pemerintah
21	II.D.10a	Pola Urutan tidak Wajar	Netral
22	II.D.10b	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Pemerintah
23	II.D.11a	Pola Urutan tidak Wajar	Pro Pemerintah
24	II.D.12b	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Mahasiswa
25	II.D.9a	Pola Urutan Umum-Khusus	Pro Pemerintah
26	II.D.14a	Pola Penyajian Implisit	Pro Pemerintah
27	II.D.14a	Pola Penyajian Implisit	Pro Pemerintah
28	II.D.13d	Pola Urutan Wajar	Pro Mahasiswa
29	II.D.1c	Pola Penyajian Eksplisit	Pro Pemerintah
30	II.D.2b	Pola Penyajian Eksplisit	Pro Pemerintah
31	II.D.12a	Pola Urutan Wajar	Pro Mahasiswa
32	II.D.3c	Pola Penyajian Eksplisit	Pro Pemerintah
33	II.D.12a	Pola Penyajian Eksplisit	Pro Mahasiswa
34	II.D.1b	Pola Urutan Wajar	Pro Mahasiswa
35	II.D.13b	Pola Penyajian Eksplisit	Pro Pemerintah
36	II.D.13b	Pola Penyajian Implisit	Pro Pemerintah

Lampiran 11: Data Manifestasi Perspektif Pemberitaan dalam Bentuk-Bentuk Ekspresi Bahasa

Kode III: Tataran Kalimat

- a) Pilihan Kata
b) Metafora
c) Modalitas
d) Struktur Informasi
e) Struktur Nominalisasi
f) Tindak Tutur
g) Ketransitifan
- III.(a).1 Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh *berondongan peluru* yang diduga ditembakkan oleh aparat [...]. (Kompas, 13 Mei 1998)
- III.(a).2 Perintah itu disertai *ham:buran peluru* yang memekakkan telinga. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(a).3 Menghadapi itu aparat keamanan *melepaskan tembakan gas air mata, peluru karet, dan tembakan peringatan dengan peluru tajam*. (Suara Karya, 13 Mei 1998)
- III.(a).4 Presiden Soeharto mengungkapkan *kerisauannya* terhadap pemberitaan media massa [...]. (AB, 17 April 1998)
- III.(a).5 Presiden Soeharto *risau* atas pemberitaan pers akhir-akhir ini [...]. (Suara karya, 17 April 1998)
- III.(a).6 Presiden menyatakan *risau* atas pemberitaan yang bias. (Republika, 17 April 1998)
- III.(a).7 Aksi mahasiswa [...] merupakan langkah *efektif* untuk mendorong perubahan. (Republika, 17/4).
- III.(a).8 Mahasiswa sekarang *kritis*. (Republika, 17/4/98)
- III.(a).9 Aksi mahasiswa saat ini masih *wajar* dan *tidak menyimpang*. (Republika, 17/4/98)
- III.(a).10 Aksi unjuk rasa mahasiswa akhir-akhir ini cenderung *melenceng, anarkis*. (AB, 7/5/98)
- III.(a).11 Aksi mahasiswa di Yogyakarta [...] telah *disusupi* pihak luar. (AB, 7/5/ 98).
- III.(a).12 Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, buntutnya nanti ada *anarkis, destruktif* yang merugikan rakyat. (AB, 20/4/98)
- III.(a).13 Karena jika turun ke jalan bisa menimbulkan kegiatan yang *anarkis* dan *destruktif*. (AB, 5/5/98).
- III.(a).14 Keinginan mahasiswa untuk turun ke jalan merupakan suatu *an-caman* terhadap pemerintah. (AB, 20/4/98)
- III.(a).15 Sejumlah aksi mahasiswa di beberapa tempat [...] sudah menjurus pada *pelanggaran hukum, seperti menggarong, membakar rumah, toko dan kendaraan*. (AB, 7/5/98)
- III.(a).16 [...]setelah memperhatikan beberapa kali aksi mahasiswa di Yogyakarta, ia berkesimpulan bahwa *radikalisme* mahasiswa Yogyakarta semakin tampak. (AB, 7/5/98)
- III.(a).17 Aksi mahasiswa mengarah pada *parlemen jalanan*. (SK, 3/4/98)
- III.(a).18 Unjuk rasa mahasiswa makin *beringas*. (SK, 4/5/98)
- III.(a).19 Kol. Pol. Drs. Abubakar dan juga keluarga korban menyesalkan, bahwa aksi *kebutralan* para mahasiswa tersebut dilakukan di halaman masjid. (SK, 11-5-98)
- III.(a).20 Dalam kesempatan ini Kapolda Jawa Barat menilai bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini sudah *ditanggunggi*. (SK, 11-5-98)
- III.(a).21 Bentrokan terjadi ketika para mahasiswa berupaya berjalan kaki dengan *damai*. (Kompas, 8/5/98)
- III.(a).22 Apa yang mereka lakukan *bukan langkah yang sia-sia, dan akan membuahkan hasil*. (Republika, 17 April 1998)
- III.(a).23 Rektor Unram [...] minta supaya mahasiswa pulang dan berdasar pembicaraan dengan Kapolda NTB, Kapolda menjamin tidak ada diantara pengunjung rasa yang akan *"dicutik"*. (Kompas, 7/5/98)
- III.(a).24 Menteri Kehakiman Muladi menegaskan, persoalan orang *"hilang"* yang diramalkan [...]. (Kompas, 1 April 1998)
- III.(a).25 Isu yang beredar mereka *"dibawa"* sekelompok orang tak dikenal. (Republika, 1/4/98)
- III.(a).26 [...] Kapsuspen ABRI membantah bahwa mereka *ditangkap* aparat keamanan. (Republika, 1/4/98)
- III.(a).27 ABRI prihatin atas adanya orang *hilang* di tanah air belakangan ini. (SK, 30/4)
- III.(a).28 Sejumlah aktivis dikabarkan *raib*. (Republika, 1/4/98)
- III.(a).29 Pola penanganan berbagai unjuk rasa [...] *tak seragam*. (Republika, 6 April 1998)
- III.(a).30 Polri *tidak keras hadapi aksi mahasiswa*. (AB, 15 April 1998)
- III.(a).31 Kita (poisi) *hanya reaktif* menghadapi aksi mereka (mahasiswa). (AB, 15 April 1998)
- III.(a).32 Untuk menjaga jangan sampai aksi tidak meluas ke luar kampus, petugas *terpaksa melepaskan gas air mata dan tembakan peluru karet*. (Suara Karya, 27 April 1998)
- III.(a).33 Sebanyak 47 tersangka yang terlibat dalam kasus *kerusuhan* di Medan. (Suara karya, 6 Mei 1998)
- III.(a).34 [...] *amuk massa* di Medan masih berlanjut. (Kompas, 7 Mei 1998)
- III.(a).35 *Aksi massa* kini merambat ke Kecamatan Lubuk pakam. (Kompas, 7 Mei 1998)
- III.(a).36 Menko Polkam Feisal Tanjung menegaskan, *kerusuhan* di Medan merupakan tindakan anarki dan melanggar hukum. (Suara Karya, 7 Mei 1998)
- III.(a).37 Aksi destruktif yang melibatkan ribuan massa [...]. (Republika, 7 Mei 1998)

- III.(a).38 [...] apa yang dilakukan majalah D&R *sangat tidak etis* [...]. (Kompas, 6 Maret 1998)
- III.(a).39 Pemuatan gambar ini dinilai sebagai *pelecehan dan penghinaan* kepada Presiden Soeharto [...]. (Suara Karya, 5 Maret 1998)
- III.(a).40 Ini merupakan kelanjutan permintaan Menpen R. Hartono berkaitan dengan kasus sampul majalah D&R yang dinilai *menghina* Kepala Negara. (Republika, 10 Maret 1998)
- III.(a).41 Kompleks DPR/MPR menjadi *milik mahasiswa*. (Republika, 21 Mei 1998)
- III.(a).42 Puluhan ribu mahasiswa [...] *menduduki* gedung DPR/MPR. (Kompas, 20 Mei 1998)
- III.(a).43 Sekitar 3000 mahasiswa [...] *menggelar* mimbar bebas di halaman parkir gedung DPR/MPR. (Suara Karya, 19 Mei 1998)
- III.(a).44 Kabar akan dilakukan *pembersihan* itu sudah didengar para mahasiswa sejak sore hari. (Republika, 23 Mei 1998)
- III.(a).45 Dalam melakukan *pembersihan* ini, aparat menggunakan cara yang *persuasif*. (Republika, 23 Mei 1998)
- III.(a).46 sebelum dilakukan *evakuasi massal*, pemberitahuan dilakukan sedemikian rupa, baik melalui pimpinan dewan maupun aparat kemanan. (Suara Karya, 23 Mei 1998)
- III.(a).47 Namun jalannya *evakuasi* sempat diwarnai *sikap kasar petugas*. (Suara Karya, 23 Mei 1998)
- III.(a).48 Upaya *persuasif* petugas semakin berhasil setelah sekitar pukul 02.00 WIB mahasiswa memasuki bus. (AB, 23 Mei 1998)
- III.(a).49 Gedung DPR/MPR yang sejak Senin lalu diduduki mahasiswa dari berbagai kampus, mulai tengah malam *dikosongkan* dari para demonstran. (Republika, 23 Mei 1998)
- III.(a).50 Dalam melakukan *pembersihan* itu aparat menggunakan cara yang *persuasif*. (Republika, 23 Mei 1998)
- III.(a).51 Enam mahasiswa tewas *terkena peluru tajam* yang ditembakkan aparat [...] (Kompas, 13 Mei 1998)
- III.(a).52 Enam mahasiswa meninggal *setelah terjadi bentrokan* antara aparat kemanan dengan mahasiswa [...] (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(a).53 Enam orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas *setelah bentrok dengan petugas* [...] (Suara karya, 13 Mei 1998)
- III.(a).54 [...] lima hari sebelum Andi *diculik*, banyak orang tak dikenal yang mengintai terus rumah orang tua Andi. (Kompas, 1 April 1998)
- III.(a).55 Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto menegaskan, sampai saat ini tidak ada kebijakan atau perintah di ABRI untuk *menghilangkan* orang-orang tertentu dalam percaturan politik. (Suara Karya, 30 Maret 1998)
- III.(a).56 ABRI membantah pemberitaan yang menyebutkan hilangnya sejumlah orang akhir-akhir ini karena *diamankan* pihak keamanan dan rekayasa ABRI. (AB, 1 April 1998)
- III.(a).57 "Besok (hari ini, Red) *almatuhum* akan dibawa ke Bandung untuk dimakamkan", ujarnya. (Suara karya, 13 Mei 1998)
- III.(a).58 Presiden juga *menginstruksikan* kepada Menpen untuk mengadakan koordinasi dengan menteri-menteri terkait [...]. (AB, 17 April 1998)
- III.(a).59 "Presiden tadi mengungkapkan kerisauan *beliau* mengenai pemberitaan-pemberitaan yang tidak memberikan gambaran sesungguhnya", kata Menteri Penerangan [...]. (Suara Karya, 17 April 1998)
- III.(a).60 Namun, menurut Alwi, pihaknya akan *menganjurkan* kepada para Menteri serta pejabat jika memang tidak mengetahui persoalannya untuk menjawab *no comment*. (Republika, 17 April 1998).
- III.(a).61 Jendral berbintang empat itu menambahkan, hari Rabu ia sudah *memerintahkan* Kapolri Jendral Diby Widodo untuk menjelaskan masalah orang-orang hilang tersebut. (Suara Karya, 30 April 1998)
- III.(a).62 "*Ngomong* apa saja silakan, polisi tinggal cari pembenarannya ada tidak dengan bukti-bukti," kata Wahab Mokodongan. (Suara Karya, 30 April 1998)
- III.(a).63 *Jenazah-jenazah* korban akan ditempatkan di liang kubur yang memiliki ukuran panjang 27 meter lebar 2 meter dengan kedalaman 1.5 meter. (Suara karya, 18 Mei 1998)
- III.(a).64 Menurut dia, dari 128 *mayat* di Ramayana Ciledug, sebanyak 6 mayat di antaranya ditemukan hari Jumat malam. (Suara karya, 18 Mei 1998)
- III.(a).65 "Kita harus tetap bertahan sampai tuntutan kita dipenuhi dan Soeharto *mundur* dari jabatannya". (Republika, 21 Mei 1998)
- III.(a).66 [...] Haji Muhammad Soeharto *berhenti* dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. (Republika, 22 Mei 1998)
- III.(a).67 [...] Karena itulah, Presiden *mint*a Menpen dan seluruh jajaran Deppen untuk mengikuti secara seksama setiap kebijakan yang diambil pemerintah. (AB, 17 April 1998)
- III.(a).68 Karena itu, ia akan *menyarankan* kepada para pejabat agar berani tidak memberikan komentar atau tanggapannya [...]. (AB, 17 April 1998)
- III.(a).69 Dalam aksinya, sebagian mahasiswa membujuk aparat, agar *mengizinkan* mereka pergi ke Gedung DPR. (Kompas, 1 April 1998)
- III.(a).70 "Tetapi *mohon* agar prosedur penahanan dan penangkapan diterapkan", ucap Bambang mengutip Eddy. (Republika, 1 April 1998)
- III.(a).71 Ia *mengharapkan* agar pemerintah memberikan klarifikasi mengenai orang hilang. (Republika, 1 April 1998)

- III.(a).72 Wiranto menyatakan pihaknya akan *menindak* oknum mahasiswa yang melakukan pengrusakan. (Republika, 5 Mei 1998)
- III.(a).73 Korps Reserse Mabes Polri, kemarin, *memeriksa* Pemimpin Redaksi Majalah D&R. (Republika, 10 Maret 1998)
- III.(a).74 Dewan Kehormatan PWI dalam sidang pleno *merekomendasikan* sanksi skors dua tahun bagi pemimpin Redaksi D&R.
- III.(a).75 Aksi *unjuk rasa* para mahasiswa di berbagai kota seperti Medan, Riau, Semarang, Jambi, Yogyakarta, Ujungpandang, Bogor dan Jakarta terus berlanjut, Sabtu. (Suara Karya, 27 April 1998)
- III.(a).76 "Reaksi aparat terlalu berlebihan," kata Ichlasul di depan peserta *mimbar bebas* di halaman balairung UGM. (Republika, 6 April 1998)
- III.(a).77 Di Surabaya, mahasiswa yang tergabung dalam arek-arek pro reformasi (ARP) menggelar *aksi keprihatinan* menuntut pencabutan keputusan kenaikan harga BBM [...]. (Suara Karya, 6 Mei 1998)
- III.(a).78 Di Bandung *demo* mahasiswa juga terjadi di kampus IAIN Sunan Gunung Jati. (Republika, 1 Mei 1998)
- III.(a).79 Kol. Pol Drs. Abubakar dan juga keluarga korban menyayangkan, bahwa *aksi kebrutalan para mahasiswa* tersebut dilakukan di halaman masjid. (SK, 11 Mei 1998)
- III.(a).80 *Aksi damai* di Universitas Trisakti dan Tarumanegara, di daerah Grogol, Jakarta Barat, kemarin diikuti sekitar 10 ribu orang. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(a).81 Aparat keamanan yang tidak sabar lagi dengan *tindakan persuasif*, secara serentak melakukan *tindakan pembubaran* aksi duduk dan mimbar bebas di Jalan S. Parman.
- III.(a).82 Kelompok *mahasiswa radikal* mendesak dan meminta adanya pergantian pimpinan negara. (Suara Karya, 3 April 1998)
- III.(a).83 Kelompok *mahasiswa moderat* ini berpikir dan ingin menyampaikan aspirasinya melalui tangga-tangga yang benar. (Suara Karya, 3 April 1998)
- III.(a).84 [...] *dialog* antara mahasiswa dan pimpinan ABRI sangat banyak manfaatnya. (Suara Karya, 3 April 1998)
- III.(b).1 Para mahasiswa sepertinya tidak pernah kehabisan *bahan bakar* dalam berdemo. (Republika, 1/5/98)
- III.(b).2 *Gelombang* aksi keprihatinan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, Kamis (7/5), diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan korban berjatuh di kedua pihak. (Kompas, 8/5/98).
- III.(b).3 Ribuan mahasiswa *banjiri* DPR. (Republika, 15/5/98).
- III.(b).4 Koopsjaya *membersihkan* gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu dinihari dari sisa mahasiswa yang bertahan. (AB, 25/5/98)
- III.(b).5 Aksi massa kini *merambat* ke Kecamatan Lubukpakam, Tanjung Morawa, Galang, Pertumbukan, Beringin, dan Kabupaten Deliserdang. (Kompas, 7/5/98)
- III.(b).6 Namun, sebagaimana disaksikan *Republika*, massa kembali *menye-mut* setelah petugas keamanan melonggarkan blokadanya. (Republika, 7/5/98)
- III.(b).7 Dari berbagai daerah juga dilaporkan, aksi unjuk rasa mahasiswa terus bergelora tidak ada tanda-tanda gerakan mereka semakin *menyurut*. (Suara Karya, 6/5/98)
- III.(b).8 Dalam kerusuhan yang disertai penjarahan di Tangerang tersebut diperkirakan telah *menelan* korban jiwa sebanyak 200 orang lebih. (Suara Karya, 18 Mei 1998)
- III.(b).9 Walaupun aksi telah *memakan* korban, tapi mahasiswa tetap bersi-keras menuntut turun ke jalan. (Republika, 1 Mei 1998)
- III.(b).10 Di Jakarta aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta Timur sempat diwarnai *kucing-kucingan* antara mahasiswa dengan petugas. (Suara Karya, 27 April 1998)
- III.(c).1 Pembuatan sampul majalah tersebut *sangat* menghina Kepala Negara [...] (SK, 5/5/98)
- III.(c).2 Dewan kehormatan PWI *dapat* memahami peringatan keras peme-rintah terhadap majalah D&R. (Kompas, 6/3/98)
- III.(c).3 Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air *sudah semakin* beringas. (Suara Karya, 4/5/98)
- III.(c).4 Aksi mahasiswa akhir-akhir ini *mulai* melenceng. (AB, 7/5/98)
- III.(c).5 Sejumlah aksi mahasiswa di beberapa tempat *sudah* menjurus pada pelanggaran hukum, seperti menggarong, membakar rumah, toko dan kendaraan. (AB, 7/5/98)
- III.(c).6 [...] anggota kepolisian *tidak* melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi [...], tetapi *hanya* reaktif. (AB, 15/4/98)
- III.(c).7 [...] aksi unjuk rasa mahasiswa yang berubah menjadi kerusuhan tersebut *pasti* ditunggangi oknum-oknum tertentu [...]. (SK, 7/5/98)
- III.(c).8 Citra (mahasiswa) sebagai insan kampus yang membawa bendera intelektualitas terasa *makin* memudar. (SK, 3/4/98)
- III.(c).9 [...] aksi mahasiswa saat ini *masih* wajar dan *tidak* menyimpang. (Republika, 17/4/98)
- III.(c).10 Presiden Soeharto mengungkapkan kerisauannya terhadap pembedaan media massa yang *tidak* menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang *tidak* tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah. (AB, 17/4/98)
- III.(c).11 Pemberitaan pers *seringkali* diberi interpretasi yang *tidak* tepat dan memberi gambaran yang salah. (SK, 14/4/98)

- III.(c).12 [...] polisi *hanya* menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. (Kompas, 13/5/98)
- III.(c).13 Universitas Trisakti *akan* mengajukan protes keras kepada pihak berwajib, khususnya Kepala Kepolisian RI. (Kompas, 13/5/98)
- III.(c).14 Komnas Ham *akan* menemui Pangab untuk mengusut kasus ini segera. (Republika, 13/5/98)
- III.(c).15 Korban jiwa *mulai* berjatuh dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. (SK, 13/5/98)
- III.(c).16 [...] mahasiswa *tidak bisa* mengundang Sidang Istimewa MPR, [...]. (SK, 3/4/98)
- III.(c).17 Kelompok ini berpikir dan *ingin* menyampaikan aspirasinya melalui tanggapan yang benar. (SK, 3/4/98)
- III.(c).18 Mereka *tidak mau* berdialog dengan ABRI. (SK, 3/4/98)
- III.(c).19 [...] *seharusnya* jika mahasiswa *ingin* menyelesaikan persoalan, ada dua dari tri dharma perguruan tinggi yang bisa dipakai. (SK, 3/4/98)
- III.(c).20 Karena itu mahasiswa *tidak perlu* menolak untuk berdialog dengan ABRI. (SK, 3/4/98)
- III.(c).21 [...] rakyat yang akan rugi, karena mahasiswa turun ke jalan *sudah pasti akan* disusupi oleh pihak lain yang akan memanfaatkan situasi. (AB, 20/4/98)
- III.(c).22 Pemerintah tetap pada ketentuannya, bahwa para mahasiswa *hanya boleh* melakukan kegiatan di dalam kampus. (AB, 20/4/98)
- III.(c).23 Namun reformasi yang dipelopori ABRI itu *haruslah* yang gradual, konstitusional, dan berkesinambungan. (AB, 20/4/98)
- III.(c).24 Persoalan orang "hilang" yang diramalkan masyarakat saat ini *harus segera* diklarifikasi. (Kompas, 1/4/98)
- III.(c).25 Ia (Aisyah Amini) mengaku *belum yakin betul* apakah hilangnya beberapa warga masyarakat belakangan ini akibat perbuatan oknum aparat atau benar-benar diculik oleh warga masyarakat lainnya. (Kompas, 1/4/98)
- III.(c).26 [...] Dan Puspom menolak bila ada yang beranggapan ABRI *tidak perlu* dilibatkan dalam tim pencari fakta karena diduga ada keterlibatan anggota ABRI. (AB, 5/5/98)
- III.(c).27 Rektor IAIN meminta aksi mahasiswa IAIN *harus lebih* mengedepankan masalah ilmu dan moral. (SK, 27/4/98)
- III.(c).28 Dengan terjadinya bentrokan ini, mahasiswa *sudah tidak* bersahabat dengan aparat keamanan. (Kompas, 7/5/98)
- III.(c).29 Jika rekomendasi Pemred dicabut, itu artinya majalah *tak boleh* terbit. (Republika, 6/3/98)
- III.(c).30 Unjuk rasa *sebaiknya* dilakukan di dalam kampus. (Republika, 5/5/98)
- III.(c).31 Di kampus mahasiswa *bisa* mengekspresikan opininya, *bisa* menjelaskan konsep-konsepnya. (Republika, 5/5/98)
- III.(c).32 Komandan Kodim *belum bisa* dihubungi karena masih berada di lapangan. (Kompas, 7 Mei 98)
- III.(c).33 Dua mahasiswa Unja tidak cedera serius dan *boleh* pulang hari itu juga. (Kompas, 7 Mei 98)
- III.(c).34 Mahasiswa tetap *tidak mau* pulang dan melampahi petugas yang dibalas dengan tembakan gas air mata. (Kompas, 7 Mei 98)
- III.(c).35 Untuk itu reformasi birokrasi *harus* menjadi agenda penting dalam upaya penataan kembali sistem pemerintahan. (Kompas, 7 Mei 98)
- III.(c).36 Pemred D&R *tidak dapat* memegang SIUPP sehingga *harus* diganti Pemred baru. (Kompas, 6/3/98)
- III.(c).37 pernyataan keras Menpen yang mengomentari gambar majalah itu *sudah seharusnya* begitu. (Kompas, 6/3/98)
- III.(c).38 Bila Pemred diskores, maka Pemred D&R *tak boleh* bertugas. (Republika, 6/3/98)
- III.(c).39 Aksi Unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air *sudah semakin* beringsas. (Suara Karya, 4 Mei 1998).
- III.(c).40 Aksi mahasiswa akhir-akhir ini *mulai* melenceng dan *tidak* tertutup kemungkinan ditunggangi pihak di luar kampus. (Angkatan Bersenjata, 7 Mei 1998).
- III.(d).1 Tiga mahasiswa Universitas Juanda tersangka pembunuh Kasat Intel Polres Bogor Letda Pol. Dadang Rusmana ditangkap, lima lainnya sampai Senin (11/5) terus dikejar. (Suara Karya, 12/5/98)
- III.(d).2 Penangkapan para mahasiswa Unida tersebut berdasarkan keterangan 15 saksi yang terdiri atas mahasiswa Unida, karyawan Unida, dan anggota masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut. (Suara Karya, 12/5/98)
- III.(d).3 Enam mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Trisakti (Kompas, 13/5/98).
- III.(d).4 Korban jiwa mulai berjatuh dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. (Suara Karya, 13/5/98).
- III.(d).5 Gedung DPR/MPR yang sejak Senin lalu diduduki mahasiswa dari berbagai kampus, mulai tengah malam dikosongkan dari para demonstran. (Republika, 23/5/98)
- III.(d).6 Diperoleh informasi, peristiwa bentrokan mahasiswa dengan petugas keamanan di Universitas Trisakti bermula ketika para mahasiswa menolak permintaan petugas keamanan agar masuk ke areal kampus sekitar pukul 18.00 dari jalan raya.
- III.(d).7 Gelombang aksi keprihatinan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, Kamis (7/5), diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan

- yang menyebabkan korban berjatuh di kedua pihak. (II.B.8a)
- III.(d).8 Sedikitnya lima mahasiswa di Medan, dan Jambi menderita luka akibat tembakan peluru karet. (SK,27/4/98)
- III.(d).9 Kemarin, setidaknya wilayah Lubuk Pakam, Perbaungan, Galang turut diguncang amuk massa, menyusul adanya keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif listrik. (Republika, 7 Mei 1998)
- III.(d).10 Sebagaimana aksi-aksi sebelumnya, kerusuhan itu tersulut tak lama setelah kehadiran segerombolan massa yang diketahui datang dari luar kota pinggiran Medan. (Republika, 7 Mei 1998)
- III.(d).11 Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol. (Kompas, 13 Mei 1998)
- III.(d).12 Enam orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk yang dilakukan ratusan mahasiswa di Jalan S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. (Suara Karya, 13 Mei 1998).
- III.(d).13 Berbeda dengan Peristiwa 27 Juli 1996 di mana pembebasan Gedung PDI berlangsung keras dan berdarah, bahkan banyak orang hilang, aksi pembebasan Gedung MPR/DPR itu berlangsung damai. (Kompas, 23 Mei 1998)
- III.(d).14 Jendral Besar TNI (Purn) Soeharto yang dikenal akrab dengan panggilan Pak Harto, Kamis (21/5) kemarin di Istana Merdeka, Jakarta memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI. (Angkatan Bersenjata, 22 Mei 1998)
- III.(d).15 Namun, jalannya evakuasi sempat diwarnai sikap kasar petugas. (Suara Karya, 23 Mei 1998).
- III.(d).16 Dalam melakukan pembersihan ini, aparat menggunakan cara yang persuasif. (Republika, 23 Mei 1998).
- III.(d).17 Koopsjaya "bersihkan" gedung DPR/MPR dengan damai. (Angkatan Bersenjata, 25 Mei 1998).
- III.(d).18 Terhitung mulai pukul 09.00 WIB, Kamis, 21 Mei 1998, Haji Muhammad Soeharto, 76, berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI. (Republika, 22 Mei 1998)
- III.(d).19 Pemuatan gambar ini dinilai sebagai pelecehan dan penghinaan kepada Presiden Soeharto dan melanggar kode etik Jumalistik. (Suara Karya, 5 Maret 1998)
- III.(d).20 Atas penurunan gambar sampul majalah tersebut Margiono dituduh melanggar Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Kepala Negara. (Republika, 10 Maret 1998)
- III.(d).21 Sebelum pemeriksaan itu, tim Kejaksaan Agung juga telah memeriksa Pemred dan Pelaksana Harian majalah D&R. (Republika, 10 Maret 1998).
- III.(d).22 Sebelum pemeriksaan Margiono, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi ahli. (Republika, 10 Maret 1998).
- III.(d).23 Sementara itu, Gubernur Riau Soeripto sangat menyayangkan aksi perusakan yang dilakukan oleh para mahasiswa di halaman kantor Gubernur Riau, Kamis (23/4).
- III.(d).24 Situasi destruktif dan berbau rasial di Sumut ini kian mendorong terjadinya eksodus warga keturunan. (Republika, 7 Mei 1998)
- III.(d).25 Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol. Dadang, kemarin tewas setelah dipukuli puluhan mahasiswa, usai mereka berunjuk rasa di Kampus Universitas Juanda, Bogor. (Republika, 10/5/98)
- III.(d).26 Selain Dadang, Pasi Intel Kodim 0621 Bogor, Kapten Ali juga terluka dan dirawat di rumah sakit. (Republika, 10/5/98)
- III.(d).27 Aksi mahasiswa di Bogor, Sabtu (9/5) menewaskan Letnan Dua (Pol) Dadang Rusmana, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor. (Kompas, 10/5/98)
- III.(d).28 Perwira lain, yang menjadi korban pemukulan mahasiswa Unida, adalah Kapten Ali, Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer Bogor. (Kompas, 10/5/98)
- III.(d).29 Sekitar pukul 23.30 WIB evakuasi yang dipimpin Kasdam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi dimulai. (Suara Karya, 23/5/98)
- III.(d).30 Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad dan Marinir, yang tergabung dalam Koopsjaya membersihkan gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu dari sisa mahasiswa yang bertahan. (AB, 23/5/98)
- III.(d).31 Gedung MPR/DPR yang diduduki mahasiswa sejak Senin lalu, Sabtu dinihari pukul 02.10 WIB masih dalam proses pengosongan 1000 pasukan gabungan [...]. (Kompas, 23 Mei 1998)
- III.(e).1 Penangkapan para mahasiswa Unida tersebut berdasarkan keterangan 15 saksi yang terdiri atas mahasiswa Unida, karyawan Unida, dan anggota masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut. (Suara Karya, 12/5/98)
- III.(e).2 Pemberitaan pers seringkali dengan interpretasi yang tidak tepat dan gambaran yang salah. (SK, 14/4/98)
- III.(e).3 Sebelum pemeriksaan Margiono, pihaknya telah memeriksa se-jumlah saksi ahli. (Republika, 10 Maret 1998).
- III.(e).4 Penangkapan dilakukan sejak hari Minggu malam dan Senin dini-hari.
- III.(e).5 Peringatan petugas agar gedung segera dikosongkan. (III.(e).8)
- III.(f).1 Dewan Kehormatan PWI dalam sidang pleno merekomendasikan sanksi skors dua tahun bagi pimpinan Redaksi D&R. (Republika, 6/3/98)
- III.(f).2 Kadispen Polda Metro Jaya Letkol Pol. Edward Arionang yang dihu bungi sekitar

- pukul 20.00 semalam mengaku belum menerima laporan mengenai korban tewas akibat bentrokan pengunjuk rasa di Universitas Trisakti dengan petugas keamanan kemarin petang. (Suara Karya, 13/5/98)
- III.(f).3 Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto menghimbau para maha-siswa yang melakukan unjuk rasa agar tetap berada di kampus. (AB, 5/5/98)
- III.(f).4 Menhankam Pangab Jendral TNI Wiranto menegaskan sampai saat ini tidak ada kebijakan atau perintah di ABRI untuk menghilangkan orang-orang tertentu dalam percaturan politik. (Suara Karya, 30/4/98)
- III.(f).5 Dalam melihat kasus orang hilang, masyarakat diminta jangan berprasangka buruk terhadap aparat keamanan. (AB, 5/5/98)
- III.(f).6 Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air sudah semakin beringas. (Suara Karya, 4/5/98)
- III.(f).7 [...] aksi mahasiswa akhir-akhir ini mulai melenceng, dan tidak tertutup kemungkinan ditunggangi pihak luar kampus. (AB, 7/5/98)
- III.(f).8 Aksi unjuk rasa mahasiswa yang kian marak di beberapa daerah saat ini cenderung mengarah kepada parlemen "jalan-an", bahkan dapat berkembang menjadi semacam *people power*. (Suara Karya, 3/4/98)
- III.(f).9 Aksi unjuk rasa mahasiswa seperti di UNS Solo, Universitas Muha-madiyah Yogyakarta dan lain-lain, misalnya, hanya menambah masalah saja. (Suara Karya, 3/4/98)
- III.(f).10 Aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia, menurut mantan Ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977, merupakan langkah efektif untuk mendorong perubahan. (Republika, 17/4/98).
- III.(f).11 Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto mengatakan, keinginan mahasiswa untuk tetap turun ke jalan merupakan suatu ancaman terhadap pemerintah. (AB, 20/4/98)
- III.(f).12 Di Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Kolonel (Pol) Bani Siswono mengemukakan, polisi masih menyediki apakah tewasnya Moses Gatotkaca (40) akibat unjuk rasa yang berlangsung Jumat hingga Sabtu subuh. (Kompas, 10/5/98)
- III.(f).13 Presiden merisaukan pemberitaan yang tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah. (AB, 17/4/98).
- III.(f).14 Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata menyatakan kepada wartawan, kematian enam mahasiswa itu masih diteliti, sambil menunggu hasil *visum et repertum*, "karena polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata". (Suara Karya, 17/4/1998)
- III.(f).15. Presiden minta Menpen melakukan koordinasi dengan menteri lain supaya pers mendapat informasi selengkap mungkin. (Suara Karya, 17/4/1998)
- III.(f).16. Pemberitaan pers mendapat sorotan Presiden Soeharto. (Republika, 17 April 1998)
- III.(f).17. Menteri Kehakiman Muladi menegaskan, persoalan orang "hilang" yang diramaikan masyarakat saat ini harus segera diklarifikasikan. (Kompas, 1 April 1998)
- III.(f).18. [...] Kapuspen ABRI Brigjen TNI Abdul Wahab Mokodongan, mengatakan, pimpinan ABRI telah melakukan pencekan terhadap seluruh kantor ABRI, mulai yang paling bawah hingga ke tingkat Markas Besar, dan ternyata tidak ditemukan para aktivis yang dikabarkan hilang. (Kompas, 1 April 1998).
- III.(f).19. Wakil kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Letjen Pol. Drs Lutfi Dahlan menegaskan anggotanya tidak melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di kampus-kampus belakangan ini, tetapi hanya reaktif. (AB, 15 April 1998)
- III.(f).20. Dewan Kehormatan PWI, kata Alwi, dapat memahami peringatan keras pemerintah terhadap majalah *D&R*. (Kompas, 6 Maret 1998)
- III.(e).21 Mahasiswa sekarang kritis. (Republika, 17/4/98)
- III.(f).22 Aksi mahasiswa saat ini masih wajar dan tidak menyimpang. (Republika, 17/4/98)
- III.(f).23 Apa yang mereka lakukan bukan langkah yang sia-sia, dan akan membuahkan hasil. (Republika, 17 April 1998)
- III.(f).24 "Kita harus tetap bertahan sampai tuntutan kita dipenuhi dan Soeharto mundur dari jabatannya". (Republika, 21 mei 1998)
- III.(f).25 [...] dialog antara mahasiswa dan pimpinan ABRI sangat banyak manfaatnya. (Suara Karya, 3 April 1998)
- III.(f).26 Citra (mahasiswa) sebagai insan kampus yang membawa bendera intelektualitas terasa makin memudar. (Suara Karya, 3/4/98)
- III.(g).1 Enam mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprhatinan ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Trisakti (Kompas, 13 Mei 1998).
- III.(g).2 Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan Layang, Grogol (*Grogol Fly Over*). (Kompas, 13 Mei 1998)
- III.(g).3 Enam mahasiswa Universitas Trisakti kemarin meninggal setelah terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menuntut reformasi yang digelar di kampus mereka. (Republika, 13 Mei 1998)

- III.(g).4 Enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang setelah bentrok dengan petugas yang berusaha membubarkan mimbar bebas dan aksi duduk yang dilakukan ratusan mahasiswa di jalan S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. (Suara Karya, 13 Mei 1998).
- III.(g).5 Korban jiwa mulai berjatuh dalam aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa. (Suara Karya, 13 Mei 1998).
- III.(g).6 Gedung DPR/MPRS yang sejak Serin lalu diduduki mahasiswa dari berbagai kampus, mulai tengah malam dikosongkan dari para demonstran. (Republika 23 Mei 1998).
- III.(g).7 Petugas keamanan dari Kodam Jaya, Kostrad dan Marinir, yang tergabung dalam Komando Operasi Jaya (Koopsjaya), "membersihkan" gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu dinihari dari sisa mahasiswa yang bertahan. (Angkatan Bersenjata, 25 Mei 1998)
- III.(g).8 Gedung DPR/MPR yang diduduki mahasiswa sejak Serin (18/5) lalu, Sabtu (23/5) dini hari pukul 02.10 WIB masih dalam proses pengosongan oleh sekitar 1000 pasukan gabungan ABRI yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Sudi Silalahi. (Kompas, 23 Mei 1998)
- III.(g).9 Berbeda dengan Peristiwa 27 Juli 1996 di mana pembebasan Gedung PDI berlangsung keras dan berdarah, bahkan banyak orang yang hilang, aksi pembebasan gedung MPR/DPR itu berlangsung damai. (Kompas, 23 Mei 1998).
- III.(g).10 Namun, jalannya evakuasi sempat diwarnai sikap kasar petugas. (Suara Karya, 23 Mei 1998).
- III.(g).11 Dalam melakukan pembersihan ini, aparat menggunakan cara yang persuasif. (Republika, 23 Mei 1998).
- III.(g).12 Koopsjaya "bersihkan" gedung DPR/MPR dengan damai. (Angkatan Bersenjata, 25 Mei 1998).
- III.(g).13 Aksi Unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air sudah semakin beringas. (Suara Karya, 4 Mei 1998).
- III.(g).14 Aksi mahasiswa akhir-akhir ini mulai melenceng dan tidak tertutup kemungkinan ditunggangi pihak di luar kampus. (Angkatan Bersenjata, 7 Mei 1998).
- III.(g).15 Aksi ke jalan selama ini telah terbukti mengarah ke tindakan anarkis dan destruktif. (Republika, 5 Mei 1998).
- III.(g).16 Gelombang unjukrasa mahasiswa terus berlanjut dan meluas. (Republika, 19 Mei 1998).
- III.(g).17 Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi masih berlanjut di mana-mana, Sabtu (25/4). (Kompas, 7 Mei 1998).
- III.(g).18 Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol. Dadang, kemarin tewas setelah dipukuli puluhan mahasiswa, usai mereka berunjuk rasa di kampus Universitas Juanda Bogor. (Republika, 10 Mei 1998)
- III.(g).19 Aksi mahasiswa di Bogor, Sabtu (9/5) menewaskan Letnan Dua (Pol) Dadang Rusmana, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor. (Kompas, 10 Mei 1998).
- III.(g).20 Tiga mahasiswa Universitas Juanda tersangka pembunuh Kasat Intel Polres Bogor Letda Dadang Rusmana *ditangkap*. (Suara Karya, 11 Mei 1998).
- III.(g).21 Korps Reserse Mabes Polri, kemarin, memeriksa Pemimpin Redaksi Majalah *Detektif dan Romantika* Margiono. (Republika, 10 Maret 1998).
- III.(g).22 Menteri Penerangan R. Hartono *menyesalkan* kulit muka majalah mingguan *Detektif dan Romantika* edisi terbaru. (Suara Karya, 5 Maret 1998).
- III.(g).23 Presiden *mertsaukan* pemberitaan yang tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya, memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah, terutama mengenai kebijakan pemerintah. (AB, 17/4/98).
- III.(g).24 Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, kemarin, kembali *menghimbau* mahasiswa agar tidak turun ke jalan. (Republika, 5 Mei 1998)
- III.(g).25 Usai menghadap Presiden di Bina Graha, kemarin, Wiranto *mengatakan* tindakan mahasiswa turun ke jalan berisiko cukup berat, karena selalu ada kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh "pihak-pihak lain". (Republika, 5 Mei 1998)
- III.(g).26 Puluhan mahasiswa lainnya *menderita* luka-luka berat dan ringan. (Kompas, 13 Mei 1998)
- III.(g).27 Puluhan pengunjung rasa lainnya *terluka terkena* pukulan dan pe-luru, sebagian harus dirawat. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(g).28 Kadispen Polda Metro Jaya Letkol Pol Edward Aritonang yang dihubungi sekitar pukul 20.00 semalam *mengaku* belum menerima laporan mengenai korban tewas akibat bentrokan pengunjung rasa di Universitas Trisakti dengan petugas keamanan kemarin petang. (Suara Karya, 13 Mei 1998)
- III.(g).29 Kapuspen ABRI Brigjen TNI A. Wahab Mokodongan yang dihubungi *Suara Karya* melalui telepon sekitar pukul 20.30 semalam untuk meminta konfirmasi mengenai bentrokan di Trisakti yang meminta korban jiwa, *mengaku* bahwa ia memang mendengar kabar adanya korban 4 orang tewas dan 10 luka-luka. (Suara Karya, 13 Mei 1998)
- III.(g).30 Menggambarkan kerisauan Kepala Negara, Menpen *menyebutkan* sejumlah berita kadang kala diberi penafsiran keliru oleh pengelola media massa itu sehingga setiap langkah dicari salahnya. (AB, 17 April 1998)

- III.(g).31 Alwi *melihat* tidak hanya media cetak, tayangan media elektronik pun banyak yang tidak proporsional atau tidak mencerminkan perspektif yang sesungguhnya. (Suara Karya, 17 April 1998)
- III.(g).32 Aksi mahasiswa yang marak di seluruh Indonesia, *menurut* mantan ketua Dewan Mahasiswa periode 1975-1977, merupakan langkah efektif mendorong perubahan. (Republika, 17 April 1998)
- III.(g).33 *Menurut* pandangan Dipo, aksi mahasiswa saat ini masih wajar dan tidak menyimpang. (Republika, 17 April 1998)
- III.(g).34 Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto *mengatakan*, keinginan mahasiswa untuk tetap turun ke jalan merupakan suatu ancaman terhadap pemerintah. (Republika, 20 April 1998)
- III.(g).35 Menteri Kehakiman Muladi *menegaskan*, persoalan orang "hilang" yang diramalkan masyarakat saat ini harus diklarifikasikan. (Kompas, 1 April 1998)
- III.(g).36 Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto *menegaskan*, sampai saat ini tidak ada kebijakan atau perintah di ABRI untuk menghilangkan orang-orang tertentu dalam percaturan politik. (Suara Karya, 30 April 1998)
- III.(g).37 Jendral berbintang empat itu *menambahkan*, hari Rabu ia sudah memerintahkan Kapolri Jendral Pol Diby Widodo untuk menjelaskan masalah orang-orang yang hilang tersebut. (Suara Karya, 30 April 1998)
- III.(g).38 ABRI *membantah* pemberitaan yang menyebutkan hilangnya sejumlah orang akhir-akhir ini karena diamankan pihak keamanan atau rekayasa ABRI. (AB, 1 April 1998)
- III.(g).39 Sejumlah aktivis *dikabarkan* raib. (Republika, 1 April 1998)
- III.(g).40 Kapuspen ABRI *membantah* bahwa mereka ditangkap aparat keamanan. (Republika, 1 April 1998)
- III.(g).41 Sementara itu, Gubernur Riau Suropto, Rektor Undip yang juga Menkeh Prof. Dr Muladi, Rektor IAIN Dr. H. Hamzah S *menyayangkan* adanya aksi kekerasan yang dilakukan mahasiswa. (Suara Karya, 27 April 1998)
- III.(g).42 Ia (Menko Polkam) menilai aksi tersebut telah ditanggapi oknum-oknum tertentu. (Suara Karya, 7 Mei 1998)
- III.(g).43 Ratusan mayat tak dikenal hari ini dikuburkan secara massal. (Republika, 18 Mei 1998)
- III.(g).44 Kemarin, mahasiswa di berbagai kota keluar dari kampus dan turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan tuntutan utama mereka, reformasi. (Republika, 1 Mei 1998)
- III.(g).45 Aksi mahasiswa di Bogor, Sabtu (9/5) menewaskan Letnan Dua (Pot) Dadang Rusmana [...]. (Kompas, 10 Mei 1998)
- III.(g).46 Puluhan ribu mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi di wilayah Jabotabek, Selasa (19/5), menduduki gedung DPR/MPR. (Kompas, 20 Mei 1998)
- III.(g).47 Petugas mulai memasuki gedung Lokawirasaba. (AB, 23 Mei 1998)
- III.(g).48 Petugas memerintahkan mahasiswa di lantai atas gedung tersebut turun. (AB, 23 Mei 1998)
- III.(g).49 Petugas menggiring mereka ke luar gedung tersebut. (AB, 23 Mei 1998)
- III.(g).50 Ribuan mahasiswa telah pergi. (Suara Karya, 23 Mei 1998)
- III.(g).51 Nama para korban adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Arsitektur, angkatan 1996), Alan Mulyadi [...]. (Kompas, 13 Mei 1998)
- III.(g).52 Mahasiswa Universitas Tarumanegara yang kampusnya berseberangan dengan Trisakti, ikut melempari petugas dengan batu dan botol. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(g).53 Menteri Kehakiman Muladi menegaskan, persoalan orang "hilang" yang diramalkan masyarakat harus segera diklarifikasikan. (Kompas, 1 April 1998)
- III.(g).54 Ia mengaku belum yakin betul apakah hilangnya beberapa warga masyarakat belakangan ini akibat perbuatan oknum aparat atau benar-benar diculik oleh warga masyarakat lainnya. (Kompas 1 April 1998)
- III.(g).55 Anggota Komnas HAM Albert Hasibuan menyayangkan terjadinya kerusuhan. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(g).56 Para mahasiswa yang cedera akibat peluru karet yang ditembakkan petugas adalah Edi Susilo, Firman dan Abdi. (Suara Karya, 27 April 1998)
- III.(g).57 Perwira lain, yang menjadi korban pemukulan mahasiswa Unida, adalah Kapten (Inf) Ali, Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer Bogor. (Kompas, 10 Mei 1998)
- III.(g).58 [...] aksi tersebut telah ditanggapi oknum-oknum tertentu. (Suara Karya, 7 Mei 1998)
- III.(g).59 [...] persoalan orang "hilang" yang diramalkan masyarakat harus segera diklarifikasikan. (Kompas, 1 April 1998)
- III.(g).60 [...] Presiden Soeharto *menilai* banyak sekali informasi yang kurang tepat. (Republika, 17 April 1998)
- III.(g).61 Adi Andojo *menyayakan* terjadinya peristiwa itu. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(g).62 Saya *melihat* mahasiswa sekarang kritis. (Republika, 17 April 1998)
- III.(g).63 Keluarganya *menduga* Andi Arief ditangkap petugas. (Republika, 1 April 1998)
- III.(g).64 Melihat hal itu, ribuan mahasiswa *semakin* emosi. (Republika, 1 Mei 1998)
- III.(g).65 Para mahasiswa *mulai berdemo* pada pukul 09.30. (Republika, 1 Mei 1998)
- III.(g).66 Mahasiswa Universitas Sahid *menggelar* aksi keprihatinan maha-siswa. (Kompas, 8 Mei 1998)

- III.(g).67 Petugas dan mahasiswa saling melempar batu. (Republika, 5 Mei 1998)
- III.(g).68 Rektor Unhas *memantau* langsung aksi itu. (Republika, 19 Mei 1998)
- III.(g).69 Dewan Kehormatan PWI dapat *memahami* peringatan keras peme-rintah terhadap majalah D&R. (Kompas, 6 Maret 1998)
- III.(g).70 Mereka *menamakan* dirinya komunitas mahasiswa se-Jabotabek. (republika, 1 Mei 1998)
- III.(g).71 Muladi *memprihatinkan* fenomena orang hilang tersebut. (Kompas, 1 April 1998)
- III.(g).72 Para mahasiswa yang cidera akibat peluru karet yang ditembakkan petugas adalah Edi, Susilo, Firman dan Abdi. (Suara Karya, 27 April 1998)
- III.(g).73 Massa *mendengar* ada warga tertembak peluru karet. (Kompas, 7 Mei 1998)
- III.(g).74 ABRI sangat memahami bila warga masyarakat merasa kurang aman. (Suara Karya, 18 Mei 1998)
- III.(g).75 Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol. Dadang, kemarin dipukuli puluhan mahasiswa [...]. (Republika, 10 Mei 1998)
- III.(g).76 Aparat *mulai bergerak* dengan serius (AB, 23 Mei 1998)
- III.(g).77 Mereka *lari* setelah melihat kedua korban yang perwira pertama ABRI itu sekarat. (SK, 11 Mei 1998)
- III.(g).78 Jenazah Letda Pol. Dadang Rusmana *dimakamkan* di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. (SK, 11 Mei 1998)
- III.(g).79 Tiga mahasiswa Universitas Juanda tersangka pembunuh Letda Pol. Dadang *ditangkap*, lima lainnya terus *dikejar*.
- III.(g).80 Para mahasiswa sejak Selasa menguasai gedung tersebut. (AB, 23 Mei 1998)
- III.(g).81 Petugas keamanan dengan simpatik menggiring mereka ke luar gedung tersebut. (Kompas, 25 Mei 1998)
- III.(g).82 Ketua *Crisis Centre* Universitas Trisakti, Adi Andojo Soecipto, S.H. dalam jumpa pers, Selasa malam, *mengemukakan*, Universitas Trisakti akan mengajukan protes keras kepada pihak berwajib khususnya Kapolri dan Menhankam. (Kompas, 13 Mei 1998)
- III.(g).83 Ia tak menyangka putranya kena peluru nyasar. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(g).84 "Semestinya aparat tak asal tembak di perkampungan, kan banyak orang," jelas Khusnul, kakak perempuan Syamsul. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(g).85 "Mereka, pihak rumah sakit, tidak menyebut adanya mahasiswa yang tewas," kata Aritonang, ketika dihubungi tadi malam. (Republika, 13 Mei 1998)
- III.(g).86 "Aksi duduk ditengah jalan ini sebagai protes kami atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam menangani aksi keprihatinan yang dilancarkan teman-teman selama ini," demikian seorang mahasiswa. (Suara Karya, 13 Mei 1998)
- III.(g).87 "Presiden merisaukan pemberitaan yang tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya," kata Alwi Dahlan kepada pers setelah diterima Kepala Negara. (AB, 17 April 1998)
- III.(g).88 Alwi Dahlan *mengingatkan* berita media massa bisa mempengaruhi nilai rupiah. (Republika, 17 April 1998)
- III.(g).89 Aksi unjuk rasa mahasiswa seperti di UNS Solo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lain-lain, misalnya, hanya menambah masalah saja," kata Irsyad Sudiro dalam jumpa pers di gedung DPR/MPR. (Suara Karya, 3 April 1998)
- III.(g).90 "Apa yang mereka (mahasiswa) lakukan bukan langkah sia-sia, dan akan membuahkan hasil," ujar Dipo ketika dihubungi *Republika*. (Republika, 17 April 1998)
- III.(g).91 "Saya kira yang paling penting adalah harus segera ada klarifikasi mengenai orang hilang, bukan saja dari pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga dari keluarga, ujamya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3).
- III.(g).92 "ABRI prihatin atas adanya orang-orang hilang di tanah air belakangan ini," kata Wiranto. (Suara Karya, 30 April 1998)
- III.(g).93 "ABRI tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, kalau ada oknum, ya memang ada," katanya.
- III.(g).94 "Tidak benar anggapan kalau hilangnya sejumlah orang-orang itu adalah rekayasa ABRI," ujar Kapuspen ABRI.
- III.(g).95 Saat ini tinggal tiga pengamen, yakni Agus Pamiji alias Wawan, Ferdinandus Suhardono, dan Muhamad Kadarisman, yang masih dalam pemeriksaan. (Republika, 6 April 1998)

Lampiran 12: Hasil Analisis Manifestasi Perspektif Pemberitaan dalam Ketransitifan

No. Data	perspektif pemberitaan	Macam Proses	Kategori Makna	Partisipan
III.(f).1	pro mahasiswa	material	kejadian	tujuan
III.(f).2	pro mahasiswa	material	kejadian	tujuan
III.(f).3	pro mahasiswa	material	kejadian	tujuan
III.(f).4	pro pemerintah	material	kejadian	tujuan
III.(f).5	pro pemerintah	material	perbuatan	tujuan
III.(f).6	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).7	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).8	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).9	pro pemerintah	material	kejadian	tujuan
III.(f).10	pro mahasiswa	mental	perasaan	pengindra, fenomena
III.(f).11	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).12	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).13	pro pemerintah	mental	penginderaan:perasaan	fenomena
III.(f).14	pro pemerintah	material	kejadian, perbuatan	pelaku: pelaku, tujuan
III.(f).15	pro pemerintah	material	kejadian	tujuan
III.(f).16	pro mahasiswa	material	kejadian	tujuan
III.(f).17	pro mahasiswa	material	kejadian	tujuan
III.(f).18	pro pemerintah	material	kejadian	tujuan
III.(f).19	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).20	pro pemerintah	material	perbuatan	tujuan
III.(f).21	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).22	pro pemerintah	mental	penginderaan:perasaan	pengindra, fenomena
III.(f).23	pro pemerintah	mental	penginderaan:perasaan	pengindra, fenomena
III.(f).24	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).25	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).26	pro mahasiswa	material	kejadian	tujuan
III.(f).27	pro mahasiswa	material	kejadian: perbuatan	tujuan: tujuan
III.(f).28	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).29	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).30	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).31	pro pemerintah	mental	penginderaan: penglihatan	pengindra, fenomena
III.(f).32	pro mahasiswa	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).33	pro mahasiswa	mental	penginderaan: pemikiran	pengindra, fenomena
III.(f).34	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).35	netral	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).36	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).37	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).38	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).39	netral	verbal	pengucapan	ucapan
III.(f).40	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).41	pro pemerintah	mental	penginderaan: perasaan	pengindra, fenomena
III.(f).42	pro pemerintah	mental	penginderaan: pemikiran	pengindra, fenomena
III.(f).43	netral	material	perbuatan	tujuan
III.(f).44	pro mahasiswa	material	perbuatan: perbuatan	pelaku: pelaku
III.(f).45	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).46	pro mahasiswa	material	perbuatan	pelaku, tujuan

III.(f).47	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).48	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).49	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).50	pro mahasiswa	material	perbuatan	pelaku
III.(f).51	pro mahasiswa	relasional	hubungan	penunjuk, penunjukan
III.(f).52	pro mahasiswa	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).53	netral	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).54	netral	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).55	netral	mental	Penginderaan: perasaan	pengindra, fenomena
III.(f).56	pro mahasiswa	relasional	hubungan	penunjuk, penunjukan
III.(f).57	pro pemerintah	relasional	hubungan	penunjuk, penunjukan
III.(f).58	pro pemerintah	material	kejadian	pelaku, tujuan
III.(f).59	netral	material	kejadian	tujuan
III.(f).60	pro pemerintah	mental	Penginderaan: pemikiran	pengindra, fenomena
III.(f).61	netral	mental	Penginderaan: perasaan	pengindra, fenomena
III.(f).62	pro mahasiswa	mental	Penginderaan: penglihatan	pengindra, fenomena
III.(f).63	pro mahasiswa	mental	Penginderaan: pemikiran	pengindra, fenomena
III.(f).64	pro mahasiswa	mental	Penginderaan: perasaan	pengindra, fenomena
III.(f).65	pro mahasiswa	material	perbuatan	pelaku
III.(f).66	pro mahasiswa	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).67	netral	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).68	pro mahasiswa	mental	Penginderaan: penglihatan	pengindra, fenomena
III.(f).69	pro pemerintah	mental	Penginderaan: pemikiran	pengindra, fenomena
III.(f).70	pro mahasiswa	relasional	hubungan	penunjuk, penunjukan
III.(f).71	netral	mental	Penginderaan: perasaan	pengindra, fenomena
III.(f).72	pro mahasiswa	relasional	hubungan	penunjuk, penunjukan
III.(f).73	pro mahasiswa	mental	Penginderaan: penglihatan	pengindra, fenomena
III.(f).74	pro pemerintah	mental	Penginderaan: pemikiran	pengindra
III.(f).75	pro pemerintah	material	kejadian	pelaku, tujuan
III.(f).76	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku
III.(f).77	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku
III.(f).78	pro pemerintah	material	kejadian	tujuan
III.(f).79	pro pemerintah	material	kejadian: kejadian	tujuan: tujuan
III.(f).80	pro mahasiswa	material	perbuatan	pelaku
III.(f).81	pro pemerintah	material	perbuatan	pelaku, tujuan
III.(f).82	pro mahasiswa	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).83	pro mahasiswa	mental	Penginderaan: pemikiran	pengindra, fenomena
III.(f).84	pro mahasiswa	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).85	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).86	pro mahasiswa	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).87	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).88	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).89	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).90	pro mahasiswa	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).91	netral	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).92	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).93	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan
III.(f).94	pro pemerintah	verbal	pengucapan	pengucap, ucapan

Lampiran 13: Hasil Analisis Manifestasi Perspektif Pemberitaan ke dalam Tindak Tutur

Data	Tuturan		Perspektif
	Fungsi Tuturan	Melakukan Sesuatu	
III.(e).1	menginformasikan	mendorong dan meminta	pro pemerintah
III.(e).2	menginformasikan	menolak dan mengelak	pro pemerintah
III.(e).3	menginformasikan	meminta	pro pemerintah
III.(e).4	menginformasikan	bantahan	pro pemerintah
III.(e).5	menginformasikan	bantahan	pro pemerintah
III.(e).6	menginformasikan	kecaman	pro pemerintah
III.(e).7	menginformasikan	kecaman	pro pemerintah
III.(e).8	menginformasikan	peringatan	pro pemerintah
III.(e).9	menginformasikan	kecaman	pro pemerintah
III.(e).10	menginformasikan	pujian dan dukungan	pro mahasiswa
III.(e).11	menginformasikan	ancaman dan peringatan	pro pemerintah
III.(e).12	menginformasikan	mengelak dan membantah	pro pemerintah
III.(e).13	menginformasikan	kecaman dan peringatan	pro pemerintah
III.(e).14	menginformasikan	bantahan	pro pemerintah
III.(e).15	menginformasikan	perintah	pro pemerintah
III.(e).16	menginformasikan	peringatan dan kritikan	pro pemerintah
III.(e).17	menginformasikan	permintaan	netral
III.(e).18	menginformasikan	bantahan	pro pemerintah
III.(e).19	menginformasikan	bantahan	pro pemerintah
III.(e).20	menginformasikan	persetujuan/dukungan	pro pemerintah
III.(e).21	menginformasikan	pujian	pro mahasiswa
III.(e).22	menginformasikan	pujian	netral
III.(e).23	menginformasikan	pujian	pro mahasiswa
III.(e).24	menginformasikan	tuntutan	pro mahasiswa
III.(e).25	menginformasikan	saran	netral
III.(e).26	menginformasikan	kecaman/kritikan	pro pemerintah

**Lampiran 14: Hasil Analisis Manifestasi Perspektif Pemberitaan
dalam Pilihan Kata**

Data	Pilihan Kata	Fitur Nilai	Perspektif
III.(a).1	berondongan peluru	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).2	hamburan peluru	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).3	tembak gas air mata, peluru karet, dan tembakan peringatan dengan senjata tajam	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).4	kerisauannya	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).5	risau	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).6	risau	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).7	langkah efektif untuk mendorong perubahan	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).8	kritis	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).9	masih wajar, tidak menyimpang	ekspresif	netral
III.(a).10	cenderung melenceng, anarkis	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).11	disusupi	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).12	anarkis	eksperiental/ekspresif	pro pemerintah
III.(a).13	destruktif	eksperiental/ekspresif	pro pemerintah
III.(a).14	ancaman	eksperiental/ekspresif	pro pemerintah
III.(a).15	menggarong, membakar rumah, toko dan kendaraan	eksperiental/ekspresif	pro pemerintah
III.(a).16	radikalisme	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).17	parlemen jalanan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).18	beringas	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).19	aksi kebrutalan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).20	ditunggangi	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).21	berjalan kaki dengan damai	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).22	bukan langkah sia-sia, akan membuahkan hasil	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).23	diculik	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).24	orang hilang	eksperiental	netral
III.(a).25	dibawa	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).26	ditangkap	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).27	orang hilang	eksperiental	netral
III.(a).28	raib	eksperiental	netral
III.(a).29	tak seragam	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).30	tidak keras	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).31	hanya reaktif	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).32	terpaksa melepaskan gas air mata dan tembakan peluru karet	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).33	kerusuhan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).34	amuk massa	eksperiental	netral
III.(a).35	aksi massa	eksperiental	netral
III.(a).36	kerusuhan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).37	aksi destruktif	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).38	sangat tidak etis	ekspresif	pro pemerintah

III.(a).39	pelecehan dan penghinaan	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).40	menghina	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).41	milik mahasiswa	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).42	menduduki	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).43	menggelar	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).44	pembersihan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).45	persuasif	eksperiental/ekspresif	pro pemerintah
III.(a).46	evakuasi massal	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).47	sikap kasar petugas	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).48	persuasif	eksperiental/ekspresif	pro pemerintah
III.(a).49	dikosongkan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).50	persuasif	eksperiental/ekspresif	pro pemerintah
III.(a).51	tewas	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).52	meninggal	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).53	tewas	ekspresif	pro mahasiswa
III.(a).54	diculik	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).55	menghilangkan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).56	diamankan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).57	almarhum	ekspresif	netral
III.(a).58	menginstruksikan	relasional	pro pemerintah
III.(a).59	beliau	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).60	menganjurkan	relasional	netral
III.(a).61	memerintah	relasional	pro pemerintah
III.(a).62	bukti-bukti	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).63	jenazah	ekspresif	netral
III.(a).64	mayat	ekspresif	netral
III.(a).65	mundur	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).66	berhenti	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).67	minta	relasional	pro pemerintah
III.(a).68	menyarankan	relasional	pro pemerintah
III.(a).69	mengizinkan	relasional	pro mahasiswa
III.(a).70	prosedur penahanan dan penangkapan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).71	orang hilang	eksperiental	netral
III.(a).72	menindak	relasional	pro pemerintah
III.(a).73	memeriksa	relasional	pro pemerintah
III.(a).74	merekomendasikan	relasional	pro pemerintah
III.(a).75	unjuk rasa	eksperiental	netral
III.(a).76	mimbar bebas	eksperiental	netral
III.(a).77	aksi keprihatinan	eksperiental	netral
III.(a).78	demo	eksperiental	netral
III.(a).79	aksi kebrutalan	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).80	aksi damai	eksperiental	pro mahasiswa
III.(a).81	tindakan pembubaran	ekspresif	pro pemerintah
III.(a).82	mahasiswa radikal	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).83	mahasiswa moderat	eksperiental	pro pemerintah
III.(a).84	dialog	relasional	netral



Lampiran 15.: Hasil Analisis Manifestasi Perspektif Pemberitaan ke dalam Metafora

Data	Kata Penanda Metafora	Analisis	Perspektif
III.(b). 1	bahan bakar	<ul style="list-style-type: none"> • mahasiswa dianalogikan sebagai energi, daya, tenaga, atau kekuatan • metafora <i>bahan bakar</i> ini memperlihatkan penilaian ekspresif yang positif 	pro mahasiswa
III.(b). 2	gelombang	<ul style="list-style-type: none"> • aksi keprihatinan mahasiswa diibaratkan seperti <i>ombak air laut yang bergulung-gulung</i> • Metafora <i>gelombang</i> memperlihatkan penilaian ekspresif yang positif 	pro mahasiswa
III.(b). 3	banjiri	<ul style="list-style-type: none"> • gerakan mahasiswa yang datang ke gedung DPR digambarkan memiliki sifat-sifat air, seperti mengalir tiada habis-habisnya, tidak terbendung, dan menggenangi tanah yang lebih rendah • metafora <i>banjiri</i> ini memperlihatkan penilaian ekspresif yang positif 	pro mahasiswa
III.(b). 4	membersihkan	<ul style="list-style-type: none"> • mahasiswa digambarkan sebagai kotoran, yang bersifat bau, membuat tidak sedap pemandangan, dan harus dibersihkan • metafora ini memperlihatkan penilaian ekspresif yang negatif terhadap mahasiswa 	pro pemerintah
III.(b)..5	merambat	<ul style="list-style-type: none"> • aksi massa digambarkan seperti sifat api yang membakar kayu, bergerak terus membakar kayu dari satu bagian ke bagian lain • metafora ini memperlihatkan penilaian negatif terhadap aksi massa 	pro pemerintah
III.(b). 6	menyemut	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah massa digambarkan sebagai semut yang banyak sekali, berkerumun dan berdesak-desakan • metafora ini memperlihatkan penilaian yang tidak memihak pada mahasiswa maupun aparat 	netral
III.(b). 7	menyurut	<ul style="list-style-type: none"> • gerakan mahasiswa digambarkan sebagai air • metafora <i>tidak menyurut</i> memperlihatkan penilaian ekspresif yang positif 	pro mahasiswa
III.(b). 8	menelan	<ul style="list-style-type: none"> • kerusuhan digambarkan sebagai binatang pemangsa • metafora ini memperlihatkan penilaian negatif terhadap kerusuhan 	pro pemerintah
III.(b). 9	memakan	<ul style="list-style-type: none"> • aksi mahasiswa digambarkan sebagai binatang pemangsa 	pro pemerintah
III.(b). 10	kucing-kucingan	<ul style="list-style-type: none"> • aksi mahasiswa dalam unjuk rasa dan aksi petugas dalam menjaga unjuk rasa dianalogikan sebagai kucing yang sedang bermain-main 	netral

Lampiran 16: Analisis Struktur Informasi

Data	Informasi Baru	Informasi latar	Struktur Proposisi	Perspektif
III.(d).1	Tiga mahasiswa Universitas Juanda tersangka pembunuh Kasat Intel Polres Bogor Letda Pol. Dadang Rusmana ditangkap, lima lainnya sampai Senin (11/5) terus dikejar.	Kasat Intel Polres Bogor Letda Pol. Dadang Rusmana tewas terbunuh	kasat Intel Polres Bogor tewas → tiga mahasiswa ditangkap	pro pemerintah
III.(d).2	keterangan 15 saksi yang terdiri atas mahasiswa Unida, karyawan Unida, dan anggota masyarakat yang menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut	Penangkapan para mahasiswa Unida tersebut	keterangan saksi → para mahasiswa ditangkap	pro pemerintah
III.(d).3	Penyebab tewasnya enam mahasiswa karena terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas • terjadi aksi keprihatinan ribuan mahasiswa di kampus Trisakti 	aksi keprihatinan → aparat menembak → enam mahasiswa tewas	pro mahasiswa
III.(d).4	Korban jiwa mulai berjatuhan	terjadi aksi unjuk rasa dan keprihatinan mahasiswa	aksi unjuk rasa dan keprihatinan → korban jiwa	pro pemerintah
III.(d).5	Gedung MPR/DPR mulai tengah malam (23/5) dikosongkan dari para demonstran	Gedung MPR/DPR sejak Senin lalu diduduki mahasiswa dari berbagai kampus	gedung MPR/DPR diduduki mahasiswa → gedung MPR/DPR mulai tengah malam dikosongkan dari para demonstran	pro pemerintah
III.(d).6	para mahasiswa menolak permintaan petugas keamanan agar masuk ke areal kampus sekitar pukul 18.00 dari jalan raya	terjadi bentrokan mahasiswa dengan petugas keamanan di Universitas Trisakti	mahasiswa di jalan raya → mahasiswa menolak masuk kampus → bentrok antara mahasiswa dan petugas	pro pemerintah
III.(d).7	korban berjatuhan di kedua belah pihak	<ul style="list-style-type: none"> • terjadi gelombang aksi keprihatinan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia pada hari Kamis (7/5) • terjadi bentrokan mahasiswa dan aparat keamanan 	aksi keprihatinan → bentrokan dengan aparat → korban di kedua belah pihak	netral

III.(d).8	penyebab luka lima mahasiswa karena tembakan peluru karet	sedikitnya lima mahasiswa di medan dan Jambi menderita luka	lima mahasiswa terkena tembakan → lima mahasiswa terluka	pro mahasiswa
III.(d).9	kemarin wilayah Lubuk Pakam, Perbaungan, dan Galang turut diguncang amuk massa	adanya keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif listrik	kenaikan harga BBM dan tarif listrik → amuk massa di beberapa daerah	pro mahasiswa
III.(d).10	penyulut kerusuhan karena kehadiran segerombolan massa yang diketahui datang dari luar kota pinggiran Medan	<ul style="list-style-type: none"> • terjadinya aksi-aksi keprihatinan • kerusuhan 	aksi keprihatinan → ada segerombolan massa → kerusuhan	pro pemerintah
III.(d).11	berondongan peluru itu diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol	keenam mahasiswa tertembak sewaktu berada di dalam kampus	mahasiswa berada di dalam kampus → aparat yang di jalan layang Grogol menembak → keenam mahasiswa tertembak	pro mahasiswa
III.(d).12	<ul style="list-style-type: none"> • mahasiswa bentrok dengan petugas 	<ul style="list-style-type: none"> • enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas Selasa (12/5) petang • mimbar bebas dan aksi duduk yang dilakukan ratusan mahasiswa di Jalan S. Parman 	mimbar bebas dan aksi duduk mahasiswa → mahasiswa bentrok dengan petugas → enam mahasiswa tewas	pro mahasiswa
III.(d).13	aksi pembebasan Gedung MPR/DPR itu berlangsung damai	Pada peristiwa 27 Juli 1996 pembebasan Gedung PDI berlangsung keras dan berdarah, bahkan banyak orang hilang	gedung PDI → pembebasan dengan cara kekerasan → orang hilang → Gedung MPR/DPR → pembebasan dengan cara damai	pro pemerintah
III.(d).14	Jendral Besar TNI (Purn) Soeharto, Kamis (21/5) kemarin di Istana Merdeka, Jakarta memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI	Jendral Besar TNI (Purn) Soeharto Presiden RI dikenal akrab dengan panggilan Pak Harto	Jendral Soeharto Presiden RI → mengundurkan diri	pro pemerintah
III.(d).15	petugas bersikap kasar dalam melakukan evakuasi	terjadi evakuasi mahasiswa dari gedung DPR/MPR oleh petugas	evakuasi mahasiswa → sikap kasar petugas	pro mahasiswa
III.(d).16	aparat menggunakan	pembersihan gedung	pembersihan	pro pemerintah

	cara yang persuasif dalam pembersihan gedung DPR/MPR dari mahasiswa	DPR/MPR oleh petugas dari mahasiswa	Gedung MPR/DPR → petugas bertindak persuasif	
III.(d).17	Pembersihan gedung DPR/MPR dilakukan dengan damai	Koopsjaya bersihkan gedung DPR/MPR	Koopsjaya bersihkan gedung MPR/DPR → pembersihan secara damai	pro pemerintah
III.(d).18	Terhitung mulai pukul 09.00 WIB, Kamis, 21 Mei 1998, Haji Muhammad Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI	Haji Muhammad Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia	H.M Soeharto Presiden RI → mengundurkan diri	pro pemerintah
III.(d).19	Pemuatan gambar Presiden Soeharto dinilai sebagai pelecehan dan penghinaan, serta melanggar kode etik jurnalistik	Pemuatan gambar Presiden Soeharto dalam halaman muka majalah D&R	pemuatan gambar → pelecehan dan penghinaan, serta pelanggaran kode etik	pro pemerintah
III.(d).20	Margiono dituduh melanggar Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Kepala Negara	Penurunan gambar sampul majalah D&R oleh Margiono	penurunan gambar sampul → pelanggaran Pasal 137 KUHP	pro pemerintah
III.(d).21	tim Kejaksaan Agung telah memeriksa Pemred dan Pelaksana Harian majalah D&R	pemeriksaan terhadap Margiono	pemeriksaan terhadap Pemred dan Pelaksana harian → pemeriksanan Margiono	netral
III.(d).22	tim Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah saksi ahli	pemeriksaan terhadap Margiono	pemeriksaan saksi ahli → pemeriksanan Margiono	netral
III.(d).23	Gubernur Riau, Soeripto, sangat menyesalkan aksi perusakan itu	mahasiswa melakukan aksi perusakan di halaman kantor Gubernur Riau	aksi perusakan → gubernur Riau menyesalkan	pro pemerintah
III.(d).24	terjadi eksodus warga keturunan	Situasi destruktif dan berbau rasial terjadi di Sumut	situasi destruktif dan berbau rasial → eksodus warga keturunan	netral
III.(d).25	Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol. Dadang tewas	<ul style="list-style-type: none"> • Para mahasiswa berunjuk rasa di kampus Universitas Juanda, Bogor • Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol. Dadang dipukuli puluhan mahasiswa 	unjuk rasa → pemukulan → Letda Pol. Dadang tewas	pro pemerintah

III.(d).26	Pasi Intel Kodim 0621 Bogor, Kapten Ali juga terluka dan dirawat di rumah sakit.	Kasat Intel Polres Bogor, Letda Pol. Dadang tewas	Letda Dadang tewas → Pasi Intel Kodim Kapten Ali terluka	pro pemerintah
III.(d).27	Aksi mahasiswa di Bogor, Sabtu (9/5) menewaskan Letnan Dua (Pol) Dadang Rusmana, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor.	Adanya aksi mahasiswa di bogor	aksi mahasiswa di bogor → Letda Pol Dadang tewas	pro pemerintah
III.(d).28	Kapten Ali, Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer Bogor juga menjadi korban pemukulan	Aksi pemukulan oleh mahasiswa di Bogor	aksi pemukulan oleh mahasiswa bogor → Kapten Ali menjadi korban pemukulan	pro pemerintah
III.(d).29	sekitar pukul 23.30 WIB, evakuasi dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen TNI Silalahi	Evakuasi mahasiswa (di gedung DPR/MPR)	evakuasi mahasiswa → pukul 23.30 evakuasi dipimpin oleh Kasdam Jaya	pro pemerintah
III.(d).30	Koopsjaya membersihkan gedung DPR/MPR pada hari Sabtu	Mahasiswa masih bertahan di gedung DPR/MPR	mahasiswa digedung DPR/MPR → Koopsjaya membersihkan	pro pemerintah
III.(d).31	Gedung DPR/MPR dalam proses pengosongan 1000 pasukan gabungan	Pendudukan Gedung DPR/MPR sejak hari Senin	Pendudukan Gedung DPR/MPR → proses pengosongan	pro pemerintah

Lampiran 17: Hasil Analisis Manifestasi Perspektif Pemberitaan
dalam Modalitas

Data	Kata Modal	Jenis Modalitas	Inferensi	Perspektif
III.(c).1	sangat	kebenaran	kata <i>sangat</i> mengukuhkan keyakinan wartawan pada kebenaran dari suatu proposisi tentang penghinaan terhadap kepala negara	pro pemerintah
III.(c).2	dapat	izin	kata <i>dapat</i> memperlihatkan interpretasi wartawan terhadap tindakan DK PWI atas peringatan keras pemerintah pada majalah D&R	netral
III.(c).3	sudah semakin	kebenaran	frasa <i>sudah semakin</i> memperlihatkan pendapat wartawan pada kebenaran dari suatu proposisi tentang keberingasan demonstrasi mahasiswa	pro pemerintah
III.(c).4	mulai	kebenaran	kata <i>mulai</i> mengukuhkan pendapat wartawan pada kebenaran dari suatu proposisi tentang aksi mahasiswa yang melenceng	pro pemerintah
III.(c).5	sudah	kebenaran	kata <i>sudah</i> mengukuhkan pendapat wartawan pada kebenaran dari suatu proposisi tentang aksi mahasiswa yang menjurus pada pelanggaran hukum	pro pemerintah
III.(c).6	tidak, hanya	kebenaran	kata <i>tidak</i> dan <i>hanya</i> mengukuhkan pendapat wartawan pada kebenaran dari suatu proposisi tentang aksi penanganan demo mahasiswa oleh petugas	pro pemerintah
III.(c).7	pasti	kebenaran	kata <i>pasti</i> mengukuhkan suatu komitmen pada kebenaran dari suatu proposisi tentang aksi mahasiswa yang ditanggapi pihak-pihak tertentu	pro pemerintah
III.(c).8	makin	kebenaran	kata <i>makin</i> mengukuhkan pendapat wartawan terhadap keadaan citra mahasiswa yang terdapat dalam proposisi	pro pemerintah
III.(c).9	masih, tidak	kebenaran	kata <i>masih</i> dan <i>tidak</i> memperlihatkan suatu keyakinan wartawan pada kebenaran dari	pro mahasiswa

			suatu proposisi tentang aksi mahasiswa	
III.(c).10	tidak, tidak	kebenaran	kata <i>tidak</i> memperlihatkan suatu keyakinan wartawan pada kebenaran dari suatu proposisi tentang pemberitaan media massa	pro pemerintah
III.(c).11	seringkali, tidak	kebenaran	kata <i>seringkali</i> dan <i>tidak</i> memperlihatkan suatu keyakinan wartawan pada kebenaran dari suatu proposisi tentang pemberitaan pers yang keliru	pro pemerintah
III.(c).12	hanya	kebenaran	modalitas <i>hanya</i> menunjukkan keyakinan wartawan pada kebenaran proposisi bahwa polisi melakukan tugas sesuai peraturan dan polisi benar tidak menggunakan peluru timah	pro pemerintah
III.(c).13	akan	keinginan	<ul style="list-style-type: none"> modalitas <i>akan</i> memperlihatkan interpretasi wartawan bahwa partisipan Univ. Trisakti menginginkan mengajukan protes terhadap kepolisian Interpretasi ini menguntungkan mahasiswa 	pro mahasiswa
III.(c).14	akan	keinginan	<ul style="list-style-type: none"> modalitas <i>akan</i> memperlihatkan interpretasi wartawan bahwa partisipan Komnas Ham menginginkan untuk menemui Pangab Interpretasi ini netral tidak memihak 	netral
III.(c).15	mulai	kebenaran	modalitas <i>mulai</i> menunjukkan kebenaran proposisi menurut wartawan bahwa unjuk rasa mahasiswa itu berbahaya	pro pemerintah
III.(c).16	tidak bisa	izin	modalitas <i>tidak bisa</i> mengindikasikan persetujuan wartawan terhadap proposisi bahwa sidang istimewa MPR hanya mungkin diajukan oleh anggota DPR, bukan pihak lain termasuk mahasiswa. Implikasi dari proposisi ini lebih sebagai upaya untuk menekan dan memperingatkan mahasiswa	pro pemerintah
III.(c).17	ingin	keinginan	<ul style="list-style-type: none"> modalitas <i>ingin</i> memperlihatkan interpretasi wartawan bahwa partisipan <i>mahasiswa</i> menginginkan menyampaikan aspirasi melalui prosedur yang 	pro pemerintah

			<p>benar (melalui DPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian aspirasi seperti ini sesuai yang diinginkan pihak pemerintah 	
III.(c).18	tidak mau	izin	<ul style="list-style-type: none"> • modalitas <i>tidak mau</i> mengindikasikan persepsi wartawan terhadap proposisi bahwa dialog antara mahasiswa dengan ABRI tidak terjadi karena pihak mahasiswa yang menolak, dan bukan pihak ABRI 	pro pemerintah
III.(c).19	seharusnya	keharusan	<ul style="list-style-type: none"> • dengan modalitas <i>seharusnya</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh partisipan mahasiswa dalam proposisi, yakni <i>melakukan dua tri dharma perguruan tinggi</i>. • Implisit dalam proposisi ini adalah mahasiswa lebih baik jangan berdemo 	pro pemerintah
III.(c).20	tidak perlu	keharusan	<p>dengan modalitas <i>tidak perlu</i> wartawan menyatakan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh partisipan mahasiswa dalam proposisi, yakni <i>menolak berdialog dengan ABRI</i></p>	pro pemerintah
III.(c).21	sudah pasti akan	kebenaran	<p>dengan modalitas <i>sudah pasti akan</i> wartawan mengindikasikan kebenaran proposisi, yakni <i>adanya pihak lain yang menyusup dalam aksi mahasiswa</i></p>	pro pemerintah
III.(c).22	hanya boleh	izin	<p>modalitas <i>hanya boleh</i> menunjukkan bahwa wartawan mengindikasikan izin pada mahasiswa melakukan kegiatan mahasiswa terbatas di kampus dan tidak memberikan izin mahasiswa melakukan kegiatan di luar kampus</p>	pro pemerintah
III.(c).23	haruslah	keharusan	<p>dengan modalitas <i>haruslah</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh partisipan ABRI dalam proposisi <i>memperlopori reformasi</i></p>	pro pemerintah
III.(c).24	harus segera	keharusan	<p>dengan modalitas <i>harus segera</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh partisipan dalam proposisi</p>	netral

			<i>persoalan orang hilang</i> , yakni melakukan klarifikasi; implisit dalam konteks teks, saran jangan saling menuduh	
III.(c).25	belum yakin betul	kebenaran	modalitas <i>belum yakin betul</i> menunjukkan indikasi wartawan pada kesangsian partisipan terhadap kebenaran isu penculikan mahasiswa.	Netral
III.(c).26	tidak perlu	keharusan	dengan modalitas <i>tidak perlu</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh partisipan ABRI dalam proposisi, yakni <i>mempertopori reformasi</i>	pro pemerintah
III.(c).27	harus lebih	keharusan	dengan modalitas <i>harus lebih</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh partisipan <i>mahasiswa dalam melakukan aksinya</i>	netral
III.(c).28	sudah tidak	kebenaran	modalitas <i>sudah tidak</i> menunjukkan komitmen wartawan pada kebenaran proposisi <i>mahasiswa tidak bersahabat dengan polisi</i>	pro pemerintah
III.(c).29	tak boleh	izin	modalitas <i>tak boleh</i> menunjukkan bahwa wartawan mengindikasikan persetujuan adanya pelarangan terbit terhadap majalah D&R	pro pemerintah
III.(c).30	sebaiknya	keharusan	<ul style="list-style-type: none"> dengan modalitas <i>sebaiknya</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh partisipan <i>mahasiswa dalam melakukan unjuk rasa</i> Implisit dalam proposisi ini ketidaksetujuan aksi di luar kampus 	pro pemerintah
III.(c).31	bisa	izin	modalitas <i>bisa</i> menunjukkan bahwa wartawan mengindikasikan adanya izin/persetujuan berdemo di kampus dan pelarangan berdemo di luar kampus bagi mahasiswa	pro pemerintah
III.(c).32	belum	kebenaran	dengan modalitas <i>belum</i> wartawan mengindikasikan kebenaran proposisi, bahwa <i>Kodim tidak ada ditempat</i> . Berdasarkan konteks teks ini berarti ketidaksediaan untuk menjawab atau ditemui	pro mahasiswa

III.(c).33	boleh	izin	modalitas <i>bisa</i> menunjukkan bahwa wartawan mengindikasikan adanya izin pulang bagi dua mahasiswa	netral
III.(c).34	tidak mau	keinginan	<ul style="list-style-type: none"> • modalitas <i>tidak mau</i> memperlihatkan penilaian wartawan atas keengganan mahasiswa membubarkan diri • Implisit dalam hal ini mahasiswa menjadi pemicu kerusuhan 	Pro pemerintah
III.(c).35	harus	keharusan	dengan modalitas <i>harus</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh partisipan <i>birokrat/pihak pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi</i>	pro mahasiswa
III.(c).36	tidak dapat, harus	izin, keharusan	<ul style="list-style-type: none"> • modalitas <i>tidak dapat</i> menunjukkan bahwa wartawan mengindikasikan persetujuan adanya pelarangan Pemred Majalah D&R bertugas • dengan modalitas <i>harus</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap Pemred D&R, yakni diganti 	pro pemerintah
III.©.37	sudah seharusnya	keharusan	dengan modalitas <i>sudah seharusnya</i> wartawan menyatakan apa yang seharusnya memang dilakukan oleh partisipan dalam proposisi, yakni <i>menper</i> . Modalitas ini memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah	pro pemerintah
III.(c).38	tak boleh	izin	modalitas <i>tidak boleh</i> menunjukkan bahwa wartawan mengindikasikan perlu adanya pelarangan Pemred Majalah D&R bertugas	pro pemerintah
III.(c).39	sudah semakin	kebenaran	dengan modalitas <i>sudah semakin</i> wartawan menyatakan persetujuannya atas kebenaran proposisi bahwa <i>aksi mahasiswa beringas</i>	pro pemerintah
III.(c).40	mulai, tidak	kebenaran	modalitas <i>mulai</i> dan <i>tidak</i> menunjukkan komitmen wartawan pada kebenaran proposisi <i>aksi mahasiswa melenceng</i> dan <i>aksi mahasiswa ditunggangi pihak di luar kampus</i>	pro pemerintah

Lampiran 18: Hasil Analisis Manifestasi Perspektif Pemberitaan dalam Struktur Nominalisasi

Data	Nominalisasi Verba Pengisi P	Akibat Sintaktis	Perspektif
III.(e).1	ditangkap → penangkapan	<ul style="list-style-type: none"> • adanya pengalihan fokus perhatian dari partisipan ke proses tindakan • ada partisipan yang diabaikan dan cenderung tidak muncul secara formal karena sudah tersebut dalam konteks sebelumnya 	netral
III.(e).2	memberitakan → pemberitaan	<ul style="list-style-type: none"> • adanya pengalihan fokus perhatian dari partisipan ke proses tindakan • partisipan (tujuan) diabaikan dan cenderung tidak muncul secara formal karena sudah tersebut dalam konteks sebelumnya • keterangan yang terkait dengan proses tindakan menentukan perspektif pemberitaan 	pro pemerintah
III.(e).3	diperiksa/memeriksa → pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • adanya pengalihan fokus perhatian dari partisipan ke proses tindakan • ada partisipan (pelaku) yang diabaikan dan cenderung tidak muncul secara formal karena sudah tersebut dalam konteks sebelumnya 	netral
III.(e).4	memperingatkan → peringatan	<ul style="list-style-type: none"> • adanya pengalihan fokus perhatian dari partisipan ke proses tindakan • partisipan (tujuan) diabaikan dan cenderung tidak muncul secara formal karena sudah tersebut dalam konteks sebelumnya 	pro pemerintah

RIWAYAT HIDUP

B. Widharyanto adalah dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ia dilahirkan pada tanggal 2 Juni 1967 di Sleman, Yogyakarta. Ia adalah putera ke sembilan dari Bapak dan Ibu Dirjowidharsono.

Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 1977, SMP pada tahun 1980, dan SMA pada tahun 1983. Pada tahun ajaran 1984, ia melanjutkan pendidikannya di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Strata 1 ini diselesaikan pada tahun 1990.

Setelah menyelesaikan Strata 1, pada tahun 1991 ia mendapat beasiswa ikatan dinas dari IKIP Sanata Dharma Yogyakarta untuk menempuh Pendidikan Strata 2 di Pascasarjana IKIP Malang. Program Strata 2 ini dapat diselesaikan pada tahun ajaran 1993/1994. Kemudian pada tahun yang sama, ia diangkat menjadi dosen tetap pada FKIP, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pada tahun 1996, ia melanjutkan Pendidikan Strata 3 di Program Studi Pendidikan Bahasa, Pascasarjana IKIP Malang/Universitas Negeri Malang dengan biaya TMPD. Pendidikan Strata 3 ini diselesaikan pada bulan September tahun 2000.

Ia menikah dengan Dra. Ratna Dewi Susanti pada tahun 1995. Pada saat ini, ia telah dikaruniai satu putri yang diberi nama Agatha Ratna Puspitasari.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Surabaya 6, Malang 65145 • Telp. (0341) 551-312 psw. 315
Telp./Fax.(0341) 551334 (langsung)
Website: <http://www.malang.ac.id> • E-mail: pps@malang.ac.id

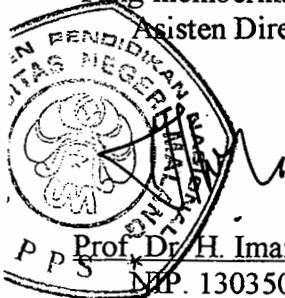
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Imam Syafi'ie
Jabatan : Asisten Direktur 1
PPS Universitas Negeri Malang

Menyatakan menandatangani lembar persetujuan dan pengesahan untuk Pembimbing 1 disertasi ini atas nama Prof. Dr. Soeseno Kartomihardjo. Penandatanganan ini dilakukan mengingat Prof. Dr. Soeseno Kartomihardjo, selaku Pembimbing 1 untuk disertasi saudara B. Widharyanto, telah meninggal dunia pada bulan Desember 2000 dan ujian disertasi ini telah dilakukan sebelumnya, pada tanggal 25 September 2000.

Yang memberikan keterangan,
Asisten Direktur 1



Prof. Dr. H. Imam Syafi'ie
NIP. 130350774



KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN TESIS/DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. B. Widharyanto, M.Pd.
NIM/Angkatan : .96656648094/1996
Program Studi : .Pendidikan Bahasa Indonesia

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- (1) -tesis/disertasi saya yang segera diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan barang jiplakan).
- (2) apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan tesis/disertasi ini hasil jiplakan, maka saya akan menanggung risiko diperkarakan oleh PPS Universitas Negeri Malang.

Malang , .9..September..2000.....

Mengetahui :
Pembimbing I,

Prof. Dr. Soeseno Kartomihardjo

(Nama dan tanda tangan)



struktur,

Dr. Frans Mataheru

NIP. 130220549

Yang menerangkan
Mahasiswa ybs.

Drs. B. Widharyanto, M.Pd.

(Nama dan tanda tangan)